

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM TERBATAS III ("PUT III")
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

PROSPEKTUS

Permohonan Pencatatan Saham Tambahan yang Berasal dari Penawaran Umum Terbatas III dengan HMETD	: 23 November 2010	Tanggal Distribusi HMETD	: 9 Desember 2010
Tanggal Pernyataan Pendaftaran Penawaran HMETD Menjadi Efektif	: 24 November 2010	Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	: 10 Desember 2010
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	: 25 November 2010	Tanggal Awal Perdagangan HMETD	: 10 Desember 2010
Tanggal Laporan Hasil RUPSLB Mengenai Persetujuan Penawaran HMETD		Tanggal Akhir Perdagangan HMETD	: 16 Desember 2010
Kepada BEI	: 26 November 2010	Tanggal Awal Pelaksanaan HMETD	: 10 Desember 2010
Tanggal Pengumuman Hasil Keputusan RUPS	: 29 November 2010	Tanggal Akhir Pelaksanaan HMETD	: 16 Desember 2010
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right)		Tanggal Akhir Pembayaran yang Berasal dari Pesanan Efek Tambahan	: 20 Desember 2010
- Pasar Reguler	: 2 Desember 2010	Tanggal Awal Penyerahan Saham yang Berasal dari HMETD	: 14 Desember 2010
- Pasar Negosiasi dan Tunai	: 8 Desember 2010	Tanggal Akhir Penyerahan Saham yang Berasal dari HMETD	: 20 Desember 2010
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)		Tanggal Penjatahan	: 21 Desember 2010
- Pasar Reguler	: 3 Desember 2010	Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pesanan yang Tidak Terpenuhi	: 23 Desember 2010
- Pasar Negosiasi dan Tunai	: 9 Desember 2010		
Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) Untuk Memperoleh HMETD	: 8 Desember 2010		

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. ("BNI" ATAU "PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Kegiatan Usaha

Bergerak Dalam Bidang Usaha Perbankan

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung BNI

Jl. Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: (021) 572 8387, 572 8037, 251 1946 (hunting)

Faksimili: (021) 572 8295, 572 8053

e-mail: bni@bni.co.id, investor.relations@bni.co.id

<http://www.bni.co.id>

Kantor Cabang

1.112 kantor cabang dan kantor cabang pembantu (termasuk 58 kantor cabang dan kantor cabang pembantu Syariah yang dimiliki Anak Perusahaan), 51 Sentra Kredit Kecil, 20 Sentra Kredit Menengah, 12 Sentra Kredit Konsumen, 24 sentra BNI Emerald dan 4.072 mesin ATM yang tersebar di seluruh Indonesia (per tanggal 30 September 2010)

**PENAWARAN UMUM TERBATAS III ("PUT III")
DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Sebanyak-banyaknya 3.374.716.060 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu enam puluh) Saham Biasa Atas Nama Seri C baru dengan nilai nominal Rp375,- (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Desember 2010 pukul 16.00 WIB, di mana setiap pemegang 500.000 (lima ratus ribu) saham lama (Saham Seri C) memiliki 110.473 (seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru Seri C dalam Perseroan dengan Harga Pelaksanaan Rp3.100,- (tiga ribu seratus Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT III dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham dari PUT III memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Jumlah PUT III ini adalah sebesar-besarnya Rp10.461.619.786.000 (sepuluh triliun empat ratus enam puluh satu miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).

Jika saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Disamping itu, setelah alokasi pemesanan saham tambahan, bilamana masih terdapat sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham dalam PUT III ini, PT Bahana Securities bertindak sebagai pembeli siaga yang bukan merupakan porsi Negara Republik Indonesia wajib membeli sebanyak-banyaknya sebesar 902.508.430 (sembilan ratus dua juta lima ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh) Saham Biasa Atas Nama Seri C dengan memperhatikan bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh publik setelah pelaksanaan PUT III sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan saham yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebesar 60% (enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT III selesai dilaksanakan.

Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham BNI tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT III yaitu sejumlah 2.472.207.630 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh) HMETD. Berdasarkan Perjanjian Pembelian tanggal 11 November 2010 yang dibuat di bawah tangan antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam kapasitasnya sebagai wakil Negara Republik Indonesia dengan PT Bahana Securities, HMETD milik Negara Republik Indonesia tersebut akan dijual kepada PT Bahana Securities dan selanjutnya PT Bahana Securities akan menawarkan dan menjual saham hasil pelaksanaan HMETD yang dibeli dari HMETD milik Negara Republik Indonesia, segera setelah saham tersebut diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Datindo Entrycor, kepada para investor asing maupun domestik melalui penawaran terbatas yang akan dilaksanakan melalui transaksi di BEI pada hari yang sama saat pelaksanaan HMETD milik Negara Republik Indonesia oleh PT Bahana Securities.

PUT III INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) BNI YANG AKAN DIADAKAN PADA TANGGAL 25 NOVEMBER 2010. DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI PUT III, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH BNI DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT III INI, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK BNI SERTA LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT III INI.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 10 DESEMBER 2010 SAMPAI DENGAN 16 DESEMBER 2010. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 10 DESEMBER 2010. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 16 DESEMBER 2010 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT III INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL YAITU MAKSIMUM SEBESAR 18,10%.

PEMBELI SIAGA



PT Bahana Securities (Terafiliasi)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI BNI ADALAH RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KREDIT. HAL INI DISEBABKAN OLEH KENYATAAN BAHWA SEBAGIAN BESAR ASET PRODUKTIF BNI MERUPAKAN KREDIT YANG DIBERIKAN. RISIKO USAHA BNI SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

BNI TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2010

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “BNI atau Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “Penawaran Umum Terbatas III” atau “PUT III”) kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam dan LK”) di Jakarta dengan surat No. DIR/403 pada tanggal 25 Oktober 2010 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan No.IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut “UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya.

BNI, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Terbatas III ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BNI baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, kecuali PT Bahana Securities yang bertindak sebagai pembeli siaga.

Apabila saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham BNI atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lain yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya.

Sesuai dengan Peraturan No.IX.D.1 Lampiran Keputusan BAPEPAM No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik BNI dan akan dijual oleh BNI serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening BNI.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1999 (“PP No.29”) tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) diatur antara lain:

1. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
2. Pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
3. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
4. Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

dan sesuai dengan pengumuman PT Bursa Efek Jakarta No.Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 (“Pengumuman Bursa Efek”) perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh pemodal asing akan dibatasi sebesar 99,0% (sembilan puluh sembilan persen) sampai dengan dipenuhinya Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dalam PP No.29 tersebut di atas. Adapun saham sejumlah 1,0% (satu persen) yang tidak dicatatkan adalah milik Negara Republik Indonesia, dimana dalam jumlah tersebut termasuk 1 Saham Seri A Dwiwarna.

BNI telah memperoleh izin untuk melakukan PUT III sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.PW01/7425/DPRRI/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 dan No.PW.01/8149/DPRRI/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang mensyaratkan bahwa porsi kepemilikan Negara Republik Indonesia setelah pelaksanaan PUT III adalah sebesar 60% (enam puluh persen), serta penetapan dari Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.74 Tahun 2010 tanggal 20 November 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk.

PENAWARAN UMUM TERBATAS III INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

BNI TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	ii
Definisi Dan Singkatan.....	iii
Ringkasan.....	viii
I. Penawaran Umum Terbatas III.....	1
II. Rencana Penggunaan Dana Hasil PUT III.....	6
III. Pernyataan Hutang.....	7
IV. Analisis Dan Pembahasan Oleh Manajemen.....	13
V. Risiko Usaha.....	55
VI. Kejadian dan Transaksi Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen.....	67
VII. Keterangan Tentang Perseroan dan Anak Perusahaan.....	68
1. Riwayat Singkat BNI.....	68
2. Perkembangan Kepemilikan Saham BNI.....	70
3. Struktur Organisasi BNI.....	73
4. Pengurusan dan Pengawasan.....	74
5. Sumber Daya Manusia.....	82
6. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan BNI dengan Anak Perusahaan.....	86
7. Aset Tetap.....	87
8. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan yang Signifikan dan Penyertaan BNI.....	88
9. Transaksi dan Saldo BNI dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa.....	97
10. Transaksi dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa lainnya.....	98
11. Ikatan dan Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.....	103
12. Perkara-perkara Yang Sedang Dihadapi dan Yang Berhubungan Dengan BNI.....	114
VIII. Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan.....	116
1. Umum.....	116
2. Sejarah, Rekapitalisasi dan Restrukturisasi.....	116
3. Program Transformasi.....	117
4. Keunggulan Kompetitif BNI.....	117
5. Strategi Usaha.....	119
6. Kegiatan Usaha.....	121
7. Bisnis Perbankan.....	126
8. Perbankan Komersial.....	128
9. <i>Consumer and Retail Banking</i>	131
10. Perbankan Internasional.....	138
11. Bisnis Syariah.....	139
12. Produk-Produk Simpanan.....	141
13. Produk dan Jasa Lainnya.....	142
14. Jaringan Distribusi.....	143
15. Persaingan Usaha.....	147
16. Teknologi Informasi.....	148
17. Manajemen Risiko dan Kepatuhan.....	150

18.	Hak Kekayaan Intelektual.....	153
19.	Asuransi.....	153
20.	Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance / GCG</i>).....	154
21.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility / CSR</i>).....	156
22.	Prospek Usaha.....	160
IX.	Industri Perbankan Indonesia.....	162
X.	Ikhtisar Data Keuangan Penting.....	169
XI.	Ekuitas.....	174
XII.	Kebijakan Dividen.....	176
XIII.	Perpajakan.....	177
XIV.	Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal.....	179
XV.	Laporan Keuangan Konsolidasian Beserta Laporan Auditor Independen.....	181
XVI.	Keterangan Tentang Pembeli Siaga.....	337
XVII.	Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham.....	340
XVIII.	Keterangan Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).....	346
XIX.	Penyebarluasan Prospektus Dan Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).....	348
XX.	Informasi Tambahan.....	349

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	<p>Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Aset Produktif	<p>Berarti terdiri dari Penempatan Pada Bank Lain dan Bank Indonesia dan Giro Pada Bank Lain, Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah, Wesel dan tagihan lainnya, Surat berharga, Tagihan Derivatif, Kredit Yang Diberikan, Tagihan Akseptasi dan Penyertaan Saham.</p>
ALCO	<p>Berarti singkatan dari <i>Assets and Liabilities Committee</i>, yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aset dan pasiva, yang diketuai oleh Direktur Utama dan bertugas menyusun strategi pengelolaan aset dan pasiva.</p>
Anak Perusahaan	<p>Berarti perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dibawah ini, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut; danyang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
Anggota Bursa	<p>Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.</p>
API	<p>Berarti singkatan dari <i>Arsitektur Perbankan Indonesia</i>.</p>
AS	<p>Berarti singkatan dari <i>Amerika Serikat</i>.</p>
ATM	<p>Berarti singkatan dari <i>Anjungan Tunai Mandiri</i>, yaitu mesin elektronik yang memudahkan nasabah dalam penarikan uang tunai, pembayaran tagihan, pengecekan saldo dan pemindahbukuan.</p>
ATMR	<p>Berarti singkatan dari <i>Aktiva tertimbang menurut risiko</i>, yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung CAR / <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).</p>
BAE	<p>Berarti <i>Biro Administrasi Efek</i>, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh BNI yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.</p>
Bank Kustodian	<p>Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.</p>

Bapepam	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPM.
Bapepam dan LK	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
BEI	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM atau penggantinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BEJ	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Jakarta.
BES	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Surabaya.
BI	Berarti singkatan dari Bank Indonesia.
BLBI	Berarti singkatan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
BMPK	Berarti singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grup sesuai dengan ketentuan BI.
BNI atau Perseroan	Berarti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
BNRI	Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
BPPN	Berarti singkatan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional yaitu badan khusus yang didirikan dalam rangka penyehatan perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.
BUMN	Berarti singkatan dari Badan Usaha Milik Negara.
BUMD	Berarti singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah.
CAR	Berarti singkatan dari " <i>Capital Adequacy Ratio</i> ", yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
<i>Coverage Ratio</i>	Berarti ratio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.
CSR	Berarti singkatan dari <i>Corporate Social Responsibility</i> .
DPK	Berarti singkatan dari Dana Pihak Ketiga.
DPS	Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham.
Daftar Pemegang Saham	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
EMSOP	Berarti singkatan dari <i>Employee and Management Stock Option Plan</i> .
<i>Four Eyes Principle</i>	Berarti prinsip pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan yang melibatkan dua orang dari unit yang berbeda.

FKP	Berarti singkatan dari Formulir Konfirmasi Penjatahan.
FPPS	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka Penawaran Umum atas kepemilikan saham Negara Republik Indonesia di BNI.
FPPS Tambahan	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) pemegang saham BNI dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III.
GCG	Berarti singkatan dari <i>Good Corporate Governance</i> .
GWM	Berarti singkatan dari Giro Wajib Minimum.
Harga Pelaksanaan	Berarti harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham BNI dalam PUT III untuk melaksanakan haknya menjadi 1 (satu) saham baru, yaitu Rp3.100,- (tiga ribu seratus Rupiah).
Hari Bank	Berarti hari dimana Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	Berarti hari dimana bursa efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
<i>Hedging</i>	Berarti suatu usaha untuk meminimalkan risiko atas pergerakan nilai kurs valuta asing dan atau suku bunga yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.
HMETD	Berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yaitu suatu hak yang dapat dialihkan yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
<i>Hub and Spoke</i>	Berarti setiap cabang hub memberikan dukungan jasa pelayanan <i>front-office customer service</i> kepada nasabah dan dukungan <i>back-office</i> kepada cabang hub dan cabang spoke yang berhubungan. Cabang spoke hanya memiliki <i>front-line customer service</i> , namun nasabah cabang-cabang ini dapat memperoleh produk dan layanan yang sama dengan cabang hub BNI.
Kontrak Manajemen	Berarti kontrak yang ditandatangani antara Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Direksi serta Dewan Komisaris BNI dalam rangka program rekapitalisasi perbankan.
KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
L/C	Berarti singkatan dari <i>Letter of Credit</i> , yaitu surat yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya untuk membayar kepada pihak ketiga (<i>beneficiary</i>) sepanjang dokumen yang dipersyaratkan dipenuhi.

LDR	Berarti singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio jumlah Kredit Yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga berdasarkan formula yang ditetapkan Bank Indonesia.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Modal Inti (Tier 1)	Berarti modal bank yang terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, agio saham, cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh bank setelah diperhitungkan pajak sesuai ketentuan SK Direksi BI No.26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993.
Modal Pelengkap (Tier 2)	Berarti modal bank yang terdiri dari modal pinjaman, pinjaman subordinasi dan cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba sebagaimana diuraikan dalam SK Direksi BI No.26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 juncto SK Direksi BI No.31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.
NIM	Berarti singkatan dari <i>Net Interest Margin</i> , yaitu Marjin Pendapatan Bunga bersih yang merupakan Pendapatan Bunga bersih dibagi rata-rata Aset Produktif Berbunga.
NPL	Berarti singkatan dari <i>Non Performing Loan</i> , yang berarti kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
Obligasi Pemerintah	Berarti obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
PDN	Berarti Posisi Devisa Netto.
Penawaran Umum Terbatas III atau PUT III	Berarti Penawaran Umum Terbatas sebanyak-banyaknya 3.374.716.060 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu enam puluh) Saham Biasa Atas Nama Seri C baru dengan nilai nominal Rp375,- (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
Perseroan	Berarti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Posisi Devisa Neto	Berarti <i>net open position</i> adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari: (i) selisih bersih antara aset dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan (ii) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing; yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.
PKAP	Berarti singkatan dari Penyisihan Kerugian Aset Produktif.
QTQ	Berarti <i>quarter to quarter</i> .
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.
Rekening PUT III	Berarti rekening yang dibuka atas nama Perseroan untuk menampung dana yang diterima dari investor.
RJP	Berarti singkatan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang BUMN.

ROAA	Berarti singkatan dari “ <i>Return on Average Assets</i> ” atau Imbal Hasil Rata-rata Aset yang merupakan perbandingan antara jumlah laba setelah pajak dalam kurun waktu 12 bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata aset dalam periode yang sama.
ROAE	Berarti singkatan dari “ <i>Return on Average Equity</i> ” atau Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas yang merupakan perbandingan antara jumlah laba setelah pajak dalam kurun waktu 12 bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.
RUPS	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
SBHMETD	Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
SBI	Berarti singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia, yaitu Surat Berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto.
SBU	Berarti singkatan dari <i>Strategic Business Unit</i> atau Unit Bisnis Strategis yaitu Unit yang aktivitas bisnisnya bertujuan memperoleh profit optimal bagi BNI. Unit ini beroperasi berdasarkan perhitungan optimalisasi pendapatan dan minimalisasi biaya.
Sentra Kredit Kecil	Berarti pusat pemrosesan permohonan kredit yang ditujukan kepada perusahaan skala kecil.
Sentra Kredit Konsumen	Berarti pusat pemrosesan permohonan kredit konsumen.
Sentra Kredit Menengah	Berarti pusat pemrosesan permohonan kredit yang ditujukan kepada perusahaan skala menengah.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran hasil pelaksanaan HMETD saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum yang harus disetor.
USD	Berarti Dolar Amerika Serikat.
UU Perbankan	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diundang-undangkan pada tanggal 10 Nopember 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 No.64, Tambahan No.3608/1995) dan peraturan pelaksanaannya.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No.4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
YOY	Berarti <i>year on year</i> .

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih terperinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha yang tercantum dalam Prospektus ini.

Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian BNI, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian.

Seluruh informasi keuangan yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk saldo dan jumlah, dibulatkan dalam jutaan atau miliaran Rupiah (dan untuk persentase dibulatkan dalam dua desimal), kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel atau paragraf-paragraf yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata disebabkan oleh pembulatan tersebut.

1. Umum

Perseroan didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1946 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1946, tanggal 5 Juli 1946 tentang Bank Negara Indonesia yang merupakan kelanjutan dari suatu yayasan dengan nama Badan Umum "Poesat Bank Indonesia" yang didirikan berdasarkan Akta No.14, tanggal 9 Oktober 1945, dibuat di hadapan Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, yang berfungsi sebagai bank sentral. Pada tahun 1955, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No.2 Tahun 1955, tanggal 4 Februari 1955, yang mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1946 fungsi Perseroan beralih menjadi bank umum dengan tugas utama yang diarahkan kepada pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam lapangan perdagangan impor dan ekspor. Sejak saat itu, Perseroan kemudian terus mengembangkan aktivitas pemberian pinjaman kepada berbagai sektor ekonomi.

Anggaran Dasar BNI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS BNI No.13, tanggal 12 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta ("Akta No.13/2010"), antara lain mengenai perubahan Pasal 11 ayat (24) dan (25); Pasal 14 ayat (9), (18), (26) dan (27); dan Pasal 27 ayat (3). Perubahan ini telah diterima pemberitaannya oleh Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BNI No. AHU-AH.01.10-13852, tanggal 7 Juni 2010, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042579.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 7 Juni 2010. Perubahan tersebut sedang dalam proses pengumuman di BNRI.

BNI menjalankan kegiatan usaha di bidang usaha perbankan. Bidang usaha tersebut termasuk dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar BNI.

Pada tanggal 30 September 2010 BNI memiliki 1.054 kantor cabang dan kantor cabang pembantu serta 58 kantor cabang dan kantor cabang pembantu Syariah melalui salah satu Anak Perusahaan, yaitu BNI Syariah, 51 Sentra Kredit Kecil, 20 Sentra Kredit Menengah, 12 Sentra Kredit Konsumen, 24 sentra BNI Emerald dan 4.072 mesin ATM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Per 30 September 2010, BNI mempunyai Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, yang terdiri dari 1 Bank komersil dan 4 perusahaan jasa keuangan. Perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh BNI, jenis usahanya serta kepemilikan BNI per tanggal 30 September 2010 adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan
BNI Remittance Ltd	Remittance antara Hong Kong dan Indonesia	1996	100,00%
PT BNI Multi Finance	Pembiayaan	1983	99,98%
PT BNI Securities	Fund Management dan Sekuritas	1995	99,85%
PT BNI Life Insurance	Asuransi Jiwa	1997	85,11%
PT Bank BNI Syariah	Perbankan Syariah Komersil	2010	99,90%

Komposisi Modal Saham BNI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) Setiap Saham dan Saham Biasa
Atas Nama Seri C Dengan Nilai Nominal Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	7.500	0,00
- Saham Seri B	289.341.866	2.170.063.995.000	0,84
- Saham Seri C	34.213.162.660	12.829.935.997.500	99,16
Jumlah Modal Dasar	34.502.504.527	15.000.000.000.000	100,00
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	7.500	0,00
- Saham Seri B			
Negara Republik Indonesia	217.006.399	1.627.547.992.500	1,42
Masyarakat	72.335.467	542.516.002.500	0,47
- Saham Seri C			
Negara Republik Indonesia	10.972.187.475	4.114.570.303.125	71,84
Masyarakat	4.012.411.168	1.504.654.188.000	26,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.273.940.510	7.789.288.493.625	100,00
C. Jumlah Saham Dalam Portepel	19.228.564.017	7.210.711.506.375	

2. Penawaran Umum Terbatas III

Direksi atas nama Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya 3.374.716.060 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu enam puluh) Saham Biasa Atas Nama Seri C baru dengan nilai nominal Rp375,- (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Desember 2010 pukul 16.00WIB, di mana setiap pemegang 500.000 (lima ratus ribu) saham lama (Saham Seri C) memiliki 110.473 (seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru Seri C dalam Perseroan dengan Harga Pelaksanaan Rp3.100,- (tiga ribu seratus Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT III dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham dari PUT III memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Jumlah PUT III ini adalah sebesar-besarnya Rp10.461.619.786.000 (sepuluh triliun empat ratus enam puluh satu miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar Bursa Efek Indonesia selama tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan 16 Desember 2010. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Desember 2010. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 16 Desember 2010 dengan keterangan bahwa hak yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham BNI tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT III yaitu sejumlah 2.472.207.630 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh) HMETD. Berdasarkan Perjanjian Pembelian tanggal 11 November 2010 yang dibuat di bawah tangan antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam kapasitasnya sebagai wakil Negara Republik Indonesia dengan PT Bahana Securities, HMETD milik Negara Republik Indonesia tersebut akan dijual kepada PT Bahana Securities dan selanjutnya PT Bahana Securities akan menawarkan dan menjual saham hasil pelaksanaan HMETD yang dibeli dari HMETD milik Negara Republik Indonesia, segera setelah saham tersebut diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, kepada para investor asing maupun domestik melalui penawaran terbatas yang akan dilaksanakan melalui transaksi di BEI pada hari yang sama saat pelaksanaan HMETD milik Negara Republik Indonesia oleh PT Bahana Securities.

Disamping itu, setelah alokasi pemesanan saham tambahan, bilamana masih terdapat sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham dalam PUT III ini, PT Bahana Securities bertindak sebagai pembeli siaga yang bukan merupakan porsi Negara Republik Indonesia wajib membeli sebanyak-banyaknya sebesar 902.508.430 (sembilan ratus dua juta lima ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh) Saham Biasa Atas Nama Seri C dengan memperhatikan bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh publik setelah pelaksanaan PUT III sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan saham yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebesar 60% (enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT III selesai dilaksanakan.

Apabila Negara Republik Indonesia tidak melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dan mengalihkan HMETD yang dimilikinya tersebut kepada PT Bahana Securities yang akan bertindak sebagai agen penjualan atas saham Seri C hasil pelaksanaan HMETD tersebut melalui penawaran terbatas dan setelah PT Bahana Securities melakukan perannya sebagai pembeli siaga yang bukan merupakan porsi Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh publik setelah pelaksanaan PUT III sebesar 40% dan saham yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebesar 60%, maka susunan modal saham dan pemegang saham BNI sebelum dan sesudah PUT III ini secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) Setiap Saham dan
Saham Biasa Atas Nama Seri C Dengan Nilai Nominal Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Terbatas III			Setelah Penawaran Umum Terbatas III		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar						
- Saham Seri A Dwiwarna	1	7.500	0,00	1	7.500	0,00
- Saham Seri B	289.341.866	2.170.063.995.000	0,84	289.341.866	2.170.063.995.000	0,84
- Saham Seri C	34.213.162.660	12.829.935.997.500	99,16	34.213.162.660	12.829.935.997.500	99,16
Jumlah Modal Dasar	34.502.504.527	15.000.000.000.000	100,00	34.502.504.527	15.000.000.000.000	100,00
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- Saham Seri A Dwiwarna						
Negara Republik Indonesia	1	7.500	0,00	1	7.500	0,00
- Saham Seri B						
Negara Republik Indonesia	217.006.399	1.627.547.992.500	1,42	217.006.399	1.627.547.992.500	1,16
Masyarakat	72.335.467	542.516.002.500	0,47	72.335.467	542.516.002.500	0,39
- Saham Seri C						
Negara Republik Indonesia	10.972.187.475	4.114.570.303.125	71,84	10.972.187.475	4.114.570.303.125	58,84
Masyarakat	4.012.411.168	1.504.654.188.000	26,27	7.387.127.116	2.770.172.668.500	39,61
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.273.940.510	7.789.288.493.625	100,00	18.648.656.458	9.054.806.974.125	100,00
C. Jumlah Saham Dalam Portepel	19.228.564.017	7.210.711.506.375		15.853.848.069	5.945.193.025.875	

3. Rencana Penggunaan Dana Hasil PUT III

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Terbatas III setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan dipergunakan oleh BNI dalam rangka memperkuat struktur permodalan, yang selanjutnya menurut rencana akan digunakan untuk:

- a. sekitar 80% akan digunakan untuk penyaluran kredit korporasi, usaha menengah, usaha kecil serta konsumen.
- b. sekitar 15% akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur pada teknologi informasi, outlet dan ATM dan lain-lain; dan
- c. sekitar 5% akan digunakan untuk pengembangan anak perusahaan yaitu BNI Life, BNI Syariah, BNI Securities dan BNI Multifinance, dimana pengembangan anak perusahaan tersebut akan dilakukan dengan jalan peningkatan penyertaan modal pada perusahaan tersebut untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya dan juga dengan mencari *strategic investor*. Apabila penyertaan modal tersebut dilakukan bersamaan dengan masuknya *strategic investor*, maka Perseroan akan tetap mempertahankan posisi Perseroan sebagai pemegang saham mayoritas dalam perusahaan tersebut.

4. Keunggulan Kompetitif Perseroan

Sejarah panjang dan posisi yang kuat di pasar khususnya di Indonesia memberikan BNI beberapa kelebihan dibandingkan dengan para pesaingnya. BNI berkeyakinan bahwa keunggulan kompetitif yang dimiliki dapat menjaga stabilitas dan pertumbuhan dalam melewati krisis keuangan global. Selain itu, keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh BNI memungkinkan untuk memanfaatkan peluang yang ada seiring dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang kuat dan dinamis. Keunggulan Kompetitif BNI adalah sebagai berikut :

- Reputasi dan sejarah panjang yang kuat dan stabil sebagai bank terkemuka di Indonesia.
- *Platform* jaringan distribusi yang luas dan ekstensif
- Basis nasabah yang besar dengan kualitas yang tinggi.
- Dana pihak ketiga yang kuat dan biaya pendanaan yang rendah
- Fokus pada manajemen risiko dan sistem kontrol internal yang efektif
- Manajemen yang berpengalaman dan fokus pada penciptaan nilai yang berkelanjutan.
- Keberadaan yang kuat di perbankan Internasional

5. Strategi Usaha

Tujuan strategi jangka panjang BNI adalah untuk memperkuat posisi pasar BNI di Indonesia dan merubah pendekatan bisnis BNI dari "*product centric*" menjadi "*customer centric*". BNI berusaha untuk memaksimalkan *shareholders value* berdasarkan strategi yang tepat untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. BNI berusaha keras meningkatkan standar agar sejajar dengan standar lembaga keuangan internasional melalui peningkatan fokus terhadap kebutuhan para nasabah, memperkuat produk dan layanan utama yang ditawarkan, manajemen yang aktif dalam mengelola portofolio kredit, mengembangkan sumber daya manusia dan memperkuat manajemen risiko serta tata kelola perusahaan. Adapun strategi usaha yang dilakukan BNI adalah sebagai berikut :

- Mengembangkan kegiatan usaha Business Banking Group dengan berfokus pada industri terpilih di setiap wilayah geografis di Indonesia secara hati-hati
- Menyediakan produk dan layanan yang tepat di seluruh tahap kehidupan nasabah ritel kami
- Mengelola portofolio kredit secara aktif
- Meningkatkan tata kelola perusahaan dan kemampuan manajemen risiko secara berkelanjutan
- Melakukan regenerasi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan

6. Risiko Usaha

Investasi pada saham BNI tidak terlepas dari berbagai risiko. Investor diharapkan untuk mempertimbangkan secara hati-hati seluruh informasi yang terdapat di dalam Prospektus, termasuk penjelasan tentang risiko-risiko di bawah ini sebelum membuat keputusan investasi. Kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi BNI dapat terkena dampak negatif secara material akibat risiko-risiko tersebut. Harga pasar saham BNI juga dapat mengalami penurunan yang diakibatkan oleh risiko-risiko tersebut sehingga dapat menyebabkan kerugian investasi.

1. BNI dapat terus mengalami peningkatan NPL, kredit dalam perhatian khusus, cadangan kerugian dan hapus buku.
2. Rasio NPL BNI terhadap total kredit lebih tinggi dan rasio cadangan kerugian BNI terhadap total kredit lebih rendah dibandingkan bank-bank lain di Indonesia
3. BNI dapat tidak berhasil dalam melaksanakan rencana strategis BNI
4. Portofolio kredit BNI yang direstrukturisasi sensitif terhadap peningkatan suku bunga dan melemahnya kondisi ekonomi global serta kredit yang dapat menjadi NPL
5. Sistem manajemen risiko dan kontrol internal BNI dapat menjadi kurang efektif
6. Kelemahan keamanan dalam sistem komputer dan infrastruktur jaringan BNI serta pihak ketiga terkait, pencurian, kegagalan sistem dan bencana dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha BNI
7. BNI dapat tidak berhasil dalam perbaikan kelemahan sistem informasi dan pelaporan
8. Peraturan Bank Indonesia mengenai klasifikasi dan cadangan kerugian NPL relatif lebih lunak dibandingkan dengan negara lainnya

9. Jumlah cadangan kerugian BNI akan dipengaruhi oleh perubahan dalam penilaian kredit dan aset-aset keuangan lainnya, serta cadangan kerugian untuk potensi kerugian kredit dan kerugian aset-aset keuangan BNI
10. Nilai agunan BNI dapat tercatat lebih tinggi dan mengalami penurunan pada masa yang akan datang
11. BNI dapat tidak memperoleh kembali *carrying value* dari agunan
12. Industri perbankan sangat kompetitif dan strategi pertumbuhan BNI bergantung pada kemampuan BNI untuk bersaing secara efektif
13. BNI dapat mengalami kerugian atas aset keuangan dan aset non-keuangan dalam jumlah besar
14. Hasil usaha BNI berfluktuasi dan akan terus berfluktuasi secara signifikan dari waktu ke waktu
15. Obligasi Pemerintah dan surat utang Pemerintah lainnya mencerminkan porsi yang substansial atas aset BNI telah mempengaruhi dan akan terus mempengaruhi hasil usaha BNI
16. BNI memiliki portofolio kredit yang sangat terkonsentrasi pada nasabah dan industri tertentu dan jika kredit ini menjadi kredit bermasalah, kualitas portofolio kredit BNI dapat terkena dampak negatif
17. Strategi BNI untuk meningkatkan portofolio kredit kepada beberapa segmen dapat menimbulkan berbagai risiko
18. Jika BNI tidak mampu memperoleh tambahan modal yang cukup, CAR BNI akan turun dan jika BNI tidak memenuhi persyaratan kecukupan modal minimum, BNI perlu untuk meningkatkan tambahan modal dan kemampuan BNI untuk meningkatkan modal terbatas
19. Fluktuasi nilai Rupiah dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha BNI
20. BNI dapat mengalami risiko suku bunga karena adanya perbedaan *repricing* suku bunga atas *assets and liabilities* atau kondisi ekonomi di Indonesia secara umum
21. BNI dapat mengalami keterbatasan likuiditas terutama karena ketidaksesuaian waktu jatuh tempo antara *assets and liabilities* dalam jumlah besar
22. Implementasi kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia (*single present policy*) untuk bank-bank Indonesia dapat berdampak negatif terhadap BNI
23. Permasalahan pasar modal dan kredit global dapat berdampak negatif terhadap likuiditas, peningkatan biaya pendanaan dan mengganggu kegiatan usaha BNI
24. Dalam proses persetujuan kredit BNI, rekomendasi unit risiko kredit tidak mengikat unit bisnis BNI
25. Jika BNI kehilangan beberapa personil inti BNI atau jika BNI tidak dapat merekrut dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, kegiatan usaha dan operasi BNI akan terganggu.
26. Risiko atas kepemilikan pada Perusahaan Anak

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting BNI untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting BNI pada tanggal 31 Desember 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta pada tanggal 30 September 2010 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan BNI untuk periode-periode tersebut. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting BNI pada tanggal 30 September 2009 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut diambil dari laporan keuangan konsolidasian BNI yang tidak diaudit untuk periode tersebut. Kinerja keuangan konsolidasian yang telah dicapai oleh BNI untuk periode 9 bulan tersebut di atas belum tentu mengindikasikan kinerja keuangan konsolidasian yang akan dicapai oleh BNI untuk satu tahun penuh.

Laporan keuangan konsolidasian BNI pada tanggal 31 Desember 2005 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian BNI pada tanggal 31 Desember 2006 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian BNI pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta pada tanggal 30 September 2010 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 dan No. 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" secara prospektif, mulai 1 Januari 2010 yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini dan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasi BNI dan anak perusahaan untuk 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009, sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Laporan keuangan konsolidasian BNI pada tanggal 30 September 2009 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit, telah *direview* oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI, dengan hasil tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut agar penyajiannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Suatu *review* yang dilaksanakan berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang lebih sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan, seperti yang tercantum dalam laporan *review* akuntan independen terkait (yang disajikan dalam satu laporan dengan laporan auditor independen tersebut di atas) yang tercantum dalam Prospektus ini, KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) (anggota dari Ernst & Young Global Limited), tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut. Oleh karena itu, tingkat keandalan laporan *review* mereka atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut sangat terbatas mengingat adanya keterbatasan dalam sifat dan ruang lingkup prosedur yang diterapkan dalam suatu *review* yang dilaksanakan berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI.

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember					Pada tanggal 30 September	
	2005	2006	2007	2008	2009	2009 (tidak diaudit)	2010
Neraca							
Kas	2.844	2.695	3.259	4.428	4.903	4.962	5.325
Giro pada Bank Indonesia	11.281	15.160	17.573	9.351	8.531	7.499	8.551
Giro pada bank lain – bersih	500	422	1.171	1.701	6.858	1.442	2.721
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia – bersih	19.554	30.327	14.809	22.642	29.622	20.784	22.908
Surat-surat berharga – bersih	3.766	4.956	16.201	9.874	19.198	8.893	17.224
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – bersih	-	-	195	87	-	250	4
Wesel ekspor dan tagihan lainnya – bersih	1.392	622	319	428	669	560	522
Tagihan akseptasi - bersih	3.497	3.040	2.380	3.831	4.729	2.528	5.793
Tagihan derivatif - bersih	51	50	3	96	7	17	1
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan – bersih	58.331	62.614	83.214	106.341	113.924	113.469	119.544
Obligasi Pemerintah	37.451	41.227	36.701	34.655	31.040	34.554	33.037
Penyertaan saham-bersih	338	778	135	105	51	56	35
Aset tetap-bersih	4.519	4.111	3.871	3.733	3.708	3.493	3.751
Aset pajak tangguhan - bersih	223	22	711	1.989	1.359	1.714	1.119
Aset lain-lain - bersih	4.065	3.392	2.800	2.480	2.898	2.839	4.276
Jumlah Aset	147.812	169.416	183.342	201.741	227.497	203.060	224.811
Kewajiban segera	1.436	1.688	1.118	1.060	1.109	918	1.033
Simpanan nasabah	115.372	135.797	146.189	163.164	188.469	163.654	183.772
Simpanan dari bank lain	2.378	2.344	3.804	4.100	3.819	3.495	3.155
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	50	500	199	625	-	-	-
Kewajiban derivatif	139	11	29	83	152	210	233
Kewajiban akseptasi	3.545	2.983	1.594	1.969	2.559	1.962	1.719
Surat-surat berharga yang diterbitkan	2.117	1.535	1.269	1.269	1.261	1.267	1.277
Pinjaman yang diterima	4.796	4.009	6.309	8.617	5.570	7.737	5.185
Hutang pajak	281	405	151	599	94	163	563

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember					Pada tanggal 30 September	
	2005	2006	2007	2008	2009	2009 (tidak diaudit)	2010
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	126	132	179	129	156	155	149
Kewajiban pajak tangguhan	-	313	-	-	-	-	19
Kewajiban lain-lain	2.640	3.217	4.319	4.664	5.134	5.064	6.345
Pinjaman Subordinasi	2.433	2.239	934	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban	135.891	154.597	166.094	186.279	208.322	184.625	203.449
Hak Minoritas	26	25	28	31	31	29	44
Jumlah Ekuitas	11.895	14.794	17.220	15.431	19.144	18.406	21.318
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	147.812	169.416	183.342	201.741	227.497	203.060	224.811

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2005	2006	2007	2008	2009	2009 (tidak diaudit)	2010
Laporan Laba Rugi							
Pendapatan bunga dan syariah ⁽¹⁾	12.601	15.044	14.878	16.628	19.447	14.710	14.400
Beban bunga, bonus dan beban pembiayaan lainnya ⁽²⁾	(5.787)	(7.667)	(7.410)	(6.716)	(8.314)	(6.400)	(5.395)
Pendapatan bunga dan syariah bersih	6.815	7.377	7.467	9.912	11.133	8.310	9.005
Pendapatan operasional lainnya	2.331	2.861	4.130	3.549	4.295	3.146	3.404
Provisi dan komisi lainnya	1.172	1.368	1.597	1.976	2.231	1.597	1.461
Pendapatan premi asuransi	-	-	680	764	1.027	738	995
Kenaikan (penurunan) nilai surat berharga	67	631	1.223	(143)	424	347	674
Laba selisih kurs – bersih	110	184	266	630	262	249	91
Lain-lain	983	678	365	322	351	214	184
Beban operasional lainnya	(5.719)	(6.258)	(7.626)	(7.228)	(7.991)	(5.708)	(6.391)
Gaji dan tunjangan	(2.637)	(2.911)	(3.692)	(3.299)	(3.460)	(2.594)	(2.642)
Umum dan administrasi	(2.108)	(2.351)	(2.389)	(2.273)	(2.312)	(1.594)	(1.737)
Underwriting asuransi	-	-	(693)	(706)	(1.022)	(771)	(1.031)
Beban promosi	-	-	(297)	(352)	(427)	(226)	(430)
Lain-lain ⁽³⁾	(974)	(1.002)	(555)	(597)	(770)	(523)	(551)
Pendapatan sebelum pembalikan (pembentukan) cadangan kerugian penurunan nilai	3.427	3.980	3.971	6.233	7.437	5.748	6.018
Pembalikan (pembentukan) cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non-keuangan	(1.256)	(1.319)	(2.704)	(4.359)	(4.051)	(3.483)	(1.776)
Laba operasional bersih	2.171	2.661	1.268	1.875	3.386	2.265	4.241
Pendapatan bukan operasional bersih	84	179	213	58	58	78	7
Laba sebelum beban pajak dan hak minoritas	2.256	2.840	1.481	1.932	3.444	2.343	4.249
Laba bersih	1.415	1.926	898	1.222	2.484	1.855	2.954
Laba per saham	106	145	64	80	163	121	193

Catatan:

(1) Termasuk pendapatan fee dan komisi

(2) Termasuk beban fee dan komisi

(3) Termasuk premi penjaminan, beban administrasi bukan kredit, beban operasional lainnya (termasuk beban overhead, pajak dan beban lainnya dari kantor cabang luar negeri BNI dan pos beban lain-lain).

8. Kebijakan Dividen

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dividen disetujui atas rekomendasi dari Direksi. Dividen, jika dibayarkan, akan bergantung, antara lain, pada laba, kebutuhan modal, kondisi keuangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi dan akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham biasa pada record date berhak atas dividen dalam jumlah penuh yang telah disetujui. BNI bermaksud untuk menentukan tingkat pembayaran dividen yang dapat memberikan pemegang saham biasa BNI arus penerimaan yang teratur, dimana pada saat yang bersamaan hal itu akan memungkinkan BNI untuk mengalokasikan sejumlah bagian laba untuk melakukan reinvestasi pada kegiatan usaha BNI. Pada saat ini dan untuk tahun-tahun yang akan datang kebijakan dividen BNI adalah minimum 25% dari laba bersih per tahun, yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS. Kebijakan dividen BNI saat ini mungkin akan mengalami perubahan berdasarkan diskusi dan persetujuan internal. Dividen yang diterima oleh pemegang saham biasa non-Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sejak tahun 2007, BNI telah melakukan pembayaran dividen sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sebesar Rp962,9 miliar pada tahun 2007 atau merepresentasikan 50% dari laba bersih tahun 2006, sebesar Rp449,1 miliar pada tahun 2008 atau merepresentasikan 50% dari laba bersih tahun 2007, sebesar Rp122,2 miliar pada tahun 2009 atau merepresentasikan 10% dari laba bersih tahun 2008 dan sebesar Rp869,4 miliar pada tahun 2010 atau merepresentasikan 35% dari laba bersih tahun 2009. Tidak ada jaminan bahwa BNI akan memiliki kemampuan atau akan membayar dividen atau keduanya pada masa yang akan datang.

Sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah bagi perusahaan yang memiliki hubungan dengan Pemerintah, sebagai bank BUMN, BNI diharuskan untuk mengalokasikan sebesar 1% dari laba bersih BNI untuk program pengembangan masyarakat dan sebesar 3% dari laba bersih BNI untuk program pengembangan lingkungan. Untuk tahun 2009, BNI telah mengalokasikan sebesar Rp24,8 miliar untuk program pengembangan masyarakat dan sebesar Rp74,5 miliar untuk program perlindungan dan pengembangan lingkungan.

9. Prospek Usaha

Pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan III 2010 diperkirakan lebih baik dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2010, ekonomi domestik diperkirakan tumbuh 6,3% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tetap tumbuh di atas 5% (yoy). Pertumbuhan konsumsi ini dipacu oleh optimisme konsumen dan meningkatnya pendapatan yang antara lain berasal dari hasil ekspor. Pertumbuhan ekspor pada triwulan III 2010 diperkirakan mencapai 11,4%. Pertumbuhan ekspor ini dipicu oleh pertumbuhan ekonomi global yang terus membaik terutama China dan India seiring dengan semakin tersebarnya negara tujuan ekspor. Investasi diperkirakan tumbuh sebesar 9,9% (yoy) pada triwulan III 2010 sebagai respons atas meningkatnya permintaan serta membaiknya iklim investasi. Kondisi ini berimplikasi pada impor yang juga meningkat. Secara sektoral, sektor *nontradable* tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor *tradable*.

Dari sisi harga, inflasi sepanjang triwulan III 2010 menunjukkan peningkatan yang terutama bersumber dari kelompok *volatile foods*. Masih tingginya tekanan inflasi dari kelompok bahan makanan (*volatile food*) akibat gangguan distribusi dan produksi yang disebabkan anomali cuaca serta kenaikan tarif dasar listrik untuk rumah tangga. Sementara itu, tekanan inflasi juga bersumber dari penyesuaian biaya pendidikan sehubungan dengan datangnya tahun ajaran baru dan adanya peningkatan permintaan terkait hari raya keagamaan. Namun demikian, tekanan inflasi pada bulan September 2010 mengalami penurunan yaitu tercatat sebesar 0,44% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya yaitu 0,76% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, selama triwulan III 2010 inflasi IHK tercatat sebesar 2,79 (qtq) atau mencapai 5,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 1,41% (qtq) atau 5,05% (yoy). Sementara itu, dampak kelompok *administered prices* terhadap inflasi IHK masih relatif kecil karena tidak adanya kebijakan strategis pemerintah di bidang harga pada September 2010.

Neraca pembayaran Indonesia (NPI) triwulan III 2010 diperkirakan akan mencatat surplus yang lebih tinggi dari yang diperkirakan semula. Hal itu disebabkan oleh surplus neraca transaksi modal dan finansial (TMF) yang mengalami perbaikan cukup signifikan. Peningkatan surplus TMF yang cukup signifikan didorong oleh membaiknya persepsi internasional terhadap perekonomian Indonesia, yaitu perbaikan outlook credit rating Indonesia, imbal hasil investasi rupiah yang cenderung meningkat, serta kondisi eksekusi likuiditas global. Di sisi lain, surplus neraca transaksi berjalan (*current account/CA*) diperkirakan akan menurun akibat pertumbuhan impor yang tinggi, seiring dengan kegiatan ekonomi domestik yang terakselerasi. Namun demikian, impor yang terakselerasi tersebut masih mendukung kegiatan ekonomi domestik, tercermin dari dominannya impor bahan baku dan barang modal. Dengan perkembangan tersebut cadangan devisa pada akhir September 2010 mencapai 86,55 miliar Dolar AS, atau setara dengan 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Nilai tukar rupiah terus menguat seiring dengan kinerja transaksi berjalan yang masih mencatat surplus cukup besar dan derasnya arus modal asing yang masuk serta faktor risiko yang masih terjaga. Penguatan rupiah ini didukung oleh sentimen global yang positif serta faktor fundamental domestik yang semakin kokoh. Jika dibandingkan dengan triwulan II 2010, secara rata-rata rupiah menguat sebesar 1,2% (qtq), mencapai Rp9.001 per dolar AS. Penguatan rupiah pada triwulan III tersebut diikuti oleh volatilitas yang turun dari 0,5% pada triwulan II 2010 menjadi 0,2% pada triwulan III 2010. Pada akhir triwulan III 2010 rupiah ditutup pada level Rp8.924 per dolar AS, atau menguat 1,2% (ptp) dibandingkan dengan triwulan II 2010. Nilai tukar rupiah yang cenderung stabil dapat mendukung kebutuhan impor bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi domestik dan di sisi lain penguatan rupiah belum memberikan tekanan yang signifikan bagi eksportir karena masih kuatnya permintaan internasional.

Pasar keuangan secara keseluruhan pada triwulan III 2010 berada dalam kondisi yang semakin stabil. Kondisi pasar SUN dan pasar modal terus membaik sebagaimana tercermin dari IHSG yang meningkat dan *yield* SUN yang menurun. Membaiknya pasar modal dan SUN pada triwulan III 2010 ini ditopang oleh prospek perekonomian yang terus membaik. Di pasar uang antarbank, kondisi likuiditas selama triwulan III 2010 cenderung meningkat. Transmisi kebijakan moneter sepanjang triwulan III-2010 juga berlangsung dengan baik sebagaimana tercermin dari suku bunga PUAB O/N yang bergerak di sekitar BI Rate, pertumbuhan kredit yang meningkat terutama untuk jenis kredit modal kerja dan IHSG yang mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. Di sisi mikro perbankan, kondisi perbankan nasional semakin kuat. Hal itu tercermin dari masih tingginya rasio kecukupan modal (CAR) dan terjaganya rasio *gross non-performing loan* (NPL) dibawah 5%. Selain itu likuiditas perbankan, termasuk likuiditas di pasar uang antar bank kian membaik dan dana pihak ketiga (DPK) yang terus meningkat. Intermediasi perbankan juga semakin baik tercermin dari pertumbuhan kredit yang hingga akhir September 2010 mencapai 21,2% (yoy). Pertumbuhan modal kerja selama tahun 2010 telah tumbuh melampaui jenis kredit konsumsi dan ke depan pertumbuhan kredit tetap diarahkan ke sektor yang produktif. Dengan perkembangan tersebut dan sesuai dengan rencana bisnis bank, untuk keseluruhan tahun 2010 pertumbuhan kredit diperkirakan mencapai 22%-24%. Peningkatan kredit terutama didorong oleh membaiknya keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian.

BNI akan tetap melaksanakan langkah – langkah usaha yang bersifat *prudent*, dengan memberikan perhatian khusus pada segmen nasabah yang dipandang mempunyai potensi yang baik bagi pengembangan usaha Bank BNI dalam jangka panjang. Sesuai dengan basis nasabah BNI yang memiliki kompetensi di segmen Korporasi; Usaha Menengah & Kecil; dan Konsumer, maka arah kebijakan Bank BNI ke depan masih dalam upaya memajukan segmen usaha tersebut yang dituangkan ke dalam Strategi Usaha BNI.

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS III

Direksi atas nama Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya 3.374.716.060 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu enam puluh) Saham Biasa Atas Nama Seri C baru dengan nilai nominal Rp375,- (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Desember 2010 pukul 16.00 WIB, di mana setiap pemegang 500.000 (lima ratus ribu) saham lama (Saham Seri C) memiliki 110.473 (seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru Seri C dalam Perseroan dengan Harga Pelaksanaan Rp3.100,- (tiga ribu seratus Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT III dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham dari PUT III memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Jumlah PUT III ini adalah sebesar-besarnya Rp10.461.619.786.000 (sepuluh triliun empat ratus enam puluh satu miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).

Jika saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Disamping itu, setelah alokasi pemesanan saham tambahan, bilamana masih terdapat sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham dalam PUT III ini, PT Bahana Securities bertindak sebagai pembeli siaga yang bukan merupakan porsi Negara Republik Indonesia wajib membeli sebanyak-banyaknya sebesar 902.508.430 (sembilan ratus dua juta lima ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh) Saham Biasa Atas Nama Seri C dengan memperhatikan bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh publik setelah pelaksanaan PUT III sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan saham yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebesar 60% (enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT III selesai dilaksanakan.

Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham BNI tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT III yaitu sejumlah 2.472.207.630 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh) HMETD. Berdasarkan Perjanjian Pembelian tanggal 11 November 2010 yang dibuat di bawah tangan antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam kapasitasnya sebagai wakil Negara Republik Indonesia dengan PT Bahana Securities, HMETD milik Negara Republik Indonesia tersebut akan dijual kepada PT Bahana Securities dan selanjutnya PT Bahana Securities akan menawarkan dan menjual saham hasil pelaksanaan HMETD yang dibeli dari HMETD milik Negara Republik Indonesia, segera setelah saham tersebut diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, kepada para investor asing maupun domestik melalui penawaran terbatas yang akan dilaksanakan melalui transaksi di BEI pada hari yang sama saat pelaksanaan HMETD milik Negara Republik Indonesia oleh PT Bahana Securities.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar Bursa Efek Indonesia selama tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan tanggal 16 Desember 2010. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Desember 2010. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 16 Desember 2010 dengan keterangan bahwa hak yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak berlaku lagi.



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Kegiatan Usaha

Bergerak Dalam Bidang Usaha Perbankan
Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung BNI
Jl. Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta 10220, Indonesia
Telepon: (021) 572 8387, 572 8037, 251 1946 (hunting)
Faksimili: (021) 572 8295, 572 8053
e-mail: bni@bni.co.id, investor.relations@bni.co.id
<http://www.bni.co.id>

Kantor Cabang

1.112 kantor cabang dan kantor cabang pembantu (termasuk 58 kantor cabang dan kantor cabang pembantu Syariah yang dimiliki oleh Anak Perusahaan), 51 Sentra Kredit Kecil, 20 Sentra Kredit Menengah, 12 Sentra Kredit Konsumen, 24 sentra BNI Emerald dan 4.072 mesin ATM yang tersebar di seluruh Indonesia.
(per tanggal 30 September 2010)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI BNI ADALAH RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KREDIT. HAL INI DISEBABKAN OLEH KENYATAAN BAHWA SEBAGIAN BESAR ASET PRODUKTIF BNI MERUPAKAN KREDIT YANG DIBERIKAN.

RISIKO USAHA BNI SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI

Perseroan didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1946 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1946, tanggal 5 Juli 1946 tentang Bank Negara Indonesia yang merupakan kelanjutan dari suatu yayasan dengan nama Badan Umum "Poesat Bank Indonesia" yang didirikan berdasarkan Akta No.14, tanggal 9 Oktober 1945, dibuat di hadapan Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, yang berfungsi sebagai bank sentral. Pada tahun 1955, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No.2 Tahun 1955, tanggal 4 Februari 1955, yang mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1946 fungsi Perseroan beralih menjadi bank umum dengan tugas utama yang diarahkan kepada pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam lapangan perdagangan impor dan ekspor. Sejak saat itu, Perseroan kemudian terus mengembangkan aktivitas pemberian pinjaman kepada berbagai sektor ekonomi.

Sejak didirikan hingga sekarang, bentuk badan hukum Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan baik melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Undang-Undang Darurat, maupun Penetapan Presiden Republik Indonesia dan Undang-Undang.

Berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 1965, tanggal 27 Juli 1965, tentang Pendirian Bank Tunggal Milik Negara, Perseroan dengan nama "Bank Negara Indonesia" menjalankan tugas dan usaha sebagai bank sirkulasi, bank sentral dan bank umum. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No.KEP.65/UBS/65, tanggal 30 Juli 1965, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 1965, "Bank Negara Indonesia" berubah menjadi "Bank Negara Indonesia Unit III".

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.17 Tahun 1968, tanggal 18 Desember 1968, "Bank Negara Indonesia Unit III" diubah menjadi "Bank Negara Indonesia 1946" (BNI 1946) dengan tugas utama yang diarahkan kepada pembangunan ekonomi nasional dengan mengutamakan sektor industri.

Sejalan dengan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946, maka BNI 1946 disesuaikan bentuk hukumnya menjadi "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia" atau "PT Bank Negara Indonesia (Persero)" dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.131, tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, SH, Notaris Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-6582.HT.01.01.Th.92, tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan dalam Buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.2153/1992, tanggal 15 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73, tanggal 11 September 1992, Tambahan No.1A. ("Akta No.131/1992"). Anggaran Dasar Perseroan ini kemudian diubah dengan Akta No.76, tanggal 19 September 1992 dan Akta No.4, tanggal 1 Oktober 1992, keduanya dibuat di hadapan Notaris yang sama, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-8230.HT.01.04.TH.92, tanggal 3 Oktober 1992, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.2624/1992 dan No.2625/1992 keduanya tertanggal 5 Oktober 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.84, tanggal 20 Oktober 1992, Tambahan No.008A.

Anggaran Dasar BNI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 13, tanggal 12 Mei 2010, dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta ("Akta No. 13/2010"), berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 12 Mei 2010, antara lain mengenai perubahan Pasal 11 ayat (24) dan (25) tentang Direksi; Pasal 14 ayat (9), (18), (26) dan (27) tentang Dewan Komisaris; Pasal 27 ayat (3) tentang Penggunaan Laba; dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan ini telah dilaporkan kepada Menkumham Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-13852, tanggal 7 Juni 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042579.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 7 Juni 2010 dan sedang dalam proses pengumuman di BNRI.

BNI menjalankan kegiatan usaha di bidang usaha perbankan. Bidang usaha tersebut termasuk dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar BNI.

Per tanggal 30 September 2010 BNI memiliki 1.112 kantor cabang dan kantor cabang pembantu (termasuk 58 kantor cabang dan kantor cabang pembantu Syariah yang dimiliki oleh Anak Perusahaan, yaitu BNI Syariah), 51 Sentra Kredit Kecil, 20 Sentra Kredit Menengah, 12 Sentra Kredit Konsumen, 24 sentra BNI Emerald dan 4.072 mesin ATM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun riwayat pencatatan saham BNI secara kronologis mulai dari Penawaran Umum Perdana (IPO) adalah sebagai berikut:

Jenis Corporate Action	Tanggal Efektif	Tambahan Saham	Akumulasi Jumlah Saham yang Dicatatkan (lembar)
Penawaran Umum Perdana (IPO)	25 November 1996	4.340.128.000	4.340.128.000
Delisting (1%)	2 Juli 1999	(43.401.280)	4.296.726.720
Penawaran Umum Terbatas I Dengan HMETD (1:35)	5 Juli 1999	151.904.480.000	156.201.206.720
Penawaran Umum Terbatas Tanpa HMETD	20 April 2001	44.946.404.500	201.147.611.220
Delisting 1%	23 April 2001	(3.571.013.245)	197.576.597.975
Tambahan Delisting untuk memenuhi jumlah 1%	12 Desember 2001	(343.540.085)	197.233.057.890
Penawaran Umum Terbatas II Dengan HMETD (3:20)	30 Juli 2007	1.992.253.110	15.273.940.510

Komposisi Modal Saham BNI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) Setiap Saham dan Saham Biasa
Atas Nama Seri C Dengan Nilai Nominal Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	7.500	0,00
- Saham Seri B	289.341.866	2.170.063.995.000	0,84
- Saham Seri C	34.213.162.660	12.829.935.997.500	99,16
Jumlah Modal Dasar	34.502.504.527	15.000.000.000.000	100,00
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	7.500	0,00
- Saham Seri B			
Negara Republik Indonesia	217.006.399	1.627.547.992.500	1,42
Masyarakat	72.335.467	542.516.002.500	0,47
- Saham Seri C			
Negara Republik Indonesia	10.972.187.475	4.114.570.303.125	71,84
Masyarakat	4.012.411.168	1.504.654.188.000	26,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.273.940.510	7.789.288.493.625	100,00
C. Jumlah Saham Dalam Portepel	19.228.564.017	7.210.711.506.375	

Saham Seri A – Dwiwarna

Saham yang dikeluarkan BNI terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna, Saham Biasa Atas Nama Seri B dan Saham Biasa Atas Nama Seri C. BNI hanya mengeluarkan 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun.

Saham Seri A – Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada Negara Republik Indonesia hak istimewa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- RUPS untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris harus dihadiri dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Selain itu anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
- RUPS sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar harus dihadiri dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.
- RUPS sehubungan dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan harus dihadiri dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.
- RUPS sehubungan dengan pembubaran dan likuidasi dari perusahaan harus dihadiri dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Saham Biasa Atas Nama Seri B dan C

Sesuai dengan Anggaran Dasar BNI, diutarakan bahwa sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Saham Seri B dan Saham Seri C mempunyai hak yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Bab XVII Prospektus ini, Saham Seri B dan C sama-sama mempunyai hak antara lain untuk (i) menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, (ii) menerima dividen dan (iii) membeli saham baru Perseroan. Sedangkan hak istimewa dari Pemegang Saham Seri A telah diterangkan di atas.

Saham Biasa Atas Nama Seri C yang ditawarkan dalam PUT III dengan HMETD ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama Seri B dan C lainnya dari BNI yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham BNI tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT III yaitu sejumlah 2.472.207.630 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh) HMETD. Negara Republik Indonesia akan mengalihkan HMETD yang dimilikinya tersebut kepada PT Bahana Securities dan selanjutnya saham Seri C hasil pelaksanaan HMETD tersebut akan dijual melalui penawaran terbatas. PT Bahana Securities selanjutnya akan segera mendistribusikan saham tersebut ke rekening efek para investor setelah pelaksanaan transaksi melalui BEI.

Disamping itu, setelah alokasi pemesanan saham tambahan, bilamana masih terdapat sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham dalam PUT III ini, PT Bahana Securities bertindak sebagai pembeli siaga yang bukan merupakan porsi Negara Republik Indonesia wajib membeli sebanyak-banyaknya sebesar 902.508.430 (sembilan ratus dua juta lima ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh) Saham Biasa Atas Nama Seri C dengan memperhatikan bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh publik setelah pelaksanaan PUT III sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan saham yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebesar 60% (enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT III selesai dilaksanakan.

Apabila Negara Republik Indonesia tidak melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dan mengalihkan HMETD yang dimilikinya tersebut kepada PT Bahana Securities yang akan bertindak sebagai agen penjualan atas saham Seri C hasil pelaksanaan HMETD tersebut melalui penawaran terbatas dan setelah PT Bahana Securities melakukan perannya sebagai pembeli siaga yang bukan merupakan porsi Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh publik setelah pelaksanaan PUT III sebesar 40% dan saham yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebesar 60%, maka susunan modal saham dan pemegang saham BNI sebelum dan sesudah PUT III ini secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) Setiap Saham dan
Saham Biasa Atas Nama Seri C Dengan Nilai Nominal Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Terbatas III			Setelah Penawaran Umum Terbatas III		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar						
- Saham Seri A Dwiwarna	1	7.500	0,00	1	7.500	0,00
- Saham Seri B	289.341.866	2.170.063.995.000	0,84	289.341.866	2.170.063.995.000	0,84
- Saham Seri C	34.213.162.660	12.829.935.997.500	99,16	34.213.162.660	12.829.935.997.500	99,16
Jumlah Modal Dasar	34.502.504.527	15.000.000.000.000	100,00	34.502.504.527	15.000.000.000.000	100,00
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- Saham Seri A Dwiwarna						
Negara Republik Indonesia	1	7.500	0,00	1	7.500	0,00
- Saham Seri B						
Negara Republik Indonesia	217.006.399	1.627.547.992.500	1,42	217.006.399	1.627.547.992.500	1,16
Masyarakat	72.335.467	542.516.002.500	0,47	72.335.467	542.516.002.500	0,39
- Saham Seri C						
Negara Republik Indonesia	10.972.187.475	4.114.570.303.125	71,84	10.972.187.475	4.114.570.303.125	58,84
Masyarakat	4.012.411.168	1.504.654.188.000	26,27	7.387.127.116	2.770.172.668.500	39,61
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.273.940.510	7.789.288.493.625	100,00	18.648.656.458	9.054.806.974.125	100,00
C. Jumlah Saham Dalam Portepel	19.228.564.017	7.210.711.506.375		15.853.848.069	5.945.193.025.875	

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PUT III ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan 16 Desember 2010 baik melalui bursa efek maupun di luar bursa efek sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT III ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum sebesar 18,10%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99,0% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1,0% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau Badan hukum Indonesia serta tidak dapat dicatatkan di bursa efek, saat ini BNI telah memenuhi Peraturan Pemerintah tersebut.

BNI telah memperoleh izin untuk melakukan PUT III sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.PW01/7425/DPRRI/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 dan No.PW.01/8149/DPRRI/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang mensyaratkan bahwa porsi kepemilikan Negara Republik Indonesia setelah pelaksanaan PUT III adalah sebesar 60% (enam puluh persen), serta penetapan dari Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.74 Tahun 2010 tanggal 20 November 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk.

SESUAI DENGAN PERJANJIAN PEMBELIAN TERTANGGAL 11 NOVEMBER 2010, NEGARA REPUBLIK INDONESIA TIDAK AKAN MENJUAL ATAU MENGALIHKAN SAHAM YANG DIMILIKINYA DI PERSEROAN DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEJAK EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT III INI.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT III INI, BNI TIDAK AKAN MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DILUAR YANG DITAWARKAN DALAM PUT III INI., KECUALI SAHAM BARU YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PROGRAM EMSOP.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PUT III

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Terbatas III setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan dipergunakan oleh BNI dalam rangka memperkuat struktur permodalan, yang selanjutnya menurut rencana akan digunakan untuk:

- a. sekitar 80% akan digunakan untuk penyaluran kredit korporasi, usaha menengah, usaha kecil serta konsumen.
- b. sekitar 15% akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur pada teknologi informasi, *outlet* dan ATM dan lain-lain; dan
- c. sekitar 5% akan digunakan untuk pengembangan anak perusahaan yaitu BNI Life, BNI Syariah, BNI Securities dan BNI Multifinance, dimana pengembangan anak perusahaan tersebut akan dilakukan dengan jalan peningkatan penyertaan modal pada perusahaan tersebut untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya dan juga dengan mencari *strategic investor*. Apabila penyertaan modal tersebut dilakukan bersamaan dengan masuknya *strategic investor*, maka Perseroan akan tetap mempertahankan posisi Perseroan sebagai pemegang saham mayoritas dalam perusahaan tersebut.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh BNI adalah sebesar 3,5% dari nilai PUT III, yang meliputi:

- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari Akuntan sebesar 0,1584%, Konsultan Hukum sebesar 0,0829%, Notaris sebesar 0,0010%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu Biro Administrasi Efek sebesar 0,0021%.
- Biaya lain-lain (percetakan lokal, percetakan asing, publikasi, jasa penasehat keuangan, dll) sebesar 3,255%

BNI akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas III ini secara periodik kepada Pemegang Saham dalam RUPS dan kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.81/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang diubah dengan No.Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dan terakhir diubah dengan No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila BNI bermaksud mengubah penggunaan dana, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada BAPEPAM dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

BNI akan mengikuti ketentuan Pasar Modal apabila dalam pelaksanaannya nanti mengandung transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Adapun aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan adalah Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") Tahun 2007, yang seluruh dana hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi telah direalisasikan seluruhnya sesuai rencana penggunaan dana, seperti yang telah diungkapkan dalam Prospektus dan telah dilaporkan kepada Bapepam dan LK dengan surat No.DIR/008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil PUT II.

III. PERNYATAAN HUTANG

Pada tanggal 30 September 2010, Perseroan memiliki kewajiban konsolidasian yang seluruhnya berjumlah Rp203.449 miliar. Angka ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2010 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" secara prospektif, mulai tanggal 1 Januari 2010 yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini dan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian BNI dan anak perusahaan untuk 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

1. Kewajiban

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	
Kewajiban segera	1.033
Simpanan nasabah:	
- Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	55
- Pihak ketiga	183.717
Simpanan dari bank lain	
- Pihak ketiga	3.155
Kewajiban derivatif	233
Kewajiban akseptasi	1.719
Surat - surat berharga yang diterbitkan	1.277
Pinjaman yang diterima	5.185
Hutang pajak	563
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	149
Kewajiban pajak tangguhan	19
Kewajiban lain-lain	6.345
Jumlah kewajiban	203.449

Kewajiban Segera

Kewajiban segera per 30 September 2010 adalah sebesar Rp1.033 miliar yang terdiri dari kiriman uang dana setoran cek, deposito yang sudah jatuh tempo tapi belum diambil nasabah, transaksi kliring, setoran pajak yang diterima oleh BNI sebagai bank persepsi dan simpanan sementara yang belum diselesaikan.

Simpanan Nasabah

Simpanan nasabah per 30 September 2010 adalah sebesar Rp183.772 miliar yang terdiri dari simpanan dalam mata uang Rupiah dan Mata Uang Asing serta penempatan dana pada giro, tabungan dan deposito berjangka.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	
Rupiah	
Giro	31.060
Tabungan	57.511
Deposito Berjangka	59.640
Jumlah Rupiah	148.211
Mata Uang Asing	
Giro	15.053
Tabungan	212
Deposito Berjangka	20.295
Jumlah Mata Uang Asing	35.561
Jumlah	183.772

Simpanan nasabah berdasarkan jangka waktu sampai dengan jatuh temponya adalah sebagai berikut :

	Nilai Tercatat	Kurang dari 1 Bulan	1 - 3 Bulan	3 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
Giro	46.112	46.112	-	-	-	-
Tabungan	57.723	57.723	-	-	-	-
Deposito	79.937	1.622	66.056	4.433	6.468	1.358
Simpanan nasabah	183.772					

Simpanan nasabah dalam mata uang asing terutama terdiri dari Dolar Amerika Serikat, Dolar Hong Kong, Pound Sterling Inggris, Yen Jepang, Euro, Dolar Australia dan Dolar Singapura.

Perincian simpanan nasabah dalam mata uang asing per 30 September 2010 adalah Rp34.290.223 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Rp506.344 dalam mata uang Dolar Singapura, Rp482.795 dalam mata uang Euro, Rp149.691 dalam mata uang Yen Jepang dan Rp131.702 dalam mata uang asing lainnya.

Simpanan nasabah sehubungan unit usaha syariah termasuk di dalamnya adalah giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Giro wadiah dan tabungan wadiah merupakan simpanan wadiah yad-dhamanah dimana pemilik dana akan mendapatkan pendapatan bonus. Pada tanggal 30 September 2010 jumlah giro wadiah sebesar Rp779 miliar. Pada tanggal 30 September 2010 jumlah tabungan wadiah sebesar Rp85 miliar.

Tabungan mudharabah merupakan simpanan dana dimana pemilik dana akan mendapatkan imbalan bagi hasil atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan sebelumnya. Pada tanggal 30 September 2010 jumlah tabungan mudharabah sebesar Rp1.662 miliar.

Deposito berjangka mudharabah merupakan simpanan deposito dari pihak lain yang memberikan bagian dari pendapatan atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Pada tanggal 30 September 2010 jumlah deposito berjangka mudharabah sebesar Rp2.377 miliar.

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku dan saat ini BNI adalah peserta dari program tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" maka nilai simpanan setiap nasabah pada satu bank yang dijamin oleh Pemerintah naik menjadi sebesar Rp2 miliar dari semula Rp100 juta, efektif sejak tanggal tersebut di atas.

Salah satu syarat pelaksanaan jaminan Pemerintah adalah untuk pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Unit Pelayanan Penjaminan Pemerintah (sebelumnya BPPN).

b. Tabungan berdasarkan jenis

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	
Tabungan BNI	55.095
Tabungan Syariah	1.747
Tabungan Haji	882
Jumlah	57.723

c. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	
Giro	595
Tabungan	198
Deposito Berjangka	153
Jumlah	946

Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain per 30 September 2010 adalah sebesar Rp3.155 miliar yang terdiri dari :

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	
Rupiah	
Giro	344
Deposito dan <i>deposits on call</i>	429
Jumlah Rupiah	773
Mata Uang Asing	
Giro	336
Deposito dan <i>deposits on call</i>	2.046
Jumlah Mata Uang Asing	2.382
Jumlah	3.155

Keterangan	Rupiah	Dolar Amerika Serikat	Euro
Tingkat suku bunga per tahun	0,00 - 6,25	0,00 - 2,25	0,25

Perincian simpanan dari bank lain dalam mata uang asing per 30 September 2010 adalah Rp1.801 miliar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Rp326 miliar dalam mata uang Dolar Singapura, Rp254 miliar dalam mata uang Yen Jepang, Rp1 miliar dalam mata uang Dolar Hong Kong.

Kewajiban Derivatif

Dalam melakukan usaha bisnis, BNI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing, *swap* atas tingkat bunga dan transaksi *spot* untuk keperluan pembiayaan, perdagangan dan lindung nilai.

Kewajiban Derivatif per 30 September 2010 adalah sebesar Rp233 miliar yang terdiri dari :

(dalam miliaran Rupiah)

Instrumen	
Terkait Nilai Tukar	
Kontrak berjangka – beli USD	1
Kontrak berjangka – jual USD	-
<i>Swap</i> mata uang asing – jual USD	-
<i>Spot</i> mata uang asing – beli USD	-
<i>Spot</i> mata uang asing – jual USD	-
<i>Spot</i> mata uang asing – jual EUR	-
Terkait Suku Bunga	
<i>Swap</i> mata uang asing dan suku bunga USD	10
<i>Swap</i> mata uang asing dan suku bunga JPY	22
<i>Swap</i> atas suku bunga USD	200
Bersih	233

Kewajiban akseptasi

Kewajiban akseptasi per 30 September 2010 adalah sebesar Rp1.719 miliar. Kewajiban akseptasi dinyatakan sebesar nilai nominal L/C atau nilai realisasi L/C yang diaksep oleh bank pengaksep.

Surat-surat berharga yang diterbitkan

Surat-surat berharga yang diterbitkan per 30 September 2010 adalah sebesar Rp1.277 miliar yang terdiri dari:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	
Obligasi-BNI, setelah dikurangi premi penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp1	999
Obligasi-Anak Perusahaan, setelah dikurangi premi penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp2	278
Jumlah	1.277

Pada tanggal 14 Juli 2003, BNI menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar Rp1 triliun dan tercatat di Bursa Efek Surabaya (sekarang BEI). Obligasi tersebut bersifat tidak dijamin dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2011. Obligasi tersebut memiliki tingkat bunga tetap sebesar 13,125% per tahun dan dibayarkan setiap kwartal. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh PT Pefindo dengan rating idA- (A minus). Pada tanggal 30 September 2010 peringkat Obligasi ini oleh PT Pefindo adalah idAA (double A). Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 10 Mei 2007, Anak Perusahaan (BNI Securities) menerbitkan dan mendaftarkan obligasi I BNI Securities tahun 2007 dengan tingkat bunga tetap 12,00% per tahun dengan nominal sebesar Rp300 miliar pada Bursa Efek Surabaya (BEI). Bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap triwulan mulai tanggal 10 Agustus 2007. Obligasi tersebut berjangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2012. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh PT Pefindo dengan rating idBBB+ (BBB plus). Pada tanggal 30 September 2010 peringkat Obligasi ini oleh PT Pefindo adalah idBBB (triple B).

Semua surat-surat berharga yang diterbitkan adalah dalam mata uang Rupiah dengan tingkat suku bunga per tahun 12,00-13,125%.

Manajemen BNI dan Anak Perusahaan berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi dan BNI dan Anak Perusahaan telah melakukan kewajiban pembayaran bunga sesuai dengan yang telah disepakati.

Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima per 30 September 2010 adalah sebesar Rp5.185 miliar yang terdiri dari:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	
Rupiah	
Kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya	55
Pinjaman penerusan	34
Lain-lain	166
Jumlah Rupiah	255
Mata uang asing	
<i>Bankers acceptance</i>	2.153
Pinjaman penerusan	94
Pinjaman luar negeri dan lain-lain	2.683
Jumlah mata uang asing	4.930
Jumlah	5.185

Kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya

Merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia terutama ditujukan untuk debitur BNI sehubungan dengan program kredit Pemerintah untuk pinjaman investasi usaha kecil, pinjaman modal kerja dan pinjaman pengusaha kecil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, manajemen program kredit likuiditas telah dialihkan ke PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Badan Usaha Milik Negara, yang akan jatuh tempo dalam beberapa tanggal, berdasarkan penyelesaian dari program-program tersebut. Tingkat bunga atas fasilitas ini berkisar antara 3% sampai 7% per tahun.

Pinjaman penerusan

Pinjaman penerusan terdiri dari fasilitas pinjaman dalam Rupiah dan mata uang asing yang diperoleh dari beberapa lembaga pembiayaan internasional melalui Bank Indonesia dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (dahulu PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), Badan Usaha Milik Negara) yang ditujukan untuk membiayai proyek-proyek tertentu di Indonesia dan untuk membiayai wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan *letters of credit* ekspor dan impor. Pinjaman ini memiliki beberapa jangka waktu jatuh tempo mulai dari 2004 sampai 2017.

Tingkat bunga rata-rata per tahun atas fasilitas tersebut berkisar antara 1,25% sampai dengan 7,83% pada tahun-tahun 2010, 2009, 2008 dan 2007. Bunga dibayar setiap enam bulan. Pinjaman penerusan pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 di atas mencakup pinjaman penerusan dari Asian Development Bank untuk pembiayaan *Small Medium Enterprise Export Development Project* yang diterima pada tahun 2004. Berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara BNI dan Departemen Keuangan No. SLA-1162/DP3/2004 tertanggal 5 Februari 2004, Pemerintah telah menyetujui BNI sebagai bank pelaksana dengan jumlah fasilitas tidak melebihi USD20 juta dan jangka waktu penarikan dana selama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu pinjaman penerusan ini adalah 15 (lima belas) tahun, termasuk masa tenggang selama 3 (tiga) tahun.

Bankers acceptance

Bankers acceptance merupakan pinjaman antar bank yang diperoleh BNI dari bank-bank luar negeri yang ditujukan untuk meningkatkan likuiditas.

Pinjaman luar negeri dan lain-lain

Termasuk dalam pinjaman luar negeri dan lain-lain adalah fasilitas pinjaman di bawah ini:

Pada tanggal 4 September 2008, BNI memiliki pinjaman bilateral yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan umum dan kebutuhan *trade finance*, masing-masing dengan Standard Chartered Bank Singapura sebesar USD150 juta dengan tingkat suku bunga 3,31% dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Maret 2011. Selanjutnya untuk membiayai hal yang sama, pada tanggal 18 Mei 2009 BNI memiliki pinjaman bilateral dengan Standard Chartered Bank Jakarta sebesar USD150 juta dengan tingkat suku bunga LIBOR ditambah 2,75% dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2014.

Tingkat Suku Bunga per tahun

Keterangan	Rupiah	Dolar Amerika Serikat	Euro
Tingkat suku bunga per tahun	2,95-11,00	1,04-7,75	1,25-1,50

Pembatasan dan persyaratan perjanjian diatas antara lain bahwa BNI dapat menyakini kepemilikan saham, langsung dan tidak langsung yang dimiliki dan dikontrol oleh Pemerintah Indonesia adalah sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen).

Hutang Pajak

Hutang Pajak yang diterima per 30 September 2010 adalah sebesar Rp563 miliar yang terdiri dari:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	
Pajak Penghasilan Badan	
- Pasal 29	429
- Pasal 25	116
Pajak Penghasilan lainnya	9
	554
Anak Perusahaan	8
Jumlah	563

Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi

Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi per 30 September 2010 adalah sebesar Rp149 miliar.

Kewajiban Pajak Tangguhan

Kewajiban Pajak Tangguhan per 30 September 2010 adalah sebesar Rp19 miliar.

Kewajiban Lain-lain

Kewajiban lain-lain per 30 September 2010 adalah sebesar Rp6.345 miliar.

2. Kewajiban Komitmen dan kontinjensi

Pada tanggal 30 September 2010, saldo kewajiban komitmen dan kontinjensi adalah sebesar Rp35.211 miliar yang terdiri dari kewajiban komitmen sebesar Rp26.102 miliar dan kewajiban kontinjensi sebesar Rp9.109 miliar dengan perincian sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	
Kewajiban komitmen	
- Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	21.467
- <i>Irrevocable letters of credit</i> yang masih berjalan	4.634
Jumlah kewajiban komitmen	26.102
Kewajiban kontinjensi	
- Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:	
- <i>Performance bonds</i>	4.082
- <i>Standby letters of credit</i>	1.691
- <i>Advance payment bonds</i>	1.346
- <i>Bid bonds</i>	1.031
- <i>Risk Sharing</i>	97
- <i>Shipping guarantee</i>	68
- Garansi bank lainnya	794
Jumlah kewajiban kontinjensi	9.109

Seluruh kewajiban Perseroan per tanggal laporan keuangan telah diungkapkan dalam Prospektus

BNI tidak memiliki pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Setelah tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan Setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, BNI tidak memiliki kewajiban dan ikatan lain kecuali kewajiban dan ikatan yang timbul dari kegiatan operasional BNI serta yang telah dinyatakan didalam Prospektus ini dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan.

BNI telah melunasi seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo. Tidak ada kewajiban yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi oleh BNI.

Manajemen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BNI serta sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam BNI, dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan serta disajikan dalam Prospektus ini.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian BNI pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan pada tanggal 30 September 2010 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya telah diaudit, serta dari laporan keuangan konsolidasian BNI pada tanggal 30 September 2009 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Kinerja keuangan konsolidasian yang telah dicapai oleh BNI untuk periode 9 bulan tersebut di atas belum tentu mengindikasikan kinerja keuangan konsolidasian yang akan dicapai oleh BNI untuk satu tahun penuh.

Laporan keuangan konsolidasian BNI pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta pada tanggal 30 September 2010 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" secara prospektif, mulai tanggal 1 Januari 2010 yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini dan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian BNI dan anak perusahaan untuk 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Laporan keuangan konsolidasian BNI pada tanggal 30 September 2009 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit, telah direview KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI, dengan hasil tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut agar penyajiannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Suatu review yang dilaksanakan berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang lebih sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan, seperti yang tercantum dalam laporan review akuntan independen terkait (yang disajikan dalam satu laporan dengan laporan auditor independen tersebut di atas) yang tercantum dalam Prospektus ini, KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) (anggota dari Ernst & Young Global Limited), tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut. Oleh karena itu, tingkat keandalan laporan review mereka atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut sangat terbatas mengingat adanya keterbatasan dalam sifat dan ruang lingkup prosedur yang diterapkan dalam suatu review yang dilaksanakan berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI.

1. Umum

BNI merupakan bank dan penyedia jasa keuangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia per 30 Juni 2010, BNI merupakan salah satu bank terbesar berdasarkan jumlah cabang dan jaringan ATM dan bank terbesar keempat di Indonesia dalam hal total aset, total pinjaman/pembiayaan/piutang dan simpanan nasabah. Per tanggal 30 September 2010, BNI mencatat total aset sebesar Rp224.811 miliar, total pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan sebesar Rp126.074 miliar dan total simpanan nasabah sebesar Rp183.772 miliar.

Pada tahun 2007, BNI mengimplementasikan strategi untuk mengurangi proporsi deposito berjangka dalam portofolio simpanan nasabah dari 49,8% pada tanggal 31 Maret 2007 menjadi 37,7% per tanggal 31 Desember 2007 untuk mengurangi biaya pendanaan BNI. BNI juga menambah penyisihan, di atas nilai minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kebijakan ini meningkatkan beban penyisihan BNI dan secara signifikan memperbaiki *coverage ratio* BNI (yaitu rasio penyisihan atas kemungkinan kerugian pinjaman yang diberikan terhadap *gross non-performing loan* BNI) dari 59,6% pada tanggal 31 Desember 2006 menjadi 71,9% pada tanggal 31 Desember 2007. Pada bulan Agustus 2007, BNI melakukan penawaran umum sekunder untuk penerbitan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*rights issue*) dan divestasi oleh Pemerintah atas sebagian saham BNI yang dimiliki. Penawaran ini dilakukan secara paralel, yang memberikan kontribusi sebesar Rp4.034 miliar bagi BNI dan meningkatkan kepemilikan publik atas saham BNI dari 0,9% menjadi 23,6%.

Selama tahun 2008, pinjaman yang diberikan tumbuh sebesar 26,3%. Margin bunga bersih meningkat dari 5,4% untuk tahun 2007 menjadi 6,5% untuk tahun 2008 yang disebabkan adanya kenaikan pada LDR BNI dan penurunan GWM Bank Indonesia. BNI meningkatkan penyisihan kerugian diatas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan meningkatkan penyisihan kerugian pada anak perusahaan agar dapat memperbaiki *coverage ratio* BNI menjadi 101,0% per 31 Desember 2008, meningkat dari 71,9% per 31 Desember 2007. Meskipun kebijakan ini memberi pengaruh yang kurang baik terhadap pendapatan bersih, pendorong bisnis utama BNI meyakinkan bahwa pertumbuhan BNI tetap positif seperti yang ditunjukkan oleh laba sebelum biaya penyisihan yang meningkat sebesar 50,3% dari Rp4.185 miliar di tahun 2007 menjadi Rp6.291 miliar di tahun 2008. Biaya terhadap pendapatan BNI juga meningkat dari 65,8% untuk tahun 2007 menjadi 53,7% untuk tahun 2008. Laba bersih setelah pajak BNI meningkat 36,1% dari Rp898 miliar di tahun 2007 menjadi Rp1.222 miliar pada tahun 2008.

Di tahun 2009, portofolio pinjaman yang diberikan tumbuh 7,9%, di bawah pertumbuhan 26,3% yang BNI alami di tahun 2008. Pendapatan bersih tumbuh menjadi Rp2.484 miliar untuk tahun 2009, meningkat sebesar 103,2% dari pendapatan bersih sebesar Rp1.222 miliar pada tahun 2008. Simpanan nasabah meningkat 15,5% dari tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan giro dan tabungan memberikan kontribusi 55,1% dari simpanan nasabah BNI per 31 Desember 2009. Pendapatan operasional lainnya meningkat 21,0% dari Rp3.549 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp4.295 miliar pada tahun 2009. Rasio beban terhadap pendapatan BNI sedikit meningkat dari 53,7% pada tahun 2008 menjadi 51,8% pada tahun 2009. BNI percaya struktur permodalan BNI tetap baik dengan rasio kecukupan modal sebesar 13,9% pada tanggal 31 Desember 2009, jauh di atas ketentuan minimum Bank Indonesia sebesar 8,0%. *Coverage ratio* BNI meningkat menjadi 120,1% pada tanggal 31 Desember 2009 dari 101,0% pada tanggal 31 Desember 2008.

Pada periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010, pertumbuhan pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan tumbuh 4,3%, melambat dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu sebagai akibat dari strategi BNI untuk meningkatkan kualitas portofolio kredit komersial dan konsumen ke nasabah-nasabah utama dalam rangka meningkatkan kualitas pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan dan mendorong debitur pembiayaan proyek untuk membayar kredit setelah terselesaikannya proyek. Pendapatan bersih meningkat menjadi Rp2.954 miliar, naik sebesar 59,3% dari Rp1.855 miliar dalam periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009. Simpanan dari nasabah meningkat sebesar 12,3% dari 30 September 2009 yang dibandingkan dengan 30 September 2010. Giro dan tabungan mengkontribusikan 56,5% dari total simpanan nasabah BNI. Pendapatan operasional lainnya meningkat 8,2% dari Rp3.146 miliar pada periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp3.404 miliar pada periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. BNI percaya struktur permodalan BNI tetap baik dengan rasio kecukupan modal sebesar 12,4% pada tanggal 30 September 2010. *Coverage ratio* BNI meningkat menjadi 118,3% pada tanggal 30 September 2010 dari 110,0% pada tanggal 30 September 2009.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Operasi

Hasil operasi dan perbandingan kinerja keuangan BNI dari waktu ke waktu telah dan akan terus dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kondisi ekonomi di Indonesia, perubahan kebijakan pemerintah dan badan regulasi di sektor perbankan, kemampuan BNI untuk memperoleh sumber pendanaan dengan harga yang terjangkau, tingkat NPL BNI, penyisihan kerugian, penghapusbukuan dan restrukturisasi pinjaman, tingkat pinjaman dan deposito BNI dan tingkat suku bunga dan kompetisi dalam sektor perbankan di Indonesia

a. Perekonomian Indonesia

Kondisi keuangan dan hasil operasi BNI telah dan akan terus dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi keuangan dan perekonomian di Indonesia. Sebagai contoh, krisis ekonomi regional yang dimulai tahun 1997 menyebabkan kesulitan yang mendalam bagi sektor perbankan Indonesia, mengharuskan adanya restrukturisasi dalam sektor perbankan oleh Pemerintah. Karena itu, Pemerintah, dengan dukungan dari IMF, World Bank dan Asian Development Bank, membentuk suatu program rekapitalisasi yang dirancang untuk bank-bank komersial, baik swasta maupun BUMN. Hal tersebut mengakibatkan BNI direkapitalisasi pada tahun 2000.

Pada tahun 2009, meskipun krisis keuangan global umumnya tidak merugikan bisnis dan kesehatan BNI atau bank-bank lain di Indonesia sebagaimana dampaknya pada bank-bank dan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan negara-negara tertentu lainnya, krisis tersebut tetap saja memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor tertentu pada perekonomian Indonesia dan terhadap stabilitas pasar keuangan Indonesia pada akhir tahun 2008 dan 2009. Selain itu, sementara Indonesia mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2007 sampai enam bulan pertama tahun 2010, perekonomian menghadapi fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dan tingkat inflasi (diukur dengan perubahan yoy pada indeks harga konsumen).

Meskipun PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,5% pada tahun 2008, tahun tersebut merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Portofolio kredit BNI tumbuh sebesar 26,3% selama tahun 2008. Pertumbuhan agresif dalam portofolio kredit BNI di tahun 2007 dan 2008 bertepatan dengan pertumbuhan yang hebat di industri perbankan Indonesia pada umumnya dan mempengaruhi tingkat kredit bermasalah BNI. Tingkat inflasi tahunan sebesar 11,1% pada tahun 2008 dipengaruhi oleh peningkatan yang signifikan dalam harga minyak dan komoditas lainnya yang mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2008. Pada semester kedua tahun 2008, nilai tukar Rupiah melemah secara signifikan terhadap dolar AS, turun dari Rp9.018 pada bulan Agustus 2008 menjadi Rp10.950 per Dolar AS pada tanggal 31 Desember karena dampak krisis ekonomi global yang terjadi tahun 2008. Hal ini memiliki dampak signifikan terhadap industri perbankan Indonesia, yang juga menderita dari lingkungan ketatnya likuiditas akibat krisis ekonomi global. Hal ini memicu persaingan ketat untuk mendapatkan pendanaan antara bank-bank di Indonesia.

Pada tahun 2009, industri perbankan Indonesia memulai tahun dengan menghadapi masalah likuiditas. Kondisi mulai membaik pada akhir tahun, dengan tingkat suku bunga BI sampai pada level 6,50% (dibandingkan 9,25% per 31 Desember 2008 dan 8,00% per 31 Desember 2007) dan tingkat inflasi tahunan menurun sampai 2,8% pada tahun 2009. Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mempunyai pertumbuhan PDB yang positif pada tahun 2009, dengan pertumbuhan sebesar 4,5%. Indikator Makroekonomi di Indonesia tetap relatif stabil pada periode 9 bulan pertama pada tahun 2009, dengan stabilnya tingkat suku bunga BI pada 6,50% dan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS menguat per 30 September 2010. Walaupun tingkat inflasi naik menjadi 5,3% untuk pertama kalinya selama 9 bulan pada tahun 2010, PDB Indonesia tumbuh 5,9% untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010.

b. Kebijakan Pemerintah

Industri perbankan merupakan industri yang diatur secara ketat dan hasil operasi serta kondisi keuangan BNI sangat dipengaruhi oleh kebijakan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai contoh, Bank Indonesia menetapkan kebijakan *"one debtor policy"* yang mewajibkan BNI untuk mengklasifikasikan pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan kepada kelompok-kelompok debitur ke dalam klasifikasi yang terendah untuk setiap pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan kepada masing-masing kelompok (atau debitur dalam kelompok tersebut) baik oleh BNI maupun oleh bank Indonesia lainnya. Sehingga, apabila salah satu debitur (atau debitur dalam kelompok tersebut) saat ini memiliki pinjaman dengan BNI dalam kategori lancar namun memiliki pinjaman dengan bank-bank lain dalam kategori bermasalah, BNI diharuskan untuk mengklasifikasikan pinjaman tersebut ke dalam kategori bermasalah, meskipun seluruh pembayaran kredit telah dilakukan tepat waktu. Pada bulan April 2007, Bank Indonesia menyempurnakan kebijakan ini sehingga memungkinkan debitur untuk memiliki klasifikasi kredit yang berbeda dari afiliasinya dalam kondisi dimana proyek dan arus kas atas proyeknya terpisah dari afiliasi tersebut (*"one project concept policy"*). Sebagai akibat dari perubahan peraturan di tahun 2007 tersebut, BNI mereklasifikasi kredit dalam jumlah yang besar dari kategori kredit bermasalah menjadi kredit tidak bermasalah (*performing*).

Selain itu, berdasarkan hukum di Indonesia, bank-bank BUMN tidak diizinkan untuk memberikan *"haircuts"* atau pengurangan nilai pokok pinjaman dalam merestrukturisasi kredit, bila tidak dalam keadaan-keadaan istimewa tertentu. Akibat kebijakan tersebut BNI tidak dapat secara efektif merestrukturisasi kredit-kredit tertentu, sehingga membuat banyak kredit-kredit tersebut kembali digolongkan menjadi NPL dan dihapusbukukan. BNI dapat terus memiliki NPL sebagai akibat dari kebijakan ini. Meskipun telah terjadi diskusi antara bank-bank BUMN dan badan regulator tentang wacana perubahan undang-undang dan peraturan untuk memungkinkan bank-bank BUMN melakukan *"haircuts"*, tidak ada jaminan bahwa perubahan tersebut akan dilakukan. Namun, jika undang-undang dan peraturan tentang *"haircuts"* diubah di masa depan, BNI akan dapat merestrukturisasi kredit yang sebelumnya telah dihapusbukukan dari neraca BNI dan BNI dapat mengakui pendapatan tambahan pada laporan laba rugi.

Mulai bulan November tahun 2010, peraturan Bank Indonesia mewajibkan bank-bank di Indonesia untuk menjaga GWM, sebesar minimal 8,0% dari simpanan nasabah berdenominasi Rupiah (tidak termasuk kewajiban kepada bank lain). Mulai bulan Maret tahun 2011, peraturan Bank Indonesia mengharuskan bank-bank di Indonesia untuk menjaga LDR dalam kisaran antara 78,0% sampai 100,0%. Bank-bank di Indonesia dengan LDR dibawah 78,0% akan diwajibkan untuk memenuhi tambahan *statutory reserve* LDR yang besarnya 0,1 dikali (i) 78,0% dikurang LDR bank, dan (ii) simpanan Rupiah dari nasabah. Bank-bank di Indonesia dengan LDR lebih tinggi dari 100,0% dan CAR kurang dari 14,0% akan diwajibkan untuk memenuhi GWM yang besarnya sama dengan 0,2 dikali (i) LDR bank tersebut dikurang 100,0%, (ii) Simpanan Rupiah dari nasabah. Sampai dengan 30 September 2010, LDR sebesar 68,6%. Jika BNI tidak dapat memenuhi peraturan Bank Indonesia terkait LDR pada bulan Maret 2011, maka BNI diharuskan melakukan penyesuaian GWM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seperti hal yang terjadi pada bank-bank BUMN lainnya di Indonesia, sebagai dampak dari krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997, sebagian besar kredit korporasi BNI menjadi kredit bermasalah dan Rasio Kecukupan Modal (CAR) menurun tajam hingga melewati tingkat minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah memutuskan untuk merekapitalisasi sejumlah bank BUMN, termasuk BNI, dengan program rekapitalisasi. Pemegang saham publik mengalami dilusi kepemilikan dari sekitar 25% sebelum rekapitalisasi menjadi kurang dari 1% setelah rekapitalisasi. Setelah rekapitalisasi, persentase aset dan pendapatan bunga BNI secara substansial dan signifikan terdiri atas dan diperoleh dari Obligasi Pemerintah. Pemerintah dapat merubah atau melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan material dalam Obligasi Pemerintah BNI dengan persetujuan BNI atau dengan undang-undang kapan pun dan memiliki kebijakan dalam menentukan jatuh tempo Obligasi Pemerintah BNI untuk menggantikan Obligasi Pemerintah BNI dengan Obligasi lainnya yang mungkin tidak memiliki spesifikasi atau harga pasar yang sama. Per 30 September 2010, sejumlah Rp33.037 miliar atau 14,7% dari total aset BNI sebesar Rp224.811 miliar merupakan Obligasi Pemerintah yang sebagian diantaranya diperoleh melalui pasar sekunder. Pendapatan bunga dari Obligasi Pemerintah memberikan kontribusi masing-masing sebesar Rp3.553 miliar atau 24,6%, Rp3.500 miliar atau 21,7% dan Rp3.174 miliar atau 16,8% dari total pendapatan bunga pada tahun 2008 dan 2009 dan sebesar Rp1.776 miliar atau 12,3% dari total pendapatan bunga dan syariah sebesar Rp14.400 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010.

c. Kredit bermasalah, penyisihan kerugian, hapus buku, penerimaan kembali dan restrukturisasi pinjaman

Hasil operasi dan kondisi keuangan BNI telah dan akan terus dipengaruhi oleh tingkat NPL, dan penyisihan kerugian, hapus buku dan penerimaan kembali BNI. Tingkat NPL BNI dipengaruhi oleh, antara lain, tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum, kendala dalam masalah-masalah restrukturisasi pinjaman, jumlah NPL yang dihapuskan dan kebijakan persetujuan pemberian dan monitor kredit BNI.

Per 30 September 2010, kredit bermasalah BNI adalah sebesar Rp5.520 miliar, dengan rasio NPL terhadap total kredit sebesar 4,4% Dari total kredit bermasalah Rp2.915 miliar atau 52,8% merupakan kredit UKM. Tabel berikut menunjukkan tingkat dan perubahan NPL *gross* pada tanggal-tanggal yang tertera pada periode yang bersangkutan:

	Per 31 Desember			Per 30 September	
	2007	2008	2009	2009 (tidak diaudit)	2010
Saldo awal	6.353	7.565	5.596	5.596	5.762
NPL baru	2.323	2.277	3.497	2.990	3.731
Penghapus bukuan	(1.111)	(4.246)	(3.331)	(728)	(3.974)
Saldo akhir	7.565	5.596	5.762	7.858	5.520

Tingkat NPL BNI telah dipengaruhi oleh strategi BNI di masa lalu dalam menumbuhkan portofolio kredit BNI secara agresif selama tahun 2007 dan sebagian tahun 2008, khususnya dalam pinjaman kredit usaha kecil dan menengah. Portofolio kredit BNI tumbuh sebesar 33,4% pada tahun 2007 dan 26,3% pada tahun 2008 yang terjadi periode pertumbuhan industri keuangan yang tinggi di Indonesia. NPL BNI juga dipengaruhi oleh penghapusan proses persetujuan kredit "four eyes" pada bulan Mei 2008. Meskipun BNI berencana untuk mulai menerapkan versi "four eyes" yang telah dimodifikasi pada bulan Januari 2011, sampai saat itu, kredit yang disetujui tidak akan tunduk pada proses tersebut. Sebagai tambahan, pada tahun 2008 BNI merevisi prosedur-prosedur kredit untuk memastikan bahwa karyawan divisi risiko kredit BNI agar menerapkan aspek-aspek kualitatif kriteria Bank Indonesia dalam klasifikasi kredit dengan lebih ketat. Hal ini mengakibatkan reklasifikasi atas kredit-kredit tertentu. Krisis keuangan global pada tahun 2008 dan 2009 juga mempengaruhi segmen-segmen tertentu dari nasabah BNI, termasuk nasabah dengan bisnis berbasis ekspor dan para produsen komoditas.

Meskipun tingkat NPL BNI menurun dari Rp7.565 miliar pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp5.596 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, meningkat sedikit menjadi Rp5.762 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dan menurun sedikit menjadi Rp5.520 miliar pada tanggal 30 September 2010, tingkat NPL berkurang sebagian sejalan dengan strategi BNI untuk meningkatkan kualitas aset dengan penghapusbukuan sebagian besar porsi NPL BNI, yang berakibat pada pengurangan NPL pada neraca BNI. BNI menghapus total Rp1.111 miliar NPL pada tahun 2007, Rp4.246 miliar NPL di tahun 2008, Rp3.331 miliar NPL pada tahun 2009 dan Rp3.974 miliar NPL pada periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010.

NPL BNI memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah penyisihan kerugian. Peraturan Bank Indonesia tentang klasifikasi kualitas kredit mewajibkan bank untuk mengkategorikan setiap kredit ke dalam salah satu dari lima kategori dan untuk menentukan beban penyisihan pinjaman minimum sebagai persentase dari pinjaman berdasarkan kategori-kategori tersebut. Persentase dikenakan pada biaya pinjaman diamortisasi setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, kecuali untuk kredit yang digolongkan lancar dan tidak dijamin atau yang dijamin dengan agunan non-tunai, dimana persentase dikenakan terhadap saldo pinjaman.

Mulai 1 Januari 2010, semua bank diminta untuk mengadopsi standar akuntansi baru dalam PSAK 55, dimana BNI pertama-tama mengevaluasi adanya bukti objektif individual dalam penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan apakah ada bukti objektif individual ataupun kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. BNI mengkategorikan semua kredit korporasi dan kredit usaha menengah sebagai individual yang signifikan untuk penilaian individu. Jika BNI menemukan bahwa tidak ada bukti objektif dalam penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik signifikan atau tidak, BNI akan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sama dan menguji mereka secara kolektif atas penurunan nilai. Aset yang diuji secara individual, BNI memperkirakan arus kas masa depan pinjaman tersebut dan BNI membuat penyisihan kerugian dari pinjaman berdasarkan estimasi tersebut. BNI mengevaluasi Rp74.881 miliar pinjaman secara individual dalam periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 dan menemukan bukti obyektif penurunan nilai dalam pinjaman sebesar Rp5.215 miliar tersebut. BNI menyisihkan sebesar Rp4.271 miliar dari pinjaman tersebut. Sisa pinjaman yang BNI nilai secara individual yang tidak memiliki bukti obyektif atas penurunan nilai dimasukkan ke dalam kelompok pinjaman yang dinilai secara kolektif. Jumlah total kelompok pinjaman yang dinilai secara kolektif adalah sebesar Rp120.859 miliar, dimana Rp2.258 miliar diturunkan nilainya sebagai beban penyisihan kerugian.

BNI menerapkan metode penyisihan kerugian sesuai dengan peraturan Bank Indonesia hanya terhadap kredit yang BNI nilai secara kolektif, sebagai bagian dari ketentuan peralihan, dan diharuskan untuk menerapkan kriteria penilaian baru untuk pinjaman yang dinilai secara kolektif yang akan mengharuskan BNI untuk mengakui penyisihan berdasarkan estimasi kerugian untuk kumpulan pinjaman yang dinilai secara kolektif selambat-lambatnya 1 Januari 2012.

Sebagai hasil dari kriteria penilaian baru untuk pengadaan berdasarkan PSAK 55, BNI harus membuat penyisihan tambahan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. BNI berharap bahwa penyisihan kerugian akan dapat meningkat karena ketentuan transisi ini berakhir dan BNI diharuskan untuk mengadopsi kriteria penilaian arus kas baru untuk semua pinjaman, termasuk pinjaman yang dinilai secara kolektif, mulai 1 Januari 2012.

Tabel berikut menyajikan perubahan penyisihan kerugian BNI untuk periode yang tertera.

(dalam miliar Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2007	2008	2009	2009 (tidak diaudit)	2010
Saldo awal	3.846	5.436	5.652	5.652	6.920
Efek dari penyesuaian transisi penerapan PSAK No. 50	-	-	-	-	315
Penyisihan kerugian untuk tahun berjalan	2.039	3.865	3.263	3.135	2.214
Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan	482	555	742	410	1.086
Cadangan gross untuk tahun berjalan	6.367	9.856	9.657	9.197	10.535
Penghapusbukuan untuk tahun berjalan	(1.111)	(4.246)	(3.331)	(728)	(3.974)
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	179	41	594	179	(32)
Saldo akhir	5.436	5.652	6.920	8.647	6.529

Kemampuan BNI dalam merestrukturisasi kredit juga berdampak kepada tingkat dan hasil operasi BNI. BNI memiliki restrukturisasi kredit yang dapat disesuaikan untuk debitur berdasarkan negosiasi dan perjanjian antara debitur dan BNI. Untuk kredit-kredit berjumlah besar, BNI dapat menggunakan jasa konsultan interasional atau pihak ketiga yang ahli dalam melakukan *due-dilligence* atas kinerja keuangan, bisnis dan operasional debitur dan membuat laporan rekomendasi skema pembayaran kredit oleh debitur tersebut. Setelah strategi restrukturisasi telah disetujui, maka BNI akan mempersiapkan dokumen-dokumen untuk mengimplementasikan restrukturisasi tersebut. Per 30 September 2010, kredit BNI yang telah direstrukturisasi secara kumulatif berjumlah sebesar Rp8.377 miliar. Namun demikian, "haircuts" atau pengurangan pokok pinjaman saat kredit direstrukturisasi akan membatasi kemampuan BNI dalam merestrukturisasi kredit tersebut.

Apabila ada penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan, jumlah tersebut dikreditkan ke laporan laba rugi dan mengurangi penyisihan kerugian untuk periode yang bersangkutan. Pinjaman yang telah di hapusbukukan dari neraca adalah sebesar Rp1.111 miliar, Rp4.246 miliar, Rp 3.331 miliar, dan Rp3.974 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010.

d. Tingkat suku bunga, deposito dan pinjaman dan perubahan dalam tingkat suku bunga

Hasil operasi BNI sangat tergantung pada pendapatan bunga dan syariah bersih. Pendapatan bunga dan syariah bersih pada intinya dipengaruhi oleh imbal hasil aset produktif, jumlah aset produktif rata-rata, biaya hutang berbunga dan volume hutang rata-rata. Pendapatan dan biaya BNI bergantung pada tingkat suku bunga pinjaman dan deposito, dengan menggunakan suku bunga Bank Indonesia dan suku bunga SBI sebagai patokan. Suku bunga Bank Indonesia merupakan faktor yang fluktuatif. Tabel berikut menunjukkan tingkat suku bunga Bank Indonesia pada tanggal-tanggal yang tercantum:

	Pada tanggal (dalam %)			
	31 Maret	30 Juni	30 September	31 Desember
2007	9,00	8,50	8,25	8,00
2008	8,00	8,50	9,25	9,25
2009	7,75	7,00	6,50	6,50
2010	6,50	6,50	6,50	-

Sumber : Bank Indonesia

BNI menetapkan tingkat suku bunga pinjaman menggunakan suatu basis untuk tingkat suku bunga pinjaman ditambah premium risiko. BNI menentukan basis yang digunakan untuk tingkat suku bunga pinjaman dengan memperhitungkan biaya pendanaan (termasuk Giro Wajib Minimum dan biaya untuk program penjaminan simpanan dari Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS")), biaya *overhead* dan *profit margin*. Premium risiko untuk setiap pinjaman bergantung pada banyak faktor termasuk tingkat kepercayaan kepada debitur, jaminan yang diberikan atas pinjaman dan rencana penggunaan dana. Dalam menentukan tingkat bunga untuk pinjaman nasabah, BNI menganalisa dan membandingkan tingkat bunga pinjaman yang diberikan pesaing BNI dan strategi BNI di samping kualitas kredit nasabah tersebut.

Sebagian besar kebutuhan pendanaan BNI didapat dari pendanaan jangka pendek dan menengah, terutama dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan giro. Saldo deposito berjangka rata-rata sebagai persentasi dari simpanan nasabah rata-rata adalah sebesar 43,4% untuk tahun 2007, 40,4% untuk tahun 2008, 45,4% untuk tahun 2009 dan 43,2% per 30 September 2010. Biaya pendanaan deposito berjangka rata-rata BNI adalah sebesar 7,5% pada tahun 2007, 6,4% pada tahun 2008, 7,0% pada tahun 2009 dan 5,6% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Biaya pendanaan untuk seluruh simpanan nasabah adalah 4,7% untuk tahun 2007, 4,0% untuk tahun 2008, 4,5% untuk tahun 2009, dan 3,6% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. BNI terus berupaya untuk mencari sumber pendanaan dengan harga yang atraktif. Upaya-upaya tersebut termasuk menawarkan promosi untuk BUMN atas produk-produk dalam bentuk simpanan, jasa simpanan langsung untuk nasabah korporasi dan juga dengan meningkatkan penawaran atas kegiatan *cash management*.

BNI memiliki aset, seperti surat berharga dan Obligasi Pemerintah, yang dikenakan bunga tetap. Marjin pendapatan bunga bersih BNI dipengaruhi secara positif oleh aset tetap yang dimilikinya pada saat tingkat suku bunga menurun. Sebaliknya, marjin pendapatan bunga bersih BNI dipengaruhi secara negatif oleh aset tetap yang dimiliki BNI saat tingkat suku bunga sedang meningkat. Selain itu, BNI menggunakan metode *mark-to-market* untuk surat-surat berharga BNI yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan obligasi pemerintah dengan nilai wajar melalui laba rugi. Pada umumnya, nilai efek-efek dengan bunga tetap meningkat pada kondisi tingkat suku bunga yang mengalami penurunan dan menurun pada kondisi tingkat suku bunga yang meningkat. Setiap keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada efek-efek yang tersedia untuk dijual dibukukan langsung dalam ekuitas dan keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat penjualannya. Setiap keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari penilaian obligasi pemerintah dengan nilai wajar melalui laba rugi dibukukan langsung dalam laporan laba rugi BNI.

e. Perubahan tingkat nilai tukar dan harga surat berharga

Tingkat nilai tukar dan harga efek-efek sangat fluktuatif di Indonesia pada tahun-tahun terakhir. Fluktuasi-fluktuasi ini berpengaruh pada, antara lain, permintaan atas produk dan jasa BNI, nilai imbal hasil atas aset BNI, ketersediaan dan biaya pendanaan dan kondisi keuangan konsumen BNI.

Risiko nilai tukar BNI pada umumnya timbul dari transaksi valuta asing pada Divisi Korporasi dan Divisi Usaha Menengah BNI dan dari *proprietary trading* BNI di pasar valuta asing antar-bank. BNI juga terpengaruh oleh dampak transaksi valuta asing pada laporan laba rugi sejauh aset yang berdenominasi dalam valuta asing tidak sama besarnya dengan hutang yang berdenominasi dalam valuta asing. BNI mempunyai batas untuk posisi devisa netto, baik *on-balance sheet* maupun *off-balance sheet*. Pada tanggal 30 September 2010, posisi devisa netto mata uang asing BNI adalah sebesar 8,1% dari *total regulatory capital*.

Posisi devisa netto mata uang asing BNI di dalam neraca adalah sebesar Rp5.435 miliar pada tanggal 31 Desember 2007, Rp7.072 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, Rp7.443 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp5.532 miliar pada tanggal 30 September 2010. Setiap kenaikan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya memiliki dampak negatif terhadap neraca dan laporan laba rugi dan setiap pengurangan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lain memiliki dampak positif pada neraca dan laporan laba rugi. BNI mengakui keuntungan selisih kurs sebesar Rp266 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, Rp630 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, Rp262 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp91 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010.

f. Persaingan Usaha

Walaupun sulit untuk diukur, persaingan mempunyai dampak yang signifikan terhadap hasil operasi BNI dan akan terus mempengaruhi jenis produk, efisiensi dan profitabilitas dari bank-bank utama di Indonesia.

Pesaing BNI merupakan bank lokal dan bank asing yang beroperasi di Indonesia. Per 30 Juni 2010, empat bank terbesar di Indonesia, termasuk BNI, memiliki 43,9% dari total pinjaman yang diberikan dan 48,5% dari total deposito di sektor perbankan Indonesia. Dengan demikian, pesaing terbesar BNI merupakan tiga bank terbesar lainnya di Indonesia – Bank Mandiri, BCA dan Bank Rakyat Indonesia.

BNI bersaing dengan bank lain baik dalam penghimpunan dana dari nasabah, pemberian pinjaman kepada nasabah dan peningkatan jumlah nasabah BNI. BNI bersaing dalam beberapa hal, seperti suku bunga yang ditawarkan kepada nasabah dan suku bunga pinjaman nasabah, jaringan cabang, jasa yang ditawarkan, reputasi dan faktor lainnya. BNI memperkirakan bahwa liberalisasi industri perbankan Indonesia dapat menyebabkan persaingan ketat dalam pasar perbankan BNI di tahun-tahun mendatang. Jumlah bank asing telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia sebagai hasil dari keputusan Pemerintah untuk melonggarkan pembatasan atas kepemilikan asing dan mengizinkan bank asing untuk membuka kantor cabang di Indonesia. Persaingan dari bank asing yang ada dan maupun yang baru, berupa *joint venture* atau investasi pada bank-bank Indonesia, dapat memiliki efek buruk pada hasil operasional dan kondisi keuangan BNI.

Bank Indonesia akhir-akhir ini mendorong bank-bank BUMN untuk melakukan praktek-praktek persaingan sehat.

g. Dampak penyesuaian terhadap PSAK No. 50 dan 55

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, BNI membukukan pendapatan bunga dan *fee* yang diterima sebagai akun pendapatan bunga. Akan tetapi untuk *fee* di atas Rp50 juta, diamortisasi selama masa pinjaman menggunakan metode garis lurus dan dicatat sebagai pendapatan provisi dan komisi. BNI juga mencatat bunga dengan asumsi jumlah pokok yang tetap selama masa pinjaman. Sejak penerapan PSAK 50 dan 55 pada 1 Januari 2010, saat ini BNI mencatat bunga berdasarkan metode akuntansi tingkat bunga efektif, yang memberikan dampak terhadap pembayaran pokok selama masa pinjaman. BNI juga mengamortisasi *fee* menggunakan suku bunga efektif selama masa pinjaman dan mencatatnya sebagai pendapatan bunga. Hal ini telah mempengaruhi penyajian dari sejumlah akun dalam laporan keuangan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Sebagai contoh, pendapatan provisi dan komisi atas pinjaman yang diberikan tidak lagi dimasukkan sebagai akun terpisah dalam laporan laba rugi. Selain itu, jumlah bunga atas surat berharga yang diterbitkan juga dipengaruhi oleh perubahan dalam standar akuntansi tersebut. Karena itu, perbandingan antar akun untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 dan untuk periode lain mungkin kurang dapat diperbandingkan dengan periode lainnya. Selain itu, karena perubahan dalam pedoman Bank Indonesia yang efektif tanggal 1 Januari 2010, terdapat perbedaan antara klasifikasi beban penyisihan kerugian dan penerimaan kembali dalam laporan keuangan konsolidasian dan dalam laporan keuangan *short-form* yang dipublikasikan di situs BNI dan dalam surat kabar sesuai dengan pedoman Bank Indonesia.

3. Kebijakan Akuntansi Penting

Catatan atas laporan keuangan BNI berisi ikhtisar kebijakan akuntansi penting. Beberapa dari kebijakan ini sangat penting bagi penyajian kondisi keuangan BNI, karena kebijakan-kebijakan tersebut mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan yang kompleks dan subjektif, beberapa diantaranya dapat terkait dengan hal-hal yang sifatnya tidak pasti. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

Penurunan nilai aset keuangan (*impairment*)

Aset yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Karena dikeluarkannya kebijakan baru di Indonesia, sejak tanggal 1 Januari 2010, BNI melakukan penilaian setiap akhir triwulan untuk melihat ada bukti objektif bahwa suatu aset keuangan atau kumpulan aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Suatu aset keuangan atau kumpulan aset keuangan dikatakan mengalami penurunan nilai dan mengalami kerugian atas penurunan nilai apabila ada bukti objektif atas penurunan nilai sebagai hasil dari satu atau lebih peristiwa setelah pengakuan aset tersebut ("peristiwa kerugian") dan peristiwa kerugian tersebut mempunyai dampak pada estimasi arus kas di masa depan dari aset keuangan atau kumpulan aset keuangan yang dapat diestimasi dengan baik.

Kriteria yang digunakan dalam menentukan adanya bukti objektif kerugian atas penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a. Kesulitan keuangan signifikan dari debitur atau obligor
- b. Pelanggaran pada perjanjian keuangan, seperti gagal bayar atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok pinjaman
- c. Pemberi pinjaman manapun, untuk alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan finansial debitur, memberikan konsesi yang tidak akan dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman dalam kondisi lain.
- d. Kemungkinan bahwa debitur akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi finansial lainnya
- e. Hilangnya pasar yang aktif untuk aset keuangan tersebut karena kesulitan keuangan
- f. Data yang dapat diobservasi menunjukkan bahwa ada penurunan yang terukur dalam estimasi arus kas masa depan dari portofolio aset keuangan sejak pengakuan awal aset tersebut, walaupun penurunan belum dapat diidentifikasi dengan aset keuangan individu dalam portofolio, termasuk:
 - i. perubahan yang merugikan dalam status pembayaran peminjam dalam portofolio dan
 - ii. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berhubungan dengan wanprestasi atas aset dalam portofolio.

BNI pertama-tama mengevaluasi adanya bukti objektif individual dalam penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individu dan apakah ada bukti objektif kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individu. BNI mengkategorikan semua kredit korporasi dan kredit usaha menengah sebagai individual yang signifikan untuk penilaian individu. Jika BNI menemukan bahwa tidak ada bukti objektif dalam penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik signifikan atau tidak, BNI akan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sama dan menguji mereka secara kolektif atas penurunan nilai. Aset yang diuji secara individual atas penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai yang sudah diakui atau tetap diakui tidak termasuk dalam pengujian penurunan nilai secara kolektif.

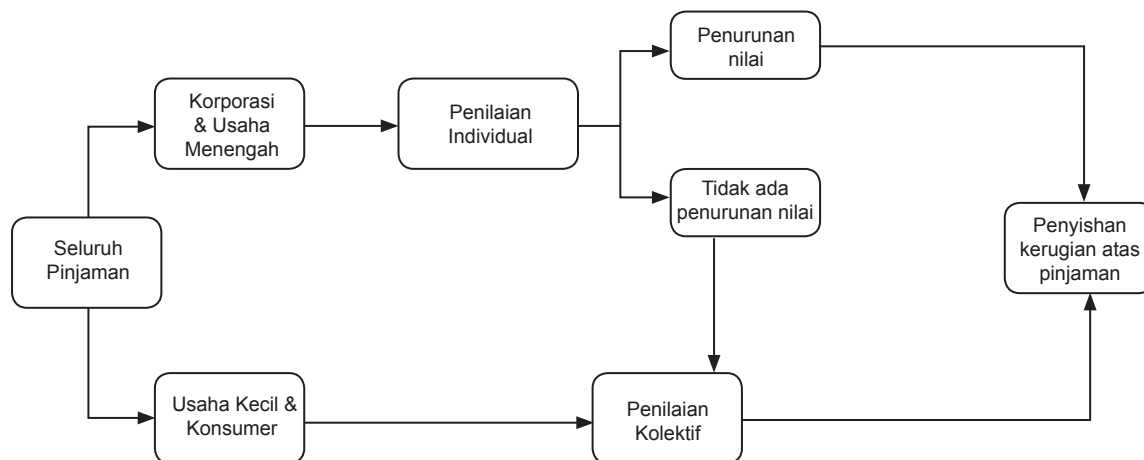
Jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai aset tercatat dan *present value* estimasi arus kas yang akan datang (tidak termasuk kerugian kredit akan datang yang belum terjadi) didiskontokan pada tingkat bunga efektif pada awal aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian tersebut diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Jika pinjaman atau investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo mempunyai suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai yang digunakan adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditentukan dalam kontrak. Untuk kelayakan, BNI dapat mengukur penurunan nilai atas dasar nilai wajar instrumen tersebut menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

Estimasi perhitungan *present value* arus kas yang akan datang untuk aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang mungkin timbul dari penjualan agunan dikurangi biaya-biaya yang timbul dari penjualan agunan tersebut.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama (yaitu atas dasar proses penilaian BNI yang mempertimbangkan jenis aset, industri, lokasi geografis, jenis agunan, status lewat jatuh tempo dan faktor relevan lainnya). Karakteristik-karakteristik tersebut relevan dengan estimasi arus kas untuk kelompok aset tersebut akan menjadi indikasi kemampuan debitur dalam membayar semua hutang sesuai dengan persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diperhitungkan atas dasar arus kas kontraktual aset BNI dan kerugian historis atas aset dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan aset tersebut. BNI menyesuaikan kerugian historis berdasarkan data yang dapat diobservasi saat ini untuk mencerminkan pengaruh dari kondisi saat ini yang tidak mempengaruhi periode kerugian historis yang menjadi dasar dan untuk menghilangkan efek-efek kondisi pada periode historis yang tidak relevan.

Berikut adalah bagan yang menunjukkan proses penyisihan kerugian atas pinjaman yang diberikan yang dinilai secara kolektif dan secara individual:



Per 30 September 2010, tanggal pelaporan keuangan terbaru BNI, BNI tidak memiliki data kerugian historis yang spesifik dan dapat diandalkan bagi penentuan kerugian penurunan nilai untuk kredit yang dievaluasi secara kolektif dengan cara yang sesuai dengan regulasi baru di Indonesia. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009, BNI diperbolehkan, selama periode penyesuaian sampai 31 Desember 2010, untuk menentukan penurunan nilai kredit berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Kualitas Aset Bank Umum ("PBI 7") yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan atas PBI 7, Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Perubahan Kedua PBI 7 dan terakhir Peraturan Bank Indonesia No.11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Perubahan Ketiga atas PBI 7.

Sesuai dengan PBI 7, penyisihan yang ditetapkan untuk setiap klasifikasi pinjaman yang dinilai secara kolektif adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Jumlah penyisihan sebagai persentase dari kredit
Lancar	1%
Dalam perhatian khusus	5%
Kurang lancar	15%
Diragukan	50%
Macet	100%

Persentase di atas diberlakukan terhadap biaya pinjaman yang diamortiasi setelah dikurangi nilai agunan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, kecuali untuk kredit yang digolongkan lancar dan tidak dijamin atau yang dijamin dengan agunan non-tunai, dimana persentase berlaku langsung atas saldo kredit yang belum terlunasi. Dibawah kriteria penilaian baru untuk pinjaman yang dinilai secara kolektif yang harus diimplementasikan paling lambat tanggal 1 Januari 2012, BNI tidak akan mengurangi nilai agunan yang diperbolehkan dari cadangan dari pinjaman manapun.

Bila kredit tidak dapat ditagih, kredit tersebut dihapusbukukan dari penyisihan penurunan nilai pinjaman. Kredit tersebut dihapuskan setelah semua prosedur relevan telah selesai dilaksanakan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Biaya-biaya sehubungan dengan penurunan nilai kredit dan surat berharga diklasifikasikan dalam akun "Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai".

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan, berdasarkan penilaian BNI, penurunan berhubungan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti perbaikan peringkat kredit debitur), kerugian penurunan nilai yang telah diakui dibatalkan dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jumlah tersebut juga diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Aset yang diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual

BNI menilai pada setiap tanggal neraca konsolidasian apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Apabila instrumen hutang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, penurunan yang signifikan atau berkepanjangan pada nilai wajar di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif atas penurunan nilai yang mengakibatkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Jika terdapat bukti serupa pada aset keuangan yang tersedia untuk dijual, kerugian kumulatif – diukur dari selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar saat ini, dikurangi dengan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi – dihapuskan dari ekuitas dan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Jika, pada periode berikut, nilai wajar instrumen hutang yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan berkaitan secara objektif terhadap peristiwa yang terjadi setelah kerugian penurunan nilai tersebut diakui dalam laporan laba rugi, kerugian penurunan nilai disesuaikan melalui laporan konsolidasian laba rugi BNI.

Penilaian obligasi dan surat berharga pemerintah

Selain kepemilikan signifikan BNI atas Obligasi Pemerintah, BNI berinvestasi di berbagai instrumen keuangan, termasuk SBI dan efek hutang. Surat berharga diklasifikasikan sebagai "obligasi pemerintah dengan nilai wajar melalui laba rugi", "tersedia untuk dijual" atau "dimiliki hingga jatuh tempo". BNI menjelaskan efek-efek tersebut sebagai berikut:

- Efek yang dimiliki sebagai "obligasi pemerintah dengan nilai wajar melalui laba rugi" dilaporkan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan. Nilai wajar dari suatu sekuritas ditentukan oleh manajemen berdasarkan tarif pasar yang berlaku. Jika tidak ada harga pasar tersedia atau jika likuiditas terbatas, BNI mendasarkan nilai wajar pada harga permintaan dan penawaran untuk efek yang dikutip dari pasar, nilai pasar untuk efek yang serupa, *present value* imbal hasil efek yang akan datang, atau kombinasi dari perhitungan-perhitungan tersebut.
- Efek yang digolongkan sebagai tersedia-untuk-dijual dinyatakan berdasarkan nilai wajar dan perubahan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada ekuitas, setelah dikurangi pajak penghasilan ditangguhkan. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi pada saat penjualan efek.
- Efek yang ditempatkan sebagai akun yang dimiliki hingga jatuh tempo dinyatakan berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premi, jika ada.

Pajak tangguhan

Pajak penghasilan tangguhan disajikan dengan menggunakan metode kewajiban, untuk perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Tarif pajak yang berlaku saat ini dipakai untuk menentukan pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan diakui apabila terdapat kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasikan dan dimanfaatkan. Kebijakan manajemen digunakan dalam pembuatan klasifikasi tersebut. Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui bila terjadi penilaian atau jika ada pengajuan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

4. Deskripsi Akun-akun Pendapatan dan Beban

Akun-akun laporan pendapatan BNI yang signifikan adalah:

- **Pendapatan bunga dan syariah.** Akun ini terdiri dari pendapatan bunga yang dihasilkan terutama dari kredit, Obligasi Pemerintah dan portofolio efek BNI. BNI juga menerima pendapatan dari penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia dan dari produk perbankan syariah BNI. Bunga dari pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan meliputi margin, pendapatan bagi hasil dan bonus syariah untuk tujuan pembahasan dalam bagian ini.
- **Provisi dan komisi atas pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan.** Provisi dan komisi atas pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan meliputi biaya administrasi, biaya komitmen dan biaya lainnya dan komisi yang dibebankan pada nasabah BNI atas pemberian pinjaman atau fasilitas kredit baru atau perpanjangan. Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010, pendapatan dari provisi dan komisi atas pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan dibukukan sebagai pendapatan bunga dan syariah.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif sejak 1 Januari 2010 dan metode garis lurus sebelum 1 Januari 2010. Saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama jangka waktu transaksi yang bersangkutan. Sejak 1 Januari 2010, pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga dengan cara diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Sebelum 1 Januari 2010, pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi.

- **Beban bunga, bonus dan pembiayaan lainnya.** Beban bunga dan bonus terutama terdiri dari bunga atas simpanan dari nasabah dan bank lain, bunga atas pinjaman BNI serta atas instrumen hutang lainnya yang diterbitkan oleh BNI seperti surat berharga yang diterbitkan, beban bonus Wadiah dan bagi hasil Mudharabah. Beban bonus Wadiah dan bagi hasil Mudharabah telah dimasukkan dalam bunga atas simpanan nasabah dan bank lain untuk tujuan pembahasan dalam bagian ini.
- **Pembiayaan lainnya.** Pembiayaan lainnya termasuk provisi dan komisi termasuk komitmen *fee* dan *fee* lainnya dan biaya komisi dari bank atau pasar uang lainnya pada saat dikeluarkannya pinjaman.

Pendapatan operasional lainnya. Pendapatan operasional lainnya terutama terdiri dari provisi dan komisi lainnya, kenaikan atau penurunan nilai surat berharga, laba selisih kurs valuta asing, pendapatan premi asuransi dan pendapatan lain-lain.

- Provisi dan komisi yang berhubungan dengan pengelolaan rekening nasabah (*fee* layanan bulanan dan pengenaan biaya pada rekening dibawah minimum), biaya transfer, *fee* bisnis kartu kredit, *fee* bank garansi, *fee investment banking*, *fee* dan jasa layanan lainnya (terutama yang terkait dengan biaya 1% yang dikenakan untuk penarikan dana dalam Dolar AS dari rekening Dolar AS) serta pendapatan lainnya.
- Pendapatan premi asuransi termasuk pendapatan dari pembayaran premi asuransi jiwa yang diterbitkan oleh anak perusahaan BNI, PT BNI Life Insurance
- Peningkatan atau penurunan nilai surat berharga dan Obligasi Pemerintah termasuk keuntungan (setelah dikurangi kerugian) dari perdagangan surat berharga dan surat berharga dan Obligasi Pemerintah BNI yang disesuaikan dengan harga pasar.
- Laba selisih kurs termasuk keuntungan dan kerugian yang direalisasi dan yang belum direalisasi untuk transaksi *spot* dan *forward* dan nilai tukar valuta asing (seperti keuntungan atau kerugian dari penjabaran neraca keuangan BNI per tanggal neraca).
- Lain-lain termasuk pendapatan dari penghasilan lain dari nasabah, penghasilan yang diperoleh oleh anak perusahaan yang tidak dialokasikan untuk akun pendapatan operasional lainnya yang dibahas di atas dan bagian ekuitas laba perusahaan asosiasi.

- **Pembalikan (pembentukan) cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non-keuangan.** BNI telah melakukan penyisihan atas kerugian kualitas aset produktif termasuk penempatan pada bank lain, surat berharga, biaya dan tagihan lain-lain, pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan dan investasi. BNI juga melakukan penyisihan untuk *off-balance sheet*, legal dan operasional.
- **Beban operasional lainnya.** Beban operasional lainnya terutama terdiri dari beban atas gaji dan kesejahteraan karyawan, beban umum dan administrasi, biaya *underwriting* asuransi, biaya promosi, premi jaminan dan biaya lain-lain.
 - Beban gaji dan kesejahteraan karyawan termasuk beban biaya gaji dan upah, tunjangan karyawan dan pendidikan dan pelatihan.
 - Beban biaya umum dan administrasi termasuk biaya sewa, persediaan kantor, biaya komunikasi, teknologi informasi, beban perbaikan dan pemeliharaan, listrik dan air, beban transportasi, penelitian dan pengembangan dan beban lainnya.
 - Beban *underwriting* asuransi termasuk biaya sehubungan dengan *underwriting* polis asuransi oleh anak perusahaan BNI, PT BNI Life Insurance.
 - Beban promosi yaitu beban-beban yang berkaitan dengan kegiatan operasional.
 - Beban premi jaminan terdiri dari fee yang berkaitan dengan Program Penjaminan Pemerintah atau program jaminan deposito oleh Lembaga Penjaminan Simpanan, yang dibebankan sebesar 0,1% per tahun dihitung atas saldo deposito domestik rata-rata dan beban lain-lain termasuk beban administrasi non-kredit, beban operasional lainnya (terutama yang berkaitan dengan *overhead*, pajak dan biaya lainnya dari cabang-cabang luar negeri BNI) dan akun lain-lain.
- **Pendapatan non-operasional, bersih.** Pos ini terdiri dari antara lain keuntungan dari pelepasan aset, pendapatan dari penghapusbukuan kewajiban dan pendapatan lain-lain dan koreksi pendapatan/biaya tahun sebelumnya yang meliputi penyesuaian untuk saldo-saldo tahun sebelumnya.
- **Beban pajak.** Pos ini terdiri atas pajak penghasilan badan kini dan pendapatan pajak tangguhan. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat dapat mengurangi pajak penghasilan korporasinya sampai 5% lebih rendah dari pajak penghasilan korporasi yang berlaku, jika perusahaan tersebut memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan, yaitu paling sedikit 40% dari total modal disetor dan dibayarkan dimiliki oleh publik, sahamnya dipegang oleh lebih dari 300 pihak, dan masing-masing pemegang saham memiliki tidak lebih dari 5% dari total modal disetor dan dibayarkan. Kriteria-kriteria ini harus dipenuhi oleh perusahaan selama minimal 6 bulan. Jika perusahaan terbuka tersebut tidak memenuhi kriteria tersebut maka mereka akan dikenakan pajak penghasilan korporasi selayaknya perusahaan lain. Segera setelah pelaksanaan PUT ini, kurang lebih 40% dari saham perusahaan akan dipegang oleh publik.
- **Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan.** Merupakan bagian kepemilikan pemegang saham minoritas atas laba bersih dan ekuitas dari anak perusahaan yang tidak sepenuhnya dimiliki BNI.

5. Hasil Operasi

Perbandingan laporan keuangan 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 dengan 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Pendapatan Bunga dan Syariah

Pendapatan bunga dan syariah BNI meningkat sebesar Rp113 miliar atau 0,8% dari Rp14.287 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp14.400 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Peningkatan ini terutama hasil dari kenaikan bunga pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan dan bunga dari surat-surat berharga.

Tabel berikut menyajikan komponen pendapatan bunga dan syariah untuk setiap periode:

(dalam miliaran Rupiah)

	Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2009 (tidak diaudit)	2010
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan ⁽¹⁾	10.467	11.364
Obligasi Pemerintah	2.575	1.776
Surat-surat berharga	779	912
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	376	273
Lain-lain	91	75
Jumlah pendapatan bunga dan syariah	14.287	14.400

Catatan: (1) Termasuk margin pendapatan bagi hasil dan bonus syariah.

Pendapatan bunga dan syariah dari pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan meningkat sebesar Rp897 miliar atau 8,6% dari Rp10.467 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp11.364 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010, terutama sebagai akibat dari kenaikan saldo rata-rata pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan.

- Saldo rata-rata pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan-gross BNI meningkat sebesar Rp4.804 miliar atau 4,0% dari Rp118.916 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp123.720 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh ekspansi portofolio pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan BNI.
- Tingkat suku bunga pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan-gross BNI meningkat dari rata-rata 11,7% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi rata-rata 12,1% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dari pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan pada tahun 2010.

Pendapatan bunga dan syariah dari Obligasi Pemerintah menurun sebesar Rp798 miliar atau 31,0% dari Rp2.575 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp1.776 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Bunga atas surat berharga meningkat sebesar Rp133 miliar atau 17,1% dari Rp779 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp912 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010.

- Saldo Obligasi Pemerintah dan surat berharga rata-rata meningkat sebesar Rp239 miliar atau 0,5% dari Rp48.072 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp48.311 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010.
- Tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah dan surat berharga menurun dari rata-rata 9,4% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi rata-rata 7,3% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 dikarenakan turunnya tingkat suku bunga.

Pendapatan bunga dan syariah dari penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia menurun sebesar Rp103 miliar atau 27,4% dari Rp376 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp299 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Penurunan ini adalah hasil dari turunnya pendapatan dari penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia dalam periode yang sama.

- Saldo penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia rata-rata meningkat sebesar Rp7.312 miliar atau 37,9% dari Rp19.289 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp26.601 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya simpanan nasabah secara substansial pada tahun 2010 dan alokasi sebagian dari dana tersebut dalam penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia.
- Tingkat suku bunga dari penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia menurun dari rata-rata 2,6% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi rata-rata 1,5% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 terutama disebabkan oleh tingkat suku bunga yang lebih rendah.

Pendapatan bunga dan syariah dari pos lain-lain menurun sebesar Rp16 miliar atau 17,6% dari Rp91 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp75 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Penurunan ini terutama akibat turunnya tagihan derivatif.

Provisi dan Komisi atas Pinjaman/Pembiayaan/Piutang yang Diberikan

Provisi dan komisi atas pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan adalah sebesar Rp423 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009. Sejak tanggal 1 Januari 2010, provisi dan komisi atas pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan tidak lagi dimasukkan dalam akun terpisah pada laporan laba rugi karena perubahan standar akuntansi akibat dari penyesuaian terhadap PSAK 55 (revisi 2006). Pendapatan provisi dan komisi atas pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan sekarang dibukukan ke dalam pendapatan bunga dan syariah dan diamortisasi pada tingkat suku bunga efektif (sebelumnya menggunakan metode garis lurus dan dibukukan sebagai pendapatan profesi dan komisi) selama masa pinjaman/pembiayaan/piutang tersebut.

Beban Bunga dan Bonus

Beban bunga dan bonus menurun sebesar Rp1.003 miliar atau 15,7% dari Rp6.386 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp5.383 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Penurunan ini terutama akibat dari turunnya bunga simpanan nasabah dan bank lain.

Tabel berikut menyajikan komponen dari beban bunga dan bonus untuk setiap periode:

(dalam miliaran Rupiah)

	Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2009	2010
	(tidak diaudit)	
Simpanan nasabah dan bank lain ⁽¹⁾	6.001	5.018
Pinjaman yang diterima	286	181
Surat berharga yang diterbitkan	99	185
Jumlah beban bunga dan bonus	6.386	5.383

Catatan:

(1) Termasuk bonus dan beban bagi hasil pada produk pendanaan syariah "bagi hasil mudharabah" dan "bonus wadiah" yang telah dikategorikan sebagai beban bonus Wadiah dan bagi hasil Mudharabah dalam laporan keuangan konsolidasi BNI.

Beban bunga dan bonus atas simpanan nasabah dan bank lain menurun sebesar Rp983 miliar atau 16,4% dari Rp6.001 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp5.018 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Penurunan tersebut terutama akibat dari turunnya beban rata-rata simpanan nasabah dan bank lain.

- Saldo rata-rata atas simpanan nasabah dan bank lain meningkat sebesar Rp16.012 miliar atau 9,5% dari Rp168.089 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp184.101 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 terutama disebabkan peningkatan saldo giro, tabungan dan deposito berjangka. Saldo simpanan rata-rata meningkat sebesar Rp7.970 miliar atau 20,4% dari Rp38.977 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp46.948 miliar. Saldo tabungan rata-rata BNI meningkat sebesar Rp5.227 miliar atau 10,2% dari Rp51.228 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp56.455 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Saldo rata-rata kami deposito berjangka meningkat sebesar Rp2.814 miliar atau 3,6% dari Rp77.883 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp78.127 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010.
- Biaya rata-rata dana simpanan nasabah dan bank lain BNI turun dari 4,8% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi 3,6% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 karena turunnya beban bunga simpanan nasabah dan bank lain. Rata-rata biaya dana dari giro turun dari rata-rata 2,8% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi rata-rata 2,2% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Rata-rata biaya dana dari rekening tabungan menurun dari rata-rata 2,5% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi rata-rata 2,2% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Rata-rata biaya dana dari deposito berjangka menurun dari rata-rata 7,2% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi rata-rata 5,5% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010.

Beban bunga atas pinjaman yang diterima menurun sebesar Rp105 miliar atau 36,7% dari Rp286 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp181 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010, terutama sebagai akibat dari turunnya biaya pendanaan rata-rata BNI. Rata-rata biaya dana pinjaman BNI menurun dari rata-rata 5,0% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi rata-rata 2,3% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 terutama disebabkan oleh turunnya tingkat suku bunga.

Beban bunga atas surat berharga yang diterbitkan meningkat sebesar Rp86 miliar atau 86,8% dari Rp99 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp185 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Peningkatan ini adalah terutama akibat dari naiknya beban rata-rata pendanaan surat berharga yang diterbitkan pada periode yang sama.

- Saldo surat berharga rata-rata yang diterbitkan menurun sebesar Rp104 miliar atau 7,5% dari Rp1.394 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp1.290 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Surat-surat berharga yang diterbitkan BNI dalam periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 terutama terdiri dari Obligasi berdenominasi Rupiah dan mata uang asing, terutama Dolar AS.
- Biaya dana surat berharga rata-rata yang diterbitkan meningkat dari rata-rata 9,5% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi rata-rata 19,1% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Kenaikan biaya rata-rata dana surat berharga yang diterbitkan BNI terutama karena amortisasi premium dari surat-surat berharga dengan menggunakan tingkat bunga efektif (sebelumnya menggunakan metode garis lurus) dan dimasukkan kedalam beban bunga dan bonus dikarenakan penyesuaiannya terhadap PSAK 55 yang efektif pada tanggal 1 Januari 2010.

Pendapatan Bunga dan Syariah Bersih

Pendapatan bunga dan syariah bersih BNI meningkat sebesar Rp695 miliar atau 8,4% dari Rp8.310 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp9.005 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya BNI meningkat sebesar Rp258 miliar atau 8,2% dari Rp3.146 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp3.404 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Kenaikan tersebut terutama akibat dari kenaikan nilai surat berharga yang diterbitkan dan pendapatan premi asuransi.

Tabel berikut menyajikan komponen pendapatan operasional lainnya untuk setiap periode:

(dalam miliaran Rupiah)

	Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2009 (tidak diaudit)	2010
Provisi dan komisi lainnya	1.597	1.461
Kenaikan (penurunan) nilai surat berharga	347	674
Laba selisih kurs – bersih	249	91
Pendapatan premi asuransi	738	995
Lain-lain	214	184
Jumlah pendapatan operasional lainnya	3.146	3.404

Pendapatan operasional lainnya dari provisi dan komisi menurun sebesar Rp136 miliar atau 8,5% dari Rp1.597 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp1.461 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Penurunan tersebut terutama akibat dari reklasifikasi pendapatan *fee* kartu kredit menjadi pendapatan bunga dan syariah sehubungan dengan PSAK 50 dan 55 yang mana sejak tanggal 1 Januari 2010, Pendapatan *fee* tersebut dibukukan sebagai pendapatan bunga dan syariah dan diamortisasi pada tingkat suku bunga efektif (sebelumnya dibukukan sebagai pendapatan provisi dan komisi lainnya dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus).

Pendapatan operasional lainnya dari kenaikan nilai surat berharga meningkat sebesar Rp326 miliar atau 94,0% dari Rp347 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp674 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010, terutama sebagai akibat dari peningkatan portofolio surat berharga BNI.

Pendapatan operasional lainnya dari laba selisih kurs bersih menurun sebesar Rp158 miliar, dari Rp249 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi sebesar Rp91 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Hal ini karena naiknya revaluasi kerugian posisi devisa netto harian BNI atas portofolio mata uang asing yang diperdagangkan pada tahun 2010.

Pendapatan operasional lainnya dari premi asuransi meningkat sebesar Rp256 miliar atau 34,7% dari Rp738 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp995 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 karena kenaikan pada total premi pada anak perusahaan BNI yaitu PT BNI Life Insurance.

Pendapatan operasional lainnya dari pos lain-lain menurun sebesar Rp30 miliar atau 14,1% dari Rp214 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp184 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010, terutama sebagai akibat dari kerugian atas investasi pada anak perusahaan.

Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan dan Non-Keuangan

Pembalikan (pembentukan) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non-keuangan menurun sebesar Rp1.707 miliar atau 49,0% dari Rp3.483 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp1.776 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Penurunan tersebut terutama akibat dari meningkatnya target *coverage ratio* untuk periode tersebut lebih rendah dari kenaikan target *coverage ratio* untuk 2009.

Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya BNI meningkat sebesar Rp683 miliar atau 12,0% dari Rp5.708 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp6.391 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Kenaikan beban operasional lainnya terutama akibat naiknya beban umum dan administrasi, *underwriting* asuransi, dan beban promosi.

Tabel berikut menyajikan komponen beban operasional lainnya untuk setiap periode:

(dalam miliaran Rupiah)

	Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2009 (tidak diaudit)	2010
Gaji dan tunjangan	2.594	2.642
Umum dan administrasi	1.594	1.737
<i>Underwriting</i> asuransi	771	1.031
Beban promosi	226	430
Premi penjaminan dan lain-lain	523	551
Jumlah beban operasional lainnya	5.708	6.391

Beban operasional lainnya dari gaji dan tunjangan meningkat sebesar Rp48 miliar atau 1,9% dari Rp2.594 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp2.642 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Peningkatan tersebut adalah hasil naiknya gaji pokok dan upah dan naiknya beban pendidikan dan pelatihan yang sebagian diimbangi oleh penurunan tunjangan.

- Gaji dan upah meningkat sebesar Rp174 miliar atau 10,9% dari Rp1.600 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp1.774 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 karena adanya kenaikan gaji pokok dan upah karyawan dan kenaikan jumlah karyawan. BNI memiliki total 20.848 karyawan pada tanggal 30 September 2010 dibandingkan dengan 19.335 karyawan pada tanggal 30 September 2009.

- Tunjangan menurun sebesar Rp146 miliar atau 16,3% dari Rp896 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp750 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 karena turunnya uang pesangon untuk karyawan-karyawan yang berpartisipasi dalam program pensiun dini pada periode tersebut.
- Beban pendidikan dan pelatihan meningkat sebesar Rp20 miliar atau 21,0% dari Rp98 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp118 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 karena adanya program pelatihan baru untuk menunjang program transformasi BNI.

Beban operasional lainnya dari pos umum dan administrasi meningkat sebesar Rp143 miliar atau 9,0% dari Rp1.594 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp1.737 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Kenaikan tersebut terutama akibat dari naiknya beban yang berhubungan dengan (i) persediaan, (ii) beban sewa, (iii) tenaga kerja *outsourse*, (iv) perbaikan dan pemeliharaan yang diimbangi oleh penurunan biaya teknologi informasi dan biaya lain-lain.

Beban operasional lainnya dari *underwriting* asuransi meningkat sebesar Rp260 miliar atau 33,7% dari Rp771 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp1.031 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 terutama disebabkan oleh klaim asuransi pada anak perusahaan PT BNI Life Insurance.

Beban operasional lainnya dari pos promosi meningkat sebesar Rp204 miliar atau 90,3% dari Rp226 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp430 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 karena adanya promosi tabungan BNI berupa "Rejeki Taplus BNI" pada tahun 2010.

Beban premi penjaminan dan lain-lain meningkat sebesar Rp28 miliar atau 5,3% dari Rp523 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp551 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010, terutama disebabkan oleh naiknya biaya premi penjaminan sebesar Rp25 miliar atau 10,1% dari Rp247 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp272 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 yang dikarenakan kenaikan simpanan nasabah.

Pendapatan Operasional Bersih

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, pendapatan operasional bersih BNI meningkat sebesar Rp1.977 miliar atau 87,3% dari Rp2.265 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp4.241 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010.

Pendapatan Bukan Operasional Bersih

Pendapatan bukan operasional bersih BNI menurun sebesar Rp71 miliar atau 90,7% dari Rp78 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp7 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Penurunan tersebut terutama akibat dari penyesuaian akun-akun tidak berulang terhadap pendapatan pada tahun 2009, yaitu penjualan saham pada VISA dan MasterCard.

Laba Sebelum Beban Pajak dan Hak Minoritas

Laba sebelum beban pajak dan hak minoritas BNI meningkat sebesar Rp1.906 miliar atau 81,4% dari Rp2.343 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp4.249 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010.

Beban Pajak

Beban pajak BNI meningkat sebesar Rp805 miliar atau 165,1% dari Rp488 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp1.293 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. Kenaikan dalam pajak penghasilan terutama akibat dari peningkatan pendapatan kena pajak dan realisasi aset pajak tangguhan pada tahun 2010.

Laba Sebelum Hak Minoritas

Laba sebelum hak minoritas BNI meningkat sebesar Rp1.101 miliar atau 59,3% dari Rp1.855 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp2.956 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010.

Hak Minoritas Atas Rugi (Laba) Bersih Anak Perusahaan

Hak minoritas atas anak perusahaan turun dari pendapatan bersih sebesar di Rp0,1 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi rugi bersih sebesar Rp1 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010.

Laba Bersih

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba bersih BNI meningkat sebesar Rp1.099 miliar atau 59,3% dari Rp1.855 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 menjadi Rp2.954 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010.

Perbandingan Laporan Keuangan 31 Desember 2009 dengan 31 Desember 2008

Pendapatan Bunga dan Syariah

Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar Rp2.776 miliar atau 17,2% dari Rp16.103 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp18.879 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Kenaikan pendapatan bunga dan syariah terutama akibat kenaikan bunga pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan, bunga surat berharga, yang sebagian diimbangi oleh, antara lain, penurunan bunga pada obligasi pemerintah.

Tabel berikut menyajikan komponen pendapatan bunga dan syariah untuk setiap periode:

(dalam miliaran Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2008	2009
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan ⁽¹⁾	10.887	14.066
Obligasi Pemerintah	3.500	3.174
Surat-surat berharga	994	1.032
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	723	567
Lain-lain	0	40
Jumlah pendapatan bunga dan syariah	16.103	18.879

Catatan: (1) Termasuk pendapatan marjin, pendapatan bagi hasil dan bonus syariah.

- Pendapatan bunga dan syariah dari pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan meningkat sebesar Rp3.179 miliar, atau 29,2% dari Rp10.887 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp14.066 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama sebagai akibat dari peningkatan saldo pinjaman/pembiayaan/piutang kotor rata-rata BNI. Saldo pinjaman/pembiayaan/piutang kotor rata-rata BNI meningkat sebesar Rp17.759 miliar atau 17,5% dari Rp101.639 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp119.398 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan kredit korporasi, konsumen dan komersial BNI sebesar masing-masing 8,7%, 12,0% dan 7,7%.
- Pendapatan rata-rata pinjaman meningkat dari 10,7% pada tahun 2008 menjadi 11,7% pada tahun 2009, terutama berasal dari pertumbuhan portofolio kredit korporasi dengan tingkat NPL yang lebih rendah dari portofolio kredit komersial. Kredit korporasi tumbuh lebih cepat sebagai hasil dari implementasi strategi BNI untuk mengembangkan portofolio kredit korporasi secara selektif.

Pendapatan bunga dan syariah dari Obligasi Pemerintah menurun sebesar Rp326 miliar atau 9,3% dari Rp3.500 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp3.174 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 terutama karena dari penurunan suku bunga BI dan penurunan saldo rata-rata Obligasi Pemerintah yang beredar. Surat-surat berharga meningkat sebesar Rp38 miliar atau 3,8% dari Rp994 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp1.032 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan ini terutama akibat peningkatan saldo rata-rata surat-surat berharga BNI selama periode yang sama yang sebagian diimbangi oleh penurunan suku bunga surat-surat berharga tersebut.

- Saldo Obligasi Pemerintah dan surat berharga rata-rata BNI meningkat sebesar Rp5.390 miliar, atau 12,4% dari Rp43.303 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp48.693 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Pendapatan bunga dan syariah dari penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia menurun sebesar Rp156 miliar atau 21,6% dari Rp723 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp567 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Penurunan ini terutama akibat penurunan dalam hasil penempatan BNI pada bank lain dan Bank Indonesia selama periode yang sama rata-rata 5,3% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi rata-rata 2,3% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 karena penurunan suku bunga.

Pendapatan bunga dan syariah dari pos lain-lain meningkat sebesar Rp39 miliar dari Rp0,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp40 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan tersebut terutama akibat dari peningkatan tagihan derivatif.

Provisi dan Komisi atas Pinjaman/Pembiayaan/Piutang yang Diberikan

Provisi dan komisi atas pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan BNI meningkat sebesar Rp43 miliar atau 8,3% dari Rp525 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp568 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan ini terutama sebagai akibat dari peningkatan pinjaman/pembiayaan/piutang baru yang diberikan.

Beban Bunga dan Bonus

Beban bunga dan bonus BNI meningkat sebesar Rp1.633 miliar atau 24,5% dari Rp6.661 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp8.294 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 terutama disebabkan kenaikan bunga yang dibayarkan atas simpanan nasabah dan bank lain.

Tabel berikut menyajikan komponen dari beban bunga dan bonus untuk setiap periode:

(dalam miliaran Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2008	2009
Simpanan nasabah dan bank lain ⁽¹⁾	5.929	7.800
Pinjaman yang diterima	514	359
Surat berharga yang diterbitkan	219	135
Jumlah beban bunga dan bonus	6.661	8.294

Catatan:

(1) Termasuk bonus dan beban bagi hasil pada produk pendanaan syariah "bagi hasil mudharabah" dan "bonus wadiah" yang telah dikategorikan sebagai beban bonus Wadiah dan bagi hasil Mudharabah dalam laporan keuangan konsolidasi BNI.

Beban bunga atas simpanan nasabah dan bank lain meningkat sebesar Rp1.871 miliar atau 31,6% dari Rp5.929 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp7.800 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Kenaikan bunga simpanan nasabah dan bank lain merupakan hasil dari peningkatan saldo rata-rata simpanan dari nasabah dan bank lain dan kenaikan rata-rata biaya dana deposito berjangka dari nasabah dan bank lain pada tahun 2009.

- Saldo rata-rata atas simpanan nasabah dan bank lain meningkat sebesar Rp25.751 miliar atau 17,4% dari Rp148.388 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp174.139 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Hal ini terutama disebabkan oleh kita kenaikan suku bunga untuk menarik deposito. Saldo rata-rata giro meningkat sebesar Rp4.675 miliar atau 13,1% dari Rp35.692 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp40.367 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Saldo rata-rata tabungan meningkat sebesar Rp3.388 miliar, atau 6,8% dari Rp49.739 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp53.127 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Saldo rata-rata deposito berjangka meningkat sebesar Rp19.762 miliar atau 34,2% dari Rp57.843 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp77.605 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

- Biaya rata-rata dana simpanan nasabah dan bank lain meningkat dari rata-rata 4,0% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi rata-rata 4,5% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan bunga yang dibayar atas simpanan nasabah, khususnya dalam rekening deposito valuta asing BNI. Rata-rata biaya dana deposito berjangka meningkat dari rata-rata 6,4% di tahun 2008 menjadi rata-rata 7,0% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Rata-rata biaya dana giro relatif stabil pada rata-rata 2,7% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009. Biaya rata-rata dana tabungan juga tetap stabil pada rata-rata 2,5% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2,4% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Beban bunga dari pinjaman yang diterima menurun sebesar Rp155 miliar atau 30,1% dari Rp514 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp359 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Penurunan ini terutama diakibatkan dari penurunan biaya rata-rata dana pinjaman BNI pada tahun 2009, yang sebagian diimbangi oleh peningkatan saldo pinjaman rata-rata selama periode yang sama.

- Saldo pinjaman rata-rata BNI meningkat sebesar Rp218 miliar atau 3,6% dari Rp6.125 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp6.343 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman luar negeri dan lain-lain yang sebagian diimbangi oleh penurunan *bankers acceptance*.
- Biaya rata-rata dana dari pinjaman BNI menurun dari 8,4% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi 4,6% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 terutama disebabkan suku bunga yang lebih rendah.

Beban bunga dari surat-surat berharga yang diterbitkan mengalami penurunan sebesar Rp84 miliar atau 38,4% dari Rp219 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp135 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Penurunan tersebut akibat dari penurunan biaya rata-rata dana surat-surat berharga yang diterbitkan BNI selama periode berjalan, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan saldo rata-rata surat-surat berharga yang diterbitkan.

- Saldo surat-surat berharga yang diterbitkan rata-rata meningkat sebesar Rp133 miliar atau 10,8% dari Rp1.228 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp1.361 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Surat-surat berharga BNI yang diterbitkan pada tahun 2008 dan 2009 terdiri dari obligasi dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing, terutama Dolar AS.
- Biaya rata-rata dana surat-surat berharga yang diterbitkan BNI turun 17,8% pada tahun 2008 menjadi 13,1% pada tahun 2009. Biaya rata-rata dana surat-surat berharga yang diterbitkan BNI lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga tetap obligasi BNI yang terdiri dari surat berharga yang diterbitkan pada tahun 2009 karena BNI memasukkan amortisasi atas premi terhadap nilai nominal surat-surat berharga tertentu ke dalam beban bunga atas surat-surat berharga yang diterbitkan. Penurunan biaya rata-rata dana surat-surat berharga pada tahun 2009 adalah akibat dari jatuh temponya obligasi subordinasi pada tahun 2008. Pada tanggal 31 Desember 2009, surat-surat berharga yang diterbitkan dan instrumen hutang senior dalam mata uang Rupiah dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000 miliar yang jatuh tempo tanggal 11 Juli 2011 yang dikenakan bunga pada tingkat tetap sebesar 13,125% per tahun.

Pendapatan Bunga dan Syariah Bersih

Pendapatan bunga dan syariah bersih meningkat Rp1.221 miliar atau 12,3% dari Rp9.912 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp11.133 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya meningkat sebesar Rp746 miliar atau 21,0% dari Rp3.549 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp4.295 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan pendapatan operasional lainnya terutama dikarenakan peningkatan pada kenaikan/ (penurunan) nilai surat-surat berharga sebesar Rp568 miliar, peningkatan pendapatan premi asuransi sebesar Rp262 miliar dan kenaikan provisi dan komisi lain-lain pada jasa perbankan lainnya sebesar Rp255 miliar pada tahun 2009 yang sebagian diimbangi oleh penurunan Rp368 miliar pada laba selisih kurs bersih.

Tabel berikut menyajikan komponen pendapatan operasional lainnya untuk setiap periode:

(dalam miliaran Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2008	2009
Provisi dan komisi lainnya ⁽¹⁾	1.976	2.231
Kenaikan (penurunan) nilai surat berharga	(143)	424
Laba selisih kurs – bersih	630	262
Pendapatan premi asuransi	764	1.027
Lain-lain	322	351
Jumlah pendapatan operasional lainnya	3.549	4.295

Catatan: (1) Termasuk provisi dan komisi trade finance

Pendapatan operasional lainnya dari provisi dan komisi lainnya meningkat sebesar Rp255 miliar atau 12,9% dari Rp1.976 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp2.231 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama disebabkan peningkatan fee bisnis kartu kredit BNI dan biaya untuk mengelola rekening nasabah.

Pendapatan operasional lainnya akibat kenaikan (penurunan) nilai surat berharga meningkat dari rugi sebesar Rp143 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi keuntungan sebesar Rp424 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama sebagai hasil dari keuntungan penjualan Obligasi Pemerintah.

Pendapatan operasional lainnya dari laba selisih kurs bersih menurun sebesar Rp368 miliar atau 58,4% dari Rp630 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp262 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Penurunan ini terutama akibat dari peningkatan kerugian revaluasi posisi devisa neto harian BNI dalam portofolio perdagangan valuta asing BNI pada tahun 2009.

Pendapatan operasional lainnya dari premi asuransi meningkat sebesar Rp262 miliar atau 34,4% dari Rp764 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp1.027 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 karena adanya peningkatan total premi dari PT BNI Life Insurance.

Pendapatan operasional lainnya dari pos lain-lain meningkat sebesar Rp29 miliar, atau 9,0% dari Rp322 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp351 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan *fee* dari transaksi non-kredit dan dari investasi pada anak perusahaan.

Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan dan Non-Keuangan

Pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non-keuangan turun sebesar Rp308 miliar atau 7,1% dari Rp4.359 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp4.051 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Penurunan ini terutama akibat peningkatan pada penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan dan peningkatan yang kurang agresif dibandingkan dengan target *coverage ratio* BNI untuk tahun 2009 dibandingkan tahun 2008.

Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya meningkat sebesar Rp764 miliar atau 10,6% dari Rp7.228 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp7.991 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 terutama sebagai akibat dari meningkatnya semua komponen beban operasional lainnya.

Tabel berikut menyajikan komponen beban operasional lainnya untuk setiap periode:

(dalam miliaran Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2008	2009
Gaji dan tunjangan	3.299	3.460
Umum dan administrasi	2.273	2.312
<i>Underwriting</i> asuransi	706	1.022
Beban promosi	352	427
Premi penjaminan dan lain-lain	597	770
Jumlah beban operasional lainnya	7.228	7.991

Beban operasional lainnya dari gaji dan tunjangan meningkat sebesar Rp161 miliar atau 4,9% dari Rp3.299 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp3.460 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan gaji dan tunjangan terutama disebabkan oleh kenaikan gaji dan upah yang sebagian diimbangi oleh penurunan tunjangan dan beban pendidikan dan pelatihan karyawan.

- Gaji dan upah meningkat sebesar Rp190 miliar atau 9,8% dari Rp1.932 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp2.122 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 terutama akibat kenaikan gaji dan upah.
- Tunjangan menurun sebesar Rp25 miliar atau 2,1% dari Rp1.211 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp1.186 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 karena penurunan pembayaran pesangon untuk pendaftaran dalam program pensiun dini sukarela pada tahun 2009.
- Beban pendidikan dan pelatihan karyawan menurun Rp4 miliar atau 2,6% dari Rp156 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp152 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Beban operasional lainnya dari pos umum dan administrasi meningkat sebesar Rp39 miliar atau 1,7% dari Rp2.273 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp2.312 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama disebabkan oleh meningkatnya (i) beban perbaikan dan pemeliharaan yang disebabkan renovasi di kantor pusat BNI di Jakarta, (ii) beban sewa dan (iii) biaya tenaga kerja *outsourcing*, yang sebagian diimbangi dengan penurunan terutama dalam (i) beban penyusutan dan (ii) beban komunikasi.

Beban operasional lainnya dari *underwriting* asuransi meningkat sebesar Rp316 miliar atau 44,8% dari Rp706 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp1.022 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 karena adanya peningkatan klaim pada PT BNI Life Insurance.

Biaya operasional lainnya dari pos promosi meningkat sebesar Rp75 miliar atau 21,4% dari Rp352 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp427 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 karena biaya sehubungan dengan *rebranding* dan program promosi BNI.

Beban premi penjaminan dan lain-lain meningkat sebesar Rp173 miliar atau 29,0% dari Rp597 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp770 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan pada beban premi penjaminan dan lain-lain terutama disebabkan oleh peningkatan beban premi penjaminan sebesar Rp76 miliar atau 29,5% dari Rp258 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp334 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Hal ini dikarenakan oleh kenaikan simpanan nasabah BNI.

Laba Operasional Bersih

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba operasional bersih meningkat sebesar Rp1.512 miliar atau 80,6% dari Rp1.875 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp3.386 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Pendapatan Bukan Operasional Bersih

Pendapatan bukan operasional bersih BNI tetap stabil di Rp58 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009.

Laba Sebelum Beban Pajak dan Hak Minoritas

Laba sebelum beban pajak dan hak minoritas BNI meningkat sebesar Rp1.512 miliar atau 78,3% dari Rp1.932 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp3.444 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Beban Pajak

Beban pajak BNI meningkat sebesar Rp251 miliar atau 35,6% dari Rp706 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp957 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Kenaikan pajak penghasilan terutama karena kenaikan pendapatan kena pajak.

Laba Sebelum Hak Minoritas

Laba sebelum hak minoritas BNI meningkat sebesar Rp1.261 miliar atau 102,9% dari Rp1.226 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp2.487 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Hak Minoritas Atas Rugi (Laba) Bersih Anak Perusahaan

Hak minoritas atas rugi bersih anak perusahaan tetap stabil di Rp3 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009.

Laba Bersih

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba bersih BNI meningkat sebesar Rp1.262 miliar atau 103,2% dari Rp1.222 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp2.484 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Perbandingan Laporan Keuangan 31 Desember 2008 dengan 31 Desember 2007

Pendapatan Bunga dan Syariah

Pendapatan bunga dan syariah BNI meningkat sebesar Rp1.648 miliar atau 11,4% dari Rp14.455 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp16.103 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Peningkatan ini terutama hasil dari kenaikan sebesar Rp2.506 miliar pada pinjaman yang diberikan/pembiayaan/piutang yang diberikan yang sebagian diimbangi oleh penurunan tingkat suku bunga surat-surat berharga sebesar Rp778 miliar selama periode yang sama.

Tabel berikut menyajikan komponen pendapatan bunga dan syariah untuk setiap periode:

(dalam miliaran Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2007	2008
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	8.380	10.886
Obligasi Pemerintah	3.553	3.500
Surat-surat berharga ⁽¹⁾	1.771	994
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	711	723
Lain-lain	39	0
Jumlah pendapatan bunga dan syariah	14.455	16.103

Catatan: (1) Termasuk margin pendapatan bagi hasil dan bonus syariah.

Pendapatan bunga dan syariah dari pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan meningkat sebesar Rp2.506 miliar atau 29,9% dari Rp8.380 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp10.886 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Peningkatan ini terutama akibat dari peningkatan saldo pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan kotor rata-rata BNI.

- Saldo rata-rata pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan kotor BNI meningkat sebesar Rp22.752 miliar atau 28,8% dari Rp78.887 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp101.639 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Hal ini terutama disebabkan oleh ekspansi portofolio kredit BNI.
- Pendapatan dari pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan kotor BNI meningkat dari rata-rata 10,6% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi rata-rata 10,7% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 terutama sebagai akibat dari peningkatan tingkat suku bunga di tahun 2008.

Pendapatan bunga dan syariah dari obligasi Pemerintah mengalami penurunan sebesar Rp53 miliar atau 1,5% dari Rp3.553 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp3.500 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Surat-surat berharga mengalami penurunan sebesar Rp778 miliar, atau 43,9% dari Rp1.771 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp994 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

- Saldo rata-rata obligasi pemerintah dan surat-surat berharga kotor BNI mengalami penurunan sebesar Rp11.536 miliar atau 21,0% dari Rp54.839 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp43.303 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penjualan surat-surat berharga, khususnya SBI pada tahun 2008 yang dimiliki BNI setelah adanya peraturan BI tentang pengurangan giro wajib minimum dari 10,0% menjadi 5,0%.
- Pendapatan obligasi pemerintah dan surat-surat berharga meningkat dari rata-rata 9,5% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi rata-rata 10,4% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 disebabkan oleh kenaikan tingkat suku bunga.

Pendapatan bunga dan syariah dari penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia meningkat sebesar Rp12 miliar atau 1,7% dari Rp711 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp723 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebagai akibat dari peningkatan hasil penempatan pada bank lain selama periode yang sama.

- Saldo rata-rata penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia kotor menurun sebesar Rp3.078 miliar atau 18,3% dari Rp16.824 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp 13.746 miliar pada tahun 2008 terutama disebabkan oleh penarikan penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia untuk meningkatkan kepemilikan kas dikarenakan likuiditas yang ketat pada tahun 2008.
- Pendapatan penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia kotor meningkat dari rata-rata 4,2% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi rata-rata 5,3% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 terutama karena meningkatnya tingkat suku bunga Dolar AS pada tahun 2008.

Pendapatan bunga dan syariah dari pos lain-lain menurun sebesar Rp39 miliar atau 99,0% dari Rp39 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp0,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Penurunan ini terutama akibat penurunan pendapatan bunga dari tagihan derivatif.

Provisi dan Komisi atas Pinjaman yang Diberikan

Provisi dan komisi atas pinjaman yang diberikan BNI meningkat sebesar Rp103 miliar atau 24,4% dari Rp422 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp525 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, terutama sebagai akibat dari peningkatan jumlah pinjaman baru yang diberikan.

Beban Bunga dan Bonus

Beban bunga dan bonus BNI mengalami penurunan sebesar Rp709 miliar atau 9,6% dari Rp7.370 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp6.661 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, terutama sebagai akibat dari penurunan bunga yang dibayarkan atas simpanan nasabah dan bank lain.

Tabel berikut menyajikan komponen dari beban bunga dan bonus untuk setiap periode:

(dalam miliaran Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2007	2008
Simpanan nasabah dan bank lain ⁽¹⁾	6.818	5.929
Pinjaman yang diterima ⁽²⁾	155	514
Surat berharga yang diterbitkan	397	219
Jumlah beban bunga dan bonus	7.370	6.661

Catatan:

(1) *Termasuk bonus dan beban bagi hasil pada produk pendanaan syariah "bagi hasil mudharabah" dan "bonus wadiah" yang telah dikategorikan sebagai beban bonus Wadiah dan bagi hasil Mudharabah dalam laporan keuangan konsolidasi BNI.*

(2) *Termasuk bunga obligasi subordinasi*

Beban bunga simpanan nasabah dan bank lain menurun sebesar Rp889 miliar atau 13,0% dari Rp6.818 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp5.929 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, terutama sebagai akibat dari penurunan biaya rata-rata dana simpanan dari nasabah dan bank lain.

- Saldo rata-rata simpanan nasabah dan bank lain meningkat sebesar Rp4.259 miliar atau 3,0% dari Rp144.129 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp148.388 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Saldo rata-rata giro BNI mengalami penurunan sebesar Rp1.797 miliar atau 4,8% dari Rp37.489 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp35.692 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Saldo rata-rata tabungan BNI meningkat sebesar Rp7.524 miliar atau 17,8% dari Rp42.215 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp49.739 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Saldo rata-rata deposito berjangka BNI mengalami penurunan sebesar Rp3.336 miliar atau 5,5% dari Rp61.179 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp57.843 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.
- Biaya rata-rata dana simpanan nasabah dan bank lain mengalami penurunan dari rata-rata 4,7% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi rata-rata 4,0% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 terutama disebabkan oleh turunnya proporsi deposito berjangka BNI, yang membebankan bunga pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan giro dan tabungan.

Beban bunga pinjaman yang diterima meningkat sebesar Rp359 miliar atau 231,9% dari Rp155 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp514 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Peningkatan bunga pinjaman ini terutama akibat peningkatan biaya rata-rata pendanaan dan peningkatan saldo rata-rata pinjaman yang diterima.

- Saldo pinjaman rata-rata BNI meningkat sebesar Rp1.352 miliar atau 28,3% dari Rp4.773 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember menjadi Rp6.125 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan akseptasi, yang berhubungan dengan pinjaman antar bank tertentu yang berkaitan dengan *trade finance* dan peningkatan pinjaman luar negeri dan lainnya.
- Biaya rata-rata dana pinjaman BNI meningkat dari rata-rata 3,2% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi rata-rata 8,4% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 terutama disebabkan kenaikan suku bunga atas pinjaman pasar uang.

Beban bunga surat-surat berharga yang diterbitkan (termasuk bunga pada obligasi subordinasi) menurun sebesar Rp178 miliar atau 44,9% dari Rp397 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp219 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, sebagai akibat dari penurunan saldo rata-rata surat-surat berharga yang diterbitkan BNI pada tahun 2008 dan penurunan biaya dana dari surat-surat berharga yang diterbitkan selama periode yang sama.

- Saldo surat-surat berharga yang diterbitkan rata-rata menurun sebesar Rp124 miliar atau 9,2% dari Rp1.352 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp1.228 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Hal ini terutama karena keputusan BNI untuk membeli kembali hutang subordinasi BNI.
- Biaya rata-rata dana surat-surat berharga yang diterbitkan BNI turun dari rata-rata 29,4% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi rata-rata 17,8% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 terutama sebagai akibat dari penebusan hutang subordinasi BNI yang membebaskan bunga pada tingkat yang lebih tinggi dari surat-surat berharga BNI lainnya.

Pendapatan Bunga dan Syariah Bersih

Pendapatan bunga dan syariah bersih meningkat Rp2.445 miliar atau 32,7% dari Rp7.467 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp9.912 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya mengalami penurunan sebesar Rp581 miliar, atau 14,1% dari Rp4.130 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp3.549 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Penurunan ini terutama hasil dari penurunan nilai surat berharga pada tahun 2008 yang sebagian diimbangi oleh, antara lain, peningkatan Rp379 miliar pada biaya lainnya dan komisi dan peningkatan sebesar Rp364 miliar pada laba selisih kurs bersih.

Tabel berikut menyajikan komponen pendapatan operasional lainnya untuk setiap periode:

(dalam miliaran Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2007	2008
Provisi dan komisi lainnya	1.597	1.976
Kenaikan (penurunan) nilai surat berharga	1.223	(143)
Laba selisih kurs – bersih	266	630
Pendapatan premi asuransi	680	764
Lain-lain	365	322
Jumlah pendapatan operasional lainnya	4.130	3.549

Provisi dan komisi lainnya meningkat sebesar Rp379 miliar atau 23,7% dari Rp1.597 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp1.976 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Peningkatan ini terutama sebagai akibat dari kenaikan *fee investment banking*.

Kenaikan (penurunan) nilai surat berharga mengalami penurunan sebesar Rp1.366 miliar dari keuntungan sebesar Rp1.223 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi rugi sebesar Rp143 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Penurunan nilai surat berharga tersebut terutama akibat revaluasi surat-surat berharga BNI.

Laba selisih kurs bersih meningkat sebesar Rp364 miliar atau 137,1% dari Rp266 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp630 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Peningkatan ini terutama sebagai hasil dari posisi *long* BNI terhadap Dolar AS dan apresiasi Dolar AS terhadap Rupiah pada periode tersebut.

Pendapatan premi asuransi meningkat sebesar Rp84 miliar atau 12,5% dari Rp680 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp764 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 karena adanya peningkatan total premi dari PT BNI Life Insurance.

Pos lain-lain menurun sebesar Rp43 miliar atau 11,8% dari Rp365 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp322 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Penurunan tersebut terutama akibat dari penurunan pendapatan dari investasi pada anak perusahaan.

Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan dan Non-Keuangan

Pembalikan (pembentukan) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non-keuangan meningkat sebesar Rp1.655 miliar atau 61,2% dari Rp2.704 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp4.359 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 terutama karena kebijakan BNI pada tahun 2008 untuk meningkatkan penyisihan BNI secara agresif dalam rangka meningkatkan *coverage ratio* BNI.

Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya mengalami penurunan sebesar Rp398 miliar atau 5,2% dari Rp7.626 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp7.228 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, terutama sebagai akibat penurunan gaji dan tunjangan dan beban umum dan administrasi.

Tabel berikut menyajikan komponen beban operasional lainnya untuk setiap periode:

(dalam miliaran Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2007	2008
Gaji dan tunjangan	3.692	3.299
Umum dan administrasi	2.389	2.273
<i>Underwriting</i> asuransi	693	706
Beban promosi	297	352
Premi penjaminan dan lain-lain	555	597
Jumlah beban operasional lainnya	7.626	7.228

Gaji dan tunjangan menurun sebesar Rp393 miliar atau 10,6% dari Rp3.692 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp3.299 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, terutama sebagai akibat dari penurunan tunjangan dan beban pendidikan dan pelatihan karyawan yang sebagian diimbangi oleh kenaikan gaji dan upah sebesar Rp29 miliar pada tahun 2008.

- Gaji dan upah meningkat sebesar Rp29 miliar atau 1,5% dari Rp1.903 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp1.932 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 karena kenaikan dalam gaji dan upah bertujuan untuk mempertahankan gaji dan upah pada tingkat yang sama dengan kompetitor BNI. BNI memiliki total karyawan sebanyak 19.044 pada tanggal 31 Desember 2007 dengan perbandingan 18.871 karyawan pada tanggal 31 Desember 2008.
- Tunjangan menurun sebesar Rp421 miliar atau 25,8% dari Rp1.632 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp1.211 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 disebabkan oleh penurunan pembayaran pesangon untuk program pensiun sukarela awal tahun 2008.
- Beban pendidikan dan pelatihan karyawan menurun Rp1 miliar atau 0,6% dari Rp157 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp156 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Beban umum dan administrasi turun sebesar Rp116 miliar atau 4,9% dari Rp2.389 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp2.273 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Penurunan ini terutama akibat penurunan beban penyusutan, beban sewa dan beban teknologi informasi, yang sebagian diimbangi oleh peningkatan biaya tenaga kerja *outsourcing*, beban komunikasi, beban peralatan kantor, beban perbaikan dan pemeliharaan dan beban transportasi.

Beban *underwriting* asuransi meningkat sebesar Rp13 miliar atau 1,8% dari Rp693 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp706 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 karena adanya peningkatan pada klaim PT BNI Life insurance.

Beban promosi meningkat sebesar Rp55 miliar atau 18,6% dari Rp297 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp352 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 terutama karena program promosi BNI pada program tabungan "Rejeki Durian Runtuh" dan program *rebranding* BNI.

Beban premi penjaminan dan lain-lain meningkat sebesar Rp42 miliar atau 7,7% dari Rp555 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp597 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Peningkatan beban premi penjaminan dan lain-lain terutama akibat dari naiknya premi penjaminan yang disebabkan oleh kenaikan simpanan nasabah BNI.

Laba Operasional Bersih

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba operasional bersih meningkat sebesar Rp607 miliar atau 47,9% dari Rp1.268 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp1.875 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Pendapatan Bukan Operasional Bersih

Pendapatan bukan operasional bersih BNI menurun sebesar Rp155 miliar atau 72,9% dari Rp213 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp58 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Penurunan pendapatan bukan operasional bersih terutama akibat dari koreksi pendapatan pada tahun sebelumnya dan pos lain-lain pada tahun 2007.

Laba Sebelum Beban Pajak dan Hak Minoritas

Laba sebelum beban pajak dan hak minoritas BNI meningkat sebesar Rp451 miliar atau 30,5% dari Rp1.481 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp1.932 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Beban Pajak

Beban pajak BNI meningkat sebesar Rp127 miliar atau 21,9% dari Rp579 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi sebesar Rp706 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan pada pendapatan kena pajak.

Laba Sebelum Hak Minoritas

Laba sebelum hak minoritas BNI meningkat sebesar Rp324 miliar atau 35,9% dari Rp902 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp1.226 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

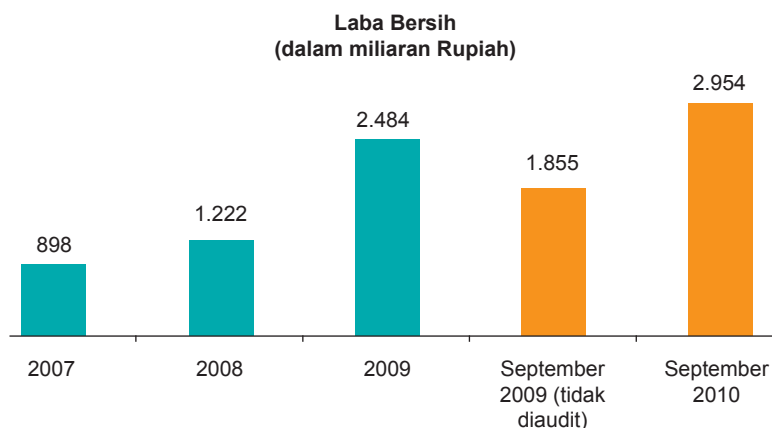
Hak Minoritas Atas Rugi (Laba) Bersih Anak Perusahaan

Hak minoritas atas rugi bersih anak perusahaan menurun sebesar Rp0,4 miliar atau 10,4% dari Rp3,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp3,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Penurunan tersebut terutama akibat dari kenaikan laba bersih dari anak perusahaan yang tidak sepenuhnya dimiliki BNI.

Laba Bersih

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba bersih BNI meningkat sebesar Rp324 miliar atau 36,1% dari Rp898 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp1.222 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.





6. Likuiditas dan Sumber Daya Modal

Kegiatan usaha BNI selama tahun 2007, 2008 dan 2009 serta periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010, sebagian besar dibiayai oleh kombinasi antara penerimaan dari pendapatan bunga portofolio pinjaman yang diberikan, pendapatan bunga dari Obligasi Pemerintah serta kenaikan jumlah simpanan. BNI juga memelihara cadangan likuid (giro wajib minimum) yang melebihi persyaratan minimum Bank Indonesia untuk mengantisipasi penarikan simpanan dalam jumlah besar dan pencairan fasilitas pinjaman yang diberikan, kepada debitur yang belum digunakan oleh nasabah. BNI telah menggunakan sebagian besar dananya untuk pembayaran beban bunga atas simpanan dan pinjaman yang diterima, pemberian kredit, pembayaran kembali pinjaman yang diterima dan pembayaran beban operasi (termasuk beban gaji dan tunjangan serta beban umum dan administrasi).

Tabel di bawah ini menunjukkan informasi mengenai posisi likuiditas BNI (tidak diaudit):

(dalam persentase, kecuali untuk aset likuid dalam miliaran Rupiah)

	Pada tanggal 31 Desember			Pada tanggal 30 September	
	2007	2008	2009 (tidak diaudit)	2009*	2010
Aset Likuid ⁽¹⁾	53.082	48.078	69.234	44.034	57.261
LDR ⁽²⁾	60,6%	68,6%	64,1%	74,6%	68,6%
Aset Likuid sebagai Persentase dari Total Aset ⁽³⁾	29,0%	23,8%	30,4%	21,7%	25,5%
Aset Likuid sebagai Persentase dari Simpanan ⁽⁴⁾	36,3%	29,5%	36,7%	26,9%	31,2%

Catatan:

- (1) Merupakan penjumlahan atas kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan surat berharga (termasuk obligasi pemerintah dalam kelompok untuk diperdagangkan).
- (2) Merupakan rasio pembagian dari jumlah pinjaman dibagi dengan jumlah dana pihak ketiga.
- (3) Merupakan rasio pembagian dari aset likuid (tidak termasuk simpanan dari bank lain) terhadap total aset.
- (4) Merupakan rasio pembagian dari aset likuid (tidak termasuk simpanan dari bank lain) terhadap simpanan.

BNI mengelola likuiditas dengan berbagai cara. BNI berusaha untuk menghasilkan likuiditas dengan menawarkan suku bunga kompetitif pada rekening deposito BNI untuk menarik simpanan-simpanan lebih banyak, pinjaman dari pasar antar bank atau melalui pinjaman dana atau dengan menjual surat berharga seperti SBI dan Obligasi Pemerintah dalam rekening perdagangan BNI. Dalam situasi di mana BNI memiliki kelebihan likuiditas, BNI dapat menurunkan suku bunga deposito BNI untuk menurunkan level deposito BNI, atau melakukan penempatan pada bank lain atau Bank Indonesia atau ke SBI atau Surat Perbendaharaan Negara atau BNI dapat membeli Obligasi Pemerintah sebelum dana tersebut digunakan untuk pinjaman yang diberikan. Untuk membantu BNI memantau likuiditas, BNI membuat laporan likuiditas harian berdasarkan penelaahan atas rekening giro BNI pada Bank Indonesia, deposito dan cadangan sekunder lainnya seperti SBI dan penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia. BNI menyusun laporan likuiditas lebih rinci setiap bulannya.

Arus kas dari deposito juga mempunyai pengaruh terhadap posisi likuiditas BNI. Untuk periode 9 bulan pertama tahun 2010, BNI mengalami arus kas keluar dari simpanan yang disebabkan penurunan bersih simpanan nasabah dalam Rupiah, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan simpanan nasabah dalam mata uang asing. BNI memiliki fluktuasi musiman dalam deposito mata uang asing BNI akibat tabungan untuk perjalanan ke Arab Saudi untuk ibadah Haji, yang merupakan rekening simpanan nasabah dalam mata uang asing. BNI biasanya mengalami peningkatan musiman sekitar AS\$200,0 sampai AS\$300,0 juta dari bulan September sampai Februari. Pada tahun 2009, BNI memiliki arus kas masuk dari kenaikan simpanan nasabah BNI.

BNI mungkin membutuhkan tambahan modal untuk mendukung pertumbuhan BNI, untuk mempertahankan rasio kecukupan modal BNI dan untuk menjaga likuiditas yang dibutuhkan. Untuk memperkuat basis modal BNI, di masa lalu BNI telah meningkatkan pendanaan dari penerbitan surat berharga berupa kewajiban subordinasi tanpa jaminan non-konversi, yang memenuhi syarat sebagai modal berbasis risiko Tier II berdasarkan pedoman Bank Indonesia untuk menilai rasio kecukupan modal. Sebagai contohnya, BNI menerbitkan surat berharga subordinasi pada tahun 2002 dan 2003 yang dibeli kembali masing-masing pada tahun 2007 dan 2008. BNI juga menerbitkan surat kewajiban subordinasi senilai AS\$100 juta pada tahun 2003 dan melaksanakan hak opsi untuk membeli kembali kewajiban subordinasi tersebut pada tahun 2008. Hasil dari Penawaran Umum Terbatas ini akan meningkatkan modal dasar BNI. Namun, karena BNI terus meningkatkan portofolio kredit dan mengurangi proporsi aset BNI yang terdiri dari obligasi Pemerintah, yang tidak memiliki risiko, aktiva tertimbang menurut risiko akan meningkatkan dan akibatnya rasio kecukupan modal BNI menurun. BNI mungkin akan mencari pendanaan tambahan melalui penawaran umum atau *private*, ekuitas atau efek-efek ekuitas, penjualan beberapa Obligasi Pemerintah BNI, pinjaman di pasar antar-bank dan/atau peningkatan basis deposito BNI. Meski demikian, tidak dapat dipastikan bahwa pendanaan di masa yang akan datang didapat dengan persyaratan yang dapat diterima oleh BNI, atau sama sekali.

7. Arus Kas

Tabel berikut menunjukkan ringkasan laporan arus kas untuk setiap periode:

(dalam miliaran Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2007	2008	2009	2009 (tidak diaudit)	2010
Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi	(7.840)	(580)	4.502	(10.388)	(10.524)
Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi	(1.915)	(1.584)	13.177	(411)	(5.825)
Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan	3.681	889	(3.227)	(1.248)	(1.338)
(Penurunan)/ Kenaikan bersih kas dan setara kas	(6.074)	(1.274)	14.452	(12.047)	(17.687)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang (digunakan) diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari arus kas dari aktivitas operasi dan kas yang digunakan dalam mendapatkan aset operasional dan mengurangi kewajiban operasional BNI.

Kas bersih yang digunakan BNI untuk kegiatan operasi untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 adalah sebesar Rp10.524 miliar. Hal tersebut berasal dari arus kas sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi. Kas yang digunakan sebagai akibat dari perubahan dalam aset dan kewajiban operasi terutama dari kas sebesar Rp8.118 miliar yang digunakan untuk meningkatnya pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan. Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 adalah sebesar Rp5.017 miliar yang berasal dari pendapatan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp14.597 miliar, pendapatan operasional lainnya sebesar Rp3.314 miliar dan pendapatan bukan operasional bersih sebesar Rp38 miliar, yang sebagian terimbangi oleh bunga dan pembiayaan lainnya sebesar Rp5.479 miliar, pembayaran biaya operasional lainnya sebesar Rp6.575 miliar dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp878 miliar.

Kas bersih yang digunakan BNI untuk kegiatan operasi untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp10.338 miliar. Hal tersebut berasal dari arus kas sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi. Kas yang digunakan sebagai akibat dari perubahan dalam aset dan kewajiban operasi terutama dari kas sebesar Rp1.440 miliar yang digunakan untuk meningkatkan pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan. Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp 5.353 miliar yang berasal dari pendapatan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp14.899 miliar, pendapatan operasional lainnya sebesar Rp2.897 miliar dan pendapatan bukan operasional bersih sebesar Rp72 miliar, yang sebagian terimbangi oleh bunga dan pembiayaan lainnya sebesar Rp6.397 miliar, pembayaran biaya operasi lainnya sebesar Rp5.144 miliar dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp878 miliar.

Kas bersih yang diperoleh BNI dari kegiatan operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp4.502 miliar. Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp7.051 miliar dan terutama berasal dari dapat bunga, provisi dan komisi yang diterima dari sebesar Rp19.509 miliar, pendapatan operasional lainnya yang diterima dari Rp4.014 miliar dan pendapatan bukan operasional bersih sebesar Rp80 miliar yang sebagian diimbangi oleh bunga dan pembiayaan lainnya yang dibayar sebesar Rp8.246 miliar, beban operasional lainnya yang dibayar sebesar Rp7.046 miliar dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp1.261 miliar. Kas bersih yang digunakan dari kegiatan operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebagai akibat perubahan dalam aset dan kewajiban operasional terutama berasal dari kas sebesar Rp25.305 miliar yang diperoleh dari peningkatan simpanan nasabah yang sebagian diimbangi oleh kas sebesar Rp11.437 miliar yang digunakan untuk pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan dan kas sebesar Rp10.918 miliar yang digunakan untuk peningkatan surat-surat berharga dan sebesar Rp3.929 miliar yang digunakan untuk peningkatan penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia.

Kas bersih yang digunakan BNI untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp580 miliar. Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp6.692 miliar dan terutama disebabkan bunga, provisi dan komisi yang diterima sebesar Rp16.435 miliar dan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp2.919 miliar yang sebagian diimbangi oleh bunga dan pembiayaan lainnya yang dibayar sebesar Rp6.967 miliar, beban operasional lainnya yang dibayar sebesar Rp5.121 miliar dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp648 miliar.

Kas bersih yang digunakan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebagai akibat perubahan dalam aset dan kewajiban operasi terutama berasal dari kas Rp27.034 miliar yang digunakan untuk peningkatan pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan, kas sebesar Rp1.563 miliar dari peningkatan tagihan akseptasi dan kas sebesar Rp1.323 miliar yang digunakan untuk peningkatan surat-surat berharga. Kas yang digunakan tersebut yang sebagian diimbangi oleh kas sebesar Rp16.976 miliar yang diperoleh dari peningkatan simpanan nasabah dan kas sebesar Rp3.700 miliar yang diperoleh dari penurunan penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia

Kas bersih yang digunakan BNI dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp7.840 miliar. Hal ini terutama disebabkan arus kas sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi dan kas yang digunakan dalam aset dan kewajiban operasional. Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban adalah sebesar Rp5.047 miliar dan terutama disebabkan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp15.343 miliar dan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp3.864 miliar dan pendapatan bukan operasional bersih sebesar Rp216 miliar yang sebagian diimbangi oleh bunga dan pembiayaan lainnya yang dibayar sebesar Rp7.259 miliar, beban operasional lainnya yang dibayar sebesar Rp5.847 miliar dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp1.270 miliar. Kas bersih yang diperoleh untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sebagai akibat perubahan dalam aset dan kewajiban operasi terutama berasal dari kas sebesar Rp10.392 miliar yang diperoleh dari peningkatan simpanan nasabah dan dari kas sebesar Rp1.460 miliar yang diperoleh dari peningkatan simpanan dari bank lain yang sebagian diimbangi oleh kas sebesar Rp22.820 miliar yang digunakan untuk peningkatan pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan dan kas sebesar Rp2.385 miliar yang ditempatkan pada bank lain dan Bank Indonesia.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan BNI dari kegiatan investasi untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 adalah sebesar Rp5.825 miliar terutama digunakan untuk pembelian Obligasi Pemerintah bersih sebesar Rp977 miliar dan penjualan surat berharga bersih sebesar Rp4.469 miliar. Hal tersebut diimbangi oleh pembelian aset tetap.

Kas bersih yang digunakan BNI dari kegiatan investasi untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp411 miliar terutama digunakan untuk pembelian Obligasi Pemerintah bersih sebesar Rp1.867 miliar dan penjualan surat berharga bersih sebesar Rp2.232 miliar. Hal tersebut diimbangi oleh pembelian aset tetap.

Kas bersih yang diperoleh BNI dari kegiatan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp13.177 miliar diperoleh terutama dari penjualan Obligasi Pemerintah bersih sebesar Rp4.972 miliar dan penjualan bersih surat berharga sebesar Rp8.551 miliar yang sebagian diimbangi oleh ,antara lain, penambahan aset tetap.

Kas bersih yang digunakan BNI dari kegiatan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp1.584 miliar terutama digunakan untuk pembelian Obligasi Pemerintah bersih sebesar Rp1.256 miliar dan penambahan aset tetap sebesar Rp463 miliar yang sebagian diimbangi oleh, antara lain, penjualan surat-surat berharga bersih sebesar Rp130 miliar.

Kas bersih yang digunakan BNI untuk kegiatan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp1.915 miliar digunakan untuk pembelian surat-surat berharga bersih sebesar Rp2.830 miliar dan penambahan aset tetap sebesar Rp464 miliar yang sebagian diimbangi oleh, antara lain, penjualan Obligasi Pemerintah bersih sebesar Rp1.353 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan BNI dari kegiatan pendanaan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 adalah sebesar Rp1.338 miliar terutama dikarenakan pembayaran dividen, program kemitraan dan bina lingkungan sebesar Rp969 miliar dan penurunan pinjaman yang diterima sebesar Rp385 miliar.

Kas bersih yang digunakan BNI dari kegiatan pendanaan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar Rp1.248 miliar terutama dikarenakan penurunan pinjaman sebesar Rp880 miliar dan penurunan pembayaran dividen sebesar Rp170 miliar.

Kas bersih yang digunakan BNI untuk kegiatan pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp3.227 miliar terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman yang diterima sebesar Rp3.047 miliar, pembayaran dividen dan program kemitraan dan bina lingkungan sebesar Rp171 miliar.

Kas bersih yang diperoleh BNI dari kegiatan pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp889 miliar terutama berasal dari kenaikan pinjaman yang diterima dari Rp2.308 miliar yang sebagian diimbangi oleh, antara lain, kas yang digunakan untuk pelunasan hutang subordinasi sebesar Rp934 miliar dan pembayaran dividen, program kemitraan dan bina lingkungan sebesar Rp485 miliar.

Kas bersih yang diperoleh BNI dari kegiatan pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp3.681 miliar terutama berasal dari pengeluaran saham sebesar Rp3.982 miliar dan kenaikan pinjaman yang diterima sebesar Rp2.300 miliar yang sebagian diimbangi oleh kas yang digunakan untuk pelunasan hutang subordinasi sebesar Rp1.305 miliar dan pembayaran dividen, program kemitraan dan bina lingkungan sebesar Rp1.030 miliar.

8. Belanja Modal

Belanja modal merupakan realisasi anggaran investasi dalam rangka pembentukan aset tetap pada periode tertentu. Tabel berikut menunjukkan belanja modal BNI untuk 3 (tiga) tahun terakhir yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 serta untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 dan 2010 :

(dalam miliaran Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2007	2008	2009	2009 (tidak diaudit)	2010
Tanah	55	39	33	-	4
Bangunan	237	219	260	165	211
Lain-lain	173	205	410	193	206
Jumlah belanja modal	464	464	703	358	422

BNI telah merancang anggaran untuk melakukan belanja modal sekitar Rp1.121 miliar pada tahun 2010, yang mana sekitar Rp447 miliar dianggarkan untuk ekspansi kantor-kantor cabang dan renovasi, Rp558 miliar untuk teknologi informasi dan sebesar Rp116 miliar untuk belanja modal lainnya seperti peralatan kantor. Sumber pendanaan berasal dari laba perseroan dan sisa anggaran tahun sebelumnya yang belum terealisasi. Seluruh belanja modal menggunakan mata uang Rupiah sehingga tidak memerlukan lindung nilai.

9. Kondisi Keuangan

Aset

Tabel berikut ini menerangkan komponen-komponen utama dari aset BNI untuk tanggal-tanggal berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

	Pada tanggal 31 Desember			Pada tanggal 30 September	
	2007	2008	2009	2009 (tidak diaudit)	2010
Kas	3.259	4.428	4.903	4.962	5.325
Giro pada Bank Indonesia	17.573	9.351	8.531	7.499	8.551
Giro pada bank lain	1.182	1.721	6.928	1.462	2.722
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	14.888	22.948	29.852	21.133	22.908
Surat-surat berharga	16.243	10.243	19.516	9.286	17.329
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	200	87	-	-	7
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	330	452	688	575	527
Tagihan derivatif	3	97	7	17	1
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	88.651	111.994	120.843	122.116	126.074
Tagihan akseptasi	2.427	3.990	4.793	2.566	5.858
Obligasi Pemerintah	36.701	34.655	31.040	34.554	33.037
Penyertaan saham	146	137	67	99	41
Aset tetap	6.816	7.286	7.572	7.304	7.902
Aset pajak tangguhan	711	1.989	1.359	1.714	1.119
Aset lain-lain	2.800	2.480	2.898	2.839	4.276
Jumlah aset (sebelum dikurangi penyisihan)	188.980	208.305	235.132	212.569	231.524
Penyisihan	(5.638)	(6.564)	(7.635)	(9.509)	(6.713)
Jumlah aset (bersih)	183.342	201.741	227.497	203.060	224.811

Pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009, serta tanggal 30 September 2009 dan 2010, perubahan pada jumlah aset BNI berasal terutama dari perubahan tingkat aset lancar BNI (terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, Giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia dan surat-surat berharga, termasuk Obligasi Pemerintah yang dimiliki untuk diperdagangkan), pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan dan Obligasi Pemerintah. BNI mengelola likuiditas BNI dengan mempergunakan pendanaan dengan mengelola akun-akun yang menjadi sumber aset-aset lancar berdasarkan kebutuhan cadangan BNI, pertimbangan *yield* dan analisis tentang kondisi pasar. BNI juga mempertahankan pendanaan yang ada pada aset lancar sampai BNI mendapatkan pinjaman tambahan untuk memanfaatkan pendanaan tersebut.

Perbandingan Laporan Keuangan pada Tanggal 30 September 2010 dengan 31 Desember 2009

Jumlah aset BNI menurun sebesar Rp2.686 miliar atau 1,2% dari Rp227.497 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp224.811 miliar pada tanggal 30 September 2010, terutama sebagai akibat dari penurunan penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, giro pada bank lain dan surat berharga.

Aset lancar menurun sebesar Rp11.973 miliar atau 17,3% dari Rp69.234 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp57.261 miliar pada tanggal 30 September 2010. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya giro pada bank lain dan penurunan pada surat berharga.

Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan meningkat sebesar Rp5.231 miliar atau 4,3% dari Rp120.843 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp126.074 miliar pada tanggal 30 September 2010. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh ekspansi portofolio kredit pada tahun 2010.

Obligasi Pemerintah meningkat sebesar Rp1.997 miliar atau 6,4% dari Rp31.040 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp33.037 miliar pada tanggal 30 September 2010. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembelian Obligasi Pemerintah bersih.

Perbandingan Laporan Keuangan 31 Desember 2009 dengan 31 Desember 2008

Jumlah aset BNI meningkat sebesar Rp25.756 miliar atau 12,8% dari Rp201.741 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp227.497 miliar pada tanggal 31 Desember 2009, terutama sebagai akibat dari peningkatan penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, surat-surat berharga dan pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan.

Aset lancar meningkat sebesar Rp21.155 miliar atau 44,0% dari Rp48.078 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp69.233 miliar pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan surat-surat berharga, peningkatan giro pada Bank Indonesia dan penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia karena kebutuhan untuk meningkatkan cadangan primer dan sekunder BNI sebagai akibat dari kenaikan substansial pada dana deposito di 2009.

Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan meningkat sebesar Rp8.849 miliar atau 7,9% dari Rp111.994 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp120.843 miliar pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh ekspansi portofolio kredit BNI pada tahun 2009.

Obligasi Pemerintah mengalami penurunan sebesar Rp3.616 miliar atau 10,4% dari Rp34.655 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp31.040 miliar pada tanggal 31 Desember 2009. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penjualan beberapa Obligasi Pemerintah yang diperdagangkan diatas biaya perolehan. BNI menjual Obligasi Pemerintah untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian untuk restrukturisasi menjadi reksadana terproteksi.

Perbandingan Laporan Keuangan 31 Desember 2008 dengan 31 Desember 2007

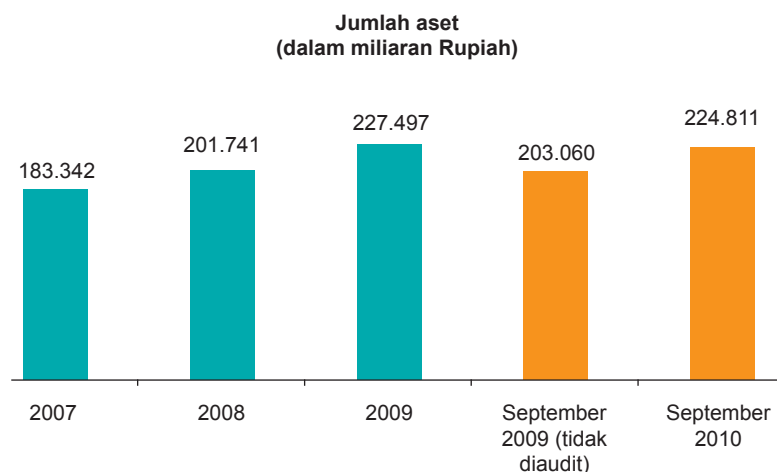
Jumlah aset BNI meningkat sebesar Rp18.399 miliar atau 10,0% dari Rp183.342 miliar pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp201.741 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, terutama sebagai akibat dari peningkatan pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan dan penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia.

Aset lancar menurun sebesar Rp5.003 miliar atau 9,4% dari Rp53.081 miliar pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp48.078 miliar pada tanggal 31 Desember 2008. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan dalam rekening giro pada Bank Indonesia dan penurunan surat-surat berharga.

Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan meningkat sebesar Rp23.343 miliar atau 26,3% dari Rp88.651 miliar pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp111.994 miliar pada tanggal 31 Desember 2008. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh ekspansi portofolio kredit BNI di tahun 2008.

Obligasi Pemerintah mengalami penurunan sebesar Rp2.046 miliar atau 5,6% dari Rp36.701 miliar pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp34.655 miliar pada tanggal 31 Desember 2008. Penurunan ini terutama disebabkan penjualan Obligasi Pemerintah bersih di pasar sekunder dan Obligasi Pemerintah yang jatuh tempo. Penjualan Obligasi Pemerintah bersih pada tahun 2008 terutama untuk kebutuhan likuiditas BNI pada kuartal ketiga tahun 2008.

Pada periode ini, pada masa awal krisis keuangan, cadangan sekunder BNI turun sebesar Rp16.812 miliar dari Rp17.182 miliar pada tanggal 31 Januari 2008 menjadi Rp370 miliar pada tanggal 22 Agustus 2008.



Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban

Tabel berikut ini menjabarkan komponen utama dari kewajiban BNI untuk tanggal-tanggal berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

	Pada tanggal 31 Desember			Pada tanggal 30 September	
	2007	2008	2009	2009 (tidak diaudit)	2010
Kewajiban segera	1.118	1.060	1.109	918	1.033
Simpanan nasabah	146.189	163.164	188.469	163.654	183.772
Simpanan dari bank lain	3.804	4.100	3.819	3.495	3.155
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	199	625	-	-	-
Kewajiban derivatif	29	83	152	210	233
Kewajiban akseptasi	1.594	1.969	2.559	1.962	1.719
Surat-surat berharga yang diterbitkan	1.269	1.269	1.261	1.267	1.277
Pinjaman yang diterima	6.309	8.617	5.570	7.737	5.185
Kewajiban pajak	151	599	94	163	563
Kewajiban pajak tangguhan	-	-	-	-	19
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	179	129	156	155	149
Kewajiban lain-lain	4.319	4.664	5.134	5.064	6.345
Pinjaman subordinasi	934	-	-	-	-
Jumlah kewajiban	166.094	186.279	208.322	184.625	203.449

Pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009, serta tanggal 30 September 2009 dan 2010, perubahan jumlah kewajiban terutama disebabkan oleh perubahan tingkat simpanan nasabah BNI dan pinjaman yang diterima.

Perbandingan Laporan Keuangan pada Tanggal 30 September 2010 dengan 31 Desember 2009

Jumlah kewajiban menurun sebesar Rp4.873 miliar atau 2,3% dari Rp208.322 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp203.449 miliar pada tanggal 30 September 2010, terutama sebagai akibat dari turunnya simpanan nasabah.

Simpanan nasabah menurun sebesar Rp4.697 miliar atau 2,5% dari Rp188.469 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp183.772 miliar pada tanggal 30 September 2010. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya simpanan dalam Rupiah. Simpanan nasabah dalam Rupiah menurun sebesar Rp5.590 miliar atau 3,6% dari Rp153.801 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp148.211 miliar pada 30 September 2010. Simpanan dalam mata uang asing meningkat sebesar Rp893 miliar atau 2,6% dari Rp34.668 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp35.561 miliar pada tanggal 30 September 2010.

Pinjaman yang diterima menurun sebesar Rp385 miliar atau 6,9% dari Rp5.570 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp5.185 miliar pada tanggal 30 September 2010. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dan lainnya.

Perbandingan Laporan Keuangan 31 Desember 2009 dengan 31 Desember 2008

Jumlah kewajiban meningkat sebesar Rp22.043 miliar atau 11,8% dari Rp186.279 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp208.322 miliar pada tanggal 31 Desember 2009, terutama sebagai akibat dari peningkatan simpanan nasabah BNI yang sebagian diimbangi oleh penurunan pinjaman yang diterima.

Simpanan dari nasabah meningkat sebesar Rp25.305 miliar atau 15,5% dari Rp163.164 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp188.469 miliar pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan nasabah dalam Rupiah dan mata uang asing pada tahun 2009. Simpanan nasabah dalam Rupiah meningkat pada seluruh produk sebesar Rp16.203 miliar atau 11,8% dari Rp137.598 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp153.801 miliar pada tanggal 31 Desember 2009. Simpanan nasabah dalam mata uang asing meningkat sebesar Rp9.101 miliar atau 35,6% dari Rp25.567 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp34.668 miliar pada tanggal 31 Desember 2009.

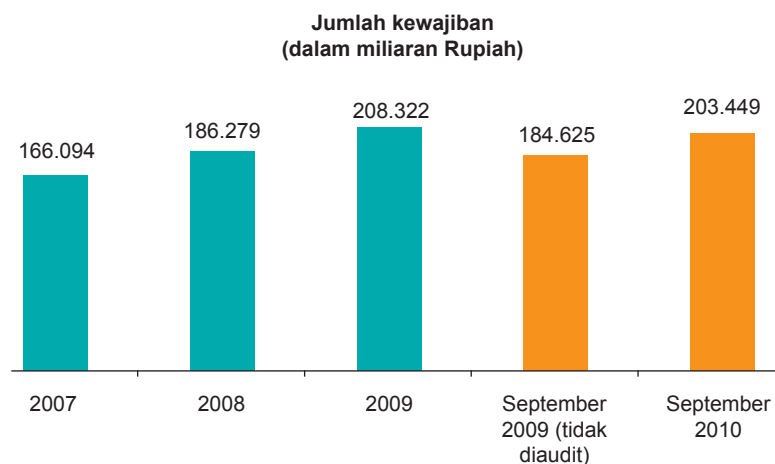
Pinjaman yang diterima menurun sebesar Rp3.047 miliar atau 35,4% dari Rp8.617 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp5.570 miliar pada tanggal 31 Desember 2009. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan *bankers acceptance* berdenominasi mata uang asing sebesar Rp2.282 miliar pada tahun 2009.

Perbandingan Laporan Keuangan 31 Desember 2008 dengan 31 Desember 2007

Jumlah kewajiban meningkat sebesar Rp20.185 miliar atau 12,2% dari Rp166.094 miliar pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp186.279 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, terutama sebagai akibat dari peningkatan simpanan nasabah BNI dan peningkatan pinjaman yang diterima.

Simpanan nasabah meningkat sebesar Rp16.975 miliar atau 11,6% dari Rp146.189 miliar pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp163.164 miliar pada tanggal 31 Desember 2008. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan simpanan nasabah dalam Rupiah dan mata uang asing pada tahun 2008. Simpanan nasabah dalam Rupiah meningkat sebesar Rp13.303 miliar atau 10,7% dari Rp124.295 miliar pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp137.598 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, terutama disebabkan oleh kenaikan deposito berjangka dan tabungan. Simpanan nasabah dalam mata uang asing meningkat sebesar Rp3.674 miliar atau 16,8% dari Rp21.893 miliar pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp25.567 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 terutama disebabkan oleh peningkatan deposito berjangka dan giro.

Pinjaman yang diterima meningkat sebesar Rp2.308 miliar atau 36,6% dari Rp6.309 miliar pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp8.617 miliar pada tanggal 31 Desember 2008. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dari sebesar Rp2.462 miliar.



Ekuitas

Perbandingan Laporan Keuangan pada Tanggal 30 September 2010 dengan 31 Desember 2009

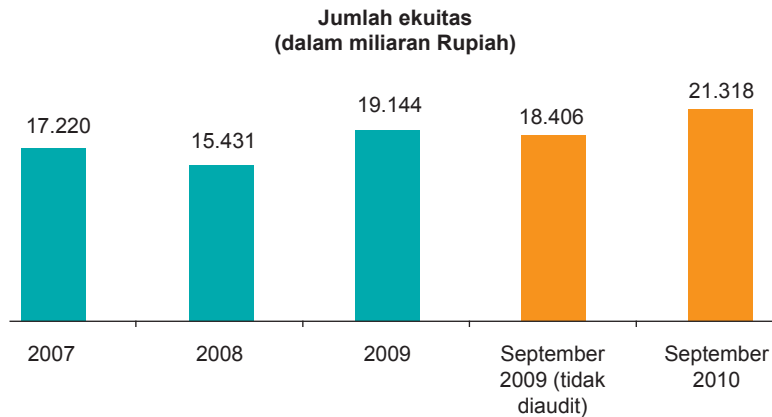
Ekuitas meningkat sebesar Rp2.174 miliar atau 11,4% dari Rp19.144 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp21.318 miliar pada tanggal 30 September 2010, terutama sebagai akibat dari laba bersih sebesar Rp2.954 miliar pada periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 dan kenaikan sebesar Rp2.172 miliar pada laba ditahan.

Perbandingan Laporan Keuangan 31 Desember 2009 dengan 31 Desember 2008

Ekuitas meningkat sebesar Rp3.713 miliar atau 24,1% dari Rp15.431 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp19.144 miliar pada tanggal 31 Desember 2009, yang terutama berasal dari laba bersih sebesar Rp2.484 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan kenaikan sebesar Rp2.065 miliar pada laba ditahan.

Perbandingan Laporan Keuangan 31 Desember 2008 dengan 31 Desember 2007

Ekuitas menurun sebesar Rp1.789 miliar atau 10,4% dari Rp17.220 miliar pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp15.431 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, terutama sebagai akibat dari kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang tersedia untuk dijual sebesar Rp2.631 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.



10. Komitmen dan Kontinjensi

Fasilitas pinjaman

Sebagai bagian dari kegiatan perbankan sehari-hari, BNI menjaga fasilitas pinjaman yang dapat ditarik dari waktu ke waktu oleh nasabah BNI sesuai dengan persyaratan dan kondisi fasilitas tersebut. BNI memiliki cadangan sekunder, yang terutama terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia dan penempatan jangka pendek pada bank domestik dan asing, untuk menjaga cadangan lancar di tingkat yang memadai. BNI memperhitungkan jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan BNI dan menilai fluktuasi penarikan atas fasilitas pinjaman yang belum digunakan BNI dalam menghitung tingkat cadangan sekunder. Pada tanggal 30 September 2010, BNI mempunyai fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar Rp21.467 miliar.

Valuta asing dan kontrak derivatif

Kebijakan BNI tentang risiko nilai tukar adalah untuk memenuhi peraturan Bank Indonesia mengenai posisi devisa neto. Bank Indonesia saat ini mensyaratkan bahwa posisi devisa neto BNI dalam semua valuta asing tidak lebih dari 20,0% dari jumlah modal tier I dan tier II dikurangi penyertaan pada Anak Perusahaan. Pada tanggal 30 September 2010, posisi devisa neto BNI adalah sebesar 8,1% dari jumlah modal tier I dan tier II dikurangi penyertaan pada Anak Perusahaan. Kebijakan BNI meliputi memasuki transaksi untuk mengalihkan risiko kurs valuta asing dalam transaksi derivatif dengan nasabah BNI kepada pihak lain dan membeli dan menjual valuta asing yang diperlukan untuk menjaga posisi devisa neto BNI.

BNI memiliki transaksi *forward swap* dengan nasabah BNI. Transaksi *forward swap* ini memungkinkan nasabah untuk memindahkan, mengubah atau mengurangi risiko kurs valuta asing mereka. Sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, BNI mengelola kontrak derivatif dengan nasabah dengan memasuki perjanjian *forward* dengan lembaga keuangan lainnya. Perjanjian *forward* tersebut dirancang untuk memiliki nilai kontrak dan jatuh tempo yang sama secara substansial dengan kontrak derivatif yang satunya.

Letters of credit dan jaminan

Sebagai bagian dari kegiatan perbankan, BNI menerbitkan surat kredit ekspor dan jaminan keuangan dan kinerja dan *letters of credit*, dimana dalam penggunaan jasa perbankan tersebut kami membebaskan biaya proporsi berdasarkan nilai surat kredit atau jaminan dan risiko kredit yang dengan tarif tertentu dari nasabah.

Tabel berikut menunjukkan surat-surat kami dan jaminan kredit terhutang pada tanggal yang tertera:

(dalam miliaran Rupiah)

	Pada tanggal 31 Desember			Pada tanggal 30 September	
	2007	2008	2009	2009 (tidak diaudit)	2010
<i>Irrevocable letters of credit</i> yang masih berjalan	6.055	3.582	4.470	5.236	4.634
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:					
<i>Standby letter of credit</i>	963	2.541	2.080	1.899	1.691
<i>Risk sharing</i>	-	325	192	-	97
<i>Performance bond</i>	2.145	2.904	4.105	3.072	4.082
<i>Advance payment bonds</i>	636	1.110	1.164	915	1.346
<i>Bid Bonds</i>	729	470	486	448	1.031
<i>Shipping guarantee</i>	-	0	3	27	68
Garansi bank lain	1.824	1.062	863	744	794
Total	12.352	11.994	13.363	12.341	13.743

11. Kebijakan Permodalan

BNI harus memenuhi ketentuan kecukupan modal dari Bank Indonesia, terutama persyaratan kecukupan modal sesuai dengan *Basel Committee of the Bank of International Settlements* pada tahun 1988.

Total minimum modal terhadap ATMR untuk bank-bank di Indonesia sebesar 8,0%. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang mensyaratkan rasio CAR tanpa memperhitungkan pendapatan pajak tangguhan. Sejak tahun 2009, Bank Indonesia telah mensyaratkan agar BNI memperhitungkan risiko operasional, selain dari kredit dan risiko pasar untuk menentukan rasio CAR.

Tabel berikut menunjukkan perhitungan permodalan dan rasio CAR BNI (tidak diaudit) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia berdasarkan laporan keuangan BNI:

(dalam miliaran Rupiah, kecuali untuk CAR-TIER I dan CAR disajikan dalam persentase)

	Pada tanggal 31 Desember (tidak diaudit)			Pada tanggal 30 September (tidak diaudit)	
	2007	2008	2009	2009	2010
Modal Inti (<i>Tier I</i>) ⁽¹⁾	12.331	12.613	14.384	14.116	15.920
Modal pelengkap (<i>Tier II</i>) ⁽²⁾	4.902	5.164	5.399	5.164	3.469
Penyertaan saham ⁽³⁾	(135)	(137)	(56)	-	-
Jumlah modal ⁽⁴⁾	17.098	17.640	19.727	19.280	19.389
Jumlah ATMR – Risiko kredit ⁽⁵⁾	99.110	121.503	140.557	121.528	137.422
Jumlah ATMR – Risiko pasar ⁽⁶⁾	11.833	8.119	1.337	1.566	2.049
Jumlah ATMR – Risiko operasional ⁽⁷⁾	-	-	-	-	16.869
CAR					
CAR ⁽⁸⁾	17,3%	14,5%	14,0%	15,9%	14,1%
CAR risiko pasar ⁽⁹⁾	15,4%	13,6%	13,9%	15,7%	13,9%
CAR risiko pasar dan operasional ⁽¹⁰⁾	-	-	-	-	12,4%
CAR sesuai peraturan BI	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%

Catatan:

- (1) Modal inti (*Tier 1*) merupakan perhitungan modal inti sesuai dengan peraturan Bank Indonesia
- (2) Modal pelengkap (*Tier 2*) merupakan perhitungan modal pelengkap sesuai dengan peraturan Bank Indonesia
- (3) Merupakan penyertaan saham BNI kepada anak perusahaan yang dihitung dengan menggunakan metode ekuitas
- (4) Merupakan penjumlahan modal *Tier 1* dan modal *Tier 2* dikurangi dengan penyertaan saham.
- (5) Merupakan aktiva tertimbang menurut risiko, yang terdiri dari aset neraca serta beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi yang diberikan bobot sesuai kadar risiko kredit yang melekat pada setiap pos sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia
- (6) Merupakan aktiva tertimbang menurut risiko dengan mempertimbangkan risiko pasar sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia
- (7) Merupakan aktiva tertimbang menurut risiko dengan mempertimbangkan risiko operasional sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia
- (8) Merupakan jumlah modal dibagi dengan jumlah ATMR risiko kredit
- (9) Merupakan jumlah modal dibagi dengan jumlah ATMR risiko kredit dan ATMR risiko pasar
- (10) Merupakan jumlah modal dibagi dengan jumlah ATMR risiko kredit, ATMR risiko pasar dan ATMR risiko operasional

Perhitungan rasio ini mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, modal pelengkap (Tier II) telah memperhitungkan semua penyisihan umum berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi laporan keuangan yang berlaku umum di Indonesia yang mempertimbangkan potensi kerugian kredit di masa mendatang. BNI masih membutuhkan tambahan modal untuk mendukung pertumbuhan usahanya dan untuk mempertahankan rasio CAR sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

BNI akan terus meningkatkan portofolio kredit dan mengurangi porsi aset yang terdiri dari Obligasi Pemerintah yang memiliki risiko nihil, BNI memperkirakan aktiva tertimbang menurut risiko BNI akan naik. Hal tersebut akan menurunkan CAR dan BNI mungkin akan harus menambah modal dalam rangka memenuhi rasio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BNI menyadari bahwa dimasa yang akan datang tidak terjamin akan adanya pendanaan yang tersedia dengan kondisi yang dapat menerima BNI atau tidak sama sekali. BNI kemungkinan akan mencari tambahan pendanaan melalui penawaran publik atau pinjaman, ekuitas atau efek-efek yang berkaitan dengan ekuitas, penjualan portofolio Obligasi Pemerintah, pinjaman antar bank dan peningkatan basis dana pihak ketiga.

12. Kewajiban Kontraktual

Tabel berikut menunjukkan kewajiban kontraktual BNI yang material pada tanggal 30 September 2010:

(dalam miliaran Rupiah)

	Jatuh tempo				Total
	Kurang dari	Lebih dari			
		1 tahun	1-3 tahun	3-5 tahun	
Hutang Obligasi jangka panjang:					
Surat-surat berharga yang diterbitkan	999	278	-	-	1.277
<i>Two-step loans</i>	-	34	-	95	129
Kualitas kredit	55	-	-	-	55
Jumlah	1.054	312	-	95	1.461

13. Prinsip-prinsip perbankan yang sehat

Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu aspek penting prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Risiko likuiditas merupakan risiko dimana Perseroan akan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Ketidaksesuaian waktu arus kas masuk dan keluar serta risiko likuiditas terkait merupakan suatu hal yang melekat pada keseluruhan kegiatan operasional Perseroan dan mungkin dipengaruhi dari kejadian-kejadian internal dan/atau eksternal, termasuk risiko kredit atau operasional, kondisi pasar atau guncangan sistemik. Pengelolaan posisi serta risiko likuiditas dan pendanaan, dilakukan oleh ALCO.

Perseroan menyusun kebijakan pengelolaan risiko likuiditas yang memaparkan tanggung jawab, pengelolaan dan pendekatan strategis yang diambil untuk menjamin ketersediaan likuiditas yang cukup guna memenuhi kewajiban Perseroan secara kontraktual maupun yang dipersyaratkan oleh Regulator.

Perseroan bergantung pada simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank-bank lain sebagai sumber pendanaan utamanya yang memiliki jatuh tempo yang lebih pendek dan sebagian besar dapat ditarik sewaktu-waktu. Pendanaan dengan jangka waktu yang pendek tersebut meningkatkan risiko likuiditas Perseroan dan Perseroan secara aktif mengelola risiko tersebut dengan memberikan tingkat suku bunga yang bersaing dan secara konstan memantau kecenderungan suku bunga pasar.

Kerangka pengelolaan risiko likuiditas mengharuskan Perseroan untuk menetapkan batas-batas likuiditas untuk pengelolaan likuiditas secara hati-hati. Batas-batas tersebut diantaranya adalah:

- Ketidaksesuaian waktu arus kas kontraktual dan perilaku mata uang lokal dan valuta asing;
- Tingkat pinjaman *wholesale* untuk memastikan bahwa besarnya pendanaan sesuai dengan kondisi pasar;
- Komitmen, baik pada neraca dan rekening administratif, untuk memastikan tersedianya dana yang cukup apabila terjadi penarikan atas komitmen tersebut;
- Rasio *loan to deposits* untuk memastikan bahwa kredit komersial didanai oleh sumber pendanaan yang stabil;
- Jumlah pendanaan jangka menengah untuk mendukung portofolio aset; dan
- Jumlah pembiayaan dalam mata uang lokal yang bersumber dari pendanaan dalam mata uang asing.

Selain itu, Perseroan merumuskan *liquidity stress scenario* yang mengasumsikan percepatan penarikan simpanan dalam jangka waktu tertentu. Perseroan harus memastikan bahwa arus kas masuk melebihi arus kas keluar dalam skenario tersebut.

Semua limit dikaji sekurangngnya setahun sekali atau lebih cepat jika diperlukan, untuk memastikan relevansinya dengan kondisi pasar dan strategi bisnis. Kepatuhan terhadap limit dipantau secara rutin oleh pihak independen yaitu unit *Market Risk*. Pelampauan limit dieskalasi dan disetujui oleh pihak yang berwenang dan dikaji oleh ALCO. Pelampauan limit juga dilaporkan secara bulanan kepada ALCO untuk dikaji lebih lanjut.

Permodalan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, KPMM dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, dimana ditetapkan bahwa bank wajib memiliki rasio KPMM minimum 8,0%. Efektif 1 Januari 2009, KPMM dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 serta 30 Juni 2009 dan 2010, Perseroan (induk perusahaan saja) berhasil mencapai KPMM melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Perseroan memiliki komitmen untuk menjaga tingkat KPMM pada level yang sehat dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian Bank.

Rasio KPMM Perseroan (induk perusahaan saja) adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni	
	2007	2008	2009	2009*)	2010
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko – tanpa memperhitungkan risiko pasar	97.436	121.503	138.877	120.110	131.541
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko – dengan memperhitungkan risiko pasar (tidak diaudit)	109.269	129.622	140.214	121.230	133.402
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko – dengan memperhitungkan risiko operasional (tidak diaudit)	-	-	-	-	148.854
Rasio KPMM - risiko kredit dan risiko pasar	15,74%	13,59%	13,77%	15,51%	13,41%
Rasio KPMM - risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	-	-	-	-	12,02%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%

Catatan :

*) tidak diaudit

Kualitas Aset

Rasio NPL-kotor pada tanggal 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah masing-masing sebesar 4,4%, 4,8%, 5,0% dan 8,5%. Rasio NPL-bersih pada tanggal 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah masing-masing sebesar 0,8%, 0,9%, 1,7% dan 4,0%. Rasio penyisihan kerugian terhadap NPL pada tanggal 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah masing-masing sebesar 118,3%, 120,1%, 101,0% dan 71,9%. Penyisihan kerugian (CKPN) pada tanggal 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah masing-masing sebesar Rp6.529 miliar, Rp6.920 miliar, Rp5.652 miliar dan Rp5.436 miliar. Pemenuhan CKPN pada tanggal 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah masing-masing sebesar 126,4%, 161,7%, 190,2% dan 145,0%.

Rasio imbal hasil aset (ROA) Perseroan (induk perusahaan saja) untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 dan 2010 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 adalah masing-masing sebesar 1,22%, 1,77%, 0,51%, 0,68% dan 1,19%.

Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan (induk perusahaan saja) untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 dan 2010 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 adalah masing-masing sebesar 16,5%, 26,0%, 8,1%, 9,4% dan 17,5%. Masih fluktuatifnya ROE Perseroan tersebut disebabkan oleh belum stabilnya laba bersih Perseroan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi, sementara jumlah ekuitas cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Rasio pendapatan bunga bersih (NIM) Perseroan (induk perusahaan saja) untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 dan 2010 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 adalah masing-masing sebesar 6,2%, 6,1%, 5,4%, 6,5% dan 6,1%. Menurunnya rasio NIM lebih disebabkan karena semakin kecilnya *margin* yang dapat diperoleh akibat tingkat persaingan di industri perbankan yang semakin kompetitif. Perseroan bertekad untuk meningkatkan rasio NIM dengan memperbaiki komposisi /struktur dana pihak ketiga.

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi yang dicapai. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional Perseroan (induk perusahaan saja) untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 dan 2010 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 adalah masing-masing sebesar 87,3%, 77,7%, 93,3%, 90,7% dan 85,7%. Investasi pada infrastruktur dan sumber daya manusia untuk perbaikan operasional dan pelayanan kepada nasabah merupakan penyebab masih tingginya rasio BOPO dan Perseroan berencana untuk menurunkan rasio ini ke tingkat yang lebih efisien dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Likuiditas

Dalam kegiatan operasionalnya, pertumbuhan kredit senantiasa dilakukan berdasarkan azas perbankan yang sehat guna mengantisipasi agar tingkat pinjaman dengan jumlah dana pihak ketiga tetap dalam kriteria sehat berdasarkan peraturan Bank Indonesia.

Sesuai dengan kegiatan usaha perbankan dan pedoman dari Bank Indonesia, parameter yang digunakan untuk menghitung risiko likuiditas terdiri dari rasio aktiva/pasiva likuid, potensi *maturity mismatch*, kondisi rasio *loan to deposit*, proyeksi *cash flow*, konsentrasi pendanaan, stabilitas pendanaan, akses ke sumber dana, serta kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas berdasarkan arus dana masuk dan dana keluar yang berasal dari penghimpunan dan penyediaan dana, termasuk arus kas masuk yang berasal dari angsuran pinjaman yang diberikan.

Rasio umum yang sering digunakan untuk pengukuran likuiditas dalam industri perbankan adalah rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan (LDR). Rasio LDR untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 dan 2010 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 masing-masing sebesar 74,6%, 68,6%, 60,6%, 68,6% dan 64,1%. Tingkat LDR Perseroan menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan Perseroan terus mengalami peningkatan, yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan bunga yang lebih meningkat.

Tingkat LDR yang optimal berkisar antara 90%-95% dengan nilai maksimum sebesar *natural LDR*-nya. *Natural LDR* digunakan untuk mengukur kapasitas Perseroan dalam memberikan kredit dengan dana yang berasal dari simpanan nasabah ditambah dengan kapital setelah memperhitungkan GWM, aset tetap, dan *illiquid earning assets*. Artinya Perseroan tidak tergantung dengan sumber dana antar bank untuk membiayai pinjaman yang diberikan. Rasio *natural LDR* adalah sebesar 66,6%.

Untuk menjaga tingkat LDR dalam rentang yang optimal dan menjadi bagian dari pemantauan risiko likuiditas, LDR dimonitor secara harian dan dilaporkan sampai kepada tingkat Direksi. Rapat *Asset Liability Committee* (ALCO) diadakan secara reguler setiap bulan dimana salah satunya adalah untuk memastikan bahwa LDR berada dalam tingkat yang optimum.

Kepatuhan

Perseroan senantiasa memonitor tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kepatuhan atas peraturan Bank Indonesia, dimana diantaranya Perseroan tidak pernah melakukan pelanggaran dan pelanggaran BMPK (baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait) dan Perseroan senantiasa menjaga tingkat GWM dan PDN sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. Rasio GWM Utama (Rupiah) BNI pada tanggal 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah masing-masing sebesar 5,24%, 5,42%, 5,20%, dan 14,74%. Rasio GWM Utama (Valas) BNI pada tanggal 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah masing-masing sebesar 1,05%, 1,04%, 1,02% dan 3,03%. Rasio GWM Sekunder (Rupiah) BNI pada tanggal 30 September 2010 dan 31 Desember 2009 adalah masing-masing sebesar 22,0% dan 27,63%. Rasio PDN BNI pada tanggal 30 September 2010, 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah masing-masing sebesar 7,47%, 6,33%, 7,59% dan 6,14%.

14. Tingkat Kesehatan BNI

Dalam menghadapi meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, Perseroan perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari kegiatan operasionalnya. Hasil identifikasi kondisi tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang.

Tingkat kesehatan dalam industri perbankan merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) atas tingkat kesehatan Perseroan (sebagai induk perusahaan - bank) berikut peringkat untuk setiap komponen untuk posisi 30 September 2010 adalah sebagai berikut:

1. Permodalan

Saat ini Perseroan memiliki rasio KPMM yang lebih tinggi dibandingkan dengan rasio KPMM yang ditetapkan Bank Indonesia. Hal ini didukung oleh porsi modal inti yang hampir mencapai 6 kali lipat dibandingkan modal pelengkapannya. Selain itu penambahan modal dari laba ditahan juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Peringkat untuk komponen permodalan adalah 2 (dua). Yang termasuk dalam rasio permodalan adalah CAR.

2. Kualitas Aset

Terkait dengan kualitas aset, Perseroan telah memiliki kebijakan, prosedur dan sistem internal kontrol yang baik, termasuk penanganan dan monitoring atas aktiva produktif bermasalah dimana seluruh aspek risiko yang menyangkut penanaman dana pada aktiva produktif telah dipertimbangkan dengan masak oleh pejabat yang berwenang, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan juga memiliki rasio pemenuhan PPAP yang jauh melebihi ketentuan yang berlaku. Peringkat untuk komponen kualitas aset adalah 2 (dua). Yang termasuk dalam rasio pemenuhan PPAP adalah NPL, CKPN.

3. Manajemen

Manajemen Perseroan memiliki *track record* kinerja yang baik, independen, serta mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekstern. Selain itu Perseroan juga telah menerapkan praktek *Good Corporate Governance* dan senantiasa tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Perseroan saat ini telah memiliki sistem pengendalian risiko yang kuat serta mampu mengatasi masalah yang dihadapi baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Perseroan selalu dapat memenuhi ketentuan yang berlaku seperti : BMPK, PDN dan KYC. Peringkat untuk komponen manajemen adalah 2 (dua).

4. Rentabilitas

Perseroan memiliki tingkat rentabilitas yang tergolong baik serta mempunyai potensi pertumbuhan yang relatif tinggi dan stabil. Manajemen mempunyai komitmen kuat untuk mempertahankan tingkat rentabilitas yang baik. Selain itu tingkat efisiensi juga menunjukkan ratio yang semakin membaik. Peringkat untuk komponen rentabilitas adalah 2 (dua), yang termasuk dalam rasio rentabilitas adalah ROA, ROE, NIM, BOPO.

5. Likuiditas

Perseroan memiliki tingkat likuiditas yang sangat baik didukung dengan kebijakan pengelolaan likuiditas yang diterapkan secara konsisten. Perseroan tidak mengalami kesulitan atas akses terhadap sumber dana mengingat Perseroan memiliki kinerja keuangan yang baik, reputasi dan hubungan yang baik dengan bank asing maupun bank lokal, serta adanya dukungan dari Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas. Peringkat untuk komponen likuiditas adalah 1 (satu). Yang termasuk dalam rasio likuiditas adalah LDR dan GWM.

6. Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar

Perseroan menghadapi risiko yang cukup rendah didukung dengan penerapan manajemen risiko pasar yang efektif, efisien dan konsisten. Peringkat untuk komponen sensitivitas terhadap risiko pasar adalah 2 (dua).

Berdasarkan analisis atas setiap komponen tingkat kesehatan tersebut diatas berikut peringkat atas setiap komponen, maka Perseroan berkesimpulan bahwa secara keseluruhan Perseroan memiliki Peringkat Komposit 2 (dua) dimana Perseroan tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan, namun Perseroan masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi dengan tindakan rutin.

15. Prospek Usaha

Penjelasan mengenai proses manajemen risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar dan suku bunga) serta keterkaitannya terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.

16. Manajemen Resiko

Penjelasan mengenai Manajemen Risiko Perseroan telah diuraikan pada Bab VIII Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan butir 17 Manajemen Risiko.

V. RISIKO USAHA

Investasi pada saham BNI tidak terlepas dari berbagai risiko. Investor diharapkan untuk mempertimbangkan secara hati-hati seluruh informasi yang terdapat di dalam Prospektus, termasuk penjelasan tentang risiko-risiko di bawah ini sebelum membuat keputusan investasi. Kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha BNI dapat terkena dampak negatif secara material akibat risiko-risiko tersebut. Harga pasar saham BNI juga dapat mengalami penurunan yang diakibatkan oleh risiko-risiko tersebut sehingga dapat menyebabkan kerugian investasi.

1. BNI dapat terus mengalami peningkatan NPL, kredit dalam perhatian khusus, cadangan kerugian dan hapus buku.

BNI pernah mengalami peningkatan kredit bermasalah atau *non-performing loan* ("NPL") selama periode ketidakstabilan ekonomi di Indonesia. Pada periode antara tahun 1997 dan 1999, kualitas aset BNI menurun secara signifikan yang disebabkan oleh kegagalan bayar dari debitur akibat krisis keuangan Asia dan terdepresiasinya mata uang Rupiah dalam jumlah besar serta tingginya tingkat suku bunga. Sebagai akibatnya, BNI memiliki ekuitas negatif karena kerugian dari NPL yang kemudian direkapitalisasi oleh Pemerintah pada tahun 2000. Dalam program rekapitalisasi ini, dilakukan pemindahan sejumlah Rp33.222 miliar aset terutama NPL dalam kategori "macet" ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN"). Walaupun program rekapitalisasi telah meningkatkan kondisi keuangan BNI, BNI masih mengalami rasio NPL terhadap total kredit yang cukup tinggi.

Pada tahun-tahun setelah dilakukannya rekapitalisasi, BNI masih mengalami tingkat NPL yang cukup tinggi, yang disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk diantaranya strategi masa lalu BNI untuk meningkatkan portofolio kredit BNI secara agresif selama tahun 2007 dan 2008, khususnya kredit untuk usaha kecil dan menengah, serta melonggarnya penilaian kredit (*credit assessment*) dan proses persetujuan kredit (*loan approval process*) BNI. Sebagai contoh, kualitas aset BNI juga dipengaruhi oleh modifikasi proses persetujuan kredit dengan konsep "four eyes" pada bulan Mei 2008. Sebagai akibat dari strategi sebelumnya, portofolio kredit BNI tumbuh sebesar 33,4% pada tahun 2007 dan 26,3% pada tahun 2008. Saat ini BNI menerapkan proses persetujuan kredit dengan modifikasi konsep "four eyes" tersebut, dimana unit risiko memberikan rekomendasi atas proses persetujuan kredit tersebut dan unit bisnis memberikan keputusan atas persetujuan kredit. Pada bulan Januari 2011, konsep "four eyes" tersebut akan disempurnakan kembali sehingga unit risiko tidak hanya sebagai pemberi rekomendasi saja.

Pada tahun 2008 BNI juga melakukan penyempurnaan prosedur untuk memastikan bahwa BNI menerapkan aspek-aspek kualitatif dari kriteria Bank Indonesia dalam melakukan klasifikasi kredit yang kemudian mengakibatkan reklasifikasi kredit sebagai NPL. Krisis keuangan global pada tahun 2008 dan 2009 juga mempengaruhi segmen tertentu dari basis nasabah BNI, termasuk usaha berbasis ekspor dan komoditas. Selain itu, BNI telah menetapkan strategi untuk meningkatkan kualitas aset dengan menghapusbukkan NPL BNI dalam jumlah besar. Walaupun NPL BNI telah menurun dari Rp7.565 miliar (8,5% dari total kredit) pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp5.596 miliar (5,0% dari total kredit) pada tanggal 31 Desember 2008 dan mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp5.762 miliar (4,8% dari total kredit) pada tanggal 31 Desember 2009 dan mengalami sedikit penurunan menjadi Rp5.520 miliar (4,4% dari total kredit) pada tanggal 30 September 2010. Penurunan ini disebabkan oleh penghapusbukkan NPL BNI yang dilakukan selama periode tersebut. BNI menghapusbukkan sejumlah Rp1.111 miliar dari NPL pada tahun 2007, Rp4.246 miliar dari NPL pada tahun 2008, Rp3.331 miliar dari NPL pada tahun 2009 dan Rp3.974 miliar dari NPL pada periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. NPL baru adalah Rp2.323 miliar pada tahun 2007, Rp2.277 miliar pada tahun 2008, Rp3.497 miliar pada tahun 2009 dan Rp3.731 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010.

Sejak 1 Januari 2010, bank-bank di Indonesia diharuskan untuk menerapkan standar akuntansi baru berdasarkan PSAK No.55, dimana setiap bank harus menilai apakah bukti-bukti objektif atas penurunan nilai atau "impairment" terjadi secara individual untuk aset-aset keuangan yang masing-masing bernilai signifikan, dan secara individual atau kolektif untuk aset-aset keuangan yang masing-masing nilainya tidak signifikan. Seperti bank-bank yang lain di Indonesia, BNI juga diharuskan untuk menerapkan kriteria penilaian baru untuk kredit-kredit yang dinilai secara kolektif paling lambat 1 Januari 2012. Hal ini mengharuskan BNI untuk membuat cadangan berdasarkan kerugian yang diperkirakan untuk keseluruhan kredit-kredit yang dinilai secara kolektif. Sehubungan dengan perubahan tersebut, saat ini BNI menerapkan metode penyisihan cadangan kerugian berdasarkan peraturan Bank Indonesia hanya untuk kredit-kredit yang dinilai secara kolektif.

Akibat hal di atas dan faktor-faktor lainnya, NPL, cadangan kerugian dan hapus buku yang cukup besar dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, rasio kecukupan modal dan hasil usaha BNI.

Sektor industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari BNI saat ini berturut-turut berada pada sektor Industri Pengolahan (23.32%), Perdagangan-Restoran- Hotel (19.20%), & Jasa Dunia Usaha (10,08%). Persentase NPL tertinggi terletak pada sektor Industri Pengolahan (7.32%), Perdagangan-Restoran-Hotel (5.15%), disusul kemudian oleh sektor Konstruksi (5.03%) dan pertumbuhan (*growth*) terbesar di sektor Pertanian (15,18%) dan Konstruksi (11,06%).

2. Rasio NPL BNI terhadap total kredit lebih tinggi dan rasio cadangan kerugian BNI terhadap total kredit lebih rendah dibandingkan bank-bank lain di Indonesia

Walaupun NPL – gross terhadap total kredit yang diberikan oleh BNI (induk perusahaan) berjumlah sebesar 8,2% pada tanggal 31 Desember 2007, sebesar 5,0% pada tanggal 31 Desember 2008, sebesar 4,7% pada tanggal 31 Desember 2009 dan 4,3% pada tanggal 30 Juni 2010, rasio tersebut masih lebih tinggi dibandingkan bank-bank besar di Indonesia. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, pada tanggal 30 Juni 2010, NPL PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) adalah sebesar 0,8% dari total kredit yang diberikan, NPL PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) adalah sebesar 4,3% dari total kredit yang dan NPL PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) adalah sebesar 2,3% dari total kredit yang diberikan.

BNI juga memiliki rasio cadangan kerugian terhadap potensi NPL-gross yang lebih rendah dibandingkan dengan sebagian besar bank di Indonesia. Per tanggal 31 Desember 2009, cadangan kerugian terhadap potensi NPL-gross BNI (induk perusahaan) adalah sebesar 120,1% dari total NPL-gross dan 44,9% dari total NPL-gross dan kredit dalam “perhatian khusus”. Pada tanggal 30 Juni 2010, rasio cadangan kerugian terhadap potensi NPL-gross adalah sebesar 122,5% dari total NPL-gross konsolidasi dan 42,8% dari total NPL-gross ditambah dan kredit dalam perhatian khusus non-konsolidasi. Sebagai perbandingan, berdasarkan data dari Bank Indonesia, pada tanggal 30 Juni 2010, rasio cadangan kerugian terhadap NPL-gross dan rasio cadangan kerugian terhadap NPL-gross ditambah kredit dalam perhatian khusus adalah sebesar 334,4% dan 121,3% untuk BCA, 147,0% dan 66,6% untuk BRI, serta 243,3% dan 51,9% untuk Bank Mandiri.

Walaupun kebijakan mengenai penanganan NPL dapat berbeda untuk bank-bank di Indonesia, NPL yang meningkat akan membutuhkan tambahan modal dan mengorbankan sumberdaya untuk penggunaan yang lebih produktif, seperti untuk menjalankan kegiatan usaha dan mengembangkan bisnis. Selain itu, cadangan kerugian untuk NPL yang meningkat dapat menyebabkan volatilitas keuntungan antar periode tidak stabil. Peningkatan yang signifikan pada NPL BNI dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, rasio kecukupan modal dan hasil usaha BNI.

3. BNI dapat tidak berhasil dalam melaksanakan rencana strategis BNI

Pada tahun 2008, BNI menerapkan rencana strategis baru yang disebut sebagai proses transformasi BNI. Sebagai bagian dari proses ini, BNI menerapkan pendekatan berbasis nasabah atau “*customer-centric*” dalam kegiatan usaha BNI dan menerapkan perubahan dalam manajemen risiko dan proses persetujuan kredit. Proses transformasi ini membutuhkan suatu modifikasi dalam model operasi BNI dimana BNI akan melakukan penataan ulang atas portofolio usaha untuk bisnis perbankan dan perbankan ritel. Pembaharuan dalam model operasi menghadapkan BNI pada berbagai risiko dan tantangan seperti disebutkan sebagai berikut:

- BNI belum memiliki pengalaman atau keahlian yang memadai untuk menerapkan model operasi yang baru secara efektif
- BNI perlu mempekerjakan personil tambahan yang berkualitas yang dapat tidak tersedia
- BNI tidak berhasil dalam meningkatkan kemampuan manajemen risiko

Ketidakmampuan BNI untuk melaksanakan proses transformasi atau mengembangkan bisnis dalam *business banking dan consumer & retail banking* dengan efektif, dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha BNI.

4. Portofolio kredit BNI yang direstrukturisasi sensitif terhadap peningkatan suku bunga dan melemahnya kondisi ekonomi global serta kredit yang dapat menjadi NPL

Pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 30 September 2010, jumlah portofolio kredit BNI yang direstrukturisasi masing-masing berjumlah sebesar Rp11.014 miliar, Rp11.274 miliar, Rp11.896 miliar dan Rp8.377 miliar. Berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia, bank-bank BUMN umumnya belum diperbolehkan untuk melakukan restrukturisasi kredit melalui *haircut* (pengurangan tunggakan pokok) atas pokok kredit yang *outstanding* maupun melalui penjualan kredit dengan diskon kepada pihak ketiga. Akibatnya, BNI dan seluruh bank BUMN lainnya hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit melalui penurunan suku bunga dan perpanjangan waktu jatuh tempo

pembayaran pokok kredit. BNI harus memilih untuk melakukan restrukturisasi melalui cara-cara sebagaimana tersebut diatas atau membentuk pencadangan penuh atas NPL dan kemudian melakukan hapus buku atas NPL tersebut. Keterbatasan BNI dalam melakukan restrukturisasi kredit bermasalah dapat membuat kredit tersebut menjadi kredit bermasalah kembali pada situasi dimana kondisi debitur tidak membaik setelah restrukturisasi. Dalam situasi tersebut, BNI menghadapi tekanan yang lebih besar dalam kondisi terjadinya perubahan tingkat suku bunga dan terjadi pelemahan kondisi perekonomian di Indonesia dibandingkan bank swasta lainnya.

Selama periode terjadinya krisis ekonomi, BNI dapat memiliki NPL yang lebih tinggi dari portofolio kredit yang direstrukturisasi, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar terhadap portofolio kredit BNI secara keseluruhan jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Tidak ada jaminan bahwa portofolio kredit BNI yang direstrukturisasi tidak akan berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan hasil usaha BNI.

5. Sistem manajemen risiko dan kontrol internal BNI dapat menjadi kurang efektif

Di masa lalu, BNI pernah mengalami *fraud* yang disebabkan oleh kelemahan dan keterbatasan dalam sistem manajemen risiko dan kontrol internal. Pada tahun 2003, BNI pernah mengalami beberapa kegagalan dalam pengelolaan risiko operasional dan kredit terutama dalam hal penerbitan *Letters of Credit* ("L/C") yang menunjukkan adanya kelemahan pada sistem manajemen risiko dan kontrol internal BNI. Dalam beberapa periode, karyawan BNI pernah terlibat *fraud* yang berkaitan dengan tindakan korupsi dan pemalsuan. Karyawan yang terlibat *fraud* dikenakan sanksi internal serta diproses secara hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Beberapa kasus *fraud* tersebut berdampak negatif terhadap reputasi BNI serta menurunnya valuasi harga saham BNI.

BNI terus berusaha meningkatkan kontrol internal sebagai respon atas peristiwa-peristiwa di masa lalu dan tidak ada jaminan bahwa kasus-kasus kriminal serupa tidak akan terjadi lagi pada masa yang akan datang. Kelemahan dalam sistem manajemen risiko dan kontrol internal BNI dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha BNI.

6. Kelemahan keamanan dalam sistem komputer dan infrastruktur jaringan BNI serta pihak ketiga terkait, pencurian, kegagalan sistem dan bencana dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha BNI

Sistem komputer dan infrastruktur jaringan BNI dapat mengalami kelemahan keamanan walaupun BNI menerapkan sistem keamanan, *firewall* dan enkripsi *password* yang dirancang untuk meminimalisasi risiko. Sebagai contoh, pada tahun 2008, BNI dan bank-bank besar lain di Indonesia mengalami pencurian data pelanggan kartu kredit dari database sebuah bank besar di Indonesia. Oleh karena itu, BNI menerbitkan kartu kredit baru kepada pelanggan kartu kredit dan memperkenalkan kartu kredit dengan teknologi *microchip* yang tertanam di dalam kartu (*embedded microchip technology*). Walaupun BNI terus berusaha menerapkan teknologi keamanan, melakukan *vulnerability assessment* dan menetapkan prosedur operasional, tidak ada jaminan bahwa langkah-langkah ini akan cukup untuk mencegah pencurian, pembobolan, kerusakan dan kegagalan atau kelemahan keamanan lainnya. BNI berusaha untuk melindungi data-data perusahaan, sistem komputer dan jaringan infrastruktur dari kerusakan fisik dan kelemahan keamanan serta permasalahan lainnya yang disebabkan oleh meningkatnya penggunaan jaringan. Kegagalan dalam sistem keamanan dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan reputasi BNI.

7. BNI dapat tidak berhasil dalam perbaikan kelemahan sistem informasi dan pelaporan

Sistem informasi dan pelaporan yang efektif sangat penting dalam kegiatan operasi BNI. Seperti perbankan pada umumnya, BNI bergantung kepada akses tepat waktu atas informasi yang dapat diandalkan untuk dapat memberikan pelayanan kepada nasabah dan untuk dapat mengelola aset dan kewajiban, likuiditas, serta kondisi keuangan secara menyeluruh dengan hati-hati. Selain itu, kemampuan BNI dalam mengelola risiko kredit, risiko pasar, risiko tingkat suku bunga dan risiko operasional juga bergantung pada akses terhadap informasi tersebut. Tidak ada jaminan bahwa BNI memiliki sistem pelaporan yang memadai, bahwa sistem teknologi informasi BNI tidak akan tertinggal atau karyawan BNI akan mengoperasikan atau mengelola sistem tersebut dengan baik. Dalam hubungannya dengan manajemen internal, pengawasan, pencatatan dan keakuratan data-data keuangan, BNI pernah mengalami beberapa kasus yang berkaitan dengan sistem kehandalan, kelengkapan, pengawasan atas sistem keuangan dan pencatatan, seperti ketidaksesuaian jumlah (*mismatch*) antara yang tercatat di *general ledger* dan *sub-ledgers* serta akun lainnya, termasuk hal lain yang berkaitan dengan sistem aset tetap. BNI juga memiliki beberapa kelemahan pada keamanan komputer yang dimaksudkan untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang terhadap komponen-komponen operasional sekunder dari sistem teknologi informasi. BNI telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kasus-kasus sebagaimana disebut di atas, namun tidak ada jaminan bahwa langkah-langkah itu akan cukup untuk mengatasi kasus-kasus tersebut atau mengatasi kelemahan-kelemahan atau kasus-kasus tersebut tidak akan terjadi pada masa yang akan datang.

Peningkatan sistem informasi dan pelaporan BNI membutuhkan waktu dan menyebabkan adanya risiko teknis dan risiko implementasi. Tidak ada jaminan bahwa sistem BNI akan cukup memadai untuk mengatasi kelemahan-kelemahan sistem informasi dan pelaporan BNI, atau BNI akan dapat merespon kemajuan teknologi dan perubahan dalam standar industri perbankan dan menerapkannya dengan biaya yang efektif dan tepat waktu. Jika sistem BNI kurang memadai atau menjadi *outdated* dalam waktu yang singkat atau karyawan BNI tidak mengoperasikan atau mengelola sistem tersebut dengan baik, prospek usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha BNI dapat terkena dampak negatif secara material.

8. Peraturan Bank Indonesia mengenai klasifikasi dan cadangan kerugian NPL relatif lebih lunak dibandingkan dengan negara lainnya

Beberapa tahun belakangan ini, Bank Indonesia telah mengubah peraturan mengenai klasifikasi aset, cadangan kerugian dan restrukturisasi kredit. Perubahan peraturan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan dalam memperkirakan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya di masa yang akan datang untuk tujuan klasifikasi, dibandingkan hanya bergantung pada kemampuan pembayaran kredit di masa lalu. Seiring berjalannya waktu, Bank Indonesia terus melakukan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan mengenai klasifikasi kredit. Peninjauan tersebut dapat mempengaruhi klasifikasi aset dan persyaratan cadangan kerugian BNI. Peraturan Bank Indonesia mewajibkan bank-bank Indonesia untuk mengklasifikasikan NPL kedalam tiga kategori yang didasarkan pada risiko kredit yang tidak dibayar, yaitu "kurang lancar", "diragukan" dan "macet". Selain itu, bank-bank di Indonesia juga diwajibkan untuk mengklasifikasi kredit tidak bermasalah kedalam dua kategori, yaitu "lancar" dan "perhatian khusus". Umumnya, klasifikasi kredit dipengaruhi oleh kombinasi dari berbagai faktor yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang berhubungan dengan prospek usaha dari debitur dan afiliasinya, kinerja keuangan debitur dan kemampuan pembayaran debitur. Kredit yang tidak dibayar lebih dari 90 hari diperhitungkan sebagai NPL namun hal ini bergantung pada perubahan kebijakan Bank Indonesia.

Selain itu, BNI juga diwajibkan untuk menilai klasifikasi kredit yang *outstanding* dengan memperhitungkan klasifikasi kredit yang dilakukan oleh bank-bank lain di Indonesia untuk fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada debitur yang sama atau untuk proyek yang sama (dimana bank lain memberikan sebagian besar kreditnya). Selama bank-bank lain di Indonesia mengklasifikasikan kredit dalam kategori yang lebih rendah dari BNI, BNI diwajibkan untuk menyesuaikan klasifikasinya sesuai dengan bank tersebut dan membuat tambahan cadangan kerugian.

Kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur BNI berbeda dalam beberapa hal secara material dibandingkan dengan di negara lain yang lebih maju. Cadangan kerugian berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") didasarkan pada klasifikasi kredit yang ditetapkan oleh standar peraturan. Berdasarkan peraturan standar yang berlaku di Indonesia, kredit yang dikategorikan dalam "perhatian khusus" tidak diklasifikasikan sebagai NPL, sehingga berdasarkan PSAK, persentase cadangan kerugian setelah memperhitungkan agunan yang ada relatif lebih rendah. Pada periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010, kredit dalam "perhatian khusus" BNI berjumlah sebesar Rp10.412 miliar atau 8,3% dari total kredit yang diberikan dan BNI telah membuat cadangan kerugian sebesar Rp889 miliar atas kredit tersebut. Cadangan kerugian untuk NPL atau portofolio secara keseluruhan berdasarkan PSAK umumnya lebih rendah dibandingkan *impaired loans* atau portofolio keseluruhan berdasarkan US GAAP. Kebijakan cadangan kerugian BNI, yang saat ini berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia, dapat menyebabkan kredit di-hapusbukukan dan cadangan kerugian lebih rendah dibandingkan bank-bank di negara maju lainnya.

Dalam hal klasifikasi kredit, ketentuan Bank Indonesia fokus pada faktor kuantitatif, seperti jumlah hari tunggakan pembayaran dan faktor kualitatif seperti prospek usaha dari debitur dan afiliasinya. Selain itu, PSAK tidak mengharuskan *impaired loans* untuk dicatat dalam nilai sekarang dari prediksi kas pada masa yang akan datang yang didiskontokan dengan suku bunga kredit yang berlaku.

Klasifikasi kredit dan kebijakan cadangan kerugian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil usaha BNI. Walaupun klasifikasi kredit dan kebijakan cadangan kerugian BNI telah mematuhi ketentuan-ketentuan Bank Indonesia, namun tidak ada jaminan bahwa cadangan kerugian tersebut mencukupi tingkat ketersediaan pemulihan kredit di masa mendatang atau tidak diperlukan lagi pembentukan tambahan cadangan kerugian dalam jumlah besar atas potensi kerugian kredit di masa yang akan datang.

9. Jumlah cadangan kerugian BNI akan dipengaruhi oleh perubahan dalam penilaian kredit dan aset-aset keuangan lainnya, serta cadangan kerugian untuk potensi kerugian kredit dan kerugian aset-aset keuangan BNI

Bank Indonesia mewajibkan BNI untuk membuat cadangan kerugian atas potensi kerugian. BNI mengkategorikan semua kredit korporasi dan kredit usaha menengah sebagai hal yang signifikan untuk penilaian individu. BNI juga menilai apakah bukti-bukti objektif atas penurunan nilai atau “*impairment*” terjadi secara individual untuk aset-aset keuangan yang masing-masing bernilai signifikan dan secara individual atau kolektif untuk aset-aset keuangan yang masing-masing nilainya tidak signifikan. Kewajiban cadangan kerugian yang digunakan BNI saat ini untuk kredit yang dinilai secara kolektif terdiri dari cadangan umum minimum sebesar 1% dari seluruh aset keuangan yang yang dikategorikan sebagai kredit “lancar” (kecuali Sertifikat Bank Indonesia/SBI, Obligasi Pemerintah dan aset produktif yang dijamin oleh kas sesuai ketentuan Bank Indonesia), cadangan khusus minimum sebesar 5% dari seluruh aset yang dikategorikan sebagai kredit dalam “perhatian khusus”, minimum sebesar 15% dari seluruh aset yang dikategorikan sebagai kredit “kurang lancar”, minimum 50% untuk aset yang dikategorikan sebagai kredit “diragukan” dan 100% dari seluruh aset yang dikategorikan sebagai kredit “macet” untuk setiap kasus, dimana cadangan kerugian dibuat setelah dikurangkan dengan nilai agunan yang diperkenankan dalam hal cadangan khusus. Sejak bulan Januari 2010, untuk kredit-kredit yang dinilai berdasarkan basis individual, BNI akan memperkirakan arus kas pada masa yang akan datang dari kredit tersebut dan membuat cadangan kerugian atas kerugian yang diperkirakan.

BNI perlu untuk menerapkan kriteria penilaian baru untuk kredit yang dinilai secara kolektif yang akan mewajibkan BNI untuk membuat cadangan kerugian berdasarkan estimasi kerugian untuk kredit keseluruhan yang dinilai secara kolektif tidak lebih dari tanggal 1 Januari 2012. Penilaian ini dapat berdampak material terhadap jumlah cadangan kerugian BNI mengingat BNI tidak akan mengurangi nilai dari agunan yang diperkenankan dari cadangan untuk kredit yang dinilai oleh BNI dalam basis individual. Jika BNI diharuskan membuat cadangan kerugian sebagai akibat dari kriteria baru ini, kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha BNI dapat terkena dampak negatif secara material. Selain itu, walaupun ketentuan Bank Indonesia mewajibkan BNI untuk melakukan penilaian berkala atas nilai agunan, tidak terdapat kepastian bahwa nilai agunan mencerminkan nilai pasar aktual dari agunan tersebut.

Jika BNI gagal dalam menilai secara wajar atau melakukan tinjauan atas agunan secara berkala atau jika hasil penilaian lebih rendah, cadangan kerugian yang telah dibuat dapat tidak memadai dan BNI akan diharuskan untuk menambah jumlah cadangan kerugian, yang dapat memberi dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan hasil usaha.

10. Nilai agunan BNI dapat tercatat lebih tinggi dan mengalami penurunan pada masa yang akan datang

Nilai agunan yang dimiliki BNI dapat tercatat lebih tinggi dan tidak mencerminkan secara akurat nilai perolehan bersih yang akan diperoleh dari penjualan agunan tersebut. Penilaian agunan tertentu yang dimiliki BNI dapat tidak sesuai dengan keadaannya (*out of date*) dan tidak mencerminkan secara akurat nilai pasar agunan yang dimiliki. Disamping itu, karena seluruh kredit BNI dijamin dengan agunan berupa properti, persediaan atau agunan lain yang berlokasi di Indonesia, maka nilai agunan tersebut dapat mengalami penurunan nilai yang dipicu oleh kondisi politik, ekonomi dan sosial di Indonesia.

Untuk kredit-kredit yang dinilai secara kolektif, BNI melakukan pengurangan sejumlah persentase tertentu terhadap nilai agunan sebagaimana yang diperkenankan oleh peraturan Bank Indonesia dalam melakukan perhitungan cadangan kerugian untuk NPL yang dikategorikan sebagai kredit “kurang lancar” dan “diragukan”. BNI menggunakan pendekatan yang lebih konservatif dibandingkan dengan ketentuan Bank Indonesia dalam menghitung cadangan kerugian yang dibutuhkan untuk NPL yang dikategorikan sebagai kredit “macet”, yaitu dengan mengurangi 10% dari nilai agunan yang diperkenankan. Selain itu, berdasarkan kriteria penilaian baru untuk aset-aset yang dinilai secara kolektif yang harus diterapkan sejak 1 Januari 2010, tidak akan terjadi pengurangan atas pencadangan sebesar nilai agunan yang diperkenankan. Jika BNI diharuskan untuk membuat cadangan kerugian yang lebih besar, kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha BNI dapat terkena dampak negatif secara material. Setiap penurunan nilai agunan kredit, termasuk nilai agunan yang akan diambil alih oleh BNI, dapat menyebabkan BNI menambah jumlah cadangan kerugian, dimana hal ini dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan, hasil usaha serta rasio kecukupan modal, sehingga BNI harus mencari tambahan modal.

11. BNI dapat tidak memperoleh kembali *carrying value* dari agunan

BNI dapat tidak memperoleh kembali *carrying value* dari agunan atau BNI tidak dapat melakukan eksekusi atas agunan. Hal ini antara lain disebabkan adanya kesulitan dalam sistem hukum Indonesia. Walaupun hukum di Indonesia memperbolehkan untuk melakukan penyitaan agunan atau mengeksekusi berbagai jenis agunan, pada prakteknya, BNI harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di Indonesia atau menghadapi gugatan dari debitur yang dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan eksekusi tersebut. Lamanya proses eksekusi dapat mengakibatkan penurunan kondisi fisik dan nilai pasar agunan, terutama apabila agunan tersebut berbentuk persediaan dan piutang. Selain itu, agunan tersebut dapat tidak diasuransikan. Faktor-faktor seperti ini akan terus mendorong BNI untuk memenuhi kewajiban hukum (*legal liability*) dalam hal kepemilikan agunan. Saat ini, kesulitan dalam melakukan eksekusi berdasarkan hukum di Indonesia menyebabkan menurunnya kemampuan BNI untuk merealisasikan nilai agunan yang berlokasi di Indonesia. Hal ini menyebabkan debitur-debitur Indonesia memiliki posisi yang lebih diuntungkan. Dalam hal terjadinya kebangkrutan atau penyitaan, tidak ada jaminan bahwa BNI akan memperoleh hasil eksekusi secara penuh atau dalam nilai tertentu, mengingat nilai dari aset yang dijamin, seperti properti dan persediaan, dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi dan sosial di Indonesia.

Sebagaimana bank lainnya di Indonesia, BNI tidak mengutamakan penyelamatan dengan melakukan eksekusi terhadap agunan dengan pertimbangan waktu, biaya dan ketidakpastian dalam proses hukum sehingga BNI lebih menekankan restrukturisasi pinjaman melalui mekanisme penyelamatan kredit lainnya. Kondisi tersebut mengurangi kemampuan BNI untuk memperoleh hasil eksekusi agunan sesuai *carrying value* sehingga mengurangi efektifitas pengembalian kredit dari agunan. Selain itu, dalam melakukan restrukturisasi NPL, BNI dapat menyetujui untuk melepaskan sebagian agunan apabila sebagian dari jumlah yang terhutang telah dibayar. Tidak ada jaminan bahwa BNI akan dapat memperoleh seluruh atau sebagian nilai agunan dalam hal nasabah dinyatakan pailit atau dalam hal eksekusi agunan atau dalam hal lainnya.

12. Industri perbankan sangat kompetitif dan strategi pertumbuhan BNI bergantung pada kemampuan BNI untuk bersaing secara efektif

Persaingan dalam sektor perbankan di Indonesia sangat kompetitif. Pesaing utama BNI adalah bank-bank besar domestik dan asing yang beroperasi di Indonesia. BNI juga menghadapi persaingan dari berbagai lembaga keuangan non-bank, seperti perusahaan *multi-finance* yang menyediakan pembiayaan untuk kendaraan bermotor, mesin berat dan aset tetap lainnya, serta entitas yang dimiliki oleh atau berafiliasi dengan Pemerintah yang menyediakan dana bagi pembangunan industri dan pemberian kredit serta jasa dalam bidang ekspor impor.

BNI juga dapat menghadapi persaingan dalam satu maupun seluruh lini produk dengan berbagai lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa perbankan komersial yang lebih beragam dibandingkan dengan yang ditawarkan BNI dan memiliki BMPK yang lebih besar, sumber pendanaan yang lebih besar dan neraca yang lebih kuat. Meningkatnya persaingan dapat disebabkan oleh:

- bank-bank domestik beraliansi strategis dengan bank-bank asing yang memiliki sumber dana dan sumber daya manajemen yang kuat
- reformasi di sektor keuangan dan restrukturisasi serta rekapitalisasi bank-bank di Indonesia, dimana sebagian telah memiliki hubungan kuat dengan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar sehingga dapat mengambil manfaat dari peluang yang diberikan oleh Pemerintah kepada mereka;
- konsolidasi yang berkelanjutan dalam sektor perbankan, masing-masing dengan atau tanpa campur tangan Pemerintah, yang melibatkan bank-bank asing dan domestik, yang didorong oleh liberalisasi peraturan kepemilikan asing pada tahun 1999; dan
- pertumbuhan bank-bank swasta kecil yang lebih cepat dalam merespon perubahan pasar

Selain itu, strategi bisnis konsumen BNI akan menghadapi persaingan dengan bank-bank domestik dan asing yang lebih berpengalaman dibanding dengan BNI. Tidak ada jaminan bahwa BNI dapat bersaing dengan efektif. Meningkatnya persaingan dapat mempersulit BNI untuk meningkatkan jumlah portofolio kredit dan simpanan, juga menyebabkan peningkatan persaingan harga, yang berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha BNI.

13. BNI dapat mengalami kerugian atas aset keuangan dan aset non-keuangan dalam jumlah besar

Dalam beberapa tahun terakhir, BNI telah membuat cadangan kerugian yang cukup besar atas aset keuangan dan aset non-keuangan. Aset keuangan BNI mencakup kredit yang diberikan, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat berharga yang diperdagangkan, wesel ekspor dan tagihan lainnya, tagihan derivatif, tagihan akseptasi dan investasi. BNI juga membuat cadangan kerugian untuk akun-akun *off-balance sheet* dan hal-hal lainnya. Cadangan kerugian tersebut meliputi cadangan kerugian portofolio kredit baik cadangan umum dan khusus, cadangan kerugian atas surat berharga, wesel ekspor dan tagihan lainnya dan tagihan derivatif, serta cadangan kerugian kredit yang dibeli dari BPPN. Pada tahun 2009, BNI membukukan cadangan kerugian sejumlah Rp4.051 miliar, dimana didalamnya termasuk cadangan kerugian sebesar Rp3.263 miliar untuk potensi kerugian kredit dan Rp787 miliar untuk aset lainnya. Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010, BNI membuat cadangan kerugian baru sebesar Rp1.776 miliar, dimana sebesar Rp2.214 miliar untuk potensi kerugian kredit dan Rp438 miliar untuk aset lainnya. Per tanggal 31 Desember 2009, *coverage ratio* adalah sebesar 120,1% dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 *coverage ratio* adalah sebesar 118,3%. BNI akan meningkatkan *coverage ratio* yang akan berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha BNI.

14. Hasil usaha BNI berfluktuasi dan akan terus berfluktuasi secara signifikan dari waktu ke waktu

Di masa lalu, hasil dari kegiatan operasional BNI berfluktuasi. Hasil usaha BNI bergantung pada sejumlah faktor, antara lain kemampuan BNI untuk melaksanakan strategi bisnis, pertumbuhan ekonomi Indonesia, perubahan kebijakan dan peraturan Pemerintah mengenai sektor perbankan, kemampuan untuk mencari sumber pendanaan dengan harga menarik, tingkat NPL BNI, cadangan untuk kerugian kredit dan restrukturisasi kredit, tingkat suku bunga kredit dan simpanan BNI, nilai tukar dan persaingan dalam industri perbankan Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa BNI akan profitabel atau tidak akan mengalami kerugian usaha dalam jumlah signifikan pada masa yang akan datang.

15. Obligasi Pemerintah dan surat utang Pemerintah lainnya mencerminkan porsi yang substansial atas aset BNI telah mempengaruhi dan akan terus mempengaruhi hasil usaha BNI

Pada tanggal 30 September 2010, BNI memiliki Obligasi Pemerintah sebesar Rp33.037 miliar atau 14,7% dari total aset BNI. Selain itu, pada tanggal 30 September 2010, sejumlah Rp45.476 miliar atau 20,2% dari total aset BNI merupakan kewajiban langsung Pemerintah (termasuk Obligasi Pemerintah, kewajiban *call money* Bank Indonesia, SBI dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia). Per tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009, BNI memiliki masing-masing Rp36.701 miliar, Rp34.655 miliar dan Rp31.040 miliar Obligasi Pemerintah, yang mewakili masing-masing 20,0%, 17,2% dan 13,6% dari total aset BNI.

Per tanggal 31 Desember 2009, BNI memiliki Obligasi Pemerintah sejumlah Rp14.949 miliar dengan tingkat bunga tetap dan sejumlah Rp16.090 miliar dengan tingkat bunga variabel. Pada periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010, BNI memiliki Obligasi Pemerintah sejumlah Rp17.222 miliar dengan tingkat bunga tetap dan sejumlah Rp15.815 miliar dengan tingkat bunga variabel. Pendapatan bunga dari Obligasi Pemerintah merupakan bagian yang cukup besar dari total pendapatan bunga dan pendapatan syariah BNI, yaitu 24,6% dari total pendapatan bunga dan pendapatan Syariah untuk tahun 2007, 21,7% untuk tahun 2008, 16,8% untuk tahun 2009 dan 12,3% untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010.

Nilai Obligasi Pemerintah tergantung pada peringkat kredit Pemerintah dan tingkat suku bunga pasar. Tidak ada jaminan bahwa peringkat kredit Pemerintah dan nilai Obligasi Pemerintah yang dimiliki BNI tidak akan mengalami penurunan pada masa yang akan datang. Keterlambatan atau ketidakmampuan Pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok atau bunga atas Obligasi Pemerintah pada saat jatuh tempo akan berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha BNI.

Selain itu, BNI memiliki kewajiban untuk melakukan *mark to market* atas nilai pasar dari Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual pada komponen modal dan Obligasi Pemerintah dalam portofolio diperdagangkan di laporan laba rugi. Pada saat ini nilai Obligasi Pemerintah dengan bunga tetap diperdagangkan lebih tinggi dari nilai pokoknya (*at premium*). Pada 30 September 2010, BNI memiliki 77,4% Obligasi Pemerintah dalam portofolio surat berharga yang tersedia untuk dijual, 1,6% Obligasi Pemerintah dalam portofolio diperdagangkan di laporan laba rugi dan 21,0% Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo. Perubahan nilai dan likuiditas yang signifikan atas Obligasi Pemerintah tergantung atas tingkat dan arah suku bunga, atau perubahan dalam peraturan yang berlaku terhadap Obligasi Pemerintah, dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha BNI.

16. BNI memiliki portofolio kredit yang sangat terkonsentrasi pada nasabah dan industri tertentu dan jika kredit ini menjadi kredit bermasalah, kualitas portofolio kredit BNI dapat terkena dampak negatif

Pada tanggal 30 September 2010, total eksposur BNI terhadap 10 debitur terbesar (termasuk debitur individu dan grup) berdasarkan *carrying amount* kredit (misalnya total pokok kredit yang telah dicairkan tetapi tidak termasuk pembayaran bunga yang telah lewat) berjumlah Rp19.787 miliar atau merepresentasikan 15,7% dari total kredit BNI. Selain itu, pada tanggal 30 September 2010 juga terdapat fasilitas kredit yang belum ditarik sejumlah Rp16.986 miliar. Pada tanggal 30 September 2010 kredit yang diberikan kepada salah satu dari 10 debitur terbesar termasuk dalam kredit dalam "perhatian khusus".

Pada tanggal 30 September 2010, kredit BNI diberikan dalam jumlah signifikan kepada dua industri, yaitu sebesar 22,9% untuk industri manufaktur dan sebesar 18,9% untuk industri perdagangan, perhotelan dan restoran.

Oleh karena portofolio kredit BNI terkonsentrasi berdasarkan jenis debitur dan industri, maka jika kredit yang diberikan kepada 10 debitur terbesar BNI menjadi NPL, atau terdapat kesulitan keuangan yang dihadapi oleh industri terbesar tersebut, maka hal ini dapat berdampak negatif secara material terhadap kualitas portofolio kredit keseluruhan dan kondisi keuangan.

17. Strategi BNI untuk meningkatkan portofolio kredit kepada beberapa segmen menimbulkan berbagai risiko

Rencana Jangka Panjang BNI menargetkan peningkatan dalam jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam industri tertentu, termasuk industri perminyakan, gas & pertambangan, agribisnis, kimia, makanan dan minuman, ritel dan grosir, komunikasi, listrik dan engineering dan konstruksi. Industri-industri ini dihadapkan pada berbagai risiko. Sebagai contoh, industri pertanian yang dipengaruhi pola cuaca yang tidak menentu, bencana alam, wabah hama, peraturan-peraturan lingkungan dan konservasi alam, demonstrasi dan gangguan lain serta peraturan kontrol perdagangan. Contoh lainnya, industri pertambangan terpengaruh oleh ketidakpastian tingkat cadangan hasil tambang, pola cuaca yang tidak menentu, peraturan-peraturan lingkungan dan konservasi alam, demonstrasi pekerja tambang dan gangguan lain serta kuota perdagangan. Portofolio kredit BNI akan mengalami dampak negatif apabila salah satu atau lebih risiko tersebut dialami oleh debitur BNI yang bergerak dalam industri-industri tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 2010, berdasarkan data dari Bank Indonesia, BNI merupakan penerbit kartu kredit terbesar keempat di Indonesia berdasarkan jumlah kartu yang telah diterbitkan dan saldo *outstanding* rata-rata kartu kredit. Bisnis kartu kredit merupakan bisnis dengan risiko tinggi karena kredit ini umumnya tanpa jaminan. Selain itu, *fraud* kartu kredit cenderung meningkat di wilayah Asia Tenggara dan pada umumnya *fraud* kartu kredit sulit dideteksi karena seringkali kartu kredit digunakan di luar negara penerbit. Kerugian yang timbul dari *fraud* kartu kredit seringkali ditanggung oleh penerbit kartu kredit tersebut. Walaupun BNI belum pernah mengalami *fraud* kartu kredit dalam jumlah yang signifikan, namun jika praktek *fraud* tersebut mengalami peningkatan maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan strategi untuk mengembangkan bisnis kartu kredit BNI.

18. Jika BNI tidak mampu memperoleh tambahan modal yang cukup, CAR BNI akan turun dan jika BNI tidak memenuhi persyaratan kecukupan modal minimum, BNI perlu untuk meningkatkan tambahan modal dan kemampuan BNI untuk meningkatkan modal terbatas

Peraturan Bank Indonesia mewajibkan BNI untuk menjaga total rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* ("CAR") minimum sebesar 8,0% dan CAR Modal Tier I minimum sebesar 4,0%. Pada tanggal 30 September 2010 total CAR BNI adalah sebesar 12,4% dan CAR Tier I adalah 10,2%. Walaupun pada saat ini BNI memenuhi kewajiban CAR sesuai peraturan Bank Indonesia, tidak ada jaminan bahwa BNI dapat terus memiliki kemampuan untuk memenuhi ketentuan tersebut.

BNI memperkirakan bahwa perubahan pertumbuhan aset dalam komposisi aset serta evaluasi dan klasifikasi NPL yang terus berlangsung (termasuk kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia yang baru) BNI akan terus meningkatkan jumlah modal wajib yang harus dipenuhi oleh BNI, sedangkan faktor lainnya akan menurunkan jumlah *risk-based capital* Tier II. CAR BNI diperkirakan akan menurun jika proporsi Obligasi Pemerintah yang memiliki risiko *zero risk-weighted* dalam portofolio aset BNI menurun seiring dengan kenaikan proporsi aset lainnya yang memiliki risiko tertimbang yang lebih tinggi (*higher risk-weighted assets*).

Selain itu, menurut peraturan Bank Indonesia, jika CAR turun dibawah 8,0%, BNI akan ditempatkan dalam "pengawasan khusus" oleh Bank Indonesia dan diantaranya akan tidak diperbolehkan untuk melakukan pembayaran bunga atau pokok atas surat utang subordinasi yang masih terhutang.

Selain itu, *Basel Committee on Banking Supervision* ("BCBS") di Basel, Switzerland, telah mengimplementasikan *Capital Accord* baru (Basel II) di akhir tahun 2006 di beberapa bank di Eropa. Bank Indonesia telah mengumumkan bahwa pada akhir tahun 2008 bank-bank di Indonesia diwajibkan untuk mematuhi kerangka Basel II tersebut guna memenuhi standar internasional, meskipun dengan pendekatan yang sederhana didalam menghitung risikonya. Dalam Basel II, risiko pasar dan risiko operasional harus diikutsertakan dalam perhitungan kecukupan modal minimum. Perhitungan yang baru tersebut dapat menyebabkan penurunan CAR BNI. Kegagalan BNI dalam memenuhi persyaratan kecukupan modal minimum, baik menurut peraturan yang berlaku saat ini maupun di masa mendatang, akan berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha BNI. Jika hal ini terjadi, BNI tidak dapat menjamin bahwa tambahan modal yang diperlukan akan selalu tersedia.

19. Fluktuasi nilai Rupiah dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha BNI

Di masa lalu, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan mata uang lainnya telah mengalami depresiasi dan volatilitas yang cukup signifikan. Depresiasi atau volatilitas Rupiah atau perubahan kebijakan nilai tukar oleh Pemerintah dapat mendorong meningkatnya tingkat suku bunga domestik, likuiditas, kekurangan, kegagalan kredit *sovereign* dan perusahaan, modal atau pengawasan nilai tukar dan bantuan keuangan dari institusi-institusi multilateral. Hal ini dapat menyebabkan melemahnya kegiatan ekonomi, resesi ekonomi, kegagalan kredit dan kenaikan harga barang-barang impor yang kemudian dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, kondisi keuangan dan hasil usaha serta kemampuan BNI untuk membayar kewajiban yang berdenominasi mata uang asing.

Secara umum, Rupiah dapat dikonversi dan ditransfer dengan bebas, kecuali dalam hal bank domestik dilarang mentransfer Rupiah kepada sejumlah rekening bank (*offshore dan onshore*) untuk kepentingan non-penduduk yang merupakan perorangan asing, badan hukum asing dan warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk permanen di luar Indonesia serta bank-bank Indonesia dan asing yang berdomisili di luar negeri. Walaupun demikian, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia melakukan intervensi pasar mata uang asing sebagai kelanjutan dari kebijakan tersebut di atas, baik untuk menjual Rupiah atau menggunakan cadangan dalam mata uang asing untuk membeli Rupiah.

Tidak ada jaminan bahwa kebijakan nilai tukar mata uang oleh Bank Indonesia tidak akan berubah. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa depresiasi Rupiah terhadap mata uang lainnya, termasuk Dolar AS, tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan melakukan tindakan-tindakan untuk menstabilkan, menjaga atau meningkatkan nilai Rupiah atau bahwa jika tindakan-tindakan ini dilakukan, akan berhasil. BNI tidak memperoleh penerimaan dalam mata uang Dolar AS dalam jumlah yang besar sehingga apresiasi Dolar AS terhadap Rupiah yang terjadi secara signifikan dan terus-menerus dapat berdampak negatif terhadap kemampuan BNI untuk melakukan pembayaran kewajiban yang berdenominasi dalam mata uang asing. Selain itu, BNI menghadapi risiko nilai tukar karena adanya ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban yang dimiliki.

Pada tanggal 31 Desember 2009, BNI memiliki jumlah kredit dalam mata uang asing sebesar Rp16.013 miliar, simpanan dalam mata uang asing (termasuk simpanan dari bank lain) sebesar Rp37.540 miliar dan pinjaman dalam mata uang asing sebesar Rp5.151 miliar. Pada tanggal 30 September 2010, BNI memiliki kredit dalam mata uang asing sebesar Rp14.928 miliar, simpanan dalam mata uang asing (termasuk simpanan dari bank lain) sebesar Rp37.943 miliar dan pinjaman dalam mata uang asing sebesar Rp4.930 miliar. Rasio posisi devisa netto BNI yang dihitung berdasarkan (i) selisih bersih antara aset dan kewajiban dalam seluruh mata uang asing yang tercatat pada neraca dalam Rupiah (ii) selisih bersih antara klaim dan kewajiban, yang terdiri atas komitmen dan kontinjensi dalam seluruh mata uang asing yang tercatat secara *off balance sheet* yang seluruhnya dinyatakan dalam Rupiah, adalah 8,1% pada tanggal 30 September 2010. Rasio ini tidak melampaui batasan 20,0% yang ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia. Apabila Rupiah terapresiasi secara signifikan pada saat tertentu dan BNI memiliki posisi *net long open position* mata uang asing dalam jumlah yang signifikan dapat menyebabkan BNI menderita kerugian, mengalami penurunan CAR sehingga mengharuskan BNI untuk melakukan penambahan modal agar tidak melanggar ketentuan CAR. Tidak ada kepastian bahwa BNI dapat melakukan penambahan modal yang diwajibkan pada saat persyaratan dan ketentuan CAR.

20. BNI dapat mengalami risiko suku bunga karena adanya perbedaan repricing suku bunga atas assets and liabilities atau kondisi ekonomi di Indonesia secara umum

BNI merealisasikan pendapatan dari selisih antara pendapatan bunga dari aset dan biaya bunga yang dibayarkan untuk kewajiban. Karena beberapa *interest-earning assets* dan *interest-bearing liabilities* BNI ditetapkan kembali (*repriced*) pada waktu yang berbeda, sehingga BNI menjadi rentan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga pasar. Berdasarkan posisi aset dan kewajiban BNI pada tanggal 30 September 2010, tingkat suku bunga atas kewajiban BNI lebih sering dilakukan peninjauan dibandingkan dengan tingkat suku bunga aset. Kondisi di mana tingkat suku bunga cenderung menurun dapat menyebabkan BNI untuk memperoleh *spread* yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila tingkat suku bunga cenderung meningkat, BNI memiliki keterbatasan dalam melakukan tinjauan suku bunga aset dan memitigasi seluruh risiko fluktuasi tingkat suku bunga mengingat Obligasi Pemerintah yang dimiliki BNI mewakili 14,7% dari total aset pada tanggal 30 September 2010.

Tingkat suku bunga dipengaruhi oleh tingkat inflasi di Indonesia secara umum. Secara historis, Indonesia telah mengalami masa-masa inflasi yang tinggi. Sebagai contoh, inflasi tahunan di Indonesia untuk tahun 1998 adalah sekitar 77,5%. Inflasi tahunan di Indonesia rata-rata sekitar 6,8% dari tahun 2007 hingga 2009. Inflasi tahunan pada tahun 2008 adalah sebesar 11,1% dan suku bunga Bank Indonesia mencapai 9,50% pada bulan Juni 2008. Inflasi tahunan pada tahun 2009 adalah sebesar 2,9% dan suku bunga Bank Indonesia mengalami penurunan hingga level 6,50% pada akhir tahun 2009. Tingkat inflasi resmi yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik ("BPS"), untuk periode 31 Desember 2009 sampai dengan 30 September 2010 adalah sekitar 5,3%, terutama disebabkan oleh biaya energi yang lebih tinggi.

Jika suku bunga mengalami kenaikan, biaya bunga dan bonus dapat meningkat dengan lebih cepat daripada pendapatan bunga dan pendapatan Syariah BNI yang dapat berdampak negatif terhadap pendapatan bunga bersih dan pendapatan Syariah serta menimbulkan permasalahan likuiditas. Selain itu, fluktuasi tingkat suku bunga dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha BNI. Jika inflasi di Indonesia meningkat secara signifikan, beban biaya BNI juga akan meningkat, yang akan berdampak negatif secara material terhadap struktur biaya, arus kas, kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha BNI. Selain itu, tingkat inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi, iklim bisnis dan kepercayaan konsumen Indonesia serta dapat mendorong tingkat suku bunga yang lebih tinggi.

21. BNI dapat mengalami keterbatasan likuiditas terutama karena ketidaksesuaian waktu jatuh tempo atas assets and liabilities dalam jumlah besar

Mayoritas pendanaan BNI berasal dari sumber pendanaan jangka pendek dan menengah, terutama dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan giro. Sebagian besar dana pihak ketiga BNI memiliki jangka waktu satu bulan atau kurang. Namun, sebagian besar kewajiban BNI (seperti Obligasi Pemerintah dan kredit yang diberikan), memiliki jangka waktu yang lebih panjang, sehingga menimbulkan potensi ketidakseimbangan pendanaan (*funding mismatch*). Pada masa lalu, BNI dapat memperpanjang dan melakukan *roll-over* sebagian besar simpanan jatuh tempo tersebut, namun tidak ada jaminan bahwa BNI dapat melakukan hal yang sama di masa yang akan datang. Walaupun BNI belum pernah mengalami kesulitan likuiditas, tidak ada jaminan bahwa BNI akan terus dapat memelihara likuiditas yang memadai untuk memenuhi penarikan dana nasabah di masa yang akan datang, terutama pada saat krisis ekonomi. Apabila sejumlah besar nasabah tidak memperpanjang dana yang didepositokan pada saat jatuh tempo, atau memutuskan untuk menarik depositonya, maka posisi likuiditas BNI dapat terkena dampak negatif. Secara khusus, BNI dapat memperoleh pinjaman dari Bank Indonesia atau sumber pendanaan lain yang memberikan persyaratan kurang menarik, atau tidak tersedia sama sekali. Setiap kegagalan untuk mendapatkan dana yang cukup atau peningkatan signifikan biaya dana dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha BNI.

22. Implementasi Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (single presence policy) untuk bank-bank Indonesia dapat berdampak negatif terhadap BNI

Untuk mempercepat konsolidasi industri perbankan di Indonesia, Bank Indonesia telah mengumumkan pengenalan kebijakan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia atau "*single presence policy*", dengan tujuan menyederhanakan kontrol Bank Indonesia dan penilaian risiko dengan memperkenankan satu entitas untuk memegang posisi pengendalian hanya di satu bank di Indonesia. Untuk melaksanakan kebijakan ini, pada tanggal 5 Oktober 2006, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia ("Peraturan SPP") sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Nomor 9/32/DPNP tanggal 12 Desember 2007. Berdasarkan Peraturan SPP seseorang atau badan hukum bisa menjadi pemegang saham pengendali hanya pada satu bank, dengan pengecualian untuk (i) pemegang saham pengendali pada dua bank yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah,

(ii) pemegang saham pengendali pada dua bank yang salah satunya merupakan bank campuran (*joint venture bank*), dan (iii) perusahaan induk dibidang perbankan (*bank holding company*). Perusahaan induk di bidang perbankan merupakan entitas yang didirikan dan/atau dimiliki oleh pemegang saham pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung operasi bank-bank yang merupakan anak perusahaan.

Dampak dari Peraturan SPP ini adalah bahwa setiap orang yang menjadi pemegang saham pengendali lebih dari satu bank di Indonesia harus menyesuaikan kepemilikannya di entitas tersebut pada akhir tahun 2010 melalui (i) mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank (ii) melakukan merger atau konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikannya atau (iii) membentuk perusahaan induk di bidang perbankan, dengan cara (a) mendirikan badan hukum baru sebagai perusahaan induk di bidang perbankan atau (b) menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai perusahaan induk di bidang perbankan.

Jika BNI tidak dapat memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, BNI dapat dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 500 juta dan dapat hal ini juga dapat merusak reputasi BNI yang berakibat negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha BNI.

23. Permasalahan pasar modal dan kredit global dapat berdampak negatif terhadap likuiditas, peningkatan biaya pendanaan dan mengganggu kegiatan usaha BNI

Sejak tahun 2008, pasar modal dan kredit di berbagai belahan dunia telah mengalami ketidakstabilan dan gangguan, sehingga lebih sulit bagi perusahaan untuk mengakses pasar tersebut. BNI bergantung pada pasar modal dan kredit yang stabil, likuid dan berfungsi dengan baik untuk membiayai operasional BNI. Walaupun krisis kredit global umumnya tidak mempengaruhi kegiatan usaha dan kesehatan BNI serta bank-bank di Indonesia seperti yang menimpa bank-bank dan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat serta negara lain, krisis keuangan global terbukti memiliki dampak yang signifikan pada sektor tertentu dalam perekonomian Indonesia dan stabilitas pasar keuangan Indonesia pada akhir 2008 dan 2009. Berbagai peristiwa pasca krisis keuangan dan kredit dapat berdampak negatif terhadap Indonesia pada masa yang akan datang. Hal ini dapat menciptakan kesulitan bagi debitur-debitur BNI untuk melakukan melakukan pembiayaan kembali atau melunasi kreditnya kepada BNI akan mengakibatkan penurunan kualitas kredit dan berpotensi meningkatkan kredit bermasalah. Selain itu, jika terjadi penurunan tingkat kepercayaan terhadap sektor perbankan yang diakibatkan oleh krisis likuiditas, nasabah BNI dapat menarik simpanannya yang kemudian dapat berdampak negatif terhadap terhadap sumber pendanaan dan likuiditas BNI. Tidak ada jaminan bahwa penarikan dana simpanan yang tidak terduga oleh nasabah BNI tidak akan menyebabkan kesulitan likuiditas atau BNI akan dapat mengatasi kesulitan likuiditas tersebut.

24. Dalam proses persetujuan kredit BNI, rekomendasi unit risiko kredit tidak mengikat unit bisnis BNI

Proses persetujuan pemberian kredit BNI dimulai dengan penilaian awal atas permohonan kredit oleh manajer bisnis yang berwenang di salah satu unit bisnis BNI sesuai dengan kewenangannya. Permohonan ini kemudian diserahkan kepada unit risiko kredit sesuai dengan kewenangannya. Unit risiko kredit akan melakukan analisa terhadap aplikasi kredit terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk meminimalisasi risiko tersebut. Unit bisnis mempertimbangkan rekomendasi yang berasal dari unit risiko kredit yang menjadi bagian penting dalam proses persetujuan kredit, namun rekomendasi tersebut tidak mengikat unit bisnis. Kredit dapat disetujui walaupun unit bisnis belum melaksanakan seluruh rekomendasi untuk memitigasi risiko yang berkaitan dengan kredit. BNI berencana untuk melakukan penyempurnaan proses persetujuan kredit "four eyes" pada bulan Januari 2011. Kredit yang disetujui tanpa menerapkan seluruh rekomendasi untuk memitigasi risiko akan cenderung untuk menjadi NPL. Meningkatnya NPL dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha BNI.

25. Jika BNI kehilangan beberapa personil inti BNI atau jika BNI tidak dapat merekrut dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, kegiatan usaha dan operasi BNI akan terganggu.

Kegiatan usaha BNI bergantung pada kemampuan BNI untuk merekrut dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. BNI bersaing untuk memperoleh personil tersebut dengan bank dan lembaga lain dan tidak ada jaminan bahwa BNI akan berhasil dalam memperoleh atau mempertahankan personil yang memenuhi syarat tersebut. Secara khusus, BNI bergantung pada manajemen senior BNI dalam kaitannya dengan keahlian mereka dalam industri perbankan. Hilangnya salah satu dari manajemen senior BNI atau kemampuan BNI untuk memperoleh atau mempertahankan jajaran manajer BNI dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha BNI.

26. Risiko atas Kepemilikan pada Perusahaan Anak

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tanggal 29 Januari 2006 beserta Surat Edaran No.8/27/DPNP tanggal 27 November 2006 mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, BNI sebagai induk perusahaan wajib melakukan penerapan manajemen risiko secara konsolidasi terhadap perusahaan anak yang dikendalikan oleh BNI. Untuk memenuhi ketentuan tersebut BNI wajib menyampaikan laporan triwulanan untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember, yaitu laporan keuangan setiap anak perusahaan, laporan keuangan konsolidasi, laporan perhitungan Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum dan rincian aktiva tertimbang menurut risiko secara konsolidasi dan laporan perhitungan BMPK secara konsolidasi. Laporan-laporan tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia sejak 31 Desember 2006.

Disamping itu BNI juga telah melakukan penilaian awal melalui serangkaian diskusi dengan perusahaan anak untuk mempersiapkan laporan profil risiko masing-masing perusahaan anak dan konsolidasi profil risiko BNI dengan perusahaan anak. Tidak ada jaminan bahwa kegiatan penyertaan pada perusahaan anak tidak berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha BNI.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang berdampak material terhadap kinerja Perseroan telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kegiatan usaha utama dan keuangan Perseroan dalam Prospektus.

VI. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian dan transaksi penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian BNI pada tanggal 30 September 2010 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini, yang memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2010 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" secara prospektif, mulai tanggal 1 Januari 2010 yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini dan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian BNI dan anak perusahaan untuk 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. Riwayat Singkat BNI

BNI didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1946 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1946, tanggal 5 Juli 1946 tentang Bank Negara Indonesia yang merupakan kelanjutan dari suatu yayasan dengan nama Badan Umum "Poesat Bank Indonesia" yang didirikan berdasarkan Akta No.14, tanggal 9 Oktober 1945, dibuat di hadapan Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, yang berfungsi sebagai bank sentral. Pada tahun 1955, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No.2 Tahun 1955, tanggal 4 Februari 1955, yang mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1946 fungsi Perseroan beralih menjadi bank umum dengan tugas utama yang diarahkan kepada pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam lapangan perdagangan impor dan ekspor. Sejak saat itu, Perseroan kemudian terus mengembangkan aktivitas pemberian pinjaman kepada berbagai sektor ekonomi.

Sejak didirikan hingga sekarang, bentuk badan hukum Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan baik melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Undang-Undang Darurat, maupun Penetapan Presiden Republik Indonesia dan Undang-Undang. Berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 1965, tanggal 27 Juli 1965, tentang Pendirian Bank Tunggal Milik Negara, Perseroan dengan nama "Bank Negara Indonesia" menjalankan tugas dan usaha sebagai bank sirkulasi, bank sentral dan bank umum. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No.KEP.65/UBS/65, tanggal 30 Juli 1965, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 1965, "Bank Negara Indonesia" menjadi "Bank Negara Indonesia Unit III". Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.17 Tahun 1968, tanggal 18 Desember 1968, "Bank Negara Indonesia Unit III" diubah menjadi "Bank Negara Indonesia 1946" (BNI 1946) dengan tugas utama yang diarahkan kepada pembangunan ekonomi nasional dengan mengutamakan sektor industri.

Sejalan dengan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946, maka BNI 1946 disesuaikan bentuk hukumnya menjadi "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia" atau "PT Bank Negara Indonesia (Persero)" dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.131, tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, SH, Notaris Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-6582.HT.01.01.Th.92, tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan dalam Buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.2153/1992, tanggal 15 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73, tanggal 11 September 1992, Tambahan No.1A. .

Pada tanggal 28 Oktober 1996, Perseroan menawarkan 25% sahamnya kepada publik melalui Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), yaitu sebesar 1.085.032.000 (satu miliar delapan puluh lima juta tiga puluh dua ribu) Saham Seri B kepada masyarakat di Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp500 setiap saham dan harga penawaran sebesar Rp850 setiap saham. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di BEJ dan BES pada tanggal 25 November 1996. Dengan perubahan status hukum ini nama "PT Bank Negara Indonesia (Persero)" berubah menjadi "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Terbuka" atau PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya di bulan Agustus 1996.

Pada tanggal 30 Juni 1999, BNI melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 151.904.480.000 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu) saham Seri C yang terdiri dari 683.916.500 saham Seri C yang diterbitkan kepada pemegang saham Publik dan terdaftar di BEJ dan BES dan sebanyak 151.220.563.500 saham Seri C yang diterbitkan kepada Pemerintah pada tanggal 7 April dan 30 Juni 2000 melalui program rekapitalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 1999 dengan nilai nominal sebesar Rp25 setiap saham, dimana setiap pemegang 1 saham lama berhak membeli 35 saham baru dengan harga Rp347,58 per saham. Dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.68, tanggal 24 Agustus 1999, Tambahan No.5208.

Pada tanggal 30 Maret 2000, Menteri Keuangan menyetujui rekapitalisasi Perseroan sebesar Rp61,8 triliun, yang meningkat sebesar Rp9 triliun dibandingkan dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 1999. Sehubungan dengan peningkatan rekapitalisasi tersebut, yang telah disetujui melalui Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2000, Perseroan menerbitkan tambahan saham Seri C sebanyak 44.946.404.500 (empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus empat ribu lima ratus) tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sehingga kepemilikan Pemerintah pasca rekapitalisasi mencapai 99,12%.

Pada tanggal 20 Juli 2001, modal saham Perseroan berkurang sebanyak 1.965.701.500 (satu miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus satu ribu lima ratus) saham Seri C sehubungan dengan pengembalian kelebihan dana rekapitalisasi kepada Pemerintah Indonesia. Pengembalian obligasi tersebut telah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPSLB pada tanggal 25 Juni 2001.

Pada tanggal 14 Juli 2003, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi I Bank BNI Tahun 2003 sebesar Rp1.000.000.000.000 dan Obligasi Subordinasi I Bank BNI Tahun 2003, sebesar AS\$ 100.000.000.

Anggaran Dasar BNI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS BNI No.13, tanggal 12 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta ("Akta No.13/2010"), antara lain mengenai perubahan Pasal 11 ayat (24) dan (25); Pasal 14 ayat (9), (18), (26) dan (27); dan Pasal 27 ayat (3). Perubahan ini telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BNI No. AHU-AH.01.10-13852, tanggal 7 Juni 2010, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042579.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 7 Juni 2010. Perubahan tersebut sedang dalam proses pengumuman di BNRI.

BNI menjalankan kegiatan usaha di bidang usaha perbankan. Bidang usaha tersebut termasuk dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar BNI.

BNI memiliki 12 kantor wilayah, 1.054 kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas di seluruh wilayah Indonesia, 4 kantor cabang luar negeri di Singapura, Hongkong, Tokyo dan London, serta 1 kantor *agency* di New York, 12 Sentra Kredit Konsumen, 51 Sentra Kredit Kecil, 20 Sentra Kredit Menengah .

Dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut:

1. Perseroan menjadi bank umum milik Negara berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1955, tanggal 4 Februari 1955 dengan tugas utama yang diarahkan kepada pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam lapangan perdagangan impor dan ekspor. Berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 1965, tanggal 27 Juli 1965, tentang Pendirian Bank Tunggal Milik Negara, Perseroan menjalankan tugas dan usaha sebagai bank sirkulasi, bank sentral dan bank umum. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. KEP.65/UBS/65, tanggal 30 Juli 1965 yang berlaku efektif pada tanggal 17 Agustus 1965, "Bank Negara Indonesia" berubah menjadi "Bank Negara Indonesia Unit III". Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 1968, tanggal 18 Desember 1968, "Bank Negara Indonesia Unit III" diubah menjadi "Bank Negara Indonesia 1946" (BNI 1946) dengan tugas utama yang diarahkan kepada pembangunan ekonomi nasional dengan mengutamakan sektor industri.
2. Izin untuk penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) sebagaimana tercantum dalam Surat BI No. 10/903/DASP, tanggal 1 Desember 2008 tentang permohonan persetujuan rencana penyelenggaraan kegiatan sebagai penerbit kartu prabayar.
3. Izin sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-162/PM/1991, tanggal 9 Desember 1991, mengenai Persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal, izin mana berlaku sejak ditetapkannya Keputusan tersebut.
4. Izin sebagai Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat yang dikeluarkan Bapepam-LK, Departemen Keuangan No. 01/STTD-WA/PM/1996, tanggal 27 Maret 1996. Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
5. Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana No. 27/BL/STTD/APERD/2007, tanggal 30 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham BNI

Perkembangan kepemilikan saham BNI sejak tahun 1992 sampai dengan Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") telah disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2007. Perkembangan saham BNI sejak Penawaran Umum Terbatas II adalah sebagai berikut:

Tahun 2007

PUT II

Sejumlah 1.992.253.110 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sepuluh) Saham Biasa Atas Nama Seri C baru dengan nilai nominal Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 20 (dua puluh) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BNI pada tanggal 9 Agustus 2007 pukul 16.00 WIB mempunyai 3 (tiga) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp2.025 (dua ribu dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham dari PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*).

Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham BNI akan melaksanakan seluruh HMETD dalam Penawaran Umum Terbatas II yang menjadi haknya yaitu sejumlah 1.974.563.625 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima) Saham Biasa Atas Nama Seri C ("Saham Hasil Pelaksanaan HMETD"). Saham Hasil Pelaksanaan HMETD tersebut akan langsung dijual oleh Negara Republik Indonesia kepada investor dan langsung didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek para investor, dan PT Bahana Securities atas nama Negara Republik Indonesia akan menyetorkan dana pelaksanaan HMETD yang berasal dari hasil Penawaran Umum oleh Negara Republik Indonesia yang dilakukan secara paralel dengan Penawaran Umum Terbatas II ini.

Disamping itu, PT Bahana Securities bertindak sebagai pembeli siaga yang bukan merupakan porsi Negara Republik Indonesia dalam hal setelah alokasi pemesanan saham tambahan yang dilakukan masih terdapat sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD, yaitu Sejumlah 17.689.485 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima) Saham Biasa Atas Nama Seri C

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dilaksanakan seluruhnya, susunan modal saham dan pemegang saham BNI sebelum dan sesudah Penawaran Umum Terbatas II ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) Setiap Saham dan
Saham Biasa Atas Nama Seri C Dengan Nilai Nominal Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Terbatas II			Setelah Penawaran Umum Terbatas II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar						
- Saham Seri A Dwiwarna	1	7.500	0,00	1	7.500	0,00
- Saham Seri B	289.341.866	2.170.063.995.000	0,84	289.341.866	2.170.063.995.000	0,84
- Saham Seri C	34.213.162.660	12.829.935.997.500	99,16	34.213.162.660	12.829.935.997.500	99,16
Jumlah Modal Dasar	34.502.504.527	15.000.000.000.000	100,00	34.502.504.527	15.000.000.000.000	100,00
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- Saham Seri A Dwiwarna						
Negara Republik Indonesia	1	7.500	0,00	1	7.500	0,00
- Saham Seri B						
Negara Republik Indonesia	217.006.399	1.627.547.992.500	1,63	217.006.399	1.627.547.992.500	1,42
Masyarakat	72.335.467	542.516.002.500	0,55	72.335.467	542.516.002.500	0,47
- Saham Seri C						
Negara Republik Indonesia	12.946.751.100	4.855.031.662.500	97,48	14.921.314.725	5.595.493.021.875	97,69
Masyarakat	45.594.433	17.097.912.375	0,34	63.283.918	23.731.469.250	0,41
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.281.687.400	7.042.193.577.375	100,00	15.273.940.510	7.789.288.493.625	100,00
C. Jumlah Saham Dalam Portepel	21.220.817.127	7.957.806.422.625		19.228.564.017	7.210.711.506.375	

Secara paralel dengan pelaksanaan transaksi ini, Negara Republik Indonesia juga sedang menjalankan program divestasi lanjutan saham BNI melalui Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham sebanyak-banyaknya 1.500.668.355 (satu miliar lima ratus juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima) Saham Biasa Atas Nama Seri C lama ("Saham Divestasi") dengan nilai nominal Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.050 (dua ribu lima puluh Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II dan Penawaran Umum oleh Pemegang Saham adalah saling terkait dan tidak dapat dijalankan secara terpisah. Jika salah satu penawaran diakhiri maka penawaran lainnya akan dibatalkan.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Negara Republik Indonesia melalui Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham, maka susunan modal saham dan pemegang saham BNI secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) Setiap Saham dan
Saham Biasa Atas Nama Seri C Dengan Nilai Nominal Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Setelah PUT II, Sebelum Penawaran Umum Oleh Negara RI			Setelah PUT II, Setelah Penawaran Umum Oleh Negara RI		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar						
- Saham Seri A Dwiwarna	1	7.500	0,00	1	7.500	0,00
- Saham Seri B	289.341.866	2.170.063.995.000	0,84	289.341.866	2.170.063.995.000	0,84
- Saham Seri C	34.213.162.660	12.829.935.997.500	99,16	34.213.162.660	12.829.935.997.500	99,16
Jumlah Modal Dasar	34.502.504.527	15.000.000.000.000	100,00	34.502.504.527	15.000.000.000.000	100,00
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- Saham Seri A Dwiwarna						
Negara Republik Indonesia	1	7.500	0,00	1	7.500	0,00
- Saham Seri B						
Negara Republik Indonesia	217.006.399	1.627.547.992.500	1,42	217.006.399	1.627.547.992.500	1,42
Masyarakat	72.335.467	542.516.002.500	0,47	72.335.467	542.516.002.500	0,47
- Saham Seri C						
Negara Republik Indonesia	14.921.314.725	5.595.493.021.875	97,69	11.446.082.745	4.292.281.029.375	74,94
Masyarakat	63.283.918	23.731.469.250	0,41	3.538.515.898	1.326.943.461.750	23,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.273.940.510	7.789.288.493.625	100,00	15.273.940.510	7.789.288.493.625	100,00
C. Jumlah Saham Dalam Portepel	19.228.564.017	7.210.711.506.375		19.228.564.017	7.210.711.506.375	

Setelah PUT II

Pada bulan September 2007, setelah dilaksanakannya PUT II, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 19, tanggal 14 September 2007, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah dilaporkan ke Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. C-UM.HT.01.10-2153, tanggal 5 November 2007 perincian kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) Setiap Saham dan Saham Biasa
Atas Nama Seri C Dengan Nilai Nominal Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	7.500	0,00
- Saham Seri B	289.341.866	2.170.063.995.000	0,84
- Saham Seri C	34.213.162.660	12.829.935.997.500	99,16
Jumlah Modal Dasar	34.502.504.527	15.000.000.000.000	100,00

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	7.500	0,00
- Saham Seri B			
Negara Republik Indonesia	217.006.399	1.627.547.992.500	1,42
Masyarakat	72.335.467	542.516.002.500	0,47
- Saham Seri C			
Negara Republik Indonesia	10.972.187.475	4.114.570.303.125	71,84
Masyarakat	4.012.411.168	1.504.654.188.000	26,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.273.940.510	7.789.288.493.625	100,00
C. Jumlah Saham Dalam Portepel	19.228.564.017	7.210.711.506.375	

Tahun 2010

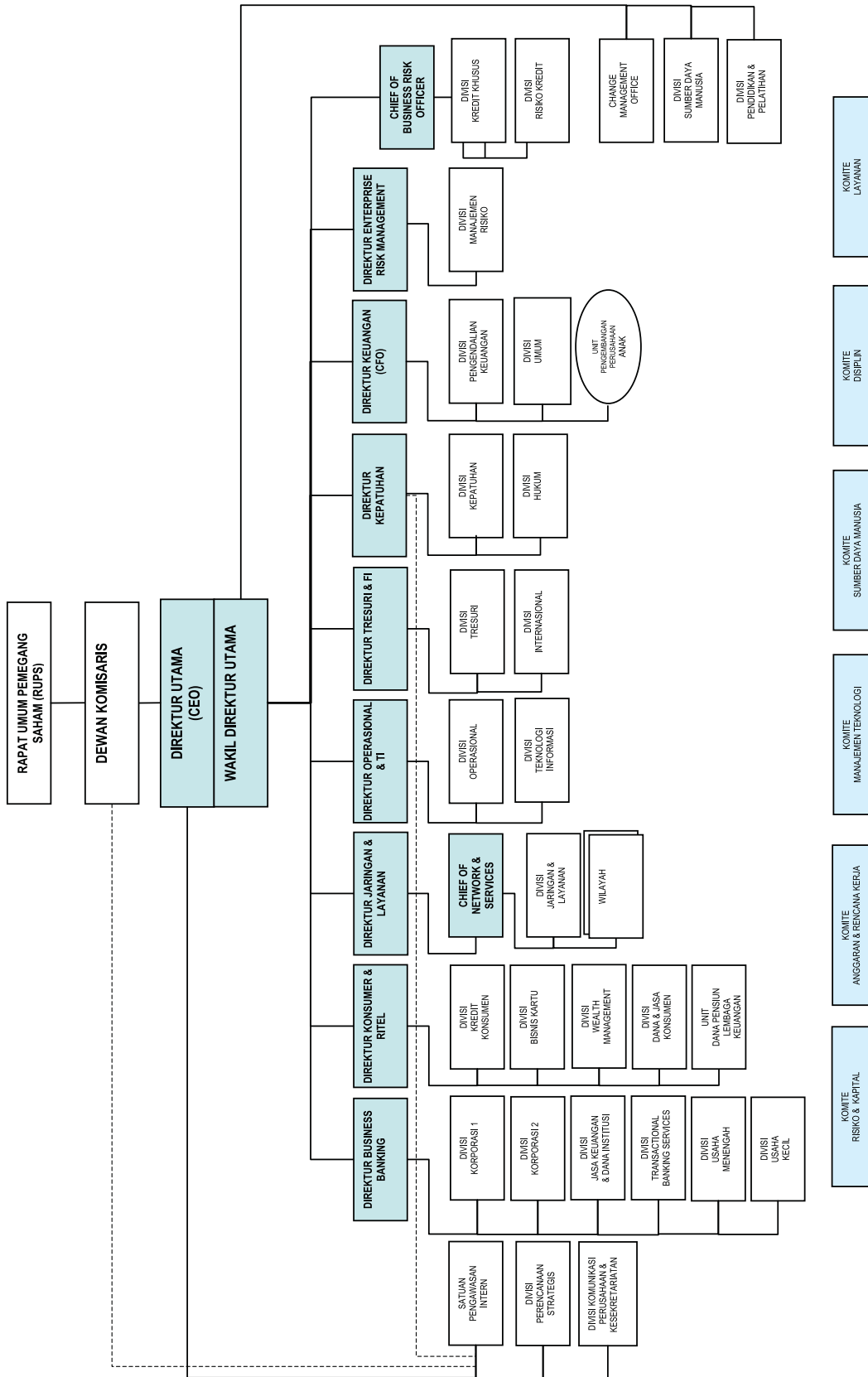
Struktur Permodalan Perseroan yang dikeluarkan PT Datindo Entrycom pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) Setiap Saham dan Saham Biasa
Atas Nama Seri C Dengan Nilai Nominal Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	7.500	0,00
- Saham Seri B	289.341.866	2.170.063.995.000	0,84
- Saham Seri C	34.213.162.660	12.829.935.997.500	99,16
Jumlah Modal Dasar	34.502.504.527	15.000.000.000.000	100,00
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	7.500	0,00
- Saham Seri B			
Negara Republik Indonesia	217.006.399	1.627.547.992.500	1,42
Masyarakat	72.335.467	542.516.002.500	0,47
- Saham Seri C			
Negara Republik Indonesia	10.972.187.475	4.114.570.303.125	71,84
Masyarakat	4.012.411.168	1.504.654.188.000	26,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.273.940.510	7.789.288.493.625	100,00
C. Jumlah Saham Dalam Portepel	19.228.564.017	7.210.711.506.375	

3. Struktur Organisasi BNI

Struktur organisasi BNI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



4. Pengurusan dan Pengawasan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BNI sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan BNI No.14, tanggal 19 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data BNI No. AHU-AH.01.10-19994, tanggal 5 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058835.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 5 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Tugas utama dari Dewan Komisaris BNI adalah memberikan nasihat dan mengawasi kebijakan-kebijakan Direksi BNI. Dewan Komisaris harus terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, termasuk Komisaris Utama. Setiap anggota Dewan Komisaris bertugas selama 5 (lima) tahun sejak diangkat hingga RUPS tahunan kelima. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris mewakili kepentingan pemegang saham dan bertanggung jawab kepada pemegang saham. Dalam RUPS, pemegang saham memiliki kewenangan untuk untuk mencalonkan, memilih dan memberhentikan Dewan Komisaris berdasarkan resolusi pemegang saham. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, paling sedikit 50% dari anggota Dewan Komisaris bank harus merupakan Komisaris Independen.

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Peter Benyamin Stok
Wakil Komisaris Utama	: Tirta Hidayat
Komisaris Independen	: Achil Ridwan Djayadiningrat
Komisaris Independen	: Bangun Sarwito Kusmuljono
Komisaris Independen	: Fero Poerbonegoro
Komisaris	: Ekoputro Adijayanto
Komisaris	: Bagus Rumbogo

Direksi

Kegiatan harian BNI dikelola oleh Direksi. Berdasarkan Anggaran Dasar BNI, Direksi BNI harus terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang salah satu diantaranya adalah Direktur Utama. Anggota Direksi dicalonkan, dipilih dan diberhentikan oleh keputusan pemegang saham dalam RUPS. Setiap anggota anggota Direksi bertugas selama 5 (lima) tahun sejak diangkat hingga RUPS tahunan kelima.

Direktur Utama	: Gatot Mudiantoro Suwondo
Wakil Direktur Utama	: Felia Salim
Direktur	: Yap Tjay Soen
Direktur	: Krishna R Suparto
Direktur Kepatuhan	: Ahdi Jumhari Luddin
Direktur	: Suwoko Singoastro
Direktur	: Honggo Widjojo Kangmasto
Direktur	: Darmadi Sutanto
Direktur	: Sutanto
Direktur	: Adi Setianto

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris:



Peter Benyamin Stok, Komisaris Utama/Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1949 dan saat ini berusia 61 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 4 Agustus 2009.

Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Permata Tbk (2008-2009), Presiden Direktur PT Bank Niaga Tbk (2000-2006), Executive Vice President PT Bank Mandiri Tbk (1999-2000), Direktur Utama PT Bank Dagang Negara (1998-1999), Komisaris Utama PT Bank Danamon (1998-1999), Direktur Utama PT Aerowisata (1998), Wakil Presiden Direktur PT Bank Pelita (1997-1998), Komisaris PT Niaga Aset Management (1995-1998), Komisaris PT Saseka Gelora Finance (1995-1998), Wakil Presiden Direktur Bank Niaga (1994-1997), menempati berbagai posisi di PT Bank Niaga Tbk (1976-1994) dan Executive Training Citibank (1975).

Pendidikan: Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Studi Pembangunan dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1989.



Tirta Hidayat, Wakil Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1959 dan saat ini berusia 51 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris sejak 12 Juli 2010.

Sebelumnya menjabat sebagai Deputi Sekretariat Wakil Presiden Bidang Ekonomi (2007-sekarang), Komisaris PT Angkasa Pura (2007-sekarang), Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (1998-2007), Komisaris PT Bank Permata (2002-2006), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Tenaga Kerja (2000-2002), Kepala Biro Ketenagakerjaan dan Penciptaan Lapangan Kerja Bappenas (1998-2000), Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV (1996-1998), Sekretaris Pokja II Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina/DKPP (1993-1999), staf pengajar Seso ABRI, Seso AU, Sespimpol (1994-2000), staf pengajar Universitas Indonesia (1985-sekarang).

Pendidikan: Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Studi Pembangunan dari Universitas Indonesia pada tahun 1985, Master dan Doktor dalam bidang Ekonomi Regional dari Cornell University, USA pada tahun 1987 dan 1991.



Achil Ridwan Djajadiningrat, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1949 dan saat ini berusia 61 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris sejak 24 Maret 2008.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kepatuhan BNI (2003-2008), Staf Ahli Dewan Gubernur Bank Indonesia Indonesia (2000-2003), Anggota Dewan Komisaris Indover Bank, Amsterdam (2000-2003), Pimpinan Cabang Bank Indonesia Jogjakarta (1998-2000), Wakil Pimpinan Riset dan Pengembangan Bank Indonesia (1997-1998), Wakil Kepala Urusan Pengawasan Bank I Bank Indonesia (1994-1997) dan menempati berbagai posisi di Bank Indonesia (1977-1994).

Pendidikan: Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1979 dan MA dalam bidang Management Science dari Arthur D. Little School of Management, Boston, USA pada tahun 1983.



Fero Poerbonegoro, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1955 dan saat ini berusia 55 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris sejak 1 Juli 2008.

Sampai saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Swadharma Kerry Satya (2010-sekarang), Komisaris BNI (2008-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tresuri Internasional dan Private Banking BNI (2003-2008), Project Manager New Core Banking BNI (2002-2003), Direktur Tresuri & International Bank Central Asia (1998-2002), Pemimpin Divisi Tresuri BNI (1997-1998) dan menempati berbagai posisi di BNI sejak tahun 1981.

Pendidikan: Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi Perusahaan dari Universitas Brawijaya pada tahun 1981 dan Pasca Sarjana jurusan Keuangan dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995.



Bangun Sarwito Kusmuljono, Komisaris

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1943 dan saat ini berusia 67 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris sejak 12 Juli 2010.

Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2005-2010), Ketua Komite Nasional Pemberdayaan Keuangan Mikro (PKPMI) (2005-sekarang), Komisaris Utama PT Syarikat Takaful Indonesia (2007-2009), Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero (1999-2005), Komisaris PT Bank Niaga Tbk (1999-2002), staf ahli Kementerian BUMN (1998-1999), Komisaris Maybank Nusa (1994-1997), Direktur Utama PT Bank Nusa Internasional (1990-1997), Investment Officer Asian Development Bank (1985-1986), General Manager Fincorinvest/Bank Indonesia (1980-1985), Credit Officer Chase Manhattan Bank New York, USA dan Hongkong (1974-1980) dan staf BKPM (1970-1972).

Pendidikan: Memperoleh gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Kimia pada tahun 1970, MBA dari University of Southern California Los Angeles, USA jurusan Business Administration pada tahun 1974 dan Doktor dari Institut Pertanian Bogor jurusan SDA Lingkungan pada tahun 2007.



Ekoputro Adijayanto, Komisaris

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1966 dan saat ini berusia 44 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris sejak 12 Juli 2010.

Sebelumnya menjabat sebagai staf ahli Kementerian BUMN (2009-sekarang), staf ahli Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) (2009-sekarang), Strategic Management Consultant Dreya Group (2006-2009), Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2006), Coordinator General Manager Ritel I PT Bank Permata Tbk (2005), menempati berbagai posisi di PT Bank Permata Tbk (2004-2005), Vice President PT Bank Universal Tbk (2001-2002), menempati berbagai posisi di PT Bank Universal Tbk (1994-2002), Associate PT Harvest International (1991-1992) dan Staf Riset dan Asisten Dosen Universitas Indonesia (1989-1993).

Pendidikan: Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Studi Pembangunan dari Universitas Indonesia pada tahun 1991.



Bagus Rumbogo, Komisaris

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1954 dan saat ini berusia 56 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris sejak 12 Juli 2010.

Sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Utama Bappenas (2005-sekarang), Inspektur Bidang Administrasi Umum Bappenas (2001-2005), Kepala Bidang Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara (1999-2001), Kepala Bagian Kantor Menteri Koordinator Bidang Wasbang dan PAN (1998-1999), Kepala Bagian dan staf ahli Bidang Pengawasan dan Pembangunan Kantor Menteri Koordinator Bidang Eku dan Wasbang (1996-1998), Kepala Subid pada Puslitbang BPKP (1995-1996), menempati berbagai posisi di BPKP (1990-1995), Auditor pada Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan (1982), Manajer Divisi Ecoplan Consultant (1981-1982) dan Auditor KAP Drs Soedomo (1978-1981).

Pendidikan: Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1982.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Direksi:



Gatot M. Suwondo, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1954 dan saat ini berusia 56 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak 6 Februari 2008.

Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BNI (2005-2008), Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2001-2005), PT Bank Duta (1988-2001), PT First Indo American (1983-1988), PT Chemco Graha Leasing (1982-1983), Indonesia Embassy Manila Philippines (1979-1982).

Pendidikan: Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Mindanao State University, Philipina pada tahun 1979 dan MBA dalam Business Administration dari International University, Philipina pada tahun 1982.



Felia Salim, Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1957 dan saat ini berusia 53 tahun.

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama sejak 6 Maret 2008.

Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) (2008-sekarang), Komisaris BNI (2004-2008), Komisaris Independen PT Goodyear Indonesia (2004-2008), Eksekutif Direktur Interim Yayasan TIFA (Mei 2003-Des 2003), Direktur Eksekutif Temporer pada office of Partnership Governance Reform (Mei 2002-Des 2002), Wakil Ketua BPPN dan Ketua Sekretariat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (2000-2001), Direktur Bursa Efek Jakarta (1994-1999), Independent Consultant Economic&Financial Research Institute (Ecfm) (1992-1994), Vice President PT Jardine Fleming Nusantara (1990-1992) dan Citibank (1983-1990).

Pendidikan : Memperoleh gelar Sarjana jurusan Bahasa Spanyol dari Instituto Venezolano-Americano di Caracas, Venezuela pada tahun 1977, Sarjana jurusan Bisnis dari La Fortune Business College, Ottawa, Canada pada tahun 1978, Sarjana jurusan Perbankan dan Keuangan dari London Business Institute, Kairo, Mesir pada tahun 1982 dan Sarjana jurusan Ilmu Politik dan Ekonomi dari Carleton University, Ottawa, Canada pada tahun 1983.



Krishna R Suparto, Direktur Business Banking

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1955 dan saat ini berusia 55 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Business Banking sejak 6 Maret 2008.

Sebelumnya menjabat sebagai Senior Advisor PT Amaco Asia (2007), Presiden Direktur PT Barclays Capital Securities Indonesia (2003-2006), Managing Director PT Bank Danamon (2000-2003), Managing Director PT Bank Bumiputera Indonesia (1995-2000), General Manager Corporate Banking PT Bank Danamon (1992-1995), Vice President Corporate Banking Citibank (1984-1992) dan PT Minicorp Indonesia (1983-1984).

Pendidikan: Memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Niaga Universitas Indonesia pada tahun 1982.



Yap Tjay Soen, Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1953 dan saat ini berusia 57 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak 6 Maret 2008.

Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Mandiri (2005), Komisaris BNI (2003), Komisaris Independen PT Aneka Tambang (2002), Direktur Utama PT Tuban Petrochemical Industries (2002), Deputy President Director BII (2001), COO Asia Food & Properties Singapore (1998), CEO Divisi Auto 2000 PT Astra International (1988) dan Vice President Citibank (1988).

Pendidikan: Memperoleh gelar Sarjana jurusan Teknik dan Master dalam bidang Bisnis dari McGill University pada tahun 1976 dan 1980.



Ahdhi Jumhari Luddin, Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1954 dan saat ini berusia 57 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak 6 Maret 2010.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko (2008-2010), Direktur Pengawasan Bank I Bank Indonesia (2006-2008) dan menempati berbagai posisi di Bank Indonesia (1983-2006).

Pendidikan: Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1982 dan Master dalam bidang Kebijakan Ekonomi dari University of Illinois, USA pada tahun 1989.



Suwoko Singoastro, Direktur Operasi dan Teknologi Informasi

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1953 dan saat ini berusia 57 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Operasi dan Teknologi Informasi sejak 6 Maret 2010.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jaringan dan Operasi BNI (2008-2010), Executive Vice President Jaringan Distribusi, Pemimpin Divisi Jaringan, Pemimpin Divisi Operasional, Wakil Pemimpin Wilayah, Pemimpin Cabang dalam dan luar negeri (1982-2008).

Pendidikan: Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi Umum dari Universitas Jember pada tahun 1980 dan MBA dalam bidang Keuangan dari Virginia Polytechnic Institute & State University, USA pada tahun 1987.



Darmadi Sutanto, Direktur Konsumer & Ritel

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1964 dan saat ini berusia 46 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Konsumer sejak 12 Juli 2010.

Sebelumnya menjabat sebagai Director of Retail Banking ABN Amro/RBS (2007-2010), Head of Branch Banking PT Bank Permata (2007), Executive Vice President Standard Chartered Bank (2006-2007), GM Shared Distribution & Wealth Management Standard Chartered Bank (2001-2006), Senior Asset Product Manager Standard Chartered Bank (2000-2001), National Sales Manager Citibank (1999-2000), Head of Distribution Expansion Citibank (1992-2000) dan Developer Relationship Manager Citibank (1995-1997).

Pendidikan: Memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Trisakti pada tahun 1988 dan Master dalam bidang Business Administration dari University of Western Illinois, USA pada tahun 1991.



Honggo Widjojo Kangmasto, Direktur Jaringan

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1966 dan saat ini berusia 43 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Jaringan sejak 12 Juli 2010.

Sebelumnya menjabat sebagai Managing Director PT Bank Permata (2008-2010), Managing Director PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2006-2007), SEVP Coordinator Commercial Banking PT Bank Mandiri (2005-2006) dan menempati berbagai posisi di Bank Mandiri hingga menjabat Group Head Jakarta Commercial Sales (2000-2005), Kepala Divisi Korporasi PT Bank Internasional Indonesia Tbk (1996-2000) dan Kepala Urusan Kredit PT Bank Central Asia Tbk (1989-1996).

Pendidikan: Memperoleh gelar Sarjana jurusan Perikanan dari Universitas Sam Ratulangi pada tahun 1988 dan Master dalam bidang Manajemen dari Royal Melbourne Institute of Technology pada tahun 1992.



Sutanto, Direktur Pengelolaan Risiko

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1956 dan saat ini berusia 54 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Risiko sejak 12 Juli 2010.

Sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko, Pemimpin Divisi Pendidikan dan Pelatihan, Wakil Pemimpin Divisi SDM, Wakil Pemimpin Wilayah Palembang dan Pemimpin Cabang di beberapa tempat (2000-2010).

Pendidikan: Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi Perusahaan dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 1981 dan Master dalam bidang Manajemen dari Drake University, USA pada tahun 1992.



Adi Setianto, Direktur Tresuri & Internasional

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1961 dan saat ini berusia 49 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Tresuri dan Internasional sejak 12 Juli 2010.

Sebelumnya menempati berbagai posisi di BNI dari Pemimpin Divisi Jasa Keuangan dan Dana Institusi, Pemimpin Divisi Jaringan, Pemimpin Wilayah Bandung, Pemimpin Unit Bancassurance, Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Non Ritel Banjarmasin, Pemimpin Cabang Tangerang (2001-2010).

Pendidikan: Memperoleh gelar Sarjana Muda dari Universitas Airlangga pada Jurusan Akuntansi pada tahun 1982, Sarjana Jurusan Akuntansi dari Universitas Narotama, Jepang pada tahun 1989 dan Master dalam bidang Finance/Keuangan dari University of Drexel, USA pada tahun 1992.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi BNI telah sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004, tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.4 tahun 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BNI No. KP/164/DIR/R, tanggal 29 Juli 2010, Perseroan telah menunjuk Putu Bagus Kresna, SE. MM sebagai Sekretaris Perusahaan.

Bidang tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain :

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi BNI.
3. Memberikan masukan kepada Direksi BNI untuk mematuhi ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
4. Sebagai penghubung atau contact person antara BNI dengan Bapepam-LK dan masyarakat

Direktur Kepatuhan

Bank Indonesia mewajibkan untuk mengangkat salah satu dari anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk memastikan agar BNI mematuhi semua peraturan Bank Indonesia dan peraturan dan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pengimplementasian prinsip-prinsip perbankan yang hati-hati (*prudential banking principles*), untuk mengawasi aktivitas bisnis BNI dan memastikan agar semua aktivitas yang dijalankan tidak melanggar peraturan yang ada, serta untuk mengawasi kepatuhan BNI terhadap semua perjanjian dan komitmen kepada Bank Indonesia.

Ahdi Djumhari Luddin menjadi Direktur Kepatuhan BNI sejak 6 Maret 2008 (berdasarkan surat BI No. 10/27/GBI/DPIP/Rahasia). Direktur Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh keputusan Komite Eksekutif dan Komite Manajemen telah sesuai dengan seluruh peraturan Bank Indonesia dan hukum yang berlaku, serta membuat laporan mengenai kebijakan yang dibuat oleh Komite dan laporan apabila terdapat penyimpangan terhadap peraturan Bank Indonesia dan / atau peraturan-peraturan yang berlaku.

Komite Manajemen dan Eksekutif

BNI memiliki tiga komite yang anggotanya adalah Dewan Komisaris BNI, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi serta enam komite yang anggotanya adalah Direksi BNI, yaitu Komite Risiko dan Kapital, Komite Perencanaan dan Anggaran, Komite Manajemen Teknologi, Komite Sumberdaya Manusia, Komite Disiplin dan Komite Pelayanan.

Komite Audit

Sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam No. IX.I.5, Sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam No. IX.I.5 tentang Pembentukan Komite Audit, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut dengan telah dibentuknya suatu Komite Audit dan diputuskan dalam surat No.Kep/05/DK/2000, tanggal 28 Juli 2000 tentang Pembentukan Komite Audit BNI. Berdasarkan keputusan tersebut. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga anggota dan salah satu dari anggota tersebut merupakan komisaris BNI, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak luar yang bersifat independen.

Komite ini bertanggung jawab untuk memberikan nasehat dan masukan Dewan Komisaris berdasarkan laporan atau permasalahan lain yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi permasalahan yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam kaitannya dengan tugas-tugas Dewan Komisaris.

Komite Audit bertindak sebagai penasihat profesional dan independen untuk Dewan Komisaris. Komite Audit juga melakukan peninjauan atas paket kompensasi dan remunerasi Direksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Keputusan Rapat Dewan Komisaris BNI No. Kep/014 A/DK/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Susunan Komite-komite Dewan Komisaris, susunan anggota Komite Audit BNI adalah sebagai berikut :

Ketua : Achil Ridwan Djayadiningrat
Anggota : Bagus Rumbogo
Anggota : Setyo Buwono
Anggota : Darminto

Setyo Buwono, Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1952 dan saat ini berusia 58 tahun.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit BNI sejak tahun 2008.

Sebelumnya menempati berbagai posisi seperti anggota Komite Audit Bank Finconesia (2007-2008), Ketua Tim Litigasi Divisi Hukum BNI (2005-2007), Pemimpin Kelompok Penyelamatan Kredit (1998-2003), Anggota Komite Audit PT Garuda Indonesia (Persero) (2000-2003), General Manager pada BNI Faysal Finance (1997-1998).

Pendidikan: Memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Perdata dan Sarjana Jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta pada tahun 1976 dan 1995.

Darminto, Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1953 dan saat ini berusia 57 tahun.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit BNI sejak tahun 2008.

Sebelumnya menempati berbagai posisi seperti anggota Komite Audit Bank Finconesia (2007-2008), Ketua Tim Litigasi Divisi Hukum BNI (2005-2007), Pemimpin Kelompok Penyelamatan Kredit (1998-2003),

Pendidikan: Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada tahun 1982 dari Universitas Indonesia pada tahun 1982, Master dalam bidang Business Administration dari State University of New York, USA pada tahun 1987 dan Doktor dalam bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2010.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk pada tahun 2003, terdiri atas lima anggota, yaitu dua anggota Dewan Komisaris dan tiga anggota dari pihak luar, masing-masing berasal dari Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan akademisi. Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko dengan tugas untuk membantu para Komisaris dalam melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan risiko BNI.

Berdasarkan Surat Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.Kep/014 A/DK/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Susunan Komite-komite Dewan Komisaris, susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Ketua : Fero Poerbonegoro
Anggota : B.S Kusmuljono
Anggota : Setiawan Boedihardjo
Anggota : Subardiah

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk pada tahun 2002, terdiri atas tiga anggota, yaitu dua anggota jajaran Komisaris dan satu anggota dari pihak luar. Komite ini bertugas sebagai penasehat independen bagi Dewan Komisaris dan bertanggung jawab dalam melakukan formulasi kriteria seleksi dan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi BNI, serta membantu Komisaris dalam menentukan remunerasi bagi Direksi dan mengevaluasi proses remunerasi tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. Kep/014 A/DK/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Susunan Komite-komite Dewan Komisaris, susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Peter Benyamin Stok
Anggota : Tirta Hidayat
Anggota : Achil Ridwan Djayadiningrat
Anggota : Fero Poerbonegoro
Anggota : B.S Kusmuljono
Anggota : Bagus Rumbogo
Anggota : Ekoputro Adijayanto
Anggota : Idayu Nilawati
Anggota : Junaidi Hisom
Anggota : Arief Ahdi Sanjaya

Komite Risiko dan Kapital

Komite Risiko dan Kapital disempurnakan pada tanggal 30 Juli 2010 dan terdiri dari 16 anggota. Komite Risiko dan Kapital memberikan laporan kepada Dewan Direksi dan bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pengelolaan risiko, kebijakan pengelolaan risiko kredit dan kebijakan pengelolaan likuiditas, *gap*, nilai tukar, serta pengelolaan pendapatan dan investasi. Komite Risiko dan Kapital terdiri dari tiga sub komite, yaitu sub komite Manajemen Risiko, sub komite *Asset and Liabilities* dan sub komite Kebijakan Kredit yang ketiganya telah ada sebelum pembentukan Komite Risiko dan Kapital pada April 2004.

Komite Perencanaan dan Anggaran

Komite Perencanaan dan Anggaran dibentuk pada tanggal 22 Mei 2009 dan terdiri dari enam anggota. Komite Perencanaan dan Anggaran melapor kepada Direksi dan bertanggung jawab untuk mengevaluasi pencapaian target untuk pengeluaran modal dan operasi serta realisasi rencana bisnis unit-unit bisnis BNI. Komite Perencanaan dan Anggaran juga bertanggung jawab dan memberikan nasihat yang berhubungan dengan hal-hal strategis mengenai kebijakan anggaran, revisi dan target untuk pengeluaran modal serta pengeluaran operasi dan tindakan strategis lainnya.

Komite Manajemen Teknologi

Komite Manajemen Teknologi dibentuk pada tahun 2009 dan disempurnakan pada tanggal 18 Agustus 2010 dan terdiri dari 20 anggota tetap. Komite Manajemen Teknologi melakukan pelaporan sebanyak dua kali dalam setahun. Komite ini melapor kepada Dewan Direksi dan bertanggung jawab dalam menentukan strategi-strategi dalam teknologi informasi. Tugas dan tanggung jawab dari Komite Manajemen Teknologi adalah sebagai berikut:

- *Formulasi Kebijakan*, termasuk memastikan agar *Standard Operation Procedures* (SOP) pengembangan yang berhubungan dengan teknologi informasi, serta pemeliharaan sistem dan teknologi informasi konsisten dengan strategi bisnis BNI.

- *Pelaksanaan Rencana Strategis Teknologi Informasi dalam Kegiatan Usaha*, termasuk memastikan peninjauan dan persetujuan atas rencana strategis teknologi informasi dalam kegiatan usaha, menetapkan prioritas proyek teknologi informasi sesuai dengan signifikansi kegunaannya terhadap kegiatan usaha BNI.
- *Manajemen Risiko Teknologi Informasi*, termasuk memberikan dukungan teknologi informasi untuk unit-unit bisnis BNI, berperan sebagai mediator untuk permasalahan yang belum terselesaikan antara unit bisnis dan *Service Level Agreement* serta meninjau perkembangan teknologi informasi.
- *Evaluasi Proyek Teknologi Informasi*, termasuk memastikan dilakukannya peninjauan dan persetujuan atas proyek-proyek teknologi informasi yang melibatkan biaya yang signifikan dan secara periodik memonitor dampak dari kebijakan dan strategi pengembangan teknologi dalam hubungannya dengan profitabilitas BNI secara keseluruhan.

Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia yang disempurnakan pada tanggal 9 Februari 2004, terdiri atas sebelas anggota, yaitu Direktur Kepatuhan, Hukum dan SDM, Direktur Operasi, Direktur Manajemen Risiko, Direktur Konsumer, Direktur UKM & Syariah, Direktur Korporasi, Direktur Tresuri dan Private Banking, Pemimpin Divisi SDM, Pemimpin Satuan Pengawasan Intern, Pemimpin Divisi Hukum dan Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan.

Komite Sumber Daya Manusia terdiri atas dan hanya beroperasi melalui tiga Tim, yaitu Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim Penugasan Tenaga Pimpinan dan Tim Budaya Kerja. Tim-tim ini memberikan laporan kepada Direksi mengenai formulasi kebijakan, sistem dan prosedur SDM dan evaluasi staff manajerial.

Komite Displin

Komite Disiplin, yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 2004, terdiri atas tiga anggota tetap yaitu Direktur Kepatuhan Hukum dan SDM, Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Pemimpin Satuan Pengawas Intern, serta anggota tidak tetap lainnya. Komite Disiplin bertanggung jawab dan memberikan laporan kepada Direksi dalam hal masalah kepegawaian, negosiasi dan penyelesaian kasus karyawan, memutuskan sanksi administrasi yang dikenakan kepada karyawan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan rapat Komite Disiplin belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, namun efektifitasnya dialihkan melalui rapat Tim Pertimbangan Hukuman Jabatan (TPHJ) yang anggotanya terdiri dari Divisi SDM (Ketua), Divisi Hukum, Divisi Jaringan dan Satuan Pengawasan Internal.

Komite Layanan

Komite Layanan dibentuk pada tanggal 4 Februari 2004 dan terdiri dari 20 anggota. Komite Layanan bertanggung jawab untuk memformulasikan dan mengelola perbaikan dan pengembangan kebijakan dan sistem manajemen layanan BNI, mengelola perencanaan dan organisasi, melakukan supervisi, mengelola kualitas layanan sesuai dengan perkembangan pasar, menetapkan kebijakan, sistem dan prosedur untuk pertumbuhan di masa yang akan datang.

Kompensasi

Dewan Komisaris dan Direksi BNI menerima kompensasi yang ditetapkan dalam RUPS tahunan dan dibayarkan per bulan. Kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi BNI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2007, 2008 dan 2009 serta periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 adalah masing-masing sebesar Rp14 miliar dan Rp3 miliar, Rp19 miliar dan Rp5 miliar, Rp35 miliar dan Rp8 miliar, serta Rp22 miliar dan Rp6 miliar. Selain itu, Direksi berhak atas fasilitas-fasilitas seperti tunjangan untuk tempat tinggal, transportasi, utilitas, perawatan kesehatan dan keanggotaan asosiasi. Dewan Komisaris dan Direksi BNI tidak menerima *reimburse* pajak penghasilan atas pendapatan yang diterima.

5. Sumber Daya Manusia

Profil Karyawan

Pada tanggal 30 September 2010, BNI memiliki 20.848 karyawan, termasuk 1.496 karyawan kontrak dan 160 karyawan staf luar negeri. Pada tanggal 30 September 2010, sebagian besar karyawan BNI, atau 58,50% dari jumlah karyawan, bekerja di kantor cabang di Indonesia, 19,61% bekerja di kantor pusat dan 9,32% bekerja di sentra kredit. Sisanya bekerja di kantor regional, kantor cabang, kantor keagenan di luar negeri dan anak perusahaan.

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan BNI dalam berbagai kategori pada tanggal 31 Desember 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009 serta pada tanggal 30 September 2010.

Komposisi Karyawan Menurut Wilayah

Wilayah	Pada tanggal 31 Desember									Pada tanggal 30 September
	2005	Δ	2006	Δ	2007	Δ	2008	Δ	2009	2010
WILAYAH 01	1.036	-2,2%	1.013	0,2%	1.015	-2,0%	995	0,8%	1.000	1.042
WILAYAH 02	938	-4,4%	897	0,0%	897	-1,1%	887	-1,5%	897	939
WILAYAH 03	998	-5,2%	946	-3,2%	916	-3,3%	886	-1,9%	897	954
WILAYAH 04	1.414	-5,8%	1.332	-2,0%	1.306	-3,1%	1.266	8,5%	1.272	1.304
WILAYAH 05	1.688	-4,5%	1.612	1,8%	1.641	-2,4%	1.602	7,1%	1.633	1.683
WILAYAH 06	1.953	-2,8%	1.898	-2,2%	1.856	-3,3%	1.794	0,7%	1.796	1.871
WILAYAH 07	933	-3,1%	904	-1,7%	889	-2,6%	866	0,1%	882	948
WILAYAH 08	827	-0,6%	822	-1,9%	806	-1,2%	796	3,1%	839	866
WILAYAH 09	1010	-2,9%	981	-0,8%	973	-1,1%	962	-3,3%	942	991
WILAYAH 10	2339	-7,4%	2165	3,1%	2.233	0,2%	2.237	4,0%	2.370	2.391
WILAYAH 11	603	-4,8%	574	-1,6%	565	-0,4%	563	0,4%	567	564
WILAYAH 12	1.266	-3,6%	1.221	3,4%	1.263	1,3%	1.280	4,7%	1.366	1.443
Kantor besar	3.986	-11,5%	3.528	-2,7%	3.432	-2,3%	3.353	1,3%	3.428	4.088
Luar negeri	19	0,0%	19	5,3%	20	0,0%	20	5,0%	21	18
Syariah	322	42,9%	460	10,4%	508	3,3%	525	8,0%	565	-
Total BNI	19.332	-5,0%	18.372	-0,3%	18.320	-1,6%	18.032	2,5%	18.475	19.102
Lokal Staff di luar negeri	139	4,3%	145	11,7%	162	2,5%	166	-13,3%	146	142
Anak Perusahaan	423	41,6%	599	-6,2%	562	19,8%	673	6,5%	598	1.604
Total BNI dan Anak Perusahaan	19.894	-3,9%	19.116	-0,4%	19.044	-0,9%	18.871	2,5%	19.219	20.848

Catatan : PT BNI Syariah dispin off mulai tanggal 8 Juni 2010

Komposisi Karyawan Menurut Kantor Cabang dan Kantor Pusat

Jenis Kantor	Pada tanggal 31 Desember									Pada tanggal 30 September
	2005	Δ	2006	Δ	2007	Δ	2008	Δ	2009	2010
Kantor pusat	3.986	-11,5%	3.528	-2,7%	3.432	-2,3%	3.353	1,3%	3.428	4.088
Kantor wilayah	767	-6,6%	716	-4,5%	684	2,0%	698	-1,0%	594	857
Kantor cabang dan kantor cabang pembantu domestik	14.560	-3,1%	14.109	-13,3%	12.227	-1,8%	12.007	2,9%	12.558	12.197
Kantor sentra kredit	-	-	-	-	1.957	-0,2%	1.954	2,7%	1.874	1.942
Kantor cabang luar negeri & kantor keagenan	19	0,0%	19	5,3%	20	0,0%	20	5,0%	21	18
TOTAL BNI	19.332	-5,0%	18.372	-0,3%	18.320	-1,6%	18.032	2,5%	18.475	19.102
Lokal Staff di luar negeri	139	4,3%	145	11,7%	162	2,5%	166	-13,3%	146	142
Anak Perusahaan	423	41,6%	599	-6,2%	562	19,8%	673	6,5%	598	1.604
Total BNI dan Anak Perusahaan	19.894	-3,9%	19.116	-0,4%	19.044	-0,9%	18.871	2,5%	19.219	20.848

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Jabatan	Pada tanggal 31 Desember									Pada tanggal 30 September
	2005	Δ	2006	Δ	2007	Δ	2008	Δ	2009	2010
Executive vice president	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Vice president	121	9,1%	132	0,0%	132	-8,3%	121	12,4%	135	118
Assistant vice president	651	2,5%	667	4,5%	697	-4,4%	666	1,4%	697	641
Manager	1.768	1,9%	1.802	0,7%	1.815	2,4%	1.858	2,5%	1.908	1.838
Assistant manager	6.742	2,7%	6.925	2,1%	7.073	-1,8%	6.948	-6,9%	6.428	6.028
Assistant	8.474	-12,2%	7.443	-2,5%	7.256	-0,6%	7.213	12,3%	8.187	9.297
Pegawai dasar	1.576	-11,0%	1.403	-4,0%	1.347	-9,0%	1.226	-2,9%	1.120	1.179
Total BNI	19.332	-5,0%	18.372	-0,3%	18.320	-1,6%	8.032	2,5%	18.475	19.102
Local staff	139	4,3%	145	11,7%	162	2,5%	166	-13,3%	146	142
Anak perusahaan ⁽³⁾	423	41,6%	599	-6,2%	562	19,8%	673	6,5%	598	1.604
Total BNI dan anak perusahaan	19.894	-3,9%	19.116	-0,4%	19.044	-0,9%	18.871	2,5%	19.219	20.848

Catatan:

(1) Termasuk general manager dan deputy general manager

(2) Termasuk group head

(3) Jabatan karyawan pada Lokal Staff di luar negeri dan Anak Perusahaan mempunyai klasifikasi yang berbeda

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Pada tanggal 31 Desember								Pada tanggal 30 September	
	2005	Δ	2006	Δ	2007	Δ	2008	Δ	2009	2010
Doktor	3	66,7%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	4	4
Pasca Sarjana	1.560	20,6%	1.881	1,0%	1.899	9,0%	2.070	6,2%	2.252	2.125
Sarjana	12.533	0,3%	12.570	-1,6%	12.365	-0,7%	2.279	1,3%	12.681	13.053
Diploma	2.873	-25,4%	2.144	12,5%	2.412	-10,0%	2.172	-4,7%	2.403	2.844
SLTA	2.020	-23,2%	1.551	-7,9%	1.428	-8,8%	1.302	20,7%	948	925
SLTP	225	-29,8%	158	-2,5%	154	-3,2%	149	-5,4%	139	118
SD	118	-46,6%	63	-9,5%	57	-3,5%	55	-7,3%	48	33
Total BNI	19.332	-5,0%	18.372	-0,3%	18.320	-1,6%	18.032	2,5%	18.475	19.102
Local Staff di luar negeri	139	4,3%	145	11,7%	162	2,5%	166	-13,3%	146	142
Anak Perusahaan ⁽³⁾	423	41,6%	599	-6,2%	562	19,8%	673	6,5%	598	1.604
Total BNI dan Anak Perusahaan	19.894	-3,9%	19.116	-0,4%	19.044	-0,9%	18.871	2,5%	19.219	20.848

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	Pada tanggal 31 Desember								Pada tanggal 30 September	
	2005	Δ	2006	Δ	2007	Δ	2008	Δ	2009	2010
0<24	753	-76,0%	181	112,2%	384	-27,6%	278	309,7%	1.110	753
25-30	7.303	-5,6%	6.892	-12,0%	6.065	-32,9%	4.067	-14,2%	3.278	7.631
31-35	3.627	-6,1%	3.406	0,1%	3.411	39,6%	4.761	4,5%	5.472	3.866
36-40	3.008	23,1%	3.702	14,1%	4.225	-4,4%	4.039	2,1%	3.718	3.395
41-45	1.648	-18,8%	1.339	-3,3%	1.295	37,9%	1.786	18,0%	2.411	1.648
46-50	2.093	-6,7%	1.953	-1,1%	1.932	-3,4%	1.866	-20,5%	1.325	2.093
51-52	588	-9,0%	535	15,9%	620	14,2%	708	-22,7%	550	588
53-54	299	8,0%	323	12,1%	362	41,2%	511	-4,9%	463	299
≥ 55	13	215,4%	41	-36,6%	26	-38,5%	16	668,8%	148	13
Total BNI	19.332	-5,0%	18.372	-0,3%	18.320	-1,6%	18.032	2,5%	18.475	20.286
Local Staff di luar negeri	139	4,3%	145	11,7%	162	2,5%	166	-13,3%	146	139
Anak Perusahaan ⁽³⁾	423	41,6%	599	-6,2%	562	19,8%	673	6,5%	598	423
Total BNI dan Anak Perusahaan	19.894	-3,9%	19.116	-0,4%	19.044	-0,9%	18.871	2,5%	19.219	20.848

Tenaga Asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, BNI memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai berikut:

- Nama : Vermeij Johannes Abraham
 Kewarganegaraan : Belanda
 Jabatan : *Software Integrator*
 No. IMTA : 5133/2009, tanggal 7 Desember 2009, yang berlaku sejak 1 Januari 2010 s.d. 31 Desember 2010
 No. KITAS : 2C21JD3970-H, yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2010
- Nama : Serena Vu
 Kewarganegaraan : Australia
 Jabatan : *General Programmer*
 No. IMTA : 5134/2009, tanggal 7 Desember 2009, yang berlaku sejak 1 Januari 2010 s.d. 31 Desember 2010
 No. KITAS : 2C21JD4025-H, yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2010

3. Nama : Paul Sherrard
Kewarganegaraan : Australia
Jabatan : *Front End Programmer*
No. IMTA : 5132/2009, tanggal 7 Desember 2009, yang berlaku sejak 1 Januari 2010 s.d. 31 Desember 2010
No. KITAS : 31.710703.40217, yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2010
4. Nama : David William Ridge
Kewarganegaraan : New Zealand
Jabatan : *System Analyst*
No. IMTA : 3142/2010, tanggal 20 Juli 2010, yang berlaku sejak 22 Juli 2010 s.d. 21 Juli 2011
No. KITAS : 2C21JD2725-J, yang berlaku sampai dengan 21 Juli 2011

Kesejahteraan karyawan

Karyawan BNI menerima paket kompensasi yang meliputi gaji dasar, penghargaan kinerja tahunan (yang dikenal dengan nama Jasa Produksi, kinerja unit kerja dan kinerja individu), yang dibayarkan di pertengahan tahun berdasarkan kinerja tengah tahun, cuti tahunan, program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti, pemberian pinjaman kepada karyawan dengan tingkat bunga yang lebih rendah (termasuk pinjaman untuk perumahan, kendaraan dan pinjaman lain-lain), asuransi kesehatan dan tunjangan perumahan serta transportasi untuk beberapa karyawan level pimpinan.

Dana Pensiun BNI

BNI menyediakan Program Pensiun Manfaat Pasti untuk karyawan BNI yang menjadi karyawan tetap BNI sebelum bulan September 2005. Karyawan yang memilih untuk menjadi peserta harus membayar iuran sebesar 7,5% dari penghasilan dasar pensiun (PHDP), sedangkan iuran yang harus dibayar BNI dihitung berdasarkan valuasi aktuaria. BNI juga menyediakan program pensiun iuran pasti (DPLK BNI, yang dikelola oleh unit Dana Pensiun, yang merupakan salah satu unit bisnis BNI) bagi seluruh karyawan yang bergabung dengan BNI (sebagai karyawan tetap) sejak September 2005. Karyawan yang berpartisipasi dalam program ini membayar 3,5% dari gaji dan kontribusi BNI sebesar 11,5% dari gaji karyawan. Selain itu, program ini (DPLK BNI) juga ditawarkan kepada karyawan yang bergabung dengan BNI sebelum September 2005, tetapi dengan jumlah kontribusi yang lebih kecil. Bagian yang dibayarkan oleh karyawan dan BNI masing-masing adalah sebesar 25% dan 75% dari total kontribusi.

Pada tahun 2009, dalam rangka untuk merevitalisasi organisasi dan untuk regenerasi, BNI memperkenalkan program pensiun sukarela untuk karyawan terpilih yang berusia 53 tahun kebawah dan dianggap sebagai karyawan yang memiliki kinerja yang stagnan atau relatif rendah. Pada tahun 2009, 1.209 karyawan terdaftar dalam program ini. Jumlah pesangon untuk program pensiun reguler dan sukarela BNI berjumlah sebesar Rp474 miliar pada tahun 2009. BNI berencana untuk melanjutkan program pensiun ini pada tahun 2011.

Serikat Pekerja

Serikat Pekerja di BNI terdiri dari :

Serikat Pekerja PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("SP BNI") yang telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.KEP.05/M/BW/2000 tanggal 3 Januari 2000, dan bukti pencatatan No.62/I/P/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001 telah terbentuk pada tingkat unit/cabang (DPU/DPC), tingkat daerah (DPD) dan tingkat pusat (DPP). Mayoritas karyawan BNI menjadi anggota SP BNI.

Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") telah didaftarkan pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP/112/PHIJSK/PKKAD/2008 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara BNI dengan Serikat Pekerja BNI, tanggal 17 November 2008. Berdasarkan Notulen Rapat Perundingan tanggal 21 September 2010, PKB yang berakhir pada tanggal 4 Juli 2010 tersebut diperpanjang masa berlakunya selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan 4 Juli 2011.

Semua karyawan domestik BNI telah menjadi anggota serikat karyawan BNI. BNI memiliki perjanjian kerja bersama yang didatangi oleh BNI dan serikat karyawan BNI pada tahun 2001, dimana peninjauan terhadap perjanjian tersebut dilakukan setiap dua tahun, BNI sangat memperhatikan hubungan dengan karyawan BNI dan serikat karyawan BNI. Hingga saat ini, BNI tidak pernah mengalami aksi pemogokan kerja karyawan.

Pelatihan dan Pengembangan

Pada tahun 2008, BNI mendirikan Divisi Pelatihan dan Pengembangan yang berfokus pada pelatihan dan pengembangan karyawan BNI. Dalam rangka mendukung transformasi, BNI memberikan pelatihan bagi 100 calon manajemen senior dan telah mendaftarkan 40 calon tersebut dalam Program Pengembangan Kepemimpinan untuk Manajemen Senior BNI yang diharapkan akan dapat mengembangkan manajemen BNI pada masa yang akan datang. Selain itu, BNI juga telah mengidentifikasi 1.000 calon manajemen level menengah yang rencananya akan dilatih dan dikembangkan melalui program yang sama. Dengan pembentukan Divisi Pelatihan dan Pengembangan serta adanya program-program pelatihan baru, BNI memperkirakan biaya pelatihan dan pengembangan akan meningkat dalam jumlah signifikan dalam jangka waktu dekat. BNI juga telah mengembangkan fasilitas *e-learning* untuk memenuhi kebutuhan karyawan BNI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada tanggal 30 September 2010, karyawan BNI telah dapat mengakses lebih dari 36 program melalui fasilitas ini.

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan biaya pendidikan dan pelatihan karyawan BNI untuk periode-periode di bawah ini:

(dalam miliaran Rupiah, kecuali untuk kenaikan biaya disajikan dalam persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember									Periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
	2005	Δ	2006	Δ	2007	Δ	2008	Δ	2009	2010
Biaya pendidikan dan pelatihan	103	45,0%	149	4,7%	156	0,6%	155	3,2%	150	117

*)Tidak termasuk Anak Perusahaan

Koperasi Karyawan BNI

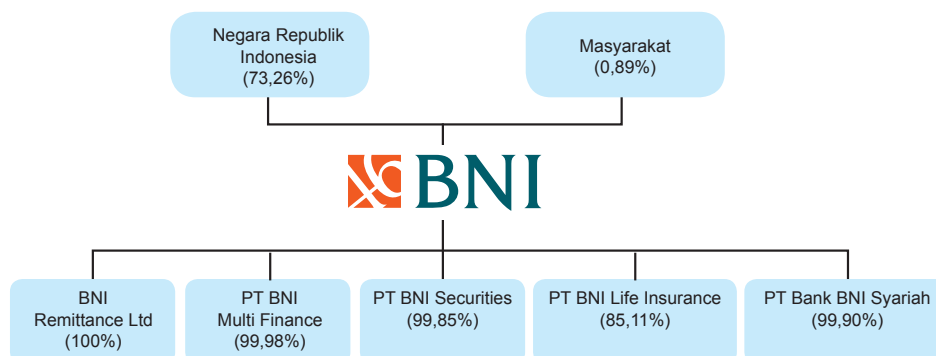
BNI memiliki koperasi karyawan yang bernama Koperasi Pegawai Swadharma Jakarta dengan singkatan “Koperasi Swadharma” yang didirikan sejak bulan 30 Juli 1968. Anggaran Dasar Koperasi Swadharma mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan Rapat Anggota tanggal 12 Mei 2005.

Adapun jenis aktivitas/usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi Swadharma antara lain berupa:

- pengusahaan / pembuatan / penyaluran barang kebutuhan para anggota;
- usaha simpan pinjam;
- penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lainnya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- usaha-usaha lainnya di bidang industri, perdagangan, percetakan, perumahan/pertanahan, kontraktor, perbengkelan, poliklinik, apotik, pengangkutan untuk anggota, jasa travel, biro, telekomunikasi (wartel), *laundry*, persewaan, benda-benda pos, *optical* dan perawatan gedung.

6. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan BNI dengan Anak Perusahaan

Diagram Hubungan Kepemilikan BNI Dengan Anak Perusahaan(>50%) pada tanggal diterbitkannya Prospektus Ini



Hubungan Pengurusan dan Pengawasan BNI Dengan Anak Perusahaan (>50%) pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini

Nama	BNI	BNI Remittance Ltd.	BNI Multi Finance	BNI Securities	BNI Life Insurance	BNI Syariah
Dewan Komisaris						
Peter Benyamin Stok	Komisaris Utama/Komisaris Independen	-	-	-	-	-
Tirta Hidayat	Wakil Komisaris Utama	-	-	-	-	-
Ekoputro Adijayanto	Komisaris	-	-	-	-	-
Bagus Rumbogo	Komisaris	-	-	-	-	-
Fero Poerbonegoro	Komisaris Independen	-	-	-	-	-
Achil Ridwan Djayadiningrat	Komisaris Independen	-	-	-	-	-
Bangun Sarwito Kusmuljono	Komisaris Independen	-	-	-	-	-
Direksi						
Gatot Mudiantoro Suwondo	Direktur Utama	-	-	-	-	-
Felia Salim	Wakil Direktur Utama	-	-	-	-	-
Suwoko Singoastro	Direktur	-	-	-	-	-
Krishna Suparto	Direktur	-	-	-	-	-
Adi Setianto	Direktur	-	-	-	-	-
Yap Tjay Soen	Direktur	-	-	-	-	-
Darmadi Sutanto	Direktur	-	-	-	-	-
Honggo Widjojo Kangmasto	Direktur	-	-	-	-	-
Sutanto	Direktur	-	-	-	-	-
Ahdi Jumhari Luddin	Direktur Kepatuhan	-	-	-	-	-

Keterangan : memiliki hubungan afiliasi dengan anak perusahaan lainnya

7. Aset Tetap

Aset-aset BNI hampir seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan operasional BNI.

Kantor Pusat BNI terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta 10220. BNI menggunakan lebih dari 732.836 meter persegi ruangan kantor untuk kegiatan usahanya di Indonesia dan 4.512 meter persegi ruangan kantor untuk kegiatan usaha di luar negeri BNI. BNI memiliki lebih dari 373.453 meter persegi ruangan kantor, termasuk 329.271 meter persegi yang digunakan untuk kantor-kantor cabang dalam negeri BNI dan pusat perbankan lainnya, 42.924 meter persegi yang digunakan untuk fungsi Kantor Pusat dan 1.258 meter persegi yang digunakan sebagai kantor cabang Hong Kong. Nilai buku bersih dari aset tetap (tanah dan bangunan) yang dimiliki BNI per 30 September 2010 adalah Rp3.064 miliar. BNI menyewa sisa dari luas bangunan yang ditempati seluas lebih dari 359.383 meter persegi. BNI juga menyewa Kantor Pusatnya di Jalan Jendral Sudirman Kav. 1 seluas 40.921 meter persegi dan sebuah Kantor Cabang dari PT Swadharma Griyasatya, sebuah perusahaan afiliasi. BNI menyewa pula ruang kantor dengan luas sekitar 8.601,8 meter persegi dari PT Swadharma Primautama, serta seluas 4.298 meter persegi dari PT Landmark.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa merek sebagai berikut:

No.	Nama Merek	Nomor Registrasi Merek	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek
1.	"BNI 46".	IDM000066355	36	23 Juli 2004	Selama 10 Tahun sejak tanggal penerimaan 23 Juli 2004
2.	"BNI 46".	IDM000066354	36	23 Juli 2004	Selama 10 Tahun sejak tanggal penerimaan 23 Juli 2004
3.	"BNI 46"	IDM000066353	36	23 Juli 2004	Selama 10 Tahun sejak tanggal penerimaan 23 Juli 2004
4.	"BNI 46"	IDM000066411	36	23 Juli 2004	Selama 10 Tahun sejak tanggal penerimaan 23 Juli 2004
5.	"Tapenas BNI"	IDM000066511	36	27 Juli 2004	Selama 10 Tahun sejak tanggal penerimaan 27 Juli 2004
6.	Dollar BNI	IDM000066512	36	27 Juli 2004	Selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan 27 Juli 2004
7.	Rejeki Durian Runtuh BNI Taplus	IDM000182844	36	3 Mei 2007	Selama 10 Tahun sejak tanggal penerimaan 3 Mei 2007
8.	Rejeki Durian Runtuh BNI Taplus	IDM000182843	36	3 Mei 2007	Selama 10 Tahun sejak tanggal penerimaan 3 Mei 2007

8. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan yang Signifikan dan Penyertaan BNI

Anak Perusahaan BNI didirikan dengan tujuan membuka peluang bagi BNI untuk menawarkan layanan keuangan satu pintu (*one stop financial services*), baik dalam bentuk produk keuangan perbankan maupun non-perbankan. Melalui kerja sama dan sinergi antar masing-masing perusahaan anak maupun dengan BNI sebagai induk perusahaan, dapat dicapai kontribusi optimal bagi para pemangku kepentingan.

Per 30 September 2010, BNI mempunyai Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, yang terdiri dari 1 Bank komersial dan 4 perusahaan jasa keuangan. Perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh BNI, jenis usahanya serta kepemilikan BNI per tanggal 30 September 2010 adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan
BNI Remittance Ltd	<i>Remittance</i> antara Hong Kong dan Indonesia	1996	100,00%
PT BNI Multi Finance	Pembiayaan	1983	99,98%
PT BNI Securities	<i>Fund Management</i> dan Sekuritas	1995	99,85%
PT BNI Life Insurance	Asuransi Jiwa	1997	85,11%
PT Bank BNI Syariah	Perbankan Syariah Komersil	2010	99,90%

Menurut peraturan BI, perbankan di Indonesia tidak diizinkan menyalurkan dana (baik dengan cara *equity participation* maupun *debt financing*) kepada perusahaan afiliasi lebih dari 10% jumlah modal yang dimiliki.

Keterangan Mengenai Anak Perusahaan yang Dimiliki Langsung (kepemilikan di atas 50%)

A. PT BNI Multi Finance ("BMF")

Riwayat Singkat

PT BNI Multi Finance (selanjutnya disebut "BMF"), merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. BMF didirikan dengan nama PT BNI-Amex Leasing (PT BAL) pada bulan April 1983 berdasarkan Akta No. 21, tanggal 8 April 1983, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH, sebagai pengganti Kartini Mulyadi, SH, Notaris di Jakarta dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 11 Juni 1983 berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4406.HT.01.01.Th.83, tanggal 11 Juni 1983. Selanjutnya nama PT BAL diubah lagi menjadi PT Swadharma Multi Finance dan terakhir telah diubah namanya menjadi BMF pada Agustus 1994.

Anggaran Dasar BMF telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar BMF adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham BMF No.13, tanggal 10 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-10032, tanggal 26 April 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0031296.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 26 April 2010.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BMF, kegiatan usaha utama BMF adalah bergerak dalam bidang pembiayaan. Kegiatan usaha BMF antara lain menjalankan usaha pembiayaan secara sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Jenis risiko utama yang dihadapi oleh BMF adalah timbulnya kredit bermasalah yang timbul akibat ketidakmampuan konsumen untuk memenuhi kewajibannya.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham BMF No. 16, tanggal 23 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Emira Khalidasari, SH, M.Kn, sebagai pengganti Ariani Lakhsmijati Rachim, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BMF adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	500.000.000	25.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	408.279.707	20.413.985.350	99,98
Koperasi Karyawan PT BNI Multi Finance	77.671	3.883.550	0,02
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	408.357.378	20.417.868.900	100,00
C. Saham Dalam Portepel	91.642.622	4.582.131.100	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Anggaran Dasar, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BMF terkini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Diding Fathuddin
 Komisaris : Fuady Thaher

Direksi

Presiden Direktur : Prabowo
 Direktur : Sayuti Melik
 Direktur : Gaguk Fauzi Santosa

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting BMF pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta pada tanggal 30 September 2010 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang diambil dari laporan keuangan BMF untuk periode-periode tersebut.

Laporan keuangan BMF pada tanggal 31 Desember 2007 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, pada tanggal 31 Juli dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan pada tanggal 31 Desember 2008 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan BMF pada tanggal 31 Desember 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal September 30, 2010 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Neraca

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 31 Desember			Pada tanggal
	2007	2008	2009	30 September
Aset Lancar	23	35	172	168
Aset Tidak Lancar	7	6	20	22
Aset Lain-Lain	384	160	3	4
Jumlah Aset	415	202	195	195
Kewajiban Lancar	-	-	13	6
Kewajiban Tidak Lancar	82	172	148	160
Jumlah Kewajiban	82	172	161	166
Jumlah Ekuitas	332	29	34	29
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	415	202	195	195

Laporan Laba Rugi

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007	Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2008	Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009	Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010
Pendapatan Usaha	44	21	41	88	38
Beban Usaha	65	316	38	80	52
Laba/(Rugi) Usaha	(20)	(295)	3	8	(14)
Laba/(Rugi) Bersih	(19)	(294)	7	5	(6)

B. PT BNI Securities ("BS")

Riwayat Singkat

PT BNI Securities (selanjutnya disebut "BS"), merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta No. 22, tanggal 12 April 1995, sebagaimana diubah dengan Akta No. 39, tanggal 3 Mei 1995 yang keduanya dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH, Notaris di Jakarta dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 19 Mei 1995 berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6278.HT.01.01.Th.95, tanggal 19 Mei 1995.

Anggaran Dasar BS telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar BS adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham BS No. 30, tanggal 8 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-62669.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 15 September 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084170.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 15 September 2008.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BS, kegiatan usaha utama BS yaitu menjalankan usaha selaku perusahaan efek yang meliputi usaha yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal. Jenis risiko utama BS yang dihadapi antara lain risiko pasar yang berhubungan dengan posisi yang diambil pada portofolio investasinya dan rendahnya Modal Kerja Bersih Yang Disesuaikan (MKBD).

Struktur Permodalan dan Pemegang saham

Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham BS No. 30, tanggal 8 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BS, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	99.850.000	99.850.000.000	99,85
Koperasi Karyawan PT BNI Securities	150.000	150.000.000	0,15
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000.000	100.000.000.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	100.000.000	100.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Anggaran Dasar, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BS terkini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Hindarmojo Hinuri Kartoatmodjo
Komisaris	: Dwijati Tjahjaningsih
Komisaris Independen	: Finaldy Syamsul K Haznam
Komisaris Independen	: Sutirta Budiman

Direksi

Presiden Direktur	: Jimmy Nyo
Direktur	: Idhamshah Runizam

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting BS pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta pada tanggal 30 September 2010 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang diambil dari laporan keuangan BS untuk periode-periode tersebut.

Laporan keuangan BS pada tanggal 31 Desember 2007 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan BS pada tanggal 31 Desember 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan BS pada tanggal 31 Desember 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal 30 September 2010 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Neraca

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 31 Desember			Pada tanggal
	2007	2008	2009	30 September
Aset Lancar	950	520	495	1.488
Aset Tidak Lancar	58	231	102	86
Aset Lain-Lain	5	32	390	6
Jumlah Aset	1.013	783	988	1.580
Kewajiban Lancar	352	239	279	995
Kewajiban Tidak Lancar	330	288	447	322
Jumlah Kewajiban	682	527	728	1.316
Jumlah Ekuitas	332	256	260	264
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	1.013	783	988	1.580

Laporan Laba Rugi

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan Usaha	138	25	150	107
Beban Usaha	110	123	166	101
Laba/(Rugi) Usaha	28	(98)	(16)	6
Laba/(Rugi) Bersih	27	(75)	(1)	7

C. PT BNI Life Insurance ("BLI")

Riwayat Singkat

PT BNI Life Insurance (selanjutnya disebut "BLI"), merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat. BLI didirikan dengan nama PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya pada bulan November 1996 berdasarkan Akta No. 24, tanggal 28 November 1996, yang dibuat dihadapan Laura Elisabeth Palingan, SH, sebagai pengganti Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH, Notaris di Jakarta dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 14 Maret 1997 berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-1787 HT.01.01.Th 97, tanggal 14 Maret 1997. Selanjutnya nama PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya diubah menjadi PT BNI Life Insurance pada Juli 2007.

Anggaran Dasar BLI telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar BLI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No. 3, tanggal 6 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-07779.AH.01.02, tanggal 16 Maret 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009295.AH.01.09 Tahun 2009, tanggal 16 Maret 2009.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BLI, kegiatan usaha utama BLI meliputi usaha yang berkaitan dengan kegiatan jasa asuransi jiwa, termasuk usaha asuransi jiwa dengan prinsip syariah. Jenis risiko utama BNI life memiliki yang dihadapi yaitu risiko klaim asuransi dalam jumlah yang besar sehingga mengurangi pendapatan BLI.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No. 3, tanggal 6 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan pemegang saham BLI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	400.000.000	400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	87.436.000	87.436.000.000	85,11
Yayasan Danar Dana Swadharma	8.696.500	8.696.500.000	8,46
Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Negara Indonesia	6.103.500	6.103.500.000	5,94
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Jiwasraya	500.000	500.000.000	0,49
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	102.736.000	102.736.000.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	297.264.000	297.264.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Anggaran Dasar, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BLI terkini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Djarot Ramelan Suseno
 Komisaris Independen : A.Junaedy Ganie

Direksi

Direktur Utama : Lilies Handayani
 Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : Sudirman
 Direktur Teknik dan Operasional : Azwir Arifin

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting BLI pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta pada tanggal 30 September 2010 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang diambil dari laporan keuangan BLI untuk periode-periode tersebut.

Laporan keuangan BLI pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang, sebelum dilakukan penyajian kembali laporan keuangan oleh BLI sehubungan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 108, "Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah" ("PSAK 108"), yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2010 dan berlaku retrospektif, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan BLI pada tanggal 31 Desember 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pada tanggal September 30, 2010 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Neraca

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember		30 September	
	2007*)	2008*)	2009*)	2010
Jumlah Aset	934	1.117	1.586	2.122
Jumlah Kewajiban	846	964	1.376	1.892
Jumlah Dana Peserta	1	1	2	6
Jumlah Ekuitas	87	152	208	224
Jumlah Kewajiban dana Peserta dan Ekuitas	934	1.117	1.586	2.122

*) Disajikan kembali

Laporan Laba Rugi

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember			Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
	2007*)	2008*)	2009*)	2010
Jumlah Pendapatan	763	804	1.185	1.200
Jumlah Beban	752	784	1.164	1.193
Laba sebelum Manfaat (Beban)				
Pajak Tangguhan	11	20	20	7
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	0	3	(1)	2
Laba Bersih	11	23	20	9

*) Disajikan kembali

D. BNI Remittance Ltd.

Riwayat Singkat

BNI Remittance Ltd (dahulu BNI-Nakertrans Limited). (selanjutnya disebut “BNI Remittance”), merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Hong Kong, berkedudukan di Hong Kong. BNI Remittance didirikan di Hong Kong pada tanggal 19 November 1996. Dari segi aktivitas bisnis, aktivitas bisnis BNI Remittance merupakan bisnis yang dilakukan oleh BNI kantor cabang Hong Kong dibawah BU Internasional. Antara BNI Remittance dengan BNI kantor cabang Hong Kong tidak bisa dipisahkan mengingat semua transaksi yang ada harus dilakukan di BNI kantor cabang Hong Kong, dengan demikian hasil yang diterima pun masuk ke kantor cabang Hong Kong. Selanjutnya setiap akhir tahun dilakukan pembagian keuntungan antara BNI kantor cabang Hong Kong dan BNI Remittance. Di sisi lain, secara institusi BNI Remittance merupakan salah satu Anak Perusahaan yang pengelolaannya berada dibawah Unit Pengembangan Perusahaan Anak.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama BNI Remittance meliputi usaha di bidang jasa pengiriman dan penukaran uang (remittance and money changes) di Hong Kong. Jenis risiko utama BNI Remittance Ltd. yang dihadapi yaitu risiko pasar karena kegiatan *remittance* yang dilakukannya.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham BNI Remittance Ltd. sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal HK\$ 1,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (HK\$)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	7.444.944	7.444.944	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	7.444.944	7.444.944	100,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.444.944	7.444.944	100,00
C. Saham Dalam Portepel	0	0	

Pengurusan

Susunan Direksi BNI Remittance adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Yunisyaf Yunizai Arif

Direktur : Agus Prasetyo

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting BNI Remittance Ltd. pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta pada tanggal 30 September 2010 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang diambil dari laporan keuangan BNI Remittance Ltd. untuk tahun-tahun dan periode tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit.

Neraca

(dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Pada tanggal 31 Desember (tidak diaudit)			Pada tanggal 30 September (tidak diaudit)
	2007* (HKD)	2008* (HKD)	2009 (miliar Rp)	2010 (miliar Rp)
Aset Lancar	180.638,89	433.005,88	9	3
Aset Tidak Lancar	3.142,50	79.377,78	-	1
Aset Lain-Lain	-	-	1	2
Jumlah Aset	183.781,39	512.383,66	10	6
Kewajiban Lancar	64.341,10	41.384,27	-	-
Kewajiban Tidak Lancar	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban	64.341,10	41.384,27	-	-
Jumlah Ekuitas	119.440,29	470.999,39	10	6
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	183.781,39	512.383,66	10	6

Catatan: *Pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2008, BNI Remittance belum dikonsolidasi oleh BNI

Laporan Laba Rugi

(dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (tidak diaudit)			Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September (tidak diaudit)
	2007* (HKD)	2008* (HKD)	2009 (miliar Rp)	2010 (miliar Rp)
Pendapatan Usaha	986.800,00	1.505.610,00	3	2
Beban Usaha	536.096,00	1.315.67,8	2	4
Laba/(Rugi) Usaha	138.683,58	189.939,92	0,4	(2)
Laba/(Rugi) Bersih	137.212,58	189.939,92	0,4	(2)

Catatan: *Pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2008, BNI Remittance belum dikonsolidasi oleh BNI

E. PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah")

Riwayat Singkat

PT Bank BNI Syariah (selanjutnya disebut "BNI Syariah"), merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas BNIS (yang Merupakan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan) No. 160, tanggal 22 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 25 Maret 2010 berdasarkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 25 Maret 2010 ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian BNIS tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0022866.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 25 Maret 2010.

Anggaran Dasar BNI Syariah telah mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar BNIS No. 226, tanggal 29 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 226/2010"), yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BNI Syariah No. AHU-AH.01.10-20148, tanggal 6 Agustus 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0059173.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 6 Agustus 2010.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama BNI Syariah yaitu menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian struktur permodalan dan pemegang saham BNI Syariah, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	4.004.000	4.004.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	1.000.000	1.000.000.000.000	99,90
PT BNI Life Insurance	1.000	1.000.000.000	0,10
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.001.000	1.001.000.000.000	100
C. Saham Dalam Portepel	3.003.000	3.003.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Anggaran Dasar, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BNI Syariah terkini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Achjar Iljas
 Komisaris Independen : Sofyan Syafri Harahap
 Komisaris Independen : Acep Riana Jayaprawira

Direksi

Direktur Utama : Rizqullah
 Direktur : Bambang Widjanarko
 Direktur Kepatuhan : Imam Teguh Saptono

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting BNI Syariah pada tanggal 30 September 2010 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang diambil dari laporan keuangan BNI Syariah untuk periode tersebut.

Laporan keuangan BNI Syariah pada tanggal 30 September 2010 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Neraca

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 September 2010
Aset Lancar	5.982
Aset Tidak Lancar	21
Aset Lain-Lain	85
Jumlah Aset	6.088
Kewajiban Lancar	4.950
Kewajiban Tidak Lancar	106
Jumlah Kewajiban	5.056
Jumlah Ekuitas	1.032
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	6.088

Laporan Laba Rugi

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010
Pendapatan Usaha	146
Beban Usaha	166
Laba/(Rugi) Usaha	(20)
Laba/(Rugi) Bersih	(20)

9. Transaksi dan Saldo BNI dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

Jenis transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti yang diatur dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa", telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini.

Transaksi antara Grup dengan Pemerintah Indonesia termasuk setiap entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah dan antara BNI dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh BNI dari hasil *debt to equity swaps*, tidak diungkapkan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pegawai-pegawai Grup, kecuali anggota manajemen kunci, tidak dikelompokkan sebagai pihak terkait.

Saldo dan transaksi antara BNI dan anak perusahaannya dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 30 September 2010 adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 September 2010
ASET	
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	
Mitrayasa Sarana Informasi	320
Koperasi Swadharma	74
PT Finansia Multifinance	73
PT Asuransi Tripakarta	0,27
PT Swadharma Duta Data	0,25
PT Swadharma Sarana Informatika	0,10
Lain-lain	15
Jumlah	483
KEWAJIBAN	
Simpanan Nasabah	
PT Asuransi Tripakarta	34
PT Citanduy Perkasa	6
PT Swadharma Kerysatya Shangri-la Hotel	5
Koperasi Swadharma	5
PT Swadharma Sarana Informatika	3
Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI	1
PT Swadharma Duta Data	0,24
PT Swadharma Propertindo	0,15
Yayasan Danar Dana Swadharma	0,01
Lain-lain	0,02
Jumlah	55
KOMITMEN DAN KONTINJENSI	
Garansi bank yang diterbitkan	
PT Swadharma Kerry Saty	0,60
PT Swadharma Sarana Informatika	0,51
PT BNI Life Insurance	0,43
PT Asuransi Tri Pakarta	0,27
PT Swadharma Travelindo	0,10
PT Swadharma Surya Finance	0,06
PT Swadharma Propertindo	0,04
PT Swadharma Eragrafindo	0,04
Jumlah	2
Surat garansi atas pelaksanaan jasa layanan perbankan PT BNI (Persero) Tbk kepada Departemen Keuangan	2
Surat garansi standby L/C untuk menjamin ketersediaan collateral Divisi Bisnis Kartu atas transaksi atas transaksi Credit Card Visa dan Master	70
Surat garansi atas pelaksanaan proyek pengembangan sistem otomasi gateway dan e-payment dengan teknologi smart card Divisi Dana dan Jasa Konsumen kepada Taman Impian Jaya Ancol	2
Irrevocable letters of credit	
PT Swadharma Eragrafindo	994

10. Transaksi dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa lainnya

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan mengikat beberapa perjanjian dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, antara lain sebagai berikut:

1. BNI Syariah

- (a) **Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan BNI Syariah tentang Pendampingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Operasional Perbankan No. DIR/043, No. DIR/208, tanggal 11 Agustus 2010 (“Perjanjian Kerjasama”).**

Para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pemberian jasa pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan operasional perbankan, yang meliputi pemberian pendampingan teknis oleh Perseroan kepada BNI Syariah dalam rangka mewujudkan BNI Syariah yang mandiri dengan rincian ruang lingkup area/produk dan uraian aktivitas kerjasama sebagaimana diatur dalam *Service Level Agreement* yang merupakan lampiran dari Perjanjian Kerjasama ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. Jangka waktu perjanjian adalah 19 Juni 2010 sampai dengan 18 Juni 2012. Biaya untuk keseluruhan pendampingan teknis yang wajib dibayar oleh BNI Syariah kepada Perseroan adalah sebesar Rp21 miliar, untuk setiap tahunnya, yang dibayarkan setiap 6 bulan selambat-lambatnya pada setiap tanggal 25 bulan keenam setiap periode pembayaran. Perjanjian ini ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Perselisihan yang terjadi akan diselesaikan secara musyawarah, namun apabila perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perjanjian ini meliputi kerjasama antara BNI Syariah dengan Perseroan yaitu sebagai berikut:

- (i) Operasional;
- (ii) Management Office;
- (iii) Bisnis Kartu;
- (iv) Dana dan Jasa Konsumen;
- (v) Hukum;
- (vi) Kepatuhan;
- (vii) Teknologi;
- (viii) Pendidikan dan Pelatihan;
- (ix) Komunikasi Perusahaan;
- (x) Risiko Kredit;
- (xi) Pengendalian Keuangan;
- (xii) Perencanaan Strategis;
- (xiii) Pengawasan Intern;
- (xiv) Transaksional Banking Services;
- (xv) International;
- (xvi) Manajemen Risiko;
- (xvii) Jaringan dan Layanan;
- (xviii) Sumber Daya Manusia; dan
- (xix) Umum.

2. BLI

- (a) **Perjanjian Kerjasama antara Perseroan (Divisi Usaha Kecil) dengan BLI tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan No. USK/005/2006, No. 030.BL.DIR.09.06, tanggal 14 September 2006**

Berdasarkan perjanjian ini, untuk lebih menjamin pengembalian kredit yang diberikan kepada debiturnya, Perseroan bermaksud menutup asuransi jiwa bagi debiturnya pada BLI. Perseroan menunjuk BLI untuk menutup asuransi atas debitur melalui Sentra Kredit Kecil dan kantor cabang *stand alone* Perseroan di seluruh Indonesia. Saat mulai berlaku pertanggungannya yaitu sejak dimulai kredit dan premi telah dibayar lunas dan kepesertaan asuransi akan berakhir apabila peserta meninggal dunia atau cacat tetap total atau kredit telah dilunasi. Ketentuan *underwriting* antara lain ditentukan dengan klasifikasi (i) tanpa Surat Pernyataan Debitur (“SPD”); (ii) dengan SPD; dan (iii) dengan SPD dan pemeriksaan medis. Jangka waktu perjanjian ini adalah 14 September 2006 sampai dengan 14 September 2011 dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

(b) Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan BLI No. USK/1/001, No. 004.PKS.BL.DIR.0307, tanggal 6 Maret 2007, tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa Kredit BNI Wirausaha

Berdasarkan perjanjian ini, untuk menjamin pengembalian kredit yang dipinjamkan kepada debiturnya, Perseroan bermaksud untuk menutup asuransi jiwa bagi debiturnya pada BLI. Perseroan menunjuk BLI untuk menutup asuransi atas debitur melalui Sentra Kredit Kecil dan kantor cabang *stand alone* Perseroan di seluruh Indonesia. Saat mulai berlaku pertanggungungan yaitu sejak dimulai kredit dan premi telah dibayar lunas dan kepesertaan asuransi berakhir apabila peserta meninggal dunia atau cacat tetap total. Ketentuan *underwriting* antara lain ditentukan dengan klasifikasi (i) tanpa Surat Pernyataan Debitur (“SPD”); (ii) dengan SPD; dan (iii) dengan SPD dan pemeriksaan medis. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 November 2006 sampai dengan 1 November 2012 dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

(c) Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan BLI No. PIB-MPD/12/VIII/2007, No. 025.PKS.BL.DIR.0807, tanggal 22 Agustus 2007, tentang Pemasaran Asuransi dengan Sistem *Channel Management*, sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Pemasaran Asuransi dengan Sistem *Channel Management*, No. WEM-KBN/03/III/2010, No. 098.PKS.BL.DIR.0310, tanggal 11 Maret 2010

Berdasarkan perjanjian ini, salah satu kegiatan usaha Perseroan adalah memberikan layanan jasa kepada nasabahnya dalam hal pertanggungungan (*Bancassurance*), untuk itu Perseroan bekerjasama dengan BLI yang dapat menyediakan produk dan memberikan layanan jasa asuransi sesuai dengan kebutuhan nasabah Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan sepakat untuk menyediakan sarana dan fasilitas kepada BLI untuk memasarkan produk-produk asuransi jiwa BLI, dimana *fee* yang didapatkan oleh Perseroan bergantung kepada jenis produk asuransi yang terjual. Tujuan dari perjanjian ini adalah sebagai landasan kerjasama antara para pihak dalam memberikan layanan solusi keagenan bagi nasabah melalui produk asuransi dengan system *channel management*. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan para pihak.

(d) Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan BLI No. DIR/042A, No. 007.BJ.DIR.1103, tanggal 5 November 2003 tentang Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Melalui Bank (*Bancassurance*)

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud menyediakan tenaga pemasaran yang telah memperoleh pelatihan dalam bidang asuransi jiwa untuk memberi nasihat keuangan kepada nasabah individual BLI (*financial advisory*). Perseroan juga sepakat untuk memasarkan produk asuransi milik BLI melalui fasilitas yang dimiliki oleh Perseroan. Besarnya komisi yang akan diterima Perseroan berdasarkan kepada produk asuransi yang terjual dan kesepakatan kedua belah Pihak. Perjanjian ini berlaku sejak 5 November 2003 dan dapat diakhiri sesuai dengan kesepakatan para pihak.

(e) Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan BLI No. DJK/9/152/R, No. 530.PKS.BL.DIR.1109, tanggal 2 November 2009, tentang Pengelolaan Pertanggungungan Untuk Nasabah BNI Tapenas

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak bermaksud untuk bekerjasama dalam pengelolaan pertanggungungan yang diperuntukan bagi nasabah BNI Tapenas (tertanggung). Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah kerjasama diantara para pihak dalam menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan pertanggungungan dalam rangka memberikan keuntungan dan pembagian risiko bagi nasabah selaku tertanggung atau penerima manfaat, serta untuk meningkatkan *brand image* para pihak kepada masyarakat. Besarnya nilai pertanggungungan bergantung pada program asuransi yang dipilih tertanggung yang berlaku efektif sejak dan selama tertanggung menjadi nasabah. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan 30 September 2012 dan dapat diperpanjang kembali.

(f) Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan BLI No. DJK/9/140/R, No. 033.PKS.BL.DIR.1207, tanggal 11 Desember 2007, tentang Pembayaran Premi Asuransi Melalui Fasilitas Elektronik BNI

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bersedia untuk menyediakan jasa fasilitas layanan perbankan elektronik seperti fasilitas ATM, *PhonePlus*, *SMS Banking*, *Internet Banking* untuk penerimaan pembayaran premi asuransi BLI dari nasabah Perseroan. Sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran, biaya administrasi yang dibebankan oleh Perseroan kepada BLI untuk setiap transaksi Pembayaran Berhasil melalui fasilitas perbankan Perseroan sebesar Rp2.500 nett per transaksi. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 11 Desember 2007 dan akan tetap berlaku sepanjang tidak diakhiri oleh Para Pihak.

- (g) **Perjanjian Kerjasama Pemasaran Asuransi melalui Telemarketing antara Perseroan dengan BLI No. WEM-KBN/07/IV/2009, No. 0172.PKS.BL.DIR.0409, tanggal 22 April 2009**

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak melaksanakan kerjasama pemasaran asuransi melalui Perjanjian Pemasaran (*Distribution Agreement*) kepada para nasabah Perseroan dengan menggunakan cara Telemarketing. Jumlah tunjangan ditentukan berdasarkan pada jenis asuransi yang dipilih oleh tertanggung. BLI wajib membayar *fee* kepada Perseroan sebesar 20% (net) dari pendapatan premi untuk produk Blife MedPlus, Blife Aman dan Blife Medika Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 April 2009 sampai dengan 31 Maret 2012.

- (h) **Perjanjian Kerjasama antara Perseroan, BLI dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Negara Indonesia No. SDM/1/281, No. 182.PKS.BL.DIR.0610, No. YKP/1/IGR/091A/R, tanggal 9 Juni 2010, tentang Penutupan Asuransi Kesehatan dan Asuransi Kecelakaan Diri Plus Serta Program Administrasi Kesehatan Rawat Jalan**

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak bekerjasama dalam bentuk pelaksanaan penutupan asuransi kesehatan untuk peserta/tertanggung (Direksi, Komisaris, pegawai Perseroan) dalam rangka mengalihkan risiko pengelolaan pertanggungans asuransi dari Perseroan kepada BLI. Apabila pada akhir tahun periode polis asuransi kesehatan terdapat keuntungan yang diperoleh BLI (jika ada), maka BLI memberikan sebagian keuntungan tersebut kepada Perseroan dengan perhitungan sekurang-kurangnya: pembagian keuntungan = $(0,75 \text{ premi} - \text{klaim}) \times 50\%$. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2011.

- (j) **Addendum Perjanjian Pengelolaan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan antara Perseroan dengan BLI, No. ADD.I.DIR/0011-056.SK/BJ.0897, tanggal 1 Februari 2006.**

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak bekerjasama dalam bentuk pelaksanaan penutupan asuransi jiwa untuk peserta/tertanggung dalam rangka mengalihkan risiko pengelolaan pertanggungans asuransi dari Perseroan kepada BLI. Jumlah tunjangan ditentukan berdasarkan pada jenis asuransi yang dipilih oleh tertanggung. Perjanjian ini berlangsung sejak tanggal 1 Februari 2006 sampai dengan 1 Februari 2011.

- (k) **Perjanjian Kerjasama Pemberian Asuransi Jiwa antara Perseroan dengan BLI, No.PKS.003. BJMKT.0801, tanggal 13 Agustus 2001.**

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak bekerjasama dalam bentuk pelaksanaan penutupan asuransi jiwa untuk peserta/tertanggung melalui *outlet* dalam rangka mengalihkan risiko pengelolaan pertanggungans asuransi dari Perseroan kepada BLI. Jumlah tunjangan ditentukan berdasarkan pada jenis asuransi yang dipilih oleh tertanggung. Perjanjian ini berlangsung sejak tanggal 13 Agustus 2001 sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

- (l) **Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa Kredit BNI Wirausaha, No. USK/1/001, No. 004.PKS.BL.DIR.0307, tanggal 6 Maret 2007.**

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak bekerjasama dalam bentuk pelaksanaan penutupan asuransi jiwa untuk peserta/tertanggung melalui Sentra Kredit Kecil (SKC), Field Office (FO) dan Kantor Cabang Stand Alone dalam rangka mengalihkan risiko pengelolaan pertanggungans asuransi dari Perseroan kepada BLI. Jumlah tunjangan ditentukan berdasarkan pada jenis asuransi yang dipilih oleh tertanggung. Perjanjian ini berlangsung sejak tanggal 6 Maret 2007 sampai dengan 1 November 2011.

- (m) **Perjanjian Kerjasama tentang Pemasaran Asuransi Jiwa, No.PIB-MPD/10.VII/2007, No. 018.PKS. BL.DIR.0707, tanggal 20 Oktober 2010.**

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak bekerjasama melakukan pemasaran dan memperbanyak jalur distribusi asuransi jiwa untuk peserta/tertanggung melalui dalam rangka mengalihkan risiko pengelolaan pertanggungans asuransi dari Perseroan kepada BLI. Jumlah tunjangan ditentukan berdasarkan pada jenis asuransi yang dipilih oleh tertanggung. Perjanjian ini berlangsung sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan 20 Oktober 2012.

- (n) **Perjanjian Kerjasama tentang Pemasaran Asuransi Jiwa Melalui Bank, No.DIR/0424, No. 007. BJ.DIR.1103, tanggal 5 November 2003.**

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak bekerjasama melakukan pemasaran asuransi jiwa dalam rangka mengalihkan risiko pengelolaan pertanggung jawaban asuransi dari Perseroan kepada BLI. Jumlah tunjangan ditentukan berdasarkan pada jenis asuransi yang dipilih oleh tertanggung. Perjanjian ini berlangsung sejak tanggal 5 November 2003 yang masa berakhir jangka waktunya tidak ditentukan oleh para pihak.

- (o) **Perjanjian Pengelolaan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan, No.DIR/0011, No.056.SK/BJ 0897, tanggal 7 Agustus 1997.**

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak bekerjasama melakukan pengelolaan asuransi jiwa kredit kumpulan benefit menurun untuk kredit perorangan. Jumlah tunjangan ditentukan berdasarkan pada jenis asuransi yang dipilih oleh tertanggung. Perjanjian ini berlangsung sejak tanggal 7 Agustus 1997 sampai dengan waktu tidak ditentukan.

- (p) **Perjanjian Pengelolaan Asuransi Kecelakaan Diri dan Ketidaknyamanan Perjalanan, No.PMR/8A/3320, No.225/SK-BJ/1297, tanggal 2 Desember 2007.**

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak bekerjasama melakukan asuransi kecelakaan. Jumlah tunjangan ditentukan berdasarkan pada jenis asuransi yang dipilih oleh tertanggung. Perjanjian ini berlaku dari saat ditandatangani, yang masa berakhir jangka waktunya tidak ditentukan oleh para pihak.

- (q) **Perjanjian Pengelolaan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan, No.PMR/8A/3321, No.226/SK-BJ/1297, tanggal 2 Desember 2007.**

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak bekerjasama melakukan penutupan pertanggung jawaban asuransi. Jumlah tunjangan ditentukan berdasarkan pada jenis asuransi yang dipilih oleh tertanggung. Perjanjian ini berlaku dari saat ditandatangani, yang masa berakhir jangka waktunya tidak ditentukan oleh para pihak.

3. BS

- (a) **Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dan BNI Securities tentang Penyediaan *Outlet* di beberapa Kantor Cabang Perseroan dalam Pemberian Jasa Pelayanan kepada Investor Efek di Pasar Modal No.JAL/5.3/040 – No.BNIS/PK/03/0118/2008 tanggal 17 September 2008, sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama No.JAL/5/3/040-No.BNIS/PK/3/0059/2009 tanggal 26 Oktober 2009, keduanya dibuat di bawah tangan**

Berdasarkan perjanjian ini, BS melaksanakan kegiatan investasi untuk kepentingan investor efek dan Perseroan menyediakan *outlet* untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan pada beberapa kantor cabang Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini adalah 6 September 2006 sampai dengan 5 September 2012. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak. BS akan memberikan imbal jasa kepada Perseroan dimana besarnya imbal jasa ditentukan sebagai berikut (i) untuk transaksi efek di pasar perdana: sebesar *selling fee* yang diterima BS dari penjamin emisi efek dikurangi dengan biaya operasional *outlet* selama masa penawaran perdana; (ii) untuk transaksi efek di pasar sekunder sebesar *fee* yang diperoleh BS (*brokerage fee*) dibagi 2 (50% untuk Perseroan dan 50% untuk BS) setelah dikurangi biaya operasional *outlet*.

4. BMF

- (a) **Perjanjian Kredit No.064/KPI/PK/2007, tanggal 28 November 2007 antara Perseroan dan BMF, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(1) 064/KPI/PK/2007, tanggal 11 Desember 2009, keduanya dibuat di bawah tangan (“Perjanjian Kredit”)**

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memberikan kredit berupa kredit modal kerja kepada BMF dengan nilai kredit maksimum sebesar Rp67 miliar. Tujuan penggunaan kredit adalah tambahan modal kerja usaha pembiayaan (*leasing, commercial finance, factoring, consumer finance* dan lain-lain). Bunga yang dikenakan adalah sebesar 13% per tahun dan provisi sebesar 1% per tahun. Agunan yang diberikan adalah surat sanggup sebesar maksimum kredit dan segala harta kekayaan BNI Multifinance, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Jangka waktu Perjanjian Kredit adalah 28 November 2008 sampai dengan 27 November 2010 (termasuk perpanjangan 6 bulan sejak 28 November 2008).

- (b) **Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dan BMF tentang Pemberian Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) kepada Debitur/Lessee untuk Pembelian Mesin, Peralatan, Alat Berat, Kendaraan untuk Tujuan Produktif No.USK/118/2007-BNIMF/DIR/PKS/2007/06/014, tanggal 13 Juni 2007 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dan BMF tentang Pemberian Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) kepada Debitur/Lessee untuk Pembelian Mesin, Peralatan, Alat Berat, Kendaraan untuk Tujuan Produktif No.USK/057/2008-BNIMF/DIR/PKS/2008/09/011, tanggal 2 September 2008 dan No.USK/025-BNIMF/DIR/PKS/2009/07/020, tanggal 27 Juli 2009, ketiganya dibuat di bawah tangan (“Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama”)**

Berdasarkan perjanjian ini, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah (i) pemberian pembiayaan bersama (*joint financing*) kepada debitur/lessee yang sumber dananya berasal dari Perseroan dengan BMF untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif, dimana secara teknis besarnya plafond pembiayaan bersama dapat disalurkan oleh Perseroan disampaikan melalui surat tersendiri; (ii) penunjukan BMF sebagai agen dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan bersama kepada debitur/lessee berdasarkan Perjanjian Keagenan No.USK/119/2007-BNIMF/DIR/PKS-K/2007/06/015, tanggal 13 Juni 2007 antara Perseroan dan BMF; dan (iii) Perseroan dan BMF dapat melakukan *cross-selling* dalam pelaksanaan pembiayaan bersama. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah 13 Juni 2009 sampai dengan 12 Juni 2011. Pemilihan domisili adalah pada Kantor Kepaniteraan Negeri Jakarta Selatan. Perjanjian Kredit ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.

- (c) **Perjanjian Keagenan No.USK/119/2007-BNIMF/DIR/PKS-K/2007/06/015, tanggal 13 Juni 2007 antara Perseroan dan BMF, dibuat di bawah tangan (“Perjanjian Keagenan”)**

Berdasarkan perjanjian ini, ruang lingkup Perjanjian Keagenan ini adalah untuk pelaksanaan pemberian pembiayaan bersama kepada debitur/lessee, dimana para pihak menunjuk BMF sebagai agen.

Berdasarkan dibuatnya Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama dan Perjanjian Keagenan sebagaimana dimaksud dalam point (b) dan (c) di atas, telah disepakati atas setiap pembagian dari setiap pembayaran sejumlah uang yang merupakan hasil dari pelaksanaan hak-hak jaminan atas obyek pembiayaan dan jaminan fasilitas yang diserahkan oleh debitur/lessee kepada para pihak dibagi secara proporsional antara para pihak sehingga jumlah uang yang akan diterima dan sisa tagihan masing-masing pihak dalam perjanjian setelah hasil pelaksanaan hak-hak atas jaminan tersebut dibagi, mendapat sejumlah uang dan posisi piutang yang proporsional tanpa adanya suatu hak istimewa apapun diantara para pihak. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka para pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian berikut ini:

Sehubungan dengan Perjanjian poin (b) dan (c) di atas, terdapat perjanjian paripassu jaminan sebagai berikut:

Akta Perjanjian *Paripassu* Jaminan (*Security Sharing Agreement*) No. 23 tanggal 20 Juli 2007 antara Perseroan dan BMF, dibuat di hadapan Fardian, SH, Notaris di Jakarta

Para pihak sepakat bahwa obyek pembiayaan bersama dan jaminan yang telah diserahkan debitur/lessee kepada BMF sebagai agen untuk menjamin fasilitas pembiayaan bersama yang telah dibuat berikut perubahannya dengan jumlah tidak melebihi maksimum fasilitas dengan nilai setara, akan menjadi jaminan bersama para pihak secara proporsional. Perjanjian ini berlaku sejak 29 Desember 2006 sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban-kewajiban debitur/lessee berdasarkan perjanjian pembiayaan selesai dilaksanakan.

- (d) **Akta Perjanjian Kerjasama No.11, tanggal 19 Januari 2007, dibuat di hadapan Stephany Maria Lilianti, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama No.KSN/2/004/R, tanggal 23 Januari 2008 dan No. KSN/2/006/R, tanggal 23 Juni 2008 antara Perseroan dan BMF (“Perjanjian Kerjasama”)**

Berdasarkan perjanjian ini, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pemberian fasilitas kredit bersama kepada debitur berdasarkan ketentuan dan persyaratan pemberian fasilitas kredit bersama kepada debitur. Para pihak sepakat bahwa dalam pemberian fasilitas kredit bersama kepada debitur jumlah porsi kredit Perseroan adalah sebesar 99% dari jumlah fasilitas kredit bersama kepada setiap debitur dan jumlah porsi kredit BMF adalah sebesar 1% dari jumlah fasilitas kredit bersama kepada setiap debitur. Perseroan dengan ini menyanggupi dan setuju untuk menyediakan fasilitas kredit bersama kepada debitur sebesar maksimum Rp50 miliar sebagai porsi kredit Perseroan. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah sampai dengan 18 April 2013.

(e) Akta Perjanjian Kerjasama No. 11 tanggal 19 Januari 2007, dibuat di hadapan Stephany Maria Lilianti, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama No.KSN/2/004/R tanggal 23 Januari 2008 dan No. KSN/2/006/R, tanggal 23 Juni 2008 antara Perseroan dan BMF

Para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pemberian fasilitas kredit bersama kepada debitur berdasarkan ketentuan dan persyaratan pemberian fasilitas kredit bersama debitur. Para pihak sepakat bahwa dalam pemberian fasilitas kredit bersama kepada debitur jumlah porsi kredit Perseroan adalah sebesar 99% dari jumlah fasilitas kredit bersama kepada setiap debitur dan jumlah porsi kredit BMF adalah sebesar 1% dari jumlah fasilitas kredit bersama kepada setiap debitur. Perseroan dengan ini menyanggupi dan setuju untuk menyediakan fasilitas kredit bersama kepada debitur sebesar maksimum Rp50 miliar sebagai porsi kredit Perseroan. Sifat dari fasilitas kredit adalah *aplofend* (menurun setiap bulan sesuai besarnya angsuran). Tanggal jatuh tempo adalah 18 April 2013.

11. Ikatan dan Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Berikut adalah perjanjian material yang diikat oleh BNI dengan pihak ketiga yang bukan merupakan Pihak Terafiliasi dari BNI yang terjadi sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini. Perjanjian material berikut merupakan perjanjian sehubungan dengan kegiatan usaha dan operasional Perseroan dengan ketentuan-ketentuan penting sebagai berikut:

A. Perjanjian Pendorongan Pekerjaan dan Outsourcing

No.	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup/Maksud dan tujuan	Nilai Kontrak	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan/ Domisili Hukum
1.	Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Jasa Layanan Komplain Merchant, No. BSK/12/7607/R, tanggal 29 Desember 2009	Perseroan memborongkan pekerjaan kepada pihak ketiga terkait dengan memberikan penjelasan dan solusi terkait komplain terhadap merchant Perseroan	Rp167.454.157 per tahun	20 Desember 2009 sampai 19 Desember 2010	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan
2.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja Outsourcing, No. BSK/11/5412/R, tanggal 4 Desember 2007, diamandemen dengan Addendum I Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Outsourcing No. BSK/11/2227/R, Tanggal 11 April 2008, diamandemen dengan Addendum II Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Outsourcing No. BSK/12/3848/R, tanggal 12 Juni 2009 dan diamandemen dengan Addendum III Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Outsourcing No. BSK/12/2063/R, tanggal 12 Maret 2010	Perseroan memborongkan kepada pihak ketiga pekerjaan Teleplus Officer, Customer Services ATM Centre dan Customer Services Phoneplus	1. Recruitment fee sebesar Rp300.000 per orang untuk masa 1 tahun 2. TelePlus Officer Rp1.455.451 3. Customer Services ATM Center Rp1.350.000 4. Customer Services Phoneplus Rp1.455.451 5. Call Centre Officer: (i) untuk 0 s/d 1 tahun Rp1.520.947 (ii) untuk di atas atau sama dengan 1 tahun Rp1.596.994	1 November 2007 sampai 31 Maret 2011	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan
3.	Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Jasa Pelayanan Kantor, No. BSK/12/4705/R, tanggal 26 Juli 2010	Perseroan memborongkan kepada pihak ketiga pekerjaan jasa pelayanan kantor	Rp720.000.000 per tahun	1 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2011	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan
4.	Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Jasa Transportasi Kantor, No. BSK/12/4706/R, tanggal 26 Juli 2010	Perseroan memborongkan pekerjaan jasa transportasi kantor kepada pihak ketiga	Rp910.000.000,00 per tahun	1 Juli 2010 sampai 30 Juni 2011	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan
5.	Perjanjian Kerjasama No.BSK/11/2685/R, Tanggal 8 September 2005, Addendum I No.BSK/11/3328/R tanggal 18 September 2006, Addendum II No.BSK/11/3588/R, Tanggal 27 Agustus 2007, Addendum III No.BSK/11/2312/R, Tanggal 16 April 2008, Addendum IV No. BSK/11/4390/R Tanggal 28 Juli 2008, Addendum V No.BSK/12/4883/R, Tanggal 6 Agustus 2009, Addendum VI BSK/12/4738/R, tanggal 28 Juli 2010	Perseroan memborongkan penyediaan tenaga kerja outsourcing pihak ketiga	Biaya tenaga kerja tergantung jenis pekerjaan yang di outsource yang dilampirkan pada kontrak	11 Agustus 2010 sampai 10 Agustus 2011	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan

No.	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup/Maksud dan tujuan	Nilai Kontrak	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan/ Domisili Hukum
6.	Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja Outsourcing No. BSK/11/2769/R tanggal 15 September 2005, Addendum I No.BSK/11/2545/R, tanggal 7 Juli 2006, Addendum II No.BSK/11/3581/R, tanggal 27 Agustus 2007, Addendum III No.BSK/11/1166/R, tanggal 12 Februari 2008, Addendum IV No.BSK/11/2311/R, tanggal 16 April 2008, Addendum V No.BSK/11/4310/R, tanggal 18 Juli 2008, Addendum VII No.BSK/12/4873/R, tanggal 3 Agustus 2009, Addendum VII No.BSK/12/6053/R, tanggal 2 Agustus 2010.	Perseroan memborongkan penyediaan tenaga kerja outsourcing pihak ketiga	Biaya tenaga kerja tergantung jenis pekerjaan yang di outsource yang dilampirkan pada kontrak	1 Agustus 2010 sampai 31 Juli 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan

B. Perjanjian Penagihan Hutang

No.	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup/Maksud dan tujuan	Nilai Kontrak	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan/ Domisili Hukum
1.	Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Penagihan Hutang, No. BSK/12/5902/R, tanggal 23 Oktober 2009	Perseroan memborongkan pekerjaan jasa penagihan hutang kepada pihak ketiga	Nilai Perjanjian ini di tentukan oleh persentase hasil penagihan hutang yang berhasil di tagih	21 Januari 2009 sampai 20 Januari 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan
2.	Perjanjian Kerjasama Penagihan Hutang No. BSK/11/2992/R, tanggal 12 Oktober 2005, Addendum I Perjanjian Kerjasama Penagihan Hutang No. BSK/11/1995/R, tanggal 8 Maret 2006, Addendum II Perjanjian Kerjasama Penagihan Hutang No. BSK/11/2697/R, tanggal 10 Juli 2007, Addendum III Perjanjian Kerjasama Penagihan Hutang No. BSK/11/1145/R, tanggal 2 Maret 2009	Perseroan memborongkan pekerjaan jasa penagihan hutang kepada pihak ketiga	Nilai Perjanjian ini di tentukan oleh persentase hasil penagihan hutang yang berhasil di tagih	1 April 2009 sampai 31 Maret 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan
3.	Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Penagihan Hutang, No. BSK/11/1526/R, tanggal 16 April 2007	Perseroan memborongkan pekerjaan jasa penagihan hutang kepada pihak ketiga	Nilai Perjanjian ini di tentukan oleh persentase hasil penagihan hutang yang berhasil di tagih	1 Maret 2009 sampai 28 Februari 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan
4.	Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Penagihan Hutang No. BSK/11/1554/R, tanggal 16 Mei 2005, Addendum III Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Penagihan Hutang No. BSK/11/0708/R, tanggal 7 Maret 2006, Addendum IV Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Penagihan Hutang No. BSK/11/23/3/R, tanggal 2 Juli 2007, Addendum V Perjanjian Kerja Sama Penagihan Hutang No. BSK/11/0423/R, tanggal 13 Maret 2009	Perseroan memborongkan pekerjaan jasa penagihan hutang kepada pihak ketiga	Nilai Perjanjian ini di tentukan oleh persentase hasil penagihan hutang yang berhasil di tagih	1 April 2009 sampai 31 Maret 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan
5.	Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Penagihan Hutang, No. BSK/12/4651/R, tanggal 21 Juli 2010	Perseroan memborongkan pekerjaan jasa penagihan hutang kepada pihak ketiga	Nilai Perjanjian ini di tentukan oleh persentase hasil penagihan hutang yang berhasil di tagih	1 April 2010 sampai 31 Maret 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah 2. Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
6.	Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Penagihan Hutang, No. BSK/12/5759/R, tanggal 9 Oktober 2009	Perseroan memborongkan pekerjaan jasa penagihan hutang kepada pihak ketiga	Nilai Perjanjian ini di tentukan oleh persentase hasil penagihan hutang yang berhasil di tagih	1 Maret 2009 sampai 28 Februari 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah 2. Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

C. Perjanjian Pembayaran Tagihan Kartu Kredit

No.	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup/Maksud dan tujuan	Nilai Kontrak	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan/ Domisili Hukum
1.	Perjanjian Kerjasama Jasa Pembayaran Tagihan Kartu Kredit BNI melalui fasilitas Bank, No. BSK/11/4009/R, tanggal 12 September 2007	Kerja sama pemanfaatan fasilitas bank milik Perseroan oleh Pemegang Kartu Kredit pihak ketiga dalam melakukan pembayaran kartu kredit	Rp5.000 per transaksi	Bertaku sejak 12 September 2007 sampai dengan diakhirinya oleh para pihak	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan
2.	Perjanjian Kerjasama Jasa Pembayaran Tagihan Kartu Kredit BNI melalui fasilitas Bank, No. 027/KKS/BCA/2002 / DIR 031, Tanggal 12 September 2002; Amandemen I Perjanjian Kerjasama Jasa Pembayaran Tagihan Kartu Kredit BNI melalui fasilitas Bank dengan Perseroan, No.BSK/11/3463/R, tanggal 25 Juni 2008; Addendum II Perjanjian Kerjasama Pembayaran Tagihan Kartu Kredit No. BSK 11/5423R, tanggal 28 Agustus 2008	Kerja sama pemanfaatan fasilitas bank milik Perseroan oleh Pemegang Kartu Kredit pihak ketiga dalam melakukan pembayaran kartu kredit	Rp5.000 per transaksi	Bertaku sejak 1 Sept 2008 sampai dengan diakhirinya oleh para pihak	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan

D. Perjanjian Dengan Perusahaan Teknologi Informasi

No.	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup/Maksud dan tujuan	Nilai Kontrak	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan/ Domisili Hukum
1.	Perjanjian Pemeliharaan Software BMC Control M, No. TEK/1/0566/R, tanggal 10 Feb 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal Layanan perbaikan dan pemeliharaan atas software BMC Control M	AS\$ 11368.43 per tahun	29 Desember 2009 sampai 28 Desember 2010	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2.	Perjanjian Pemeliharaan Mesin IBM Tape Drive Production & DRC, No. TEK/1/3157/R, tanggal 28 Dec 2007	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pemeliharaan mesin IBM Tape Drive Production dan DRC termasuk meningkatkan kapasitas, performance, availability dan reability perangkat	AS\$ 10.163 per tahun	1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2010	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan
3.	Perjanjian Pemeliharaan & Dukungan Teknis Modul Extractor/Replicator, No. TEK/1/0571/R, tanggal 11 Feb 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal: 1. Penggunaan lisensi Modul Extractor/ Replicator 2. Dukungan eskalasi problem bila terjadi masalah 3. Maintenance rutin 1 kali setiap bulan 4. Dukungan upgrade system bila ada fitur baru 5. Dukungan untuk transfer of knowledge 6. Dukungan modifikasi schema database 7. Dukungan Perubahan bit, field atau token bila dibutuhkan	AS\$ 1.386 per tahun	17 Januari 2010 sampai 16 Januari 2011	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No.	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup/Maksud dan tujuan	Nilai Kontrak	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan/ Domisili Hukum
4.	Perjanjian Pemeliharaan & Dukungan Teknis (Tandem S88008-Production Hardware Dan Software), No. TEK/1/2684/R, tanggal 01 Sep 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pemeliharaan Produk Tandem S88008 Production yang berlokasi di Main Data Centre BNI	AS\$ 315.000 per tahun	17 Juli 2010 sampai 16 Juli 2011	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
5.	Perjanjian Jasa Pemeliharaan dan Dukungan Teknis Software Aplikasi Base24 DRC, No. Tek/1/2027/R, tanggal 26 May 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pemeliharaan Produk Software BASE24 di DEG (S88006 DRC) yang berlokasi di DRC Perseroan	AS\$ 98. 041,33 per tahun	26 Januari 2010 sampai 25 Januari 2011	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
6.	Perjanjian Jasa Pemeliharaan dan Dukungan Teknis Software Aplikasi Base24 Production, No. Tek/1/2650/R, tanggal 13 Agustus 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal : 1. Hak Penggunaan Produk Software di DEG 2. Dukungan Teknis Produk Software BASE24 Production milik Perseroan	1. Setelah Perjanjian ditandatangani AS\$ 484.146,85 2. Setelah 16 Januari 2011 AS\$ 484.146,85	17 Juli 2010 sampai 16 Juli 2011	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
7.	Kontrak Kerja No. TEK/1/1195/R, tanggal 31 Maret 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal jasa pemeliharaan Software Mimix Foe Windows untuk STPK Kliring	Rp13.000.000 per tahun	31 Januari 2010 sampai 30 Januari 2011	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
8.	Kontrak Kerja No. TEK/1/2337/R, tanggal 22 Juni 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal jasa pemeliharaan Software Mimix Foe Windows untuk BI-RTGS	Rp12.500.000 per tahun	27 Juni 2010 sampai 26 Juni 2011	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
9.	Surat Perintah Kerja No. TEK/1/2189/R, tanggal 9 Juni 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penutupan asuransi perangkat Otomatis PABX	AS\$ 18.049,59 per tahun	26 Mei 2010 sampai 25 Mei 2011	Tidak diatur lebih lanjut oleh Para Pihak
10.	Perjanjian Teknologi Informasi terhadap PT Bank Negara Indonesia, tanggal 25 Juni 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal saran terhadap pelayanan dalam industri (Perbankan) dalam hal Teknologi Informasi	AS\$ 37.200 per tahun	1 Agustus 2010 sampai 31 Juli 2011	Para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap sengketa melalui arbitrase dengan mengikuti Australian Commercial Dispute Centre Arbitrase Sydney, Australia Hukum Negara bagian New South Wales

No.	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup/Maksud dan tujuan	Nilai Kontrak	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan/ Domisili Hukum
11.	Perjanjian Pemeliharaan dan Dukungan Teknis (Tandem S88006-Drc-Hardware Dan Software), No. TEK/1/2323/R, tanggal 21 Juni 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal : 1. Pelayanan Pencegahan, pelayanan terjadwal atas Sistem Komputer Tandem yang tercakup dalam Perjanjian ini ; 2. Pelayanan Perbaikan, mengatasi segala gangguan fungsional pada Sistem Komputer Tandem yang dilaporkan Perseroan 3. Support (Dukungan Teknis) dalam penggunaan masing-masing Perangkat Keras dan Piranti Lunak Tandem pada Designated Equipment Group.	AS\$ 279.887,68 per tahun	26 Januari 2010 sampai 25 Januari 2011	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
12.	Perjanjian Pengadaan Jasa Implementasi Aplikasi Swiftalliance Gateway, No . TEK/1/2683/R, tanggal 30 Agustus 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal jasa Implementasi Aplikasi Swiftalliance Gateway	Rp46.750.000 per tahun	19 Juli 2010 sampai 31 Desember 2010	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
13.	Perjanjian Jasa Apply Patches Mastercard (BNET & MDS) dan VISA/VISP Periode April 2010, No TEK/2577/R, tanggal 8 Juli 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pekerjaan jasa Fixes Patches Visa dan Master Card untuk Module MDS, BNET dan VISA/VISP	Rp231.336.000 per masa kontrak	24 Mei 2010 sampai diselesaikannya pekerjaan	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
14.	Perjanjian Jasa Pemeliharaan Software BMC Control M DI DRC, No. TEK/1/ C335/R, tanggal 18 Januari 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal perbaikan dan pemeliharaan atas software BMC Control M, menyelesaikan permasalahan yang timbul dan melakukan eskalasi problem	AS\$ 22.000 per masa kontrak	20 Desember 2009 sampai 22 Desember 2010	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
15.	Perjanjian Jasa Perpanjangan Anual Technical Report (ATS) Software Oracle, No. TEK/1/0341/R, tanggal 19 Januari 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal jasa perpanjangan Annual Technical Support Software Oracle (ATS software Oracle)	AS\$ 436.159,01 per masa kontrak	8 Desember 2009 sampai 7 Desember 2010	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
16.	Perjanjian Kerjasama antara tentang Pengelolaan Transaksi Perbankan melalui Media Elektronik, No. DIR/057, tanggal 30 Desember 2008	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan transaksi perbankan melalui media elektronik.	Sharing Revenue, pihak ketiga berhak mendapatkan revenue sebagai berikut : Transaksi per bulan : 1. Untuk Transaksi Ke 1-8 Rp 250 per transaksi 2. Untuk Transaksi Ke 8-dst Rp 175 per transaksi	30 Desember 2008 3 tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 3 (tiga) tahun kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak.	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui BANI

No.	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup/Maksud dan tujuan	Nilai Kontrak	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan/ Domisili Hukum
17.	Perjanjian Jasa Oracle Advanced Customer Services, No. TEK/0825/R, tanggal 9 Maret 2010 sebagaimana telah diubah dengan Addendum 1 Perjanjian Jasa Oracle Advanced Customer Services No. TEK/1/290R/R, tanggal 30 September 2010.	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pemberian jasa layanan teknis professional Oracle Advanced Customer Services assistance kepada Perseroan dan service tambahan berupa transfer knowledge sebanyak 2 mandays.	AS\$ 31.716 per masa kontrak	30 Oktober 2010 sampai dengan 29 September 2011.	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
18.	Perjanjian Kerjasama Cash Replenishment dan First Line Maintenance ATM Sentra "Yogyakarta" antara PT. BNI (Persero) Tbk. dengan pihak ketiga No. BNI OPR/10/034, tanggal 21 Mei 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal Cash Replenishment ATM dan First Line Maintenance ATM	Rp3.470.125 per ATM per bulan	1 April 2010 sampai 31 Maret 2011.	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
19.	Perjanjian Jasa Pemeliharaan dan Dukungan Teknis Software Aplikasi Base24 Production, No. Tek/1/2650/R, tanggal 13 Agustus 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal : 1 Hak Penggunaan Produk Software di DEG 2. Dukungan Teknis Produk Software BASE24 Production milik Perseroan	1. Setelah Perjanjian ditandatangani AS\$ 484.146,85 2. Setelah 16 Januari 2011 AS\$ 484.146,85	17 Juli 2010 sampai 16 Juli 2011	1. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 2. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah maka Para Pihak akan sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
20.	Addendum 1 Perjanjian Pemeliharaan Perangkat PBX Phils, No. Tek/1/3510/R, tanggal 16 Desember 2009	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal Perjanjian Pemeliharaan Perangkat PBX Phils	Rp2.472.000.000 per masa kontrak	16 Desember 2009 sampai 16 Desember 2010	Tidak diatur lebih lanjut oleh Para Pihak
21.	Addendum 1 Perjanjian Jasa Pemeliharaan UPS (UPS Protek), No. TEK/1/1197/R, tanggal 31 Maret 2010 sebagaimana diubah dengan Addendum 2 Perjanjian Jasa Pemeliharaan UPS (UPS Protek) No. TEK/1/3001/R, tanggal 8 November 2010.	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal Jasa Pemeliharaan UPS (UPS Protek)	Rp52.000.000 per masa kontrak	7 November 2010 sampai 6 November 2011	Tidak diatur lebih lanjut oleh Para Pihak
22.	Addendum 1 Perjanjian Jasa Pemeliharaan Fire Supression System, No. TEK/1/1196/R, tanggal 31 Maret 2010 sebagaimana diubah dengan Addendum 2 Perjanjian Jasa Pemeliharaan Fire Supression System No. TEK/1/3010/R tanggal 11 November 2010.	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal Jasa Pemeliharaan Fire Supression System	Rp50.400.000 per masa kontrak	5 November 2010 sampai 4 November 2011	Tidak diatur lebih lanjut oleh Para Pihak
23.	Addendum III Pemeliharaan pelayanan Premier Support Microsoft, No. TEK/1/2400/R, tanggal 25 Juni 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal Pemeliharaan pelayanan Premier Support Microsoft	AS\$ 49.000 per tahun	Diperpanjang menjadi 18 Juni 2010 sampai dengan 17 Juni 2011	Tidak diatur lebih lanjut oleh Para Pihak
24.	Addendum II Perjanjian Jasa Pemeliharaan UPS Bauma BPT-100 No. TEK/1/0835/R, tanggal 9 Maret 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal Jasa Pemeliharaan UPS Bauma BPT-100	Rp48.000.000 per tahun	Diperpanjang menjadi 1 Februari 2010 sampai dengan 31 Januari 2011	Tidak diatur lebih lanjut oleh Para Pihak
25.	Addendum II Perjanjian Pemeliharaan Software CaratDup No. TEK/1.b/0653/R, tanggal 23 Februari 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal Perjanjian Pemeliharaan Software CaratDup	Rp105.000.000 per tahun	Diperpanjang menjadi 27 Februari 2010 sampai dengan 26 Februari 2011	Tidak diatur lebih lanjut oleh Para Pihak
26.	Addendum II Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Security System No. TEK/1/0573/R, tanggal 16 Februari 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Security System	Rp1.600.000.000 per tahun	Diperpanjang menjadi 1 September 2010 sampai dengan 31 September 2011	Tidak diatur lebih lanjut oleh Para Pihak

E. Perjanjian Sehubungan Dengan Kegiatan Operasional Dan Kegiatan Usaha Perseroan

No.	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup/Maksud dan tujuan	Nilai Kontrak/Besar Kredit	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan/ Domisili Hukum
I. Perjanjian Penyediaan Kredit					
1.	Perjanjian Kerjasama Penyaluran Fasilitas Kredit BNI Griya, No. PKS.1116/LG.05/PD-00/VIII/2010, tanggal 3 Agustus 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal : 1. Penyaluran fasilitas BNI Griya untuk Karyawan pihak ketiga 2. Penyaluran gaji karyawan pihak ketiga ke rekening Afiliasi	1. Untuk pembelian minimal Rp50.000.000 dan maksimal Rp5.000.000.000 2. Untuk renovasi Rp25.000.000 dan maksimal Rp2.500.000.000	Sejak tanggal 3 Agustus 2010 dan akan terus berlaku sepanjang tidak diakhiri oleh Para Pihak	1. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah 2. Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Pengadilan negeri tempat kedudukan hukum tergugat
2.	Perjanjian Kerjasama Home Ownership Assistance Program, No.Leg-002/MEPI-BNI/VIII/2010, tanggal 25 Agustus 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal Home Ownership Assistance Program ("HOAP")	Untuk 1 Tahun Pertama : Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia pada saat pencairan kredit + 2,5% Untuk tahun selanjutnya : Suku bunga mengambang Sertifikat Bank Indonesia pada tanggal 1 setiap bulannya + 4 %	Sejak tanggal 25 Agustus 2010 dan akan terus berlaku sepanjang tidak diakhiri oleh Para Pihak	1. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah 2. Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
3.	Perjanjian Kerjasama Penyaluran Kredit Konsumen, No.026.J/Eks/01200/KU.02/08/II/2008, tanggal 31 Januari 2008	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal : 1. Pemberian rekomendasi dari kepada Perseroan terhadap pegawai yang layak mendapat fasilitas kredit 2. Penyaluran gaji karyawan pihak ketiga ke rekening Afiliasi	BNI Griya : Minimum Rp15.000.000 – Maksimum Rp5.000.000.000 BNI Oto : Minimum Rp5.000.000 – Maksimum Rp1.000.000.000 BNI Griya Multiguna: Minimum Rp50.000.000 – Maksimum Rp1.000.000.000 BNI Flexi : Minimum Rp15.000.000 – Maksimum Rp30.000.000	Sejak tanggal 31 Januari 2008 dan akan terus berlaku sepanjang tidak diakhiri oleh Para Pihak	1. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah 2. Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Pengadilan negeri tempat kedudukan hukum tergugat
4.	Perjanjian Kerjasama Penyaluran Kredit Konsumen, No.5534/SP-BGT/2007, tanggal 27 November 2007	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal : 1. Pemberian rekomendasi dari kepada Perseroan terhadap pegawai yang layak mendapat fasilitas kredit 2. Penyaluran gaji karyawan pihak ketiga ke rekening Afiliasi	BNI Griya : Minimum Rp15.000.000 – Maksimum Rp5.000.000.000 BNI Oto : Minimum Rp5.000.000 – Maksimum Rp1.000.000.000 BNI Griya Multiguna: Minimum Rp50.000.000 – Maksimum Rp1.000.000.000 BNI Flexi : Minimum Rp15.000.000 – Maksimum Rp30.000.000	Sejak tanggal 27 November 2007 dan akan terus berlaku sepanjang tidak diakhiri oleh Para Pihak	1. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah 2. Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Pengadilan negeri tempat kedudukan hukum tergugat
5.	Perjanjian Kerjasama Penyaluran Kredit Konsumen, No. KSN/51/1371/R, tanggal 30 Juni 2008	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal : 1. Pemberian rekomendasi dari kepada Perseroan terhadap pegawai yang layak mendapat fasilitas kredit 2. Penyaluran gaji karyawan pihak ketiga ke rekening Afiliasi	BNI Griya : Minimum Rp 15.000.000 – Maksimum Rp 5.000.000.000 BNI Oto : Minimum Rp5.000.000 – Maksimum Rp1.000.000.000 BNI Griya Multiguna: Minimum Rp50.000.000 – Maksimum Rp1.000.000.000 BNI Flexi : Minimum Rp15.000.000 – Maksimum Rp30.000.000	Sejak tanggal 30 Juni 2008 dan akan terus berlaku sepanjang tidak diakhiri oleh Para Pihak	1. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah 2. Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Pengadilan negeri tempat kedudukan hukum tergugat

No.	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup/Maksud dan tujuan	Nilai Kontrak/Besar Kredit	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan/ Domisili Hukum
6.	Akta Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen dan Ruko/Rukan/Kios (BNI Griya) No. 26, tanggal 9 September 2009, dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal Pemasaran dan pemberian Fasilitas BNI Griya kepada masyarakat	Hingga diatas Rp 500.000.000	Sejak tanggal 9 September 2009 dan akan terus berlaku sepanjang tidak diakhiri oleh Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan
II. Penyediaan Channeling Loan					
7.	Perjanjian Kerjasama Pendanaan dalam Rangka Kredit Pemberdayaan Pengusaha pihak ketiga, No. PKP-04/KPP/DSMI/2010, tanggal 20 Januari 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penyaluran kredit pemberdayaan pengusaha	Total komitmen pendanaan maksimal Rp45.000.000.000 dengan rincian per jenis kegiatan usaha/sector	Sampai dengan nilai fasilitas berakhir	<ol style="list-style-type: none"> Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui BANI
8.	Perjanjian Kerjasama Pendanaan dalam Rangka Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), No. PKP-05/KUPS/DSMI/2010, tanggal 24 Februari 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penyaluran kredit usaha pembibitan sapi	Total komitmen pendanaan maksimal Rp500.000.000.000 sampai dengan tahun 2014 yang hanya dapat yang dilakukan pola kemitraan dengan peternak.	<ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan KUPS untuk pelaku usaha yang berbentuk perusahaan pembibitan diberikan selama 2 tahun dengan subsidi bunga sesuai jangka waktu kredit paling lama 6 tahun Pembiayaan KUPS untuk pelaku usaha yang berbentuk koperasi dan kelompok/ gabungan kelompok peternak diberikan sampai dengan tahun 2014, dengan subsidi bunga berakhir paling lambat 2020. 	<ol style="list-style-type: none"> Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui BANI
9.	Perjanjian Kerjasama Pendanaan dalam Rangka Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan, No. PKP-06/KPEN-RP/DP3/2007, tanggal 25 September 2007	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pelaksanaan pendanaan kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan	Total komitmen pendanaan minimum Rp5.000.000.000.000	Sampai dengan tahun 2010	<ol style="list-style-type: none"> Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui BANI
10.	Perjanjian Kerjasama Pendanaan dalam Rangka Kredit Kredit Ketahanan Pangan dan Energi No. PKP-02/KKP-E/DP3/2007, tanggal 1 November 2007 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Pendanaan No. PKP-02/KKP-E/DP3/2007, tanggal 1 November 2007 dalam Rangka Kredit Kredit Ketahanan Pangan dan Energi No. AMA-01/PKP-02/KKP-E/DSMI/2009, tanggal 14 Juli 2009	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pendanaan kredit ketahanan pangan dan energi.	Perseroan bersedia dan sanggup untuk menyediakan dana dalam rangka pendanaan kredit ketahanan pangan dan energi dengan jumlah baki debet (outstanding) dari waktu ke waktu setinggi-tingginya sebesar Rp410.000.000.000.	Sampai dengan nilai fasilitas berakhir	<ol style="list-style-type: none"> Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui BANI
11.	Perjanjian Kerjasama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi No. DIR/013, tanggal 24 Februari 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penjaminan kredit atas risiko pengembalian Kredit Usaha Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> Kredit Usaha Rakyat ("KUR") Mikro:Rp5.000.000 KUR Ritel:Rp500.000.000 KUR Kepada Lembaga Linkage:Rp1.000.000.000 	24 Februari 2010 dan akan terus berlaku sepanjang tidak diakhiri oleh Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan <p>Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</p>

No.	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup/Maksud dan tujuan	Nilai Kontrak/Besar Kredit	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan/ Domisili Hukum
12.	Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi dalam Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan, No. PRJ-73/PB/2009, tanggal 29 Desember 2009	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal jasa pelayanan perbankan sebagai Bank Persepsi/ Devisa Persepsi dalam Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan atas seluruh nilai rekening pihak ketiga.	Sesuai dengan biaya administrasi TSA	1 Juli 2009 sampai 30 Juni 2012	<ol style="list-style-type: none"> Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui BANI
III. Perjanjian Dengan Merchant & Layanan Konsumen					
13	Perjanjian Kerjasama Merchant, No. BSK/11/4012/R, tanggal 17 November 2006	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pembuatan merchant atas nama Perseroan	Pihak Ketiga akan memberikan discount Rate kepada Perseroan sebesar : <ol style="list-style-type: none"> 1) Mastercard atau Visa Card Perseroan – 2% 2) Mastercard atau Visa Card Bank Lain – 2% 3) Kartu Plus/Kartu Perseroan – 0,5% 	18 Oktober 2006 sampai dengan diakhirinya perjanjian oleh kedua belah pihak	Para Pihak sepakat untuk tunduk kepada Ketentuan Umum Perjanjian Kerjasama Merchant Perseroan maupun yang ditetapkan Visa International, MasterCard International
14.	Perjanjian Kerjasama Merchant, No. BSK/11/2099/R, tanggal 24 Mei 2006	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pembuatan merchant atas nama Perseroan	Perseroan akan memberikan sponsorship kepada pihak ketiga sebesar Rp200.000.000/tahun didasarkan atas sales volume sebesar Rp50.000.000.000	Sejak 1 Mei 2006 dan akan terus berlaku sepanjang tidak diakhiri oleh Para Pihak	Tidak diatur lebih lanjut
15	Perjanjian Kerjasama Tentang Penyediaan Layanan Pembayaran Gaji Anggota TNI AL melalui rekening perorangan pada Bank, No. PKS/23/V/2010, No. DIR/029, , tanggal 25 Mei 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan jasa layanan payroll	Biaya pengelolaan rekening perbulan Rp 1.500	25 Mei 2010 sampai 30 Juni 2011	<ol style="list-style-type: none"> Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
16.	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Layanan ATM Pihak Ketiga antara, No. DIR/026, tanggal 11 Juli 2007	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penyelenggaraan layanan transaksi secara elektronik melalui Terminal ATM milik atau yang dikelola oleh Perseroan.	Perseroan selaku pengguna Terminal ATM Pihak Ketiga, setuju dan sepakat untuk membayar Biaya Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Perseroan kepada Perseroan, berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya Switching (Switching Fee) ; 2) Biaya Acquiring (Acquiring Fee) ; Besarnya Biaya Transaksi ATM Pihak Ketiga sesuai dengan yang diatur di dalam Perjanjian Kerjasama	36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.	<ol style="list-style-type: none"> Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan
17.	Perjanjian Kerjasama Pengadaan Aplikasi Manajemen Risiko Pasar, No. UMM/4.1/018/R, tanggal 23 Maret 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan Aplikasi Manajemen Risiko Pasar	Rp7.850.000.000 per masa kontrak	23 Maret 2010 sampai 23 Maret 2014	<ol style="list-style-type: none"> Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
IV. Perjanjian Pembayaran Tagihan					
18.	Perjanjian Kerjasama Operasional tentang Pemanfaatan Fasilitas Perseroan untuk Layanan Pembelian Pulsa isi ulang On-Line (e-Reload on-line), No. 1106.A/XVI.L3.4284/XL/2006, No. DIR/ 070 A, No. 206/VI/SLA/ME-2006 tanggal 15 Juni 2006	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pembelian pulsa isi ulang dengan memanfaatkan fasilitas perbankan elektronik Perseroan secara on-line.	Akan ditentukan kemudian oleh para pihak sesuai jumlah rekonsiliasi	Sejak tanggal 29 Mei 2006 dan akan terus berlaku sepanjang tidak diakhiri oleh Para Pihak	

No.	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup/Maksud dan tujuan	Nilai Kontrak/Besar Kredit	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan/ Domisili Hukum
19.	Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Fasilitas Perseroan untuk Pembayaran Tagihan dengan menggunakan Sistem Host to Host, No. 1164.A/XVI.L3.4362/XL/X/2006, No. DIR/084, No. 018/AJ/000/2006, tanggal 9 Oktober 2006	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pembayaran tagihan oleh customer melalui sistem billing payment on-line dengan memanfaatkan fasilitas perbankan Perseroan	Akan ditentukan kemudian oleh para pihak sesuai jumlah rekonsiliasi	Sejak tanggal 9 Oktober 2006 dan akan terus berlaku sepanjang tidak diakhiri oleh Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
20.	Perjanjian Kerjasama tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Jasa-jasa pihak ketiga melalui Fasilitas BNI dengan Sistem Host to Host, No. DJK/9/073/R, tanggal 30 April 2009	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penggunaan Sistem Host to Host yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Penerimaan pembayaran tagihan melalui seluruh fasilitas Perseroan; Penerimaan pembayaran isi ulang pulsa melalui seluruh fasilitas Perseroan 	Produk Biaya/transaksi Produk Internet Postpaid Rp. 5.000,- Produk Internet Prepaid 5%	Sejak 30 April 2009 dan akan terus berlaku sepanjang tidak diakhiri oleh Para Pihak	Musyawarah oleh Para Pihak melalui Tim Rekonsiliasi. Apabila perselisihan tersebut masih tidak dapat diselesaikan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui lembaga Pengadilan.
V. Perjanjian Kartu Mahasiswa					
21.	Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu Mahasiswa antara No. UID/327/R, No. 1107/R/UP/V/2010, tanggal 25 Mei 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penerbitan dan pengelolaan kartu mahasiswa pihak ketiga yang akan berfungsi sebagai kartu mahasiswa dan Kartu Tabungan.	Rp53.000 per mahasiswa	25 Mei 2010 sampai 25 Mei 2015	<ol style="list-style-type: none"> Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
23.	Perjanjian Kerjasama Tentang Penerbitan dan Pengelolaan Kartu Mahasiswa, No RWM/01/040/R, No. 1461/234.H/KU/2004, tanggal 1 September 2004. Perjanjian ini diubah beberapa kali oleh Para Pihak dimana perubahan terakhir adalah Addendum 2 atas Perjanjian Kerjasama No. RWM/01/261.A/R, No. 14/H39/HM/2010, tanggal 8 Maret 2010.	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penerbitan dan pengelolaan kartu mahasiswa pihak ketiga yang akan berfungsi sebagai kartu mahasiswa dan Kartu Tabungan.	Rp60.000 per mahasiswa	8 Maret 2010 sampai 31 Agustus 2012	<ol style="list-style-type: none"> Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
24.	Perjanjian Kerjasama Tentang Penerbitan dan Pengelolaan Kartu Tanda mahasiswa ("KTM") Program Pasca Sarjana, No. DJK/9/100/R, No. 6287/PII/HT/2008, tanggal 15 September 2008	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penerbitan dan pengelolaan kartu mahasiswa pihak ketiga yang akan berfungsi sebagai kartu mahasiswa dan Kartu Tabungan, Kartu ATM, Kartu Debit dan Kartu Akses.	Perseroan akan memberikan subsidi ASS 1 untuk biaya personalisasi kartu setiap kartu	15 September 2008 sampai 15 September 2013	<ol style="list-style-type: none"> Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Sleman.
VI. Perjanjian Asuransi					
25.	Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Pertanggungans Asuransi Kecelakaan Diri Nasabah BNI Taplus No. DJK/9/0148/R, tanggal 2 November 2009	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pemberian asuransi jiwa bagi pihak ketiga	Range Saldo Dasar Perhitungan Premi < Rp1.000.000 - Rp1.000.000,- s.d. Rp60.000.000 Sesuai besarnya saldo x 0,40% □ > Rp60.000.000 Rp60.000.000,- x x 0,40%	3 tahun sejak 1 Oktober 2009 sampai 30 September 2012	<ol style="list-style-type: none"> Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan

No.	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup/Maksud dan tujuan	Nilai Kontrak/Besar Kredit	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan/ Domisili Hukum
26.	Perjanjian Pengelolaan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan, No. 056Sk/B7.0897, tanggal 7 Agustus 1997	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pemberian asuransi jiwa bagi pihak ketiga	Dibayarkan oleh Perseroan dengan jumlah yang ditentukan kemudian	Sejak tanggal penandatanganan sampai waktu yang tidak ditentukan	1. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah 2. Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
27.	Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit, No. 25/0069/VIII/PERJ-DIR/ASEI, No. USK/040/2010, tanggal 31 Agustus 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pemberian asuransi jiwa bagi pihak ketiga	Diatur dalam polis asuransi tersendiri yang akan dibayarkan oleh debitur pihak Perseroan	31 Agustus 2010 sampai 31 Agustus 2014	1. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah 2. Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
28.	Perjanjian Pertanggungans Asuransi Jiwa Kredit Untuk Debitur Kredit Konsumen, No. 005.SJ.T.0107, tanggal 15 Januari 2007	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pemberian asuransi jiwa bagi pihak ketiga	Diatur dalam polis asuransi tersendiri yang akan dibayarkan oleh debitur pihak Perseroan	21 Juli 2006 sampai 21 Juli 2011	1. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah 2. Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
29.	Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan No. KSN/3/027/R, tanggal 17 Mei 2010	Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pemberian asuransi jiwa bagi pihak ketiga	Diatur dalam polis asuransi tersendiri yang akan dibayarkan oleh debitur pihak Perseroan	Sejak tanggal 17 Mei 2010 dan akan terus berlaku sepanjang tidak diakhiri oleh Para Pihak	1. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan secara musyawarah 2. Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah maka akan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

F. Cross Currency Swap

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan Umum	Nilai Pertukaran Akhir/Final Exchange
1.	Transaksi Cross Currency Swap berdasarkan surat perjanjian Ref. 25666271, tanggal 16 April 2008	Perseroan (Party A) dan PT Bank DBS Indonesia/ DBS (Party B)	- Tanggal Perdagangan: 8 April 2008 - Tanggal Efektif: 10 April 2008 - Tanggal Pengakhiran: 10 April 2011, dengan tunduk pada penyesuaian sehubungan dengan <i>Modified Following Business Day Convention</i>	- Tanggal Pertukaran Akhir: Pada saat Tanggal Pengakhiran, yaitu 10 April 2010. - Nilai Pertukaran Akhir untuk Party A : SGD15.000.000 - Nilai Pertukaran Akhir untuk Party B: USD10.865.628,40
2.	Surat Perjanjian Transaksi Cross Currency Swap, 6 April 2010	Deutsche Bank AG ("DBAG") kepada Perseroan (Counterparty)	- Tanggal Perdagangan: 8 April 2008 - Tanggal Efektif: 10 April 2008 - Tanggal pengakhiran - Sehubungan dengan : - Fixed Rate Payer, 8 April 2013 dan - Floating Rate Payer, 8 April 2013, dengan tunduk kepada penyesuaian sesuai dengan <i>Modified Following Business Day Convention</i> .	- Tanggal Pertukaran Akhir: Pada saat Tanggal Pengakhiran - Nilai Pertukaran Akhir untuk DBAG: USD20.000.000 - Nilai Pertukaran Akhir untuk Counterparty: JPY1.873.000.000

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan Umum	Nilai Pertukaran Akhir/Final Exchange
3.	Surat Perjanjian Transaksi Cross Currency Swap dengan Refensi Transaksi No. 5602836/84320, 17 April 2008	Standard Chartered Bank/ SCB (Party A) kepada Perseroan (Party B)	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Perdagangan: 8 April 2008 - Tanggal Efektif: 10 April 2008 - Tanggal Pengakhiran: 10 April 2011, dengan tunduk pada penyesuaian sehubungan dengan <i>Modified Following Business Day Convention</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Pertukaran Akhir: Pada saat Tanggal Pengakhiran, yaitu 10 April 2010. - Nilai Pertukaran Akhir untuk Party A : USD10.867.202,78 - Nilai Pertukaran Akhir untuk Party B: SGD15.000.000
4.	USD Interest Rate Swap, tanggal 18 Mei 2009	Standard Chartered Bank/ SCB (Party A) kepada Perseroan (Party B)	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Perdagangan: 18 Mei 2009 - Tanggal Efektif: 22 Mei 2009 - Tanggal Pengakhiran: 22 Mei 2014, dengan tunduk pada penyesuaian sehubungan dengan <i>Modified Following Business Day Convention</i> - Opsi Nilai Mengambang (Floating Rate Option): USD-BBA-LIBOR - Penetapan Jatuh Tempo (Designated Maturity): 3 Bulan - Spread: + 2,75% 	<p><u>Nilai Tetap:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fix Rate Payer: Perseroan - Nilai Fix Rate Payer Currency: USD150.000.000 - Tanggal Pembayaran Fixed Rate Payer: 22 Februari, Mei, Agustus, November setiap tahunnya dimulai, termasuk 22 Agustus 2009, sampai, termasuk, 22 Mei 2014, dengan tunduk pada penyesuaian sehubungan dengan <i>Modified Following Business Day Convention</i> <p><u>Nilai Mengambang (Floating Amounts):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fix Rate Payer: SCB - Nilai Fix Rate Payer Currency: USD150.000.000 - Tanggal Pembayaran Fixed Rate Payer: 22 Februari, Mei, Agustus, November setiap tahunnya dimulai, termasuk 22 Agustus 2009, sampai, termasuk, 22 Mei 2014, dengan tunduk pada penyesuaian sehubungan dengan <i>Modified Following Business Day Convention</i>

12. Perkara-perkara Yang Sedang Dihadapi dan Yang Berhubungan Dengan BNI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BNI menghadapi beberapa perkara hukum di Indonesia. Kebijakan umum yang dilakukan oleh BNI adalah dengan membuat provisi sebesar 70% dari jumlah gugatan jika perkara diputuskan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan merugikan BNI serta provisi sebesar 100% dari jumlah gugatan jika perkara diputuskan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dan merugikan BNI.

Provisi tersebut di atas merupakan kebijakan Direksi BNI yang mungkin terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya karena bergantung pada fakta dan kondisi dari perkara yang dihadapi. Pada tanggal 30 September 2010, BNI telah mencatat provisi di neraca sebesar Rp87,3 miliar untuk kewajiban yang berpotensi muncul dalam kaitannya dengan 18 proses hukum, yang termasuk meliputi provisi untuk kasus-kasus berikut:

1. Pada tanggal 19 Maret 2008, BNI menerima putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menyatakan BNI harus mengganti rugi materiil sebesar Rp63,8 miliar terkait dengan kasus jaminan kredit pihak ketiga. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada tingkat banding pada tanggal 14 Oktober 2008 dan diperkuat kembali pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung pada tanggal 21 Agustus 2009. Sejalan dengan kebijakan umum BNI yang dijelaskan di atas, BNI telah membuat provisi sebesar 100% dari jumlah gugatan tersebut. BNI memperkirakan bahwa putusan pengadilan tersebut akan dieksekusi dalam waktu dekat, walaupun BNI telah mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung pada 9 Agustus 2010 atas putusan kasasi tanggal 21 Agustus 2009 tersebut.

BNI juga terlibat dalam beberapa perkara material di mana terhadap perkara-perkara tersebut kami tidak melakukan provisi, sebagai berikut.

2. BNI menjadi tergugat dalam kasus pencemaran nama baik dan kerugian usaha oleh penggugat individual yang telah dipublikasikan terlibat dalam kasus penipuan L/C tahun 2003, dengan total gugatan ganti rugi materiil sebesar Rp220 miliar dan USD111,5 juta serta ganti rugi immateriil sebesar Rp2 triliun. Pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perseroan dinyatakan tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum pada kasus tersebut. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada tanggal 29 September 2005, Pengadilan Tinggi Jakarta memberikan putusan yang menyatakan membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. BNI menjadi tergugat dalam perbuatan melawan hukum terkait dengan penyalahgunaan surat kuasa oleh depositor dan diminta untuk itu BNI diminta ganti rugi materiil sebesar Rp47,4 miliar dan ganti rugi immateriil sebesar Rp150 miliar. Kasus ini dimenangkan oleh penggugat di Pengadilan Negeri Situbondo, namun putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 11 November 2008 dan dinyatakan bahwa gugatan dari penggugat tidak dapat diterima. Penggugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan saat ini kasus ini sedang dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung.

4. BNI menjadi tergugat di *District Court* di Utah, Amerika Serikat atas kasus garansi bank dan *standby Letter of Credit (L/C)* yang tidak dibayar. *District Court* telah memutuskan bahwa Penggugat mendapatkan *default judgment* dan BNI diperintahkan untuk membayar sebesar USD127 juta, karena BNI tidak menghadiri acara pengadilan dikarenakan BNI tidak pernah menerima panggilan dari *District Court* tersebut. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2008, BNI mengajukan *motion for judgment*, yang meminta agar seluruh gugatan Penggugat atas BNI ditolak dengan alasan bahwa *District Court* tersebut tidak memiliki yurisdiksi atas BNI sesuai dengan ketentuan *Foreign Sovereign Immunities Act*. Berdasarkan posisi BNI di dalam kasus ini, garansi bank dan *standby L/C* tersebut merupakan dokumen palsu dan BNI tidak pernah menerbitkan kedua dokumen tersebut. *District Court Utah* menolak *motion for judgment* BNI dan sehubungan dengan keputusan tersebut, BNI telah mengajukan banding ke *United States Court of Appeals for the Tenth Circuit*. *United States Court of Appeals for the Tenth Circuit* telah memerintahkan *District Court Utah* untuk melakukan pemeriksaan terbatas sehubungan dengan masalah imunitas BNI berdasarkan ketentuan dalam *Foreign Sovereign Immunities Act*, sedangkan terhadap keabsahan dari garansi bank dan *L/C*, hingga saat ini belum diputuskan oleh *District Court Utah*. Dalam perkara ini, BNI telah menunjuk Hollyer Braddy LLP sebagai kantor hukum untuk menangani perkara ini dan berdasarkan jadwal yang telah disampaikan oleh *District Court of Utah*, BNI diberikan kesempatan untuk menyampaikan *oral argument* yaitu pada 14 Desember 2010 terkait upaya BNI melakukan *renewed motion for judgment*.
5. BNI menghadapi perselisihan pajak sebesar Rp.150 juta yang timbul dari transaksi Murabahah. Dalam kasus ini, BNI telah mengajukan keberatan ke kantor pajak yang kemudian memutuskan untuk menolak keberatan yang diajukan oleh BNI. Oleh karena itu, BNI kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. BNI telah membayar sebesar 50,0% dari jumlah gugatan ke Kantor Pajak, sebagaimana disyaratkan dalam pengajuan keberatan.
6. BNI bersama BNI Life dan beberapa pihak lainnya digugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru terkait dengan perbuatan melawan hukum yaitu kasus pemotongan saldo penggugat untuk premi asuransi dan pelaksanaan eksekusi lelang terhadap harta penggugat. Dalam gugatannya, penggugat meminta Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menghukum BNI dan BNI Life untuk mengembalikan uang pemotongan saldo penggugat sebesar Rp5,7 juta. Selain itu, dalam gugatannya, penggugat juga meminta ganti rugi kepada para tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp20 miliar dan kerugian immateriil sebesar Rp100 miliar. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Hasil operasi atau kondisi keuangan BNI pada masa yang akan datang, dapat terkena dampak negatif dari perubahan asumsi atau efektivitas strategi BNI yang berkaitan dengan perkara-perkara ini.

Dari waktu ke waktu, karyawan dan mantan karyawan BNI pernah terlibat dalam kasus-kasus kriminal yang berkaitan dengan tindakan korupsi dan pencurian dimana pada beberapa kasus, karyawan yang terbukti bersalah dikenakan hukuman kurungan penjara. Salah satu contohnya adalah Deputy General Manager dan enam mantan karyawan BNI terbukti bersalah melakukan tindakan korupsi sehubungan dengan penerbitan kredit bermasalah. Empat terdakwa dijatuhi hukuman penjara satu tahun dan tiga bulan penjara dan tiga lainnya dijatuhi hukuman penjara satu tahun, walaupun putusan yang berkekuatan hukum tetap atas kasus tersebut belum final karena semua terdakwa dan jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan tersebut. Dalam kasus ini, Pengadilan juga meminta untuk para terdakwa untuk mengembalikan barang bukti ke BNI yang terdiri dari Rp23,3 miliar uang tunai dan aset tetap yang meliputi jaminan atas fasilitas kredit. Perkara-perkara tersebut dan pemberian hukuman atas tindakan kejahatan tersebut dapat mencegah karyawan BNI untuk terlibat dalam tindakan korupsi atau pencurian. Perkara-perkara yang melibatkan karyawan BNI tidak mengakibatkan kewajiban bagi BNI untuk membayar ganti rugi.

BNI meyakini bahwa gugatan-gugatan yang diajukan tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan belum menentukan besarnya potensi kerugian atas gugatan ini. Namun demikian, jika pengadilan akhirnya memutuskan bahwa BNI bertanggung jawab atas gugatan-gugatan tersebut, perkara tersebut tidak akan mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha BNI secara material.

Selain yang dijelaskan di atas, BNI tidak memiliki perkara lainnya yang dapat berdampak negatif secara material terhadap posisi keuangan konsolidasi BNI.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

BNI merupakan salah satu bank dan penyedia jasa keuangan di Indonesia, yang memiliki kombinasi yang unik antara sejarah panjang yang sukses, kepercayaan nasabah, pengakuan atas merek, skala dan cakupan produk dan jaringan yang ekstensif, serta proses transformasi yang sedang berlangsung dengan tujuan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Berdiri pada tahun 1946 dan BNI telah menjadi salah satu bank terkemuka di industri perbankan di Indonesia sepanjang sejarah panjang BNI, saat ini BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia dalam hal jumlah aset, jumlah kredit dan jumlah dana pihak ketiga berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia per 30 Juni 2010. BNI merupakan bank terbesar ke-4 dalam hal jaringan kantor cabang Indonesia (tanpa mengikutsertakan cabang-cabang mikro atau unit pedesaan dari bank-bank di Indonesia lainnya). Per tanggal 30 September 2010 BNI memiliki 1.054 kantor cabang dan kantor cabang pembantu serta 58 kantor cabang dan kantor cabang pembantu Syariah melalui Anak Perusahaan, yaitu BNI Syariah, 51 Sentra Kredit Kecil, 20 Sentra Kredit Menengah, 12 Sentra Kredit Konsumen, 24 sentra BNI Emerald dan 4.072 mesin ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk melengkapi platform jaringan distribusi yang luas, BNI juga menyediakan jasa layanan SMS Banking dan Internet Banking. Per tanggal 30 September 2010, BNI mencatat total aset sebesar Rp224.811 miliar, Rp126.074 miliar total kredit, Rp33.037 miliar Obligasi Pemerintah, Rp183.772 miliar total dana pihak ketiga dan sekitar Rp11,7 juta jumlah rekening nasabah (sekitar 330.000 rekening pinjaman dan lebih dari 11,4 juta rekening simpanan).

BNI bertujuan untuk terus meningkatkan fokus pada nasabah, kualitas layanan dan kinerja untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi BNI di sektor perbankan Indonesia. BNI menawarkan produk dan jasa keuangan yang komprehensif dan kompetitif untuk memenuhi kebutuhan nasabah melalui berbagai jaringan distribusi, dan layanan perbankan tradisional seperti (pembiayaan dan penarikan deposito), layanan treasury dan layanan investasi. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh BNI juga meliputi kredit sindikasi (*loan syndication*), pembiayaan dagang (*trade financing*) dan produk valuta asing (*foreign exchange*). BNI menjalin hubungan yang baik dan telah terbina lama dengan berbagai grup korporasi swasta/BUMN dan lembaga-lembaga/institusi Pemerintah lainnya. BNI juga menyalurkan kredit kepada sektor usaha kecil dan menengah serta kredit konsumen. Meskipun pada mulanya penyaluran kredit kepada sektor korporasi merupakan fokus utama dalam aktivitas pembiayaan BNI, namun demikian pemberian kredit kepada usaha kecil dan menengah serta kredit konsumen telah menjadi komponen yang semakin signifikan dalam pembiayaan BNI, hal ini tercermin dari diversifikasi jenis kredit (*loan mix*) yang diberikan untuk nasabah korporasi, komersial dan konsumen. Selain bergerak dalam bisnis intinya, BNI juga bergerak dalam jasa keuangan lainnya, seperti usaha sekuritas, multifinance dan asuransi.

Kegiatan operasional BNI di luar negeri berlokasi di kota-kota yang menjadi pusat perdagangan dan keuangan internasional. BNI merupakan bank Indonesia pertama yang mendirikan kantor cabang di luar negeri dan saat ini memiliki jaringan kantor cabang aktif di Hong Kong, London, Singapura dan Tokyo serta Kantor Agency di New York.

2. Sejarah, Rekapitalisasi dan Restrukturisasi

BNI didirikan pada tahun 1946 sebagai bank sentral Republik Indonesia. Pada tahun 1955 BNI menghentikan fungsi sebagai bank sentral dan fokus pada pertumbuhan ekonomi nasional, terutama pada kegiatan ekspor dan impor. Pada tahun 1968 status BNI berubah menjadi bank komersial milik negara. Pada bulan November tahun 1996, BNI melakukan penawaran umum saham perdana sebesar 25,0% dari saham biasa kepada investor domestik maupun internasional serta mencatatkan saham seri B pada BEJ dan BES, menjadikan BNI sebagai bank milik negara pertama di Indonesia yang menjadi perusahaan terbuka.

Sebagai dampak dari krisis ekonomi di kawasan Asia pada tahun 1997 dan beberapa kesulitan yang dialami sektor perbankan, pada tahun 2000 pemerintah melakukan rekapitalisasi kepada BNI, sehingga kepemilikan BNI hampir seluruhnya dikuasai oleh negara. Sebagai salah satu langkah dari rekapitalisasi ini, BNI membeli Rp61.800 miliar obligasi pemerintah dengan dana yang diperoleh dari pemerintah. Sampai dengan 30 September 2010, BNI memiliki Rp33.037 miliar obligasi pemerintah.

Pada tahun 2003, BNI melakukan restrukturisasi besar pada kegiatan operasional. Untuk menjalankan restrukturisasi tersebut BNI mengambil langkah untuk mengganti beberapa anggota Direksi, Komisaris dan Senior Manajemen dengan pejabat baru. Pada bulan April tahun 2004, BNI memulai uji coba sistem informasi teknologi *core banking* yang baru dengan tujuan untuk meningkatkan sistem dan prosedur manajemen risiko organisasi, termasuk kontrol kredit, kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah serta manajemen sumber daya manusia. Pada tahun 2005, seluruh sistem informasi teknologi *core banking* BNI yang baru sudah dapat berjalan secara penuh.

Pada tahun 2007, BNI mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD yang dicatatkan pada BEJ dan BES. Setelah penawaran tersebut, jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat meningkat menjadi 23,6%

3. Program Transformasi

Pada tahun 2008, BNI memfokuskan kembali visi dan misi untuk menjadi pemimpin pasar baik dalam hal layanan diberikan dan juga kinerja yang dihasilkan. BNI telah menerapkan dan menjalankan rencana untuk meningkatkan distribusi dan juga meningkatkan sistem manajemen risiko sebagai salah satu langkah dalam proses transformasi BNI. Sebagai contoh, BNI berencana untuk menyempurnakan prinsip *"Four eyes"* untuk pemberian kredit pada awal tahun 2011, dimana credit analyst BNI akan melakukan analisis terhadap risiko kredit secara independen tanpa campur tangan dari business manager, selanjutnya persetujuan atas kredit yang diberikan harus disetujui oleh divisi risiko kredit dan juga business manager. BNI juga melatih 40 kandidat yang akan menduduki posisi senior manajemen sebagai salah satu langkah program pengembangan kepemimpinan untuk senior manajemen yang diharapkan dapat mengembangkan tim manajemen BNI di masa yang akan datang.

BNI menggunakan pendekatan *"customer centric"* dalam melakukan transformasi terhadap usaha perbankan yang dimiliki. Sebagai bagian dari pendekatan ini, BNI akan fokus terhadap kebutuhan nasabah dengan mengambil langkah yang konkrit untuk memahami kebutuhan dan membangun hubungan yang lebih erat dengan setiap nasabah. BNI percaya dengan perubahan pendekatan dari pendekatan *"product centric"* ke pendekatan *"customer centric"* dapat membuat BNI dapat melayani nasabah dengan lebih baik melalui penyesuaian strategi dan model operasional yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Proses transformasi ini memerlukan modifikasi pada model operasional yang dimiliki oleh BNI, dimana akan dilakukan konfigurasi ulang pada portofolio bisnis kepada dua bidang utama dimana BNI memiliki keunggulan kompetitif, yaitu bisnis perbankan dan bisnis perbankan konsumen dan retail. Hal ini dilakukan agar BNI dapat melayani dengan lebih para nasabah besar BNI dan dapat menjadi BNI sebagai penyedia jasa solusi keuangan pilihan. BNI berencana untuk melayani berbagai jenis nasabah, mulai dari konsumen, pengusaha individu, usaha skala kecil dan menengah, hingga nasabah perusahaan besar.

Selain itu, BNI telah mengambil langkah untuk menanamkan budaya sadar risiko (*risk awareness*) di semua jenjang karyawan dengan memberikan pemahaman dan kesadaran atas risiko yang terdapat pada setiap aspek pekerjaan mereka, sebagai contoh dengan menyertakan diskusi/pembahasan tentang manajemen risiko pada website internal BNI serta dengan mengikutsertakan karyawan pada program sertifikasi manajemen risiko.

Sebagai tambahan, BNI juga berencana untuk merevitalisasi dan meningkatkan unit bisnis strategis yang dimiliki.

4. Keunggulan Kompetitif BNI

Sejarah panjang dan posisi yang kuat di pasar khususnya di Indonesia memberikan BNI beberapa kelebihan dibandingkan dengan para pesaingnya. BNI berkeyakinan bahwa keunggulan kompetitif yang dimiliki dapat menjaga stabilitas dan pertumbuhan dalam melewati krisis keuangan global. Selain itu, keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh BNI memungkinkan untuk memanfaatkan peluang yang ada seiring, dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang kuat dan dinamis. Adapun keunggulan kompetitif BNI yang dimiliki oleh BNI adalah sebagai berikut:

- ***Reputasi dan sejarah panjang yang kuat dan stabil sebagai bank terkemuka di Indonesia.***

Pada awalnya BNI didirikan sebagai bank sentral Indonesia pada tahun 1946 dan telah menjadi pemain terkemuka di sektor perbankan Indonesia sejak BNI menjalankan kegiatan operasionalnya pada tahun 1955. Pada tahun 1996, BNI merupakan bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik dan tercatat pada BEI. Sebagai bank terkemuka di Indonesia selama lebih dari setengah abad, BNI berkeyakinan bahwa BNI memiliki reputasi yang baik dan nama BNI merupakan salah satu lembaga keuangan terkemuka yang paling dikenal di Indonesia. Sebagai contoh pada tahun 2009, pada saat sektor perbankan mengalami masalah likuiditas karena krisis perekonomian global, BNI justru mengalami peningkatan yang pada simpanan nasabah, hal yang tidak terjadi pada sebagian besar bank swasta di Indonesia, hal ini mencerminkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan yang sangat tinggi terhadap BNI. Pada Tahun 2004, BNI menyelesaikan program peremajaan merek untuk modernisasi *image* perusahaan dan melakukan renovasi kantor cabang untuk merubah BNI menjadi bank yang terus berkembang, modern dan fokus untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat di Indonesia. BNI berkeyakinan bahwa dengan nama besar BNI di industri perbankan, BNI memiliki platform yang kuat untuk memasarkan produk dan layanan yang dimilikinya. Sebagai pengakuan atas kualitas pelayanan yang tinggi, BNI dipilih sebagai salah satu dari sepuluh bank terbaik dalam hal service excellence di Indonesia dan memperoleh penghargaan dari Market Research Institute dan InfoBank selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2007, 2008 dan 2009.

- **Platform jaringan distribusi yang luas dan ekstensif**

BNI memiliki platform jaringan distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan 1.054 kantor cabang serta kantor cabang dan kantor cabang pembantu Syariah melalui Anak Perusahaan yaitu BNI Syariah, 51 sentra kredit kecil, 20 sentra kredit menengah, 12 sentra kredit konsumen, 24 sentra BNI Emerald dan 4.072 mesin ATM per 30 September 2010. BNI menempati posisi bank terbesar ke-4 di Indonesia dalam hal total aset, total kredit dan dana pihak ketiga per 30 Juni 2010 berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Per tanggal 30 September 2010, BNI mencatat total aset sebesar Rp224.811 miliar, Rp126.074 miliar total kredit, Rp183.772 miliar total dana pihak ketiga. Jaringan kantor cabang BNI yang luas didukung oleh jumlah tenaga penjualan yang besar untuk perbankan personal dan korporasi. BNI memiliki jaringan elektronik perbankan yang maju dan efisien terdiri dari ATM dan layanan perbankan yang ditawarkan melalui internet, telepon dan telepon selular. Dengan jaringan distribusi yang luas dan ekstensif, BNI memiliki platform penjualan yang kuat untuk mendapatkan nasabah baru, mempererat hubungan dengan nasabah lama dan memperoleh posisi terdepan dalam produk dan layanan perbankan yang baru.

- **Basis nasabah yang besar dengan kualitas yang tinggi.**

BNI memiliki hubungan yang erat dengan basis nasabah korporasi besar, nasabah usaha kecil dan menengah dan nasabah retail. Hal ini memungkinkan BNI secara efektif dan efisien menjalankan pendekatan *value chain* dalam mendapatkan nasabah baru dan juga dalam melakukan *cross selling* produk dan layanan yang dapat memperluas dan mempererat hubungan antara nasabah dengan BNI. BNI menawarkan produk dan layanan kepada 962 rekening nasabah korporasi besar, 71.912 rekening nasabah usaha kecil dan menengah, 206.629 rekening pinjaman konsumen dan lebih dari 10,8 juta rekening nasabah ritel. Sesuai dengan sejarah panjang BNI sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia, BNI memiliki hubungan yang sangat erat dengan perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia. Nasabah korporasi BNI meliputi perusahaan yang menjadi pemimpin di hampir setiap industri antara lain industri minyak dan gas bumi, bahan dasar, telekomunikasi, pembangkit listrik, agribisnis dan infrastruktur, industri-industri tersebut merupakan industri yang menjadi kunci pertumbuhan perekonomian Indonesia. BNI telah memberikan kredit kepada nasabah usaha kecil dan menengah, serta memberikan modal kepada banyak pemasok utama dan rekanan dari nasabah korporasi besar BNI. Pendekatan *value chain* dengan memperluas hubungan dengan pemasok dan rekanan yang termasuk dalam *value chain* bisnis nasabah memungkinkan BNI untuk membantu nasabahnya untuk tumbuh dan sukses

- **Dana pihak ketiga yang kuat dan biaya pendanaan yang rendah**

BNI merupakan salah satu bank dengan sumber dana pihak ketiga dari korporasi dan retail terkuat di Indonesia, yang memberikan sumber pendanaan dengan biaya yang rendah dan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan BNI. Per 30 Juni 2010 BNI merupakan bank dengan dana pihak ketiga terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. BNI memiliki Rp183.772 miliar dana pihak ketiga yang tersimpan dalam 11,4 juta rekening simpanan nasabah per 30 September 2010. BNI berkeyakinan bahwa, BNI merupakan salah satu pemimpin dalam pasar layanan *cash management* di Indonesia, hal ini memungkinkan BNI untuk menjaga dan menarik minat nasabah korporasi untuk menyimpan dananya dalam rekening di BNI. Pada tahun 2010, BNI memperoleh penghargaan dari Asiamoney sebagai “*Best Local Cash Management Bank*” di Indonesia berdasarkan pilihan dari perusahaan skala besar dan “*Best Local Cash Management Bank*” di Indonesia berdasarkan pilihan dari perusahaan skala menengah. Sebagai tambahan, jaringan kantor cabang BNI yang terletak di seluruh Indonesia, kemudahan layanan transaksi perbankan elektronik BNI, nama yang kuat dan reputasi yang baik di Indonesia memberikan BNI akses kepada dana pihak ketiga yang besar dan stabil baik dari nasabah retail maupun nasabah korporasi. BNI berkeyakinan bahwa dana pihak ketiga yang dimiliki oleh BNI, memungkinkan BNI untuk mempertahankan biaya dana yang rendah jika dibandingkan dengan pesaing lainnya di Indonesia.

- ***Fokus pada manajemen risiko dan sistem kontrol internal yang efektif***

Tim manajemen dan Karyawan BNI fokus dan berdedikasi untuk menjalankan sistem manajemen risiko yang cermat, selain itu BNI telah mengembangkan kerangka manajemen risiko yang komprehensif mencakup risiko kredit, likuiditas, pasar dan operasional. BNI secara berkesinambungan terus berusaha meningkatkan dan mengembangkan kerangka tersebut untuk dapat menjalankan manajemen risiko dan sistem kontrol internal yang terintegrasi dan komprehensif yang dapat membantu BNI untuk mencapai manajemen risiko terbaik dikelasnya yang memenuhi standar internasional. Dengan kerangka manajemen risiko yang komprehensif serta didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang canggih, memungkinkan BNI untuk mengelola risiko dengan lebih baik, termasuk untuk pengelolaan risiko kredit yang dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas aset BNI secara keseluruhan. BNI menjalankan proses check and balance secara independen dalam proses perpanjangan kredit dengan memisahkan proses pengajuan kredit, analisis kredit, layanan kredit dan fungsi pemantauan, selain itu BNI juga telah memisahkan divisi manajemen risiko dan divisi kepatuhan. Manajemen BNI berkomitmen untuk mencapai stabilitas keuangan, menciptakan nilai bagi pemegang saham secara berkelanjutan dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai salah satu bagian dari sistem internal, BNI telah membentuk komite internal untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan untuk melakukan penilaian dan pemantauan terhadap kebijakan internal untuk memastikan kesesuaian dengan Peraturan Bank Indonesia, prinsip dan prosedur perbankan serta standar internasional.

Pada tahun 2009, BNI menerima penghargaan “*Best Corporate Governance*” di Indonesia dari Euromoney berdasarkan hasil pilihan dari analisis saham di regional Asia-Pasifik.

- ***Manajemen yang berpengalaman dan fokus pada penciptaan nilai yang berkelanjutan.***

Senior Manajemen BNI memiliki pengalaman dan kepemimpinan yang ekstensif di Industri Perbankan Indonesia. Kemampuan manajemen BNI dalam memberikan arahan strategis dan menjalankan inisiatif bisnis di pasar yang kompetitif dapat terlihat pada posisi BNI yang kuat pada sektor perbankan Indonesia, profitabilitas yang meningkat dan kinerja harga saham yang kuat di tahun 2009 dan 2010. Selama dua tahun terakhir, Manajemen BNI telah berhasil menyelesaikan beberapa inisiatif strategis antara lain dengan pembuatan sistem peringatan dini untuk portofolio kredit dengan pemantauan secara aktif terhadap potensi NPL, penyelesaian terhadap NPL yang besar dan penerapan beberapa kebijakan penyisihan baru yang komprehensif. Selain itu, manajemen juga menginvestasikan banyak waktu dan sumber daya untuk memastikan bahwa BNI memiliki karyawan dengan keahlian yang tepat untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan dengan cara merekrut karyawan berkualitas dari pihak eksternal ataupun melalui pelatihan karyawan. BNI berkeyakinan bahwa rekam jejak ini menunjukkan senior manajemen BNI memiliki visi strategis, pendekatan yang pro-aktif dalam menyesuaikan diri dengan kondisi pasar dan kemampuan untuk memimpin bank komersial yang modern. BNI percaya bahwa senior manajemen yang dimiliki akan terus memberikan keunggulan yang penting dalam industri yang semakin kompetitif.

- ***Keberadaan yang kuat di perbankan Internasional***

BNI memiliki jejak internasional yang kuat yang memungkinkan BNI untuk memberikan pelayanan atas kebutuhan perbankan internasional secara lebih baik kepada nasabah korporasi dan retail dibandingkan dengan bank di Indonesia lainnya. BNI memiliki 4 kantor cabang di luar negeri yaitu di Hong Kong, London, Singapura dan Tokyo serta satu kantor agency di New York dan per 30 September 2010 BNI memiliki 51 “Smart Remittance System” untuk memberikan layanan pengiriman uang di 11 negara dan 8 remittance representative di 5 negara. Kantor Cabang BNI di Singapura, Hong Kong dan Tokyo memberikan pelayanan produk dan jasa perbankan secara penuh, sedangkan kantor cabang di London dan agency New York memberikan akses penting kepada sentra keuangan penting di dunia. BNI memiliki jaringan dengan 1.425 bank koresponden di luar negeri dan 76 bank koresponden bank di dalam negeri, selain itu BNI juga memiliki kerjasama strategis dengan institusi penting antara lain dengan The Bank of New York Mellon Corporation, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Malaya Banking Berhad dan SingPost untuk melayani kebutuhan nasabah secara global. Jaringan internasional yang dimiliki oleh BNI memungkinkan untuk memberikan layanan kepada nasabah yang ingin mengembangkan bisnis diluar negeri.

5. Strategi Usaha

Tujuan strategi jangka panjang BNI adalah untuk memperkuat posisi pasar BNI di Indonesia dan merubah BNI dari bank dengan pendekatan *"product centric"* menjadi bank dengan pendekatan *"customer centric"* kelas dunia. BNI berusaha untuk memaksimalkan *shareholders value* berdasarkan strategi yang tepat untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. BNI berusaha keras meningkatkan standar agar sejajar dengan standar lembaga keuangan internasional melalui peningkatan fokus terhadap kebutuhan para nasabah, memperkuat produk dan layanan utama yang ditawarkan, manajemen yang aktif dalam mengelola portofolio kredit, mengembangkan sumber daya manusia dan memperkuat manajemen risiko serta tata kelola perusahaan. Adapun strategi usaha yang dilakukan BNI adalah sebagai berikut:

- ***Mengembangkan kegiatan usaha Business Banking Group dengan berfokus pada industri terpilih di setiap wilayah geografis di Indonesia secara hati-hati.***

BNI telah menyesuaikan kembali target industri untuk bisnis perbankan pada setiap wilayah geografis di Indonesia untuk mempererat hubungan dengan nasabah lama dan menyeimbangkan risiko yang terkait dengan nasabah dan konsentrasi industri. BNI fokus pada pengembangan kredit di setiap sub-wilayah geografis pada industri terpilih yang diyakini dapat memberikan kualitas kredit yang lebih baik dan memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Divisi Korporasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah bekerja sama dengan erat untuk meningkatkan keahlian BNI pada industri terpilih dan untuk memperkuat hubungan BNI dengan nasabah dalam setiap *value* dan *supply chain* yang dimiliki oleh nasabah korporasi besar serta nasabah usaha kecil dan menengah pada industri tersebut. Konsep membuat BNI dapat menyesuaikan produk dan layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah dan meningkatkan kemampuan BNI untuk melakukan identifikasi atas peluang dan juga mengelola risiko pada setiap segemen industri. Untuk tahun 2010, target industri untuk Divisi Korporasi BNI antara lain industri minyak dan gas bumi, telekomunikasi, kimia, agribisnis, makanan dan minuman, retail dan grosir, pembangkit listrik, engineering dan konstruksi (infrastruktur). BNI akan terus menyesuaikan target industri agar sesuai dengan perubahan pada kondisi pasar.

- ***Menyediakan produk dan layanan yang tepat di seluruh tahap kehidupan nasabah ritel kami***

Strategi pertumbuhan grup bisnis perbankan konsumen dan retail BNI adalah untuk menjadi mitra perbankan seumur hidup bagi nasabah individu, BNI mengembangkan model operasional berbasis pelanggan (*"Customer Centric"*) untuk meningkatkan kolaborasi diantara tim BNI untuk berbagai macam produk seperti deposito, pinjaman, pengiriman uang dan *wealth management* dan secara lebih luas dengan BNI Securities, BNI Life Insurance, BNI Multifinance dan BNI Syariah untuk menyediakan produk dan layanan yang komprehensif secara keseluruhan mampu memenuhi kebutuhan nasabah. Untuk meningkatkan efektifitas dari program-program tersebut BNI mengembangkan sistem *customer relationship management* yang dapat mengumpulkan semua informasi nasabah yang dimiliki oleh BNI dan anak perusahaannya sehingga pemahaman dari setiap kebutuhan nasabah dapat diketahui secara komprehensif. Selain itu, BNI melakukan segmentasi nasabah untuk meningkatkan *cross-selling* secara efektif dan meningkatkan jumlah layanan keuangan yang digunakan oleh nasabah, terutama kepada keluarga dengan pendapatan menengah dan individu dengan pendapatan tinggi (*high net worth individual*).

- ***Mengelola portofolio kredit secara Aktif***

BNI secara fokus menerapkan manajemen aktif dalam mengelola portofolio kredit, terutama NPL dan kredit *off balance sheet* yang dihapus buku, untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. BNI telah memperkuat Divisi manajemen risiko dan pemulihan kredit untuk memonitor, mengelola dan melakukan pemulihan kredit secara lebih baik pada portofolio kredit BNI. BNI berencana untuk lebih pro-aktif dalam melakukan interaksi dengan nasabahnya dalam melakukan restrukturisasi NPL yang dilakukan dengan cara melakukan identifikasi masalah pada tahap awal dan memulai proses restrukturisasi sedini mungkin. Selain itu, BNI telah menjalankan program untuk melakukan peninjauan kembali dan memonitor kredit yang telah dihapuskan dari neraca, mempercepat dan meningkatkan pemulihan terhadap kredit tersebut. Kredit yang telah dihapus buku oleh BNI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 serta untuk periode 9 bulan yang berakhir tanggal 30 September 2010 adalah masing-masing sebesar Rp1.111 miliar, Rp4.246 miliar, dan Rp3.331 miliar serta Rp3.974 miliar.

- **Meningkatkan tata kelola perusahaan dan kemampuan manajemen risiko secara berkelanjutan.**

BNI berkeyakinan bahwa penerapan manajemen risiko secara aktif dan budaya manajemen risiko adalah komponen yang sangat penting dalam strategi bisnis bank yang mempengaruhi keberhasilan BNI secara keseluruhan. Untuk itu, BNI secara fokus mengembangkan budaya manajemen risiko di seluruh bagian organisasi BNI dan meningkatkan akuntabilitas melalui program pelatihan yang berkesinambungan. Melalui kebijakan, prosedur, batas persetujuan kredit dan fungsi manajemen risiko yang independen dan terpusat, BNI akan terus meningkatkan sistem manajemen risiko dengan tujuan menyesuaikan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh BNI dengan standar internasional yang terbaik. Selain itu, BNI juga terus berusaha meningkatkan independensi dari fungsi kontrol internal dan meningkatkan *bank-wide internal control systems*. BNI menerapkan perubahan untuk memperbaiki struktur tata kelola internal perusahaan untuk memastikan bahwa tata kelola internal berjalan dengan baik dan konsisten, selain itu BNI juga memperbaiki manajemen aset dan kewajiban agar dapat meyelaraskan tujuan manajemen dengan tujuan pemegang saham dengan lebih baik. BNI akan terus mendedikasikan sumber daya dan perhatian manajemen untuk meningkatkan kerangka manajemen risiko agar dapat menjalankan manajemen risiko dan sistem kontrol internal yang terintegrasi dan komprehensif.

- **Melakukan regenerasi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan**

BNI terus mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki melalui berbagai inisiatif agar dapat mendukung strategi bisnis. BNI berkeyakinan bahwa sumber daya manusia adalah faktor yang penting dalam kesuksesan penerapan strategi bisnis. Sejak tahun 2009, BNI telah melakukan perekrutan penting untuk beberapa area penting antara lain, manajemen risiko, bisnis usaha menengah dan kartu kredit, selain itu, BNI juga memperkuat manajemen level senior dan level menengah melalui perekrutan 69 profesional dari pihak eksternal. Fokus BNI adalah untuk terus memperkuat kemampuan eksekusi, meningkatkan akuntabilitas dan membuat insentif atas kinerja. BNI terus melakukan penempatan karyawan berdasarkan kebutuhan bisnis yang terus berubah dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara organisasi. BNI secara reguler mengadakan pelatihan yang ekstensif untuk meningkatkan pengetahuan mengenai produk, pejualan, kemampuan marketing, kemampuan manajemen risiko yang dimiliki oleh karyawan. BNI juga telah mengembangkan fasilitas *e-learning* sebagai langkah pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkelanjutan.

6. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha BNI dilakukan melalui unit-unit bisnis berikut ini:

- **Business Banking Group** BNI terdiri dari Divisi Korporasi, Divisi Usaha Kecil dan Menengah, Divisi *Transactional Banking Services*, Divisi Jasa Keuangan dan Dana Institusi.
 - a. Divisi Korporasi. BNI memberikan kredit, termasuk kredit modal kerja, kredit investasi, kredit sindikasi, serta *corporate finance services*, termasuk cash management baik untuk institusi pemerintah maupun perusahaan swasta di berbagai industri, selain itu BNI juga mengelola deposito beberapa nasabah perbankan institusi. Divisi Korporasi terbagi menjadi dua divisi, yaitu Divisi Korporasi I yang melayani industri minyak dan gas bumi, telekomunikasi, infrastruktur, pembangkit listrik dan kimia; serta Divisi Korporasi II yang melayani industri agribisnis dan industri yang terkait untuk institusi Pemerintah/BUMN dan nasabah swasta.
 - b. Divisi Usaha Kecil dan Divisi Usaha Menengah. BNI memberikan layanan produk dan jasa perbankan komersial kepada usaha kecil dan menengah diberbagai jenis industri.
 - c. Divisi *Transactional Banking Services*. BNI memberikan layanan *cash management*, termasuk penarikan dana, pengeluaran dana, manajemen likuiditas dan investasi pada berbagai instrumen, terutama kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia, perusahaan multi-nasional besar dan usaha menengah.
 - d. Divisi Jasa Keuangan dan Dana Institusi. BNI memiliki fungsi untuk memperoleh dan mengelola dana pihak ketiga dari nasabah institusi.
 - e. Divisi Kredit Khusus. BNI bertanggung jawab untuk mengelola restrukturisasi dan recovery kredit korporasi yang bermasalah dan melapor langsung kepada *Chief of Business Risk Officer*.
- **Consumer & Retail Group** memberikan berbagai layanan jasa perbankan konsumen kepada nasabah individu dan rumah tangga, termasuk produk pembiayaan dan simpanan melalui Divisi Kredit Konsumen, Divisi Dana dan Jasa Konsumen, kartu kredit dan debit melalui Divisi Kartu Kredit dan dana pensiun melalui Divisi Dana Pensiun Lembaga Keuangan. *Consumer & Retail Group* memiliki Divisi *Wealth Management* yang memberikan layanan perbankan secara komprehensif kepada *high net worth individual*. BNI memberika jasa dan layanan perbankan yang lengkap seperti *Bancassurance* dan produk investasi seperti reksadana melalui BNI Emerald kepada para nasabah tersebut.

- **Bisnis Syariah** menawarkan produk dan jasa pembiayaan serta pendanaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah.
- **Bisnis Perbankan Internasional** melakukan pengelolaan kegiatan kantor cabang di luar negeri, juga kegiatan ekspor, impor dan remittance di Indonesia. BNI memberikan kredit kepada nasabah internasional yang terdiri dari nasabah domestik yang melakukan kegiatan usaha di luar negeri dan melakukan partisipasi dalam kredit sindikasi asing.
- **Bisnis Tresuri** memberikan berbagai layanan produk tresuri dan layanan pasar modal, terutama bagi nasabah korporasi dan BUMN dan bertanggung jawab dalam mengelola likuiditas, portofolio efek dan posisi valuta asing.

Nasabah

BNI menggolongkan perusahaan (baik Swasta maupun BUMN) yang dilayani oleh kegiatan usaha dalam negeri BNI sebagai nasabah korporasi yang ditangani oleh Bisnis Perbankan Korporasi, atau nasabah komersial yang ditangani oleh Bisnis Perbankan Usaha Kecil dan Menengah. Klasifikasi nasabah perusahaan BNI, baik korporasi maupun komersial, sebagian besar didasarkan pada pendapatan tahunan nasabah tersebut, nilai kredit yang diberikan ataupun nilai kredit yang diminta.

Pada umumnya, BNI melakukan kategorisasi perusahaan dengan omzet penjualan tahunan lebih dari Rp200 miliar per tahun untuk perusahaan individu, (atau lebih dari Rp400 miliar per tahun untuk grup perusahaan) dan atau perusahaan yang mencari pinjaman dengan nilai pinjaman lebih dari Rp100 miliar untuk perusahaan individu, (atau lebih dari Rp150 miliar untuk grup perusahaan) sebagai nasabah korporasi kecuali untuk nasabah pinjaman penerusan (fasilitas kredit yang didapatkan dari institusi pendanaan internasional melalui Bank Indonesia dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk membiayai investasi sosial ekonomi dan proyek-proyek di Indonesia) yang diklasifikasikan sebagai nasabah perbankan komersial. BNI juga mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam melakukan klasifikasi terhadap nasabah yaitu keinginan nasabah (customer preference), bila nasabah tersebut memenuhi salah satu atau lebih, namun tidak seluruh persyaratan yang ditentukan. Nasabah yang tidak diklasifikasikan sebagai nasabah perbankan korporasi diklasifikasikan sebagai nasabah komersial / UKM.

BNI menggolongkan nasabah yang dilayani oleh kegiatan usaha luar negeri BNI sebagai nasabah perbankan internasional yang ditangani oleh Bisnis Internasional. BNI juga melakukan penggolongan nasabah individual yang dilayani oleh kegiatan usaha domestik BNI, dengan tidak mengikutsertakan kegiatan usaha Syariah, sebagai nasabah konsumen yang ditangani oleh Bisnis Perbankan Konsumer BNI. Sedangkan nasabah yang dilayani oleh kegiatan usaha Syariah BNI sebagai nasabah Syariah yang ditangani oleh Bisnis Syariah BNI.

Berdasarkan data historikal, sebagian besar bisnis BNI berasal dari nasabah korporasi, walaupun BNI telah meningkatkan fokusnya pada bisnis komersial dan konsumen. Per 30 September 2010, BNI memberikan kredit sejumlah Rp46.284 miliar, atau 36,7% kepada nasabah korporasi, Rp50.834 miliar atau 40,3% kepada nasabah komersial (terdiri dari nasabah usaha menengah dan nasabah usaha kecil), Rp20.890 miliar atau 16,6% kepada nasabah konsumen dan ritel, Rp4.811 miliar atau 3,8% kepada nasabah internasional dan Rp3.255 miliar atau 2,6% kepada nasabah syariah. Sedangkan per 30 September 2010, produk simpanan BNI sejumlah Rp88.369 miliar atau 48,1% berasal dari nasabah BUMN dan perusahaan swasta korporasi, serta Rp90.500 miliar atau 49,2% berasal dari nasabah perorangan dan Rp4.903 miliar atau 2,7% berasal dari nasabah Syariah.

Portofolio Kredit

Per 30 September 2010, total portofolio kredit BNI adalah sebesar Rp126.074 miliar (termasuk tagihan kartu kredit outstanding dan kredit karyawan). Per 30 September 2010, BNI merupakan bank terbesar keempat di Indonesia berdasarkan kredit yang diberikan menurut laporan keuangan publikasi bank-bank Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tertanggal 30 Juni 2010.

Tabel berikut menunjukkan total portofolio kredit yang diberikan oleh BNI pada tanggal-tanggal di bawah ini yang dibagi berdasarkan Grup Bisnis:

(dalam miliaran Rupiah, kecuali untuk kolom "% dari total" yang disajikan dalam persentase)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember								Pada tanggal 30 September					
	2005		2006		2007		2008		2009		2009 (tidak diaudit)		2010	
	Kredit yang diberikan	% dari Total	Kredit yang diberikan	% dari Total	Kredit yang diberikan	% dari Total	Kredit yang diberikan	% dari Total	Kredit yang diberikan	% dari Total	Kredit yang diberikan	% dari Total	Kredit yang diberikan	% dari Total
Portofolio Kredit														
Korporasi	21.640	34,5	22.942	34,5	29.648	33,4	37.467	33,5	40.717	33,7	42.346	34,7	46.284	36,7
Komersial / UKM	25.056	40,0	27.954	42,1	38.155	43,0	47.879	42,8	53.612	44,4	51.866	42,5	50.834	40,3
Konsumer	11.369	18,2	10.582	15,9	13.188	14,9	17.198	15,4	18.515	15,3	18.237	14,9	20.890	16,6
Internasional	3.766	6,0	3.849	5,8	5.860	6,6	6.285	5,6	4.734	3,9	6.215	5,1	4.811	3,8
Divisi Usaha Syariah	827	1,3	1.133	1,7	1.801	2,0	3.165	2,8	3.265	2,7	3.452	2,8	3.255	2,6
Total	62.658	100,0	66.460	100,0	88.651	100,0	111.994	100,0	120.843	100,0	122.116	100,0	126.074	100,0

Distribusi Kredit Yang Diberikan

Distribusi Industri

Tabel berikut ini menunjukkan fasilitas pinjaman yang telah diberikan BNI diklasifikasikan berdasarkan industri debitur dan persentase dari pinjaman yang telah diberikan dalam Rupiah dan mata uang asing, sebagai indikasi pada tanggal tertentu. Sektor industri yang digunakan di bawah ini mengikuti klasifikasi industri dari Bank Indonesia.

(dalam miliaran Rupiah, kecuali untuk kolom "% dari total" yang disajikan dalam persentase)

Uraian	31 Desember								30 September					
	2005		2006		2007		2008		2009		2010			
	Kredit yang diberikan	% dari Total	Kredit yang diberikan	% dari Total	Kredit yang diberikan	% dari Total	Kredit yang diberikan	% dari Total	Kredit yang diberikan	% dari Total	Kredit yang diberikan	% dari Total		
Rupiah														
Perindustrian	13.530	21,6	14.529	21,9	16.325	18,4	20.951	18,7	22.174	18,3	23.257	18,4		
Perdagangan, Restoran & Hotel	10.993	17,5	12.830	19,3	15.767	17,8	18.652	16,7	22.367	18,5	21.782	17,3		
Pertanian	1.988	3,2	2.139	3,2	3.072	3,5	4.098	3,7	7.213	6,0	8.603	6,8		
Jasa Dunia Usaha	3.381	5,4	4.652	7,0	6.562	7,4	10.828	9,7	13.011	10,8	10.220	8,1		
Konstruksi	3.261	5,2	3.390	5,1	4.100	4,6	5.062	4,5	5.557	4,6	8.915	7,1		
Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi	1.749	2,8	2.371	3,6	3.447	3,9	6.725	6,0	8.282	6,9	8.383	6,6		
Jasa Pelayanan Sosial	2.588	4,1	466	0,7	652	0,7	950	0,8	1.392	1,2	1.224	1,0		
Pertambangan	239	0,4	326	0,5	489	0,6	805	0,7	2.443	2,0	2.225	1,8		
Listrik, Gas & Air	194	0,3	249	0,4	317	0,4	2.370	2,1	3.537	2,9	3.652	2,9		
Lain-lain ⁽¹⁾	9.771	15,6	10.818	16,3	14.591	16,5	19.048	17,0	18.854	15,6	22.886	18,2		
Jumlah Rupiah	47.693	76,1	51.771	77,9	65.322	73,7	89.489	79,9	104.830	86,7	111.146	88,2		
Mata Uang Asing⁽²⁾														
Perindustrian	7.675	12,2	7.025	10,6	8.980	10,1	8.178	7,3	6.052	5,0	5.655	4,5		
Perdagangan, Restoran & Hotel	691	1,1	1.163	1,7	1.937	2,2	2.365	2,1	2.097	1,7	2.003	1,6		
Pertanian	561	0,9	508	0,8	952	1,1	1.108	1,0	571	0,5	311	0,2		
Jasa Dunia Usaha	560	0,9	684	1,0	1.005	1,1	1.146	1,0	417	0,3	352	0,3		
Konstruksi	525	0,8	569	0,9	633	0,7	482	0,4	175	0,1	28	0,0		
Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi	608	1,0	241	0,4	294	0,3	387	0,3	213	0,2	374	0,3		
Jasa Pelayanan Sosial	43	0,1	46	0,1	41	0,0	23	0,0	19	0,0	-	-		
Pertambangan	431	0,7	1.053	1,6	3.888	4,4	2.525	2,3	1.385	1,1	1.872	1,5		
Listrik, Gas & Air	2.230	3,6	2.343	3,5	3.960	4,5	4.315	3,9	3.320	2,7	1.712	1,4		
Lain-lain ⁽¹⁾	1.643	2,6	1.056	1,6	1.639	1,8	1.974	1,8	1.763	1,5	2.622	2,1		
Jumlah Mata Uang Asing	14.966	23,9	14.689	22,1	23.329	26,3	22.506	20,1	16.013	13,3	14.928	11,8		
Jumlah	62.659	100,0	66.460	100,0	88.651	100,0	111.994	100,0	120.843	100,0	126.074	100,0		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.328)		(3.846)		(5.436)		(5.652)		(6.920)		(6.529)			
Bersih	58.331		62.614		83.215		106.342		113.923		119.544			

Catatan:

- "Lain-lain" termasuk pinjaman konsumen dan pinjaman yang tidak dapat diklasifikasikan dengan jelas berdasarkan klasifikasi Bank Indonesia.
- Pinjaman dalam mata uang asing sebagian besar dalam mata uang Dollar AS, Euro, Dollar Singapura dan Yen

Portofolio Dana Pihak Ketiga

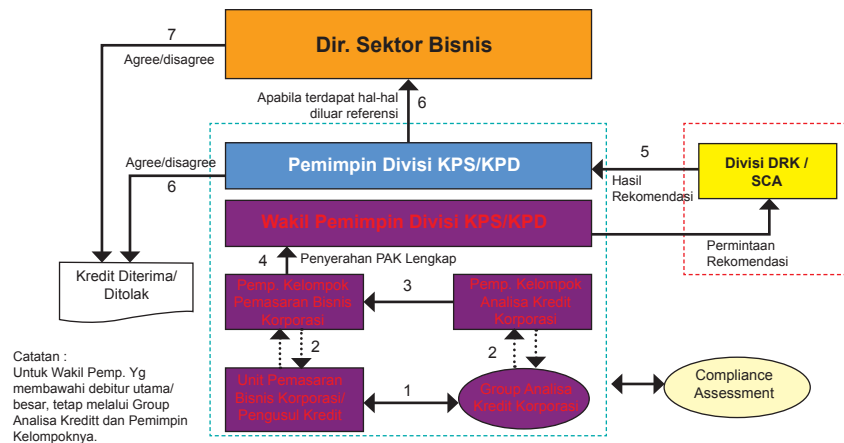
Dengan total portofolio dana pihak ketiga sebesar Rp183.772 miliar per 30 September 2010, BNI merupakan bank terbesar keempat di Indonesia berdasarkan dana pihak ketiga, menurut keuangan publikasi bank-bank Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tertanggal 30 Juni 2010. Tabel berikut menunjukkan total konsolidasi produk dan pihak ketiga berdasarkan jenis:

(dalam miliaran Rupiah, kecuali untuk kolom "% dari total" yang disajikan dalam persentase)

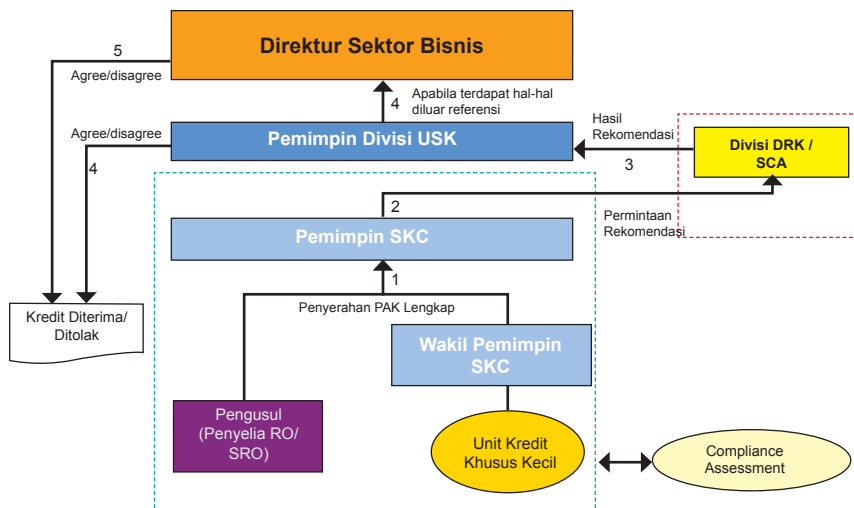
Uraian	Pada tanggal 31 Desember								Pada tanggal 30 September					
	2005		2006		2007		2008		2009		2009 (tidak diaudit)		2010	
	Jumlah	% dari total	Jumlah	% dari total	Jumlah	% dari total	Jumlah	% dari total	Jumlah	% dari total	Jumlah	% dari total	Jumlah	% dari total
Institusi														
BUMN/Institusi Pemerintah	26.018	22,6	32.789	24,1	34.342	23,5	35.735	21,9	36.802	19,5	30.607	18,7	36.402	19,8
Perusahaan Swasta	29.607	25,7	36.989	27,2	35.761	24,5	42.499	26,0	57.119	30,3	46.785	28,6	51.967	28,3
Individu	58.891	51,0	64.898	47,8	74.293	50,8	81.896	50,2	90.374	48,0	82.504	50,4	90.500	49,2
Syariah	856	0,7	1.120	0,8	1.792	1,2	3.034	1,9	4.173	2,2	3.758	2,3	4.903	2,7
Total	115.372	100,0	135.797	100,0	146.189	100,0	163.164	100,0	188.469	100,0	163.654	100,0	183.772	100,0

Skema penyaluran dana dari persetujuan kredit yang diberikan oleh BNI.

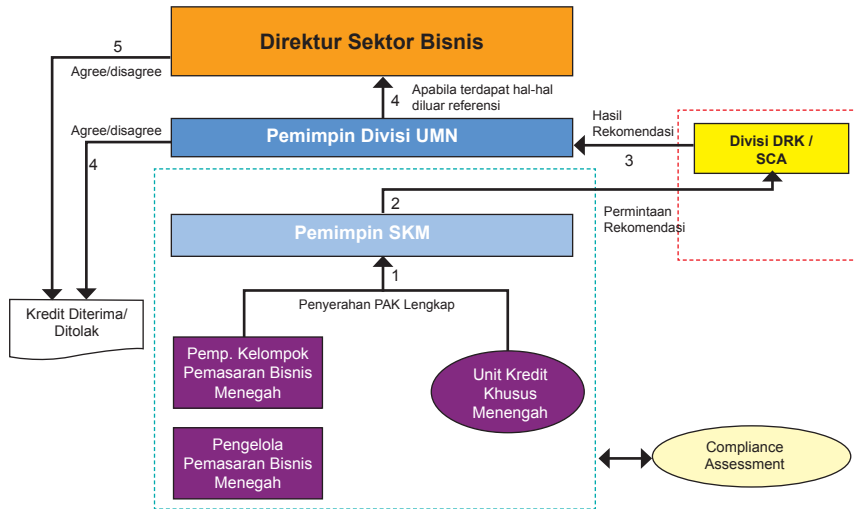
a. Kredit Korporasi



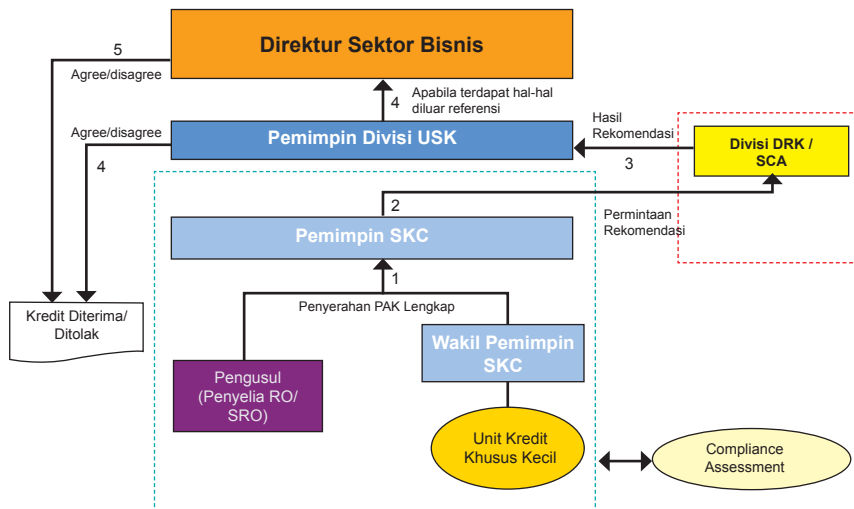
b. Kredit Divisi Usaha Menengah



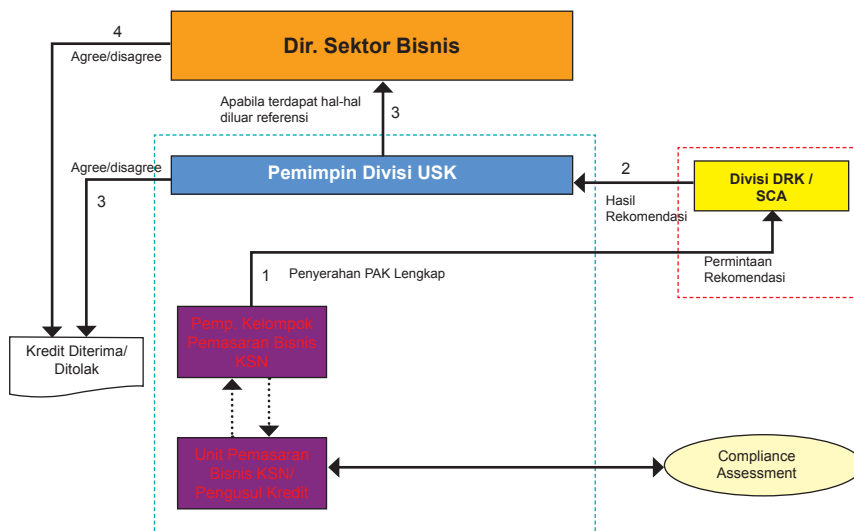
c. Kredit Divisi Usaha Menengah



d. Kredit Divisi Usaha Kredit



e. Kredit Divisi Kredit Konsumen



Pendapatan

BNI mendapatkan pendapatan bunga melalui pinjaman, pembiayaan dan piutang, Obligasi Pemerintah, dan porfolio surat-surat berharga. BNI juga memperoleh pendapatan melalui penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia serta pendapatan dari produk perbankan Syariah. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, BNI membukukan pendapatan bunga dan pendapatan syariah sebesar Rp19.447 miliar. Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010, BNI membukukan pendapatan bunga dan pendapatan syariah sebesar Rp14.400 miliar.

BNI menentukan tingkat suku bunga kredit berdasarkan tingkat pinjaman dasar (*base lending rate*) ditambah premi risiko. BNI menetapkan tingkat pinjaman tersebut berdasarkan *cost of fund* (termasuk GWM dan *fee* untuk program penjaminan simpanan di Lembaga Penjaminan Simpanan), *overhead cost* dan marjin laba. Premi risiko yang diterapkan pada sebuah kredit tergantung kepada beberapa faktor, termasuk kelayakan kredit debitur, agunan yang diberikan dan rencana penggunaan dana. Sebagian besar kredit yang disalurkan menggunakan tingkat bunga yang kebijakannya dikaji secara periodik yang umumnya ditetapkan setiap bulan. BNI dapat menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga pinjaman untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar, persaingan, perubahan tingkat risiko nasabah (*customer's risk rating*), kondisi keuangan nasabah dan kondisi lainnya.

BNI mendapatkan pendapatan non-bunga dari, *fee* bisnis kartu kredit, keuntungan perdagangan valuta asing, *fee* dan komisi transaksi *trade finance*, komisi dan provisi dari bisnis perbankan lainnya, keuntungan atas efek-efek dan *fee* dari pengelolaan dana nasabah serta jasa-jasa lainnya. Penetapan *fee* pada umumnya berdasarkan *overhead cost* ditambah marjin laba. Besaran *fee* juga ditentukan oleh kondisi pasar dan tingkat persaingan dan dalam keadaan tertentu, ditentukan oleh jumlah dana yang disediakan atau produk keuangan yang dibeli.

Pada tahun 2009, BNI mendapatkan *fee* pembukaan rekening kartu kredit sebesar Rp400 miliar, *fee* dan komisi dari transaksi *trade finance* sebesar Rp135 miliar, *fee* dan komisi untuk layanan perbankan lainnya sebesar Rp2.096 miliar, keuntungan dari efek-efek sebesar Rp424 miliar dan keuntungan valuta asing sebesar Rp262 miliar. Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2010, BNI mendapatkan *fee* dari bisnis kartu kredit sebesar Rp331 miliar, *fee* dan komisi dari transaksi *trade finance* sebesar Rp91 miliar, *fee* dan komisi untuk layanan perbankan lainnya sebesar Rp1.371 miliar, keuntungan dari efek-efek sebesar Rp674 miliar dan keuntungan valuta asing sebesar Rp91 miliar. *Fee Income* dari Anak Perusahaan adalah sebesar Rp1.354 miliar.

Penetapan tingkat suku bunga (*pricing*) atas produk-produk perbankan BNI didasarkan pada kondisi pasar dan tingkat persaingan, serta sensitivitas tingkat suku bunga untuk berbagai segmen. Untuk menarik nasabah yang sensitif terhadap tingkat suku bunga dan untuk bersaing dengan kompetitor yang menerapkan strategi penawaran suku bunga yang rendah, BNI dapat memberikan suku bunga yang lebih rendah untuk produk dan layanan jasa tertentu.

7. Bisnis Perbankan

BNI baru saja melakukan perubahan terhadap Divisi Korporasi dan komersial dengan menempatkan keduanya dibawah *Business Banking Group* yang baru dibentuk untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan guna memanfaatkan bisnis perbankan korporasi dan komersial untuk meningkatkan kualitas aset melalui peningkatan pada *collection* dan *recovery* kredit. Selain itu BNI juga memberikan Layanan transaksi perbankan (*transactional banking services*) melalui *Business Banking Group*.

Business Banking Group BNI menargetkan nasabah/nasabah dari beberapa sektor antara lain, minyak dan gas, kimia, perkebunan, makanan dan minuman, grosir dan retail, komunikasi, pembangkit listrik, infrastruktur dan konstruksi. *Business Banking Group* melakukan identifikasi terhadap industri yang akan menjadi target setiap tahunnya dan melakukan evaluasi terhadap industri-industri tersebut sebanyak dua kali dalam satu tahun. Selain itu BNI tidak hanya melatih *relationship manager* dan *banking account manager* yang dimilikinya untuk memahami masalah keuangan dan kebutuhan perbankan dari setiap sektor industri, tetapi juga bagaimana merancang pemberian kredit, produk simpanan dan penawaran produk dan jasa layanan yang dapat memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan nasabah pada masing-masing industri.

a. Perbankan Korporasi (*Corporate Banking*)

Umum

Divisi Korporasi BNI menawarkan berbagai produk pembiayaan dan pendanaan dan juga berbagai layanan jasa yang memberikan nilai tambah (*value-added services*), seperti jasa *trade finance*, pasar uang dan jasa *cash management*. Produk pembiayaan BNI meliputi fasilitas kredit modal kerja, kredit investasi, kredit sindikasi dan fasilitas kredit non-kas seperti bank garansi dan L/C.

Per 30 September 2010, BNI memiliki 943 rekening kredit korporasi dari 229 nasabah peminjam korporasi atau sekitar 36,8% dari total kredit yang diberikan (termasuk kredit luar negeri). Produk pendanaan BNI meliputi giro, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Per 30 September 2010, BNI memiliki 143.024 rekening simpanan korporasi dari 365 nasabah korporasi.

Nasabah dan Pemasaran

BNI memberikan layanan kepada nasabah korporasi melalui para *relationship manager* dan *banking account manager* yang berada di kantor pusat dan kantor cabang. *Relationship manager* BNI memiliki keahlian khusus dalam produk pembiayaan dan berfokus untuk membina hubungan serta menyediakan solusi keuangan yang dirancang khusus untuk memenuhi seluruh kebutuhan perbankan peminjam korporasi. BNI memiliki hubungan baik yang terjalin sejak lama dengan beberapa BUMN, instansi Pemerintah dan perusahaan swasta besar di Indonesia.

BNI memperluas portofolio kreditnya dengan memberikan kredit kepada nasabah baru, menambah jumlah kredit kepada nasabah yang telah ada, berpartisipasi dalam sindikasi kredit dan *refinancing* kredit. BNI juga berusaha meningkatkan jumlah kredit berkualitas tinggi dengan memberikan penawaran tingkat bunga yang kompetitif kepada nasabah yang dianggap berkualitas dimana hal ini didukung juga dengan proses persetujuan kredit yang lebih singkat dalam batasan-batasan risiko yang telah ditentukan. BNI menyediakan jangkauan produk dan jasa yang lebih luas untuk para nasabah korporasi dan melakukan diversifikasi pada bisnis korporasi untuk meningkatkan pendapatan dari jasa-jasa perbankan yang bersifat *fee-based*, yang diyakini dapat memberikan tingkat pengembalian (*rate of return*) yang lebih tinggi setelah disesuaikan dengan tingkat risiko yang terkait. BNI telah melakukan integrasi antara sistem pemasaran dan penjualan produk dan jasa, langkah integrasi tersebut melalui (i) Inisiatif pengembangan bisnis baru, termasuk pengembangan produk baru (ii) Penetapan harga (*pricing*) dan kegiatan *co-branding*, antar lain dengan melakukan *co-branding* dengan nasabah korporasi melalui kartu debit dan kartu kredit (iii) Kegiatan promosi penjualan, antara lain dengan mengkombinasikan kartu kredit dan kartu debit untuk nasabah korporasi tertentu (iv) Layanan purna jual, yaitu dengan menyediakan tim pelayanan khusus untuk menjawab pertanyaan dari nasabah serta untuk melayani keluhan nasabah. BNI juga memperkenalkan program loyalitas nasabah dengan fitur-fitur khusus yang ditujukan untuk kepentingan nasabah korporasi dan institusi.

Produk-produk Pembiayaan

Sampai dengan 30 September 2010, total kredit yang diberikan kepada nasabah korporasi adalah sebesar Rp46.284 miliar atau 36,7% dari total kredit yang diberikan. Per 30 September 2010, seluruh kredit korporasi yang diberikan kepada nasabah korporasi swasta memiliki agunan, BNI dapat memberikan kredit tanpa agunan kepada BUMN atau instansi Pemerintah tergantung pada kualitas kredit yang dimiliki oleh peminjam dan faktor-faktor lainnya. Per 30 September 2010, 82% dari kredit korporasi yang dimiliki oleh BNI dijamin dengan agunan.

Produk-produk pembiayaan utama yang ditawarkan BNI kepada nasabah korporasi adalah sebagai berikut:

- **Kredit Investasi.** BNI memberikan kredit investasi untuk pembiayaan pembelian barang modal/aset tetap (*capital expenditure*) dan pembiayaan proyek (*project finance*). Kredit ini umumnya diberikan dalam mata uang Rupiah maupun Dollar AS dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dan memiliki tingkat suku bunga yang dapat ditinjau ulang secara bulanan sesuai dengan kebijakan BNI, namun demikian tingkat bunga tetap dapat diberikan untuk jangka waktu sampai dengan satu tahun. Kebijakan yang dianut BNI adalah memberikan pinjaman hingga 70% dari nilai proyek atau aset apabila proyek tersebut adalah proyek swasta dan sampai dengan 80% dari nilai proyek atau aset apabila proyek tersebut adalah milik Pemerintah, tergantung dari limit penyaluran kredit yang ditetapkan.
- **Kredit Sindikasi (Syndicated Loan).** Kredit sindikasi pada umumnya memiliki *tingkat suku bunga mengambang dan diberikan dalam mata uang Rupiah atau Dollar AS*. BNI dapat bertindak sebagai *arranger, facility agent, security agent, escrow agent* dan/atau *participating lender*. Selain pendapatan bunga dana pendapatan syariah, BNI juga mendapatkan *fee* dari kredit sindikasi.
- **Kredit Modal Kerja (Working Capital Loan).** BNI menyediakan kredit modal kerja untuk membiayai kegiatan usaha nasabah, termasuk kredit ekspor. Kredit ini umumnya diberikan dalam mata uang Rupiah maupun Dollar AS dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun hingga tiga tahun dengan tingkat suku bunga mengambang. Per 30 September 2010, kredit modal kerja merupakan kredit dengan porsi terbesar pada nasabah perbankan korporasi.

Tabel berikut menunjukkan total kredit yang diberikan kepada nasabah korporasi berdasarkan tipe pinjaman dan mata uang sesuai periode berikut ini:

(dalam miliaran Rupiah, kecuali untuk kolom "% dari total" yang disajikan dalam persentase)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember										Pada tanggal 30 September	
	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Kredit yang diberikan (Rp)	% dari total	Kredit yang diberikan (Rp)	% dari total	Kredit yang diberikan (Rp)	% dari total	Kredit yang diberikan (Rp)	% dari total	Kredit yang diberikan (Rp)	% dari total	Kredit yang diberikan (Rp)	% dari total
Kredit Korporasi												
Investasi	10.924	50,5	11.555	50,4	5.832	19,7	8.393	22,4	9.963	24,5	13.576	29,3
Sindikasi	5.752	26,6	6.990	30,5	8.247	27,8	9.910	26,4	11.754	28,9	9.838	21,3
BUMN/Institusi Pemerintah	21	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modal Kerja	4.943	22,8	4.397	19,2	15.569	52,5	19.164	51,1	19.000	46,7	22.870	49,4
Total	21.640	100,0	22.942	100,0	29.648	100,00	37.467	100,0	40.717	100,0	46.284	100,0
Terdiri dari :												
Kredit dalam mata uang Rupiah	12.248	56,6	13.748	59,9	14.787	49,9	23.734	63,3	31.321	76,9	37.418	80,8
Kredit dalam mata uang asing	9.392	43,4	9.194	40,1	14.861	50,1	13.733	36,7	9.396	23,1	8.866	19,2
Total	21.640	100,0	22.942	100,0	29.648	100,0	37.467	100,0	40.717	100,0	46.284	100,0

Kredit yang diberikan kepada BUMN/Institusi Pemerintah adalah sebesar Rp20.307 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 dan Rp14.682 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Jasa Transaksi Perbankan

BNI memberikan jasa *cash management* meliputi jasa penagihan (*fund collection*), pembayaran (*disbursement*), manajemen likuiditas (*liquidity management*) dan investasi pada berbagai instrumen, serta memiliki rencana untuk menyediakan produk dan jasa tambahan lainnya di masa mendatang. BNI memberikan jasa tersebut terutama kepada perusahaan besar dan multi-nasional di Indonesia, nasabah menengah seperti lembaga pendidikan, perusahaan transportasi dan perusahaan jasa keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi. BNI telah menerima penghargaan untuk *Best Local Cash Management Bank* untuk kategori perusahaan besar dan menengah di Indonesia dari Majalah Asia Money pada September 2010. Per 30 September 2010, BNI memiliki 215 nasabah *cash management*.

Jasa & Layanan Dana Institusi

Bisnis Perbankan Korporasi juga meliputi Divisi Jasa Keuangan & Dana Institusi yang bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola dana pihak ketiga dari nasabah institusi. Dengan memberikan layanan tersebut diatas, BNI telah melakukan peningkatan layanan kepada nasabah, pendapatan berbasis *fee* dan dana yang transit.

8. Perbankan Komersial

Umum

BNI memberikan jasa perbankan komersial melalui (i) Divisi Usaha Kecil (*small business division*), yang menangani pemberian kredit sampai dengan Rp10 miliar untuk nasabah individu (sampai dengan Rp15 miliar untuk nasabah Grup) dan (ii) Divisi Usaha Menengah (*medium business division*) yang menangani pemberian kredit dari Rp10 miliar sampai dengan Rp100 miliar untuk nasabah individu (atau dari Rp15 miliar sampai dengan Rp150 miliar untuk nasabah Grup). Divisi usaha kecil dan menengah BNI membangun dan mengelola hubungan dengan nasabah perbankan komersial. Per 30 September 2010, BNI memiliki 71.982 rekening pinjaman nasabah komersial, yang terdiri dari 3.317 rekening nasabah usaha menengah dan 68.595 rekening nasabah usaha kecil, dimana rekening tersebut termasuk 70 rekening pinjaman penerusan.

Nasabah dan Pemasaran

Nasabah komersial mendapatkan pelayanan melalui kantor pusat, jaringan ekstensif yang meliputi kantor cabang, Sentra Kredit Kecil dan Menengah yang tersebar di seluruh Indonesia. BNI memiliki, 12 Sentra Kredit Konsumen, 20 Sentra Kredit Menengah dan 51 Sentra Kredit Kecil untuk memberikan layanan kepada nasabah Komersial. Nasabah BNI dilayani oleh *relationship manager* komersial yang terlatih dalam memberikan solusi terbaik dalam memenuhi kebutuhan nasabah usaha kecil dan menengah di tiap-tiap sektor industri dan wilayah.

Produk-Produk Pembiayaan

Per 30 September 2010, BNI memiliki total kredit yang diberikan kepada nasabah perbankan komersial sebesar Rp50.834 miliar atau 40,3% dari total kredit yang diberikan. Hampir seluruh kredit komersial memiliki agunan, pada saat pemberian kredit rasio kecukupan agunan (*Collateral Coverage Ratio*) dari kredit komersial yang memiliki agunan setidaknya 100% berdasarkan nilai taksasi yang paling kini.

Produk pembiayaan utama BNI untuk nasabah perbankan komersial adalah sebagai berikut:

- **Kredit Modal Kerja (*Working Capital Loan*)**. BNI menyediakan kredit modal kerja untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau untuk membiayai proyek tertentu, termasuk kredit ekspor. Kredit ini terutama diberikan dalam mata uang Rupiah maupun Dollar AS dengan jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun dengan tingkat suku bunga mengambang.
- **Kredit Investasi**. BNI menyediakan kredit investasi untuk belanja modal dan pembiayaan proyek (*project finance*), umumnya dalam Rupiah dan Dollar AS. Umumnya memiliki tenor lebih dari satu tahun dan memiliki tingkat suku bunga mengambang.
- **Penerusan Pinjaman (*Two-Step Loan*)**. BNI menawarkan dan melakukan kegiatan administrasi pinjaman penerusan (*two-step loan*) Pemerintah kepada perusahaan swasta dan entitas yang terkait dengan Pemerintah (BUMN dan instansi pemerintah). Kredit ini mencakup fasilitas kredit yang diperoleh dari institusi pendanaan internasional melalui Bank Indonesia dan LPEI untuk membiayai investasi dan proyek-proyek sosial ekonomi di Indonesia.
- **Program Pemerintah**. BNI memberikan program kredit pemerintah, yang terdiri dari kredit untuk usaha skala kecil, kredit modal kerja bergulir dan kredit modal kerja, dimana Pemerintah menyediakan dana untuk mensubsidi suku bunga yang dikenakan.

Tabel berikut menunjukkan kredit yang diberikan untuk nasabah perbankan komersial berdasarkan divisi dan mata uang seperti pada tanggal tertera dibawah ini:

(dalam miliaran Rupiah, kecuali untuk kolom "persentase dari total kredit komersial" yang disajikan dalam persentase)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember						Pada tanggal 30 September					
	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Kredit yang diberikan (Rp)	Persentase dari total kredit komersial (%)	Kredit yang diberikan (Rp)	Persentase dari total kredit komersial (%)	Kredit yang diberikan (Rp)	Persentase dari total kredit komersial (%)	Kredit yang diberikan (Rp)	Persentase dari total kredit komersial (%)	Kredit yang diberikan (Rp)	Persentase dari total kredit komersial (%)	Kredit yang diberikan (Rp)	Persentase dari total kredit komersial (%)
Kredit UKM												
Usaha Menengah												
Modal Kerja	8.990	35,9	10.405	37,2	15.309	40,1	18.214	38,0	20.200	37,7	17.585	34,6
BUMN/Institusi Pemerintah	7	<0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi	3.776	15,1	3.767	13,5	5.008	13,1	6.132	12,8	7.140	13,3	6.135	12,1
Sub Total	12.773	51,0	14.172	50,7	20.317	53,2	24.346	50,8	27.340	51,0	23.720	46,7

(dalam miliaran Rupiah, kecuali untuk kolom "persentase dari total kredit komersial" yang disajikan dalam persentase)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember								Pada tanggal 30 September			
	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Kredit yang diberikan (Rp)	Persentase dari total kredit komersial (%)	Kredit yang diberikan (Rp)	Persentase dari total kredit komersial (%)	Kredit yang diberikan (Rp)	Persentase dari total kredit komersial (%)	Kredit yang diberikan (Rp)	Persentase dari total kredit komersial (%)	Kredit yang diberikan (Rp)	Persentase dari total kredit komersial (%)	Kredit yang diberikan (Rp)	Persentase dari total kredit komersial (%)
Usaha Kecil												
Modal Kerja ⁽¹⁾	9.409	37,6	10.566	37,8	13.430	35,2	15.949	33,3	17.548	32,7	17.581	34,6
BUMN/Institusi Pemerintah	566	2,3	724	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pemerintah	-	-	-	-	592	1,6	449	0,9	340	0,6	442	0,9
Investasi ⁽¹⁾	2.308	9,1	2.492	8,9	3.816	10,0	7.135	14,9	8.384	15,6	9.091	17,9
Sub Total	12.283	49,0	13.782	49,3	17.838	46,8	23.533	49,2	26.272	49,0	27.114	53,3
Total	25.056	100,0	27.954	100,0	38.155	100,0	47.879	100,0	53.612	100,0	50.834	100,0
Terdiri dari :												
Kredit dalam mata uang Rupiah	23.233	92,7	26.308	94,1	35.553	93,2	45.399	94,8	51.800	96,6	49.615	97,6
Kredit dalam mata uang asing	1.823	7,3	1.646	5,9	2.602	6,8	2.480	5,2	1.812	3,4	1.219	2,4
Total	25.056	100,0	27.954	100,0	38.155	100,0	47.879	100,0	53.612	100,0	50.834	100,0

Catatan:

(1.) Termasuk Pinjaman Penerusan

Simpanan

BNI menawarkan deposito dan giro kepada nasabah institusi (Institusi pemerintah dan perusahaan swasta), termasuk kepada nasabah perbankan internasional. Per 30 September 2010, BNI memiliki total rekening simpanan sebesar Rp88.369 miliar dari nasabah institusi, Simpanan dari nasabah institusi mewakili 48,1% dari total simpanan yang dimiliki oleh BNI.

Tabel berikut ini menyajikan simpanan yang berasal dari nasabah institusi pemerintah berdasarkan tipe dan mata uang untuk tanggal-tanggal dibawah ini:

(dalam miliaran Rupiah, kecuali untuk kolom "% dari jumlah simpanan" yang disajikan dalam persentase)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember								Pada tanggal 30 September			
	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Jumlah Simpanan (Rp)	% dari total simpanan	Jumlah Simpanan (Rp)	% dari total simpanan	Jumlah Simpanan (Rp)	% dari total simpanan	Jumlah Simpanan (Rp)	% dari total simpanan	Jumlah Simpanan (Rp)	% dari total simpanan	Jumlah Simpanan (Rp)	% dari total simpanan
Simpanan Institusi Pemerintah												
Deposito	10.384	39,9	13.338	40,7	13.125	38,2	16.002	44,8	17.187	46,7	14.742	40,5
Tabungan	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giro	15.624	60,1	19.452	59,3	21.216	61,8	19.733	55,2	19.615	53,3	21.660	59,5
Jumlah	26.018	100,0	32.790	100,0	34.342	100,0	35.735	100,0	36.802	100,0	36.402	100,0
Terdiri dari:												
Simpanan dalam Rp	15.543	59,7	20.867	63,6	23.842	69,4	27.480	76,9	24.690	67,1	23.376	64,2
Simpanan dalam US\$ ¹	10.475	40,3	11.923	36,4	10.500	30,6	8.255	23,1	12.113	32,9	13.026	35,8
Total	26.018	100,0	32.790	100,0	34.342	100,0	35.735	100,0	36.802	100,0	36.402	100,0

Catatan:

(1.) Simpanan dalam Dolar AS dan sudah dikonversi ke Rupiah

Tabel berikut ini menyajikan simpanan dari nasabah swasta berdasarkan tipe dan mata uang untuk tanggal-tanggal di bawah ini:

(dalam miliaran Rupiah, kecuali untuk kolom "% dari jumlah simpanan" yang disajikan dalam persentase)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember								Pada tanggal 30 September			
	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Jumlah Simpanan (Rp)	% dari jumlah simpanan	Jumlah Simpanan (Rp)	% dari jumlah simpanan	Jumlah Simpanan (Rp)	% dari jumlah simpanan	Jumlah Simpanan (Rp)	% dari jumlah simpanan	Jumlah Simpanan (Rp)	% dari jumlah simpanan	Jumlah Simpanan (Rp)	% dari jumlah simpanan
Simpanan Perusahaan Swasta												
Deposito	17.246	58,3	23.740	64,2	17.425	48,7	24.420	57,5	36.218	63,4	32.641	62,8
Tabungan	39	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giro	12.322	41,6	13.249	35,8	18.336	51,3	18.079	42,5	20.901	36,6	19.326	37,2
Jumlah	29.607	100,0	36.989	100,0	35.761	100,0	42.499	100,0	57.119	100,0	51.967	100,0
Terdiri dari:												
Simpanan dalam Rp	21.962	74,2	31.584	85,4	29.098	81,4	30.911	72,7	41.099	72,0	37.017	71,2
Simpanan dalam mata uang asing ¹	7.645	25,8	5.405	14,6	6.663	18,6	11.588	27,3	16.020	28,0	14.950	28,8
Total	29.607	100,0	36.989	100,0	35.761	100,0	42.499	100,0	57.119	100,0	51.967	100,0

Catatan:

(1.) Simpanan dalam mata uang asing sudah dikonversi ke Rupiah, sebagian besar simpanan dalam mata uang asing berdenominasi US\$, sisanya berbentuk mata uang Dolar Hongkong, British Pounds Sterling, Yen Jepang, Euro, Dolar Australia dan Dolar Singapura.

BNI juga menawarkan *direct deposit services* yang memungkinkan karyawan dari nasabah untuk langsung menyimpan gajinya di rekening BNI. Beberapa nasabah korporasi, termasuk instansi pemerintah menggunakan layanan ini. Layanan ini telah memperkuat hubungan BNI dengan nasabah dan memungkinkan BNI untuk memanfaatkan hubungan tersebut untuk mengembangkan basis simpanan BNI.

Divisi Kredit Khusus

Divisi Kredit Khusus memiliki tanggung jawab untuk keseluruhan kebijakan restrukturisasi dan *recovery* kredit korporasi yang bermasalah. BNI melakukan restrukturisasi NPL berdasarkan masing-masing kasus setelah mendapat persetujuan dari *credit approval authority* yang berwenang, dimana keputusan tersebut bergantung pada jumlah pembayaran yang mungkin direalisasikan dari restrukturisasi kredit yang dilakukan. Seperti bank-bank di Indonesia lainnya, BNI jarang menutup kredit atau mencairkan jaminan kredit karena kendala waktu, biaya dan ketidakpastian dalam proses hukum. BNI biasanya melakukan restrukturisasi terhadap peminjam yang memiliki prospek operasional dan kerjasama yang baik, namun sedang mengalami atau akan mengalami masalah likuiditas sementara ataupun masalah lainnya, BNI dapat meminta kepada debitur untuk membuat pembayaran kembali sebagian dari jumlah total terhutang sebagai pembayaran parsial (khusus untuk *non-principal portion*) dari total hutang secara keseluruhan.

9. Consumer and Retail Banking

Umum

BNI menawarkan berbagai layanan produk dan layanan bagi nasabah konsumen, antara lain produk pinjaman dan simpanan, asuransi, investasi dana pensiun, kartu kredit dan kartu debit. BNI melayani nasabahnya melalui jaringan kantor cabang, tim penjualan cabang dan penjualan langsung. *Consumer and Retail Banking* juga memiliki Divisi *Wealth Management* yang fokus untuk memberikan layanan perbankan yang komprehensif kepada *high net worth individual*.

Dari sisi pengembangan produk konsumen, BNI fokus kepada empat hal, yaitu: (1) Produk dan jasa yang bersifat transaksional seperti giro, tabungan dan kartu debit; (2) Produk-produk pembiayaan seperti kredit konsumen dan kartu kredit; (3) Produk-produk investasi termasuk dana pensiun dan produk tabungan pendidikan; serta (4) Produk-produk *wealth-protection* seperti *bancassurance*. Rekening simpanan nasabah memberikan sumber pendanaan murah dan stabil kepada BNI dimana hal tersebut mewakili basis nasabah dimana BNI dapat melakukan upaya *cross-selling* produk dan jasa perbankan non-tradisionalnya, seperti produk reksadana dan asuransi. BNI juga telah mengimplementasikan *brand management* terutama dalam pengelolaan produk-produk unggulannya dan untuk meningkatkan pangsa pasarnya.

Nasabah dan Pemasaran

Dalam rangka membina hubungan jangka panjang kepada nasabah konsumen, BNI menyediakan berbagai jenis produk dan jasa-jasa perbankan yang berkualitas, serta saluran distribusi yang nyaman dan mudah dicapai.

BNI melakukan fokus atas upaya pemasaran dan pengembangan usaha yang dilakukan di 9 kota besar di Indonesia, dimana terdapat konsentrasi nasabah berpenghasilan tinggi. BNI juga melakukan upaya pengembangan usaha di ibukota propinsi di seluruh Indonesia, dengan meningkatkan efisiensi operasional kantor-kantor cabang dan melakukan pengembangan produk-produk perbankan yang dirancang khusus untuk melayani kebutuhan segmen nasabah berpenghasilan rendah dan keluarga-keluarga di daerah miskin di Indonesia.

BNI juga melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan *fee-based* dengan menggunakan jaringan nasabah korporasi dan komersial-nya dengan cara menjalin kerjasama untuk melakukan *cross-selling* atas produk dan jasa layanan Bisnis Konsumer kepada karyawan dari nasabah-nasabah tersebut, termasuk produk reksadana dan asuransi. BNI mengembangkan proses implementasi sistem informasi nasabah yang memungkinkan BNI dapat mengelola dan memanfaatkan informasi nasabah, yang dapat mendukung aktivitas *cross-selling* produk dan jasa layanan.

BNI menawarkan beragam jaringan akses perbankan melalui kantor-kantor cabang, mesin ATM, layanan elektronik, *telephone banking*, SMS banking, mobile banking, internet banking dan tim pemasaran *personal banking*. BNI juga melakukan upaya peningkatan jaringan layanan dengan mengembangkan layanan *telephone banking*, layanan internet banking, menambah jumlah merchant yang menggunakan jaringan BNI dan menambah jumlah mesin ATM dan *deposit machines*. Untuk memberikan layanan kepada nasabah individu yang bersifat *cost-effective* bagi BNI, dilakukan pelatihan-pelatihan pada tenaga *customer service* di kantor cabang untuk dapat memberikan layanan berkualitas kepada nasabah kantor cabang, menggunakan program pelatihan yang dilakukan oleh konsultan manajemen bertaraf internasional. BNI juga meningkatkan kemampuan penjualan kantor-kantor cabang dengan menciptakan aliansi dengan pengembang perumahan, *dealer* kendaraan bermotor dan perusahaan pembiayaan. BNI juga melakukan upaya *cross-selling* kepada nasabah konsumer menggunakan program *direct mailing*, tenaga pemasaran *telemarketing* dan menjalin kerjasama dengan agen penyedia tenaga pemasaran, terutama untuk memasarkan kartu kredit. Seiring dengan langkah tersebut, aktivitas atau program promosi juga secara intensif dan konsisten terus dikembangkan terutama yang berkaitan dengan *corporate image*, *product brand image* dan implementasi program *customer loyalty*.

BNI berusaha untuk meningkatkan jumlah kredit yang diberikan melalui peningkatan pemasaran, peningkatan produktivitas dari tenaga kerja penjual (*sales people*), meningkatkan *back office* serta meningkatkan proses operasi dan *channeling* volume kredit yang lebih banyak melalui pihak ketiga. BNI melakukan penawaran kredit kepemilikan kendaraan melalui perusahaan pembiayaan pihak ketiga disamping melalui Anak Perusahaan BNI, PT BNI Multi Finance. Untuk kredit yang disalurkan melalui perusahaan pembiayaan pihak ketiga, maka proses kredit atas calon nasabah dilakukan oleh pihak ketiga tersebut, termasuk *review* atas proposal kredit yang diajukan. Selanjutnya, bila proposal kredit mendapatkan persetujuan maka pihak ketiga tersebut menjamin sekaligus menanggung risiko kredit. BNI juga melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia untuk menawarkan kredit kepada para pegawai perusahaan tersebut. BNI menawarkan tingkat suku bunga yang kompetitif dan memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran kredit dengan memotong langsung gaji karyawan tersebut setiap bulannya.

Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, BNI juga telah melakukan sentralisasi terhadap persetujuan kredit konsumer yang selama ini diberikan pada masing-masing kantor cabang, selanjutnya persetujuan kredit akan diberikan di Sentra Kredit Konsumen (SKK), yaitu unit-unit yang bertanggung-jawab terhadap proses persetujuan kredit konsumer secara terpusat. Per 30 September 2010, BNI telah memiliki 12 Sentra Kredit Konsumen yang berlokasi di berbagai kota besar di Indonesia. BNI berkeyakinan bahwa dengan pengembangan SKK ini kecepatan pemrosesan aplikasi kredit dan kualitas kredit akan meningkat, sehingga pengelolaan terhadap penjualan dan pelayanan juga akan menjadi lebih baik

BNI membedakan layanan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah saldo tabungan yang tinggi ("*affluent*") melalui segmen "Layanan Prima" dan BNI Emerald, sehingga nasabah pada segmen tersebut menerima layanan dari *customer service* yang sudah diberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk melayani nasabah di segmen ini. BNI melakukan penentuan klasifikasi nasabah-nasabah tersebut berdasarkan jumlah saldo rata-rata minimum sejumlah Rp350 juta untuk segmen Layanan Prima dan Emerald (*upgrade* dari *outlet* Layanan Prima) dengan saldo rata-rata minimum Rp1 miliar, walaupun BNI juga mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti jumlah aset yang bisa dijadikan investasi. Per 30 September 2010, BNI memiliki 22 *outlet* Layanan Prima yang berlokasi di kantor cabang dan 24 *outlet* BNI Emerald (*upgrade* dari *outlet* Layanan Prima).

BNI juga berusaha untuk meningkatkan pendapatan *fee-based* dengan menggunakan jaringan nasabahnya dengan memanfaatkan hubungan yang telah terjalin dengan nasabah-nasabah tersebut untuk melakukan *cross-selling* dari produk-produk investasi dan *wealth-protection*.

Produk-Produk Pembiayaan

Per 30 September 2010, total kredit yang diberikan kepada nasabah konsumen (diluar kredit yang diberikan kepada karyawan dan kartu kredit) adalah sebesar Rp20.890 miliar atau 16,6% dari total kredit yang diberikan (termasuk kredit sebesar Rp4.698 miliar) yang disalurkan melalui perusahaan pembiayaan pihak ketiga untuk pembelian kendaraan bermotor, namun tidak termasuk kredit karyawan dan *outstanding* kartu kredit).

BNI menawarkan empat macam produk kredit konsumen dalam mata uang Rupiah sebagai berikut:

- **Kredit Pemilikan Rumah (KPR).** BNI menawarkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) baik untuk pembelian rumah baru maupun lama, serta renovasi, berdasarkan nilai rumah melalui kredit BNI Griya. Maksimum pinjaman KPR adalah sampai dengan Rp5 miliar dan sampai dengan 90,0% dari nilai taksasi atas properti yang akan dibeli dengan jangka waktu pengembalian maksimum sampai dengan 20 tahun dengan tingkat suku bunga tetap untuk tahun pertama. Kredit BNI Griya dapat memiliki tingkat suku bunga mengambang ataupun tetap dengan jangka waktu sampai dengan lima tahun, setelah itu suku bunga yang dikenakan adalah suku bunga mengambang. Per 30 September 2010, Seluruh KPR BNI diagunkan dengan properti yang dibeli. BNI telah melakukan berbagai langkah untuk mempromosikan BNI Griya secara agresif antara lain dengan melakukan *re-focus* pada strategi pemasaran untuk menangkap peluang yang cukup besar pada pasar kelas menengah yang terus berkembang. BNI berencana untuk menggunakan jaringan distribusi yang luas yang didukung oleh sistem penambahan kredit berbasis elektronik dan *tim sales* yang didedikasikan untuk penjualan BNI Griya. BNI melakukan kerjasama dengan sejumlah BUMN dan perusahaan swasta, termasuk perusahaan pengembang dan perusahaan yang memiliki program kepemilikan rumah untuk karyawannya dan memperluas pemberian kredit melalui upaya tersebut. Untuk mendukung pertumbuhan BNI Griya, telah dilakukan kerjasama dengan perusahaan pengembang perumahan, agen properti, notaris publik dan perusahaan penilai independen. Per 30 September 2010 BNI memiliki 97.400 nasabah Kredit Pemilikan Rumah.
- **Kredit Multi Guna.** BNI juga menawarkan Kredit Multi Guna (KMG), yang ditujukan untuk pembelian aset selain properti residensial juga untuk kebutuhan nasabah lainnya seperti pendidikan, pernikahan dan perjalanan wisata. Untuk Kredit Multi Guna lainnya, kredit yang diberikan pada umumnya sampai dengan Rp2,5 miliar untuk profesional dan nasabah lainnya lainnya dengan jangka waktu pengembalian maksimal sampai dengan 10 tahun. Per 30 September 2010 seluruh Kredit Multi Guna memiliki agunan dan collateral coverage ratio untuk Kredit Multi Guna adalah sebesar paling tidak 80% berdasarkan nilai taksasi terkini. Agunan yang diberikan pada umumnya berupa aset yang dibeli atau aset tetap lainnya.
- **Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor.** BNI juga menawarkan kredit yang ditujukan untuk pembelian kendaraan bermotor melalui perusahaan *multifinance* pihak ketiga. Per 30 September 2010, terdapat 33 perusahaan *multifinance* pihak ketiga, BNI percaya bahwa dengan menyalurkan kredit kendaraan bermotor melalui perusahaan *multifinance* pihak ketiga, BNI mendapatkan keuntungan karena sumber daya yang diperlukan dalam hal administrasi kredit, dibandingkan dengan penyaluran kredit secara langsung kepada pembeli kendaraan bermotor. BNI juga menawarkan kredit pembelian kendaraan bermotor secara langsung kepada pembeli kendaraan bermotor melalui kredit "BNI Oto". Untuk pembelian kendaraan bermotor, kredit yang diberikan sampai dengan jumlah Rp1 miliar dan sampai dengan 80% dari nilai taksasi atas kendaraan bermotor yang akan dibeli. BNI menawarkan jangka waktu pengembalian sampai dengan 5 tahun dengan tingkat bunga tetap untuk periode yang telah disetujui.
- **Kredit Tanpa Agunan.** BNI menawarkan Kredit Tanpa Agunan, yang dikenal dengan nama BNI Fleksi. Diberikan kepada karyawan dari Nasabah Korporasi BNI dan Wirasusaha. Maksimum kredit yang diberikan adalah Rp50 juta sampai dengan Rp100 juta untuk karyawan nasabah Korporasi BNI, dengan jangka waktu pengembalian sampai dengan 5 tahun dan tingkat bunga tetap untuk periode yang telah disetujui. Kredit Tanpa Agunan ini ditujukan kepada karyawan nasabah korporasi BNI dan wiraswastawan.
- **Cash Collateral Credit.** BNI menawarkan kredit "BNI Instan" kepada segmen individu yang secara khusus hendak mengajukan pinjaman dengan menggunakan simpanan kas yang dimilikinya di BNI sebagai agunan, melalui kredit dengan agunan kas yang dikenal dengan nama BNI Instan. Maksimum *Cash Collateral Credit* ini adalah sampai dengan 90% dari jumlah dana tunai yang disimpan nasabah bersangkutan di BNI dan dengan maksimum jangka waktu pengembalian tidak melebihi jangka waktu rekening deposito yang diagunkan. *Cash Collateral Credit* diberikan dengan tingkat suku bunga yang disesuaikan tiap bulan sesuai kebijaksanaan BNI berdasarkan persyaratan yang berlaku.

Tabel berikut menunjukkan Kredit Konsumen BNI berdasarkan jenis kredit:

(dalam miliaran Rupiah, kecuali untuk kolom "% dari total kredit consumer" disajikan dalam persentase)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember										Pada tanggal 30 September	
	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Kredit yang diberikan (Rp)	% dari total kredit konsumen	Kredit yang diberikan (Rp)	% dari total kredit konsumen	Kredit yang diberikan (Rp)	% dari total kredit konsumen	Kredit yang diberikan (Rp)	% dari total kredit konsumen	Kredit yang diberikan (Rp)	% dari total kredit konsumen	Kredit yang diberikan (Rp)	% dari total kredit konsumen
Kredit Konsumer⁽¹⁾												
Kredit Pemilikan Rumah	1.966	23,5	2.617	36,4	4.745	42,7	7.035	48,2	8.266	51,4	10.771	60,2
Kredit Multi Guna	5.211	62,4	931	13,0	1.089	9,8	542	3,7	291	1,8	239	1,3
Kredit Kepemilikan Kendaraan	661	7,9	2.561	35,6	2.828	25,5	4.512	30,9	4.869	30,3	4.420	24,7
Kredit Tanpa Agunan	489	5,9	496	6,9	407	3,7	303	2,1	317	2,0	527	2,9
Kredit Cash Collateral	27	0,3	582	8,1	276	2,5	258	1,8	288	2,2	234	1,3
Kredit Untuk Karyawan ⁽¹⁾	-	-	-	-	1.759	15,8	1.951	13,4	1.996	12,4	1.696	9,5
Jumlah⁽²⁾	8.354	100,0	7.187	100,0	11.103	100,0	14.600	100,0	16.027	100,0	17.887	100,0

Catatan:

(1) Kredit untuk karyawan adalah kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan kendaraan bermotor yang diberikan kepada karyawan BNI, kredit yang termasuk dalam kredit untuk karyawan tidak dimasukkan pada kategori lainnya.

(2) Jumlah kredit tidak termasuk pinjaman kartu kredit

BNI melakukan sentralisasi terhadap proses persetujuan, administrasi pemberian dan penagihan kredit pada sentra kredit untuk nasabah untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja bisnis. Dalam hal pemberian kredit dilakukan melalui pihak ketiga yaitu perusahaan multifinance, pihak ketiga tersebut akan mencari dan melakukan langkah-langkah awal pemeriksaan kredit bagi calon nasabah. Mereka akan melakukan penilaian terhadap proposal kredit yang diajukan dan apabila telah disetujui oleh BNI, mereka akan menjamin kredit tersebut. Pihak ketiga akan menanggung risiko kredit dari peminjam, hal ini diperlukan apabila peminjam tidak mampu membeli aset yang disimpan sebagai jaminan oleh BNI dengan jumlah yang sesuai dengan jumlah kredit.

Kartu Kredit

Per 30 September 2010 BNI telah menerbitkan 1.774.778 kartu kredit. Berdasarkan informasi yang diterbitkan Bank Indonesia sampai dengan bulan Juni 2010, BNI adalah penerbit kartu kredit terbesar ke-empat di Indonesia berdasarkan jumlah kartu yang diterbitkan. Total pembelanjaan (*total spending*) untuk penggunaan kartu kredit BNI adalah sebesar Rp7.365 miliar untuk tahun 2009 yang menjadikan BNI sebagai penerbit kartu kredit terbesar ke-6 berdasarkan *total spending* nasabah berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Bank. BNI menawarkan kartu kredit dengan membawa *brand name* MasterCard dan VISA. BNI telah melakukan penawaran kartu-kartu tersebut masing-masing sejak tahun 1997 dan 1998. BNI mempromosikan produk kartu kreditnya sebagai produk gaya hidup modern. Saat ini, BNI menawarkan kartu kredit *Blue*, kartu kredit *Gold* dan kartu kredit *Platinum* yang ditujukan untuk melayani segmen menengah atas. Kartu Kredit BNI memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan cicilan biaya kuliah, pembayaran tagihan otomatis, isi pulsa otomatis, transfer dana ke bank manapun dan melalui *auto debit*, *transfer balance* dari kartu kredit lain, transfer uang ke rekening pribadi. BNI juga menawarkan kartu kredit dengan hubungan *co-branding* eksklusif dengan institusi terkemuka di Indonesia termasuk *corporate card* dan kartu anggota untuk alumni berbagai universitas di Indonesia.

BNI menargetkan nasabah kantor cabang sebagai calon pemegang kartu kredit melalui Unit Layanan Cabang. Selain itu, pemasaran melalui program penjualan langsung dan penjualan tidak langsung. Setiap calon pemegang kartu kredit harus melewati proses penyaringan dan verifikasi sebelum aplikasinya disetujui. BNI telah meningkatkan usaha pemasaran melalui jaringan kantor cabang dengan proses *pre-embossed* dan *pre-approval* kartu kredit, yang kemudian ditawarkan kepada nasabah BNI yang memenuhi kriteria keuangan yang sudah ditetapkan. BNI juga telah melakukan desentralisasi untuk proses review dan persetujuan kredit dengan mendirikan sentra kartu kredit (*credit card center*) di 9 kota di seluruh Indonesia. Masing-masing sentra kartu kredit bertanggungjawab untuk melakukan review dan memberikan persetujuan atas aplikasi kartu kredit di wilayah kerjanya. Proses desentralisasi yang telah dilakukan sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usaha BNI.

Jumlah kartu kredit yang diterbitkan oleh BNI menunjukkan angka peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini. Tabel berikut menunjukkan jumlah kartu kredit yang diterbitkan BNI pada tanggal-tanggal yang tertera.

Uraian	Pada tanggal 31 Desember					Pada tanggal 30 September
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
VISA™	677.149	716.148	725.064	870.354	982.734	1.090.659
MasterCard™	471.618	503.698	479.281	508.113	560.021	684.119
Total	1.148.767	1.219.846	1.204.345	1.378.467	1.542.755	1.774.778

Per 31 Desember 2005, jumlah kartu kredit VISA yang dalam keadaan tidak aktif atau tidak digunakan dalam tiga bulan terakhir adalah sebanyak 112.966 kartu kredit. Per 31 Desember 2006 adalah sebanyak 147.309 kartu kredit, Per 31 Desember 2007 adalah sebanyak 112.786 kartu kredit. Per 31 Desember 2008 adalah sebanyak 218.372 kartu kredit, Per 31 Desember 2009 adalah sebanyak 260.411 kartu kredit, Per 30 September 2010 adalah sebanyak 305.907 kartu kredit atau sebanyak 28,0% jumlah kartu kredit VISA yang diterbitkan per 30 September 2010. Sedangkan untuk kartu kredit Mastercard, per 31 Desember 2005 jumlah kartu kredit yang dalam keadaan tidak aktif atau tidak digunakan dalam tiga bulan terakhir adalah sebanyak 68.836 kartu kredit. Per 31 Desember 2006 adalah sebanyak 93.428 kartu kredit. Per 31 Desember 2007 adalah sebanyak 69.858 kartu kredit. Per 31 Desember 2008 adalah sebanyak 131.345 kartu kredit. Per 31 Desember 2009 adalah sebanyak 142.577 kartu kredit dan per 30 September 2010 adalah sebanyak 182.350 kartu kredit atau 26,7% jumlah kartu kredit MasterCard yang diterbitkan per 30 September 2010.

BNI mengenakan iuran tahunan untuk penggunaan kartu kredit. BNI juga mengenakan *fee* atas transaksi penarikan uang tunai (*cash advance*) dari kartu kredit. Pemegang kartu menerima tagihan setiap bulannya dan diharuskan untuk membayar bunga untuk sisa tagihan yang belum dibayar pada saat jatuh tempo. Untuk meningkatkan penggunaan kartu kredit, BNI bekerja sama dengan pihak ketiga dalam menawarkan pemesanan aneka produk eksklusif dengan harga istimewa, pemberian diskon menarik antara lain di beberapa toko, restoran dan hotel. BNI menargetkan program peningkatan penggunaan kartu kredit kepada segmen pengguna yang spesifik, antara lain keluarga dan *lifestyle users*. Penawaran ini disampaikan kepada nasabah melalui berbagai jenis media, antara lain majalah, koran, *billboard advertisement* dan brosur.

Per 30 September 2010, total tagihan dari kartu kredit BNI mencapai kurang lebih Rp3.003 miliar. Tabel berikut menunjukkan perkembangan usaha kartu kredit BNI, pada tanggal dan untuk periode yang tertera:

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					Pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pendapatan Bunga Bersih	452	503	561	672	721	558
Pendapatan Diskon Merchant Bersih	67	112	54	58	68	66
<i>Fee</i> dan charge yang diperoleh	194	256	275	326	363	291
Pendapatan lain-lain	8	16	12	19	88	14
Jumlah Pendapatan	721	887	902	1.075	1.240	929
Jumlah Saldo Outstanding dari piutang Kartu Kredit ⁽¹⁾	1.718	1.831	2.085	2.598	2.488	3.003

Catatan:

(1) Jumlah saldo outstanding dari piutang kartu kredit per 31 Desember 2007 dan 2009 termasuk piutang kartu kredit yang dikategorikan sebagai "kerugian". Piutang kartu kredit yang dianggap sebagai "kerugian" telah dihapus sebelum kalkulasi perhitungan jumlah saldo outstanding piutang kartu kredit pada 31 Desember 2009 dan 30 September 2010.

Uraian	Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009					Pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah kartu yang diterbitkan	1.148.767	1.219.846	1.204.345	1.378.467	1.542.755	1.774.778
Total pembelanjaan kartu kredit (dalam jutaan rupiah)	4.149	4.853	5.297	6.323	7.365	6.695
Jumlah merchant	6.213	8.722	10.281	15.261	19.666	20.391
Jumlah penjualan melalui terminal EDC (dalam jutaan rupiah)	4.145	6.107	11.003	20.108	21.994	19.668
Jumlah terminal EDC ⁽¹⁾	7.674	10.528	19.175	25.727	28.471	30.068

Catatan:

(1) Terminal EDC menerima kartu kredit dan kartu debit

Per 30 September 2010, saldo rekening yang tidak lancar (*delinquent account balance*), yaitu rekening yang menunggak namun belum dihapus buku mencapai Rp289 miliar atau 9,6% dari total tagihan. Kartu kredit yang menunggak lebih dari 90 hari akan diblokir secara permanen (tidak bisa melakukan transaksi). Hapus buku dilakukan secara selektif terhadap rekening yang menunggak lebih dari 180 hari. BNI membuat biaya pencadangan untuk rekening yang tidak lancar sejalan dengan peraturan Bank Indonesia.

Tabel berikut menunjukkan *aging* dari portofolio kartu kredit BNI pada tanggal 30 September 2010.

(dalam miliaran Rupiah, kecuali untuk kolom "persentase")

Uraian	Pada tanggal 30 September 2010	
	Kredit Outstanding	Persentase
Lancar	2.714	90,4
Total Tunggakan	289	9,6
Total	3.003	100,00

Pemrosesan Bukti Transaksi dan Layanan Merchant

BNI melakukan pembayaran kepada *merchant* sesuai dengan bukti transaksi yang diterima dan menggunakannya juga untuk pembayaran terhadap Visa atau MasterCard. Transaksi yang diproses melalui terminal EDC (*Electronic Data Capture*) akan tertagih secara elektronik, sedangkan untuk transaksi manual akan tertagih setelah bukti transaksi diterima oleh BNI. Untuk meningkatkan jumlah *merchant* yang dapat menerima transaksi kartu kredit/debit, BNI mengembangkan jaringan EDC (*Electronic Data Capture*) yang menggunakan jaringan komputer (*Local Area Network*) pada toko-toko besar dimana terdapat banyak kasir di setiap *outlet*-nya. Terhitung pada 30 September 2010, BNI memiliki 30.068 terminal EDC yang terpasang dan 20.391 *merchants* yang setuju untuk melakukan kerjasama (dimungkinkan untuk non-eksklusif). BNI mengenakan biaya kepada *merchant* sejumlah persentase tertentu pada setiap transaksi sebagai biaya yang timbul atas proses dan *settlement* transaksi. Di sisi lain, BNI juga dibebankan sejumlah biaya sebagai pembayaran kepada institusi atau bank penerbit kartu sejumlah persentase yang lebih kecil dari bukti transaksi, yang dikenal sebagai *interchange fee*. BNI adalah salah satu peserta terbesar untuk bisnis ini di Indonesia.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (*Financial Institution Pension Fund*)

BNI telah menawarkan program pensiun iuran pasti (*defined contribution pension fund*) yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI (DPLK BNI). DPLK adalah institusi keuangan yang memiliki izin untuk mengelola dana pensiun anggota individu yang terdaftar melalui institusi yang berpartisipasi atau langsung sebagai partisipan individual.

DPLK BNI terbuka untuk seluruh institusi lapisan masyarakat Indonesia. Menurut data Asosiasi DPLK Indonesia per 31 Desember 2009, DPLK BNI merupakan DPLK terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah peserta dan dana yang dihimpun. Per 30 September 2010 dana pensiun yang dikelola DPLK BNI berjumlah Rp4.758 miliar dengan jumlah anggota sebanyak 468.272. BNI akan terus memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin pasar dalam bisnis ini untuk lebih memantapkan posisinya dalam memperebutkan pangsa pasar dana pensiun di Indonesia di masa depan. Per 31 Desember 2009, DPLK BNI mewakili kurang lebih 30,0% dari jumlah dana yang dikelola DPLK di Indonesia dan kurang lebih 40,0% dari seluruh anggota DPLK di Indonesia, berdasarkan informasi yang diterbitkan Asosiasi DPLK Indonesia. Fakta tersebut menempatkan DPLK BNI sebagai pemimpin pasar DPLK di Indonesia.

DPLK BNI memiliki komitmen untuk memberikan tingkat pengembangan (*return*) yang optimal, minimal 1% di atas tingkat suku bunga deposito yang berlaku di pasar dan sementara itu juga menjaga tingkat risiko pada tingkat yang wajar. BNI mendapatkan pendapatan *fee* administratif dan manajemen untuk pengelolaan dana pensiun. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan periode tiga bulan yang berakhir tanggal 30 September 2010, BNI membukukan pendapatan *fee* masing-masing sejumlah Rp38,6 miliar dan Rp34,3 miliar untuk pengelolaan dana pensiun.

Tabel berikut menunjukkan jumlah nasabah yang berpartisipasi dalam DPLK BNI, nilai dana dan pendapatan:

Uraian	31 Desember				30 September	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah Anggota	343.304	364.309	384.581	411.234	437.204	468.272
Jumlah Dana (miliar Rupiah)	2.007	2.467	2.944	3.566	4.271	4.758

Simpanan

BNI menawarkan berbagai produk pendanaan, antara lain deposito berjangka, tabungan dan giro. Per 30 September 2010, BNI memiliki total simpanan nasabah sebesar Rp90.500 miliar pada 10,8 juta rekening simpanan nasabah.

Simpanan nasabah menyediakan pendanaan dengan biaya yang rendah dan sumber dana yang stabil serta merepresentasikan potensi pertumbuhan yang dapat meningkatkan sumber pendanaan BNI secara keseluruhan. BNI berusaha untuk meningkatkan pendanaan secara keseluruhan sesuai dengan basis nasabah yang dimiliki, dengan menawarkan tingkat suku bunga yang kompetitif, jaringan yang nyaman, pembayaran tagihan, serta pemberian hadiah secara periodik. Pembayaran tagihan, yang memungkinkan pemegang kartu ATM BNI untuk membayar tagihan dari penyedia jasa pihak ketiga, merupakan suatu layanan yang sangat memudahkan para nasabah, dimana biasanya tagihan-tagihan tersebut dibayar secara langsung. BNI menawarkan berbagai akses jaringan untuk menyimpan, menarik dan melakukan transfer dana, antara lain melalui ATM, kartu debit, *phone banking* dan *mobile banking*.

Per 30 September 2010, BNI memiliki total dana simpanan nasabah sebesar Rp183.772 miliar. Simpanan oleh individu mewakili sebesar 48,9% dari total simpanan nasabah BNI.

Tabel berikut ini menyajikan produk pendanaan BNI berdasarkan tipe untuk nasabah konsumen pada tanggal-tanggal dibawah ini:

(dalam miliaran Rupiah, kecuali untuk kolom "% dari total" disajikan dalam persentase)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember										Pada tanggal 30 September	
	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Jumlah simpanan (Rp)	% dari total	Jumlah simpanan (Rp)	% dari total	Jumlah simpanan (Rp)	% dari total	Jumlah simpanan (Rp)	% dari total	Jumlah simpanan (Rp)	% dari total	Jumlah simpanan (Rp)	% dari total
Simpanan Nasabah Individual												
RUPIAH												
Tabungan	35,934	61.0	37,980	58.52	47,087	63.4	51,138	62.4	57,180	63.3	55,765	61.6
Deposito	17,932	30.4	21,585	33.26	20,650	27.8	23,306	28.5	25,031	27.7	25,707	28.4
Giro	1,227	2.1	1,547	2.38	1,838	2.5	1,826	2.2	1,686	1.9	1,479	1.6
Sub Jumlah	55,093	93.5	61,113	94.17	69,575	93.6	76,270	93.1	83,897	92.83	82,951	91.7
VALAS												
Tabungan	-	-	-	-	216	0.3	15	0.0	27	0.0	212	0.2
Deposito	2,405	4.1	2,493	3.84	3,101	4.2	3,474	4.2	3,982	4.4	4,468	4.9
Giro	1,394	2.4	1,293	1.99	1,401	1.9	2,137	2.6	2,468	2.7	2,869	3.2
Sub Jumlah⁽¹⁾	3,799	6.5	3,786	5.83	4,718	6.4	5,626	6.9	6,478	7.17	7,550	8.3
Jumlah	58,891	100.0	64,898	100.0	74,293	100.0	81,896	100.0	90,374	100.00	90,500	100.0

Catatan:

(1) Simpanan dalam mata uang asing sebagian besar berbentuk mata uang US\$, sisanya berbentuk Dollar Hong kong, Pounds Sterling Inggris, Yen Jepang, Dolar Australia dan Dolar Singapura.

Divisi Wealth Management

BNI mendirikan Divisi *wealth management* pada tahun 1996, memberikan prioritas layanan perbankan kepada individu berpenghasilan tinggi berdasarkan kebutuhan masing-masing nasabah. Pada bulan February 2007, BNI mengembangkan pelayanan yang diberikan oleh Divisi *wealth management* dengan memberikan layanan *wealth management* yang komprehensif melalui BNI Emerald kepada sekelompok nasabah yang ditargetkan dimana nasabah tersebut memiliki simpanan paling sedikit Rp1 miliar pada rekening simpanan mereka. BNI memberikan layanan *personal advisory*, perencanaan keuangan, *personal investment* dan *personal asset and debt management* melalui *outlet-outlet* BNI Emerald. Per 30 September 2010, BNI memiliki 24 *outlet* BNI Emerald yang menawarkan kepada nasabah terpilih akses kepada produk investasi pasar modal, antara lain saham, obligasi, reksadana, Per 30 September 2010 Divisi Wealth Management BNI melayani 8.909 rekening, dengan dana kelolaan sebesar Rp23.377 miliar.

Sebagai bagian dari rencana strategis untuk mengembangkan produk dan jasa layanan yang lebih luas kepada nasabah konsumen dan untuk meningkatkan pendapatan berbasis *fee*, BNI menawarkan jasa *bancassurance* yang berfokus kepada kebutuhan investasi dan asuransi melalui jaringan distribusi yang dimiliki. Produk tersebut ditawarkan melalui kerjasama dan *co-branding* dengan perusahaan asuransi seperti BNI Life yang merupakan anak perusahaan BNI, Sun Life, CIGNA dan AIA. BNI Life menerima penghargaan dari Majalah Investor pada tahun 2010 sebagai "Best Life Insurance Company" dengan nilai aset antara Rp1 triliun sampai dengan Rp2,5 triliun.

BNI membuat “BNI Solusi” sebagai merek dagang untuk menawarkan *Bancassurance* jiwa dan asuransi umum seperti asuransi pendidikan, jiwa, kesehatan, properti, kendaraan bermotor dan kecelakaan dan produk investasi seperti reksadana. BNI bertindak sebagai agen penjualan untuk afiliasi BNI Life serta perusahaan asuransi pihak ketiga. BNI terus melakukan pengembangan terhadap produk *Bancassurance* yang mengkombinasikan tabungan dan asuransi proteksi. Produk-produk tersebut, ditawarkan melalui kerjasama atau *co-branding* dengan perusahaan-perusahaan asuransi. Melalui sinergi yang dilakukan melalui layanan-layanan yang telah disebutkan diatas, BNI dapat menawarkan kepada nasabah *one stop financial services* yang unik diantara berbagai produk keuangan perbankan dan produk non-perbankan.

Penasehat keuangan BNI Life *Bancassurance* (BLI) menawarkan jasa layanan perencanaan keuangan secara gratis kepada nasabah di kantor-kantor cabang (*specialists*). Para *specialist* tersebut memberikan rekomendasi yang bersifat personal untuk memenuhi kebutuhan keuangan nasabah dan aspirasi dari portofolio produk-produk BNI. Per 30 September 2010, BNI memiliki 330 orang *specialist* BNI Life di *outlet* yang terletak di seluruh Indonesia.

BNI juga menyediakan beberapa produk investasi melalui kerja sama dengan perusahaan manajemen investasi seperti Schroders, PT Danareksa Investment Management, Manulife Financial Corporation, PT Trimegah Securities Tbk dan BNI Securities.

10. Perbankan Internasional

Umum

Saat ini BNI memiliki kantor-kantor cabang di Hong Kong, London, Singapura, Tokyo dan sebuah kantor *agency* di New York, 51 “*Smart Remittance*” sistem untuk memberikan layanan pengiriman uang di 10 negara dan 8 *remittance representative* di 5 negara. Kantor cabang BNI di Singapura, Hong Kong dan Tokyo menawarkan produk dan layanan perbankan yang cukup lengkap termasuk produk pembiayaan dan *deposit-taking*. Sedangkan Kantor cabang BNI di London hanya dapat menerima penyimpanan dana “*wholesale*” saja. Kantor *Agency* BNI di New York menawarkan kegiatan perbankan terbatas dan tidak menerima simpanan dari warga negara dan penduduk tetap (*permanent resident*) negara Amerika. Dalam melakukan kegiatan usaha perbankan internasional, pada 30 September 2010 BNI menjalin kerjasama dengan 1.425 bank koresponden diluar negeri yang terletak di 81 negara dan juga 76 bank koresponden dalam negeri dan sejumlah aliansi strategis internasional melalui keanggotaan asosiasi perbankan internasional.

Nasabah dan Pemasaran

BNI berupaya untuk meningkatkan usaha perbankan internasional melalui peningkatan pembiayaan dan jasa *trade finance* pada kantor-kantor cabang luar negeri. Sejak bulan Mei 2004 BNI telah membuka *international trade processing center* di Jakarta untuk menangani aktivitas *trade financing* yang tersentralisasi untuk nasabah BNI yang berada di Jakarta. Kantor Cabang BNI diluar negeri didukung oleh lebih dari 1.400 bank koresponden di 81 negara.

Produk Pembiayaan

Sampai dengan 30 September 2010, kantor cabang luar negeri dan kantor *agency* di New York memiliki total kredit yang diberikan sebesar Rp4.811 miliar, atau 3,8% dari total kredit yang diberikan, yang terdiri dari 228 rekening kredit.

(dalam miliaran Rupiah, kecuali untuk kolom “% dari total kredit luar negeri” yang disajikan dalam persentase)

	Pada tanggal 31 Desember						Pada tanggal 30 September 2010					
	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Kredit yang diberikan	% dari total kredit luar negeri	Kredit yang diberikan	% dari total kredit luar negeri	Kredit yang diberikan	% dari total kredit luar negeri	Kredit yang diberikan	% dari total kredit luar negeri	Kredit yang diberikan	% dari total kredit luar negeri	Kredit yang diberikan	% dari total kredit luar negeri
Kredit Internasional⁽¹⁾												
Modal Kerja	2.311	61,4	2.951	76,7	5.771	98,5	3.475	55,3	2.642	55,8	3.084	64,1
Investasi	1.111	29,5	892	23,2	89	1,5	2.810	44,8	2.092	44,2	1.727	35,9
Karyawan	4	0,1	6	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindikasi	340	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	3.766	100,0	3.849	100,0	5.860	100,0	6.285	100,0	4.734	100,0	4.811	100,0

Catatan:

(1) Kredit internasional ini sebagian besar berbentuk mata uang USD, Dollar Hong kong, Pounds Sterling Inggris, Yen Jepang, Dolar Australia dan Dolar Singapura.

Melalui kantor cabang luar negerinya, BNI memberikan pinjaman kepada nasabah internasional dan juga berpartisipasi dalam memberikan kredit sindikasi luar negeri dan pembiayaan langsung, yang diyakini akan mendukung upaya penetrasi pasar internasional. BNI melakukan pengawasan eksposur terhadap negara asal debitur dan secara aktif mengelola serta menjaga tingkat risiko dengan melakukan analisa berkala terhadap perkembangan politik, ekonomi, keuangan dan sosial di negara-negara yang memiliki tingkat eksposur yang signifikan. Aset luar negeri BNI sebagian besar didanai dari simpanan dan pinjaman dalam mata uang asing.

Seluruh kantor cabang luar negeri dan Kantor *Agency* merupakan profit center yang independen dan dikelola sendiri di masing-masing negara. Setiap kantor cabang luar negeri memiliki komite persetujuan kredit, untuk setiap permohonan kredit yang diatas batasan persetujuan yang dapat diberikan oleh kantor cabang akan diserahkan ke kantor pusat untuk memperoleh persetujuan dari pejabat bank dengan kewenangan yang lebih tinggi yang memberikan laporan kepada Divisi Manajemen Risiko.

Jasa Trade Finance

BNI menyediakan berbagai jasa *trade finance* kepada nasabah korporasi, komersial dan perbankan internasional, seperti *buyers credit*, pembiayaan L/C, bank garansi dan fasilitas negosiasi wesel ekspor. Pendapatan yang didapat dari *fee* dan komisi *trade finance* adalah sebesar Rp135 miliar di tahun 2009 dan Rp91 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010.

Pengiriman Uang (Remittance Activities)

BNI menyediakan layanan pengiriman uang kepada nasabah. Layanan pengiriman uang BNI didukung baik oleh jaringan domestik maupun jaringan internasional melalui aliansi strategis. Selain itu, Per 30 September 2010 BNI telah mengembangkan 51 "Smart Remittance" sistem untuk menyediakan layanan pengiriman uang di bank koresponden dan *remittance agencies* BNI di Singapura, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Yordania, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Malaysia, Brunei dan Taiwan. Pada tahun 2009, BNI memproses pengiriman uang sebanyak 2,05 juta transaksi dengan total nilai sebesar USD35.662 juta dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010, BNI memproses pengiriman uang sebanyak 1,75 juta transaksi dengan total nilai sebesar USD36.856 juta.

Deposito

BNI menawarkan produk deposito dan giro kepada nasabah perbankan internasional. Per 30 September 2010, BNI memiliki jumlah simpanan sebesar Rp1.215 miliar dari nasabah perbankan internasional yang merepresentasikan sebesar 0,7% dari total simpanan pada tanggal tersebut.

11. Bisnis Syariah

Umum

BNI mendirikan Unit Usaha Syariah pada bulan April 2000 untuk menawarkan produk pembiayaan dan pendanaan yang sejalan dengan prinsip syariah. BNI telah melakukan *spin-off* terhadap Unit Usaha Syariah-nya menjadi PT Bank BNI Syariah yang berdiri pada bulan Juni tahun 2010. Saat ini BNI merupakan salah satu dari 10 Bank domestik yang memiliki Bank Syariah dengan layanan penuh dan 23 bank di Indonesia yang memiliki divisi syariah dan menawarkan produk perbankan Syariah. Per 30 September 2010 BNI memiliki Rp6.088 miliar aset syariah, Rp3.255 miliar pembiayaan syariah dan Rp4.903 miliar simpanan Syariah. BNI berkeyakinan memiliki pangsa pasar ketiga terbesar di Indonesia dalam hal simpanan dan pangsa pasar keempat terbesar dalam hal pembiayaan syariah per 31 Desember 2009 (berdasarkan laporan keuangan publikasi masing-masing bank per 31 Desember 2010 untuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia).

Per 30 September 2010, BNI menawarkan layanan perbankan syariah melalui 58 *outlet* khusus di Indonesia, yang terdiri dari 27 kantor cabang syariah yang berdiri sendiri (*stand alone*) dan 31 kantor cabang pembantu syariah yang merupakan bagian dari kantor cabang dalam negeri BNI dan 787 *outlet channeling* syariah pada kantor-kantor cabang konvensional untuk menawarkan akses yang lebih baik pada nasabah syariah BNI. Sampai dengan saat prospektus ini diterbitkan. Produk dan jasa layanan syariah BNI meliputi Kartu Syariah BNI yang dilengkapi dengan SMS banking, *internet banking*, *phone banking* dan dapat pula digunakan sebagai kartu debit. Per 30 September 2010, BNI memiliki 51.762 rekening nasabah untuk pembiayaan Syariah dan 487.497 rekening nasabah simpanan dana pihak ketiga syariah. Sebagian besar dari nasabah Syariah BNI merupakan nasabah individu yang memiliki rekening simpanan.

Untuk melengkapi produk dan layanan perbankan syariah yang telah dimiliki oleh BNI, BNI berencana untuk menawarkan produk dan layanan baru termasuk perbankan korporasi, *trade finance* dan produk pasar modal dengan rekan strategis.

Nasabah dan Pemasaran

Pada bulan Desember 2003, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa yang memutuskan bahwa bunga bank, yang menurut prinsip hukum Islam merupakan riba, adalah haram. Hal ini diyakini akan meningkatkan jumlah nasabah syariah secara signifikan di masa yang akan datang. Untuk melayani nasabah syariah, BNI berencana untuk menambah jumlah *outlet* perbankan syariah menjadi 61 yang terdiri dari 28 kantor cabang dan 33 kantor cabang pembantu hingga akhir tahun 2010.

BNI telah memperkenalkan segmen “Layanan Prima” yang didedikasikan untuk menyediakan produk dan layanan Syariah kepada nasabah syariah individual yang masuk ke dalam golongan nasabah berpenghasilan tinggi. BNI juga memperkenalkan produk dan layanan perbankan Syariah yang baru antara lain jasa konsultan kepada bank lain khususnya mengenai prinsip-prinsip perbankan Syariah. BNI juga melakukan fokus pada upaya *cross-selling* produk-produk Syariah. Sebagai contoh, BNI juga menawarkan produk dan layanan Syariah kepada nasabah Divisi *wealth management* yang masuk ke dalam golongan nasabah berpenghasilan tinggi.

Produk Pembiayaan

Jasa Perbankan Syariah BNI berfokus pada produk-produk pembiayaan industri agribisnis, perdagangan, manufaktur, otomotif dan perumahan. Produk Syariah andalan BNI adalah BNI Griya Syariah. BNI menawarkan beberapa produk pembiayaan syariah lainnya, terutama pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *ijarah* dan *Qard*. Sebagian besar dari pembiayaan BNI disalurkan melalui pembiayaan *Murabahah* yang umumnya digunakan untuk pembelian aset. Pembiayaan *Murabahah* didasarkan pada jual beli produk, di mana BNI membiayai pembelian aset yang dimaksud, seperti mesin, lalu menjual kembali aset tersebut kepada nasabah dengan persyaratan pembayaran yang disetujui bersama. Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* digunakan untuk pembiayaan proyek (*project financing*). Dalam pembiayaan *Musyarakah*, baik BNI maupun nasabah memberikan kontribusi dana yang diperlukan untuk proyek yang dibiayai, di mana laba atau pendapatan dari proyek tersebut akan dibagi. Sedangkan pada pembiayaan *Mudharabah*, BNI akan membiayai keseluruhan dari proyek dan umumnya menerima proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan atau laba dari kerjasama yang dimaksud dibandingkan dengan pembiayaan *Musyarakah*. Pembiayaan *Qard* adalah pembiayaan syariah yang ditujukan untuk pembiayaan program sosial. BNI memberikan kontribusi dana yang dibutuhkan dan hanya memperoleh sebagian pendapatan atau laba yang dianggap cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan.

Sebagai bagian dari pemenuhan prinsip perbankan syariah, seluruh pembiayaan Syariah harus berasal dari sumber pendanaan syariah, termasuk sumber dana syariah BNI dan penempatan dana Syariah oleh pihak ketiga di BNI.

Per 30 September 2010, total pembiayaan syariah BNI mencapai Rp3.255 miliar yang terdiri dari 51.762 nasabah syariah atau 2,8% dari nilai keseluruhan portofolio kredit BNI per tanggal yang sama. BNI menggunakan proses persetujuan kredit yang sama dengan proses persetujuan kredit pada Bisnis Korporasi dan Bisnis Konsumer. BNI melakukan *benchmark* tingkat pengembalian (*return*) dari produk pembiayaan syariah terhadap tingkat pengembalian (*return*) yang dicapai produk perbankan konvensional.

Tabel berikut menunjukkan produk pembiayaan syariah, pada tanggal-tanggal yang tertera:

(dalam miliaran Rupiah, kecuali untuk kolom “% dari total pembiayaan syariah” yang disajikan dalam persentase)

	Pada tanggal 31 Desember								Pada tanggal 30 September			
	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
Pembiayaan Syariah	% dari total pembiayaan Syariah	Pembiayaan Syariah	% dari total pembiayaan Syariah	Pembiayaan Syariah	% dari total pembiayaan Syariah	Pembiayaan Syariah	% dari total pembiayaan Syariah	Pembiayaan Syariah	% dari total pembiayaan Syariah	Pembiayaan Syariah	% dari total pembiayaan Syariah	
Pembiayaan Syariah												
Murabahah	615	74,4	862	76,1	1.468	81,5	2.440	77,1	2.474	75,8	2.339	71,9
Mudharabah	101	12,2	110	9,7	80	4,4	75	2,4	85	2,6	99	3,0
Musyarakah	87	10,5	108	9,5	191	10,6	521	16,5	517	15,8	572	17,6
Qard	24	2,9	53	4,7	63	3,5	74	2,3	100	3,1	112	3,4
Ijarah	-	-	-	-	-	-	55	1,7	64	2,0	74	2,3
Islamic Card	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0,8	59	1,8
Total	827	100,0	1.133	100,0	1.801	100,0	3.165	100,0	3.265	100,0	3.255	100,0

Simpanan Syariah

Per 30 September 2010, BNI memiliki jumlah simpanan nasabah syariah Rp4.903 miliar. Simpanan nasabah syariah mewakili 2,7% dari jumlah simpanan secara keseluruhan pada tanggal tersebut. Nasabah yang menyimpan dananya pada BNI Syariah memperoleh pendapatan melalui bagi hasil dan tidak mendapat bunga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tabel berikut ini menyajikan simpanan menurut produk dan suku bunga dari nasabah perbankan syariah untuk tanggal-tanggal dibawah ini:

(dalam miliaran Rupiah, kecuali untuk kolom "% dari total simpanan syariah" yang disajikan dalam persentase)

	Pada tanggal 31 Desember										Pada tanggal 30 September	
	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Jumlah Simpanan	% dari total Simpanan Syariah	Jumlah Simpanan	% dari total Simpanan Syariah	Jumlah Simpanan	% dari total Simpanan Syariah	Jumlah Simpanan	% dari total Simpanan Syariah	Jumlah Simpanan	% dari total Simpanan Syariah	Jumlah Simpanan	% dari total Simpanan Syariah
Produk Simpanan Perbankan Syariah												
Tabungan												
Tabungan Syariahplus ⁽¹⁾⁽²⁾	397	46,4	513	45,8	837	46,7	1.205	39,7	1.614	38,7	1.747	35,6
Deposito												
Deposito Mudharabah ⁽³⁾	390	45,5	385	34,4	748	41,7	1.474	48,6	2.142	51,3	2.377	48,5
Giro												
Giro Wadiah ⁽⁴⁾	69	8,1	222	19,8	207	11,6	355	11,7	417	10,0	779	15,9
Jumlah	856	100,0	1.120	100,0	1.792	100,0	3.034	100,0	4.173	100,0	4.903	100,0

Catatan:

(1) Tabungan Syariahplus adalah produk tabungan Syariah BNI yang utama

(2) Termasuk THH Mudharabah yaitu tabungan Haji dan KTM Syariah, yaitu tabungan untuk pelajar

(3) Deposito Mudharabah adalah deposito Syariah BNI yang utama

(4) Giro Wadiah adalah giro Syariah BNI yang utama, imbal hasil dibayarkan sesuai dengan sistem Wadiah, dimana pemegang rekening memperoleh bonus yang dihitung setiap bulannya berdasarkan kinerja BNI.

12. Produk-Produk Simpanan

BNI memiliki banyak produk simpanan yang diantaranya adalah deposito berjangka, tabungan dan giro. Per 30 September 2010, BNI memiliki total simpanan nasabah sebesar Rp183.772 miliar dari lebih dari 11 juta rekening simpanan dimana 10 juta diantaranya adalah rekening simpanan nasabah konsumen. Berdasarkan laporan keuangan publikasi bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tanggal 30 September 2010, BNI menempati peringkat ke-4 diantara bank-bank di Indonesia dalam hal jumlah simpanan nasabah.

Seluruh simpanan BNI diluar produk-produk Syariah, umumnya memberikan bunga yang di-review setiap bulan oleh sub-Komite ALCO (*Asset and Liability*). Peninjauan atas tingkat suku bunga simpanan tersebut dilakukan lebih sering bila terdapat perubahan pada peraturan yang berlaku atau perubahan kondisi pasar. BNI akan terus mempertahankan tingkat suku bunga yang kompetitif sesuai dengan kondisi pasar agar dapat bersaing. Saat ini BNI menetapkan tingkat bunga sama dengan atau di bawah tingkat bunga maksimum program penjaminan simpanan yang diatur oleh Lembaga Penjaminan Simpanan.

Tingkat bunga yang ditawarkan pada produk pendanaan pada umumnya bervariasi tergantung kepada kondisi pasar dan persaingan serta dalam beberapa kasus tertentu didasarkan pada persyaratan, jumlah dan mata uang simpanan. BNI menghasilkan pendapatan non-bunga yang bersifat *fee-based* dalam produk pendanaan Perseroan. Pendapatan *fee-based* terdiri dari tagihan rekening deposito, tagihan tradisional dan juga tagihan transaksi e-banking. Besarnya *fee* yang ditagihkan bergantung pada kondisi pasar dan persaingan serta dalam beberapa kasus tertentu didasarkan pada jumlah dan jenis produk pembiayaan tersebut.

Deposito Berjangka

BNI menawarkan deposito berjangka dengan periode 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan. Untuk nasabah yang hendak menyimpan dana dalam jumlah besar dan dalam periode pendek, BNI menawarkan rekening *deposit on call* dengan jangka waktu kurang dari satu bulan dengan periode serta tingkat suku bunga yang disepakati dengan nasabah. Pada saat jatuh tempo, jumlah pokok beserta bunga yang terhitung akan menjadi kewajiban BNI kepada nasabah. Selain itu, nasabah BNI juga dapat memilih untuk menerima pembayaran bunga yang dibayarkan setiap bulannya atau dikapitalisasi. Deposito berjangka BNI ditawarkan dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing seperti Yen, Poundsterling, Dollar AS, Dollar Singapore, Euro dan Dollar Hong Kong. Namun demikian, untuk deposito berjangka, nasabah juga dapat memilih dalam dua jenis mata uang melalui produk deposito berjangka BNI Duo. Produk tersebut memungkinkan nasabah untuk mengganti jenis mata uang antara Dollar AS dan Rupiah tanpa tambahan biaya apapun. Saldo minimum yang diperlukan untuk BNI Duo adalah Rp20 juta.

Tabungan

BNI menawarkan produk tabungan kepada nasabah di dalam negeri dalam mata uang Rupiah sedangkan kantor-kantor cabang di luar negeri juga menawarkan tabungan dalam mata uang asing. Bunga tabungan dibayarkan setiap bulan, dimana simpanan dapat ditarik dengan menggunakan buku tabungan, kartu debit, maupun kartu ATM. Dua produk tabungan terpenting BNI adalah Taplus dan Taplus Bisnis yang ditujukan untuk segmen nasabah berpenghasilan menengah ke atas. Rekening Taplus mensyaratkan simpanan saldo minimum Rp250.000 untuk penabung di luar DKI Jakarta dan Rp500.000 untuk penabung di DKI Jakarta, sedangkan untuk Taplus Bisnis minimum saldo yang diwajibkan adalah sebesar Rp1 juta. Beberapa keuntungan dari produk tabungan BNI ini antara lain tidak adanya biaya bulanan, asuransi gratis, bunga yang besar dibandingkan akun Taplus, kartu ATM dan debit Gold dan layanan *electronic banking*.

Giro

BNI menawarkan berbagai jenis rekening giro yang merupakan simpanan dengan bunga yang dibayar secara bulanan (kecuali giro Syariah), dengan dana yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek, kartu ATM, perintah pembayaran atau transfer. BNI menawarkan giro dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing termasuk BNI Giro dan BNI Dollar. Rekening giro BNI dapat digunakan sebagai agunan untuk *cash collateral credit*.

Seluruh produk simpanan diatas dapat digunakan sebagai agunan untuk *cash collateral credit*

13. Produk dan Jasa Lainnya

BNI menawarkan produk-produk konsumen lain seperti *traveller's cheques*, *safe deposit box* dan pembayaran tagihan layanan rumah tangga antara lain listrik, telpon, pajak bumi dan bangunan, TV berlangganan dan air. Dengan menggunakan berbagai jaringan distribusi, BNI juga memasarkan produk reksadana dan asuransi dari Anak-anak Perusahaan dan institusi-institusi lain.

Investment Banking

BNI menawarkan jasa *investment banking*, perantara efek dan manajemen investasi melalui anak perusahaan Perseroan, PT BNI Securities, yang didirikan pada tahun 1995. Jasa *investment banking* kami, perantara efek dan manajemen investasi BNI menghasilkan pendapatan sebesar Rp15 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 14 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010.

Tresuri

Divisi Tresuri memiliki sekitar 41 orang *dealers* dan melakukan kegiatan *trading* dan investasi dengan tujuan untuk mengoptimalkan laba serta pengelolaan posisi likuiditas dan posisi valuta asing. Divisi Tresuri BNI juga memberikan jasa layanan terhadap produk-produk tresuri seperti produk pasar uang, pasar modal dan valuta asing (jasa *advisory*, jasa transaksi valuta asing dan sebagai perantara dalam produk-produk lindung nilai) serta jasa kustodian dan wali amanat untuk produk *hedging*. Divisi Tresuri BNI memiliki aktivitas utama sebagai berikut:

- *Perdagangan Pasar Uang (Money Market Trading)*, melaksanakan transaksi pasar uang untuk tujuan profitabilitas dari aktivitas *proprietary trading* pasar uang, Tim ini bersama-sama dengan Tim Manajemen Perbankan mengelola posisi likuiditas Rupiah maupun valuta asing baik *intra-day* maupun *overnight*, serta pinjaman jangka pendek.

- *Perdagangan Valuta Asing (Foreign Exchange Trading)*, melakukan transaksi valuta asing untuk uang untuk tujuan profitabilitas dari aktivitas *proprietary trading* valuta asing dan mendukung transaksi nasabah korporasi. Tim ini bersama-sama dengan Tim Manajemen Perbankan menjaga posisi devisa netto (*net open position*)
- *Penjualan (Sales)*, melakukan pemasaran produk-produk tresuri, seperti produk pasar uang dan valuta asing kepada nasabah korporasi, institusi dan konsumen melalui kantor-kantor cabang BNI dan memperdagangkannya. Tim ini juga menyediakan sesi pelatihan dan informasi bagi nasabah BNI. Tim Penjualan memiliki individu yang didedikasikan untuk kegiatan pemasaran produk Treasuri di Medan, Palembang, Bandung, Surabaya, Makassar dan Balikpapan, daerah di mana BNI bermaksud meningkatkan basis nasabah dan tingkat layanan nasabah.
- *Pasar Modal (Capital Market)*, melakukan aktivitas transaksi instrumen *fixed-income* yang diterbitkan oleh perusahaan maupun Pemerintah untuk keperluan perdagangan dan investasi BNI.
- *Likuiditas (Liquidity)*, memantau likuiditas BNI, posisi devisa netto dan posisi valuta asing, termasuk kebutuhan pendanaan BNI sehari-hari, untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan dan kebijakan giro wajib minimum dan membuat rekomendasi kepada Tim Perdagangan dan Manajemen Perbankan. Ini juga mendukung BNI domestik cabang pengelolaan likuiditas harian.
- *Penelitian (Research)*, memberikan dukungan penelitian ke tim pasar uang, pasar valuta asing, pasar modal dan penjualan dan kepada nasabah BNI.
- *Manajemen Perbankan (Banking Management)*, mengatur dana untuk BNI, termasuk pinjaman jangka panjang, restrukturisasi modal dan instrumen-instrumen hutang. Tim ini juga bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau portofolio obligasi Pemerintah, investasi menengah-jangka panjang termasuk surat berharga, obligasi korporasi dan investasi reksa dana, serta menjalankan kebijakan dan strategi dalam mengelola aset dan kewajiban BNI. Tim manajemen perbankan juga mengelola likuiditas sehari-hari dan posisi valuta asing BNI dan mendukung Sub-komite Aset dan Kewajiban dan membuat rekomendasi mengenai kebijakan dan strategi Sub-komite Aset dan Kewajiban BNI.
- *Perencanaan Pembangunan Bisnis (Business Development Planning)*, mereview rencana bisnis dan rencana keuangan Divisi Treasuri dan memastikan konsistensinya dengan rencana dan target kinerja BNI. Kelompok ini juga mendukung sistem informasi dan pengembangan usaha BNI.
- *Manajemen Bank Notes (Bank Notes Management)*, bertanggung jawab dalam memantau, memperdagangkan dan mengembalikan kelebihan *bank notes* berdenominasi mata uang asing yang dimiliki. BNI mempunyai dealer yang didedikasikan untuk melaksanakan transaksi wesel bank tersebut.

Pendapatan divisi tresuri dari keuntungan bersih dari perdagangan valuta asing dan keuntungan bersih dari surat berharga dan obligasi Pemerintah sebesar Rp686 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp764 miliar untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010.

14. Jaringan Distribusi

Jaringan distribusi BNI tersebar luas di berbagai pusat ekonomi utama dan pusat bisnis di seluruh Indonesia. Kegiatan operasional BNI diluar negeri berlokasi di Sentra Bisnis dan Keuangan Internasional besar di Luar Negeri.

Tabel berikut memperlihatkan jaringan nasional dan internasional BNI pada tanggal 30 September 2010:

	Pada tanggal 31 Desember					Pada tanggal
	2005	2006	2007	2008	2009	30 September
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah kantor cabang nasional⁽¹⁾						
Kantor Pusat	1	1	1	1	1	1
Kantor Cabang ⁽¹⁾	216	216	216	216	165	167
Kantor cabang pembantu ⁽¹⁾	700	702	707	726	810	887
Kantor cabang dan kantor cabang pembantu Syariah yang dimiliki oleh Anak Perusahaan, yaitu BNI Syariah	33	53	53	53	57	58
Jumlah kantor domestik	950	972	979	995	1.032	1.112
Jumlah Sentra Kredit Menengah	14	17	17	20	20	20
Jumlah Sentra Kredit Kecil	45	47	45	45	45	51
Jumlah Sentra Kredit Konsumer	12	12	12	12	12	12
Jumlah kantor cabang luar negeri	4	4	4	4	4	4
Jumlah Kantor Agency luar negeri	1	1	1	1	1	1
Jumlah ATM	2.272	2.325	2.476	2.978	3.933	4.072

Catatan:

(1) Jumlah kantor cabang dan kantor cabang pembantu pada tanggal 31 Desember 2009 dan tanggal 30 September 2010 mewakili ulang pengelompokan cabang dan cabang pembantu yang BNI lakukan pada tahun 2009.

Jaringan Nasional

Tabel berikut memperlihatkan penyebaran geografis *outlet* nasional BNI pada tanggal 30 September 2010.

Jaringan Kantor Cabang Wilayah	Kantor Wilayah	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Sentra Kredit Menengah	Sentra Kredit Kecil	Sentra Kredit Konsumen	ATM
Sumatera Utara dan NAD	Medan	20	55	1	3	1	232
Sumatera Barat dan Riau	Padang	16	44	1	4	1	213
Sumatera Selatan	Palembang	15	55	1	2	1	223
Jawa Barat	Bandung	11	71	1	6	1	375
Jawa Tengah	Semarang	21	108	2	8	2	437
Jawa Timur	Surabaya	24	105	2	10	1	493
Sulawesi Selatan ⁽¹⁾	Makasar	16	54	1	2	1	181
Bali	Denpasar	9	57	1	1	1	174
Kalimantan	Banjarmasin	20	52	2	4	1	231
Sulawesi Utara	Manado	9	27	1	1	1	104
Jakarta ⁽²⁾	Jakarta	20	175	3	4	-	847
Jakarta ⁽³⁾	Jabotabek	13	115	4	6	1	562
Total kantor cabang		194	918	20	51	12	4.072

Catatan:

1. Wilayah ini termasuk Maluku dan Papua

2. Wilayah ini termasuk beberapa bagian wilayah Jakarta selatan, timur dan pusat.

3. Wilayah ini termasuk beberapa bagian wilayah Jakarta utara dan barat, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Cilegon.

Kantor Pusat

Selain sebagai pusat kegiatan usaha dan organisasi, kantor pusat juga merupakan pusat pelayanan nasabah korporasi dan merupakan pusat dari *relationship manager* BNI.

Kantor cabang dan kantor cabang pembantu

BNI membagi jaringan kantor cabang dalam negeri menjadi kantor cabang dan kantor cabang pembantu berdasarkan nilai aset, jumlah karyawan, total nilai simpanan dan kredit, serta layanan dalam negeri dan internasional. Klasifikasi ini menentukan jenis produk pembiayaan dan pendanaan yang ditawarkan serta penentuan limit pinjaman yang dapat diberikan. Kantor-kantor cabang BNI memberikan layanan perbankan untuk nasabah dari seluruh segmen, berkoordinasi dengan tim penjualan langsung untuk menjual produk kredit dan menjaga hubungan dengan para nasabah. Kantor cabang pembantu BNI memberikan layanan transaksi, produk-produk non-kredit, jasa konsultasi produk perbankan dan mendukung penawaran kredit dan jasa keuangan melalui *cross-selling*. Jasa layanan seperti penerbitan bank garansi dan layanan *trade finance* tidak ditawarkan di Kantor Cabang Pembantu.

Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Syariah

Kantor cabang Syariah BNI menyediakan produk dan layanan Syariah, yang diperkuat oleh *relationship manager* dan tenaga *customer service* yang terlatih dalam produk-produk dan layanan Syariah. Kantor cabang pembantu Syariah menyediakan layanan transaksi, produk non-kredit dan jasa penasihat keuangan untuk produk-produk Syariah BNI.

Sentra Kredit Kecil dan Sentra Kredit Menengah

Per 30 September 2010, BNI memiliki 51 Sentra Kredit Kecil untuk melayani segmen nasabah usaha kecil dan 20 Sentra Kredit Menengah untuk melayani segmen nasabah usaha menengah. Sentra-sentra kredit ini memiliki *relationship manager*, produk-produk pembiayaan dan jasa lainnya yang didedikasikan untuk melayani masing-masing nasabah usaha kecil dan menengah.

Sentra Kredit Konsumen

Per 30 September 2010, BNI memiliki 12 Sentra Kredit Konsumen untuk melayani nasabah individu. Sentra Kredit Konsumen memiliki tim sales yang berdedikasi untuk menawarkan produk-produk dan jasa layanan pembiayaan untuk nasabah individu.

Jaringan ATM, Kartu ATM dan Kartu Kredit

Menurut laporan Artajasa per 30 September 2010, jaringan ATM BNI merupakan ke-4 terbesar di Indonesia. Jaringan ATM yang dimiliki meliputi 4.072 mesin ATM yang tersebar di seluruh Indonesia dan lebih dari 8 juta kartu ATM dalam sirkulasi. BNI memiliki rencana untuk menambah sekitar 164 mesin ATM pada akhir tahun 2007. Bersama dengan empat bank milik Pemerintah lainnya, BNI membentuk aliansi strategis yang dinamai Himpunan Bank-bank Negara (HIMBARA) yang memungkinkan nasabah BNI untuk mengakses ATM berlogo LINK. BNI juga telah melakukan kerjasama lain yang memungkinkan pemegang kartu ATM BNI untuk dapat melakukan akses ke jaringan ATM Bersama, yang memiliki lebih dari 70 bank dalam negeri yang menjadi partisipan. Kerjasama ini memungkinkan pemegang kartu ATM BNI untuk dapat melakukan transaksi pada lebih dari 23.600 mesin ATM (termasuk mesin ATM yang dimiliki oleh BNI) di seluruh Indonesia. Jaringan ATM dan pemegang kartu ini bersama dengan 30.068 terminal *debit-enabled* EDC dan jaringan komunikasi yang terintegrasi membentuk sebuah jaringan infrastruktur nasional untuk proses pembayaran dan penyelesaian tagihan nasabah BNI.

Jaringan ATM BNI berada di hampir seluruh kantor cabang utama dan kantor cabang pembantu serta di berbagai pusat perbelanjaan, perkantoran dan kompleks perumahan. Distribusi ATM BNI di setiap propinsi dapat dilihat pada tabel yang tertera diatas. BNI berencana untuk terus mengembangkan jaringan ATM yang dimiliki dan terus mencari lokasi yang paling menguntungkan untuk jaringan ATM BNI guna meningkatkan pemakaian oleh nasabah dan pendapatan dari *fee* transaksi serta memberikan kemudahan yang maksimal untuk pemegang kartu ATM BNI. Tabel berikut menunjukkan pertumbuhan jumlah kartu ATM BNI dan rata-rata harian jumlah transaksi untuk periode-periode berikut ini

Uraian	Per tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					Per tanggal serta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kartu BNI	878.431	3.147.854	4.386.282	5.953.610	6.168.149	7.203.854
Kartu Plus ⁽¹⁾	3.230.465	2.977.196	2.433.594	2.245.775	1.389.394	1.182.569
Derivatif	799.471	671.027	48.259	100.049	96.208	95.045
Jumlah kartu ATM	4.908.367	6.796.077	6.868.135	8.299.434	7.653.751	8.481.468
Jumlah rata-rata transaksi harian	592.992	623.100	382.433	361.098	467.471	535.057

Catatan :

(1) Proses konversi ke kartu BNI

Pemegang kartu ATM BNI dapat menggunakan mesin ATM BNI untuk menarik dana, memeriksa saldo dan transfer dana antar rekening tabungan dan giro (termasuk ke rekening nasabah lain). BNI juga telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 9 penyedia jasa pihak ketiga untuk memungkinkan pembayaran berbagai tagihan seperti telepon, telepon seluler, kartu kredit, air dan tagihan-tagihan lain melalui ATM BNI. Pemegang kartu ATM BNI juga dapat membeli voucher isi ulang telepon seluler melalui mesin ATM BNI. Pemegang kartu ATM juga dapat melakukan transaksi melalui ATM non-BNI yang terintegrasi dengan jaringan Cirrus, Plus, ATM LINK dan ATM Bersama dan *merchant* yang tergabung dalam jaringan Maestro.

Jumlah transaksi di ATM BNI dan biaya yang ditagihkan oleh BNI meningkat secara stabil dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan meningkatnya jumlah *merchant* yang bergabung ke dalam program BNI dan bertambahnya nasabah yang mengetahui kemudahan pelayanan yang ditawarkan tersebut.

Tabel berikut menunjukkan jumlah dan nilai transaksi ATM pada periode-periode berikut ini:

Uraian	Per tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					Per tanggal serta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah transaksi pembayaran ATM	4.229.449	5.101.279	13.283.991	15.587.905	18.057.120	16.788.612
Nilai rata-rata transaksi bulanan (Rp miliar)	123	164	457	646	790	1.008

Transaksi debit memberikan manfaat likuiditas kepada BNI karena transaksi-transaksi semacam itu pada umumnya adalah transaksi transfer dana antar rekening BNI, sehingga tidak menyebabkan penarikan uang tunai. BNI juga mendapat keuntungan bunga karena transfer dana pada umumnya terjadi dari tabungan ke rekening giro. Selain itu, transaksi debit juga mengurangi biaya perawatan yang diperlukan untuk jaringan ATM BNI karena mengurangi penarikan tunai.

Untuk meningkatkan penggunaan jaringan kartu debatnya, BNI melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah pemegang kartu ATM dan *merchant* yang berpartisipasi, mendorong pemegang kartu debit dan kredit BNI untuk melakukan transaksi menggunakan jaringan ini, serta memberikan akses pada berbagai jaringan ATM domestik dan internasional kepada para pemegang kartu debit BNI. Sejak peluncuran kartu ATM *debit-enabled* pada tahun 1996 dan peluncuran kartu kredit yang bekerjasama dengan *merchant-merchant* tertentu di tahun 2005, jaringan debit BNI telah tumbuh menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia dari sisi jumlah kartu debit yang diterbitkan. BNI akan terus mengembangkan jaringan kartu debatnya dengan menargetkan *merchant* ritel terbesar di Indonesia, terutama supermarket dan *department store*, untuk memasang terminal EDC *debit enabled*. BNI juga berencana untuk menumbuhkan bisnisnya melalui *cross-selling* kepada seluruh nasabah tabungan dan kartu kredit BNI.

Phone banking

BNI menyediakan layanan *telephone banking* "BNI Call", yang memungkinkan nasabah melakukan transfer dana, memeriksa saldo rekening, mengisi ulang pulsa telepon seluler pra-bayar dan membayar tagihan seperti kartu kredit dan asuransi. Nasabah juga dapat mengakses informasi mengenai rangkaian produk dan layanan BNI melalui BNI Call.

Dengan 23 wilayah layanan *phone banking* di Indonesia dengan sistem yang dapat menerima sampai dengan 90 panggilan sekaligus, BNI meyakini bahwa BNI PhonePlus merupakan salah satu pemimpin pasar layanan *phone banking* di Indonesia. Nasabah BNI dapat mengakses layanan *phone banking* BNI dengan tarif lokal. Per 30 September 2010, BNI Phoneplus telah menyelesaikan lebih dari 58.000 dan 34.000 transaksi keuangan secara berturut-turut di untuk tahun yang berakhir pada tanggal 2009 dan pada periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010. BNI mempunyai rencana untuk memperluas layanan BNI Call dengan mengembangkan aliansi strategis dengan pihak ketiga untuk pembayaran tagihan, reservasi hotel, serta tiket kereta api dan pesawat terbang.

BNI SMS Banking & BNI Mobile (mobile banking)

BNI SMS Banking & BNI Mobile adalah fasilitas layanan transaksi perbankan melalui telepon selular. Perseroan meluncurkan layanan jasa BNI SMS Banking pada bulan April tahun 2006. Layanan yang diberikan melalui SMS Banking adalah transfer dana ke rekening BNI lain, pembayaran tagihan dan pembelian voucher isi ulang. Nasabah hanya membayar tarif operator. Pada tanggal 30 September 2010, pengguna aktif jasa ini berjumlah 1,1 juta (yaitu nasabah yang telah melakukan minimal satu kali transaksi perbankan dengan menggunakan layanan *sms banking*).

Internet Banking

Fasilitas layanan *Internet Banking* diperkenalkan pada bulan Mei 2007. Dengan fasilitas layanan tersebut, nasabah dapat melakukan mutasi rekening ke rekening BNI ataupun rekening bank lain yang menjadi anggota sistem Kliring Bank Indonesia / RTGS (*Real Time Gross Settlement System*), pembayaran tagihan dan pembelian voucher telepon selular. Nasabah juga dapat melihat transaksi-transaksi terakhir yang diproteksi menggunakan enkripsi digital. Per tanggal 30 September 2010, jumlah pengguna *internet banking* mencapai lebih dari 500.000 dimana 133.000 diantaranya merupakan pengguna aktif (yaitu nasabah yang telah melakukan minimal satu kali transaksi perbankan dengan menggunakan layanan *internet banking*).

Jaringan Internasional

Kantor cabang luar negeri BNI berfungsi secara independen dari kantor pusat dalam hal pemenuhan kewajiban pendanaan dan pemberian kredit dalam mata uang asing kepada nasabah berdasarkan limit yang ditetapkan di masing-masing kantor cabang, serta pengoperasian unit tresuri terpisah. Kantor-kantor cabang BNI di luar negeri umumnya melayani nasabah nasional yang memiliki operasi di luar negeri, termasuk pemberian pinjaman, penyimpanan, transfer dana dan *remittance*, penerbitan *L/C* dan layanan perbankan untuk keperluan *trade finance* lainnya. Per 30 September 2010, Kegiatan usaha BNI di luar negeri didukung oleh jaringan 1.517 bank koresponden internasional, 75 bank koresponden dalam negeri dan sejumlah aliansi strategis internasional melalui keanggotaan asosiasi perbankan internasional.

15. Persaingan Usaha

BNI menghadapi persaingan dalam setiap kegiatan usahanya, terutama dari bank-bank besar lainnya di Indonesia dan bank-bank asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Selain itu, BNI juga menghadapi persaingan dari institusi keuangan lain seperti koperasi dan perusahaan pembiayaan, serta dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau terafiliasi dengan Pemerintah yang memberikan pendanaan pengembangan industri dan pembiayaan jasa ekspor/impor. Selain itu, Pemerintah telah mengizinkan bank asing untuk mendirikan kantor cabang di Indonesia. Persaingan dari bank asing yang telah dan akan beroperasi di Indonesia dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kondisi keuangan BNI. Sebagai contoh, konsorsium yang dipimpin oleh Acom Co Ltd dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ yang mengakuisisi PT Bank Nusantara Parahyangan di tahun 2007, CIMB Group yang mengakuisisi PT Bank Niaga dan melakukan penggabungan dengan PT Bank Lippo pada tahun 2008, United Overseas Bank Limited yang mengakuisisi PT Bank Buana di tahun 2008, OCBC Bank yang mengambil alih saham mayoritas PT Bank NISP pada tahun 2010 dan HSBC Limited yang mengambil alih saham mayoritas PT Bank Ekonomi Raharja pada tahun 2009. Di pasar internasional, BNI bersaing dengan berbagai bank dan institusi keuangan yang memiliki operasi dan jaringan internasional yang luas.

Per tanggal 30 Juni 2010, berdasarkan laporan keuangan publikasi bank-bank Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, BNI menduduki peringkat keempat dalam kredit yang diberikan dan total aset diantara bank-bank komersial di Indonesia. Tabel berikut memperlihatkan jumlah simpanan tidak dikonsolidasi, serta informasi pangsa pasar dari BNI dan pesaing utama BNI per tanggal 30 Juni 2010 (tidak diaudit):

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Perbandingan Pangsa Pasar Simpanan							
	Pada tanggal 30 Juni 2010							
	Giro	Pangsa Pasar (%)	Tabungan	Pangsa Pasar (%)	Deposito Berjangka	Pangsa Pasar (%)	Total Simpanan ⁽¹⁾	Pangsa Pasar (%)
Bank Mandiri	67.053	12,8	105.499	17,3	129.552	13,5	302.105	14,4
Bank Rakyat Indonesia	45.226	8,7	102.231	16,7	108.597	11,3	256.054	12,2
Bank BCA	59.127	11,3	127.870	20,9	68.033	7,1	255.030	12,2
BNI	53.672	10,3	55.163	9,0	71.360	7,4	180.195	8,6
Bank CIMB Niaga	25.235	4,8	20.765	3,4	58.464	6,1	104.463	5,0
Bank Danamon	8.234	1,6	17.487	2,9	41.173	4,3	66.895	3,2
Bank Panin	14.147	2,7	12.898	2,1	35.409	3,7	62.455	3,0
Bank BII	9.035	1,7	12.383	2,0	30.510	3,2	51.928	2,5
Bank Permata	11.543	2,2	10.369	1,7	27.039	2,8	48.951	2,3
Bank BTN	3.867	0,7	8.679	1,4	25.907	2,7	38.453	1,8
Total Bank-bank di Indonesia	522.162	100,0	610.805	100,0	963.069	100,0	2.096.036	100,0

Sumber: Laporan keuangan publikasi masing-masing bank secara individual dan Bank Indonesia.

(1) Simpanan nasabah tidak termasuk simpanan dari bank-bank lain.

Tabel berikut memperlihatkan kredit yang diberikan dan total aset tidak dikonsolidasi, serta informasi pangsa pasar dari BNI dan pesaing utama BNI pada tanggal 30 September 2010 (tidak diaudit):

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Perbandingan Pangsa Pasar Kredit Yang Diberikan dan Aset			
	Pada tanggal 30 Juni 2010			
	Kredit Yang Diberikan ⁽¹⁾⁽²⁾	Pangsa Pasar (%)	Total Aset	Pangsa Pasar (%)
Bank Mandiri	195.285	12,3	373.593	13,9
Bank Rakyat Indonesia	226.242	14,3	319.942	11,9
Bank BCA	131.551	8,3	296.379	11,1
BNI	122.908	7,7	218.704	8,2
Bank CIMB Niaga	91.214	5,7	125.863	4,7
Bank Danamon	67.166	4,2	98.380	3,7
Bank Panin	49.794	3,1	87.017	3,2
Bank BII	44.807	2,8	65.063	2,4
Bank Permata	43.939	2,7	62.716	2,3
Bank BTN	46.413	2,8	60.946	2,3
Total Bank-bank di Indonesia	1.586.492	100,0	2.678.265	13,9

Sumber: Laporan keuangan publikasi bank-bank individual dan Bank Indonesia.

Tabel berikut memperlihatkan *Capital Adequacy Ratio* (“CAR”), *NPL Ratio*, *Return on Equity* (“ROE”) dan *Return on Assets* (“ROA”) dari BNI dan bank-bank besar utama di Indonesia pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit)

Uraian	Perbandingan Rasio-rasio Keuangan			
	Pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010			
	CAR(%) ⁽¹⁾	Rasio NPL - bruto ⁽²⁾ (%)	ROE ⁽³⁾ (%)	ROA ⁽⁴⁾ (%)
Bank Mandiri	14,5	2,3	30,7	2,9
Bank Rakyat Indonesia	14,1	4,3	33,4	3,5
Bank BCA	14,7	0,8	31,6	3,5
BNI	13,3	4,3	24,3	2,3
Bank CIMB Niaga	12,1	2,7	22,2	2,6
Bank Danamon	15,4	3,5	18,7	3,0
Bank Panin	19,7	2,8	16,5	2,5
Bank BII	14,9	2,9	10,8	1,5
Bank Permata	13,9	3,7	25,1	2,4
Bank BTN	18,7	4,1	14,4	1,9
Citibank	26,6	9,7	24,3	5,7

Sumber: Laporan keuangan publikasi bank-bank individual dan Bank Indonesia.

Catatan:

(1) Modal inti dan modal pelengkap, dibagi dengan aktiva tertimbang menurut risiko

(2) Rasio NPL - bruto adalah total kredit bermasalah dibagi dengan total kredit yang diberikan (sebelum dikurangi penyisihan kerugian)

(3) Dihitung berdasarkan laba bank setelah pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 yang disetahunkan dengan cara mengalikannya dengan dua dan dibagi dengan rata-rata saldo akhir bulan dari modal inti dan modal pelengkap untuk periode tersebut

(4) Dihitung berdasarkan laba bank sebelum pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 yang disetahunkan dengan cara mengalikannya dengan dua dan dibagi dengan rata-rata saldo akhir bulan dari total aset untuk periode tersebut

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat diantara bank-bank di Indonesia, Perseroan telah menetapkan strategi untuk tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan aset yang berkualitas
- b. Mempertajam dan fokus portofolio bisnis BNI terutama pada segmen korporasi dan konsumen

Penajaman fokus portofolio bisnis BNI di setiap segmen :

- Pengembangan bisnis korporasi difokuskan pada 8 sektor unggulan (minyak & gas) dan Pertambangan, Telekomunikasi, Kimia, Agribisnis, Makanan dan Minimum, Perdagangan, Kelistrikan dan Konstruksi), khususnya pada inrastuktur, kelistrikan, alutsista
 - Pengembangan bisnis menengah difokuskan pada sektor-sektor unggulan di masing-masing wilayah dengan mempertimbangkan mitigasi risikonya
 - Pengembangan bisnis konsumen difokuskan pada kelompok nasabah potensial (*high net worth, affluent families, young elites, students, middle income families, wealthy singles, golden oldies*) dengan mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan nasabah.
- c. Diversifikasi *fee based income*
 - d. Pertumbuhan dana murah yang lebih agresif
 - e. Meningkatkan efisiensi operasional

16. Teknologi Informasi

Proses pembaruan (*upgrading*) dan perbaikan teknologi informasi secara berkesinambungan dipercaya sebagai kunci keberhasilan untuk memastikan kemampuan bersaing dalam industri perbankan Indonesia dan juga meningkatkan pengawasan internal serta sistem manajemen risiko. Sampai dengan saat ini, BNI telah melakukan pembaruan dan modernisasi atas *platform* Teknologi Informasi. Melalui *Core Banking System* yang dimiliki oleh BNI seluruh pelaporan, pemrosesan dan penyimpanan data serta kegiatan *back office* sudah terpusat dan dikerjakan di Kantor Pusat.

BNI merupakan bank pertama di Indonesia dan salah satu yang pertama di kawasan Asia-Pasifik, untuk melaksanakan “*Service Oriented Architecture*”, sebuah perkembangan strategi modern yang dapat memberikan informasi kepada unit bisnis BNI dan memungkinkannya dalam menyediakan produk ke pasar dengan lebih cepat dan untuk meningkatkan kinerja transaksi antar sistem dalam operasi bisnis BNI.

Inisiatif teknologi informasi diatur oleh Komite Manajemen Teknologi. Komite Manajemen Teknologi menentukan cetak biru teknologi BNI, investasi dan prioritas pembangunan teknologi informasi BNI, mengevaluasi kinerja penerapan teknologi BNI dan menjamin keselarasan antara teknologi informasi dan bisnis BNI. Pada kuartal kedua tahun 2009, BNI menyusun strategi teknologi informasi jangka panjang yang baru (BNI IT *Strategy Plan* "BNI ITSP") sejalan dengan rencana jangka panjang BNI. Inisiatif utamanya untuk periode 2009-2013 diorientasikan kepada transformasi yang berfokus pada nasabah, manajemen risiko bisnis, manajemen keuangan dan kinerja, keunggulan dalam kegiatan usaha bank, transformasi organisasi, proyek-proyek strategis dan transformasi teknologi lainnya. Pada bulan September tahun 2010, Komite Manajemen Teknologi BNI memperbaharui BNI ITSP untuk menyelaraskan strategi teknologi informasi dengan program transformasi yang berlangsung.

Pada bulan Desember tahun 2009, Komite Manajemen Teknologi menyetujui Pedoman Prinsip teknologi informasi. Secara umum, Pedoman Prinsip tersebut membentuk kerangka kerja untuk memecahkan atau berurusan dengan masalah teknologi informasi yang unik dan tidak ada dalam standar kebijakan operasional dan prosedur teknologi informasi BNI.

Untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis, BNI telah mengembangkan sistem *database* nasabah yang memungkinkan BNI untuk menangkap, mengatur dan mendapatkan informasi berharga yang berkaitan dengan nasabah dan produk untuk dukungan bisnis operasional, pemasaran dan manajemen strategis. Sistem Database Nasabah memfasilitasi laporan harian *online* untuk kegiatan produk, kualitas aset dan *forecasting* kas dan laporan bulanan terhadap profitabilitas nasabah pada bisnis-bisnis grosir. Sistem ini akan dikembangkan lebih lanjut seiring dengan meningkatnya permintaan bisnis dan manajemen.

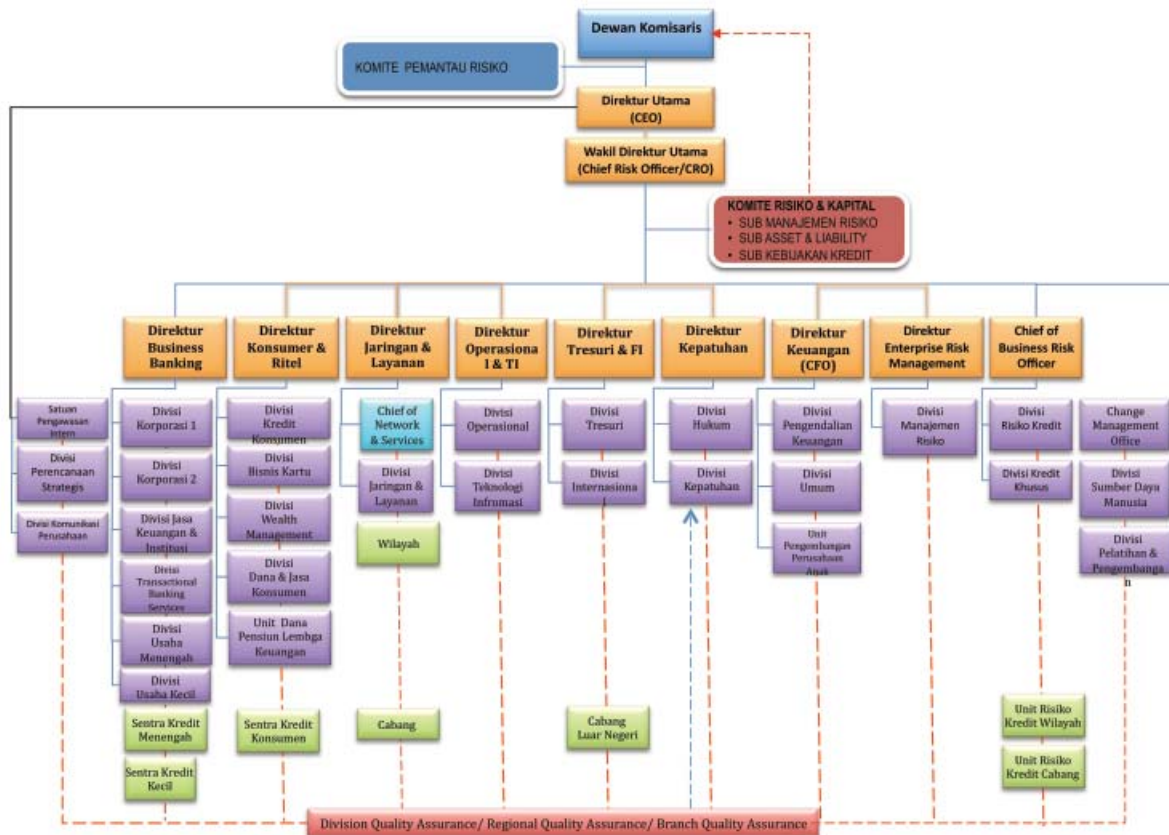
Untuk nasabah korporasi, BNI menawarkan berbagai layanan transaksi berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan manajemen *supply chain*, termasuk jasa Sistem Pembayaran Tagihan *Online*, *Internet Banking Corporate*, *Cash Management System* dan *Student Payment Center*. BNI juga meluncurkan *cash management system* baru di tahun 2009 yang menawarkan solusi keuangan yang komprehensif untuk nasabah korporasi, mencakup fasilitas manajemen arus kas masuk dan keluar, pembayaran elektronik, pengumpulan kas serta pelaporan keuangan.

BNI telah menerapkan sistem keamanan digital yang bertujuan untuk memberikan keamanan eksternal, seperti kontrol pada akses jaringan dan penggunaan *bandwidth* serta pencegahan kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui internet dan keamanan internal seperti *firewall* jaringan dan aplikasi, perangkat lunak anti-virus dan pembatasan akses terhadap informasi rahasia berdasarkan kewenangan karyawan. Manajemen keamanan teknologi informasi BNI telah dibakukan dan disertifikasi berdasarkan standar ISO 9001:2008 dan saat ini sedang mempersiapkan sertifikasi untuk ISO ISMS 27001.

Untuk menjamin kelangsungan bisnis, BNI juga telah mengimplementasikan fitur keamanan di *data center* BNI dan *disaster recovery center*, termasuk mekanisme *back-up*. Semua cabang dan ATM dapat berkomunikasi dengan *data center* dan *disaster recovery center*. BNI terus melakukan *fine tune* terhadap sistem jaringan. BNI juga terus berinvestasi pada *hardware*, jaringan dan fasilitas-fasilitas *disaster recovery*. Untuk memenuhi target efisiensi operasional, BNI memulai upaya efisiensi sistem serta standarisasi teknologi dan meluncurkan implementasi *bank-wide paperless* dan *Voice Over Internet Protocol (VOIP)* untuk menjalankan operasi perbankan dengan biaya yang lebih efektif.

Inisiatif-inisiatif ini terus berlanjut pada tahun 2010 melalui pengenalan produk dan fitur baru berbasis teknologi informasi, khususnya di bidang manajemen hubungan nasabah (*customer relationship management*), *trade finance*, *treasury* dan *business intelligence*. BNI juga sedang merencanakan inisiatif untuk memperkuat sistem manajemen risiko BNI, penerapan Basel II terkait untuk pemenuhan persyaratan regulatori, serta *fine tuning* berkelanjutan atas *call center* yang ada, *identity management* dan operasi teknologi informasi.

17. Manajemen Risiko dan Kepatuhan



Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Sebagai bagian dari usaha pembaharuan dalam sistem manajemen risiko, BNI membentuk struktur pengelolaan manajemen risiko berbagai tingkat (*multi-layer*). Salah satu komponen utama dalam struktur ini adalah pemisahan antara manajemen risiko kredit dan fungsi kepatuhan dari fungsi-fungsi operasional bisnis BNI. Manajemen risiko kredit dan fungsi kepatuhan BNI terpusat pada unit-unit independen di kantor pusat BNI. Karyawan manajemen risiko kredit dan kepatuhan di unit-unit terpusat ini bersifat independen dari unit-unit bisnis BNI. Selain itu, BNI memiliki karyawan risiko kredit dan *quality assurance* yang berlokasi dan bertanggung jawab di kantor cabang, sentra kredit usaha kecil, sentra kredit bisnis menengah dan unit-unit bisnis di kantor pusat BNI. Karyawan risiko kredit melapor langsung kepada Divisi Risiko Kredit di kantor pusat. Karyawan *quality assurance* yang bertanggung jawab atas kepatuhan, melapor langsung kepada Divisi Kepatuhan di kantor pusat. Dengan demikian, Divisi Risiko Kredit, Divisi Kepatuhan dan Audit Internal bersifat independen dari unit-unit bisnis BNI.

Tingkatan tertinggi dalam struktur organisasi BNI adalah Dewan Komisaris, yang bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan-kebijakan Direksi BNI. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dalam meninjau dan mengawasi kebijakan-kebijakan dan manajemen risiko BNI. Direksi BNI bertanggung jawab untuk mencanangkan kebijakan-kebijakan perbankan dan melaksanakan kegiatan usaha dan operasi BNI. Direksi BNI telah mendelagasikan tugas-tugas dalam manajemen risiko kepada Komite Risiko dan Kapital yang memberikan arahan setingkat Direksi untuk unit-unit di bawahnya. Pada tingkat operasional, BNI telah membentuk Direktorat Manajemen Risiko Perusahaan yang melapor kepada Komite Risiko dan Kapital dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis lainnya untuk mencanangkan, melaksanakan dan mengawasi strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. BNI juga memiliki Divisi kepatuhan yang melapor kepada Direktur Kepatuhan dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap panduan, kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

Komite Risiko dan Kapital

Direksi BNI telah medelegasikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan manajemen risiko dan mengawasi serta mengelola risiko-risiko BNI. Komite Risiko dan Kapital memberikan saran bagi Direksi BNI dalam permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan manajemen risiko. Komite ini terdiri dari dan menjalankan fungsinya melalui tiga sub-komite, yaitu sub-komite manajemen risiko, sub-komite *assets and liabilities* dan sub-komite Kebijakan Kredit.

Tanggung jawab utama Komite Risiko dan Kapital adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi semua risiko yang dihadapi oleh unit-unit bisnis, mengevaluasi, menyetujui serta memantau kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko.
- Mengembangkan mekanisme manajemen risiko untuk setiap risiko termasuk akuntabilitas dan tanggung jawab untuk setiap unit
- Menetapkan toleransi risiko termasuk eksposur risiko perbankan secara keseluruhan dan pengaruhnya terhadap unit-unit bisnis
- Menganalisis prosedur dan strategi untuk mengontrol risiko kredit termasuk sistem peringatan dini
- Menetapkan premium risiko kredit untuk setiap produk dan sektor, harga tertinggi dari suku bunga kredit dan penyisihan kerugian kredit untuk setiap segmen
- Melakukan pemeringkatan kredit dan batasan eksposur untuk nasabah dan sektor-sektor industri
- Melakukan peninjauan terhadap level-level risiko yang dihadapi BNI dan status operasi manajemen risiko serta memastikan bahwa level-level risiko tersebut berada dalam level toleransi yang dapat diterima
- Menetapkan tujuan-tujuan manajemen aset dan kewajiban serta memformulasikan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut
- Menentukan, mengawasi dan mengelola seluruh pendanaan dan posisi likuiditas, risiko likuiditas, risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar (termasuk PDN) dan risiko operasional BNI
- Menentukan kebijakan alokasi pendanaan melalui pasar modal dan pasar uang
- Menganalisis neraca dan menentukan risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar, risiko perdagangan dan risiko likuiditas yang terjadi
- Melakukan evaluasi terhadap perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi dan menganalisis pengaruhnya terhadap kredit, simpanan, aset dan kewajiban dalam mata uang asing, suku bunga dan nilai tukar serta profitabilitas
- Menghitung biaya pendanaan dan menentukan suku bunga pinjaman dasar serta suku bunga untuk giro, tabungan dan deposito
- Menentukan *transfer price* pendanaan internal
- Memastikan bahwa unit-unit bisnis mematuhi kebijakan-kebijakan internal dan peraturan eksternal dan mengawasi pelaksanaan kebijakan internal dan peraturan eksternal pada unit-unit bisnis

Direktorat *Enterprise Risk Management*

Direktorat *Enterprise Risk Management* membantu Komite Risiko dan Kapital serta dikelola oleh Direktur *Enterprise Risk Management*. Direktorat *Enterprise Risk Management* bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, memperhitungkan, mengevaluasi, mengawasi, mengelola dan melaporkan risiko-risiko yang ada. Direktorat ini mengawasi Divisi Manajemen Risiko dan bertanggung jawab dalam mengidentifikasi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional yang material.

Divisi Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk mencanangkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko bank keseluruhan, mencanangkan kriteria-kriteria untuk identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko, mengawasi dan melaporkan risiko-risiko serta melaksanakan kebijakan dan prosedur dalam portofolio bank secara keseluruhan

Divisi Kepatuhan

Divisi Kepatuhan berada di bawah pengawasan langsung Direktur Kepatuhan dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kepatuhan dan mendukung struktur manajemen risiko dengan melakukan peninjauan dan mengawasi kebijakan dan kegiatan internal untuk memastikan kepatuhan dengan (1) regulasi Bank Indonesia serta peraturan perundangan lain yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usaha (2) prinsip-prinsip perbankan internal yang hati-hati (*prudent*) seperti yang tertuang dalam petunjuk operasi, pernyataan kebijakan dan kode etik BNI.

Divisi Kepatuhan BNI melakukan peninjauan, pengawasan, pengujian dan pembuatan rekomendasi atas setiap aktivitas yang dilakukan oleh BNI dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kontrol internal, kebijakan dan prosedur telah dijalankan oleh seluruh unit bisnis pada semua level di BNI, termasuk kepatuhan terhadap peraturan anti-pencucian uang serta kebijakan dan prosedur melawan pendanaan terorisme. Divisi Kepatuhan dirancang untuk secara berkelanjutan melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas BNI dalam mendukung Divisi Manajemen Risiko dan Unit Internal Audit

Sebagai bagian dari struktur tersebut, BNI juga memiliki karyawan *quality assurance* di kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang dan unit bisnis, termasuk sentra usaha kecil, sentra usaha menengah dan sentra kredit konsumen. Karyawan ini bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan atas kepatuhan di masing-masing unit. Karyawan *quality assurance* di setiap unit bisnis dipisahkan dari fungsi unit bisnis dan melapor langsung kepada Divisi Kepatuhan.

Sehubungan dengan kegiatan diatas, Divisi Kepatuhan yang akan mempersiapkan dan menyerahkan laporan yang dibutuhkan kepada pihak yang berwenang di Indonesia, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu Divisi Kepatuhan juga mengadakan pelatihan secara reguler mengenai *quality assurance* kepada karyawan yang berkerja di Divisi Kepatuhan.

Divisi Hukum

Divisi hukum berada dibawah pengawasan langsung dari Direktur Kepatuhan dan bertanggung jawab untuk mengurangi dan memitigasi risiko hukum, memberikan masukan dalam bidang hukum mengenai produk dan layanan BNI. Divisi hukum juga bertanggung jawab untuk membuat kebijakan, prosedur dan pedoman untuk setiap aktivitas yang dilakukan oleh BNI dan juga menangani perkara-perkara hukum ataupun klaim yang melibatkan BNI. Divisi hukum bertanggung jawab untuk menyediakan *security assistance* untuk memastikan keamanan dan keselamatan dari aset dan bisnis BNI. Fungsi ini dijalankan oleh grup konsultasi dan pengembangan hukum, grup perkara perdata, grup perkara pidana dan grup *security assistance*.

Divisi Risiko Kredit

Divisi Risiko Kredit bertanggung jawab untuk melakukan penilaian mengenai risiko kredit dan untuk memastikan bahwa pemisahan tugas yang baik di BNI dan untuk menjalankan kebijakan dan prosedur manajemen risiko disetiap unit BNI. Karyawan Divisi Kredit memberikan rekomendasi terhadap aspek risiko dari setiap pinjaman yang diajukan. Karyawan Divisi Kredit untuk Grup Bisnis Perbankan Retail, Divisi Usaha Menengah, Divisi Usaha Kecil berada di sentra usaha kecil dan sentra usaha menengah yang dimiliki oleh BNI dan melakukan pemantauan terhadap risiko kredit untuk cabang-cabang BNI. Karyawan Divisi Kredit untuk Divisi Perbankan Korporasi berada dikantor pusat bersama dengan Divisi Treasuri dan Divisi Perbankan Internasional. Untuk memastikan *check and balances* pada prosedur dan operasional BNI, karyawan Divisi Kredit melapor langsung pada Divisi Risiko Kredit

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama dan melapor kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan. Tanggung jawab Unit Audit Internal adalah membantu Direktur Utama dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap seluruh unit bisnis, unit pembantu dan memastikan setiap unit beroperasi secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan organisasi dan sesuai dengan standar dan prosedur operasional. Unit Internal Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola perusahaan.

Untuk memastikan pengawasan yang tepat dari semua aspek, Unit Internal Audit BNI mempekerjakan lebih dari 160 auditor, yang dibagi menjadi tiga kelompok dan bertanggung jawab atas (i) unit internasional, treasuri dan pendukung, (ii) cabang dan sentra kredit di daerah tertentu di bagian barat Indonesia, serta unit usaha lainnya di kantor pusat dan (iii) cabang dan sentra kredit di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, Unit Internal Audit harus ditinjau oleh pihak independen setiap tiga tahun sekali untuk memastikan kepatuhan dengan standar fungsi audit internal bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sejak tahun 2000, Unit Audit Internal BNI telah ditinjau sebanyak empat kali, dengan hasil bahwa Unit Audit Internal BNI telah sesuai dengan standar umum yang berlaku.

18. Hak Kekayaan Intelektual

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual berupa merek dengan perincian sebagai berikut.

Merek

No.	Nama Merek	Nomor Registrasi Merek	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek
1.	"BNI 46".	IDM000066355	36	23 Juli 2004	Selama 10 Tahun sejak tanggal penerimaan 23 Juli 2004
2.	"BNI 46".	IDM000066354	36	23 Juli 2004	Selama 10 Tahun sejak tanggal penerimaan 23 Juli 2004
3.	"BNI 46"	IDM000066353	36	23 Juli 2004	Selama 10 Tahun sejak tanggal penerimaan 23 Juli 2004
4.	"BNI 46"	IDM000066411	36	23 Juli 2004	Selama 10 Tahun sejak tanggal penerimaan 23 Juli 2004
5.	"Tapenas BNI"	IDM000066511	36	27 Juli 2004	Selama 10 Tahun sejak tanggal penerimaan 27 Juli 2004
6.	Dollar BNI	IDM000066512	36	27 Juli 2004	Selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan 27 Juli 2004
7.	Rejeki Durian Runtuh BNI Taplus	IDM000182844	36	3 Mei 2007	Selama 10 Tahun sejak tanggal penerimaan 3 Mei 2007
8.	Rejeki Durian Runtuh BNI Taplus	IDM000182843	36	3 Mei 2007	Selama 10 Tahun sejak tanggal penerimaan 3 Mei 2007

19. Asuransi

Perseroan telah menutup asuransi terhadap seluruh aset material Perseroan terutama yang dipergunakan untuk kegiatan operasional Perseroan yang berada di seluruh wilayah Indonesia atas resiko-resiko sebagai berikut:

1. Kebakaran (*Fire Insurance*);
2. Gempa Bumi (*Earthquake Insurance*);
3. Kebongkaran (*Burglary Insurance*);
4. Kerusakan Alat-alat (*Machinery Breakdown*);
5. Kerusakan Peralatan Elektronik (*Electronic Equipment Insurance*);
6. Property All Risk Insurance;
7. Asuransi Uang yang terdiri atas:
8. Uang Dalam Simpanan (*Cash In Safe*);
9. Uang Dalam Mesin (*Cash In Cashier Box*);
10. Uang Dalam Perjalanan (*Cash In Transit*)

Perseroan telah mengasuransikan asset-asetnya kepada perusahaan asuransi berserta jumlah polis yang dikeluarkan untuk Perseroan seperti pada tabel berikut:

No.	Assuradur	Jumlah Polis
1.	PT Asuransi Tri Pakarta (Terafiliasi)	2075
2.	PT Jasindo (Terafiliasi)	168
3.	PT Wahana Tata	144
4.	PT Asuransi Sinar Mas	2
5.	PT Asuransi Ramayana	3
6.	PT Asuransi Rama Satria Wibawa	5
7.	PT Asuransi Tugu Pratama	1

Perseroan berkeyakinan bahwa seluruh aset Perseroan yang bersifat material telah diasuransikan dinilai memadai untuk menutup seluruh kerugian yang mungkin dapat terjadi apabila aset tersebut mengalami kerusakan atau musnah. Seluruh polis asuransi Perseroan masih berlaku dan mengikat Perseroan.

PT Asuransi Tri Pakarta dan PT Jasindo adalah pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yaitu sebagai anak perusahaan Perseroan. Namun demikian tidak ada perlakuan yang berbeda antara perusahaan yang terafiliasi maupun tidak terafiliasi baik untuk biaya, pelayanan, maupun fasilitas yang diberikan oleh masing-masing perusahaan asuransi. Transaksi antara Perseroan dengan perusahaan asuransi, termasuk dengan Asuransi Permata, memiliki ketentuan dan persyaratan yang berlaku umum (*arm's length*).

20. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance / GCG*)

Secara terus menerus, BNI mengedepankan agenda agresif untuk mendorong upaya perbaikan implementasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaannya.

Tahun 2009 merupakan tahun kebangkitan bagi kinerja BNI. Pada tahun ini laba BNI meningkat sebesar 103% (seratus tiga persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Prestasi yang dicapai oleh BNI tersebut tidak lepas dari peran pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di BNI. Dengan dilaksanakannya GCG maka risiko- risiko dapat dikendalikan dengan baik dan berdampak pada semakin baiknya kinerja BNI.

Manajemen BNI menyadari penerapan prinsip- prinsip GCG sangat diperlukan dalam setiap aspek pengelolaan kegiatan usaha Bank. Oleh sebab itu Dewan Komisaris dan Direksi BNI membuat komitmen bersama untuk melaksanakan GCG di BNI.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, BNI secara terus menerus berupaya secara konsisten melakukan perbaikan serta penyempurnaan terhadap implementasi GCG lingkungan internal BNI antara lain dengan melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan internal BNI sehingga kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan sistem reward dan *punishment* dilaksanakan dengan konsekuen.

Peningkatan kualitas dan standar penerapan GCG pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan dengan berlandaskan pada budaya kerja yang bersih dan sesuai standar etika dalam praktek sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap BNI, memberikan manfaat yang optimal serta melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) BNI. Untuk semakin mendukung penegakan GCG di BNI, kepada segenap *stakeholder* dimungkinkan penyampaian pengaduan atas pelanggaran- pelanggaran GCG melalui sarana email gcg@bni.co.id atau PO Box GCG BNI.

Untuk memberikan informasi kepada para *stakeholder* mengenai laporan pelaksanaan GCG pada tahun 2009 sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, tanggal 30 January 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, BNI telah menyusun laporan Pelaksanaan GCG untuk tahun 2009.

Kode Etik Karyawan

BNI telah memiliki panduan berupa kode etik atau *Code of Conduct* (disingkat dengan "COC") sebagai pedoman etika yang menjadi prinsip dan dasar yang memandu hubungan di antara Insan BNI dan hubungan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam berbisnis sejak tahun 2001, yang diharapkan dapat mendukung implementasi Tata Kelola Perusahaan dengan sebaik-baiknya.

COC merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan- peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.

Dalam perjalanannya, BNI melakukan review terhadap COC dengan maksud dan tujuan untuk:

- Menyempurnakan pedoman bagi seluruh pelaku bisnis di perusahaan agar berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas perusahaan, serta sebagai pedoman dalam menentukan sikap pada saat menghadapi keadaan yang dilematis.

- Sebagai kriteria dalam menilai apakah individu di dalam perusahaan telah berperilaku sesuai dengan yang diinginkan perusahaan atau menyimpang dari peraturan tersebut.
- Mengidentifikasi standar-standar dan etika dalam perusahaan agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Implementasi COC di atas, diharapkan mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi segenap insan BNI, serta menciptakan kerja sama tim yang solid. Mengingat COC ini merupakan pedoman bagi insan BNI dalam bersikap dan berperilaku untuk melaksanakan tugas sehari-hari, serta berinteraksi dengan mitra kerja, mitra usaha dan pihak-pihak lainnya, dengan tujuan BNI mampu mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingannya. Pada intinya Code of Conduct BNI mengatur pokok-pokok hal-hal sebagai berikut:

1. Bertindak profesional
2. Menjadi panutan & saling mengingatkan
3. Menjaga hubungan baik antar insan bni
4. Menjaga kerahasiaan
5. Menjaga keamanan kerja
6. Berkomitmen terhadap lingkungan
7. Melakukan pencatatan data dan penyusunan laporan
8. Mencegah benturan kepentingan
9. Memberi/menerima hadiah/cinderamata
10. Bertindak sebagai narasumber
11. Larangan menjadi anggota dan donatur parpol
12. Mengungkapkan informasi
13. Menggunakan dan menjaga aset bni
14. Penggunaan *corporate identity*

Prinsip 46

Prinsip 46 merupakan panduan perilaku yang akan membantu semua insan BNI memahami nilai-nilai Budaya Kerja BNI dan melaksanakan Perilaku Utama yang dijadikan tonggak-tonggak perilaku teladan di BNI. Tuntutan ini berlaku bagi seluruh insan BNI dari jajaran Dewan Komisaris, Direksi, pemimpin sampai jajaran pegawai terendah dalam struktur organisasi, termasuk pegawai rekanan yang ditugaskan di BNI.

Prinsip 46 yang dicanangkan pada tanggal 5 Juli 2007 merupakan akronim dari 4 (empat) nilai budaya kerja yang baru, yaitu profesionalisme, integritas, orientasi pelanggan dan perbaikan tiada henti serta 6 (enam) perilaku utama yaitu meningkatkan kompetensi dan hasil terbaik, jujur tulus dan ikhlas, disiplin konsisten dan bertanggung jawab, memberikan pelayanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis, senantiasa melakukan penyempurnaan, kreatif dan inovatif. Diharapkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kerja yang baru akan dapat mendukung pencapaian visi dan misi BNI untuk senantiasa unggul dalam layanan dan kinerja mengingat bahwa budaya kerja tersebut mencerminkan keinginan sungguh-sungguh dan komitmen yang kuat dari insan-insan BNI untuk memberi yang terbaik kepada seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders* baik internal maupun eksternal).

Nilai Budaya Kerja BNI mempunyai makna sebagai berikut:

No.	4 Nilai Kebudayaan	Makna
1.	Profesionalisme	Memiliki kompetensi dan berkomitmen memberikan hasil terbaik
2.	Integritas	Berkomitmen untuk selalu konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh kata hati dan kepercayaan pada prinsip-prinsip kebenaran yang hakiki
3.	Orientasi pelanggan	Senantiasa mengutamakan kepentingan pelanggan dengan dilandasi sikap saling menghargai dan hubungan kemitraan yang sinergis
4.	Perbaikan tiada henti	Senantiasa mencari peluang dan solusi untuk meningkat layanan dan kinerja yang melampaui harapan pelanggan

Nilai profesionalisme dan integritas berorientasi ke dalam diri individu. Sedangkan nilai orientasi pelanggan dan perbaikan tiada henti berorientasi pada aspek di luar diri seperti lingkungan dan pihak lain. Pelanggan dalam hal ini berarti luas yaitu pihak-pihak internal dan eksternal termasuk segenap pemangku kepentingan BNI.

Setiap Nilai Budaya Kerja BNI memiliki perilaku utama yang merupakan acuan bertindak bagi seluruh Insan BNI, dengan perincian sebagai berikut:

No.	4 Nilai Budaya Kerja	6 Perilaku Utama
1.	Profesionalisme	a. Meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik
2.	Integritas	b. Jujur, tulus dan ikhlas c. Disiplin, konsisten dan bertanggung jawab
3.	Orientasi pelanggan	b. Memberikan layanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis
4.	Perbaikan tiada henti	b. Senantiasa melakukan penyempurnaan c. Kreatif dan Inovatif

Komitmen insan BNI untuk mempunyai perilaku dan sikap yang mencerminkan Nilai Budaya Kerja Prinsip 46 diwujudkan dalam penandatanganan komitmen Terhadap Prinsip 46.

21. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*)

BNI telah memberikan komitmennya pada pembangunan berkelanjutan, sebagaimana yang tercantum dalam salah satu misi BNI, yaitu 'Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan'.

Pada tahun 2009, sebuah peta jalan keberlanjutan telah dikembangkan sebagai acuan bagi segenap warga BNI dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, keberlanjutan menjadi sebuah upaya strategis yang diinternalisasi kedalam bisnis BNI.

Sebagai perusahaan yang berorientasi pada konsep keberlanjutan maka BNI telah menyusun strategi yang disusun dalam bentuk '*Road Map of Sustainability*'. Strategi tersebut dipilah berdasarkan periodisasi yaitu secara semesteran dan akan diimplementasikan selama 2 (dua) tahun yaitu sejak 2009-2011.

Strategi tersebut secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu strategi internal dan eksternal. Strategi internal, BNI melakukan operasional perusahaan dengan melakukan pendekatan *Green Office*. Penerapan strategi tersebut dilakukan mulai kantor pusat hingga ke kantor-kantor cabang baik di dalam negeri maupun luar negeri. *Green office* dimaksudkan tidak hanya untuk melakukan efisiensi saja namun juga dimaksudkan agar pegawai menerapkan filosofi dari konsep keberlanjutan dalam perilaku sehari-hari.

Internalisasi semangat keberlanjutan pada diri pegawai akan menjadi landasan yang kuat bagi BNI untuk menerapkan strategi eksternal yang disebut dengan *Green Bank* atau *Sustainable Corporate* yaitu menjadi insitusi keuangan yang memberikan prioritas pada sustainability dalam praktek bisnisnya. Kedua strategi tersebut selama tahun 2009 telah diterapkan dalam berbagai tindakan nyata.

Investasi pada Lingkungan Alam dan Sosial

Penyaluran kredit pada sektor energi terbarukan BNI menyadari bahwa energi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil bersifat tidak terbarukan dan merupakan salah satu kontributor utama dalam emisi gas rumah kaca. BNI berkontribusi dalam meminimalisir efek dari rumah kaca antara lain dengan meningkatkan portofolio kredit di sektor energi terbarukan khususnya pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

Panas bumi menghasilkan energi yang ramah lingkungan antara lain dicirikan oleh sifat *zero waste*. Selama beberapa tahun terakhir, peningkatan portofolio kredit BNI di sektor panas bumi adalah lebih dari USD 50 juta.

Beberapa proyek PLTP yang dibiayai oleh BNI antara lain:

- PLTP Wayang Windu, Jawa Barat dengan kapasitas 2 x 110 MW. BNI terlibat dalam pembiayaan sindikasi dengan bank-bank lain dengan menyalurkan pembiayaan sebesar USD 90,712 juta atau sebesar 30% dari total pembiayaan sindikasi.
- PLTP Patuha, Jawa Barat dengan kapasitas 1 x 55 mega MW yang dikelola oleh PLTP Patuha yaitu anak perusahaan PT PLN dan PT Pertamina. Kredit yang disalurkan sebesar USD 103 juta dan direncanakan akan beroperasi paling lambat pada akhir tahun 2012. PLTP Patuha diproyeksikan akan menghemat 800 ribu barel per tahun bahan bakar minyak.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Ketersediaan sumber daya air di bumi pertiwi ini cukup melimpah. BNI telah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan tenaga air dalam Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Salah satu daerah yang potensial untuk proyek PLTA adalah di daerah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sebagai daerah dengan topografi yang mendukung dan ketersediaan air yang cukup besar maka BNI membiayai PLTA Poso Energi. Model pembiayaan adalah dengan sindikasi dimana BNI adalah sebagai kreditur terbesar atau sekitar 30% dari total pembiayaan. Terkait dengan pembiayaan tersebut, dilakukan power purchase agreement (PPA) dalam pembelian listrik yang dihasilkan melalui skema karbon kredit.

Selain itu BNI Kantor Wilayah XI Manado Sulawesi Utara juga telah berkomitmen untuk membiayai sebesar 30% dari total biaya proyek PLT Minihidro Sawangan di Minahasa. Proyek tersebut direncanakan memiliki kapasitas sebesar 7 MW dengan nilai sebesar USD 4,9 juta.

Keterlibatan BNI dalam Perdagangan Karbon

Perdagangan karbon atau dikenal sebagai sistem cap-and-trade adalah mekanisme berbasis pasar untuk membatasi peningkatan CO₂ di bumi antara lain melalui sistem insentif bagi pihak-pihak yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut mengimplementasikan Protokol Kyoto melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM). CDM adalah salah satu solusi alternatif untuk mengurangi emisi karbon di dunia melalui skema perdagangan karbon yang diatur oleh PBB melalui UNFCCC.

Sejalan dengan spirit BNI tentang keberlanjutan yang tertuang dalam salah satu misi BNI maka BNI juga terlibat dalam CDM melalui pembiayaan terhadap proyek-proyek ramah lingkungan. Tindakan nyata yang dilakukan antara lain adalah pada bulan Juli 2009 BNI berkolaborasi dengan *Green Works Asia* dan *Climate Change Capital Limited* untuk mengalokasikan dana sebesar Rp. 2 triliun pada proyek-proyek yang dapat menekan emisi gas rumah kaca.

Selain itu CCC Ltd juga berkomitmen untuk menyediakan dana sebesar USD 1,18 miliar untuk mendukung program pengurangan polusi karbon di Asia Tenggara, termasuk proyek pembangkit listrik batubara berkapasitas 50 MW di Indonesia.

Pembiayaan pada Industri Kreatif

Industri kreatif dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Industri kreatif adalah bidang usaha penyediaan produk kreatif langsung kepada pelanggan dan pendukung penciptaan nilai kreatif pada sektor lain.

Sebagai sektor yang mengedepankan kreatifitas, baik dalam penggunaan bahan baku, proses produksi maupun pemasarannya maka industri kreatif dapat dikatakan sebagai industri yang ramah lingkungan.

Pertimbangan utama karena memberdayakan masyarakat kecil sebagai ujung tombak industri yang baru tumbuh di Indonesia tersebut, serta penggunaan bahan baku yang didominasi oleh bahan-bahan alami dan R3 (*reduce, reuse, recycled, reused*).

BNI menyadari bahwa penciptaan nilai atas suatu produk akan meningkatkan daya saing produk. Dengan demikian BNI berkomitmen untuk mendukung pengembangan industri kreatif antara lain melalui dukungan finansial yaitu penyaluran fasilitas kredit.

Selain dukungan finansial, BNI juga terlibat dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan (*skill*) para pelaku industri kreatif tersebut, antara lain melalui program pelatihan yang selama tahun 2009 telah dilakukan di Jakarta, Bekasi, Bandung, Palembang, Denpasar dan Yogyakarta.

Kemitraan antara BNI dengan para pelaku industri kreatif juga dilakukan dengan membuka akses pasar lebih luas diantaranya melalui pameran dan expo yang dilakukan baik didalam maupun di luar negeri. Antara lain pada Asian Expo di London pada Januari 2009, Pameran Mega Show di Hong Kong dan Festival Indonesia di Melbourne pada bulan Oktober 2009, serta keterlibatan dalam INACRAFT 2009 dan 12 pameran berskala nasional lainnya.

Keberlanjutan berarti Kinerja

Kepedulian BNI terhadap lingkungan alam dan masyarakat ternyata tidak hanya bernilai secara ekologis dan sosial saja namun juga terbukti sejalan dengan peningkatan kinerja BNI. Hal itu juga sejalan dengan meningkatnya kepercayaan para pemegang saham yang direpresentasikan oleh harga saham BNI yang meningkat cukup signifikan selama tahun 2009. Harga saham BNI pernah menyentuh harga Rp 640 per lembar saham namun pada akhir tahun 2009 meningkat tajam hingga menjadi Rp1.980 per lembar saham.

Berdasarkan data Bloomberg, saham BNI adalah salah satu saham yang memberi keuntungan terbesar karena mencatat lonjakan gain tertinggi yakni 191% pada sepanjang tahun 2009.

Salah satu prestasi lain yang diberikan oleh investor adalah tercatatnya saham BNI dalam indeks Sri Kehati, *Sustainable and Responsible Investment* sebagai inisiatif bersama Yayasan Keaneka ragaman Hayati Indonesia (Kehati) dan Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu referensi utama investor. Saham BNI dalam SRI-Kehati yang berada pada kategori Hijau-2, menunjukkan bahwa BNI telah mengelola bisnis yang berorientasi keberlanjutan dan dipercaya akan menguntungkan dalam jangka panjang.

Kemitraan untuk memberdayakan masyarakat

Sesuai dengan misi perusahaan maka kepedulian BNI tidak hanya dilakukan terhadap lingkungan alam namun juga terhadap lingkungan sosial. Hal itu antara lain dilakukan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sekaligus memenuhi Ketentuan Pemerintah RI di tahun 1994, UU No. 19/2007 tentang BUMN dan Peraturan Menteri Negara BUMN No.05/2007 tentang PKBL.

Ketentuan dan peraturan yang ada mensyaratkan bahwa 1-5% dari laba bersih setelah pajak agar dialokasikan untuk PKBL. BNI sepanjang tahun 2009 telah menganggarkan Rp200 miliar untuk PKBL dan telah direalisasikan sebesar 90% dari anggaran tersebut.

Program Kemitraan

Program kemitraan BNI difokuskan untuk memberdayakan masyarakat melalui penyaluran pinjaman lunak bergulir pada pengusaha kecil. Dengan demikian pengusaha kecil yang selama ini relatif tidak *bankable*, mempunyai kesempatan besar untuk lebih berkembang melalui dukungan finansial dari BNI melalui PKBL tersebut.

Salah satu bentuk nyata kepedulian BNI pada pemberdayaan masyarakat adalah dengan membentuk 'Kampoeng BNI' di beberapa daerah. Spirit pembentukannya adalah untuk mengembangkan suatu kawasan pedesaan melalui pinjaman lunak program kemitraan untuk mengembangkan potensi masyarakat di setiap daerah. Dengan demikian diharapkan akan berdampak *multiplier* terhadap peningkatan derajat hidup masyarakat.

Saat ini pembentukan Kampoeng BNI antara lain:

Kampoeng BNI Sapi Subang, Kampoeng BNI Jagung Tasikmalaya, Kampoeng BNI Ulut Sutera Imogiri Yogyakarta, Kampoeng BNI Sapi Nongkojajar Malang dan Kampoeng BNI Tenun Songket Ogan Ilir Sumatera Selatan.

Pembentukan 'Kampoeng BNI' tersebut telah dilakukan sejak tahun 2007 dan rencananya akan terus dilakukan di beberapa daerah di seluruh penjuru tanah air. Kedepan, BNI akan kembali membuka Kampoeng BNI misalnya industri pisang di Lumajang, pewarnaan alam untuk kain ulos di Pulau Samosir, kain tenun ikat di Nusa Tenggara Timur dan budidaya mutiara di Nusa Tenggara Barat.

Program Bina Lingkungan

Dalam rangka turut serta menjaga kelestarian lingkungan, pada umumnya peranan BNI dalam bentuk bantuan hibah yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Program bina lingkungan tersebut disalurkan ke 6 (enam) sektor yaitu korban bencana alam, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pelestarian lingkungan, sarana ibadah serta pengembangan sarana dan prasarana umum.

Secara umum beberapa kegiatan bina lingkungan yang telah dilakukan BNI adalah:

Bantuan bencana alam, antara lain diberikan pada korban gempa di Tasikmalaya, Padang, Manokwari, Manado, Bima dan Dompu dan korban banjir Situgintung dan Karawang.

Bantuan pendidikan dalam bentuk pengoperasian Pojok Wirausaha BNI di beberapa universitas untuk membentuk jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa; renovasi gedung sekolah; program Ayo Membaca, Ayo Menabung di Tangerang dan Bandung; dan bantuan pendidikan lainnya seperti beasiswa, buku bacaan dan peralatan sekolah.

Pengembangan sarana umum, antara lain pengadaan motor pengangkut sampah di Jawa Tengah, sarana listrik mandiri di Samarinda dan pembangunan pasar tradisional di Pacitan.

Bantuan kesehatan, antara lain melanjutkan pengoperasian 46 klinik kesehatan murah di beberapa wilayah di Indonesia.

Bantuan pembangunan sarana ibadah, termasuk bantuan sosial dalam rangka hari raya keagamaan.

Bantuan pelestarian alam berupa penanaman 500.000 bibit pohon dan program penghijauan di berbagai wilayah Indonesia, serta pembangunan hutan kota di Nanggroe Aceh Darussalam.

Mengurangi Beban Lingkungan

Green Office

Mengurangi Penggunaan Kertas

BNI secara bertahap telah menerapkan budaya paperless antara lain melalui budaya R3 (*reuse, reduce dan recycle*) serta inisiasi untuk menyederhanakan format beberapa formulir dan laporan baik secara internal maupun untuk konsumsi eksternal.

Menggunakan listrik seperlunya

Di kantor besar BNI telah menerapkan kebijakan mematikan lampu secara terpusat setelah jam 18.00 WIB, mengaktifkan *lift* secara terbatas pada jam-jam tertentu, menggunakan lampu hemat energi yaitu jenis lampu LED dan menghimbau pegawai untuk mematikan computer saat meninggalkan meja kerja untuk waktu yang relative lama. Kebijakan tersebut juga telah diterapkan secara bertahap di kantor wilayah dan kantor cabang.

Pemanfaatan air hujan

Salah satu kantor cabang BNI di Kalimantan yang terletak di daerah dengan permasalahan *supply* air bersih yang terbatas telah memanfaatkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air sekaligus mengurangi eksploitasi terhadap air tanah. Model penggunaan air hujan tersebut akan dikembangkan di beberapa kantor cabang lainnya khususnya yang menghadapi permasalahan yang sama.

Pengelolaan air limbah

BNI telah mengolah air limbah untuk digunakan kembali untuk keperluan tertentu (misal untuk *flushing toilet*), yang disebut TP (*sewage treatment plant*). Hal itu telah dilakukan di BNI Jl Lada, Jakarta Kota.

Optimalisasi fasilitas teknologi dan informasi

Dalam rangka efisiensi waktu, biaya, tenaga dan peralatan tulis menulis, BNI telah mengoptimalkan media teknologi dan informasi untuk media komunikasi baik secara internal antar pegawai/unit juga secara eksternal yaitu dengan pemangku kepentingan antara lain melalui fasilitas intranet dan *website*.

Aktif dalam komunitas hijau

BNI memosisikan sebagai perusahaan berkelanjutan

BNI adalah satu-satunya bank di Indonesia yang menjadi penandatanganan United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) sejak tahun 2005. Selain itu pada tahun 2007 BNI terpilih sebagai salah satu Panitia Pengarah Global (*steering committee*) UNEP FI. Hal tersebut menunjukkan bahwa BNI telah 'mendeklarasikan' dirinya untuk berkomitmen menjadi institusi yang mengintegrasikan faktor kelestarian lingkungan dalam aktivitas bisnisnya dan direspon positif oleh dunia internasional. Dengan demikian secara formal BNI telah memosisikan diri sebagai perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable corporate*).

Partisipasi dalam event nasional maupun global

Pada bulan Mei 2009 BNI terpilih sebagai *Official Bank in the World Ocean Conference (WOC)* dan *Coral Triangle Initiative (CTI)* di Manado. Tindak lanjut dari penunjukan tersebut antara lain BNI akan bekerjasama dengan Kelola Mina Laut untuk mengembangkan pelabuhan terpadu dan pemrosesan ikan di Bali dan Lombok.

Pada *event* global BNI berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan lingkungan, antara lain sebagai peserta maupun pembicara dalam konferensi maupun seminar yang diadakan di luar negeri.

22. Prospek Usaha

Pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan III 2010 diperkirakan lebih baik dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2010, ekonomi domestik diperkirakan tumbuh 6,3% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tetap tumbuh di atas 5% (yoy). Pertumbuhan konsumsi ini dipacu oleh optimisme konsumen dan meningkatnya pendapatan yang antara lain berasal dari hasil ekspor. Pertumbuhan ekspor pada triwulan III 2010 diperkirakan mencapai 11,4%. Pertumbuhan ekspor ini dipicu oleh pertumbuhan ekonomi global yang terus membaik terutama China dan India seiring dengan semakin terbarnya negara tujuan ekspor. Investasi diperkirakan tumbuh sebesar 9,9% (yoy) pada triwulan III 2010 sebagai respons atas meningkatnya permintaan serta membaiknya iklim investasi. Kondisi ini berimplikasi pada impor yang juga meningkat. Secara sektoral, sektor *nontradable* tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor *tradable*.

Dari sisi harga, inflasi sepanjang triwulan III 2010 menunjukkan peningkatan yang terutama bersumber dari kelompok *volatile foods*. Masih tingginya tekanan inflasi dari kelompok bahan makanan (*volatile food*) akibat gangguan distribusi dan produksi yang disebabkan anomali cuaca serta kenaikan tarif dasar listrik untuk rumah tangga. Sementara itu, tekanan inflasi juga bersumber dari penyesuaian biaya pendidikan sehubungan dengan datangnya tahun ajaran baru dan adanya peningkatan permintaan terkait hari raya keagamaan. Namun demikian, tekanan inflasi pada bulan September 2010 mengalami penurunan yaitu tercatat sebesar 0,44% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya yaitu 0,76% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, selama triwulan III 2010 inflasi IHK tercatat sebesar 2,79 (qtq) atau mencapai 5,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 1,41% (qtq) atau 5,05% (yoy). Sementara itu, dampak kelompok *administered prices* terhadap inflasi IHK masih relatif kecil karena tidak adanya kebijakan strategis pemerintah di bidang harga pada September 2010.

Neraca pembayaran Indonesia (NPI) triwulan III 2010 diperkirakan akan mencatat surplus yang lebih tinggi dari yang diperkirakan semula. Hal itu disebabkan oleh surplus neraca transaksi modal dan finansial (TMF) yang mengalami perbaikan cukup signifikan. Peningkatan surplus TMF yang cukup signifikan didorong oleh membaiknya persepsi internasional terhadap perekonomian Indonesia, yaitu perbaikan *outlook credit rating* Indonesia, imbal hasil investasi rupiah yang cenderung meningkat, serta kondisi eksekutif likuiditas global. Di sisi lain, surplus neraca transaksi berjalan (*current account/CA*) diperkirakan akan menurun akibat pertumbuhan impor yang tinggi, seiring dengan kegiatan ekonomi domestik yang terakselerasi. Namun demikian, impor yang terakselerasi tersebut masih mendukung kegiatan ekonomi domestik, tercermin dari dominannya impor bahan baku dan barang modal. Dengan perkembangan tersebut cadangan devisa pada akhir September 2010 mencapai 86,55 miliar dolar AS, atau setara dengan 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Nilai tukar rupiah terus menguat seiring dengan kinerja transaksi berjalan yang masih mencatat surplus cukup besar dan derasnya arus modal asing yang masuk serta faktor risiko yang masih terjaga. Penguatan rupiah ini didukung oleh sentimen global yang positif serta faktor fundamental domestik yang semakin kokoh. Jika dibandingkan dengan triwulan II 2010, secara rata-rata rupiah menguat sebesar 1,2% (qtq), mencapai Rp9.001 per dolar AS. Penguatan rupiah pada triwulan III tersebut diikuti oleh volatilitas yang turun dari 0,5% pada triwulan II 2010 menjadi 0,2% pada triwulan III 2010. Pada akhir triwulan III 2010 rupiah ditutup pada level Rp8.924 per dolar AS, atau menguat 1,2% (ptp) dibandingkan dengan triwulan II 2010. Nilai tukar rupiah yang cenderung stabil dapat mendukung kebutuhan impor bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi domestik dan di sisi lain penguatan rupiah belum memberikan tekanan yang signifikan bagi eksportir karena masih kuatnya permintaan internasional.

Pasar keuangan secara keseluruhan pada triwulan III 2010 berada dalam kondisi yang semakin stabil. Kondisi pasar SUN dan pasar modal terus membaik sebagaimana tercermin dari IHSG yang meningkat dan yield SUN yang menurun. Membaiknya pasar modal dan SUN pada triwulan III 2010 ini ditopang oleh prospek perekonomian yang terus membaik. Di pasar uang antarbank, kondisi likuiditas selama triwulan III 2010 cenderung meningkat. Transmisi kebijakan moneter sepanjang triwulan III-2010 juga berlangsung dengan baik sebagaimana tercermin dari suku bunga PUAB O/N yang bergerak di sekitar BI Rate, pertumbuhan kredit yang meningkat terutama untuk jenis kredit modal kerja dan IHSG yang mencapai level tertinggi sepanjang sejarah.

Di sisi mikro perbankan, kondisi perbankan nasional semakin kuat. Hal itu tercermin dari masih tingginya rasio kecukupan modal (CAR) dan terjaganya rasio *gross non-performing loan* (NPL) dibawah 5%. Selain itu likuiditas perbankan, termasuk likuiditas di pasar uang antar bank kian membaik dan dana pihak ketiga (DPK) yang terus meningkat. Intermediasi perbankan juga semakin baik tercermin dari pertumbuhan kredit yang hingga akhir September 2010 mencapai 21,2% (yoy). Pertumbuhan modal kerja selama tahun 2010 telah tumbuh melampaui jenis kredit konsumsi dan ke depan pertumbuhan kredit tetap diarahkan ke sektor yang produktif. Dengan perkembangan tersebut dan sesuai dengan rencana bisnis bank, untuk keseluruhan tahun 2010 pertumbuhan kredit diperkirakan mencapai 22%-24%. Peningkatan kredit terutama didorong oleh membaiknya keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian.

BNI akan tetap melaksanakan langkah – langkah usaha yang bersifat *prudent*, dengan memberikan perhatian khusus pada segmen nasabah yang dipandang mempunyai potensi yang baik bagi pengembangan usaha Bank BNI dalam jangka panjang. Sesuai dengan basis nasabah BNI yang memiliki kompetensi di segmen Korporasi; Usaha Menengah & Kecil; dan Konsumer, maka arah kebijakan Bank BNI ke depan masih dalam upaya memajukan segmen – segmen usaha tersebut yang dituangkan ke dalam Strategi Usaha BNI.

IX. INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA

Informasi-informasi berikut berasal dari sumber publik dan tidak di verifikasi secara independen oleh BNI, *Joint Global Coordinators, Joint Global Bookrunners* atau para penjamin emisi.

1. Struktur Industri

Sebelum bulan November 1988, sektor perbankan Indonesia terdiri dari Bank Umum, Bank Tabungan dan Bank Pembangunan dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Pada saat ini, sektor perbankan Indonesia terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat ("BPR"). Ditinjau dari segi kepemilikan, di Indonesia terdapat bank milik Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta Nasional, bank hasil *joint venture*, cabang bank-bank asing dan BPR. Per 30 Juni 2010, total aset bank milik Pemerintah adalah sebesar 35,8%, Bank Pembangunan Daerah adalah sebesar 8,8%, Bank Swasta Nasional adalah sebesar 40,7%, bank hasil *joint venture* adalah sebesar 13,2% dan BPR adalah sebesar 1,5% masing-masing dari total asset pada sektor perbankan Indonesia. Berikut ini adalah tabel rangkuman perkembangan sektor perbankan Indonesia dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir:

	Per 31 Desember							Per 30 Juni
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Bank Umum								
Bank milik Pemerintah	5	5	5	5	5	5	4	4
Bank Pembangunan Daerah	26	26	26	26	26	26	26	26
Bank Swasta Nasional	76	72	71	71	71	68	65	67
Bank hasil <i>joint venture</i> dan cabang Bank Asing	31	31	29	28	28	25	26	26
Total Bank Umum	138	134	131	130	130	124	121	123
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	2.141	2.159	2.009	1.880	1.817	1.772	1.733	1.715

Sumber: Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia per tanggal 31 September 2010*

Tabel berikut adalah aset, kredit, simpanan dan ekuitas dari top 10 bank dalam negeri per tanggal 30 Juni 2010:

(dalam miliar Rupiah)

Bank	Aset	Kredit ⁽¹⁾	Simpanan ⁽²⁾	Ekuitas
1 Bank Mandiri	373.593	195.285	302.105	36.508
2 Bank Rakyat Indonesia	319.942	226.242	256.054	30.523
3 Bank Central Asia	296.379	131.551	255.030	30.200
4 Bank Negara Indonesia	218.704	122.908	180.195	19.864
5 Bank CIMB Niaga	125.863	91.214	104.463	12.305
6 Bank Danamon	98.380	67.166	66.895	16.946
7 Bank Panin	87.017	49.794	62.455	11.381
8 Bank Internasional Indonesia	65.063	44.807	51.928	6.888
9 Bank Permata	62.716	43.939	48.951	5.450
10 Bank Tabungan Negara	60.946	46.413	38.453	5.539

Sumber: *Publikasi Laporan keuangan yang tidak diaudit untuk periode enam bulan berakhir yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 diterbitkan di situs bank yang bersangkutan dan / atau Bank Indonesia.*

(1) Termasuk produk Syariah dan tagihan konsumen pembiayaan

(2) Termasuk produk-produk Syariah

2. Perkembangan Industri Perbankan di Indonesia

Berikut ini merupakan perkembangan industri perbankan di Indonesia dari tahun 1983 hingga saat ini.

Periode Deregulasi Tahun 1983-1991

Pada awal tahun 1983, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan deregulasi dan birokrasi pada industri perbankan untuk mengembangkan sistem perbankan yang baik, efisien dan kuat. Langkah-langkah deregulasi yang telah dijalankan antara lain adalah menghapuskan pagu kredit, menurunkan GWM, memberikan fleksibilitas bagi bank-bank untuk menetapkan sendiri tingkat suku bunga kredit, tabungan dan simpanan serta memperkenalkan instrumen pasar uang.

Sebelum tahun 1988, sektor perbankan Indonesia terdiri dari Bank Umum, Bank Tabungan dan Bank Pembangunan namun tetap didominasi oleh 7 (tujuh) bank milik Pemerintah, yang menguasai lebih dari 60,0% total kredit perbankan. Dalam rangka pengembangan sektor industri perbankan Indonesia, mobilisasi simpanan dalam negeri dan mendukung iklim persaingan antar bank di Indonesia, Pemerintah, melalui Menteri Keuangan, telah mengeluarkan beberapa paket deregulasi pada bulan Oktober 1988. Salah satu kebijakan reformasi perbankan yang penting yaitu meringankan persyaratan untuk mendapat izin pendirian bank baru, yang mengakibatkan berdirinya bank-bank baru dengan pesat pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan deregulasi perbankan tersebut telah berhasil meningkatkan persaingan serta jumlah simpanan dan pinjaman secara signifikan pada tahun 1989 dan 1990. Namun demikian, karena beberapa alasan, tingkat pertumbuhan industri perbankan yang sangat cepat tersebut diiringi dengan penurunan kualitas aset secara signifikan dan peningkatan kredit bermasalah.

Melalui beberapa inisiatif kebijakan lanjutan, Pemerintah berusaha untuk meningkatkan sistem perbankan dan meningkatkan iklim perbankan yang lebih baik. Pada bulan Februari 1991, Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang lebih rinci dan melengkapi paket kebijakan deregulasi bulan Oktober 1988. Kebijakan tersebut kemudian diperbaiki dengan menerapkan peraturan mengenai minimum CAR sebesar 8,0% atas ATMR dan diterapkan di seluruh bank di Indonesia.

Periode Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1991-1996

Semenjak kebijakan uang ketat diberlakukan pada awal tahun 1991, sektor perbankan Indonesia mengalami periode konsolidasi dan melambatnya pertumbuhan kredit. sampai pertengahan tahun 1993. Pada periode ini, beberapa bank Pemerintah dan bank swasta nasional mengalami penurunan tingkat pertumbuhan kredit dan harus meningkatkan modal untuk menaikkan CAR hingga tingkat minimum yang disyaratkan oleh ketetapan Bank Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 1994, Pemerintah menetapkan batas 25% pada posisi devisa neto valuta asing.

Selama periode tahun 1992 dan 1993, tingkat suku bunga simpanan dan kredit mengalami penurunan secara bertahap. Dimulai pada awal tahun 1994, tingkat suku bunga di Indonesia meningkat kembali sebagai reaksi terhadap kenaikan tingkat suku bunga luar negeri yang diakibatkan oleh kenaikan tingkat suku bunga diskonto dan tingkat suku bunga pendanaan Bank Sentral AS. Namun setelah penurunan tingkat suku bunga Bank Sentral AS pada bulan Juli 1995, tingkat suku bunga di Indonesia mulai stabil dan kemudian secara perlahan menurun.

Krisis Ekonomi dan Pemulihan: Tahun 1997 Sampai Sekarang

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberikan beban yang besar bagi industri perbankan di Indonesia dan sebagian besar bank mengalami masalah likuiditas yang serius dikarenakan penarikan uang dari nasabah dan turunnya tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Akibat semakin banyaknya bank yang gagal memenuhi ketentuan tingkat GWM, Pemerintah mengambil langkah untuk memberikan BLBI kepada bank-bank tersebut. BLBI tersebut dipepanjang dengan persyaratan ketat.

BPPN

Menghadapi krisis ekonomi yang berawal pada pertengahan tahun 1997, BPPN dibentuk melalui Keputusan Presiden (Kepres) pada tanggal 26 Januari 1998 berupa badan otonom dibawah Menteri Keuangan. BPPN didirikan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama sehubungan dengan penyelesaian bank-bank bermasalah, yaitu: (i) mengelola pemberian jaminan kepada bank-bank atas nama Pemerintah sesuai Kepres tersebut diatas; (ii) mengawasi dan melakukan restrukturisasi atas bank-bank yang telah dinyatakan tidak layak beroperasi (*unsound*); (iii) melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan dalam kerangka restrukturisasi bank-bank tersebut. Secara umum, misi yang diemban BPPN adalah untuk mengawal pemulihan ekonomi Indonesia, melalui restrukturisasi bank dan pinjaman korporasi, serta mengoptimalkan tingkat pengembalian uang negara (yang dipinjamkan kepada bank-bank dalam bentuk bantuan likuiditas dan Obligasi Pemerintah) dalam rangka mengurangi beban APBN.

Berdasarkan peraturan yang berlaku saat itu, BPPN memiliki kewenangan yang luas, termasuk kewenangan; merestrukturisasi, merehabilitasi bank-bank dibawah kelolaan BPPN, termasuk kewenangan melakukan *merger* dan akuisisi. Melalui BPPN, Pemerintah mengeksekusi penutupan beberapa bank, merekapitalisasi, melakukan *merger* dan akuisisi untuk mengejar tujuan akhir dari bank umum dengan mempersedikit jumlah bank dan memperkuat bank-bank tersebut dengan cakupan geografis yang luas dan menawarkan berbagai layanan.

Program Penjaminan Pemerintah

Sejak tahun 1998, Pemerintah, sebagai jawaban atas krisis ekonomi dan sebagai dukungan terhadap menurunnya industri perbankan di Indonesia, telah menerapkan program penjaminan Pemerintah (*Government Guarantee Program*) dan program penawaran pertukaran (*Exchange Offer program*), untuk memberikan jaminan kepada penyimpan bank dan kreditur.

Secara umum, kewajiban yang dijamin oleh Pemerintah dalam program ini adalah pembayaran atas kewajiban bank umum nasional baik yang tercatat di neraca (*on-balance sheet*) maupun yang tidak tercatat dalam neraca (*off-balance sheet*) (termasuk kewajiban kantor cabang luar negeri bank-bank tersebut) kepada penyimpan asing dan dalam negeri serta para kreditur, termasuk kewajiban untuk membayar dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing sesuai dengan ketentuan dalam program tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam Program Penjaminan Pemerintah, jangka waktu penjaminan akan dengan sendirinya terus diperpanjang setiap enam bulan; kecuali Menteri Keuangan, sebelum akhir dari jangka waktu enam bulan tersebut, menyatakan tidak akan memperpanjang program tersebut.

Program Penjaminan Pemerintah sebelumnya dilaksanakan dan dikelola oleh BPPN. Pasca penutupan BPPN di awal tahun 2004, penjaminan ini dilaksanakan dan dikelola oleh suatu unit dibawah Menteri Keuangan dengan nama Unit Pengelola Penjaminan Pemerintah (UP3). Program Penjaminan Pemerintah berakhir di bulan September 2005. Penjaminan kewajiban pembayaran bank selanjutnya dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang didirikan berdasarkan Undang-undang No.24/2004 tanggal 22 September 2004 sebagaimana telah diamandemen oleh Peraturan Pemerintah Undang-undang No. 7/2009, tanggal 13 Januari 2009 dan mulai menjaminkan kewajiban pembayaran bank (simpanan).

Jenis tabungan yang diasuransikan oleh LPS adalah dana-dana piha ketiga (non-bank), deposito antar bank, termasuk didalamnya giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito dan/atau bentuk-bentuk tabungan lainnya yang diperlakukan sama dengan jenis-jenis tabungan diatas. Jumlah tabungan yang diasuransikan oleh LPS adalah saldo tabungan yang terdiri dari pokok dan bunga berjalan pada saat izin usaha bank masih berlaku. Jumlah saldo yang diasuransikan untuk tiap nasabah pada tiap bank adalah jumlah saldo seluruh rekening nasabah di bank tersebut, baik secara sendiri maupun bersama pihak lain, yang bernilai maksimum Rp 100 juta efektif mulai 22 Maret 2007, akan tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66/2008, tanggal 13 Oktober 2008, nilainya telah ditingkatkan menjadi Rp2 miliar.

Program Exchange Offer

Program *Exchange Offer* dimulai setelah adanya 2 (dua) kesepakatan yang dicapai antara Bank Indonesia dengan kreditur tertentu dari bank di Indonesia. Program *Exchange Offer* yang pertama diperkenalkan pada akhir tahun 1998 setelah adanya kesepakatan yang dicapai pada tanggal 18 Agustus 1998 dan yang kedua diperkenalkan pada pertengahan tahun 1999 setelah adanya kesepakatan pada tanggal 25 Mei 1999. Program yang disponsori oleh Pemerintah tersebut bertujuan untuk membantu restrukturisasi hutang dengan mengubah, misalnya, tingkat suku bunga atau jangka waktu. Dalam program *Exchange Offer* ini, Bank Indonesia menyediakan jaminan pasti dan tanpa syarat untuk kewajiban dari bank-bank Indonesia yang terkait.

Dalam Program *Exchange Offer* 1998, pinjaman yang memenuhi syarat dalam program tersebut ditukar menjadi perjanjian kredit baru yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahap dengan periode jatuh tempo: satu tahun, dua tahun, tiga tahun dan empat tahun. Peserta dari Program *Exchange Offer* 1999, menukarkan pinjaman yang memenuhi syarat menjadi pinjaman baru yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahap dengan periode jatuh tempo: tiga, empat, lima dan enam tahun.

Pinjaman yang memenuhi syarat dalam Program *Exchange Offer* 1998 didefinisikan sebagai saldo pinjaman non-Rupiah dari (i) kewajiban pinjaman antar bank dan kewajiban jangka pendek obligor yang jatuh tempo sebelum tanggal 1 April 1999, (ii) porsi lancar dari kewajiban jangka menengah dan panjang obligor yang akan jatuh tempo sebelum tanggal 1 April 1999. Pinjaman yang memenuhi syarat dalam Program *Exchange Offer* 1999 didefinisikan sebagai saldo pinjaman non-Rupiah dari (i) kewajiban simpanan antar bank dan kewajiban jangka pendek obligor yang jatuh tempo sebelum tanggal 1 Januari 2002, (ii) porsi lancar dari kewajiban jangka menengah dan panjang obligor yang akan jatuh tempo sebelum tanggal 1 Januari 2002 (selain dari kewajiban yang jatuh temponya dipercepat, kecuali percepatan tersebut terjadi sebelum tanggal 15 Maret 1999 sesuai kontrak yang ada). Obligor didefinisikan sebagai bank Pemerintah dan swasta nasional dan Anak-anak Perusahaannya di luar negeri, cabang-cabangnya di luar negeri, maupun kantor agennya di luar negeri.

Program Rekapitalisasi Perbankan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia bulan Pebruari 1999, dilakukan Program Rekapitalisasi Bank yang bertujuan meningkatkan Rasio Kecukupan Modal (CAR) bank mencapai minimum 4%.

Bagi bank-bank yang ikut-serta dalam program tersebut (kecuali bank-bank milik Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah, serta bank-bank yang diambil-alih BPPN), pemegang saham pengendali diwajibkan untuk menyetorkan dana sedikitnya 20% dari kekurangan modal yang diperlukan untuk mencapai CAR 4%. Pemegang saham pengendali dapat mengkombinasikan dana tersebut dengan dana setoran investor strategis, ataupun dana tersebut seluruhnya disetorkan oleh Investor Strategis. Dalam hal ini, pemegang saham pengendali memiliki 25% atau lebih dari total saham bank yang dikeluarkan, atau pihak-pihak yang memiliki kurang dari 25% saham bank namun mengendalikan bank tersebut secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam 3 (tiga) tahun pelaksanaan Investment Management and Performance Agreement (IMPA), tiap pemegang saham berhak membeli kembali saham Pemerintah dengan mekanisme Opsi Beli (*Call Option*). Selanjutnya Pemerintah dapat menjual saham tersebut kepada masyarakat setelah satu kali penawaran kepada pemegang saham lainnya.

Pada tanggal 13 Maret 1999, Pemerintah menetapkan 74 bank dinilai cukup mampu melanjutkan operasinya tanpa bantuan Program Rekapitalisasi Bank. Bank-bank ini terdiri dari: Bank Niaga, Bank Lippo, Bank International Indonesia, Bank Bali, Bank Universal, Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin), Bank Prima Express, Bank Arta Media dan Bank Patriot. Dalam bulan Juli dan September 1999, secara berurutan Bank Niaga dan Bank Bali keluar dari Program Rekapitalisasi Bank dan BPPN mengambil alih pengendaliannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada bulan Maret 1999, pada pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank untuk Bank yang Diambil Alih (*Bank Take Over/BTO*), Pemerintah mengambil alih sementara bank-bank tertentu dengan CAR kurang dari 4%. Penanaman Modal Sementara (PMS) Pemerintah tersebut diputuskan berdasarkan kajian uji-tuntas oleh pihak independen yang ditunjuk oleh BPPN. Lima bank Pemerintah juga digabungkan dan direkapitalisasi pada bulan Juli 1999, untuk meningkatkan CAR bank hasil penggabungan mencapai minimal 4%.

Pada bulan Juni 2000, Pemerintah melalui BPPN, menggabungkan 8 (delapan) bank BTO (Bank Duta, Bank Rama, Bank Tamara, Bank Tiara Asia, Bank Nusa Nasional, Bank Pos Nusantara, Jayabank International dan Bank Risjad Salim) ke dalam Bank Danamon.

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah melalui BPPN mengumumkan rencana penggabungan 5 bank komersial, yaitu Bank Bali, Bank Universal, Bank Artamedia, Bank Prima Express dan Bank Patriot. Penggabungan bank-bank ini secara hukum menjadi efektif pada tanggal 30 September 2002, dengan entitas hasil penggabungan bernama Bank Permata.

Konsolidasi Perbankan

Sektor perbankan Indonesia terus mengalami konsolidasi dari tahun 2000 sampai sekarang, sebagian dikarenakan Peraturan Bank Indonesia No.7/15/PBI/2005 *juncto* Peraturan Bank Indonesia No.9/16/PBI/2007 tentang Modal Inti Minimum Bank Umum yang mengharuskan bank komersial untuk memenuhi persyaratan modal inti minimum sebesar Rp80 miliar pada akhir tahun 2007 dan modal inti minimum sebesar Rp100 miliar pada akhir tahun 2010. Setelah pelaksanaan peraturan ini banyak terjadi konsolidasi bank, antara lain; PT Bank Artha Graha bergabung ke dalam PT Bank Inter-Pacific pada tahun 2005, PT Bank Hana membeli PT Bank Bintang Manunggal pada tahun 2007, PT Bank Commonwealth Indonesia melakukan *merger* dengan PT Bank Arta Niaga Kencana Tbk pada tahun 2007 dan PT Bank Bukopin Tbk membeli PT Bank Persyarikatan Indonesia pada tahun 2008.

3. Kepemilikan Asing

Secara historis, bank asing hanya diberikan izin untuk beroperasi sebagai kantor cabang yang dimiliki sepenuhnya (dengan pembatasan-pembatasan operasional) dan sebagai bank hasil *joint venture* atau kantor perwakilan. Pada tahun 1999, Bank Indonesia mengizinkan bank dengan 99,0% kepemilikan asing untuk beroperasi di Indonesia tanpa batasan. Akibatnya, ABN Amro Bank, American Express Bank Ltd (sudah tutup), Bank of America, NA, Bank of China Limited, Citibank NA, Deutsche Bank AG, JP Morgan Chase Bank, N.A, Standard Chartered Bank, The Bangkok Bank Comp. Ltd, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd dan Hongkong & Shanghai Banking Corporation telah membuka cabang di Indonesia.

Saat ini, sektor perbankan Indonesia telah mengurangi pembatasan terhadap bank asing dan, sebagai akibat dari restrukturisasi sektor perbankan dan inisiatif pemerintah, investor asing strategis dan pemegang saham mengendalikan tujuh dari sepuluh bank-bank terbesar (berdasarkan jumlah aset) di Indonesia. Sejak bulan Maret 2002, partisipasi asing dalam sektor perbankan Indonesia telah meningkat dikarenakan penjualan saham-saham mayoritas di bank di Indonesia kepada investor asing. BCA, Bank Internasional Indonesia Tbk., PT Bank NISP Tbk., PT Bank Buana Tbk., PT Bank Bumiputra Tbk., PT Bank Permata Tbk. dan PT Bank Danamon Tbk. mayoritas dimiliki oleh investor asing.

Bank dengan kepemilikan asing yang ada di Indonesia per tanggal 30 September 2010 adalah sebagai berikut :

No	Bank	Pemegang Saham	% Kepemilikan Saham
1	Bank Akita	Barclays Bank PLC	99,0%
		PT Badhra Buana Persada	1,0%
2	Amin Bank	Wishart Investment Inc.	90,0%
		H.M.Y Bambang Sujanto	10,0%
3	Bank Andara	Mercy Corps	40,2%
		International Finance Corporation	19,9%
		Stiching Hivos-Triodos Fund	17,5%
		I Wayan Gatha	11,9%
		Catholic Organization for Relief & Development Aid	10,6%
4	Bank BNP	Acom, Co, Ltd	55,7%
		The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ	20,0%
		PT Hermawan Sentra Investama	7,5%
		PT Hermawan Ladang Arta	7,5%
		Others (<5%)	9,3%
5	Bank BTPN	TPG Nusantara S.a.r.l	71,6%
		PT Multi Kencana Mulia	1,0%
		Public	27,4%
6	Bank ICB Bumiputera	ICB Financial Group Holdings AG	67,1%
		AJB Bumiputera 1912	6,0%
		Public (<5%)	26,9%
7	BCA	Farindo Investments (Mauritius) Ltd, Farallon Capital Mgt LLC, Sdr. Bambang Hartono and Sdr. Robert Budi Hartono	51,2%
		Anthony Salim	1,8%
		Public	45,9%
		PT Bank Central Asia Tbk. (Treasury Stock)	1,2%
8	Bank CIMB Niaga ⁽¹⁾	CIMB Group Bhd Malaysia	77,2%
		Santubong Ventures Sdn Bhd Malaysia	16,6%
		Others (<5%)	6,1%
9	Bank Danamon Indonesia	Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd	67,8%
		Public (<5%)	32,2%
10	Bank Ekonomi	HSBC Asia Pacific Holdings (UK)	88,9%
		PT Surya Sakti	1,0%
		Public	10,1%
11	Bank ICBC Indonesia	Industrial and Commercial Bank of China Ltd (ICBC)	97,8%
		PT Intidana Wijaya	2,2%
12	Bank SBI Indonesia (d/h Indomonex)	State Bank of India	76,0%
		PT Ravindo Jaya	24,0%
13	BII Maybank	Sorak Financial Holdings Pte Ltd	54,3%
		Maybank Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn Bhd	43,2%
		Public	2,5%
14	Bank Mestika ⁽²⁾	PT Mestika Benua Mas	99,9%
		Others	0,1%
15	Bank Muamalat	Islamic Development Bank	28,0%
		Boubyan Bank Kuwait	21,3%
		Atwill Holding Limited	15,3%
		Abdul Rohim	6,7%
		Rizal Ismael	5,5%
		Kopkapindo	3,3%
		IDF Foundation	3,0%
		BPDONHI	2,4%
		Others	11,5%
16	Bank OCBC NISP	OCBC Overseas Investment Pte Ltd	74,7%
		International Finance Corporation	7,2%
		Others	18,1%
17	Bank Swadesi	Bank of India	76,0%
		PT Panca Mantra Jaya	17,1%
		Prakash Rupchand Chugani	1,6%

No	Bank	Pemegang Saham	% Kepemilikan Saham
18	Bank UOB Buana	Public	5,3%
		UOB International Investment Private Limited	99,0%
19	Hana Bank	Sukanta Tanudjaja	1,0%
		Hana Bank Korea	70,1%
		International Finance Corporation	19,9%
		PT Trisetijo Manunggal Utama	5,0%
20	PermataBank	Bambang Setijo	5,0%
		PT Astra International Tbk	44,5%
		Standard Chartered Bank	44,5%
		Public	11,0%
21	Rabobank Indonesia ⁽³⁾	Cooperative Centrale Raiffeisen Boerenleenbank BA	56,9%
		PT Aditirta Suryasentosa	17,0%
		PT Antarindo Optima	17,0%
		PT Antariksabuana Citanagara	8,5%
		PT Mitra Usaha Kencana Sejati	0,5%
22	Bank Panin	PT Panin Financial	44,7%
		ANZ Group	38,8%
		Lain-lain	16,5%

Sumber : Infobank Outlook 2010 dan Indonesia Banking Watch 2010-2011

Catatan:

- Melalui corporate action pada tanggal 1 November 2008, Bank CIMB Niaga melakukan merger dengan PT Bank Lippo
- Pada bulan Oktober 2009, RHB Capital (bank terbesar keempat di Malaysia) mengumumkan rencana akuisisinya terhadap 80% saham Bank Mestika Dharma
- Pada bulan Juli 2008, Rabobank Indonesia menyelesaikan segala masalah hukumnya dalam merger dengan Hagabank dan Bank Hagakita.

Bank asing hanya diberikan izin untuk beroperasi sebagai kantor cabang yang dimiliki sepenuhnya (dengan pembatasan-pembatasan operasional) atau kantor perwakilan dan sebagai bank hasil *joint venture*. Tabel berikut adalah daftar seluruh bank-bank asing dengan kantor cabang di Indonesia:

No	Bank-bank asing dengan kantor-kantor cabang di Indonesia
1	ABN AMRO Bank
2	Bank of America, N.A.
3	Bank of China Limited
4	Citibank N.A.
5	Deutsche Bank AG.
6	JP. Morgan Chase Bank, N.A.
7	Standard Chartered Bank
8	The Bangkok Bank Comp. Ltd
9	The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd
10	The Hongkong & Shanghai B.C.

Sumber: Bank Indonesia

4. Kebijakan Kepemilikan Tunggal

Dalam rangka mempercepat konsolidasi industri perbankan di Indonesia, di tahun 2006 Bank Indonesia memperkenalkan kebijakan "kepemilikan tunggal atau *single presencepolicy*", dengan tujuan untuk mempermudah kontrol dan penilaian risiko Bank Indonesia dengan memperbolehkan suatu entitas untuk menjadi pemegang saham pengendali pada hanya satu bank di Indonesia. Berdasarkan peraturan perbankan, pemegang saham pengendali adalah pemegang saham uang (i) memiliki 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh bank atau (ii) memiliki kontrol (baik langsung maupun tidak langsung) atas bank.

Untuk melaksanakan kebijakan "kepemilikan tunggal atau *single presencepolicy*", pada tanggal 5 Oktober 2006, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan SPP mengenai kepemilikan tunggal pada bank-bank di Indonesia. Peraturan SPP menetapkan bahwa suatu entitas dapat menjadi pemegang saham pengendali pada hanya satu bank, dengan pengecualian untuk (i) pemegang saham pengendali yang menjadi pemegang saham pengendali dari dua bank yang memiliki kegiatan usaha dengan prinsip yang berbeda, yaitu, perbankan konvensional dan syariah, (ii) pemegang saham pengendali yang menjadi pemegang saham pengendali dari dua bank, dan (iii) perusahaan induk suatu bank. Perusahaan induk suatu bank merupakan entitas yang didirikan dan/atau dimiliki oleh pemegang saham pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung operasi bank yang merupakan anak perusahaannya.

Dampak dari peraturan tersebut adalah bahwa setiap orang yang telah menjadi pemegang saham pengendali lebih dari satu bank di Indonesia harus menyesuaikan kepemilikan di entitas tersebut pada akhir tahun 2010, melalui (i) pengalihan seluruh atau sebagian kepemilikan saham pada satu atau lebih bank yang dikendalikan kepada pihak ketiga sehingga hanya mempunyai kendali atas satu bank saja, atau (ii) melakukan *merger* atau konsolidasi seluruh bank di bawah kendalinya, atau (iii) mendirikan sebuah perusahaan induk bank dengan cara (a) mendirikan suatu badan hukum baru sebagai perusahaan induk bank atau (b) menunjuk salah satu bank yang dikendalikan untuk bertindak sebagai perusahaan induk bank.

Pemegang saham pengendali yang gagal untuk memenuhi batas waktu pada tanggal 31 Desember 2010 akan memiliki hak suara dalam setiap bank terbatas pada 10,0% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Bank-bank yang bersangkutan juga harus mencatat kepemilikan pemegang saham pengendali tersebut hanya terbatas pada 10,0% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan hanya memperbolehkan pemegang saham pengendali tersebut untuk memberikan suara dalam RUPS sampai dengan 10,0% dari total saham yang diterbitkan.

Bank yang bersangkutan harus memperlakukan saham kelebihan dari 10,0% dari modal saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali tersebut sebagai saham tanpa hak suara, sampai saham tersebut dialihkan kepada pihak ketiga. Perlakuan ini tidak mempunyai dampak dari sisi akuntansi dan struktur modal pada bank yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan SPP, jika pemegang saham pengendali tidak menyesuaikan terhadap kebijakan tersebut sampai tanggal 31 Desember 2011, pemegang saham pengendali dilarang menjadi pemegang saham pengendali dalam bank manapun di Indonesia selama 20 tahun.

Sehubungan dengan Peraturan SPP, Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/17/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.9/12/PBI/2007 tentang insentif dalam rangka konsolidasi bank ("Peraturan Insentif"). Peraturan ini menetapkan sejumlah insentif yang dimaksudkan untuk mendorong bank-bank Indonesia untuk melakukan *merger* atau konsolidasi dengan bank lain untuk memperkuat struktur dan meningkatkan modal mereka.

Sebuah bank yang berencana untuk melakukan *merger* atau konsolidasi harus menyerahkan rencana *merger* tersebut kepada Bank Indonesia sebelum *merger* atau konsolidasi dilakukan. Rencana tersebut harus diserahkan oleh salah satu bank yang berpartisipasi dalam *merger* atau konsolidasi dan harus ditandatangani oleh direktur utama dari semua bank yang berpartisipasi. Selanjutnya, untuk melaksanakan Peraturan SPP dan untuk memberikan klarifikasi sehubungan dengan tiga pengecualian di atas, Bank Indonesia, pada tanggal 12 Desember 2007 menerbitkan Surat Edaran No.9/32/DPNP ("Surat Edaran"). Surat Edaran mengklarifikasi bahwa dalam rangka melaksanakan pengalihan saham, perlu diperhatikan persyaratan dan prosedur yang berkaitan dengan konsolidasi, *merger* dan akuisisi bank komersial atau persyaratan dan prosedur yang berkaitan dengan pembelian saham komersial bank, yang manapun yang relevan. Surat Edaran selanjutnya menyatakan bahwa bila akuisisi perlu dilakukan sebelum *merger*, Bank Indonesia hanya akan memberikan izin akuisisi jika akuisisi dan *merger* tersebut merupakan satu proses yang terintegrasi.

Surat Edaran juga menyatakan bahwa Bank Indonesia mungkin tidak mengharuskan pemegang saham pengendali dan/atau manajemen bank merger untuk menjalani proses "*Fit and Proper Test*", jika mereka telah menyelesaikan proses "*Fit and Proper Test*". Surat Edaran tersebut juga mencakup prosedur untuk mendirikan perusahaan induk bank dan mencakup batas waktu penyampaian laporan yang berkaitan dengan perubahan pemegang saham atau pemegang saham pengendali di sebuah perusahaan induk bank. Selanjutnya, Surat Edaran menetapkan bahwa partisipasi pemegang saham pengendali di sebuah perusahaan induk bank dapat dilakukan dengan cara kontribusi *equity swap*, dimana pemegang saham pengendali akan mengganti kepemilikan sahamnya di bank yang bersangkutan untuk saham yang dikeluarkan oleh perusahaan induk bank. Setelah proses *swap*, perusahaan induk bank akan menjadi pemegang saham langsung dari bank yang bersangkutan.

5. Implementasi Basel II

Pada tahun 2008, Bank Indonesia memulai penerapan Basel II secara bertahap dalam rangka mendorong industri perbankan Indonesia untuk memenuhi standar internasional atau setidaknya menggunakan metode dasar untuk menghitung risiko. Basel II memerlukan penggabungan risiko pasar tambahan dan pertimbangan risiko operasional ke dalam perhitungan kecukupan modal. Persyaratan kecukupan modal yang baru di bawah Basel II diperkenalkan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2009 untuk bank dengan aset lebih dari Rp1 triliun. Untuk bank lain, persyaratan kecukupan modal yang baru di bawah Basel II diperkenalkan pada bulan Juni 2009.

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting BNI untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting BNI pada tanggal 31 Desember 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta pada tanggal 30 September 2010 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan BNI untuk periode-periode tersebut. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting BNI pada tanggal 30 September 2009 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut diambil dari laporan keuangan konsolidasian BNI yang tidak diaudit untuk periode tersebut. Kinerja keuangan konsolidasian yang telah dicapai oleh BNI untuk periode 9 bulan tersebut di atas belum tentu mengindikasikan kinerja keuangan konsolidasian yang akan dicapai oleh BNI untuk satu tahun penuh.

Laporan keuangan konsolidasian BNI pada tanggal 31 Desember 2005 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BNI dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian BNI pada tanggal 31 Desember 2006 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian BNI pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta pada tanggal 30 September 2010 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" secara prospektif, mulai tanggal 1 Januari 2010 yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini dan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian BNI dan anak perusahaan untuk 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Laporan keuangan konsolidasian BNI pada tanggal 30 September 2009 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit, telah direview oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) (anggota dari Ernst & Young Global Limited) akuntan publik independen, berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI, dengan hasil tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut agar penyajiannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Suatu review yang dilaksanakan berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang lebih sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan, seperti yang tercantum dalam laporan review akuntan independen terkait (yang disajikan dalam satu laporan dengan laporan auditor independen tersebut di atas) yang tercantum dalam Prospektus ini, KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) (anggota dari Ernst & Young Global Limited), tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut. Oleh karena itu, tingkat keandalan laporan review mereka atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut sangat terbatas mengingat adanya keterbatasan dalam sifat dan ruang lingkup prosedur yang diterapkan dalam suatu *review* yang dilaksanakan berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI.

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember				Pada tanggal 30 September		
	2005	2006	2007	2008	2009	2009 (tidak diaudit)	2010
Neraca							
Kas	2.844	2.695	3.259	4.428	4.903	4.962	5.325
Giro pada Bank Indonesia	11.281	15.160	17.573	9.351	8.531	7.499	8.551
Giro pada bank lain – bersih	500	422	1.171	1.701	6.858	1.442	2.721
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia – bersih	19.554	30.327	14.809	22.642	29.622	20.784	22.908
Surat-surat berharga – bersih	3.766	4.956	16.201	9.874	19.198	8.893	17.224
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – bersih	-	-	195	87	-	250	4
Wesel ekspor dan tagihan lainnya – bersih	1.392	622	319	428	669	560	522
Tagihan akseptasi - bersih	3.497	3.040	2.380	3.831	4.729	2.528	5.793
Tagihan derivatif - bersih	51	50	3	96	7	17	1
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan – bersih	58.331	62.614	83.214	106.341	113.924	113.469	119.544
Obligasi Pemerintah	37.451	41.227	36.701	34.655	31.040	34.554	33.037
Penyertaan saham-bersih	338	778	135	105	51	56	35
Aset tetap-bersih	4.519	4.111	3.871	3.733	3.708	3.493	3.751
Aset pajak tangguhan - bersih	223	22	711	1.989	1.359	1.714	1.119
Aset lain-lain - bersih	4.065	3.392	2.800	2.480	2.898	2.839	4.276
Jumlah Aset	147.812	169.416	183.342	201.741	227.497	203.060	224.811
Kewajiban segera	1.436	1.688	1.118	1.060	1.109	918	1.033
Simpanan nasabah	115.372	135.797	146.189	163.164	188.469	163.654	183.772
Simpanan dari bank lain	2.378	2.344	3.804	4.100	3.819	3.495	3.155
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	50	500	199	625	-	-	-
Kewajiban derivatif	139	11	29	83	152	210	233
Kewajiban akseptasi	3.545	2.983	1.594	1.969	2.559	1.962	1.719
Surat-surat berharga yang diterbitkan	2.117	1.535	1.269	1.269	1.261	1.267	1.277
Pinjaman yang diterima	4.796	4.009	6.309	8.617	5.570	7.737	5.185
Hutang pajak	281	405	151	599	94	163	563
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	126	132	179	129	156	155	149
Kewajiban pajak tangguhan	-	313	-	-	-	-	19
Kewajiban lain-lain	2.640	3.217	4.319	4.664	5.134	5.064	6.345
Pinjaman Subordinasi	2.433	2.239	934	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban	135.891	154.597	166.094	186.279	208.322	184.625	203.449
Hak Minoritas	26	25	28	31	31	29	44
Jumlah Ekuitas	11.895	14.794	17.220	15.431	19.144	18.406	21.318
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	147.812	169.416	183.342	201.741	227.497	203.060	224.811

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2005	2006	2007	2008	2009	2009 (tidak diaudit)	2010
Laporan Laba Rugi							
Pendapatan bunga dan syariah ⁽¹⁾	12.601	15.044	14.878	16.628	19.447	14.710	14.400
Beban bunga, bonus dan beban pembiayaan lainnya ⁽²⁾	(5.787)	(7.667)	(7.410)	(6.716)	(8.314)	(6.400)	(5.395)
Pendapatan bunga dan syariah bersih	6.815	7.377	7.467	9.912	11.133	8.310	9.005
Pendapatan operasional lainnya	2.331	2.861	4.130	3.549	4.295	3.146	3.404
Provisi dan komisi lainnya	1.172	1.368	1.597	1.976	2.231	1.597	1.461
Pendapatan premi asuransi	-	-	680	764	1.027	738	995
Kenaikan (penurunan) nilai surat berharga	67	631	1.223	(143)	424	347	674
Laba selisih kurs – bersih	110	184	266	630	262	249	91
Lain-lain	983	678	365	322	351	214	184
Beban operasional lainnya	(5.719)	(6.258)	(7.626)	(7.228)	(7.991)	(5.708)	(6.391)
Gaji dan tunjangan	(2.637)	(2.911)	(3.692)	(3.299)	(3.460)	(2.594)	(2.642)
Umum dan administrasi	(2.108)	(2.351)	(2.389)	(2.273)	(2.312)	(1.594)	(1.737)
Underwriting asuransi	-	-	(693)	(706)	(1.022)	(771)	(1.031)
Beban promosi	-	-	(297)	(352)	(427)	(226)	(430)
Lain-lain ⁽³⁾	(974)	(1.002)	(555)	(597)	(770)	(523)	(551)
Pendapatan sebelum pembalikan (pembentukan) cadangan kerugian penurunan nilai	3.427	3.980	3.971	6.233	7.437	5.748	6.018
Pembalikan (pembentukan) cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non-keuangan	(1.256)	(1.319)	(2.704)	(4.359)	(4.051)	(3.483)	(1.776)
Laba operasional bersih	2.171	2.661	1.268	1.875	3.386	2.265	4.241
Pendapatan bukan operasional bersih	84	179	213	58	58	78	7
Laba sebelum beban pajak dan hak minoritas	2.256	2.840	1.481	1.932	3.444	2.343	4.249
Laba bersih	1.415	1.926	898	1.222	2.484	1.855	2.954
Laba per saham (dalam rupiah penuh)	106	145	64	80	163	121	193

Catatan:

(1) Termasuk pendapatan fee dan komisi

(2) Termasuk beban fee dan komisi

(3) Termasuk premi penjaminan, beban administrasi bukan kredit, beban operasional lainnya (termasuk beban overhead, pajak dan beban lainnya dari kantor cabang luar negeri BNI dan pos beban lain-lain).

(dalam miliar Rupiah, kecuali dalam persentase)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember (tidak diaudit)					Pada tanggal 30 September	
	2005	2006	2007	2008	2009	2009 (tidak diaudit)	2010
Modal Inti (<i>Tier I</i>) ⁽¹⁾	7.398	8.817	12.331	12.613	14.384	14.116	15.920
Modal pelengkap (<i>Tier II</i>) ⁽²⁾	7.300	5.364	4.902	5.164	5.399	5.164	3.469
Penyertaan saham ⁽³⁾	(698)	(659)	(143)	(135)	(56)	-	-
Jumlah modal ⁽⁴⁾	14.000	13.521	17.090	17.642	19.727	19.280	19.389
Jumlah ATMR – Risiko kredit ⁽⁵⁾	83.988	84.790	99.110	121.503	140.557	121.528	137.422
Jumlah ATMR – Risiko pasar ⁽⁶⁾	3.540	3.563	11.833	8.119	1.337	1.566	2.049
Jumlah ATMR – Risiko operasional ⁽⁷⁾	-	-	-	-	-	-	16.869
CAR							
CAR ⁽⁸⁾	16,7%	15,9%	17,2%	14,5%	14,0%	15,9%	14,1%
CAR risiko pasar ⁽⁹⁾	16,0%	15,3%	15,4%	13,6%	13,9%	15,7%	13,9%
CAR risiko pasar dan operasional ⁽¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-	12,4%
CAR sesuai peraturan BI	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (tidak diaudit)				Per tanggal dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		
	2005	2006	2007	2008	2009	2009 (tidak diaudit)	2010
Rasio keuangan penting (tidak diaudit kecuali dinyatakan lain)							
Rasio Pertumbuhan							
Asset	8,22%	14,62%	8,22%	10,04%	12,77%	0,65%	-1,18%
Kewajiban	9,67%	13,76%	7,44%	12,15%	11,83%	-0,89%	-2,33%
Ekuitas	-5,77%	24,37%	16,40%	-10,39%	24,06%	19,28%	11,36%
Pendapatan Bunga dan Syariah Bersih	6,90%	18,55%	-0,40%	11,76%	16,95%	11,78%	7,85%
Laba Operasional	-29,74 %	22,29%	-52,24%	47,87%	80,59%	61,07%	67,00%
Laba Bersih	-54,21%	36,11%	-53,37%	36,08%	103,27%	102,40%	58,56%
Rasio Profitabilitas							
Imbal Hasil terhadap Aset sebelum pajak ⁽¹¹⁾	1,6%	1,8%	0,84%	1,07%	1,65%	1,54%	2,55%
Imbal Hasil terhadap Aset (ROA) ⁽¹²⁾	1,6%	1,9%	0,51%	0,68%	1,19%	1,22%	1,77%
Imbal Hasil terhadap Jumlah Modal ⁽¹³⁾	9,8%	13,7%	5,2%	7,1%	12,9%	12,8%	20,3%
Imbal Hasil terhadap Ekuitas (ROE) ⁽¹⁴⁾	12,6%	14,4%	8,1%	9,4%	17,5%	16,5%	26,0%
NIM ⁽¹⁵⁾	5,4%	5,2%	5,4%	6,5%	6,1%	6,2%	6,1%
Cost to Income Ratio ⁽¹⁶⁾	62,0%	61,1%	65,8%	53,7%	51,8%	49,8%	51,5%
Rasio Likuiditas							
LDR ⁽¹⁷⁾	54,3%	48,9%	60,6%	68,6%	64,1%	74,6%	68,6%
BOPO	84,88%	85,08%	93,3%	90,7%	85,7%	87,3%	77,7%
Rasio Kepatuhan							
Rasio Ekuitas terhadap Total Aset ⁽¹⁸⁾	8,0%	8,7%	9,4%	7,6%	8,4%	9,1%	9,5%
CAR – Tier I ⁽¹⁹⁾	8,5%	10,0%	11,1%	9,7%	10,1%	11,5%	10,2%
CAR – Tier II ⁽²⁰⁾	8,3%	6,1%	4,4%	4,0%	3,8%	4,2%	2,2%
CAR ⁽²¹⁾	16,0%	15,3%	15,4%	13,6%	13,9%	15,7%	12,4%
Pemenuhan CKPN	102,29%	100,00%	145,0%	190,2%	161,7%	128,7%	126,4%
BOPO	84,88%	85,08%	93,3%	90,7%	85,7%	87,3%	77,7%
GWM Utama (Rupiah)	11,42%	13,03%	14,74%	5,20%	5,42%	5,02%	5,24%
GWM Utama (Valas)	3,02%	3,04%	3,03%	1,02%	1,04%	1,03%	1,05%
GWM Sekunder (Rupiah)	-	-	-	-	27,63%	-	22,00%
PDN	8,18%	6,76%	6,14%	7,59%	6,33%	4,78%	7,47%
Pelanggaran BMPK	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kualitas Kredit (tidak diaudit, kecuali dinyatakan lain)							
NPL – kotor ⁽²²⁾	8.582	6.976	7.565	5.596	5.762	7.858	5.520
Penyisihan kerugian ⁽²³⁾	4.328	3.846	5.436	5.652	6.920	8.647	6.529
NPL – bersih ⁽²⁴⁾	4.254	3.130	3.534	1.940	1.075	2.382	995
NPL - bersih terhadap total pinjaman/pembiayaan/ piutang yang diberikan ⁽²⁵⁾	6,8%	4,7%	4,0%	1,7%	0,9%	2,0%	0,8%
NPL terhadap total pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan ⁽²⁶⁾	13,7%	10,5%	8,5%	5,0%	4,8%	6,4%	4,4%
NPL terhadap total aset konsolidasian ⁽²⁷⁾	5,8%	4,1%	4,1%	2,8%	2,5%	3,9%	2,5%
Penyisihan kerugian terhadap total pinjaman/ pembiayaan/piutang yang diberikan ⁽²⁸⁾	6,9%	5,8%	6,1%	5,0%	5,7%	7,1%	5,2%
Penyisihan kerugian terhadap NPL ⁽²⁹⁾	50,4%	55,1%	71,9%	101,0%	120,1%	110,0%	118,3%
Penyisihan kerugian yang dibebankan kepada laporan laba rugi konsolidasian terhadap total pinjaman/ pembiayaan/piutang yang diberikan ⁽³⁰⁾	2,1%	1,2%	2,3%	3,5%	2,7%	3,4%	2,3%

Catatan:

- (1) Modal inti (Tier 1) merupakan perhitungan modal inti sesuai dengan peraturan Bank Indonesia
- (2) Modal pelengkap (Tier 2) merupakan perhitungan modal pelengkap sesuai dengan peraturan Bank Indonesia
- (3) Merupakan penyertaan saham BNI kepada anak perusahaan yang dihitung dengan menggunakan metode ekuitas
- (4) Merupakan penjumlahan modal Tier 1 dan modal Tier 2 dikurangi dengan penyertaan saham.
- (5) Merupakan aktiva tertimbang menurut risiko, yang terdiri dari aset neraca serta beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi yang diberikan bobot sesuai kadar risiko kredit yang melekat pada setiap pos sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia
- (6) Merupakan aktiva tertimbang menurut risiko dengan mempertimbangkan risiko pasar sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia

- (7) Merupakan aktiva tertimbang menurut risiko dengan mempertimbangkan risiko operasional sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia
- (8) Merupakan jumlah modal dibagi dengan jumlah ATMR risiko kredit
- (9) Merupakan jumlah modal dibagi dengan jumlah ATMR risiko kredit dan ATMR risiko pasar
- (10) Merupakan jumlah modal dibagi dengan jumlah ATMR risiko kredit, ATMR risiko pasar dan ATMR risiko operasional
- (11) Dihitung berdasarkan laba bersih konsolidasian sebelum pajak pada tahun atau periode (disetahunkan) yang bersangkutan dibagi dengan total aset rata-rata (untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009, total aset rata-rata dihitung dengan menggunakan saldo total aset rata-rata pada neraca konsolidasian triwulanan pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Desember untuk setiap tahunnya; sedangkan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2009 dan 2010, total aset rata-rata dihitung dengan menggunakan saldo total aset rata-rata pada neraca konsolidasian triwulanan pada tanggal 31 Maret, 30 Juni dan 30 September untuk setiap periodenya).
- (12) Dihitung berdasarkan laba bersih konsolidasian pada tahun atau periode (disetahunkan) yang bersangkutan dibagi dengan total aset rata-rata (untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009, total aset rata-rata dihitung dengan menggunakan saldo total aset rata-rata pada neraca konsolidasian triwulanan pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Desember untuk setiap tahunnya; sedangkan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2009 dan 2010, total aset rata-rata dihitung dengan menggunakan saldo total aset rata-rata pada neraca konsolidasian triwulanan pada tanggal 31 Maret, 30 Juni dan 30 September untuk setiap periodenya) sesuai dengan PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010.
- (13) Jumlah modal merupakan total modal inti dan modal pelengkap, dikurangi dengan penyertaan pada saham. Rasio imbal hasil terhadap jumlah modal dihitung berdasarkan laba bersih untuk periode yang bersangkutan dibagi dengan jumlah modal rata-rata (untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009, jumlah modal rata-rata dihitung dengan menggunakan saldo jumlah modal rata-rata pada neraca konsolidasian triwulanan pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Desember untuk setiap tahunnya; sedangkan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2009 dan 2010, jumlah modal rata-rata dihitung dengan menggunakan saldo jumlah modal rata-rata pada neraca konsolidasian triwulanan pada tanggal 31 Maret, 30 Juni dan 30 September untuk setiap periodenya).
- (14) Dihitung berdasarkan laba bersih konsolidasian pada tahun atau periode (disetahunkan) yang bersangkutan dibagi dengan Modal Tier I rata-rata (untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009, ekuitas rata-rata dihitung dengan menggunakan saldo ekuitas rata-rata pada neraca konsolidasian triwulanan pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Desember untuk setiap tahunnya; sedangkan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2009 dan 2010, ekuitas rata-rata dihitung dengan menggunakan saldo ekuitas rata-rata pada neraca konsolidasian triwulanan pada tanggal 31 Maret, 30 Juni dan 30 September untuk setiap periodenya) sesuai dengan PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010.
- (15) Dihitung berdasarkan pendapatan bunga dan Syariah bersih konsolidasian untuk tahun atau periode (disetahunkan) yang bersangkutan sebagai persentase dari rata-rata jumlah aset produktif yang menghasilkan bunga (tidak termasuk komitmen dan kontinjensi) (untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009, dihitung berdasarkan rata-rata saldo penutupan pada neraca konsolidasian triwulan pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Desember untuk setiap tahunnya, sedangkan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2009 dan 2010, dihitung berdasarkan rata-rata dari saldo penutupan pada neraca konsolidasian triwulanan pada tanggal 31 Maret, 30 Juni dan 30 September untuk setiap periodenya).
- (16) Dihitung dengan cara membagi beban operasional lainnya (tidak termasuk beban-beban untuk penyisihan kerugian aset produktif) dengan penjumlahan antara pendapatan bunga dan Syariah bersih dan pendapatan operasional lainnya untuk periode yang bersangkutan.
- (17) Dihitung berdasarkan total pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan dibagi dengan total simpanan nasabah pada tanggal yang bersangkutan.
- (18) Dihitung dengan cara membagi jumlah ekuitas konsolidasian dengan jumlah aset pada tanggal neraca konsolidasian.
- (19) Dihitung dengan cara membagi Modal Inti (Tier I) dengan ATMR risiko kredit, ATMR risiko pasar dan ATMR risiko operasional
- (20) Dihitung dengan cara membagi Modal Pelengkap (Tier II) dengan ATMR risiko kredit, ATMR risiko pasar dan ATMR risiko operasional
- (21) Dihitung dengan cara membagi jumlah modal dengan jumlah ATMR risiko kredit, ATMR risiko pasar dan ATMR risiko operasional.
- (22) Merupakan jumlah pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan bermasalah (pinjaman yang digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia
- (23) Merupakan penyisihan atas pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan yang digolongkan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia
- (24) Merupakan jumlah pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan bermasalah setelah dikurangi penyisihan kerugian atas pinjaman yang digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia
- (25) Dihitung dengan cara membagi NPL – bersih dengan total pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan
- (26) Dihitung dengan cara membagi NPL – bruto dengan total pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan
- (27) Dihitung dengan membagi NPL – bruto dengan total aset konsolidasian
- (28) Dihitung dengan membagi penyisihan kerugian dengan total pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan
- (29) Dihitung dengan membagi penyisihan kerugian dengan NPL – bruto
- (30) Dihitung dengan membagi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan untuk tahun atau periode (disetahunkan) yang bersangkutan dengan total pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan

XI. EKUITAS

Tabel berikut ini menyajikan posisi ekuitas konsolidasian BNI pada tanggal 31 Desember 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009, serta pada tanggal 30 September 2009 dan 2010, yang angka-angkanya diambil dari: (i) laporan keuangan konsolidasian auditan BNI pada tanggal 31 Desember 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta pada tanggal 30 September 2010 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan (ii) laporan keuangan konsolidasian BNI pada tanggal 30 September 2009 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit.

Laporan keuangan konsolidasian BNI pada tanggal 31 Desember 2005 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BNI dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian BNI pada tanggal 31 Desember 2006 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian,

Laporan keuangan konsolidasian BNI pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta pada tanggal 30 September 2010 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" secara prospektif, mulai tanggal 1 Januari 2010 yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini dan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian BNI dan anak perusahaan untuk 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Laporan keuangan konsolidasian BNI pada tanggal 30 September 2009 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan tidak diaudit, telah direview oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI, dengan hasil tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut agar penyajiannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Suatu review yang dilaksanakan berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang lebih sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan, seperti yang tercantum dalam laporan review akuntan independen terkait (yang disajikan dalam satu laporan dengan laporan auditor independen tersebut di atas) yang tercantum dalam Prospektus ini, KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) (anggota dari Ernst & Young Global Limited), tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut. Oleh karena itu, tingkat keandalan laporan review mereka atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit tersebut sangat terbatas mengingat adanya keterbatasan dalam sifat dan ruang lingkup prosedur yang diterapkan dalam suatu *review* yang dilaksanakan berdasarkan SA 722 yang ditetapkan oleh IAPI.

(dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember					Pada tanggal 30 September	
	2005	2006	2007	2008	2009	2009 (tidak diaudit)	2010
Modal dasar (dalam lembar saham)	13.281.687	13.281.687	13.281.687	13.281.687	13.281.687	13.281.687	13.281.687
Modal ditempatkan dan disetor penuh	7.042	7.042	7.789	7.789	7.789	7.789	7.789
Tambahan modal disetor	2.526	2.526	5.813	5.813	5.618	5.618	5.618
Laba (rugi) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan	(380)	1.351	(90)	(2.720)	(924)	(1.037)	(745)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(8)	(22)	(6)	39	7	10	13
Rugi yang belum direalisasi atas transaksi lindung nilai	-	-	-	-	(148)	(167)	(200)
Cadangan umum dan wajib	389	678	1.059	1.156	1.273	1.281	1.524
Cadangan khusus	435	479	662	757	867	867	1.101
Tidak Dicadangkan	1.891	2.740	2.039	2.597	4.662	4.046	6.218
Dikurangi: saham yang diperoleh kembali oleh anak perusahaan sejumlah 23.585.000 saham	-	-	(48)	-	-	-	-
Jumlah ekuitas	11.895	14.794	17.220	15.431	19.144	18.406	21.318

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "BNI atau Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "Penawaran Umum Terbatas III" atau "PUT III") kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") di Jakarta dengan surat No. DIR/403 pada tanggal 25 Oktober 2010 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan No.IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya.

Seandainya perubahan ekuitas BNI karena adanya Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu terjadi pada tanggal 30 September 2010, maka Proforma Ekuitas BNI pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Proforma Ekuitas Pada Tanggal 30 September 2010

(dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Rugi yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Rugi yang belum direalisasi atas transaksi lindung nilai	Saldo Laba			Jumlah Ekuitas
						Dicadangkan		Tidak Dicadangkan	
						Cadangan umum dan wajib	Cadangan khusus		
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2010 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut	7.789	5.618	(745)	13	(200)	1.524	1.101	6.218	21.318
Penawaran Umum Terbatas III Sebanyak-banyaknya 3.374.716.060 Saham Biasa Atas Nama Seri C baru dengan nilai nominal Rp375 setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp3.100,- setiap saham	1.265	9.196	-	-	-	-	-	-	10.461
Proforma ekuitas pada tanggal 30 September 2010	9.054	14.814	(745)	13	(200)	1.524	1.101	6.218	31.779

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan setelah tanggal 30 September 2010

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dividen disetujui atas rekomendasi dari Direksi. Dividen, jika dibayarkan, akan bergantung, antara lain, pada laba, kebutuhan modal, kondisi keuangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi dan akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham biasa pada record date berhak atas dividen dalam jumlah penuh yang telah disetujui. BNI bermaksud untuk menentukan tingkat pembayaran dividen yang dapat memberikan pemegang saham biasa BNI arus penerimaan yang teratur, dimana pada saat yang bersamaan hal itu akan memungkinkan BNI untuk mengalokasikan sejumlah bagian laba untuk melakukan reinvestasi pada kegiatan usaha BNI. Pada saat ini dan untuk tahun-tahun yang akan datang kebijakan dividen BNI adalah minimum 25% dari laba bersih per tahun, yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS. Kebijakan dividen BNI saat ini mungkin akan mengalami perubahan berdasarkan diskusi dan persetujuan internal. Dividen yang diterima oleh pemegang saham biasa non-Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sejak tahun 2007, BNI telah melakukan pembayaran dividen sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sebesar Rp962,9 miliar pada tahun 2007 atau merepresentasikan 50% dari laba bersih tahun 2006, sebesar Rp449,1 miliar pada tahun 2008 atau merepresentasikan 50% dari laba bersih tahun 2007, sebesar Rp122,2 miliar pada tahun 2009 atau merepresentasikan 10% dari laba bersih tahun 2008 dan sebesar Rp869,4 miliar pada tahun 2010 atau merepresentasikan 35% dari laba bersih tahun 2009. Tidak ada jaminan bahwa BNI akan memiliki kemampuan atau akan membayar dividen atau keduanya pada masa yang akan datang.

Sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah bagi perusahaan yang memiliki hubungan dengan Pemerintah, sebagai bank BUMN, BNI diharuskan untuk mengalokasikan sebesar 1% dari laba bersih BNI untuk program pengembangan masyarakat dan sebesar 3% dari laba bersih BNI untuk program pengembangan lingkungan. Untuk tahun 2009, BNI telah mengalokasikan sebesar Rp24,8 miliar untuk program pengembangan masyarakat dan sebesar Rp74,5 miliar untuk program perlindungan dan pengembangan lingkungan.

BNI tidak memiliki pembatasan (*negative covenants*) sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

XIII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan untuk Pemegang Saham

Dividen yang Dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri

Sesuai dengan ketentuan yang tercakup dalam Undang-Undang No.36 th 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”), Dividen termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan, kecuali Dividen yang diterima atau diperoleh Perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima Dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan Dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.234/PMK.03/2009, tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain Dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-114/PJ/2009 tanggal 15 Desember 2009.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Untuk transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari nilai jual saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No.36 tahun 2008.

Pajak Penghasilan atas Dividen diperhitungkan dan diprelakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009, tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, penghasilan yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No.36 Tahun 2008, maka - Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun baik dari saham -, yang terhutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam Negeri dalam bentuk usaha tetapselain yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Keuangan, dipotong pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam negeri, dalam Pasal 1 diatur bahwa Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dikenai Pajak 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-03/Pzj.42/1993 tanggal 29 Januari 1993, tentang Pajak Penghasilan Atas Bukti HMETD, apabila Pemegang Saham menjual Bukti HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan hasil Bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, pengenaan pajaknya mengikuti ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan negara tempat domisili Pemegang Saham yang bersangkutan.

Bea Materai

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp6.000 (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan Rp3.000 (tiga ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan Bea Meterai.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT III INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT III INI.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh BNI

Sebagai Wajib Pajak, BNI memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). BNI telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, BNI tidak memiliki tunggakan pajak.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Terbatas ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik

KAP Purwantono, Suherman & Surja

(dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja)
Gedung Bursa Efek Indonesia
Menara 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

No. STTD : No.16/BL/STTD-AP/2006 tanggal
No.IAPI : No. 05.1.0973
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Penunjukan oleh Perseroan melalui surat perikatan No. TRI/095 tanggal 21 September 2010

Tugas dan tanggung jawab akuntan publik dalam rangka PUT III adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum

Hadiputranto, Hadinoto & Partners

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 21
Jl. Jend.Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Telp : (021) 5155090
Faks : (021) 5154840

No. STTD : No.179/STTD-KH/PM/1998 tanggal 21 April 1998
Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Pendoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

Penunjukan oleh Perseroan melalui surat perikatan No. TRI/092 tanggal 21 September 2010

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam PUT III adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari segi hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris**Fathiah Helmi, SH**

Graha Irama Lt.6 Ruang C
Jl. HR Rasuma Said Blok X-1 Kav 1&2
Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp : (021) 5709009
Faks : (021) 5709026

No. STTD : No.02/STTD-N-PM-1996 tanggal 12 Februari 1996
No. Asosiasi : 011.003.027.260958
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No.30 tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Penunjukan oleh Perseroan melalui surat perikatan No. TRI/090 tanggal 21 September 2010

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PUT III antara lain menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PUT III, yaitu membuat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Biro Administrasi Efek**PT Datindo Entrycom**

Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta
Telp : (021) 5709009
Faks : (021) 5709026

No. STTD : Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1995
Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Penunjukan oleh Perseroan melalui surat perikatan No. TRI/096 tanggal 21 September 2010

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam PUT III adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi menyiapkan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk emiten, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pengembalian uang pemesanan pembelian saham.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

**XV. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 DAN 2009
DAN TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ANAK PERUSAHAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Krishna R. Suparto
 Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia
 Nomor telepon : 5728045
 Alamat rumah : Jl. Murai Raya Blok J-I No.18 Bintaro, Jakarta Selatan
 Jabatan : Direktur
2. Nama : Suwoko Singoastro
 Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia
 Nomor telepon : 5729304
 Alamat rumah : Griya BNI 46 RT.002/RW.002, Kebayoran Lama, Grogol Selatan, Jakarta Selatan
 Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan anak perusahaan;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan anak perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan anak perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan anak perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan anak perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi
Jakarta, 12 November 2010






Krishna R. Suparto
Direktur
 Suwoko Singoastro
Direktur

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-375/PSS/2010

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

Kami telah mengaudit neraca konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BNI") dan Anak Perusahaan tanggal 30 September 2010 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, serta laporan laba rugi konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen BNI. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami tidak mengaudit laporan keuangan Anak Perusahaan BNI pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, yang laporan keuangannya mencerminkan jumlah aset sebesar 0,67% dan 1,13% dari jumlah aset konsolidasian pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, dan jumlah pendapatan operasional sebesar 1,51% dan 0,48% dari jumlah pendapatan operasional konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007. Laporan keuangan Anak Perusahaan tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya telah diserahkan kepada kami, dan pendapat kami, sejauh berkaitan dengan jumlah-jumlah untuk Anak Perusahaan tersebut, semata-mata hanya didasarkan atas laporan-laporan auditor independen lain tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami dan laporan auditor independen lain tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

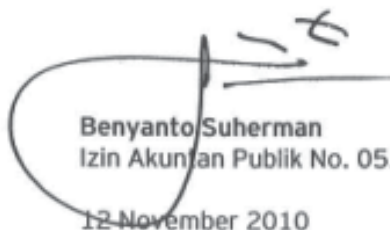
Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan-laporan auditor independen lain yang kami sebut di atas, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 September 2010 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, serta hasil usaha dan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian BNI dan Anak Perusahaan tanggal 30 September 2009 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah kami *review* dan laporan kami bertanggal 24 November 2009 berisi pernyataan bahwa kami tidak menemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. *Review* atas laporan keuangan interim terutama meliputi penerapan prosedur analitik terhadap data keuangan dan meminta keterangan kepada orang yang bertanggung jawab atas berbagai hal yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan. Namun, suatu *review* sangat terbatas lingkungannya dibandingkan dengan lingkup audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia, dan tidak memberikan dasar memadai bagi kami untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Seperti dijelaskan pada Catatan 2a, 2c dan 49 atas laporan keuangan konsolidasian, mulai 1 Januari 2010, BNI dan Anak Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Penerapan PSAK No. 50 dan No. 55 (Revisi 2006) ini dilakukan secara prospektif.

Kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. RPC-335/PSS/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007. Seperti dijelaskan pada Catatan 57 atas laporan keuangan konsolidasian, BNI dan Anak Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas untuk mencakup tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,

Purwantono, Suherman & Surja



Benyanto Suherman
Izin Akuntan Publik No. 05.1.0973
12 November 2010

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASIAN
30 September 2010 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
				2009	2008	2007
ASET						
Kas	2a,2c,3	5.325.305	4.962.340	4.903.316	4.428.192	3.259.229
Giro pada Bank Indonesia	2a,2c, 2e,4	8.551.458	7.498.689	8.531.044	9.350.792	17.573.082
Giro pada bank lain setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.049 pada periode 2010, Rp20.514 pada periode 2009, Rp69.276 pada tahun 2009, Rp19.787 pada tahun 2008, dan Rp10.914 pada tahun 2007	2a,2c,2e, 2l,5	2.720.621	1.441.571	6.858.342	1.700.793	1.170.800
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp210 pada periode 2010, Rp349.044 pada periode 2009, Rp229.550 pada tahun 2009, Rp306.367 pada tahun 2008, dan Rp79.621 pada tahun 2007	2a,2c, 2f,2l,6	22.908.211	20.784.440	29.622.162	22.641.940	14.808.515
Surat-surat berharga setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp105.508 pada periode 2010, Rp393.104 pada periode 2009, Rp317.584 pada tahun 2009, Rp369.232 pada tahun 2008, dan Rp42.249 pada tahun 2007	2a,2c, 2g,2l,7	17.223.620	8.892.938	19.197.927	9.874.051	16.200.561
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp2.530 pada periode 2009 dan pendapatan bunga yang belum direalisasi sebesar Rp50 pada periode 2010, Rp2.377 pada periode 2009, Rp365 pada tahun 2008, dan Rp5.206 pada tahun 2007	2c,2h, 2l,13	4.015	250.456	-	86.815	195.119
Wesel ekspor dan tagihan lainnya setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp5.516 pada periode 2010, Rp15.804 pada periode 2009, Rp19.207 pada tahun 2009, Rp24.110 pada tahun 2008, dan Rp10.574 pada tahun 2007	2c,2i, 2l,8	521.551	559.638	668.764	427.945	319.333

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan)
30 September 2010 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember			
			2009	2008	2007	
ASET (lanjutan)						
Tagihan akseptasi setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp65.423 pada periode 2010, Rp37.495 pada periode 2009, Rp63.479 pada tahun 2009, Rp158.998 pada tahun 2008, dan Rp47.353 pada tahun 2007	2c,2l,2m, 2ac,9,38	5.792.631	2.528.475	4.729.379	3.831.037	2.380.118
Tagihan derivatif setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar RpNihil pada periode 2010, Rp173 pada periode 2009, Rp92 pada tahun 2009, Rp967 pada tahun 2008, dan Rp27 pada tahun 2007	2c,2j, 2l,10	1.365	16.637	7.301	95.558	2.637
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp6.529.394 pada periode 2010, Rp8.647.140 pada periode 2009, Rp6.920.455 pada tahun 2009, Rp5.652.046 pada tahun 2008, dan Rp5.436.203 pada tahun 2007 - Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa - Pihak ketiga	2c,2k,2l, 2q,11 2ac,38	482.862 119.061.356	263.526 113.205.730	530.187 113.392.498	468.249 105.874.102	84.680 83.130.305
Obligasi Pemerintah setelah penyesuaian amortisasi diskonto dan premi	2c,2g, 2l,12	33.037.232	34.553.671	31.039.523	34.655.313	36.700.770
Penyertaan saham setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp5.630 pada periode 2010, Rp42.730 pada periode 2009, Rp15.523 pada tahun 2009, Rp32.387 pada tahun 2008, dan Rp11.118 pada tahun 2007	2l, 2n,14	35.403	56.298	51.267	104.653	134.793
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.151.949 pada periode 2010, Rp3.810.751 pada periode 2009, Rp3.863.790 pada tahun 2009, Rp3.553.245 pada tahun 2008, dan Rp2.944.609 pada tahun 2007	2o,15	3.750.512	3.492.938	3.707.940	3.732.893	3.871.229
Aset pajak tangguhan - bersih	2y,23c	1.118.734	1.714.375	1.358.911	1.989.131	710.755
Aset lain-lain - bersih	2o,2p,16	4.275.758	2.838.704	2.898.406	2.479.605	2.799.685
JUMLAH ASET		224.810.634	203.060.426	227.496.967	201.741.069	183.341.611

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan)
30 September 2010 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 September	30 September	31 Desember		
		2010	2009 (Tidak Diaudit)	2009	2008	2007
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
Kewajiban segera	2r,17	1.032.919	917.558	1.109.216	1.059.663	1.118.333
Simpanan nasabah	2c,2t,18					
- Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2ac,38	54.514	137.292	1.017.255	866.953	419.417
- Pihak ketiga		183.717.297	163.516.734	187.451.732	162.297.405	145.769.129
Simpanan dari bank lain						
- Pihak ketiga	2c,2u,19	3.155.074	3.494.768	3.819.149	4.100.032	3.803.936
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	2c,2h,7,12,20	-	-	-	625.000	199.406
Kewajiban derivatif	2c,2j,10	233.117	209.732	152.423	82.666	29.190
Kewajiban akseptasi	2c,2m	1.719.040	1.962.297	2.558.681	1.969.306	1.594.270
Surat-surat berharga yang diterbitkan	2c,2v,21	1.276.545	1.267.121	1.260.750	1.269.242	1.269.135
Pinjaman yang diterima	2c,22	5.185.068	7.737.196	5.569.805	8.616.869	6.309.151
Hutang pajak	2y,23a	562.830	162.850	94.036	599.246	151.379
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	2l,37	148.543	155.402	155.723	129.166	178.505
Kewajiban pajak tangguhan	2y	18.657	-	-	-	-
Kewajiban lain-lain	2s,2z,24,35	6.345.125	5.064.348	5.133.675	4.663.795	4.318.861
Pinjaman subordinasi	25	-	-	-	-	933.704
JUMLAH KEWAJIBAN		203.448.729	184.625.298	208.322.445	186.279.343	166.094.416
HAK MINORITAS	2b,39	43.892	28.894	30.940	30.578	27.610

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan)
30 September 2010 dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
EKUITAS					
Modal saham:					
- Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp7.500 per saham					
- Seri B - nilai nominal Rp7.500 per saham					
- Seri C - nilai nominal Rp375 per saham					
Modal dasar:					
- Seri A Dwiwarna - 1 saham					
- Seri B - 289.341.866 saham					
- Seri C - 34.213.162.660 saham					
Modal ditempatkan dan disetor penuh:					
- Seri A Dwiwarna - 1 saham					
- Seri B - 289.341.866 saham					
- Seri C - 14.984.598.643 saham	26	7.789.288	7.789.288	7.789.288	7.789.288
Tambahan modal disetor	2ag,26	5.617.599	5.617.599	5.617.599	5.812.879
Rugi yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan	2g,7,12,23	(745.063)	(1.036.645)	(924.402)	(2.720.198)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2d	13.255	9.516	6.903	39.141
Rugi yang belum direalisasi atas transaksi lindung nilai		(200.007)	(167.475)	(148.374)	-
Saldo laba *)					
Dicadangkan					
Cadangan umum dan wajib	28	1.523.788	1.280.854	1.272.833	1.155.957
Cadangan khusus	29	1.101.030	867.102	867.286	756.661
Tidak dicadangkan		6.218.123	4.045.995	4.662.449	2.597.420
		8.842.941	6.193.951	6.802.568	4.510.038
Jumlah ekuitas sebelum dikurangi saham yang diperoleh kembali oleh Anak Perusahaan		21.318.013	18.406.234	19.143.582	15.431.148
Dikurangi: saham yang diperoleh kembali oleh Anak Perusahaan sejumlah 23.585.000 saham	2af	-	-	-	-**)
JUMLAH EKUITAS		21.318.013	18.406.234	19.143.582	15.431.148
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		224.810.634	203.060.426	227.496.967	201.741.069
					183.341.611

*) Saldo rugi sebesar Rp58.905.232 pada tanggal 30 Juni 2003 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor, laba yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual, cadangan penilaian kembali aset, cadangan khusus dan cadangan umum dan wajib pada saat kuasi-reorganisasi BNI pada tanggal 30 Juni 2003.

***) Saldo dibawah Rp1.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	31 Desember		
				2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH						
Pendapatan bunga dan syariah	2w,30	14.399.812	14.286.817	18.878.575	16.103.368	14.455.271
Provisi dan komisi atas pinjaman yang diberikan	2x	-	423.147	568.191	524.771	422.449
JUMLAH PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH		14.399.812	14.709.964	19.446.766	16.628.139	14.877.720
BEBAN BUNGA, BONUS DAN BEBAN PEMBIAYAAN LAINNYA						
Beban bunga dan bonus Pembiayaan lainnya	2w,31	(5.382.860) (12.157)	(6.385.958) (14.259)	(8.294.120) (19.878)	(6.661.349) (54.907)	(7.370.413) (39.876)
JUMLAH BEBAN BUNGA, BONUS DAN BEBAN PEMBIAYAAN LAINNYA		(5.395.017)	(6.400.217)	(8.313.998)	(6.716.256)	(7.410.289)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH BERSIH		9.004.795	8.309.747	11.132.768	9.911.883	7.467.431
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA						
Provisi dan komisi lainnya		1.461.238	1.597.447	2.231.196	1.975.746	1.596.604
Pendapatan premi asuransi Kenaikan (penurunan) nilai surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi	2aa 2g	994.571	738.205	1.026.573	764.263	679.510
Laba selisih kurs - bersih	2d	673.547	347.124	424.428	(143.240)	1.222.737
Lain-lain	32	90.609 184.241	248.785 214.498	261.966 351.222	629.965 322.155	265.641 365.224
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		3.404.206	3.146.059	4.295.385	3.548.889	4.129.716
PEMBALIKAN (PEMBENTUKAN) PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN						
Pinjaman yang diberikan Lainnya	11	(2.213.913) 437.511	(3.134.837) (348.299)	(3.263.472) (787.337)	(3.865.145) (493.462)	(2.039.334) (664.238)
JUMLAH PEMBENTUKAN PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN		(1.776.402)	(3.483.136)	(4.050.809)	(4.358.607)	(2.703.572)
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA						
Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi	33,35 34	(2.642.061) (1.737.030)	(2.593.594) (1.593.688)	(3.460.000) (2.311.820)	(3.298.886) (2.273.336)	(3.691.747) (2.389.407)
Underwriting asuransi	2aa	(1.030.511)	(770.909)	(1.022.219)	(706.076)	(693.416)
Beban promosi		(430.361)	(226.191)	(427.323)	(351.967)	(296.805)
Premi penjaminan		(272.378)	(247.402)	(334.399)	(257.876)	(287.746)
Lain-lain		(278.853)	(276.061)	(435.469)	(339.501)	(266.806)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		(6.391.194)	(5.707.845)	(7.991.230)	(7.227.642)	(7.625.927)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	31 Desember		
				2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
LABA OPERASIONAL		4.241.405	2.264.825	3.386.114	1.874.523	1.267.648
PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - BERSIH		7.203	77.811	57.835	57.862	213.492
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK DAN HAK MINORITAS		4.248.608	2.342.636	3.443.949	1.932.385	1.481.140
BEBAN PAJAK	2y,23b	(1.293.051)	(487.833)	(957.230)	(706.480)	(579.396)
LABA SEBELUM HAK MINORITAS		2.955.557	1.854.803	2.486.719	1.225.905	901.744
HAK MINORITAS ATAS (LABA) RUGI BERSIH ANAK PERUSAHAAN	2b,39	(1.346)	103	(2.724)	(3.420)	(3.816)
LABA BERSIH		2.954.211	1.854.906	2.483.995	1.222.485	897.928
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (DALAM RUPIAH PENUH)	2ab,36	193	121	163	80	64

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahhan Modal Disetor	Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi atas Surat-surat Berharga dan Obligasi Pemerintah dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual Setelah Plak Tanggungan	Salah satu Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Rugi yang Belum Direalisasi atas Transaksi Lindung Nilai	Saldo Laba *)		Tidak Dicapang	Jumlah Ekuitas
						Dicadangkan	Cadangan Khusus		
	7.789.288	5.617.599	(924.402)	6.903	(148.374)	1.272.833	867.286	4.662.449	19.143.582
								52.361	
	7.789.288	5.617.599	(924.402)	6.903	(148.374)	1.272.833	867.286	4.714.810	19.195.943
								2.954.211	2.954.211
									179.339
									6.352
								(869.396)	(869.396)
								(24.839)	(24.839)
								(74.519)	(74.519)
									(51.633)
								(248.400)	
									2.555
									233.744
								(233.744)	
	7.789.288	5.617.599	(745.063)	13.255	(200.007)	1.523.788	1.101.030	6.218.123	21.318.013

*) Saldo rugi sebesar Rp58.905.232 pada tanggal 30 Juni 2003 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor, laba yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual, cadangan penilaian kembali aset, cadangan khusus dan cadangan umum dan wajib pada saat kuasi-reorganisasi BNI pada tanggal 30 Juni 2003.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Laba (Rugi) yang Belum Diresalisasi atas Surat-surat Berharga dan Obligasi				Saldo Laba *)		Jumlah Ekuitas
			Diresalisasi dalam Kelompok Tergolong untuk Dijual Setelah Pajak Tangguhan	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Rugi yang Belum Diresalisasi atas Transaksi Lindung Nilai	Dicadangkan			
						Cadangan Umum dan Wajib	Cadangan Khusus	Tidak Dicapadangkan	
Saldo per 31 Desember 2008	7.789.288	5.812.879	(2.720.198)	39.141	-	1.155.957	756.661	2.597.420	15.431.148
Laba bersih untuk periode sembilan bulan 30 September 2009 (tidak diaudit)	-	-	-	-	-	-	-	1.854.906	1.854.906
Laba yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan	2g,7,12,23	-	1.683.553	-	-	-	-	-	1.683.553
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2d	-	-	(29.625)	-	-	-	-	(29.625)
Dividen tunai (Rp8 per saham)	2ad,27	-	-	-	-	-	-	(122.248)	(122.248)
Dana program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil	27,29	-	-	-	-	-	-	(12.225)	(12.225)
Dana program bina lingkungan	27,29	-	-	-	-	-	-	(36.673)	(36.673)
Rugi yang belum direalisasi atas transaksi lindung nilai	10	-	-	-	(167.475)	-	-	-	(167.475)
Pembentukan cadangan umum dan wajib	27,28	-	-	-	-	122.249	-	(122.249)	-
Pembalikan cadangan umum	-	-	-	-	-	(4.246)	-	4.246	-
Pembentukan cadangan khusus	27,29	-	-	-	-	-	125.571	(125.571)	-
Pembalikan cadangan khusus	-	-	-	-	-	-	(15.130)	15.130	-
Pembentukan cadangan wajib cabang luar negeri	28	-	-	-	-	6.741	-	(6.741)	-
Pembentukan cadangan atas dividen yang tidak diambil	-	-	-	-	-	-	153	-	153
Biaya emisi penerbitan saham	2a,26	(195.280)	-	-	-	-	-	-	(195.280)
Saldo per 30 September 2009 (tidak diaudit)	7.789.288	5.617.599	(1.036.645)	9.516	(167.475)	1.280.854	867.102	4.045.995	18.406.234

*) Saldo rugi sebesar Rp58.905.232 pada tanggal 30 Juni 2003 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor, laba yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual, cadangan penilaian kembali aset, cadangan khusus dan cadangan umum dan wajib pada saat kuasi-reorganisasi BNI pada tanggal 30 Juni 2003.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahhan Modal Disetor	Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi atas Surat-surat Berharga dan Obligasi Pemerintah dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual Setelah Pajak Tangguhan	Salah Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Rugi yang Belum Direalisasi atas Transaksi Lindung Nilai	Saldo Laba *)		Jumlah Ekuitas	
							Dicadangkan	Cadangan Umum dan Wajib		Cadangan Khusus
Saldo per 31 Desember 2008		7.789.288	5.812.879	(2.720.198)	39.141	-	1.155.957	756.661	2.597.420	15.431.148
Laba bersih untuk tahun 2009		-	-	-	-	-	-	-	2.483.995	2.483.995
Laba yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan		-	-	1.795.796	-	-	-	-	-	1.795.796
Selish kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2d	-	-	-	(32.238)	-	-	-	-	(32.238)
Dividen tunai (Rp8 per saham)	2ad,27	-	-	-	-	-	-	-	(122.248)	(122.248)
Dana program keaktifan badan usaha milik negara dengan usaha kecil	27,29	-	-	-	-	-	-	-	(12.225)	(12.225)
Dana program bina lingkungan	27,29	-	-	-	-	-	-	-	(36.673)	(36.673)
Rugi yang belum direalisasi atas transaksi lindung nilai	10	-	-	-	-	(148.374)	-	-	-	(148.374)
Pembentukan cadangan umum dan wajib	27,28	-	-	-	-	-	122.249	-	(122.249)	-
Pembalikan cadangan umum		-	-	-	-	-	(4.247)	-	-	(4.247)
Pembentukan cadangan khusus	27,29	-	-	-	-	-	-	125.571	(125.571)	-
Pembalikan cadangan khusus		-	-	-	-	-	-	(14.946)	-	(14.946)
Pembalikan cadangan wajib cabang luar negeri		-	-	-	-	-	(1.126)	-	-	(1,126)
Biaya emisi pembelian saham	2ag,26	-	(195.280)	-	-	-	-	-	-	(195.280)
Saldo per 31 Desember 2009		7.789.288	5.617.599	(924.402)	6.903	(148.374)	1.272.833	867.286	4.662.449	19.143.582

*) Saldo rugi sebesar Rp58.905.232 pada tanggal 30 Juni 2003 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor, laba yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual, cadangan penilaian kembali aset, cadangan khusus dan cadangan umum dan wajib pada saat kuasi-reorganisasi BNI pada tanggal 30 Juni 2003.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahkan Modal Disetor	Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi atas Surat-surat Berharga dan Obligasi				Saldo Laba *)		Jumlah Ekuitas Sebelum Dikurangi Saham yang Diperoleh Kembali oleh Anak Perusahaan	Saham yang Diperoleh Kembali oleh Anak Perusahaan	Jumlah Ekuitas
			Pemerintah dalam Kelompok Tersedia	Selisih Kurs karena Perubahan Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Dicadangkan		Jumlah Ekuitas Sebelum Dikurangi Saham yang Diperoleh Kembali oleh Anak Perusahaan				
					Cadangan Umum dan Wajib	Cadangan Khusus		Tidak Dicadangkan			
	7.789.288	5.812.879	(89.680)	(5.590)	1.059.007	662.086	2.039.493	17.267.483	(47.898)	17.219.585	
	-	-	-	-	-	-	1.222.485	1.222.485	-	1.222.485	
2g, 7, 12, 23	-	-	(2.630.518)	-	-	-	-	(2.630.518)	-	(2.630.518)	
2d	-	-	-	44.731	-	-	-	44.731	-	44.731	
2ad, 27	-	-	-	-	-	-	(449.054)	(449.054)	-	(449.054)	
27, 28	-	-	-	-	89.793	-	(89.793)	-	-	-	
27, 29	-	-	-	-	-	89.793	(89.793)	-	-	-	
28	-	-	-	-	7.157	-	-	7.157	-	7.157	
28	-	-	-	-	-	4.782	-	4.782	-	4.782	
27, 29	-	-	-	-	-	-	(26.937)	(26.937)	-	(26.937)	
27, 29	-	-	-	-	-	-	(8.981)	(8.981)	-	(8.981)	
2af	-	-	-	-	-	-	-	-	47.898	47.898	
	7.789.288	5.812.879	(2.720.198)	39.141	1.155.957	756.661	2.597.420	15.431.148	-**)	15.431.148	

*) Saldo rugi sebesar Rp58.905.232 pada tanggal 30 Juni 2003 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor, laba yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual, cadangan penilaian kembali aset, cadangan khusus dan cadangan umum dan wajib pada saat kuasi-reorganisasi BNI pada tanggal 30 Juni 2003.

***) Saldo dibawah Rp1.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahhan Modal Disetor	Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi atas Surat-surat Berharga dan Obligasi Pemerintah dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual Setelah Pajak Tangguhan	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Saldo Laba *)			Jumlah Ekuitas Sebelum Dikurangi Saham yang Diperoleh Kembali oleh Anak Perusahaan	Saham yang Diperoleh Kembali oleh Anak Perusahaan	Jumlah Ekuitas
						Dicadangkan Umum dan Wajib	Cadangan Khusus	Tidak Dicadangkan			
Saldo per 31 Desember 2006		7.042.194	2.525.661	1.351.484	(22.360)	678.147	479.132	2.740.011	14.794.269	-	14.794.269
Laba bersih untuk tahun 2007		-	-	-	-	-	-	897.928	897.928	-	897.928
Rugi yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan		-	-	(1.441.164)	-	-	-	-	(1.441.164)	-	(1.441.164)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-	-	-	16.770	-	-	-	16.770	-	16.770
Dividen tunai (Rp72,50 per saham)	2ad,27	-	-	-	-	-	-	(962.922)	(962.922)	-	(962.922)
Pembentukan cadangan umum dan wajib	27,28	-	-	-	-	385.166	-	(385.166)	-	-	-
Pembalikan cadangan bersih cabang Tokyo	28	-	-	-	-	(4.306)	-	-	(4.306)	-	(4.306)
Pembentukan cadangan khusus	27,29	-	-	-	-	-	182.954	(182.954)	-	-	-
Pembelian saham	26	747.094	-	-	-	-	-	-	747.094	-	747.094
Tambahan modal disetor	26	-	3.287.218	-	-	-	-	-	3.287.218	-	3.287.218
Dana program bina lingkungan	27,29	-	-	-	-	-	-	(38.517)	(38.517)	-	(38.517)
Dana program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil	27,29	-	-	-	-	-	-	(28.887)	(28.887)	-	(28.887)
Saham yang diperoleh kembali oleh Anak Perusahaan	2af	-	-	-	-	-	-	-	-	(47.898)	(47.898)
Saldo per 31 Desember 2007		7.789.288	5.812.879	(89.680)	(6.590)	1.059.007	662.086	2.039.493	17.267.483	(47.898)	17.219.585

*) Saldo rugi sebesar Rp88.905.232 pada tanggal 30 Juni 2003 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor, laba yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual, cadangan penilaian kembali aset, cadangan khusus dan cadangan umum dan wajib pada saat kuasi-reorganisasi BNI pada tanggal 30 Juni 2003.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	31 Desember		
			2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Bunga, provisi dan komisi	14.596.710	14.898.695	19.509.478	16.434.789	15.342.923
Bunga dan pembiayaan lainnya yang dibayar	(5.479.001)	(6.396.731)	(8.246.264)	(6.966.538)	(7.259.064)
Pendapatan operasional lainnya	3.313.596	2.897.274	4.014.390	2.918.924	3.864.075
Beban operasional lainnya	(6.574.915)	(5.143.861)	(7.046.325)	(5.121.094)	(5.846.973)
Pendapatan bukan operasional - bersih	38.194	72.257	79.798	73.562	216.055
Pembayaran pajak penghasilan badan	(877.743)	(974.364)	(1.260.256)	(647.892)	(1.269.598)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi	5.016.841	5.353.270	7.050.821	6.691.751	5.047.418
Perubahan dalam aset dan kewajiban operasi:					
Penurunan (kenaikan) aset operasi:					
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	(231.173)	(5.448.641)	(3.929.292)	3.700.298	(2.384.531)
Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi dengan tujuan untuk diperdagangkan	26.799	262.964	(10.918.294)	(1.323.415)	(207.188)
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	(4.015)	(166.171)	86.815	108.304	(195.119)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	160.904	(124.700)	(235.929)	(122.148)	351.312
Pinjaman/pembiayaan yang diberikan	(8.118.367)	(10.440.483)	(11.437.453)	(27.033.997)	(22.819.814)
Tagihan akseptasi	(1.065.196)	1.424.065	(802.823)	(1.562.564)	669.277
Aset lain-lain	(1.327.541)	(884.857)	(930.612)	353.085	577.858
Kenaikan (penurunan) kewajiban operasi:					
Kewajiban segera	(76.297)	(142.105)	49.553	(58.670)	(144.583)
Simpanan nasabah	(4.697.175)	489.669	25.304.629	16.975.812	10.391.806
Simpanan dari bank lain	(664.075)	(605.264)	(280.883)	296.096	1.459.603
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	(625.000)	(625.000)	425.594	(300.240)
Kewajiban akseptasi	(839.641)	(7.009)	589.375	375.036	(1.388.463)
Kewajiban lain-lain	1.295.433	525.815	580.919	595.216	1.102.874
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	(10.523.503)	(10.388.447)	4.501.826	(579.602)	(7.839.790)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penjualan dan pembelian Obligasi Pemerintah:					
Penjualan	16.082.879	21.013.375	29.148.982	18.780.490	41.130.696
Pembelian	(17.059.664)	(19.145.978)	(24.177.452)	(20.036.650)	(39.777.633)
(Pembelian) penjualan Obligasi Pemerintah - bersih	(976.785)	1.867.397	4.971.530	(1.256.160)	1.353.063
Penjualan (pembelian) surat-surat berharga - bersih	(4.468.870)	(2.232.495)	8.551.353	130.109	(2.830.226)
Penambahan aset tetap	(421.649)	(358.286)	(703.109)	(463.529)	(464.133)
Hasil penjualan aset tetap	41.778	270.387	318.891	5.900	35.137
Penambahan penyertaan modal, saham Anak Perusahaan dan asosiasi perusahaan	-	-	(7.817)	-	(9.274)
Hasil penjualan penyertaan modal sementara, saham Anak Perusahaan dan asosiasi perusahaan	60	42.278	45.878	-	-
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi	(5.825.466)	(410.719)	13.176.726	(1.583.680)	(1.915.433)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	31 Desember		
			2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Kenaikan (penurunan) surat berharga yang diterbitkan	15.795	(2.121)	(8.492)	107	(265.522)
Kenaikan (penurunan) pinjaman yang diterima	(384.737)	(879.674)	(3.047.064)	2.307.718	2.299.727
Pembayaran dividen, program kemitraan dan bina lingkungan	(968.754)	(170.586)	(171.146)	(484.972)	(1.030.326)
Pengeluaran saham	-	(195.279)	-	-	3.982.108
Pelunasan hutang subordinasi	-	-	-	(933.704)	(1.305.099)
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(1.337.696)	(1.247.660)	(3.226.702)	889.149	3.680.888
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(17.686.665)	(12.046.826)	14.451.850	(1.274.133)	(6.074.335)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE/TAHUN	61.621.283	47.169.433	47.169.433	48.443.566	54.517.901
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE/TAHUN	43.934.618	35.122.607	61.621.283	47.169.433	48.443.566
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:					
Kas	5.325.305	4.962.340	4.903.316	4.428.192	3.259.229
Giro pada Bank Indonesia	8.551.458	7.498.689	8.531.044	9.350.792	17.573.082
Giro pada bank lain	2.721.670	1.462.085	6.927.618	1.720.580	1.181.714
Penempatan pada bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	22.620.964	19.373.617	29.795.428	26.637.081	14.876.612
Sertifikat Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	4.715.221	1.825.876	11.463.877	5.032.788	11.552.929
Jumlah kas dan setara kas	43.934.618	35.122.607	61.621.283	47.169.433	48.443.566
KEGIATAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS					
Penghapusbukuan pinjaman yang diberikan	3.974.170	728.032	3.330.629	4.245.924	1.110.834
Penghapusbukuan penyertaan saham sementara	-	-	-	-	1.225.177
Laba (rugi) yang belum direalisasi atas kenaikan (penurunan) nilai surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan	179.339	1.683.553	1.795.796	(2.630.518)	(1.441.164)
Laba (rugi) yang belum direalisasi atas kenaikan (penurunan) nilai surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok diperdagangkan setelah dikurangi pajak tangguhan	673.547	347.124	19.030	(139.289)	1.222.737

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Bank

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI" atau "Bank") pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi "Bank Negara Indonesia 1946", dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi perusahaan perseroan terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyesuaian masa jabatan anggota direksi dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar BNI sesuai dengan Akta No. 13 tanggal 12 Mei 2010 Notaris Fathiah Helmi, S.H. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.10-13852 tanggal 7 Juni 2010.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BNI, ruang lingkup kegiatan BNI adalah melakukan usaha di bidang perbankan (termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah (Catatan 1h)).

b. Penawaran Umum Perdana Saham

Pada tanggal 28 Oktober 1996, BNI melakukan penawaran umum perdana atas 1.085.032.000 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500 (nilai penuh) setiap saham dan harga penawaran sebesar Rp850 (nilai penuh) setiap saham kepada masyarakat di Indonesia. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI) pada tanggal 25 November 1996.

c. Penawaran Umum Saham Terbatas I

Pada tanggal 30 Juni 1999, BNI melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 151.904.480.000 saham Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp25 (nilai penuh) setiap saham. Setiap pemegang 1 (satu) saham lama berhak membeli 35 (tiga puluh lima) saham baru dengan harga Rp347,58 (nilai penuh) per saham. Dari penawaran umum ini, BNI meningkatkan modal sahamnya sebanyak 683.916.500 lembar saham Seri C yang diterbitkan kepada masyarakat umum pada tanggal 21 Juli 1999 dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang BEI) dan sebanyak 151.220.563.500 lembar saham Seri C yang diterbitkan kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 7 April 2000 dan 30 Juni 2000 melalui program rekapitalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1999.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Penawaran Umum Saham Terbatas II

Pada tanggal 30 Juli 2007, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Pemegang Saham telah memutuskan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan sampai dengan sejumlah 1.992.253.110 saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp375 (nilai penuh) setiap lembar saham.

Setiap pemegang 20 (dua puluh) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BNI pada tanggal 9 Agustus 2007 pukul 16.00 WIB mempunyai 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp2.025 (dua ribu dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Dari Penawaran Umum Terbatas II BNI mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp747.094 dan tambahan agio saham sebesar Rp3.287.218.

Perdagangan perdana dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2007 melalui Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang BEI).

e. Rekapitalisasi

Pada tanggal 30 Maret 2000, Menteri Keuangan menyetujui rekapitalisasi BNI sebesar Rp61,8 triliun, yang meningkat sebesar Rp9 triliun dibandingkan dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1999. Sehubungan dengan peningkatan rekapitalisasi tersebut, yang telah disetujui melalui Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2000, BNI menerbitkan tambahan saham Seri C sebanyak 44.946.404.500 saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pada tanggal 20 Juli 2001, modal saham BNI berkurang sebanyak 1.965.701.500 saham Seri C sehubungan dengan pengembalian kelebihan dana rekapitalisasi kepada Pemerintah Indonesia. Pengembalian obligasi tersebut telah disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 25 Juni 2001.

f. Penawaran Umum Obligasi

Pada tanggal 15 November 2002, BNI melalui cabang Hong Kong, menerbitkan surat berharga subordinasi sebesar USD150 juta dan dicatat di Singapore Stock Exchange. Surat berharga ini adalah kewajiban subordinasi BNI dan bersifat tidak dijamin. Surat berharga ini akan jatuh tempo pada tanggal 15 November 2012. BNI memiliki opsi untuk melunasi surat berharga ini pada tanggal 15 November 2007. Opsi tersebut sudah dilaksanakan pada bulan November 2007.

Surat berharga ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10% per tahun, dibayarkan setiap enam bulan di akhir setiap tanggal 15 Mei dan 15 November tiap tahunnya. Kecuali dilunasi lebih awal, tingkat bunga akan ditentukan kembali berdasarkan tingkat bunga treasury Amerika Serikat dengan jangka waktu 5 (lima) tahun ditambah 11,10% (1.110 *basis points*) per tahun mulai 15 November 2007. Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah JP Morgan Corporate Trustee Services Limited.

Pada tanggal 14 Juli 2003, BNI menerbitkan surat berharga subordinasi dengan nilai nominal sebesar USD100 juta dan dicatat di Bursa Efek Surabaya (sekarang BEI). Surat berharga ini adalah kewajiban subordinasi BNI dan bersifat tidak dijamin. Surat berharga ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2013. BNI memiliki opsi untuk melunasi surat berharga ini pada tanggal 10 Juli 2008.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)

Surat berharga ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 7,5% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan. Kecuali dilunasi lebih awal, tingkat bunga akan ditentukan kembali berdasarkan tingkat bunga Treasury Amerika Serikat dengan jangka waktu 5 tahun ditambah premi 7,74% (774 basis points) per tahun mulai 10 Juli 2008. Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Surat berharga subordinasi tersebut telah dilunasi pada tanggal 10 Juli 2008.

Pada tanggal 14 Juli 2003, BNI menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar Rp1 triliun dan tercatat di Bursa Efek Surabaya (sekarang BEI). Obligasi tersebut bersifat tidak dijamin dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2011. Obligasi tersebut memiliki tingkat bunga tetap sebesar 13,125% per tahun dan dibayarkan setiap kwartal. Pada saat diterbitkan, obligasi ini mendapat peringkat A- (A minus) oleh Pefindo. Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

g. Struktur dan Manajemen

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit BNI adalah sebagai berikut:

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Dewan Komisaris					
Komisaris Utama/Komisaris Independen	Peter Benyamin Stok	Peter Benyamin Stok	Peter Benyamin Stok	Erry R. Hardjapamekas	Zaki Baridwan
Wakil Komisaris Utama	Tirta Hidayat	Suwarsono	Suwarsono	Suwarsono	Suwarsono *)
Komisaris Independen	Fero Poerbonegoro	Achjar Iljas	Achjar Iljas	Achjar Iljas	Felia Salim
Komisaris Independen	Achil R. Djayadiningrat	Achil R. Djayadiningrat	Achil R. Djayadiningrat	Achil R. Djayadiningrat	-
Komisaris Independen	B.S. Kusmuljono	-	-	-	-
Komisaris	Ekoputro Adijayanto	Parikesit Suprpto	Parikesit Suprpto	Parikesit Suprpto	Parikesit Suprpto
Komisaris	Bagus Rumbogo	Fero Poerbonegoro	Fero Poerbonegoro	Fero Poerbonegoro	Achjar Iljas
Komisaris	-	H.M.S. Latif	H.M.S. Latif	H.M.S. Latif	H.M.S. Latif
Komisaris	-	-	-	-	Effendi
Direksi					
Direktur Utama	Gatot M. Suwondo	Gatot M. Suwondo	Gatot M. Suwondo	Gatot M. Suwondo	Sigit Pramono
Wakil Direktur Utama	Felia Salim	Felia Salim	Felia Salim	Felia Salim	Gatot M. Suwondo
Direktur Konsumer	Darmadi Sutanto	Darwin Suzandi	Darwin Suzandi	Darwin Suzandi	Kemal Ranadireksa
Direktur <i>Business Banking</i>	Krishna R. Suparto	-	-	-	-
Direktur Treasury dan Internasional	Adi Setianto	Bien Subiantoro	Bien Subiantoro	Bien Subiantoro	-
Direktur Treasury dan <i>Private Banking</i>	-	-	-	-	Fero Poerbonegoro
Direktur Keuangan	Yap Tjay Soen	Yap Tjay Soen	Yap Tjay Soen	Yap Tjay Soen	-
Direktur Jaringan dan Layanan	Honggo Widjojo	Kangmasto	-	-	-
Direktur Kepatuhan	Ahdi Jumhari Luddin	-	-	-	-
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	-	Ahdi Jumhari Luddin	Ahdi Jumhari Luddin	Ahdi Jumhari Luddin	-
Direktur Kepatuhan dan SDM	-	-	-	-	Achil R. Djayadiningrat
Direktur Operasional dan Teknologi Informasi	Suwoko Singoastro	-	-	-	-
Direktur Manajemen Risiko	Sutanto	-	-	-	Ignatius Supomo
Direktur Usaha Kecil, Menengah dan Syariah	-	Achmad Baiquni	Achmad Baiquni	Achmad Baiquni	-
Direktur Komersial dan Usaha Syariah	-	-	-	-	Bien Subiantoro
Direktur Korporasi	-	Krishna R. Suparto	Krishna R. Suparto	Krishna R. Suparto	Achmad Baiquni
Direktur Jaringan dan Operasi	-	Suwoko Singoastro	Suwoko Singoastro	Suwoko Singoastro	-
Direktur Operasi	-	-	-	-	Suroto Moehadjij
Komite Audit **)					
Ketua	Achil R. Djayadiningrat	Achil R. Djayadiningrat	Achil R. Djayadiningrat	Erry R. Hardjapamekas	Suwarsono
Anggota	Bagus Rumbogo	Teuku Radja Sjahnan	H.M.S. Latif	Teuku Radja Sjahnan	Teuku Radja Sjahnan
Anggota	Setyo Buwono	Setyo Buwono	Setyo Buwono	Setyo Buwono	Henrajaya
Anggota	Darminto	Darminto	Darminto	Darminto	Haryanto
Anggota	-	Alexander Zulkarnain	Alexander Zulkarnain	Alexander Zulkarnain	Alexander Zulkarnain
Anggota	-	H.M.S. Latif	-	H.M.S. Latif	Effendi
Anggota	-	Henrajaya	-	Henrajaya	-
Sekretaris	-	Hasan Mas'ud	-	Hasan Mas'ud	Hasan Mas'ud

*) Merangkap jabatan sebagai komisaris independen

**) Pembentukan komite audit Bank telah dilakukan sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.I.5.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

g. Struktur dan Manajemen (lanjutan)

Susunan pengurus Dewan Komisaris dan Direksi telah mendapat persetujuan Bank Indonesia.

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi BNI adalah sebesar Rp21.807, Rp27.194, Rp34.561, Rp18.849 dan Rp14.460 masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007. Sedangkan gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris BNI adalah sebesar Rp6.054, Rp5.860, Rp7.758, Rp5.154 dan Rp3.502 masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

Jumlah pegawai BNI dan Anak Perusahaan (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	Tetap	Honorer	Jumlah
30 September 2010	19.352	1.496	20.848
30 September 2009	18.843	492	19.335
31 Desember 2009	18.710	509	19.219
31 Desember 2008	18.683	188	18.871
31 Desember 2007	18.456	288	19.044

Kantor pusat BNI berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta. Pada tanggal 30 September 2010, BNI memiliki 167 (seratus enam puluh tujuh) kantor cabang dan 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) cabang pembantu domestik. Selain itu, jaringan BNI juga meliputi 4 (empat) kantor cabang luar negeri yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo dan London serta 1 (satu) kantor perwakilan di New York.

h. Anak Perusahaan

BNI mempunyai kepemilikan langsung pada Anak Perusahaan berikut:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Mulai Beroperasi Komersial	Persentase Kepemilikan		Jumlah Aset	
			Sep 2010	Sep 2009	Sep 2010	Sep 2009
PT BNI Multifinance	Pembiayaan	1983	99,98%	99,98%	194.546	164.674
PT BNI Securities	Sekuritas	1995	99,85%	99,85%	1.580.147	1.193.317
PT BNI Life Insurance	Asuransi jiwa	1997	85,11%	85,11%	2.117.217	1.506.339
BNI Remittance Ltd.	Jasa keuangan	1998	100,00%	100,00%	5.982	10.042
PT Bank BNI Syariah	Perbankan	2010	99,90%	-	6.088.008	-

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Mulai Beroperasi Komersial	Persentase Kepemilikan			Jumlah Aset		
			Des 2009	Des 2008	Des 2007	Des 2009	Des 2008	Des 2007
PT BNI Multifinance	Pembiayaan	1983	99,98%	99,98%	99,98%	200.333	201.545	167.391
PT BNI Securities	Sekuritas	1995	99,85%	99,85%	99,85%	987.627	792.774	992.342
PT BNI Life Insurance	Asuransi jiwa	1997	85,11%	85,11%	69,11%	1.585.352	1.118.160	934.246
BNI Remittance Ltd.	Jasa keuangan	1998	100,00%	99,99%	-	9.768	717	-
PT Bank BNI Syariah	Perbankan	2010	-	-	-	-	-	-

Semua Anak Perusahaan BNI berkedudukan di Jakarta, kecuali BNI Remittance Ltd. berkedudukan di Hong Kong.

PT BNI Life Insurance (dahulu PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya)

Pada bulan Desember 2007, BNI telah meningkatkan penyetaraannya pada PT BNI Life Insurance dari 59,78% menjadi 69,11%.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

h. Anak Perusahaan (lanjutan)

PT BNI Life Insurance (dahulu PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya) (lanjutan)

Pada tanggal 29 Juli 2008 BNI memberikan pinjaman subordinasi kepada PT BNI Life Insurance (Anak Perusahaan) sebesar Rp50.000 yang dikonversikan menjadi modal saham pada tanggal 22 Desember 2008. Oleh karenanya penyertaan BNI pada PT BNI Life Insurance (Anak Perusahaan) meningkat dari 69,11% menjadi 85,11%.

Penambahan penyertaan tersebut diakui oleh PT BNI Life Insurance sebagai modal disetor.

PT BNI Multifinance

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Juni 2008, berdasarkan Akta Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H. No. 20 tanggal 23 Desember 2008, pemegang saham telah memberikan persetujuan atas rencana kuasi-reorganisasi PT BNI Multifinance per tanggal 31 Juli 2008.

Sebagai hasil dari kuasi-reorganisasi, saldo defisit PT BNI Multifinance sebesar Rp370.033, koreksi atas pajak tangguhan sebesar Rp15.208 dan selisih negatif sebesar Rp1.473 atas penilaian kembali aset dan kewajiban dieliminasi ke akun tambahan modal disetor sebesar Rp387.939.

Pelaksanaan kuasi-reorganisasi ini berdampak pada penurunan nominal penyertaan BNI kepada PT BNI Multifinance, dengan perincian sebagai berikut:

	Sebelum Kuasi- Reorganisasi	Setelah Kuasi- Reorganisasi
Ekuitas per 31 Desember 2008	Rp408.357	Rp20.418
Persentase kepemilikan BNI	99,98%	99,98%
Saldo penyertaan BNI	Rp408.276	Rp20.414

Saldo penyertaan BNI kepada PT BNI Multifinance per 30 September 2010 adalah sebesar Rp29.030, dengan rincian sebagai berikut:

	Ekuitas	Persentase Kepemilikan	Penyertaan
Modal disetor	20.418	99,98%	20.414
Tambahan modal disetor	1.224	99,98%	1.223
Saldo laba	13.728	99,98%	13.725
Laba periode berjalan	(6.333)	99,98%	(6.332)
Jumlah	29.037		29.030

BNI Remittance Ltd. (dahulu BNI Nakertrans)

BNI telah menambah modal sebesar HKD7.434.944 (nilai penuh) atau Rp10.000 pada tanggal 11 Juni 2009 yang dicatat menggunakan metode ekuitas.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

h. Anak Perusahaan (lanjutan)

PT Bank BNI Syariah

PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah") didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 160 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. sebagai Pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010.

BNI Syariah merupakan bank umum syariah hasil pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("UUS Bank BNI") dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BNI"). Proses pendiriannya telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank BNI tanggal 5 Oktober 2009 sesuai akta No 37 Notaris Fathiah Helmi, S.H. Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dengan cara mendirikan bank umum syariah baru. Pemberitahuan atas rancangan *spin-off* kepada karyawan, nasabah dan pihak ketiga telah diumumkan di surat kabar nasional pada tanggal 12 Agustus 2009 sedangkan pemberitahuan atas rencana pengalihan hak dan kewajiban UUS Bank BNI telah diumumkan di surat kabar nasional pada tanggal 15 Februari 2010. Pendirian tersebut dilakukan dengan izin Bank Indonesia melalui dua tahap yaitu persetujuan izin prinsip usaha dan izin usaha. Pada tanggal 8 Februari 2010 BNI Syariah telah mendapatkan izin prinsip dari Bank Indonesia untuk melaksanakan pemisahan UUS Bank BNI berdasarkan surat No.12/2/DpG/Dpbs. Pemisahan UUS Bank BNI dilakukan dengan Akta Pemisahan Nomor 159 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tanggal 21 Mei 2010, BNI Syariah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia, berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/41/KEP.GBI/2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank BNI Syariah. Selanjutnya pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 19 Juni 2010, yakni saat pertama kalinya BNI Syariah melakukan kegiatan usaha, sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan surat nomor Dir/1/03 tanggal 19 Juni 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

BNI Syariah menjalankan operasional sebagai bank devisa dimulai pada tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 12/5/KEP.DpG/2010 tertanggal 9 Juli 2010.

Sehubungan dengan telah beroperasinya BNI Syariah, maka Bank Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2010 mencabut ijin usaha UUS Bank BNI melalui keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 12/7/KEP.DpG/2010 tentang pencabutan ijin usaha Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor pusat BNI Syariah berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta. Sampai dengan tanggal 30 September 2010, BNI Syariah memiliki 27 (dua puluh tujuh) Kantor Cabang Syariah (KCS) dan 31 (tiga puluh satu) Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang telah diterapkan secara konsisten oleh Bank dan Anak Perusahaan ("Grup") dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dengan menggunakan praktek yang lazim berlaku dalam industri perbankan serta pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM - LK) Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan" yang terlampir dalam Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM - LK No. KEP.06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 serta Surat Edaran BAPEPAM - LK No. SE-02/BL/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, dan Perbankan".

Laporan keuangan konsolidasian Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia ("PAPI") 2008.

Laporan keuangan konsolidasian Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 31 (Revisi 2000) tentang "Akuntansi Perbankan" dan PAPI 2000. PSAK No. 31 tersebut telah dicabut efektif tanggal 1 Januari 2010.

Anak Perusahaan PT Bank BNI Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank BNI (sebelum *spin-off*) yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah sesuai dengan PSAK No. 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102, "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 105, "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106, "Akuntansi *Musyarakah*", dan PSAK No. 107, "Akuntansi *Ijarah*" yang menggantikan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain dan disusun dengan dasar akrual (kecuali tagihan bunga atas aktiva produktif yang digolongkan sebagai *non-performing* sebelum 1 Januari 2010, pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*).

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, kecuali untuk beberapa arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan yang disusun dengan menggunakan metode tidak langsung. Sejak 1 Januari 2010, untuk keperluan laporan arus kas konsolidasian, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya. Sebelum 1 Januari 2010, kas dan setara kas hanya terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain yang tidak dibatasi dan tidak digunakan sebagai jaminan. Perubahan tersebut terjadi sehubungan dengan dicabutnya PSAK No. 31, "Akuntansi Perbankan", efektif tanggal 1 Januari 2010 dan PAPI tahun 2000. Untuk tujuan komparatif, laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 telah direklasifikasi (Catatan 55).

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

Laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 disusun sehubungan dengan rencana BNI untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

b. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan BNI beserta seluruh Anak Perusahaan yang berada di bawah pengendalian BNI, kecuali Anak Perusahaan yang sifat pengendaliannya adalah sementara atau jika ada pembatasan jangka panjang yang mempengaruhi kemampuan Anak Perusahaan untuk memindahkan dananya ke BNI.

Dalam hal pengendalian terhadap Anak Perusahaan dimulai atau diakhiri dalam suatu periode berjalan, maka hasil usaha Anak Perusahaan yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

Suatu pengendalian atas suatu Anak Perusahaan lain dianggap ada bilamana BNI menguasai lebih dari lima puluh persen (50%), atau BNI dapat menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari Anak Perusahaan, atau mempunyai kemampuan untuk memberhentikan atau menunjuk mayoritas Direksi Anak Perusahaan, atau mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Seluruh saldo dan transaksi termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi antar perusahaan yang signifikan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasian BNI dan Anak Perusahaan sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila laporan keuangan Anak Perusahaan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan Anak Perusahaan tersebut.

Hak minoritas dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham minoritas atas laba bersih dan ekuitas Anak Perusahaan tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham minoritas pada Anak Perusahaan tersebut.

c. Aset keuangan dan kewajiban keuangan

Aset keuangan Grup terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, surat-surat berharga, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, Obligasi Pemerintah, wesel ekspor dan tagihan lainnya, tagihan derivatif, pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan, tagihan akseptasi, penyertaan saham dan aset lain-lain.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan kewajiban keuangan (lanjutan)

Kewajiban keuangan Grup terdiri dari kewajiban segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, kewajiban derivatif, kewajiban akseptasi, surat-surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi dan kewajiban lain-lain.

Grup menerapkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", efektif sejak 1 Januari 2010, yang masing-masing menggantikan PSAK No. 55 (Revisi 1999), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai" dan PSAK No. 50 (Revisi 1999), "Akuntansi Investasi Efek Tertentu".

Dampak penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dijelaskan pada Catatan 49.

(i) Klasifikasi

Sejak 1 Januari 2010, Grup mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Kredit yang diberikan dan piutang;
- Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo;
- Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Kewajiban keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu kewajiban keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan kewajiban keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Kewajiban keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Kategori untuk kelompok aset dan kewajiban diperdagangkan adalah aset dan kewajiban keuangan yang diperoleh atau dimiliki Grup terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

Kredit yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan Grup tidak berniat untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

Di dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan kewajiban keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak dikelompokkan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan dan kewajiban keuangan pada saat pengakuan awal.

(ii) Pengakuan awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian, seperti tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan kewajiban keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau kewajiban keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi konsolidasian, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Grup pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Selanjutnya, penetapan ini tidak dapat diubah. Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul, atau
- aset keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar, atau
- aset keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

Opsi nilai wajar digunakan untuk pinjaman yang diberikan dan piutang tertentu yang dilindungi nilai menggunakan *credit derivatives* atau *swap* suku bunga, namun tidak memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai. Jika tidak, pinjaman yang diberikan akan dicatat menggunakan biaya diamortisasi dan derivatif akan diukur menggunakan nilai wajar melalui laporan laba rugi konsolidasian.

Opsi nilai wajar juga digunakan untuk dana investasi yang merupakan bagian dari portofolio yang dikelola dengan basis nilai wajar. Opsi nilai wajar juga digunakan untuk *structured investment* termasuk derivatif melekat.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan kewajiban keuangan (lanjutan)

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

- a. Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi konsolidasian diukur pada nilai wajarnya.
- b. Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Grup mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*); dan
- (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau dibawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset dan masih memiliki pengendalian atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Grup yang berkelanjutan atas aset tersebut.

- b. Kewajiban keuangan dihentikan pengakuannya jika kewajiban keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Jika suatu kewajiban keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu kewajiban yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan kewajiban awal dan pengakuan kewajiban baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Grup dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas pinjaman yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke dalam penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman/piutang di neraca konsolidasian (Catatan 2f).

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan kewajiban keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan kewajiban keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi konsolidasian dengan menggunakan suku bunga efektif.
- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam ekuitas, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari *item* moneter, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Grup tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.

Grup tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam periode berjalan atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

- a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- b. terjadi setelah Grup telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Grup telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- c. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Grup, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Grup.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan kewajiban keuangan (lanjutan)

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan kewajiban keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam neraca konsolidasian jika, dan hanya jika Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu kewajiban dapat diselesaikan, diantara para pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar pada tanggal pengukuran, termasuk didalamnya adalah nilai pasar dari Interdealer Market Association (IDMA) atau harga yang diberikan oleh *broker (quoted price)* dari Bloomberg dan Reuters pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Grup menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto.

Grup menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menggunakan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan *swap* mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Grup menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar *over the counter, unlisted debt securities* (termasuk surat hutang dengan derivatif melekat) dan instrumen hutang lainnya yang pasarnya tidak aktif. Beberapa *input* dari model ini tidak berasal dari data yang dapat diobservasi di pasar dan demikian merupakan hasil estimasi berdasarkan asumsi tertentu.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan kewajiban keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Grup menggunakan *credit risk spread* sendiri di dalam menentukan nilai wajar dari kewajiban derivatif dan kewajiban lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar. Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, Grup mengakui keuntungan atas kewajiban tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat kewajiban. Ketika terjadi penurunan di dalam *credit spread*, entitas mengakui kerugian atas kewajiban tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat kewajiban.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut.

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki Grup. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti *model risk*, risiko likuiditas dan risiko kredit *counterparty*. Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen Grup berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam neraca konsolidasian. Data harga dan parameter yang digunakan didalam prosedur pengukuran pada umumnya telah di-review dan disesuaikan jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta kewajiban kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Nilai wajar dari kewajiban kontinjensi dan fasilitas kredit yang tidak dapat dibatalkan dibukukan sesuai dengan nilai tercatatnya.

Sejak 1 Januari 2010, aset keuangan dan *long position* diukur dengan menggunakan harga penawaran; kewajiban keuangan dan *short position* diukur menggunakan harga permintaan. Jika Grup memiliki posisi aset dan kewajiban konsolidasian dimana risiko pasarnya saling hapus, maka Grup dapat menggunakan nilai tengah dari pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka atau neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

Sebelum 1 Januari 2010, aset dan kewajiban keuangan konsolidasian maupun *long and short position* diukur pada nilai penawaran (*bid price*).

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran

Transaksi dalam mata uang asing

BNI dan cabang serta Anak Perusahaan yang berdomisili di Indonesia menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang selain Rupiah yang terjadi di sepanjang periode dicatat dengan nilai kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan.

Penjabaran aset dan kewajiban dalam mata uang asing

Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Reuters pada pukul 16:00 WIB pada tanggal-tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian periode berjalan.

Pada tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, kurs mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
1 Pound Sterling Inggris	14.178	15.548	15.165	15.755	18.761
1 Euro	12.169	14.142	13.542	15.356	13.822
1 Dolar Amerika Serikat	8.925	9.665	9.395	10.900	9.393
1 Dolar Hong Kong	1.150	1.246	1.211	1.406	1.204
1 Yen Jepang	107	108	102	121	84

Penjabaran laporan keuangan sehubungan dengan konsolidasian laporan cabang BNI yang berkedudukan di luar negeri

Cabang BNI yang bertempat kedudukan di luar negeri menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang negara tempat kedudukannya.

Untuk tujuan konsolidasian, laporan keuangan cabang BNI tersebut dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan cara sebagai berikut:

- Saldo akun-akun aset, kewajiban, komitmen dan kontinjensi dijabarkan dengan menggunakan kurs *spot* Reuters jam 16:00 WIB pada tanggal neraca;
- Saldo akun-akun laba rugi setiap bulannya dijabarkan dengan menggunakan kurs *spot* Reuters jam 16:00 WIB rata-rata untuk bulan yang bersangkutan. Saldo untuk periode berjalan merupakan jumlah dari penjabaran bulanan tersebut;
- Akun ekuitas dijabarkan dengan menggunakan kurs historis; dan
- Selisih yang timbul sebagai akibat dari penjabaran ini disajikan di neraca sebagai bagian dari ekuitas pada akun "Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing".

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia

Sejak 1 Januari 2010, giro pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan masing-masing sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Sebelum 1 Januari 2010, giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Saldo giro pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo giro.

f. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia

Sejak 1 Januari 2010, penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan masing-masing sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Sebelum 1 Januari 2010, penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Saldo penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo penempatan setelah dikurangi bunga yang belum diamortisasi.

g. Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah

Surat-surat berharga yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI), tagihan treasury asing, unit penyertaan reksa dana, surat berharga *credit-linked notes*, *credit-linked loans*, obligasi dan instrumen utang lainnya yang diperdagangkan di pasar uang.

Obligasi Pemerintah terdiri dari Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diterbitkan untuk BNI dan bank lainnya berkaitan dengan program rekapitalisasi Pemerintah dan obligasi lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah yang tidak berkaitan dengan program rekapitalisasi yang diperoleh melalui pasar perdana dan sekunder.

Sejak 1 Januari 2010

Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Dalam hal Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, dicatat sesuai dengan klasifikasi, masing-masing sebagai dimiliki hingga jatuh tempo, nilai wajar melalui laporan laba rugi atau tersedia untuk dijual dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Penilaian surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Bila terjadi penjualan atau reklasifikasi dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan dari surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo yang belum mendekati tanggal jatuh tempo akan menyebabkan reklasifikasi atas semua surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo kedalam kelompok tersedia untuk dijual, dan Bank tidak diperkenankan untuk mengklasifikasikan surat-surat berharga sebagai dimiliki hingga jatuh tempo untuk periode berjalan dan untuk kurun waktu dua tahun mendatang.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah (lanjutan)

2. Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang diperdagangkan dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.
3. Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajar.

Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas sampai dengan surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Sebelum 1 Januari 2010

Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah disajikan sebesar nilai bersih setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai dan premium atau diskonto yang belum diamortisasi. Premium dan diskonto diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus. Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah dicatat sesuai dengan klasifikasi masing-masing sebagai untuk diperdagangkan, tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo.

Penilaian surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai “untuk diperdagangkan” dinyatakan berdasarkan nilai wajar dan perubahan atas nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian.
2. Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai “tersedia untuk dijual” dinyatakan berdasarkan nilai wajar dan perubahan atas nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yang dilaporkan dalam ekuitas, setelah dikurangi dengan pajak penghasilan ditanggungkan yang berlaku. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yang sebelumnya diakui di ekuitas diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat surat-surat berharga tersebut dijual. Penurunan permanen atas nilai surat berharga yang tersedia untuk dijual diakui dalam laba rugi konsolidasian periode berjalan.
3. Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai “dimiliki hingga jatuh tempo” dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah ditambah atau dikurangi dengan diskonto atau saldo premi yang belum diamortisasi. Premium dan diskonto diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus. Nilai tercatat surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo disesuaikan untuk segala penurunan bersifat permanen atas nilai surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo yang dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Pemindahan surat berharga dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya pada tanggal pemindahan; selisih antara nilai tercatat, termasuk diskonto/premi yang belum

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah (lanjutan)

diamortisasi dan pencadangan piutang bunga, dan nilai wajar surat-surat berharga pada tanggal pemindahan diakui sebagai keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang dilaporkan dalam ekuitas, setelah dikurangi dengan penerapan pajak penghasilan tangguhan.

Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku di pasar yang aktif pada tanggal neraca.

Untuk surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, nilai wajar tersebut umumnya ditentukan dengan mengacu pada harga penawaran pasar yang terjadi di bursa efek pada tanggal yang terdekat dengan tanggal neraca, kemudian disesuaikan dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Untuk surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang tidak mempunyai harga penawaran pasar, estimasi atas nilai wajar surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya adalah sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah tersebut. Penurunan nilai wajar permanen atas surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah untuk dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual dibebankan pada laba rugi periode berjalan.

Pendapatan bunga atas instrumen hutang diakui dengan dasar akrual. Keuntungan atau kerugian selisih kurs atas instrumen hutang yang diklasifikasikan sebagai “untuk diperdagangkan”, “tersedia untuk dijual” atau “dimiliki hingga jatuh tempo” diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Penyisihan kerugian wajib diakui sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia dan disajikan sebagai pengurang saldo surat-surat berharga.

Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah tidak diakui lagi (*derecognized*) dari neraca konsolidasian ketika Bank telah mentransfer semua risiko signifikan dan imbalan dari surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah tersebut.

h. Surat-surat berharga yang dibeli/dijual dengan janji dijual/dibeli kembali

Sejak 1 Januari 2010, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam neraca konsolidasian sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan penyisihan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (belum diamortisasi), dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak surat-surat berharga tersebut dibeli hingga dijual kembali menggunakan suku bunga efektif.

Sebelum 1 Januari 2010, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam neraca konsolidasian sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan penyisihan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (belum diamortisasi), dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak surat-surat berharga tersebut dibeli hingga dijual kembali menggunakan metode amortisasi garis lurus.

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Surat-surat berharga yang dibeli/dijual dengan janji dijual/dibeli kembali (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2010, surat-surat berharga yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai kewajiban dalam neraca konsolidasian sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar di muka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak surat-surat berharga tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan suku bunga efektif. Surat-surat berharga yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Sebelum 1 Januari 2010, surat-surat berharga yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai kewajiban dalam neraca konsolidasian sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar di muka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak surat-surat berharga tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode amortisasi garis lurus.

i. Wesel ekspor dan tagihan lainnya

Wesel ekspor dan tagihan lainnya terdiri atas tagihan dari *letters of credit* dan dokumen-dokumen kepada importir dan eksportir.

Sejak 1 Januari 2010, wesel ekspor dan tagihan lainnya dicatat pada biaya perolehan amortisasi setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

Wesel ekspor dan tagihan lainnya diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Sebelum 1 Januari 2010, wesel ekspor dan tagihan lainnya dinyatakan sebesar *draft/bill of exchange* dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

j. Instrumen keuangan derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, BNI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing, *swap* atas suku bunga, *credit-linked notes* dan *credit-linked loans*.

Instrumen keuangan derivatif dinilai dan diakui di neraca pada nilai wajar dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai kewajiban apabila memiliki nilai wajar negatif.

Sejak 1 Januari 2010, transaksi derivatif diakui sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Sebelum 1 Januari 2010, transaksi derivatif diakui sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 1999), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai".

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Instrumen keuangan derivatif (lanjutan)

Seluruh instrumen derivatif (termasuk transaksi valuta asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) dicatat dalam neraca konsolidasian berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar, kurs Reuters pada tanggal pelaporan, diskonto arus kas, model penentu harga atau harga yang diberikan oleh *broker (quoted price)* atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa atau model penentuan harga. Tagihan derivatif disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai tagihan derivatif. Kewajiban derivatif disajikan sebesar nilai wajar.

Bank menggunakan instrumen derivatif untuk mengelola risiko atas tingkat suku bunga dan transaksi valuta asing. Dalam rangka mengelola risiko tertentu, Bank menerapkan akuntansi lindung nilai untuk transaksi yang memenuhi kriteria tertentu.

Pada awal hubungan lindung nilai, Bank secara formal mendokumentasikan hubungan antara item yang dilindung nilai dengan instrumen lindung nilainya, jenis risiko, tujuan dan strategi dalam melaksanakan lindung nilai serta metodologi yang digunakan untuk menilai keefektifan hubungan lindung nilai tersebut.

Selanjutnya, pada awal hubungan lindung nilai, penilaian secara formal dilakukan untuk meyakinkan bahwa instrumen lindung nilai tersebut diharapkan untuk sangat efektif untuk mencapai saling-hapus perubahan atas nilai wajar atau arus kas yang terkait dengan risiko yang dilindungnilaikan. Lindung nilai secara formal dinilai setiap kuartal. Lindung nilai diharapkan menjadi sangat efektif jika perubahan nilai wajar atau arus kas mampu terkait dengan risiko lindung nilai selama periode lindung nilai yang dirancang untuk mengsalang-hapuskan dalam kisaran 80% sampai dengan 125%. Pada situasi dimana item yang dilindung nilai merupakan suatu transaksi proyeksi, Bank akan melakukan penilaian apakah transaksi tersebut memiliki kemungkinan yang tinggi dan menimbulkan paparan variasi arus kas yang akan pasti mempengaruhi laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan tujuan Bank atas rancangan transaksi pada saat akuisisi, yaitu sebagai (1) lindung nilai atas nilai wajar, (2) lindung nilai atas arus kas, (3) lindung nilai atas investasi bersih pada kegiatan operasi luar negeri dan (4) tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai, sebagai berikut:

1. Keuntungan atau kerugian dari suatu kontrak derivatif yang ditujukan dan memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai atas nilai wajar, dan keuntungan atau kerugian atas revaluasi lindung nilai aset atau kewajiban, diakui sebagai laba atau rugi yang dapat saling hapus dalam periode akuntansi yang sama. Setiap selisih yang terjadi yang menunjukkan akibat ketidakefektifan lindung nilai secara langsung diakui sebagai laba atau rugi pada periode berjalan;
2. Bagian yang efektif dari keuntungan atau kerugian atas suatu kontrak derivatif yang ditujukan sebagai instrumen lindung nilai atas arus kas dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya pada ekuitas. Bagian yang tidak efektif dari lindung nilai dilaporkan secara langsung sebagai laba atau rugi pada periode berjalan;
3. Keuntungan atau kerugian atas kontrak derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai atas investasi bersih pada kegiatan operasi luar negeri dilaporkan sebagai pendapatan komprehensif lainnya sebagai bagian dari penyesuaian penjabaran kumulatif dalam ekuitas, sepanjang transaksi tersebut dianggap efektif sebagai suatu transaksi lindung nilai;

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Instrumen keuangan derivatif (lanjutan)

4. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai (atau kontrak derivatif yang tidak memenuhi persyaratan sebagai instrumen lindung nilai) diakui secara langsung sebagai laba atau rugi pada periode berjalan.

Kontrak berjangka mata uang asing dan *swaps* mata uang asing dilakukan untuk tujuan pendanaan dan perdagangan.

Perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai atas nilai wajar, dan lindung nilai tersebut efektif, dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian, bersama dengan perubahan yang terjadi pada nilai wajar aset atau kewajiban yang dilindungi/nilaikan.

k. Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari transaksi perdagangan yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari.

Sejak 1 Januari 2010

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Sebelum 1 Januari 2010

Pinjaman yang diberikan dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama (pinjaman sindikasi) dinyatakan sebesar pokok pinjaman sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh BNI.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara BNI dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian. Penerimaan kemudian atas pinjaman yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke dalam penyisihan kerugian pinjaman di neraca konsolidasian.

Pinjaman yang dibeli dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN")

Selama tahun 2002 dan 2003, BNI membeli pinjaman dari BPPN. Perlakuan akuntansi atas pinjaman ini mengacu pada PBI No. 4/7/PBI/2002 tanggal 27 September 2002 tentang "Prinsip Kehati-hatian dalam Rangka Pembelian Kredit oleh Bank dari BPPN".

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

k. Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan (lanjutan)

Selisih antara pokok pinjaman dan harga beli, jika ada, dibukukan sebagai penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman apabila BNI tidak membuat perjanjian pinjaman baru dengan debitur, dan dibukukan sebagai pendapatan ditangguhkan apabila BNI membuat perjanjian baru dengan debitur.

Pinjaman yang dibeli dari BPPN diklasifikasikan dalam kualitas lancar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak saat pembelian. Penilaian kualitas pinjaman yang diberikan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak saat pembelian didasarkan pada analisa arus kas dan kemampuan membayar debitur.

Pembayaran dari debitur diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok pinjaman dan kelebihan penerimaan pembayaran diakui sebagai pendapatan bunga. Penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman atau pendapatan ditangguhkan hanya dapat dilakukan apabila BNI telah menerima pembayaran sebesar harga beli semula.

Pendapatan bunga atas pinjaman yang dibeli dari BPPN diakui pada saat pendapatan tersebut diterima (berbasis kas).

Pinjaman harus dihapusbukukan apabila dalam masa 5 (lima) tahun sejak tanggal pembelian, pinjaman belum dilunasi.

Pinjaman yang dibeli dari BPPN diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit meliputi modifikasi persyaratan kredit, konversi kredit menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan/atau kombinasi dari keduanya.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Untuk restrukturisasi kredit bermasalah dengan cara konversi kredit yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, kerugian dari restrukturisasi kredit diakui hanya apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi biaya untuk menjualnya, adalah kurang dari nilai tercatat kredit yang diberikan.

Tunggakan bunga yang dikapitalisasi menjadi pokok kredit yang baru dalam rangka restrukturisasi kredit dicatat sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan dan akan diakui sebagai pendapatan dengan cara amortisasi secara proporsional berdasarkan persentase tagihan bunga *non-performing* yang dikapitalisasi terhadap pokok kredit baru dikalikan dengan angsuran pokok yang diterima.

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BNI dalam restrukturisasi kredit bermasalah dicatat sebagai biaya pada saat terjadinya.

Pinjaman berdasarkan prinsip syariah

Pinjaman yang diberikan meliputi pembiayaan syariah yang terutama terdiri dari piutang syariah, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

k. Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan (lanjutan)

Piutang syariah adalah tagihan yang timbul dari transaksi berdasarkan akad-akad *murabahah*, *rahn*, *ijarah* dan *qardh*.

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara BNI dan nasabah dimana BNI menyediakan dana, sedangkan nasabah bertindak selaku pengelola, yang dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan *nisbah* (porsi bagi hasil) yang telah disepakati.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad antara BNI dan nasabah untuk melakukan usaha tertentu dalam suatu kemitraan dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi dana.

Piutang, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

l. Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset dan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi

Sejak 1 Januari 2010

Pada setiap tanggal neraca, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh entitas untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - 1) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 - 2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

I. Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset dan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi (lanjutan)

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Grup pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Grup memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Dalam menentukan penurunan nilai secara kolektif, Bank menerapkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009, "Perubahan atas Surat Edaran No. 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)". Surat Edaran Bank Indonesia tersebut memuat penyesuaian atas PAPI 2008 tentang ketentuan transisi atas estimasi penurunan nilai kredit yang diberikan secara kolektif bagi bank yang memenuhi syarat.

Sesuai dengan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009 (SE-BI), Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai kredit secara kolektif dengan mengacu pada pembentukan penyisihan umum dan penyisihan khusus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum. Sesuai dengan SE-BI tersebut ketentuan transisi penurunan nilai atas kredit secara kolektif dapat diterapkan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Penyisihan kolektif untuk kredit yang dikelompokkan sebagai dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet dihitung setelah dikurangi dengan nilai agunan yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai tercatat (biaya perolehan amortisasi).

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan atau surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak. Sebagai panduan praktis, Grup dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralised financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

I. Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset dan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi (lanjutan)

nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

Kerugian penurunan nilai atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi.

Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

Jika persyaratan kredit yang diberikan, piutang atau surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Sebelum 1 Januari 2010

Bank membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif dan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi berdasarkan *review* dan evaluasi terhadap eksposur tiap debitur. Dalam kaitan tersebut, ketentuan Bank Indonesia (BI) tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva dan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi yang mempunyai risiko kredit digunakan sebagai acuan. Aktiva produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, surat-surat berharga, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, Obligasi Pemerintah, wesel ekspor dan tagihan lainnya, tagihan derivatif, pinjaman dan pembiayaan syariah/piutang, tagihan akseptasi, penyertaan saham serta komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit.

Komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit antara lain terdiri dari, namun tidak terbatas pada penerbitan jaminan, *letters of credit*, *standby letters of credit* dan fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan.

Aktiva non-produktif adalah aktiva yang memiliki potensi kerugian, dan antara lain terdiri dari, namun tidak terbatas pada agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense accounts*.

Sesuai dengan PBI, Bank mengklasifikasikan aktiva produktif ke dalam satu dari lima kategori dan aktiva non-produktif ke dalam satu dari empat kategori. Aktiva produktif tidak bermasalah (*performing*) diklasifikasikan sebagai "Lancar" dan "Dalam Perhatian Khusus", sedangkan aktiva produktif bermasalah (*non-performing*) diklasifikasikan kedalam tiga kategori yaitu: "Kurang

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

I. Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset dan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi (lanjutan)

Lancar”, “Diragukan” dan “Macet”. Kategori untuk aktiva non produktif terdiri dari “Lancar”, “Kurang Lancar”, “Diragukan” dan “Macet”.

Pengklasifikasian aktiva produktif dilakukan berdasarkan PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan atas PBI 7, PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Perubahan Kedua PBI 7, dan terakhir diubah dengan PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Perubahan Ketiga PBI 7.

Jumlah minimum penyisihan kerugian penurunan nilai aset serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit dihitung dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia disebut di atas.

Dalam penerapan PBI No. 7/2/PBI/2005, penyisihan kerugian penurunan nilai atas aktiva produktif dan aktiva non-produktif dibentuk berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas masing-masing aktiva produktif dan aktiva non-produktif dan dengan mempertimbangkan evaluasi manajemen atas prospek usaha, kinerja keuangan dan kemampuan membayar setiap debitur. Manajemen mempertimbangkan juga rekomendasi dari Bank Indonesia berdasarkan hasil pemeriksaan berkala, klasifikasi yang ditetapkan oleh bank umum lainnya atas aktiva produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank dan ketersediaan laporan keuangan debitur yang telah diaudit.

Sesuai PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, penerapan kualitas untuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense accounts* dan fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan (transaksi rekening administratif), mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya PBI ini.

Jumlah minimum penyisihan penghapusan aktiva serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit dihitung dengan memperhatikan PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 (PBI 7) tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang telah diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan atas PBI 7, yang diubah kembali dengan PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang perubahan kedua atas PBI 7, yang mengatur tingkat penyisihan minimum dari penyisihan penghapusan aktiva serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit.

Penyisihan minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

<u>Klasifikasi</u>	<u>Persentase penyisihan</u>
Lancar *)	Minimum 1,00%
Dalam perhatian khusus	Minimum 5,00%
Kurang lancar	Minimum 15,00%
Diragukan	Minimum 50,00%
Macet	100,00%

*) di luar Sertifikat Bank Indonesia (SBI), penempatan pada Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah dan instrumen hutang lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

I. Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset dan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi (lanjutan)

Persentase penyisihan kerugian penurunan nilai aset di atas diterapkan terhadap saldo aktiva produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, kecuali untuk aktiva produktif yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin atau yang dijamin dengan agunan non-tunai, dimana persentase penyisihan kerugian penurunan nilai aset diterapkan terhadap saldo aktiva produktif yang bersangkutan dan komitmen dan kontinjensi.

Adapun penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai aset di atas tidak dapat dilakukan untuk aktiva non-produktif.

Bank dalam melakukan perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai tidak memperhitungkan seluruh agunan yang ada antara lain karena jangka waktu penilaian agunan yang dilakukan telah melampaui jangka waktu seperti yang telah ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia yang terkait.

Untuk pinjaman yang diklasifikasikan sebagai macet, Bank hanya mengakui sebesar 10% dari nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Penyisihan kerugian penurunan nilai aset untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk disajikan sebagai kewajiban ("Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi") pada neraca konsolidasian.

Penyisihan kerugian atas penyertaan sementara dalam rangka *debt to equity swaps* ditentukan berdasarkan kriteria Bank Indonesia sesuai dengan PBI No. 5/10/PBI/2003 tanggal 11 Juni 2003 tentang "Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal". Dalam peraturan tersebut klasifikasi penyertaan sementara dalam rangka *debt to equity swaps* dinilai sebagai berikut:

Klasifikasi	Batas waktu
Lancar	Kurang dari 1 tahun
Kurang lancar	1 - 4 tahun
Diragukan	4 - 5 tahun
Macet	Apabila penyertaan modal sementara telah melampaui jangka waktu 5 tahun atau belum dilepas meskipun debitur telah memiliki laba kumulatif

Penyertaan modal sementara akan dihapusbukukan dari neraca konsolidasian Bank apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.

Saldo aktiva produktif yang memiliki kualitas macet dihapusbukukan dengan penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar nilai aktiva produktifnya, pada saat manajemen berpendapat bahwa aktiva produktif tersebut sulit untuk direalisasi atau ditagih. Penerimaan kembali aktiva produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan penyisihan kerugian penurunan nilai aktiva produktif selama periode berjalan. Jika penerimaan melebihi nilai pokoknya, kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga.

Sehubungan dengan implementasi atas manajemen risiko secara konsolidasian bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan untuk memenuhi PBI No. 8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, maka sejak tahun 2007, pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang yang dimiliki oleh Anak Perusahaan dibentuk sesuai dengan kebijakan Bank dengan persentase tertentu, berdasarkan umur piutang Anak Perusahaan yang telah jatuh tempo.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset dan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi (lanjutan)

Pedoman pembentukan penyisihan aktiva produktif dan penentuan kualitas aktiva produktif PT Bank BNI Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank BNI mengacu kepada PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang mana dalam pasal-pasal tertentu telah diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

m. Tagihan dan kewajiban akseptasi

Sejak 1 Januari 2010, tagihan dan kewajiban akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Kewajiban akseptasi diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Sebelum 1 Januari 2010, tagihan dan kewajiban akseptasi dinyatakan sebesar nilai nominal L/C atau nilai realisasi L/C yang diaksep oleh bank pengaksep. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

n. Penyertaan saham

Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan non-publik yang bergerak di bidang jasa keuangan yang tidak melalui pasar modal untuk tujuan jangka panjang, serta penyertaan saham sementara dalam rangka *debt to equity swaps*.

Investasi dimana BNI mempunyai persentase kepemilikan 20% sampai dengan 50% dicatat dengan metode ekuitas, kecuali untuk penyertaan saham sementara. Dengan metode ini, investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan disesuaikan dengan bagian BNI atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi sesuai dengan jumlah persentase kepemilikan dan dikurangi dengan penerimaan dividen sejak tanggal perolehan.

Investasi dengan persentase kepemilikan dibawah 20% dicatat dengan metode biaya dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Penyertaan saham sementara berasal dari hasil *debt to equity swaps* pada perusahaan dicatat sebesar biaya perolehan, tanpa mempertimbangkan persentase kepemilikan, dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Penyertaan saham diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan secara berkala diukur dengan menggunakan biaya perolehan.

o. Aset tetap dan penyusutan

Semua aset tetap dinilai kembali sehubungan dengan kuasi-reorganisasi BNI di bulan Juni tahun 2003. Peningkatan nilai hasil dari penilaian kembali telah dieliminasi dengan akumulasi kerugian pada saat kuasi-reorganisasi. Aset tetap yang diperoleh setelah kuasi-reorganisasi di bulan Juni tahun 2003 diakui sebesar biaya perolehan.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2008, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali tanah yang tidak disusutkan). Efektif tanggal 1 Januari 2008, BNI menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), "Aset Tetap", yang menggantikan PSAK No. 16 (1994), "Aset Tetap dan Aset Lain-lain", dan PSAK No. 17 (1994), "Akuntansi Penyusutan".

BNI telah melakukan revaluasi aset tetap sebelum penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2007) dan memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk mengukur aset tetap. Oleh karena itu, nilai revaluasi aset tetap tersebut dianggap sebagai biaya perolehan (*deemed cost*) dan biaya perolehan tersebut adalah nilai pada saat PSAK No. 16 (Revisi 2007) diterbitkan. Penerapan PSAK revisi ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Semua aset tetap kecuali tanah, disusutkan berdasarkan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat aset tersebut sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	15
Kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor	5

Perlengkapan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, *automated teller machine* (ATM), perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset dikapitalisasi dan disusutkan.

Sesuai dengan PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah", semua biaya dan beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, antara lain, biaya perizinan, biaya survei dan pengukuran lokasi, biaya notaris dan pajak-pajak yang berhubungan dengan hal tersebut, ditanggungkan dan disajikan secara terpisah dari biaya perolehan hak atas tanah. Biaya perolehan hak atas tanah yang ditanggungkan tersebut disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Lain-lain" dalam neraca konsolidasian, dan diamortisasi selama masa manfaat hak atas tanah yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

Selain itu, PSAK No. 47 juga menyatakan bahwa hak atas tanah tidak diamortisasi kecuali memenuhi kondisi-kondisi tertentu yang telah ditentukan.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai yang dipakai.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi dan dicatat sebagai "Aset dalam Penyelesaian" (termasuk dalam "Aset Lain-lain" di neraca konsolidasian). Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai.

p. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih disajikan dalam akun "Aset Lain-lain".

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai bersih yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun penyisihan kerugian penurunan nilai aset. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan kerugian penurunan nilai aset agunan yang diambil alih dibentuk atas penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasian.

q. Piutang pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan konsumen dinyatakan sebesar nilai bersih setelah dikurangi dengan pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan penyisihan piutang ragu ragu. Untuk perjanjian kerjasama pembiayaan bersama konsumen tanpa jaminan (*without recourse*), Perusahaan hanya menyajikan porsi jumlah angsuran piutang yang dibiayai Perusahaan (pendekatan neto). Pendapatan pembiayaan konsumen disajikan setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak bank-bank dalam rangka transaksi tersebut.

Untuk pembiayaan bersama konsumen dengan jaminan (*with recourse*), piutang pembiayaan konsumen merupakan seluruh jumlah angsuran dari pelanggan sedangkan kredit yang disalurkan oleh penyedia dana dicatat sebagai kewajiban (pendekatan bruto).

Bunga yang dikenakan kepada pelanggan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga, sedangkan bunga yang dikenakan penyedia dana dicatat sebagai beban bunga.

Sejak 1 Januari 2010, pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui tersebut diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu kontrak pembiayaan konsumen berdasarkan tingkat suku bunga efektif dari piutang pembiayaan konsumen.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

q. Piutang pembiayaan konsumen (lanjutan)

Selisih bersih antara pendapatan administrasi yang diperoleh dari konsumen pada saat pertama kali perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani dan beban-beban yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan kredit pembiayaan konsumen ditangguhkan dan diakui sebagai penyesuaian atas imbal hasil pembiayaan konsumen selama jangka waktu pembiayaan konsumen dan disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Pembiayaan Konsumen - Bersih" pada laporan laba rugi periode berjalan.

Sejak 1 Januari 2010, selisih bersih tersebut ditangguhkan dan diakui sebagai penyesuaian atas imbal hasil selama periode pembiayaan konsumen berdasarkan tingkat suku bunga efektif dan disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Pembiayaan Konsumen - Bersih" pada laporan laba rugi periode berjalan.

Pelunasan sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir dianggap sebagai pembatalan perjanjian pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang timbul diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Sebelum 1 Januari 2010, piutang pembiayaan konsumen disajikan sebesar nilai bersih, setelah dikurangi pendapatan yang belum diakui dan penyisihan kerugian penurunan nilai. Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari pelanggan dengan jumlah pokok pembiayaan, akan diakui sebagai pendapatan berdasarkan tingkat pengembalian berkala dari piutang pembiayaan konsumen selama jangka waktu perjanjian pembiayaan konsumen.

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bersama dimana risiko kredit ditanggung pemberi pembiayaan bersama sesuai dengan porsinya (*without recourse*) dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian periode berjalan pada tanggal terjadinya transaksi.

Pembiayaan Bersama

Pembiayaan bersama terdiri dari atas pembiayaan bersama konsumen tanpa jaminan (*without recourse*) dan pembiayaan bersama konsumen dengan jaminan (*with recourse*). Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain dimana masing-masing pihak menanggung risiko kredit sesuai dengan porsinya (*without recourse*) disajikan di neraca konsolidasian secara bersih. Pendapatan pembiayaan konsumen dan beban bunga yang terkait dengan pembiayaan bersama (*without recourse*) disajikan secara bersih di laporan laba rugi konsolidasian. Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain di mana Anak Perusahaan menanggung risiko kredit (*with recourse*) disajikan di neraca konsolidasian secara bruto. Pendapatan pembiayaan konsumen dan beban bunga yang terkait dengan pembiayaan bersama *with recourse* tersebut disajikan secara bruto di laporan laba rugi konsolidasian.

Dalam pembiayaan bersama *without recourse*, Anak Perusahaan berhak menentukan tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pemberi pembiayaan bersama yaitu Bank. Selisihnya merupakan pendapatan dan disajikan sebagai dari "Pendapatan Bunga".

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

q. Piutang pembiayaan konsumen (lanjutan)

Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

r. Kewajiban segera

Sejak 1 Januari 2010, kewajiban segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Sebelum 1 Januari 2010 kewajiban segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank.

s. Kewajiban manfaat polis masa depan

Kewajiban manfaat polis masa depan dibentuk berdasarkan perhitungan secara aktuarial oleh aktuaris internal Anak Perusahaan dan aktuaris independen, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2005 tanggal 27 Desember 2005, dengan asumsi perhitungan sebagai berikut:

- Tabel mortalita GBM 61/65, TMI 2 Pria, GA (Anuitas), COS 1958, *Munich Re basis* (Asuransi Kesehatan)
- Tingkat suku bunga berkisar 8% - 9% untuk Rupiah dan 4% - 5% untuk Dolar Amerika Serikat
- Metode yang digunakan adalah prospektif premi neto dengan biaya tahun pertama yang diamortisasikan 30/1000 (tiga puluh per seribu) dari uang pertanggungan.

t. Simpanan nasabah

Giro merupakan simpanan nasabah di BNI dan Anak Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah di BNI dan Anak Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui *counter* dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau dengan cara pemindahbukuan melalui *SMS Banking*, *Phone Banking* dan *Internet Banking* jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di BNI dan Anak Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan BNI dan Anak Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan.

Termasuk di dalam simpanan adalah simpanan dan dana *syirkah* temporer yang terdiri dari:

- a. Giro *wadiah* merupakan giro *wadiah yad adh-dhamanah* yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan syariah BNI. Giro *wadiah* dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro *wadiah*.
- b. Dana *syirkah* temporer dalam bentuk tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang memberikan pemilik dana imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan nasabah.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

t. Simpanan nasabah (lanjutan)

- c. Dana *syirkah* temporer dalam bentuk deposito berjangka *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang memberikan pemilik dana imbalan bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Deposito *mudharabah* dicatat sebesar nilai nominal.

Sejak 1 Januari 2010, simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan dan dana *syirkah* temporer yang dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Sebelum 1 Januari 2010, simpanan nasabah dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah.

u. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari kewajiban terhadap bank lain baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, *inter-bank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 (sembilan puluh) hari, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Semua dinyatakan sesuai jumlah kewajiban terhadap bank lain.

Di dalam simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro *wadiah* dan dana *syirkah* temporer yang terdiri dari tabungan *mudharabah* dan deposito berjangka *mudharabah*.

Sejak 1 Januari 2010, simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Sebelum 1 Januari 2010, simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah.

v. Surat-surat berharga yang diterbitkan

Surat-surat berharga yang diterbitkan terdiri dari obligasi yang diterbitkan oleh Bank dan Anak Perusahaan.

Surat-surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. (Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan surat berharga dikurangkan dari jumlah surat-surat berharga yang diterbitkan).

Obligasi yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi saldo diskonto yang belum diamortisasi. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan obligasi dicatat sebagai pengurang hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi dengan menggunakan suku bunga efektif sejak 1 Januari 2010 dan metode garis lurus sebelum 1 Januari 2010.

Perbedaan antara nilai tercatat surat berharga yang diterbitkan dengan harga pembelian kembali tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasian.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

w. Pendapatan bunga dan syariah, beban bunga dan syariah

Sejak 1 Januari 2010, pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang *interest bearing* diakui pada laporan laba rugi konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau kewajiban keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 (sembilan puluh) hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai (*impairment*) (2009, 2008 dan 2007 sebagai kredit *non-performing*). Kredit *non-performing* pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 terdiri dari kredit yang diklasifikasikan sebagai kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai (2009, 2008 dan 2007 sebagai kredit *non-performing*).

Sebelum 1 Januari 2010, pendapatan dan beban bunga diakui berdasarkan konsep akrual. Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan atau aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai bermasalah diakui pada saat bunga tersebut diterima (berbasis kas).

- Pada saat pinjaman diklasifikasikan sebagai kredit bermasalah, tagihan bunga yang telah diakui sebelumnya sebagai pendapatan, tetapi belum diterima akan dibatalkan pengakuannya. Selanjutnya bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi.
- Pendapatan bunga atas kredit dalam kategori *non-performing* (menurut Peraturan Bank Indonesia) diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai pendapatan pada saat pembayarannya diterima.
- Penerimaan pembayaran atas pinjaman yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok pinjaman. Kelebihan penerimaan dari pokok pinjaman diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi konsolidasian.
- Bank mengakui pendapatan bunga atas kredit bermasalah yang direstrukturisasi berdasarkan sistem kas.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

w. Pendapatan bunga dan syariah, beban bunga dan syariah (lanjutan)

Pendapatan dan beban bunga termasuk pendapatan dan beban syariah. Pendapatan syariah terdiri dari keuntungan *murabahah*, pendapatan *ijarah* (sewa), bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta pendapatan *qardh*. Beban syariah terdiri dari beban bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah*.

Keuntungan *murabahah* dan pendapatan *ijarah* diakui selama periode akad berdasarkan konsep akrual. Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati. Pendapatan dari transaksi *qardh* diakui pada saat diterima.

Beban syariah merupakan bagi hasil untuk dana pihak ketiga dengan menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan porsi bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah*.

x. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif sejak 1 Januari 2010 dan metode garis lurus sebelum 1 Januari 2010. Saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama jangka waktu transaksi yang bersangkutan.

Sejak 1 Januari 2010, pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga dengan cara diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Sebelum 1 Januari 2010, pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi.

y. Perpajakan

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansi telah berlaku pada tanggal neraca. Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan kewajiban untuk pelaporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban (*liability method*). Tarif pajak yang berlaku saat ini dipakai untuk menentukan pajak tangguhan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dapat dikompensasi dengan aset pajak tangguhan yang diakui tersebut.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

z. Imbalan kerja dan dana pensiun

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti BNI dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut. Pembayaran dikurangkan dari hutang iuran. Iuran terhutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti panjang dan penghargaan dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun BNI. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Grup dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003, mana yang lebih tinggi.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuarial ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*. Perkiraan kewajiban pada tanggal neraca merupakan nilai kini imbalan pasti pada tanggal neraca, dikurangi nilai wajar aset program dan keuntungan aktuarial yang tidak diakui yang disesuaikan, biaya jasa masa lalu yang belum menjadi hak (*vested*), biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan/kerugian kurtailmen.

Biaya imbalan pasca-kerja yang diakui selama periode berjalan terdiri dari biaya jasa kini, bunga atas kewajiban, keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu dan dikurangi dengan iuran pegawai dan hasil yang diharapkan dari aset program.

Keuntungan atau kerugian aktuarial dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial sebagai kelebihan atas nilai yang lebih tinggi antara 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal periode diamortisasi dan diakui sebagai biaya atau keuntungan selama perkiraan rata-rata sisa tahun jasa pegawai yang masuk program pensiun.

Biaya imbalan masa lalu diakui sebagai biaya kecuali untuk biaya jasa masa lalu yang belum menjadi hak (*vested*) yang diamortisasi dan diakui sebagai biaya selama periode hak.

Biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan/kerugian kurtailmen diakui pada periode BNI atau Anak Perusahaannya menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program.

aa. Pendapatan premi asuransi dan beban *underwriting* asuransi

Pendapatan premi diakui pada saat premi tahun pertama dibayar dan tagihan premi tahun lanjutan diterbitkan. Anak Perusahaan tidak mengakui pendapatan atas premi tahun lanjutan yang telah menunggak lebih dari 4 (empat) bulan. Premi tertunggak tersebut akan diakui sebagai pendapatan pada saat pembayaran premi diterima.

Beban *underwriting* asuransi dibebankan langsung pada laporan laba rugi konsolidasian periode berjalan.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ab. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa (laba residual) dengan jumlah rata-rata tertimbang lembar saham biasa yang beredar (Catatan 36) selama periode berjalan.

ac. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Jenis transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti yang dinyatakan di PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa", apakah dilaksanakan dengan atau tidak dengan syarat atau kondisi normal yang sama untuk pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Transaksi antara Grup dengan Pemerintah Indonesia termasuk setiap entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah dan antara BNI dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh BNI dari hasil *debt to equity swaps*, tidak diungkapkan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pegawai-pegawai Grup, kecuali anggota manajemen kunci, tidak dikelompokkan sebagai pihak terkait.

ad. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

ae. Pelaporan segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Pelaporan segmen primer adalah berdasarkan segmen usaha sedangkan segmen sekunder adalah berdasarkan segmen geografis.

Sebuah segmen usaha adalah sekelompok aset dan operasi yang menyediakan barang atau jasa yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen usaha lainnya.

Segmen usaha Grup meliputi bank konvensional dan syariah, sekuritas, pembiayaan dan asuransi jiwa.

Segmen geografis meliputi penyediaan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis Grup adalah Indonesia, Asia, Eropa dan Amerika Serikat.

af. Saham yang diperoleh kembali oleh Anak Perusahaan

Saham yang diperoleh kembali oleh Anak Perusahaan terdiri dari pembelian saham Bank yang didivestasikan Pemerintah di pasar oleh Anak Perusahaan dengan tujuan untuk diperdagangkan. Bank menerapkan metode biaya seperti transaksi saham perbendaharaan dimana jumlah bruto dari biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh saham tersebut disajikan sebagai pengurang pada sisi ekuitas laporan keuangan konsolidasian (Saham yang diperoleh kembali oleh Anak Perusahaan). Akun modal saham yang dikreditkan pada waktu pengeluaran saham pertama kali tetap dipertahankan. Ketika saham yang diperoleh kembali oleh Anak Perusahaan diterbitkan

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

af. Saham yang diperoleh kembali oleh Anak Perusahaan (lanjutan)

kembali atau dijual sebesar nilai perolehan, akun pengurang ekuitas dikreditkan, selanjutnya kelebihan dari biaya perolehan tersebut akan dikreditkan pada akun tambahan modal disetor dan kekurangannya akan dibebankan pada saldo laba.

ag. Biaya emisi penerbitan saham

Sesuai dengan Peraturan No. VIII.G.7 lampiran Surat Keputusan BAPEPAM No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 mengenai "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan", biaya-biaya emisi efek yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahan Modal Disetor - Bersih", sebagai bagian dari Ekuitas pada neraca konsolidasian.

ah. Penggunaan estimasi dan pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi aset konsolidasian, kewajiban konsolidasian, komitmen dan kontinjensi konsolidasian yang dilaporkan. Karena adanya unsur ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi sehingga dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Pertimbangan profesional dan estimasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan yang tercatat pada neraca tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan Manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan Manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

Penurunan nilai kredit yang diberikan dan piutang

Bank me-review kredit yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal neraca untuk menilai apakah penurunan nilai harus diakui dalam laporan laba rugi. Secara khusus, justifikasi oleh manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai. Dalam estimasi arus kas ini, Bank membuat justifikasi tentang situasi keuangan peminjam dan nilai realisasi bersih agunan. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan penurunan nilai tersebut di masa mendatang.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Rupiah	4.760.866	4.701.945	4.685.979	4.275.483	3.118.184
Mata uang asing	564.439	260.395	217.337	152.709	141.045
Jumlah	5.325.305	4.962.340	4.903.316	4.428.192	3.259.229

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM (*Automatic Teller Machines*) sejumlah Rp1.364.287, Rp1.252.200, Rp1.919.385, Rp1.935.925 dan Rp886.021 masing-masing pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Rupiah	8.170.307	7.210.131	8.111.031	9.085.856	16.866.437
Dolar Amerika Serikat	381.151	288.558	420.013	264.936	706.645
Jumlah	8.551.458	7.498.689	8.531.044	9.350.792	17.573.082

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum dan syariah, serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing. GWM disimpan dalam bentuk giro pada Bank Indonesia.

Rasio GWM pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta 31 Desember 2009 dan 2008 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang "Perubahan Atas PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang GWM Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing". Sedangkan rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2007 dihitung berdasarkan PBI No. 7/49/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang "Perubahan Kedua Atas PBI No. 6/15/PBI/2004 tentang GWM Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing".

Pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah berdasarkan PBI No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008, mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2009.

Pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, perhitungan rasio GWM berdasarkan prinsip syariah didasarkan pada PBI No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang diamandemen dengan PBI No. 8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan PBI No. 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008.

Realisasi GWM BNI pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	30 September 2010 (Tidak Diaudit)	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009 (Tidak Diaudit)	2008 (Tidak Diaudit)	2007 (Tidak Diaudit)
Rupiah Utama	5,25%	5,17%	5,47%	6,70%	14,74%
Rupiah Sekunder	22,00%	-	27,63%	-	-
Dolar Amerika Serikat	1,05%	1,03%	1,04%	1,02%	3,03%

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Rupiah	528.181	448.759	225.068	436.630	234.765
Mata uang asing	2.193.489	1.013.326	6.702.550	1.283.950	946.949
Jumlah	2.721.670	1.462.085	6.927.618	1.720.580	1.181.714
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.049)	(20.514)	(69.276)	(19.787)	(10.914)
Bersih	2.720.621	1.441.571	6.858.342	1.700.793	1.170.800

Perincian giro pada bank lain dalam mata uang asing per 30 September 2010 adalah Rp1.466.888 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Rp276.613 dalam mata uang Yen Jepang, Rp221.369 dalam mata uang Dolar Singapura, Rp70.070 dalam mata uang Dolar Hong Kong dan Rp158.549 dalam mata uang asing lainnya.

b. Berdasarkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga

Pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, BNI tidak mempunyai transaksi giro pada bank lain dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

c. Berdasarkan kolektibilitas

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 diklasifikasikan lancar, kecuali giro pada Bank Indover yang diklasifikasikan macet dengan jumlah masing-masing sebesar Rp5.952 dan Rp3.614 pada tanggal-tanggal 30 September 2009 dan 31 Desember 2008. Giro pada Bank Indover tersebut telah dihapusbukukan pada kuartal akhir tahun 2009.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk tersebut telah memadai.

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA

Informasi mengenai jatuh tempo penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia diungkapkan pada Catatan 44.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Rupiah					
Bank Indonesia - <i>call money</i>	2.719.450	3.275.383	7.995.343	10.444.278	6.751.438
<i>Call money</i>					
PT Bank UOB Buana, Indonesia, Jakarta	300.000	300.000	175.000	-	-
PT Panin Bank, Jakarta	190.000	190.000	190.000	200.000	-
PT Bank Bukopin, Jakarta	180.000	135.000	130.000	-	-
The Bank of Tokyo, Mitsubishi UFJ, Ltd - Jakarta Branch	170.000	-	375.000	-	-
Lain-lain	325.000	1.127.500	2.552.500	417.500	3.281.520

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Deposito berjangka	282.142	114.506	327.463	112.588	281.532
Jumlah Rupiah	4.166.592	5.142.389	11.745.306	11.174.366	10.314.490
Mata uang asing					
<i>Call money</i>					
The Bank of Tokyo, Mitsubishi UFJ, Ltd - Singapura	2.374.050	2.995.184	2.536.650	-	-
Westdeutsche Landesbank, London	1.115.625	773.200	1.174.375	872.000	328.755
Deutsche Genossenschaft Bank, Singapura	1.026.375	-	-	-	-
National Bank of Canada, London	980.947	869.850	1.127.400	872.000	234.825
Bank of Montreal, London	937.125	773.200	986.475	817.500	-
Deutsche Genossenschaft Bank, London	892.500	2.334.473	939.845	904.700	574.809
Commerzbank AG, Frankfurt	669.375	483.250	845.550	490.500	-
Raffaizen Zentrale, Singapura	669.375	724.875	704.625	817.500	281.790
Sumitomo Mitsui Bank, Singapura	624.750	483.250	648.255	-	-
ING Bank, Singapura	580.125	-	-	-	-
Natexis Banques Populaires, Singapura	535.500	386.600	563.700	436.000	-
Skandinaviska Enskilda Bank, London	447.267	628.225	732.032	981.000	251.920
Royal Bank of Canada, Hong Kong	446.250	-	469.750	-	-
Societe Generale, Hong Kong	446.250	289.950	469.750	-	-
Wachovia Bank, N.A., Hong Kong	446.250	-	469.750	-	-
ABN Amro Bank, Hong Kong	392.700	386.600	422.775	-	-
Standard Chartered Bank, Hong Kong	357.000	1.327.971	1.240.140	-	-
Credit Industrial et Commercial, Singapura	357.000	483.250	375.800	490.500	122.109
HSH Nordbank A.G., Singapura	357.000	386.600	375.800	436.000	-
Bank DBS, Singapura	357.000	-	-	-	-
Svenska Hotel Handelsbanken, Singapura	357.000	706.107	-	-	-
Banque National De Paris, Singapura	348.075	-	-	-	-
Standard Chartered Bank, London	321.300	-	-	-	-
Rabobank, London	321.300	-	-	-	-
Bank of America, Singapura	312.375	-	-	-	-
Lain-lain	1.458.791	1.220.965	3.191.786	3.757.781	2.143.905
Deposito berjangka	1.610.524	737.545	831.948	898.460	635.533
Jumlah mata uang asing	18.741.829	15.991.095	18.106.406	11.773.941	4.573.646
Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai	22.908.421 (210)	21.133.484 (349.044)	29.851.712 (229.550)	22.948.307 (306.367)	14.888.136 (79.621)
Bersih	22.908.211	20.784.440	29.622.162	22.641.940	14.808.515

Perincian penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia dalam mata uang asing per 30 September 2010 adalah Rp18.378.003 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Rp320.648 dalam mata uang Euro dan Rp43.178 dalam mata uang Pound Sterling Inggris.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA (lanjutan)

b. Berdasarkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga

Pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, seluruh penempatan pada bank lain merupakan penempatan pada pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2008, penempatan berupa *interbank call money* pada Standard Chartered Bank senilai Rp125.000 merupakan penempatan yang dilakukan sehubungan dengan transaksi surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dengan Standard Chartered Bank (Catatan 20).

c. Berdasarkan kolektibilitas

Seluruh penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 diklasifikasikan sebagai lancar, kecuali penempatan pada Bank Indover yang dilakukan BNI cabang luar negeri yang diklasifikasikan sebagai macet dengan jumlah masing-masing sebesar Rp164.443 dan Rp184.234 pada tanggal-tanggal 30 September 2009 dan 31 Desember 2008. Penempatan pada Bank Indover ini telah dihapus buku berdasarkan memo internal BNI No. INT/3/6131 tanggal 9 Desember 2009. Selanjutnya, pada tanggal 10 Maret 2010, BNI telah menerima pembayaran atas hapus buku tersebut sebesar EUR6.233.757,49.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk tersebut telah memadai.

d. Penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan

Penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan adalah sebesar RpNihil, RpNihil, RpNihil, Rp109.000 dan Rp245.945 untuk transaksi perdagangan masing-masing pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

e. Tingkat suku bunga per tahun

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat %	Euro %
2010 (9 bulan)	4,90 - 9,50	0,01 - 3,00	0,10 - 0,43
2009 (9 bulan)	5,75 - 9,50	0,01 - 2,52	0,10 - 0,43
2009	4,50 - 12,00	0,01 - 3,00	0,15 - 1,20
2008	4,31 - 13,50	0,01 - 3,75	1,00 - 3,00
2007	3,00 - 15,21	3,00 - 7,25	3,90 - 4,50

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. SURAT-SURAT BERHARGA

Informasi mengenai jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 44.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

	30 September 2010		30 September 2009 (Tidak Diaudit)		31 Desember					
					2009		2008		2007	
	Nilai nominal	Nilai tercatat	Nilai nominal	Nilai tercatat	Nilai nominal	Nilai tercatat	Nilai nominal	Nilai tercatat	Nilai nominal	Nilai tercatat
Nilai wajar melalui laporan laba rugi										
Rupiah										
Reksadana	785.763	953.500	749.185	763.831	710.732	715.253	745.085	745.085	255.944	255.944
Obligasi	146.000	151.847	74.611	61.025	89.625	88.872	37.025	37.247	124.013	123.992
Efek hutang lainnya	72.917	77.772	39.261	39.247	36.282	35.276	43.660	43.660	30.546	30.546
Jumlah Rupiah	1.004.680	1.183.119	863.057	864.103	836.639	839.401	825.770	825.992	410.503	410.482
Mata uang asing										
<i>Credit-linked notes</i>	267.750	244.640	483.250	462.770	422.775	411.457	654.000	527.978	450.864	426.740
<i>Credit-linked loans</i>	89.250	84.643	193.300	170.858	187.900	172.769	218.000	163.744	-	-
Obligasi	7.726	7.726	53.182	51.237	37.585	36.731	-	-	-	-
Reksadana	15.000	15.188	2.615	2.615	2.664	2.664	10.956	10.956	-	-
Jumlah mata uang asing	379.726	352.197	732.347	687.480	650.924	623.621	882.956	702.678	450.864	426.740
Jumlah nilai wajar melalui laporan laba rugi	1.384.406	1.535.316	1.595.404	1.551.583	1.487.563	1.463.022	1.708.726	1.528.670	861.367	837.222
Tersedia untuk dijual										
Rupiah										
Sertifikat Bank Indonesia setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar RpNihil pada periode 2010 Rp4.124 pada periode 2009 Rp31.123 pada tahun 2009 Rp17.169 pada tahun 2008 dan Rp44.721 pada tahun 2007	-	-	1.350.000	1.345.876	11.495.000	11.463.877	5.050.000	5.032.831	11.797.650	11.752.929
Obligasi	1.190.000	1.266.505	1.371.000	1.366.913	1.394.000	1.482.758	743.000	720.759	731.000	733.903
Reksadana	943.000	1.013.933	1.703.000	1.764.454	2.148.000	2.253.203	250.357	250.357	76.098	76.098
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	-	-	480.000	480.000	350.000	350.000	350.000	350.000	321.500	321.500
Efek hutang lainnya	95.000	98.256	50.000	50.000	50.000	53.375	50.000	49.580	80.000	82.782
Jumlah Rupiah	2.228.000	2.378.694	4.954.000	5.007.243	15.437.000	15.603.213	6.443.357	6.403.527	13.006.248	12.967.212
Mata uang asing										
Obligasi	2.437.086	1.914.239	1.654.798	1.506.787	1.397.320	1.271.807	2.727.088	1.392.353	1.780.899	1.684.560
Reksadana	898.988	833.877	282.218	284.355	274.334	280.305	-	-	-	-
Efek hutang lainnya	458.456	366.396	650.522	484.180	524.069	396.612	785.410	516.689	809.136	753.816
Jumlah mata uang asing	3.794.530	3.114.512	2.587.538	2.275.322	2.195.723	1.948.724	3.512.498	1.909.042	2.590.035	2.438.376
Jumlah tersedia untuk dijual	6.022.530	5.493.206	7.541.538	7.282.565	17.632.723	17.551.937	9.955.855	8.312.569	15.596.283	15.405.588
Dimiliki hingga jatuh tempo										
Rupiah										
Sertifikat Bank Indonesia setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp131.112 pada periode 2010	9.850.000	9.718.888	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi setelah dikurangi diskonto dan ditambah premi yang belum diamortisasi sebesar Rp193 pada periode 2010 Rp2.601 pada periode 2009 Rp787 pada tahun 2009 Rp327 pada tahun 2008 RpNihil pada tahun 2007	542.891	542.698	427.050	424.449	465.250	464.463	366.063	365.736	-	-
Jumlah Rupiah	10.392.891	10.261.586	427.050	424.449	465.250	464.463	366.063	365.736	-	-

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

	30 September 2010		30 September 2009 (Tidak Diaudit)		31 Desember					
					2009		2008		2007	
	Nilai nominal	Nilai tercatat	Nilai nominal	Nilai tercatat	Nilai nominal	Nilai tercatat	Nilai nominal	Nilai tercatat	Nilai nominal	Nilai tercatat
Mata uang asing										
Obligasi	40.244	39.020	29.043	27.445	37.600	36.089	36.308	36.308	-	-
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo	10.433.135	10.300.606	456.093	451.894	502.850	500.552	402.371	402.044	-	-
Jumlah surat berharga	17.840.071	17.329.128	9.593.035	9.286.042	19.623.136	19.515.511	12.066.952	10.243.283	16.457.650	16.242.810
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(105.508)		(393.104)		(317.584)		(369.232)		(42.249)
Surat-surat berharga - bersih		17.223.620		8.892.938		19.197.927		9.874.051		16.200.561

Perincian surat-surat berharga dalam mata uang asing per 30 September 2010 adalah Rp3.047.791 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Rp403.201 dalam mata uang Dolar Singapura, Rp51.058 dalam mata uang Euro dan Rp3.679 dalam mata uang Yen Jepang.

Harga pasar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual berkisar antara 11,00% - 123,46%, antara 11,00% - 114,96%, antara 11,00% - 112,00%, antara 30,17% - 114,50% dan antara 66,00% - 114,17% dari nilai nominal untuk masing-masing pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007. BNI mengakui kerugian yang belum direalisasi atas penurunan nilai pasar (*decline in market value*) surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual (setelah pajak tangguhan) masing-masing sebesar Rp62.883, Rp200.822, Rp36.749, Rp800.407 dan Rp126.770 pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, yang tercatat pada bagian ekuitas neraca konsolidasian.

b. Berdasarkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, Grup tidak memiliki surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

c. Berdasarkan penerbit

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia	9.718.888	1.825.876	11.813.877	5.382.831	12.074.429
Korporasi	4.900.776	5.357.634	5.719.653	3.202.653	2.480.969
Bank	2.176.271	1.571.796	1.594.978	1.323.644	1.419.604
Pemerintah dan bank sentral negara lain	533.193	530.736	387.003	334.155	267.808
Jumlah	17.329.128	9.286.042	19.515.511	10.243.283	16.242.810
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(105.508)	(393.104)	(317.584)	(369.232)	(42.249)
Bersih	17.223.620	8.892.938	19.197.927	9.874.051	16.200.561

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat

	30 September 2010		Nilai Tercatat
	Pemeringkat	Peringkat	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			
Rupiah			
Reksadana	-	-	953.500
Obligasi	Beragam	Beragam	151.847
Efek hutang lainnya	Beragam	Beragam	77.772
Jumlah Rupiah			1.183.119
Mata uang asing			
<i>Credit-Linked Notes</i>			
Standard Chartered Bank Singapura jatuh tempo 20 September 2011	S&P	Baa1	44.584
Standard Bank New York jatuh tempo 20 Maret 2012	Moody's	Baa1	43.820
Credit Suisse London jatuh tempo 20 Maret 2012	S&P	A+	43.392
Merrill Lynch S.A. jatuh tempo 20 Desember 2011	S&P	AA	43.304
Credit Suisse London jatuh tempo 20 Juni 2013	S&P/Moody's	A+/Aa1	43.041
Barclays Bank PLC jatuh tempo 20 September 2011	S&P/Moody's	A/A3	26.499
<i>Credit-Linked Loans</i>			
Barclays Bank PLC London jatuh tempo 20 Juni 2012	Moody's	A1	42.365
UBS AG London jatuh tempo 20 Juni 2012	Moody's	A1	42.278
Obligasi	S&P	BB	7.726
Reksadana	-	-	15.188
Jumlah mata uang asing			352.197
Jumlah nilai wajar melalui laporan laba rugi			1.535.316
Tersedia untuk dijual			
Rupiah			
Obligasi			
Telkom II A	Pefindo	idAAA	152.456
BTPN II 2010 A	Pefindo	idAA-	99.422
SUB II BK NISP	Pefindo	idA+	60.118
OCBC NISP III 2010	Pefindo	idAA	56.301
Medco II A	Pefindo	idAA-	54.631
PPKT II	Pefindo	idAA-	54.035
Indosat 04/13 VI A	Pefindo	idAA+	52.680
Astra SD Finance XI A	Pefindo	idAA-	50.345
SMF II A 09	Pefindo	idAA	50.296
BEXI I A	Pefindo	idAAA	50.130
GADAI - 13 A2	Pefindo	idAA+	49.861
Bank Sulut IV 2010	Pefindo	idA-	48.920
Medco II B	Pefindo	idAA-	41.619
SUB Panin II	Pefindo	idAA-	34.187
MAP I A - 2012	Pefindo	idA+	32.477

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

	30 September 2010		Nilai Tercatat
	Pemeringkat	Peringkat	
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Rupiah (lanjutan)			
Obligasi (lanjutan)			
Ciliandra P 11/12 II	Pefindo	idA	31.776
PT Indofood Sukses 05	Pefindo	idAA	31.134
Astra SD Finance XI B	Pefindo	idAA-	30.647
Panin Bank 06/12 2 B	Pefindo	idAA	29.248
PT Adhi Karya 07/12	Pefindo	idA-	28.032
BEXI I C	Pefindo	idAAA	26.285
Excelcomindo Pra 04/12	Pefindo	idAA-	26.049
BEXI I B	Pefindo	idAAA	25.763
Tunas Fin 02/15 5 D	Pefindo	idA-	20.608
BTN 09/16 XII	Pefindo	idAA-	20.102
Lain-lain	Beragam	Beragam	109.383
Reksadana	-	-	1.013.933
Efek hutang lainnya	Beragam	Beragam	98.256
Jumlah Rupiah			2.378.694
Mata uang asing			
Obligasi			
Pemerintah Singapura	S&P	AAA	313.977
Malaysia 2011	S&P/Moody's	A-/A3	56.161
Indosat Palapa Amsterdam	Moody's	Ba1	49.348
DBS Singapore	S&P	A+	46.449
Pemerintah Rusia	S&P/Moody's	BBB/Baa1	46.303
Lukoil Intl Fin BV 2022	S&P/Moody's	BBB-/Baa2	46.298
Pemerintah Jepang	Moody's	Aaa	44.599
Republik Pakistan	S&P/Moody's	B-/B3	40.163
PT Indosat Tbk	S&P/Moody's	BB/Ba1	36.668
Bank of East Asia Dec 2015	S&P/Moody's	BBB+/A3	35.789
Japan Express, Tokyo	Moody's	Aa2	34.328
Bangkok Bank	S&P/Moody's	BBB/Baa1	32.580
Tokyo Elec Power, Tokyo	Moody's	Aa2	32.518
Kuznetski (Bank of Moscow)	Moody's	Baa2	30.790
Bank of East Asia	S&P/Moody's	BBB+/A3	26.775
Monetary Authority of Singapore	S&P	AAA	26.775
Krung Thai Bank	S&P/Moody's	BB+/B2	26.641
Dah Sing Bank	S&P	BBB+	26.387
Mizuho Cap Inv	S&P/Moody's	BBB/B1	25.436
Woori Bank	S&P/Moody's	BBB/Ba2	25.436
Majapahit Holding	Pefindo	idA	25.368
Morgan Stanley	S&P	A	24.972
Kazkommerts	S&P	CCC+	24.365
Hutchison, Hong Kong	Moody's	A3	22.037
Citigroup, USA	Moody's	A3	21.826
Kazkommerts	Moody's	Baa2	21.688
BNP Paribas, Paris	Moody's	Aa2	21.568
Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HSBC)	S&P	AA	21.022
Lain-Lain	Beragam	Beragam	727.972

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

	30 September 2010		Nilai Tercatat
	Pemeringkat	Peringkat	
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Mata uang asing (lanjutan)			
Efek hutang lainnya			
Goldman Sachs Group Inc	S&P	A	43.452
Bear Stearns JPM Chase	S&P	A+	41.782
Morgan Stanley	S&P	A	40.751
JPM Chase Cap XIII	Fitch	BBB+	38.378
Wachovia Bank	S&P	A-	34.617
M&T Bank Corp	S&P	BBB-	33.678
Suntrust Capital I	S&P	BB+	32.947
Merrill Lynch	S&P	A-	32.249
Bank Boston Capital Trust	S&P	BB	31.286
Huntington Capital Trust II	S&P	B	25.208
Lain-Lain	Beragam	Beragam	12.048
Reksadana	-	-	833.877
Jumlah mata uang asing			3.114.512
Jumlah tersedia untuk dijual			5.493.206
Dimiliki hingga jatuh tempo			
Rupiah			
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	9.718.888
Obligasi	Beragam	Beragam	542.698
Jumlah Rupiah			10.261.586
Mata uang asing			
Obligasi	Beragam	Beragam	39.020
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo			10.300.606
Jumlah surat-surat berharga			17.329.128
Penyisihan kerugian penurunan nilai			(105.508)
Surat-surat berharga - bersih			17.223.620

30 September 2009 (Tidak Diaudit)

	Pemeringkat	Peringkat	Nilai Tercatat
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			
Rupiah			
Reksadana	-	-	763.831
Obligasi	Beragam	Beragam	61.025
Efek hutang lainnya	Beragam	Beragam	39.247
Jumlah Rupiah			864.103

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

	30 September 2009 (Tidak Diaudit)		
	Pemeringkat	Peringkat	Nilai Tercatat
Nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)			
Mata uang asing			
<i>Credit-Linked Notes</i>			
UBS AG (Jersey)	S&P	AA+	89.405
Deutsche Bank London			
jatuh tempo 19 Juli 2010	S&P	A+	47.902
Standard Chartered Bank Singapura			
jatuh tempo 20 September 2011	Moody's	Baa1	47.615
Barclays Bank PLC			
jatuh tempo 20 September 2011	S&P	A	47.483
Credit Suisse London			
jatuh tempo 20 Juni 2013	S&P	A	47.421
Credit Suisse International	Moody's	Aa1	46.334
Standard Chartered Bank	S&P	BBB+	45.029
Lain-lain			91.581
<i>Credit-Linked Loans</i>			
Credit Suisse International			
jatuh tempo 20 September 2011	S&P	AA-	48.325
Shinsei Bank Tokyo	S&P	A-	42.343
Barclays Bank PLC London			
jatuh tempo 20 Juni 2012	S&P	AA	40.410
UBS AG London			
jatuh tempo 20 Juni 2012	S&P	AA-	39.780
Obligasi	Beragam	Beragam	51.237
Reksadana	-	-	2.615
Jumlah mata uang asing			687.480
Jumlah diperdagangkan			1.551.583
Tersedia untuk dijual			
Rupiah			
Reksadana	-	-	1.764.454
Obligasi			
Indosat VI A	Pefindo	idAA+	124.125
Medco IIA	Pefindo	idAA-	121.540
Lembaga Pembiayaan Ekspor			
Indonesia (dahulu Bank Ekspor			
Indonesia) IV A	Pefindo	idAAA	105.735
Astra SD Finance X A	Pefindo	idAA+	92.106
Medco II B	Pefindo	idAA-	85.280
Perum Pegadaian XIII Series A2	Pefindo	idAA+	75.000
PT Indofood V	Pefindo	idAA	68.835
Sub II Bank NISP	Pefindo	idA+	55.000
BTN XIII A	Pefindo	idAA-	50.000
PT Bank Jabar VI A	Pefindo	idAa	48.034
Lembaga Pembiayaan Ekspor			
Indonesia (dahulu Bank Ekspor			
Indonesia)	Pefindo	idAAA	40.640
Summit Oto Finance III A	Pefindo	idA+	29.871

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

30 September 2009 (Tidak Diaudit)			
	Pemeringkat	Peringkat	Nilai Tercatat
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Rupiah (lanjutan)			
Obligasi (lanjutan)			
Bentoel Intl Invest	Pefindo	idA	29.520
Jasa Marga XIII R	Pefindo	idAA-	29.120
Ciliandra Perkasa	Pefindo	idA-	28.200
Adhi Karya	Pefindo	A-	27.014
Panin Bank II B	Pefindo	idAA-	26.460
Federal International Finance IX A	Pefindo	idAAA+	24.800
Excelcomindo Pratama II	Pefindo	idAA+	24.375
Danareksa II	Pefindo	idA-	24.363
Indomobil Finance III A	Pefindo	idA-	20.047
Lain-lain	Beragam	Beragam	236.848
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	1.345.876
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	-	-	480.000
Efek hutang lainnya	Beragam	Beragam	50.000
Jumlah Rupiah			5.007.243
Mata uang asing			
Obligasi			
Monetary Authority of Singapore	Moody's	Aaa	337.918
Majapahit Holding	Pefindo	idA-/A3	91.971
Lukoil Intl Fin 17	S&P	BBB-	88.966
Malaysia 2011	S&P/Moody's	BBB/A3	63.563
Woori Bank 2037	S&P/Moody's	A-/A3	58.606
Hutchison	S&P/Moody's	A3/A-	55.556
Republic of Sri Lanka Oct 2012	S&P	B	49.292
ICICI Bank Ltd	Moody's	Baa2	47.435
Krung Thai Bank Pcl Th	Moody's	Baa3	43.251
State Bank of India	Moody's	Baa2	42.526
Kuznetski (Bank of Moscow)	Moody's	Baa2	42.043
Republic of Pakistan 2017	Moody's	B3	41.461
Mizuho Cap Inv	S&P/Moody's	BBB/Baa1	40.430
Bangkok Bank	S&P/Moody's	BBB/Baa1	31.895
Gaz Capital SA	Moody's	Baa1	50.770
DP World	S&P	BBB+	25.615
Shinsei Finance II	S&P/Moody's	BBB-/Baa3	24.911
City Telecom Hong Kong Ltd.	S&P	BB-	22.713
Lain-Lain	Beragam	Beragam	347.865
Efek hutang lainnya			
VTB Capital	S&P	BBB	48.213
International Lease Finance Corp	S&P	BBB+	47.179
Goldman Sachs Group Inc.	S&P	A	46.141
Morgan Stanley	S&P	A	44.409
Bear Stearns	S&P	A+	43.964
Merrill Lynch	S&P	A-	33.866
CIT Group Inc	Moody's	Ca	31.411
Bank Boston Cap Trust	S&P	BB-	28.995
Wachovia Bank	Moody's	A3	28.995
M&T Bank Corp	S&P	BBB-	26.579
Suntrust Capital	Moody's	Baa3	26.579

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

30 September 2009 (Tidak Diaudit)			
	Pemeringkat	Peringkat	Nilai Tercatat
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Mata uang asing (lanjutan)			
Efek hutang lainnya (lanjutan)			
Huntington Cap	Moody's	Baa3	21.746
Lain-Lain	Beragam	Beragam	56.103
Reksadana	-	-	284.355
Jumlah mata uang asing			2.275.322
Jumlah tersedia untuk dijual			7.282.565
Dimiliki hingga jatuh tempo			
Rupiah			
Obligasi	Beragam	Beragam	424.449
Mata uang asing			
Obligasi	Beragam	Beragam	27.445
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo			451.894
Jumlah surat-surat berharga			9.286.042
Penyisihan kerugian penurunan nilai			(393.104)
Surat-surat berharga - bersih			8.892.938
31 Desember 2009			
	Pemeringkat	Peringkat	Nilai Tercatat
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			
Rupiah			
Reksadana	-	-	715.253
Obligasi	Beragam	Beragam	88.872
Efek hutang lainnya	Beragam	Beragam	35.276
Jumlah Rupiah			839.401
Mata uang asing			
<i>Credit-Linked Notes</i>			
Credit Suisse International			
jatuh tempo 20 Juni 2013	Moody's	Aa1	48.611
Deutsche Bank London			
jatuh tempo 19 Juli 2010	S&P	A+	46.888
Standard Chartered Bank			
Singapura			
jatuh tempo 20 September 2011	S&P	A+	46.679

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

	31 Desember 2009		
	Pemeringkat	Peringkat	Nilai Tercatat
Nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)			
Mata uang asing (lanjutan)			
<i>Credit-Linked Notes (lanjutan)</i>			
Barclays Bank PLC			
jatuh tempo 20 September 2011	S&P	AA-	46.406
UBS AG (Jersey)			
jatuh tempo 20 Maret 2014	S&P	A+	45.919
Standard Bank New York			
jatuh tempo 20 Maret 2012	Moody's	Baa2	43.217
Lain-lain	Beragam	Beragam	133.737
<i>Credit-Linked Loans</i>			
Credit Suisse International			
jatuh tempo 20 September 2011	S&P	A+	46.975
UBS AG London			
jatuh tempo 20 Juni 2012	S&P	A+	42.510
Barclays London PLC			
jatuh tempo 20 Juni 2012	S&P	AA-	42.326
Shinsei Bank Tokyo			
jatuh tempo 20 September 2011	S&P	BBB+	40.958
Obligasi	Beragam	Beragam	36.731
Reksadana	-	-	2.664
Jumlah mata uang asing			623.621
Jumlah nilai wajar melalui laporan laba rugi			1.463.022
Tersedia untuk dijual			
Rupiah			
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	11.463.877
Reksadana	-	-	2.253.203
Obligasi			
Indosat VIA	Pefindo	idAA+	132.528
Medco IIA	Pefindo	idAA	132.420
Pegadaian XIII A2	Pefindo	idAA+	83.699
Lembaga Pembiayaan Ekspor			
Indonesia (dahulu Bank Ekspor			
Indonesia) IVA	Pefindo	idAAA	77.760
Indofood Sukses Makmur V	Pefindo	idAA	75.686
Subordinasi Bank NISP II	Pefindo	idA+	57.889
BTN XIII A	Pefindo	idAA-	54.540
Pupuk Kalimantan Timur II	Pefindo	idAA-	54.097
BTPN IA	Fitch	A+	53.592
Sarana Multigriya Finansial	Fitch	AA	50.856
Bank Jabar Banten VIA	Pefindo	idA+	50.996
Medco IIB	Pefindo	idAA-	42.362
Subordinasi Bank Panin II	Pefindo	idA+	33.416
Mitra Adiperkasa I	Pefindo	idA+	33.013
Ciliandra Perkasa II	Pefindo	idA	32.124
Indofood Sukses Makmur IV	Pefindo	idAA	31.401
Bentoel I	Pefindo	idA	31.102

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

	31 Desember 2009		
	Pemeringkat	Peringkat	Nilai Tercatat
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Rupiah (lanjutan)			
Obligasi (lanjutan)			
Summit Oto Finance IIIA	Pefindo	idA+	30.720
Bank Panin IIB	Pefindo	idAA-	29.794
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (dahulu Bank Ekspor Indonesia) IVB	Pefindo	idAAA	29.474
Adhi Karya IV	Pefindo	idA-	27.853
Jasa Marga XIIIIR	Pefindo	idAA-	27.699
Lain-lain	Beragam	Beragam	309.737
Sertifikat Bank Indonesia Syariah <i>Medium Term Notes</i>	-	-	350.000 53.375
Jumlah Rupiah			15.603.213
Mata uang asing			
Obligasi			
Monetary Authority of Singapore	S&P	AAA	285.973
Majapahit Holding 2016	Pefindo	idA	89.097
Lukoil International Finance 2017	S&P	BBB-	87.976
Malaysia 2011	S&P	A-	61.239
Woori Bank 2037	S&P	BBB	56.916
Hutchison 2033	S&P	A-	51.810
ICICI Bank 2022	Moody's	Baa3	50.187
Gaz Capital 2016	S&P	Baa1	49.620
Kuznetski (Bank of Moscow)	S&P	Baa2	43.334
Krung Thai Bank	Moody's	Baa3	41.103
Republic of Pakistan 2017	Moody's	B3	39.791
Kazkommerts 2016	S&P	B	37.932
Mizuho Cap Inv	S&P	BBB	37.143
Kazkommerts 2017	S&P	CCC+	35.028
Bangkok Bank 2029	S&P	BBB	31.567
Kazkommerts 2015	S&P	B	30.931
Kookmin Bank	S&P	A	30.712
Shinsei Finance II	S&P	BBB-	27.246
Gain Silver Finance	S&P	BBB-	19.231
Gazprom Bank	Moody's	Baa3	18.226
Kazkommerts 2013	S&P	B	16.723
Russian Agricultural Bank 2017	S&P	Baa1	14.163
Lain-Lain	Beragam	Beragam	115.859
Efek hutang lainnya			
International Lease Finance Corp	S&P	BBB+	46.882
Goldman Sachs Group Inc.	S&P	A	46.270
Morgan Stanley	S&P	A	43.971
Bear Stearns	S&P	A+	42.888
Merrill Lynch	S&P	A-	38.158
JPM Chase Cap. XIII	S&P	BBB+	33.118
Bank Boston Capital Trust IV	Moody's	Baa3	31.500
M&T Bank Corp.	S&P	BBB-	29.377

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. SURAT-SURAT BERTAHAP (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

	31 Desember 2009		
	Pemeringkat	Peringkat	Nilai Tercatat
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Mata uang asing (lanjutan)			
Efek hutang lainnya (lanjutan)			
Suntrust Capital I	Moody's	Baa2	29.161
Wachovia Bank	Moody's	Baa2	28.584
Lain-Lain	Beragam	Beragam	26.703
Reksadana	-	-	280.305
Jumlah mata uang asing			1.948.724
Jumlah tersedia untuk dijual			17.551.937
Dimiliki hingga jatuh tempo			
Rupiah			
Obligasi	Beragam	Beragam	464.463
Mata uang asing			
Obligasi	Beragam	Beragam	36.089
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo			500.552
Jumlah surat-surat berharga			19.515.511
Penyisihan kerugian penurunan nilai			(317.584)
Surat-surat berharga - bersih			19.197.927
31 Desember 2008			
	Pemeringkat	Peringkat	Nilai Tercatat
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			
Rupiah			
Reksadana	-	-	745.085
Efek hutang lainnya	Beragam	Beragam	43.660
Obligasi	Beragam	Beragam	37.247
Jumlah Rupiah			825.992
Mata uang asing			
<i>Credit-Linked Notes</i>			
UBS AG (Jersey)	S&P	A+	75.393
Deutsche Bank London 2010			
jatuh tempo 19 Juli 2010	S&P	A+	54.500
Barclays Bank PLC			
jatuh tempo 20 September 2011	S&P	AA-	51.131
Standard Bank New York			
jatuh tempo 20 Maret 2012	Moody's	A3	47.312

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

	31 Desember 2008		
	Pemeringkat	Peringkat	Nilai Tercatat
Nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)			
Mata uang asing (lanjutan)			
<i>Credit-Linked Notes (lanjutan)</i>			
Standard Chartered Bank Singapura jatuh tempo 20 September 2011	S&P	A+	42.041
UBS Jersey jatuh tempo 20 Juni 2009	S&P	A+	40.849
Credit Suisse International	Moody's	Aa1	40.521
Lain-lain	Beragam	Beragam	176.231
<i>Credit-Linked Loans</i>			
Credit Suisse International jatuh tempo 20 September 2011	S&P	AA-	48.505
Shinsei Bank Tokyo jatuh tempo 20 September 2011	S&P	A-	48.505
Barclays Bank London PLC jatuh tempo 20 Juni 2012	S&P	AA	35.323
UBS AG London jatuh tempo 20 Juni 2012	S&P	AA-	31.411
Reksadana	-	-	10.956
Jumlah mata uang asing			702.678
Jumlah diperdagangkan			1.528.670
Tersedia untuk dijual			
Rupiah			
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	5.032.831
Obligasi			
Indosat	Pefindo	idAA+	139.241
BTN	Pefindo	idAA-	16.751
Lain-lain	Beragam	Beragam	564.767
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	-	-	350.000
Reksadana	-	-	250.357
Efek hutang lainnya			
PTPN III	Pefindo	idAA-	49.580
Jumlah Rupiah			6.403.527
Mata uang asing			
Obligasi			
Monetary Authority of Singapore	S&P	AAA	181.348
Hutchison	S&P	A-	111.491
Lukoil International Finance 17	S&P	BBB-	72.755
Government of Malaysia	S&P	A-	69.607
Freeport McMoran C&G	Moody's	Baa1	63.727
Krung Thai Bank 2016	Moody's	Baa3	46.427
Woori Bank 2037	S&P	BBB	44.326
Mizuho Cap Inv 2016	S&P	BBB+	35.015
Republic of Sri Lanka Oct 2012	S&P	B	34.880
Gaz Capital 2016	Moody's	A3	34.880

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

				31 Desember 2008		
				Pemeringkat	Peringkat	Nilai Tercatat
Tersedia untuk dijual (lanjutan)						
Mata uang asing (lanjutan)						
Obligasi (lanjutan)						
State Bank of India 2017	Moody's	Baa2	34.332			
Bangkok Bank Mar 2029	S&P	BBB	28.704			
ICICI Bank	Moody's	Baa2	28.260			
Shinsei Finance II 2016	S&P	BBB-	27.250			
Kuznetski (Bank of Moscow)	Moody's	Baa2	27.250			
Bank Danamon	Moody's	Ba2	26.920			
Kazkommerts Jun 2017	S&P	B	26.198			
Kazkommerts Nov 2016	S&P	BB-	24.769			
BTAS 2016	S&P	CCC	23.904			
Kazkommerts 2015	S&P	BB-	21.745			
Republic of Pakistan 2017	Moody's	CCC+	21.673			
Citytel	S&P	B+	16.350			
MEI Euro Financial Ltd	S&P	B+	9.516			
Lainnya	Beragam	Beragam	381.026			
Efek hutang lainnya						
Standard Int'l Holdings	Moody's	Baa1	50.140			
VTB Capital	S&P	BBB	47.927			
International Lease Finance	S&P	BBB+	40.875			
CIT Group Inc	S&P	BBB+	40.875			
Bear Stearns	S&P	A+	40.875			
Goldman Sachs Group Inc	S&P	A	39.240			
Morgan Stanley	S&P	A	37.604			
Bank Boston Capital Trust	S&P	BBB	30.520			
Merrill Lynch	S&P	A	30.520			
JPM Chase Cap XIII	S&P	BBB+	30.520			
Wachovia Bank	Moody's	A+	29.975			
Suntrust Capital I	S&P	BBB	26.160			
M & T Bank Corp	S&P	BBB-	24.525			
Huntington Capital Trust II	Moody's	Baa1	24.525			
Lain-lain	Beragam	Beragam	22.408			
Jumlah mata uang asing						1.909.042
Jumlah tersedia untuk dijual						8.312.569
Dimiliki hingga jatuh tempo						
Rupiah						
Obligasi						
Indosat Syariah Ijarah III	Pefindo	AA+sy	77.004			
Indosat Syariah Ijarah II	Pefindo	AA+sy	60.000			
Bank Muamalat	Moody's	<i>stable outlook</i>	27.012			
Perkebunan Nusantara III						
Syariah Ijarah	Pefindo	AA-	20.045			
Berlian Laju Tanker						
Syariah Ijarah	Pefindo	A+sy	20.000			
Mayora Indah						
Syariah Ijarah	Pefindo	A+sy	20.000			
Arpeni Pratama Ocean Line						
Syariah Ijarah	Pefindo	A+sy	15.000			
		A-(idn)				

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

	31 Desember 2008		
	Pemeringkat	Peringkat	Nilai Tercatat
Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)			
Rupiah (lanjutan)			
Obligasi (lanjutan)			
Apexindo Pratama Duta			
Syariah Ijarah	Pefindo	A+sy	14.993
PLN Syariah Ijarah	Moody's	Aid	14.000
Aneka Gas Syariah Ijarah	Moody's	A.3id	
Lain-lain	Beragam	<i>stable outlook</i> Beragam	11.000
			86.682
Jumlah Rupiah			365.736
Mata uang asing			
Obligasi	Beragam	Beragam	36.308
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo			402.044
Jumlah surat-surat berharga			10.243.283
Penyisihan kerugian penurunan nilai			(369.232)
Surat-surat berharga - bersih			9.874.051

	31 Desember 2007		
	Pemeringkat	Peringkat	Nilai Tercatat
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			
Rupiah			
Reksadana	-	-	255.944
Obligasi	Beragam	Beragam	123.992
Efek hutang lainnya	Beragam	Beragam	30.546
Jumlah Rupiah			410.482
Mata uang asing			
<i>Credit-Linked Notes</i>			
UBS AG (Jersey)			
jatuh tempo 20 Maret 2014	S & P	AA+	47.275
Deutsche Bank London 2010			
jatuh tempo 19 Juli 2010	S & P	A	47.037
Standard Chartered Bank Singapura			
jatuh tempo 20 September 2011	S & P	A-	46.552
UBS Jersey			
jatuh tempo 20 Juni 2009	S & P	AA+	46.190
Standard Bank New York			
jatuh tempo 20 Maret 2012	Moody's	Baa1	46.026
Barclays Bank PLC			
jatuh tempo 20 September 2011	S & P	AA	45.373
Credit Suisse International			
jatuh tempo 20 Juni 2012	Moody's	Aa1	44.734

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

	31 Desember 2007		
	Pemeringkat	Peringkat	Nilai Tercatat
Nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)			
Mata uang asing (lanjutan)			
<i>Credit-Linked Notes (lanjutan)</i>			
UBS AG (Jersey)			
jatuh tempo 20 September 2012	S & P	AA+	42.315
Zircon Finance Ltd			
jatuh tempo 20 September 2012	S & P	A+	32.876
Standard Chartered Bank Singapura			
Jatuh tempo 20 Juni 2008	S & P	A-	28.362
Jumlah mata uang asing			426.740
Jumlah nilai wajar melalui laporan laba rugi			837.222
Tersedia untuk dijual			
Rupiah			
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	11.752.929
Obligasi			
BTN	Pefindo	idAA-	104.782
Indosat Syariah Ijarah II	Pefindo	idAA+	60.000
Indosat	Pefindo	idAA+	34.539
Lain-lain	Beragam	Beragam	534.580
Sertifikat <i>Wadiah</i> Bank			
Indonesia	-	-	321.500
Efek hutang lainnya			
PTPN III	Pefindo	idAA-	72.833
Lain-lain	Beragam	Beragam	9.951
Reksadana	-	-	76.098
Jumlah Rupiah			12.967.212
Mata uang asing			
Obligasi			
Hutchison	Fitch	A-	91.259
Bank Rakyat Indonesia	Moody's	B3	84.511
Monetary Authority of Singapore	S & P	AAA	79.342
Kazkommerts	S & P	BB+	72.041
Government of Malaysia	Fitch	A-	61.712
Gaz Capital 2016	S & P	BBB	49.759
Bank Mandiri - 2008	S & P	BB-	47.030
Credit Suisse International	S & P	A+	46.965
Merrill Lynch SA Notes	S & P	AA	46.965
Republic of Sri Lanka Oct 2012	S & P	B+	45.556
Mizuho Cap Inv 2016	S & P	BBB+	42.973
Kuznetski (Bank of Moscow)	S & P	BBB-	42.973
Krung Thai Bank 2016	S & P	BB+	42.269
Republic of Pakistan 2017	Moody's	B1	41.564
ICICI Bank	S & P	BB	40.531
State Bank of India 2017	S & P	BB	39.685
Shinsei Finance II 2016	S & P	BBB	38.732

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

	31 Desember 2007		Nilai Tercatat
	Pemeringkat	Peringkat	
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			
Mata uang asing (lanjutan)			
Obligasi (lanjutan)			
Excelcomindo Finance	S & P	BB-	37.757
Kazkommerts Nov 2016	S & P	BB	36.868
Woori Bank 2037	S & P	BBB	33.550
BTAS 2016	S & P	B-	30.997
Bangkok Bank Mar 2029	S & P	BBB	30.856
Freeport McMoran C&G	Moody's	Baa3	28.602
Lukoil 17	S & P	BBB-	27.193
Lukoil International			
Finance Jun 2016	S & P	BBB-	27.142
Lukoil International Fin BV 2017	Moody's	Baa2	26.770
KCRC	Moody's	Aa3	24.419
Lehman Brothers USA 01	Moody's	A1	23.633
Bank Danamon	Moody's	Ba2	23.576
Citytel	S & P	BB-	22.895
Kazkommerts Jun 2017	S & P	BB-	22.135
MEI Euro Financial Ltd	S & P	B+	19.225
Lainnya	Beragam	Beragam	355.075
Efek hutang lainnya			
Standard Int'l Holdings	Moody's	Baa1	47.435
UBS Notes	S & P	BB-	46.965
International Lease Finance Corp.	S & P	AA-	46.330
VTB Capital	S & P	BBB+	46.026
M & T Bank Corp	S & P	BBB	45.885
Goldman Sachs Group Inc	S & P	A+	45.523
Lehman Brothers Holding Co	S & P	A+	45.288
Morgan Stanley	S & P	A+	44.570
JPM Chase Cap XIII	S & P	A	42.973
Suntrust Capital I	S & P	A-	42.668
Wachovia Bank	S & P	A	41.916
Bear Stearns	S & P	A	41.799
Bank Boston Capital Trust	S & P	A	41.564
Merrill Lynch	S & P	A+	41.328
Huntington Capital Trust II	S & P	BBB-	41.094
CIT Group Inc	S & P	A	40.860
Washington Mutual Inc	S & P	A-	40.860
Lain-lain	Beragam	Beragam	10.732
Jumlah mata uang asing			2.438.376
Jumlah tersedia untuk dijual			15.405.588
Jumlah surat-surat berharga			16.242.810
Penyisihan kerugian penurunan nilai			(42.249)
Surat-surat berharga - bersih			16.200.561

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

e. Berdasarkan kolektibilitas

	30 September 2010		30 September 2009 (Tidak Diaudit)		31 Desember					
					2009		2008		2007	
	Pokok	Penyisihan	Pokok	Penyisihan	Pokok	Penyisihan	Pokok	Penyisihan	Pokok	Penyisihan
Individual	15.464.135	(75.317)	-	-	-	-	-	-	-	-
Lancar	1.839.102	(4.300)	8.943.370	(63.638)	19.261.607	(67.835)	9.910.432	(66.778)	16.242.810	(42.249)
Kurang lancar	-	-	15.536	(2.330)	4.888	(733)	35.761	(5.364)	-	-
Macet	25.891	(25.891)	327.136	(327.136)	249.016	(249.016)	297.090	(297.090)	-	-
Jumlah	17.329.128	(105.508)	9.286.042	(393.104)	19.515.511	(317.584)	10.243.283	(369.232)	16.242.810	(42.249)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk tersebut telah memadai.

f. Tingkat suku bunga per tahun

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat %	Euro %
2010 (9 bulan)	7,55 - 15,00	0,73 - 11,63	4,13
2009 (9 bulan)	9,25 - 18,25	0,69 - 9,03	4,13
2009	9,25 - 18,25	0,66 - 9,03	-
2008	9,08 - 14,50	1,93 - 6,85	4,13
2007	9,75 - 17,88	3,96 - 10,50	4,13

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA

Informasi mengenai jatuh tempo wesel ekspor dan tagihan lainnya diungkapkan pada Catatan 44.

a. Berdasarkan mata uang

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Rupiah	59.628	137.571	43.956	37.042	15.223
Mata uang asing	467.439	437.871	644.015	415.013	314.684
Jumlah	527.067	575.442	687.971	452.055	329.907
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(5.516)	(15.804)	(19.207)	(24.110)	(10.574)
Bersih	521.551	559.638	668.764	427.945	319.333

Perincian wesel ekspor dan tagihan lainnya dalam mata uang asing per 30 September 2010 adalah Rp347.789 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Rp80.305 dalam mata uang Dolar Hong Kong, Rp28.857 dalam mata uang Yen Jepang, Rp3.559 dalam mata uang Euro dan Rp6.929 dalam mata uang asing lainnya.

b. Berdasarkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, BNI tidak memiliki wesel ekspor dan tagihan lainnya dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan)

c. Berdasarkan kolektibilitas

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Lancar	526.565	543.814	665.590	402.141	315.853
Dalam perhatian khusus	-	23.235	16.219	29.183	7.434
Kurang lancar	-	-	1.768	2.508	-
Diragukan	502	-	-	-	-
Macet	-	8.393	4.394	18.223	6.620
Jumlah	527.067	575.442	687.971	452.055	329.907
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(5.516)	(15.804)	(19.207)	(24.110)	(10.574)
Bersih	521.551	559.638	668.764	427.945	319.333

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk tersebut telah memadai.

d. Tingkat suku bunga per tahun

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat %	Euro %
2010 (9 bulan)	9,12 - 11,99	4,29 - 8,57	-
2009 (9 bulan)	10,97 - 12,97	6,83 - 8,83	-
2009	10,14 - 12,14	6,69 - 8,69	-
2008	12,62 - 14,62	3,43 - 9,90	-
2007	10,71 - 12,71	5,75 - 10,00	6,68

9. TAGIHAN AKSEPTASI

Informasi mengenai jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 44.

a. Berdasarkan mata uang

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Rupiah	200.175	274.219	250.716	256.626	148.414
Mata uang asing	5.657.879	2.291.751	4.542.142	3.733.409	2.279.057
Jumlah	5.858.054	2.565.970	4.792.858	3.990.035	2.427.471
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(65.423)	(37.495)	(63.479)	(158.998)	(47.353)
Bersih	5.792.631	2.528.475	4.729.379	3.831.037	2.380.118

Perincian tagihan akseptasi dalam mata uang asing per 30 September 2010 adalah Rp5.503.011 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Rp104.834 dalam mata uang Euro, Rp21.843 dalam mata uang Yen Jepang, Rp21.663 dalam mata uang Pound Sterling Inggris dan Rp6.528 dalam mata uang asing lainnya.

b. Berdasarkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, tagihan akseptasi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa masing-masing sebesar RpNihil, RpNihil, Rp220, Rp939 dan Rp854 (Catatan 38).

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan)

c. Berdasarkan kolektibilitas

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Lancar	5.693.225	2.327.414	4.608.877	2.728.578	2.099.541
Dalam perhatian khusus	162.330	234.273	174.738	1.104.243	255.564
Kurang lancar	2.499	1.056	1.512	94.957	68.621
Diragukan	-	3.227	-	-	-
Macet	-	-	7.731	62.257	3.745
Jumlah	5.858.054	2.565.970	4.792.858	3.990.035	2.427.471
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(65.423)	(37.495)	(63.479)	(158.998)	(47.353)
Bersih	5.792.631	2.528.475	4.729.379	3.831.037	2.380.118

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk tersebut telah memadai.

10. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN DERIVATIF

Dalam melakukan usaha bisnis, BNI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing, *swap* atas tingkat bunga dan transaksi *spot* untuk keperluan pembiayaan, perdagangan dan lindung nilai.

Instrumen	Jumlah nosional Mata uang asing (Jumlah penuh)	30 September 2010	
		Nilai wajar	
		Tagihan derivatif	Kewajiban derivatif
Terkait Nilai Tukar			
Kontrak berjangka - beli USD	10.955.000	-	(1.046)
Kontrak berjangka - jual USD	10.955.000	1.098	-
<i>Swap</i> mata uang asing - jual USD	25.000.000	222	(64)
<i>Spot</i> mata uang asing - beli USD	3.603.045	26	(61)
<i>Spot</i> mata uang asing - jual USD	8.500.000	19	(58)
EUR	400.000	-	(7)
Terkait Suku Bunga			
<i>Swap</i> mata uang asing dan suku bunga USD	30.000.000	-	(9.687)
JPY	1.873.000.000	-	(22.187)
<i>Swap</i> atas suku bunga USD	150.000.000	-	(200.007)
Bersih		1.365	(233.117)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
 serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN DERIVATIF (lanjutan)

Instrumen	Jumlah nosional Mata uang asing (Jumlah penuh)	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	
		Nilai wajar	
		Tagihan derivatif	Kewajiban derivatif
Swap valuta asing dan tingkat bunga USD	121.732.831	4.542	(30.124)
Swap valuta asing - USD	102.000.000	3.555	(1.512)
Swap valuta asing - EUR	600.000	-	(1)
Swap valuta asing - JPY	47.183.551	-	(151)
Swap atas tingkat bunga USD	150.000.000	-	(167.475)
Spot - USD	115.350.000	1.590	(3.799)
Spot - EUR	41.450.000	666	(333)
Spot - GBP	200.000	-	(42)
Spot - HKD	1.000.000	8	-
Kontrak berjangka - USD	30.990.000	6.449	(6.295)
Jumlah		16.810	(209.732)
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(173)	-
Bersih		16.637	(209.732)
31 Desember 2009			
Instrumen	Jumlah nosional Mata uang asing (Jumlah penuh)	Nilai wajar	
		Tagihan derivatif	Kewajiban derivatif
Terkait Nilai Tukar			
Kontrak berjangka - beli			
USD	8.850.000	-	(1.699)
EUR	100.000	15	-
Kontrak berjangka - jual			
USD	8.880.374	1.800	-
EUR	100.000	-	(14)
Swap mata uang asing - jual			
USD	81.667.858	2.335	-
EUR	600.000	19	-
Spot mata uang asing - beli			
USD	4.750.000	17	(15)
EUR	1.000.000	66	-
GBP	200.000	-	(4)
Spot mata uang asing - jual			
USD	18.050.000	341	(162)
EUR	500.000	8	-
GBP	350.000	-	(8)
AUD	300.000	-	(1)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN DERIVATIF (lanjutan)

Instrumen	31 Desember 2009		
	Jumlah nosional Mata uang asing (Jumlah penuh)	Nilai wajar	
		Tagihan derivatif	Kewajiban derivatif
Terkait Suku Bunga			
Swap mata uang asing dan suku bunga USD	121.732.831	2.792	(2.146)
Swap atas suku bunga USD	150.000.000	-	(148.374)
Jumlah		7.393	(152.423)
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(92)	-
Bersih		7.301	(152.423)
31 Desember 2008			
Instrumen	Jumlah nosional Mata uang asing (Jumlah penuh)	Nilai wajar	
		Tagihan derivatif	Kewajiban derivatif
Terkait Nilai Tukar			
Kontrak berjangka - beli USD	2.930.000	601	(586)
Kontrak berjangka - jual USD	10.342.880	5.907	(1.898)
Swap mata uang asing - beli USD	4.500.000	-	(13)
EUR	700.000	127	-
Swap mata uang asing - jual USD	137.025.000	69.176	(870)
SGD	10.000.000	-	(835)
Spot mata uang asing - beli USD	16.150.000	14	(2.654)
EUR	6.500.000	-	(111)
GBP	60.000	-	(3)
Spot mata uang asing - jual USD	11.800.000	2.039	(11)
EUR	5.413.264	1.476	-
Terkait Suku Bunga			
Swap mata uang asing dan suku bunga USD	121.732.831	11.021	(75.685)
SGD	10.000.000	6.164	-
Jumlah		96.525	(82.666)
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(967)	-
Bersih		95.558	(82.666)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN DERIVATIF (lanjutan)

Instrumen	Jumlah nosional Mata uang asing (Jumlah penuh)	31 Desember 2007	
		Nilai wajar	
		Tagihan derivatif	Kewajiban derivatif
Terkait Nilai Tukar			
Kontrak berjangka - beli			
USD	7.045.000	63	(180)
Kontrak berjangka - jual			
USD	6.457.017	183	(68)
Swap mata uang asing - beli			
USD	66.000.000	560	(1.211)
GBP	7.500.000	106	-
Swap mata uang asing - jual			
USD	135.500.000	1.298	(6.307)
Spot mata uang asing - beli			
USD	128.849.960	-	(2.880)
EUR	500.000	45	-
Spot mata uang asing - jual			
USD	12.700.000	409	-
EUR	500.000	-	(54)
Terkait Suku Bunga			
Swap mata uang asing dan suku bunga			
USD	109.927.201	-	(18.231)
SGD	10.000.000	-	(259)
Jumlah		2.664	(29.190)
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(27)	-
Bersih		2.637	(29.190)

Seluruh tagihan derivatif pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 tidak mengalami penurunan nilai, sedangkan 30 September 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 diklasifikasikan sebagai lancar, kecuali tagihan kepada PT Busana Remaja Agracipta sebesar Rp35 per 31 Desember 2008 diklasifikasikan sebagai dalam perhatian khusus.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk tersebut telah memadai.

BNI memiliki saldo *interest rate swap* (IRS) dengan bank lain, dengan jumlah nosional sebesar USD150.000.000 (nilai penuh). IRS ditujukan sebagai lindung nilai arus kas untuk keperluan akuntansi. BNI sudah mengakui rugi nilai pasar akumulasi atas IRS sebesar Rp200.007 per 30 September 2010, yang merupakan bagian dari ekuitas BNI.

11. PINJAMAN/PEMBIAYAAN/PIUTANG YANG DIBERIKAN

Informasi mengenai pinjaman yang diberikan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa diungkapkan pada Catatan 38. Informasi mengenai jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 44.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PINJAMAN/PEMBIAYAAN/PIUTANG YANG DIBERIKAN (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa					
Rupiah					
Modal kerja	74.292	24.691	22.086	48.537	54.310
Investasi	320.607	53.501	351.168	193.245	10.770
Konsumen	87.963	185.334	156.933	226.467	19.600
Jumlah pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	482.862	263.526	530.187	468.249	84.680
Pihak ketiga					
Rupiah					
Modal kerja	53.808.402	53.817.010	52.279.076	46.593.380	36.174.170
Investasi	25.272.542	22.473.622	24.696.566	19.572.992	12.010.075
Konsumen	21.046.235	16.984.597	17.350.042	16.297.746	12.556.963
Sindikasi	8.411.783	7.303.837	7.662.089	4.160.416	2.148.389
Karyawan	1.690.787	2.075.350	1.991.787	1.947.588	1.755.089
Program pemerintah	433.331	338.001	320.378	448.502	592.375
Jumlah Rupiah	110.663.080	102.992.417	104.299.938	89.020.624	65.237.061
Mata uang asing					
Modal kerja	7.764.633	9.223.634	7.748.598	10.951.372	14.276.347
Sindikasi	3.579.202	4.735.449	4.180.610	5.812.302	6.098.801
Investasi	3.561.422	4.827.119	3.992.816	5.701.682	2.947.970
Konsumen	13.344	74.251	71.653	40.168	6.329
Program pemerintah	9.069	-	19.338	-	-
Jumlah mata uang asing	14.927.670	18.860.453	16.013.015	22.505.524	23.329.447
Jumlah pihak ketiga	125.590.750	121.852.870	120.312.953	111.526.148	88.566.508
Jumlah Penyisihan kerugian penurunan nilai	126.073.612	122.116.396	120.843.140	111.994.397	88.651.188
	(6.529.394)	(8.647.140)	(6.920.455)	(5.652.046)	(5.436.203)
Bersih	119.544.218	113.469.256	113.922.685	106.342.351	83.214.985

Perincian pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan dalam mata uang asing per 30 September 2010 adalah Rp14.347.229 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Rp200.443 dalam mata uang Dolar Singapura, Rp182.538 dalam mata uang Yen Jepang, Rp115.948 dalam mata uang Dolar Hong Kong dan Rp81.512 dalam mata uang asing lainnya.

Pinjaman yang diberikan dijamin dengan agunan yang diikat dengan hipotik, hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka dan jaminan lain yang diterima (Catatan 18).

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PINJAMAN/PEMBIAYAAN/PIUTANG YANG DIBERIKAN (lanjutan)

b. Berdasarkan sektor ekonomi

	30 September		31 Desember		
	2010	2009 (Tidak Diaudit)	2009	2008	2007
Rupiah					
Perindustrian	23.256.584	24.030.263	22.173.586	20.951.379	16.325.153
Perdagangan, restoran dan hotel	21.782.136	21.096.695	22.367.350	18.651.590	15.767.238
Jasa dunia usaha	10.219.548	11.518.303	13.011.014	10.828.119	6.561.502
Konstruksi	8.915.449	5.789.187	5.556.929	5.062.393	4.099.889
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	8.382.551	8.370.407	8.282.250	6.724.801	3.446.796
Pertanian	8.602.931	5.431.344	7.212.826	4.097.868	3.072.329
Jasa pelayanan sosial	1.223.870	1.205.739	1.391.566	949.634	651.890
Pertambangan	2.225.121	2.466.970	2.443.168	805.299	489.034
Listrik, gas dan air	3.652.125	3.375.302	3.536.955	2.369.890	317.107
Lain-lain	22.885.627	19.971.733	18.854.481	19.047.900	14.590.803
Jumlah Rupiah	111.145.942	103.255.943	104.830.125	89.488.873	65.321.741
Mata uang asing					
Perindustrian	5.654.617	6.886.090	6.052.053	8.178.408	8.980.354
Listrik, gas dan air	1.712.448	4.201.654	3.320.322	4.315.208	3.960.001
Pertambangan	1.871.650	1.494.538	1.385.329	2.525.375	3.887.838
Jasa dunia usaha	352.349	631.518	416.567	1.146.241	1.005.269
Perdagangan, restoran dan hotel	2.002.629	1.817.108	2.096.843	2.365.321	1.936.912
Konstruksi	27.964	182.940	174.987	482.269	632.653
Pertanian	310.571	1.015.343	571.180	1.108.397	952.299
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	373.564	408.965	213.389	386.816	294.218
Jasa pelayanan sosial	-	20.181	19.393	23.349	41.136
Lain-lain	2.621.878	2.202.116	1.762.952	1.974.140	1.638.767
Jumlah mata uang asing	14.927.670	18.860.453	16.013.015	22.505.524	23.329.447
Jumlah	126.073.612	122.116.396	120.843.140	111.994.397	88.651.188
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(6.529.394)	(8.647.140)	(6.920.455)	(5.652.046)	(5.436.203)
Bersih	119.544.218	113.469.256	113.922.685	106.342.351	83.214.985

c. Berdasarkan kolektibilitas

	30 September 2010		30 September 2009 (Tidak Diaudit)		31 Desember					
					2009		2008		2007	
	Pokok	Penyisihan	Pokok	Penyisihan	Pokok	Penyisihan	Pokok	Penyisihan	Pokok	Penyisihan
Individual	5.215.013	4.271.155	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolektif:										
Lancar	110.070.955	1.103.221	102.286.607	1.121.201	105.441.979	1.358.770	96.751.680	1.142.688	74.032.721	951.796
Dalam perhatian khusus	9.055.482	315.379	11.971.730	2.050.045	9.638.916	874.650	9.646.780	853.688	7.053.533	453.123
Kurang lancar	821.875	171.442	1.424.307	105.649	1.258.274	497.664	1.527.544	212.721	1.165.601	338.134
Diragukan	385.256	175.918	1.274.295	554.032	608.973	379.446	790.031	561.064	725.805	338.245
Macet	525.031	492.279	5.159.457	4.816.213	3.894.998	3.809.925	3.278.362	2.881.885	5.673.528	3.354.905
Jumlah	126.073.612	6.529.394	122.116.396	8.647.140	120.843.140	6.920.455	111.994.397	5.652.046	88.651.188	5.436.203

d. Pinjaman bermasalah dan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi

	30 September 2010		30 September 2009 (Tidak Diaudit)		31 Desember					
					2009		2008		2007	
	Pokok	Penyisihan	Pokok	Penyisihan	Pokok	Penyisihan	Pokok	Penyisihan	Pokok	Penyisihan
Perindustrian	3.568.406	2.503.015	3.391.015	2.144.291	2.607.278	2.481.534	2.719.801	1.859.338	3.657.129	2.268.832
Perdagangan, restoran dan hotel	1.195.115	992.516	1.880.577	1.499.485	1.496.507	1.149.484	1.155.703	749.751	1.745.589	566.444
Konstruksi	538.775	432.474	560.432	429.946	401.496	317.961	270.303	141.026	634.477	405.550
Jasa dunia usaha	497.130	452.450	475.443	209.669	417.695	276.437	441.262	240.174	338.750	170.430

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PINJAMAN/PEMBIAYAAN/PIUTANG YANG DIBERIKAN (lanjutan)

d. Pinjaman bermasalah dan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

	30 September 2010		30 September 2009 (Tidak Diaudit)		31 Desember					
					2009		2008		2007	
	Pokok	Penyisihan	Pokok	Penyisihan	Pokok	Penyisihan	Pokok	Penyisihan	Pokok	Penyisihan
Pengangkutan, perdagangan dan komunikasi	387.662	264.225	226.538	79.938	252.195	146.686	106.559	29.448	173.780	32.412
Pertanian	220.227	144.759	315.690	182.835	205.118	150.480	234.757	157.837	153.393	45.658
Listrik, gas dan air	30.670	30.670	-	-	3.646	397	-	-	37.003	36.384
Jasa pelayanan sosial	29.430	21.704	50.934	44.273	55.063	33.463	46.849	32.393	35.866	4.621
Pertambangan	26.530	26.488	102.622	95.458	27.948	18.973	89.609	47.707	89.270	25.266
Lain-lain	453.230	242.493	854.808	789.999	295.299	111.620	531.094	397.996	699.677	475.687
Jumlah	6.947.175	5.110.794	7.858.059	5.475.894	5.762.245	4.687.035	5.595.937	3.655.670	7.564.934	4.031.284

Rasio pinjaman bermasalah bruto (rasio NPL-bruto) BNI (Induk Perusahaan), berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, terhadap jumlah pinjaman yang diberikan adalah sebesar 4,37%, 6,35%, 4,68%, 4,96% dan 8,18% masing-masing pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, sedangkan rasio pinjaman bermasalah bersih terhadap total pinjaman (rasio NPL-bersih) adalah sebesar 0,74%, 1,90%, 0,84%, 1,74% dan 4,01% masing-masing pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

e. Tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat %
Tingkat suku bunga per tahun:		
2010 (9 bulan)	7,72 - 16,00	2,30 - 11,25
2009 (9 bulan) (tidak diaudit)	10,50 - 14,25	10,00 - 11,50
2009	9,50 - 14,25	8,00 - 9,75
2008	12,25 - 16,00	8,00 - 11,50
2007	13,25 - 15,75	8,00 - 9,50
Tingkat bagi hasil per tahun:		
2010 (9 bulan)	13,00 - 17,75	-
2009 (9 bulan) (tidak diaudit)	1,54 - 7,20	-
2009	8,25 - 11,00	-
2008	7,25 - 11,00	-
2007	7,25 - 11,00	-

f. Pinjaman yang direstrukturisasi

Pinjaman yang direstrukturisasi meliputi antara lain pinjaman dengan penjadwalan ulang pembayaran pokok pinjaman dan bunga atau penyesuaian tingkat bunga serta penurunan tunggakan bunga.

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Pinjaman yang direstrukturisasi	8.376.779	11.933.842	11.895.545	11.274.335	11.013.744
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.419.647)	(3.133.498)	(2.601.201)	(2.125.550)	(2.703.064)
Bersih	5.957.132	8.800.344	9.294.344	9.148.785	8.310.680

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PINJAMAN/PEMBIAYAAN/PIUTANG YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f. Pinjaman yang direstrukturisasi (lanjutan)

Pinjaman yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Lancar	1.928.773	3.987.859	4.129.772	3.670.269	4.332.543
Dalam perhatian khusus	4.395.257	4.959.430	5.416.682	5.147.741	3.179.960
Kurang lancar	584.800	772.217	703.612	801.992	953.171
Diragukan	279.660	776.295	396.284	376.783	464.602
Macet	1.188.289	1.438.041	1.249.195	1.277.550	2.083.468
Jumlah	8.376.779	11.933.842	11.895.545	11.274.335	11.013.744
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.419.647)	(3.133.498)	(2.601.201)	(2.125.550)	(2.703.064)
Bersih	5.957.132	8.800.344	9.294.344	9.148.785	8.310.680

g. Kredit sindikasi

Pinjaman sindikasi merupakan pinjaman yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

Keikutsertaan BNI dalam pinjaman sindikasi dengan bank-bank lain adalah sebesar Rp11.990.985, Rp12.039.286, Rp11.842.699, Rp9.972.718 dan Rp8.247.190 masing-masing pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

Persentase bagian BNI dalam pinjaman sindikasi, dimana BNI bertindak sebagai pimpinan sindikasi adalah sebagai berikut:

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
% Partisipasi	34,00% - 63,00%	37,05% - 70,77%	26,27% - 69,04%	27,00% - 70,94%	71,16%

Keikutsertaan BNI dalam pinjaman sindikasi, dimana lembaga keuangan lain bertindak sebagai pimpinan sindikasi adalah sebagai berikut:

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
% Partisipasi	1,58% - 40,00%	1,56% - 45,00%	1,56% - 40,00%	1,56% - 40,00%	1,56% - 43,82%

h. Pinjaman yang dibeli dari BPPN

Pada tahun 2002 dan 2003, BNI membeli beberapa pinjaman dari BPPN sebagai berikut:

	Pokok Pinjaman	Harga Beli
Dibeli dari BPPN melalui program <i>swap</i> aset Obligasi Pemerintah	2.316.642	463.328
Dibeli dari pihak ketiga (PT GMT Aset Manajemen dan PT Bahtera Tjipta Sakti)	1.315.391	384.749

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PINJAMAN/PEMBIAYAAN/PIUTANG YANG DIBERIKAN (lanjutan)

h. Pinjaman yang dibeli dari BPPN (lanjutan)

	Pokok Pinjaman	Harga Beli
Dibeli dari BPPN dengan tunai	8.482	1.118
Jumlah	3.640.515	849.195

Perubahan jumlah pinjaman yang dibeli dari BPPN dan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Pokok pinjaman					
Saldo awal	-	4.502	4.502	40.230	66.507
Pelunasan pinjaman	-	-	-	(35.464)	(28.435)
Penghapusan selama periode berjalan	-	-	(4.502)	-	-
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	-	-	-	(264)	2.158
Saldo akhir	-	4.502	-	4.502	40.230
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	4.502	-	4.502	33.294

Di bawah ini adalah klasifikasi pinjaman yang dibeli dari BPPN dan penyisihan kerugian penurunan nilainya pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007:

	30 September 2010		30 September 2009 (Tidak Diaudit)		31 Desember					
					2009		2008		2007	
	Pokok	Penyisihan	Pokok	Penyisihan	Pokok	Penyisihan	Pokok	Penyisihan	Pokok	Penyisihan
Lancar	-	-	-	-	-	-	-	-	4.501	4.501
Dalam perhatian khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	28.179	28.179
Kurang lancar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diragukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macet	-	-	4.502	4.502	-	-	4.502	4.502	7.550	614
Jumlah	-	-	4.502	4.502	-	-	4.502	4.502	40.230	33.294

i. Penyisihan kerugian penurunan nilai

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	31 Desember		
			2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Saldo awal	6.920.455	5.652.046	5.652.046	5.436.203	3.846.152
Penyesuaian saldo awal sehubungan dengan penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (Catatan 49)	315.125	-	-	-	-

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PINJAMAN/PEMBIAYAAN/PIUTANG YANG DIBERIKAN (lanjutan)

i. Penyisihan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	31 Desember		
			2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Penyisihan kerugian selama periode/ tahun berjalan	2.213.913	3.134.837	3.263.472	3.865.145	2.039.334
Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan	1.086.274	409.548	741.919	555.136	482.261
Penghapusan selama periode/tahun berjalan	(3.974.170)	(728.032)	(3.330.629)	(4.245.924)	(1.110.834)
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	(32.203)	178.741	593.647	41.486	179.290
Saldo akhir	6.529.394	8.647.140	6.920.455	5.652.046	5.436.203

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Jumlah minimum penyisihan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.522.877, Rp6.661.863, Rp5.177.362, Rp3.749.357 dan Rp4.635.813 masing-masing pada tanggal 30 September 2010 dan 2009, dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

j. Kredit dihapusbukukan

Kredit yang telah dihapusbukukan oleh BNI dicatat sebagai kredit ekstra-komtabel di dalam rekening administratif. BNI terus melakukan usaha-usaha penagihan atas kredit yang telah dihapusbukukan tersebut.

k. Fasilitas pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan

BNI memiliki perjanjian pembiayaan dengan beberapa lembaga pembiayaan untuk membiayai kepemilikan kendaraan bermotor sebesar Rp4.698.093, Rp4.529.248, Rp4.178.950, Rp4.489.620 dan Rp3.070.978 masing-masing pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

Perjanjian pembiayaan dengan hak *recourse* adalah sebesar 96,01%, 83,81%, 87,24%, 70,22% dan 64,00% masing-masing pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 dari jumlah kredit yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut. Apabila terjadi tunggakan atas debitur, BNI memiliki hak *recourse* terhadap perusahaan pembiayaan yang terkait.

l. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan dalam Rupiah meliputi pembiayaan syariah sebesar Rp3.254.704, Rp3.452.393, Rp3.265.445, Rp3.165.253 dan Rp1.800.996 masing-masing pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PINJAMAN/PEMBIAYAAN/PIUTANG YANG DIBERIKAN (lanjutan)

I. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Pinjaman karyawan adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan dengan tingkat bunga sebesar 4% per tahun yang ditujukan untuk pembelian rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 15 (lima belas) tahun. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) ditanggungkan dan dicatat sebagai beban yang ditanggungkan untuk pinjaman karyawan, bagian dari aset lain-lain. Besarnya akun beban yang ditanggungkan untuk pinjaman karyawan pada tanggal 1 Januari 2010 (saldo awal) adalah Rp652.294 dan pada 30 September 2010 adalah Rp696.352 (Catatan 16).

Sehubungan dengan diterbitkannya PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran No. 7/14/DPnP tanggal 18 April 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit ("BMPK") Bank Umum, maka perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan atau keuangan, seperti Yayasan Dana Pensiun BNI, dan Anak Perusahaannya dianggap sebagai pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan BNI. Berdasarkan peraturan tersebut, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah 10% dari modal BNI.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, tidak terdapat pemberian pinjaman yang melanggar/melampaui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Indonesia.

12. OBLIGASI PEMERINTAH

Informasi mengenai jangka waktu jatuh tempo diungkapkan di Catatan 44.

	30 September 2010		30 September 2009 (Tidak Diaudit)		31 Desember					
					2009		2008		2007	
	Nilai nominal	Nilai tercatat	Nilai nominal	Nilai tercatat	Nilai nominal	Nilai tercatat	Nilai nominal	Nilai tercatat	Nilai nominal	Nilai tercatat
Nilai wajar melalui laporan laba rugi										
Rupiah										
Tingkat bunga tetap	159.806	169.812	478.455	453.734	115.500	116.673	87.550	82.465	60.225	60.326
Dolar Amerika Serikat										
Tingkat bunga tetap	330.225	361.858	-	-	4.700	4.648	-	-	9.393	8.957
Jumlah nilai wajar melalui laporan laba rugi	490.031	531.670	478.455	453.734	120.200	121.321	87.550	82.465	69.618	69.283
Tersedia untuk dijual										
Rupiah										
Tingkat bunga tetap	6.023.387	7.939.138	8.102.854	8.388.210	5.593.074	5.810.005	9.073.921	8.776.107	16.861.303	17.833.977
Tingkat bunga mengambang	16.418.814	15.814.754	16.518.814	16.092.124	16.518.814	16.090.484	16.548.814	16.082.263	17.218.814	17.135.298
Jumlah Rupiah	22.442.201	23.753.892	24.621.668	24.480.334	22.111.888	21.900.489	25.622.735	24.858.370	34.080.117	34.969.275
Dolar Amerika Serikat										
Tingkat bunga tetap	1.490.538	1.803.722	1.644.515	1.675.831	887.828	988.415	2.272.650	1.850.411	1.596.823	1.662.212
Jumlah tersedia untuk dijual	23.932.739	25.557.614	26.266.183	26.156.165	22.999.716	22.888.904	27.895.385	26.708.781	35.676.940	36.631.487
Dimiliki hingga jatuh tempo										
Rupiah										
Tingkat bunga tetap	7.612.089	6.916.943	8.628.240	7.943.772	8.672.236	7.996.751	8.572.518	7.864.067	-	-
Dolar Amerika Serikat										
Tingkat bunga tetap	31.301	31.005	-	-	32.900	32.547	-	-	-	-
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo	7.643.390	6.947.948	8.628.240	7.943.772	8.705.136	8.029.298	8.572.518	7.864.067	-	-
Jumlah Obligasi Pemerintah	32.066.160	33.037.232	35.372.878	34.553.671	31.825.052	31.039.523	36.555.453	34.655.313	35.746.558	36.700.770

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

Jumlah nominal Obligasi Pemerintah yang diterima BNI dari program rekapitalisasi adalah sebesar Rp17.745.914, Rp18.969.132, Rp18.969.132, Rp18.973.132 dan Rp19.567.132 masing-masing pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

Berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 10/177/DpG/DPNP tanggal 9 Oktober 2008 perihal Penetapan Nilai Wajar dan Reklasifikasi Surat Utang Negara (SUN), pada tanggal 23 Desember 2008, Bank telah melakukan reklasifikasi Obligasi Pemerintah diperdagangkan dan tersedia untuk dijual dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp220.000 dan Rp8.112.178 ke Obligasi Pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo. Selisih antara nilai wajar Obligasi Pemerintah tersedia untuk dijual pada tanggal reklasifikasi akan diamortisasi sampai dengan Obligasi Pemerintah tersebut jatuh tempo.

Pada tanggal 23 Desember 2008, Bank juga telah melakukan reklasifikasi Obligasi Pemerintah diperdagangkan mata uang Rupiah ke Obligasi Pemerintah tersedia untuk dijual dengan nilai nominal Rp30.000.

Pada tanggal 30 Desember 2008, Bank juga telah melakukan reklasifikasi Obligasi Pemerintah diperdagangkan mata uang asing ke Obligasi Pemerintah tersedia untuk dijual dengan nilai nominal Rp130.800.

Jumlah Obligasi Pemerintah yang dikelompokkan sebagai tersedia untuk dijual dan dijual selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

	Jumlah Dijual	Kepada Pihak Ketiga	Kepada Pihak Terkait	
		Nilai Nominal	Nilai Nominal	Nilai Nominal
Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010	3.778.355	3.730.255	48.100	50.643
Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009	5.143.295	4.753.795	389.500	435.082
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009	9.606.582	8.915.695	690.887	763.791
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008	10.067.453	9.429.453	638.000	680.310
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007	22.559.049	19.825.349	2.733.700	3.035.253

Jumlah Obligasi Pemerintah yang dibeli dari reksadana yang dikelola oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebesar Rp180.110 (nilai nominal) dengan nilai tercatat Rp195.496, Rp357.000 (nilai nominal) dengan nilai tercatat Rp340.634, Rp386.395 (nilai nominal) dengan nilai tercatat Rp374.185, Rp380.000 (nilai nominal) dengan nilai tercatat Rp393.678, dan Rp454.430 (nilai nominal) dengan nilai tercatat Rp481.107 masing-masing pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

Jumlah Obligasi Pemerintah yang telah jatuh tempo adalah sebesar Rp1.063.077 (nilai nominal), Rp54.000 (nilai nominal), Rp54.000 (nilai nominal), Rp250.000 (nilai nominal) dan Rp921.000 (nilai nominal) masing-masing pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

Harga pasar Obligasi Pemerintah berkisar antara 99,60% sampai dengan 137,66%, antara 99,50% sampai dengan 99,74%, antara 95,50% sampai dengan 99,70%, antara 95,38% sampai dengan 99,72% dan antara 99,07% sampai dengan 100,04% masing-masing pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 dari nilai nominal obligasi tingkat bunga mengambang.

Untuk tingkat bunga tetap, harga pasar Obligasi Pemerintah berkisar antara 100,43% sampai dengan 137,66%, antara 98,05% sampai dengan 121,11%, antara 89,69% sampai dengan 117,80%, antara 61,74% sampai dengan 109,04% dan antara 86,70% sampai dengan 120,91% masing-masing pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

BNI mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas peningkatan atau penurunan nilai Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual (sesudah pajak tangguhan) sebesar Rp682.180 (kerugian), Rp835.823 (kerugian), Rp887.653 (kerugian), Rp1.919.791 (kerugian) dan Rp37.090 (keuntungan) masing-masing pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 yang tercatat pada bagian ekuitas neraca konsolidasian.

Obligasi Pemerintah yang digunakan sebagai jaminan pinjaman masing-masing sebesar Rp2.400.000, Rp2.400.000, Rp2.400.000, Rp219.602 dan RpNihil pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 (Catatan 22).

Informasi Obligasi Pemerintah berdasarkan kisaran tanggal jatuh tempo

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Diperdagangkan					
Obligasi tingkat bunga tetap	15/09/2016 - 15/08/2040	15/10/2011 - 15/02/2028	12/11/2011 - 15/08/2030	12/11/2011 - 15/02/2037	15/09/2018 - 17/02/2037
Tersedia untuk dijual					
Obligasi tingkat bunga tetap	15/10/2010 - 15/07/2038	15/03/2010 - 15/07/2038	14/01/2010 - 15/07/2038	15/03/2010 - 15/07/2038	20/11/2008 - 15/05/2037
Obligasi tingkat bunga mengambang	25/04/2011 - 25/07/2020	25/04/2011 - 25/07/2020	25/04/2011 - 25/07/2020	25/04/2011 - 25/07/2020	25/04/2011 - 25/07/2020
Dimiliki hingga jatuh tempo					
Obligasi tingkat bunga tetap	15/08/2011 - 15/05/2037	14/02/2010 - 15/05/2037	15/03/2010 - 15/05/2037	30/04/2009 - 15/05/2037	-

Tingkat suku bunga tetap per tahun:

	Rupiah	Dolar
	%	Amerika Serikat %
2010 (9 bulan)	6,58 - 14,50	5,00 - 11,63
2009 (9 bulan)	9,00 - 14,50	6,63 - 8,80
2009	9,00 - 14,50	6,50 - 8,80
2008	0,00 - 14,50	6,63 - 8,50
2007	0,00 - 14,50	6,63 - 8,50

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
 serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

Tingkat suku bunga mengambang per tahun:

	Rupiah %
2010 (9 bulan)	6,58 - 6,81
2009 (9 bulan)	6,58 - 6,81
2009	6,58 - 6,59
2008	11,00 - 11,50
2007	7,83

13. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 terdiri dari:

30 September 2010 (Anak Perusahaan)							
<i>Counterparty</i>	Jenis Surat Berharga	Nilai Nominal	Tanggal Dimulai	Tanggal Jatuh Tempo	Kewajiban Penjualan Kembali	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi	Nilai Bersih
Eko Budi Siswanto	Saham	4.000	23/09/10	25/10/10	4.065	50	4.015
30 September 2009 (BNI)							
<i>Counterparty</i>	Jenis Surat Berharga	Nilai Nominal	Tanggal Dimulai	Tanggal Jatuh Tempo	Kewajiban Penjualan Kembali	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi	Nilai Bersih
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Obligasi Pemerintah	331.000	14/08/09	16/11/09	255.363	2.377	252.986
Penyisihan kerugian penurunan nilai							(2.530)
Jumlah surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih							250.456
31 Desember 2008 (BNI dan Anak Perusahaan)							
<i>Counterparties</i>	Jenis Surat-surat Berharga	Nilai Nominal	Tanggal Dimulai	Tanggal Jatuh Tempo	Kewajiban Penjualan Kembali	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi	Nilai Bersih
PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk	Obligasi Pemerintah	100.000	10/12/2008	09/01/2009	70.359	221	70.138
Batasa Capital	Obligasi	7.500	24/12/2008	25/01/2009	5.064	50	5.014
Batasa Capital	Obligasi	2.500	24/12/2008	25/01/2009	1.685	15	1.670
AAA Securities	Obligasi	5.500	15/12/2008	15/01/2009	5.015	25	4.990
Bhakti Securities	Obligasi Pemerintah	6.000	23/12/2008	23/03/2009	5.057	54	5.003
		121.500			87.180	365	86.815

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
 serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

31 Desember 2007							
<i>Counterparties</i>	Jenis Surat-surat Berharga	Nilai Nominal	Tanggal Dimulai	Tanggal Jatuh Tempo	Kewajiban Penjualan Kembali	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi	Nilai Bersih
PT Inti Karya Megah PT Handson Energy & PT Dewata Jaya International	Saham	40.000	21/11/2007	22/05/2008	43.600	2.400	41.200
PT Bapindo Bumi Sekuritas	Saham	40.000	28/11/2007 02/11/2007 - 27/12/2007	30/05/2008 07/01/2008 - 13/03/2008	42.000	1.333	40.667
		173.994			114.725	1.473	113.252
		<u>253.994</u>			<u>200.325</u>	<u>5.206</u>	<u>195.119</u>

Pada tanggal 30 September 2010, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali tidak mengalami penurunan nilai. Surat-surat berharga pada tanggal 30 September 2009, 31 Desember 2008 dan 2007 diklasifikasikan lancar.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

14. PENYERTAAN SAHAM

Penyertaan jangka panjang

	Biaya Perolehan		Bagian BNI Atas Saldo Laba (Rugi Akumulasi)			Nilai Tercatat			
	30 September	31 Desember	30 September	31 Desember	30 September	31 Desember			
	2010	2009 (Tidak Diaudit)	2010	2009 (Tidak Diaudit)	2010	2009 (Tidak Diaudit)			
Metode ekuitas	40.742	101.770	40.742	(34.703)	(92.561)	(34.412)	6.039	9.209	6.330
Metode biaya perolehan							34.994	89.819	60.460
Jumlah							41.033	99.028	66.790
Penyisihan kerugian							(5.630)	(42.730)	(15.523)
Bersih							<u>35.403</u>	<u>56.298</u>	<u>51.267</u>

	Biaya Perolehan		Bagian BNI Atas Saldo Laba (Rugi Akumulasi)		Nilai Tercatat	
	31 Desember	31 Desember	31 Desember	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2008	2007	2008	2007	2008	2007
Metode ekuitas	101.770	101.770	(95.581)	3.938	6.189	105.708
Metode biaya perolehan					130.851	40.203
Jumlah					137.040	145.911
Penyisihan kerugian					(32.387)	(11.118)
Bersih					<u>104.653</u>	<u>134.793</u>

Penyertaan jangka panjang berdasarkan kolektibilitas adalah:

	30 September	30 September	31 Desember		
	2010	2009 (Tidak Diaudit)	2009	2008	2007
Lancar	40.497	96.492	56.437	134.504	143.375
Macet	536	2.536	10.353	2.536	2.536
Jumlah	41.033	99.028	66.790	137.040	145.911

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Penyertaan jangka panjang (lanjutan)

Penyertaan jangka panjang berdasarkan kolektibilitas adalah (lanjutan):

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(5.630)	(42.730)	(15.523)	(32.387)	(11.118)
Bersih	35.403	56.298	51.267	104.653	134.793

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian di atas telah memadai.

Penyertaan jangka panjang pada perusahaan asosiasi mencakup:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan				
		30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
				2009	2008	2007
Metode ekuitas						
PT Swadharma Surya Finance	Pembiayaan	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
PT Amaswa	Jasa dunia usaha	-	-	-	-	40,00%
PT Bank Finconesia	Bank	-	-	-	-	48,51%
Metode perolehan						
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Investasi	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
PT Pembiayaan Artha Negara	Pembiayaan	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,90%
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Lembaga penyelesaian efek	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	2,50%
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Persero)	Pemeringkat efek	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,46%
PT Bank Mizuho Indonesia	Bank	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Bank	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
PT Bursa Efek Indonesia	Bursa efek	2,37%	2,37%	0,50%	2,37%	1,37%

Tidak terdapat penghapusbukuan penyertaan saham sementara masing-masing pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, kecuali untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp1.225.177.

15. ASET TETAP

Aset tetap kepemilikan langsung:

	30 September 2010				
	Saldo Awal 1 Januari 2010	Penambahan	Pengurangan	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan	Saldo Akhir 30 September 2010
Biaya perolehan					
Tanah	1.717.130	4.041	(4.064)	436	1.717.543
Bangunan	1.968.795	211.153	(24.322)	(7.629)	2.147.997
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	3.885.805	206.455	(55.152)	(187)	4.036.921
Jumlah biaya perolehan	7.571.730	421.649	(83.538)	(7.380)	7.902.461

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap kepemilikan langsung (lanjutan):

	30 September 2010				
	Saldo Awal 1 Januari 2010	Penambahan	Pengurangan	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan	Saldo Akhir 30 September 2010
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	722.557	91.929	(6.139)	(7.168)	801.179
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	3.141.233	250.960	(41.933)	510	3.350.770
Jumlah akumulasi penyusutan	3.863.790	342.889	(48.072)	(6.658)	4.151.949
Nilai buku bersih	3.707.940				3.750.512

	30 September 2009 (Tidak Diaudit)				
	Saldo Awal 1 Januari 2009	Penambahan	Pengurangan	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan	Saldo Akhir 30 September 2009
Biaya perolehan					
Tanah	1.723.498	6	(8.741)	(1.100)	1.713.663
Bangunan	2.008.418	164.937	(258.633)	(25.067)	1.889.655
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	3.554.222	193.343	(35.749)	(11.445)	3.700.371
Jumlah biaya perolehan	7.286.138	358.286	(303.123)	(37.612)	7.303.689
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	648.779	86.033	(764)	(20.385)	713.663
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	2.904.466	234.137	(31.680)	(9.835)	3.097.088
Jumlah akumulasi penyusutan	3.553.245	320.170	(32.444)	(30.220)	3.810.751
Nilai buku bersih	3.732.893				3.492.938

	31 Desember 2009				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan	Saldo Akhir
Biaya perolehan					
Tanah	1.723.498	33.159	(37.915)	(1.612)	1.717.130
Bangunan	2.008.418	260.359	(269.362)	(30.620)	1.968.795
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	3.554.222	409.591	(63.825)	(14.183)	3.885.805
Jumlah biaya perolehan	7.286.138	703.109	(371.102)	(46.415)	7.571.730
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	648.779	100.989	(1.289)	(25.922)	722.557
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	2.904.466	307.953	(58.785)	(12.401)	3.141.233
Jumlah akumulasi penyusutan	3.553.245	408.942	(60.074)	(38.323)	3.863.790
Nilai buku bersih	3.732.893				3.707.940

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. ASET TETAP (lanjutan)

Berdasarkan laporan dari perusahaan penilai, BNI telah membukukan selisih penilaian kembali aset tetap sebesar Rp1.185.971, sehingga jumlah selisih penilaian kembali aset tetap menjadi Rp1.190.598 pada tanggal 31 Desember 2001. Kantor Pelayanan Pajak telah menyetujui selisih penilaian kembali aset tetap sebesar Rp1.160.410 sesuai dengan suratnya No.KEP-04/WPJ.06/KP.0104/2001 tanggal 14 Desember 2001. Dalam menentukan nilai wajar, perusahaan penilai independen menggunakan pendekatan "metode perbandingan data pasar" untuk tanah dan "metode kalkulasi biaya" untuk bangunan.

Pada tahun 2003, BNI telah melakukan penilaian kembali atas seluruh aset tetap sehubungan dengan kuasi-reorganisasi, yang dilakukan oleh perusahaan penilai independen yang sama (PT Ujatek Baru). Dalam menentukan nilai wajar, perusahaan penilai menggunakan pendekatan "metode perbandingan data pasar" untuk tanah dan "metode kalkulasi biaya" untuk bangunan dan perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor.

Berdasarkan laporan dari perusahaan penilai independen, nilai wajar dari aset tetap BNI adalah sebesar Rp4.194.026, sehingga selisih penilaian kembali aset tetap bertambah sebesar Rp1.545.680. Kantor Pelayanan Pajak telah menyetujui selisih penilaian kembali sebesar Rp1.664.621 berdasarkan nilai buku bersih aset tetap fiskal dalam suratnya No. KEP-430/WPJ.07/BD.03/2003 tanggal 6 November 2003.

Selisih penilaian kembali aset tetap tahun 2001 sebesar Rp1.190.598 dan tahun 2003 sebesar Rp1.545.680 telah dieliminasi dengan akumulasi kerugian pada tanggal 30 Juni 2003, sehubungan dengan tujuan kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2003.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Aset tetap telah diasuransikan sebagian besar pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu PT Tripakarta dengan nilai pertanggungan yang menurut manajemen adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tersebut.

Tidak ada aset tetap yang dijaminkan.

16. ASET LAIN-LAIN - BERSIH

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Piutang lain-lain					
BNI	301.700	325.729	392.727	165.688	464.517
Anak Perusahaan:					
Piutang dari PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)	359.409	153.334	186.127	77.034	145.957
Piutang nasabah (PT BNI Securities)	282.387	232.488	128.010	44.959	333.119
Piutang pembiayaan	76.577	68.495	80.188	99.121	103.522
Piutang premi asuransi	6.809	14.747	2.171	12.838	10.681
Lain-lain	62.280	10.666	72.497	17.561	14.593
Sub-jumlah piutang lain-lain	1.089.162	805.459	861.720	417.201	1.072.389
Biaya dibayar di muka	794.319	611.874	393.805	432.029	304.602
Beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan	696.352	-	-	-	-
Piutang bunga	685.701	806.607	882.599	1.124.086	930.736
Aset dalam penyelesaian	226.316	209.686	301.220	26.968	51.015
Dividen dibayar di muka	-	-	144.252	-	-
Persediaan keperluan kantor	59.216	50.579	64.341	51.192	34.041

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET LAIN-LAIN - BERSIH (lanjutan)

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Investasi sewa guna usaha setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp535 pada periode 2010 Rp690 pada periode 2009 Rp516 pada tahun 2009 Rp698 pada tahun 2008 dan Rp250 pada tahun 2007	55.179	23.730	34.245	25.251	3.262
Tagihan anjak piutang - bersih Aset tidak digunakan dalam operasional - bersih	24.291	24.233	22.801	18.818	467
Tagihan atas lebih bayar pajak Agunan yang diambil alih setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp212.612 pada periode 2010 Rp220.032 pada periode 2009 Rp220.032 pada tahun 2009 Rp208.703 pada tahun 2008 dan Rp194.136 pada tahun 2007	5.339	5.249	5.339	8.923	19.023
Setoran jaminan <i>Letters of Credit</i> Lain-lain setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp135.722 pada periode 2010 Rp294.203 pada periode 2009 Rp181.756 pada tahun 2009 Rp349.707 pada tahun 2008 Rp325.466 pada tahun 2007	-	-	-	-	90.531
	-	6.475	-	20.212	64.703
	-	-	-	-	4.256
	639.883	294.812	188.084	354.925	224.660
Jumlah - Bersih	4.275.758	2.838.704	2.898.406	2.479.605	2.799.685

Piutang bunga termasuk bunga yang berasal dari Obligasi Pemerintah sebesar Rp393.310, Rp467.274, Rp552.517, Rp735.193 dan Rp655.793 masing-masing pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

Dividen dibayar di muka adalah pembagian dividen interim tahun buku 2009 berdasarkan laba bersih Bank yang diperoleh dalam 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp9,44 (nilai penuh) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp144.252 yang telah disetujui oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/228/DIR/R tanggal 5 November 2009. Dividen interim tahun buku 2009 tersebut akan diperhitungkan dalam menetapkan dividen final dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank untuk tahun buku 2009 (Catatan 27).

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas aset-aset yang disebutkan di atas telah memadai. Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat agunan yang diambil alih tersebut merupakan nilai bersih yang dapat direalisasi.

17. KEWAJIBAN SEGERA

Kewajiban segera terdiri dari kiriman uang, dana setoran cek, deposito yang sudah jatuh tempo tapi belum diambil nasabah, transaksi kliring, setoran pajak yang diterima oleh BNI sebagai bank persepsi dan simpanan sementara yang belum diselesaikan.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. SIMPANAN NASABAH

Informasi mengenai simpanan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa diungkapkan pada Catatan 38. Informasi mengenai jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 44.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Rupiah					
Giro	31.059.568	28.127.228	35.677.773	33.516.780	35.999.731
Tabungan	57.511.135	52.262.948	58.793.567	52.342.763	47.923.722
Deposito berjangka	59.640.353	55.147.926	59.329.965	51.738.027	40.371.782
	<u>148.211.056</u>	<u>135.538.102</u>	<u>153.801.305</u>	<u>137.597.570</u>	<u>124.295.235</u>
Mata uang asing					
Giro	15.053.444	10.605.496	9.410.350	8.614.343	6.998.669
Tabungan	212.242	27.557	27.448	14.508	216.148
Deposito berjangka	20.295.069	17.482.871	25.229.884	16.937.937	14.678.494
	<u>35.560.755</u>	<u>28.115.924</u>	<u>34.667.682</u>	<u>25.566.788</u>	<u>21.893.311</u>
Jumlah	<u>183.771.811</u>	<u>163.654.026</u>	<u>188.468.987</u>	<u>163.164.358</u>	<u>146.188.546</u>

Perincian simpanan nasabah dalam mata uang asing per 30 September 2010 adalah Rp34.290.223 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Rp506.344 dalam mata uang Dolar Singapura, Rp482.795 dalam mata uang Euro, Rp149.691 dalam mata uang Yen Jepang dan Rp131.702 dalam mata uang asing lainnya.

Simpanan nasabah berdasarkan prinsip syariah termasuk di dalamnya adalah giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* merupakan simpanan *wadiah yad-dhamanah* dimana pemilik dana akan mendapatkan pendapatan bonus. Pada tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, jumlah giro *wadiah* masing-masing sebesar Rp778.583, Rp446.149, Rp416.975, Rp355.362 dan Rp206.853. Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009, jumlah tabungan *wadiah* masing-masing sebesar Rp84.873 dan Rp21.370.

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana dimana pemilik dana akan mendapatkan imbalan bagi hasil atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan sebelumnya. Pada tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, jumlah tabungan *mudharabah* masing-masing sebesar Rp1.661.727, Rp1.391.032, Rp1.581.730, Rp1.202.191 dan Rp833.492.

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan simpanan deposito dari pihak lain yang memberikan bagian dari pendapatan atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Pada tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, jumlah deposito berjangka *mudharabah* masing-masing sebesar Rp2.377.384, Rp1.899.696, Rp2.142.289, Rp1.473.534 dan Rp748.437.

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku dan saat ini BNI adalah peserta dari program tersebut.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" maka nilai simpanan setiap nasabah pada satu bank yang dijamin oleh Pemerintah naik menjadi sebesar Rp2 miliar dari semula Rp100 juta, efektif sejak tanggal tersebut di atas.

Salah satu syarat pelaksanaan jaminan Pemerintah adalah untuk pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Unit Pelayanan Penjaminan Pemerintah (sebelumnya BPPN).

b. Tabungan berdasarkan jenis

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Tabungan BNI	55.095.131	50.188.598	56.402.317	50.524.643	46.863.507
Tabungan Syariah	1.746.600	1.412.402	1.613.981	1.204.738	837.187
Tabungan Haji	881.646	689.505	804.717	627.890	439.176
Jumlah	57.723.377	52.290.505	58.821.015	52.357.271	48.139.870

c. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan (Catatan 11)

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Giro	595.413	11.240	14.199	8.118	489.563
Tabungan	197.544	10.020	12.189	8.488	230.753
Deposito berjangka	153.024	576.947	570.886	400.510	262.727
Jumlah	945.981	598.207	597.274	417.116	983.043

d. Tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun

	Rupiah	Dolar
	%	Amerika Serikat %
Tingkat suku bunga per tahun:		
2010 (9 bulan)	0,50 - 10,25	0,00 - 4,00
2009 (9 bulan)	0,00 - 13,00	0,00 - 5,00
2009	0,00 - 12,50	0,00 - 5,00
2008	1,00 - 11,75	0,05 - 4,50
2007	1,00 - 9,75	3,07 - 5,74
Indikasi bagi hasil per tahun:		
2010 (9 bulan)	0,00 - 10,00	0,00 - 5,00
2009 (9 bulan)	1,39 - 7,72	-
2009	1,47 - 8,24	0,77 - 1,54
2008	2,39 - 8,79	1,43 - 1,89
2007	2,36 - 9,19	1,43 - 1,74

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Informasi mengenai jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 44.

Berdasarkan jenis dan mata uang

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Rupiah					
Giro	343.994	251.888	301.219	301.552	32.926
Deposito dan <i>deposits on call</i>	428.756	122.136	584.884	-	-
<i>Call money</i> /simpanan pasar uang antar bank	-	425.000	61.000	85.000	125.000
Jumlah Rupiah	772.750	799.024	947.103	386.552	157.926
Mata uang asing					
Giro	335.843	255.952	242.739	116.895	53.188
Deposito dan <i>deposits on call</i>	2.046.481	2.439.792	2.629.307	1.798.085	469.649
<i>Call money</i> /simpanan pasar uang antar bank	-	-	-	1.798.500	3.123.173
Jumlah mata uang asing	2.382.324	2.695.744	2.872.046	3.713.480	3.646.010
Jumlah	3.155.074	3.494.768	3.819.149	4.100.032	3.803.936

Perincian simpanan dari bank lain dalam mata uang asing per 30 September 2010 adalah Rp1.800.662 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Rp325.705 dalam mata uang Dolar Singapura, Rp254.395 dalam mata uang Yen Jepang, Rp1.562 dalam mata uang Dolar Hong Kong.

Informasi mengenai tingkat suku bunga per tahun:

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat %
2010 (9 bulan)	0,00 - 6,25	0,00 - 2,25
2009 (9 bulan)	0,00 - 8,00	0,00 - 2,99
2009	0,00 - 8,00	0,00 - 4,25
2008	0,50 - 10,25	1,95 - 6,75
2007	0,50 - 3,13	5,05 - 5,91

20. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri dari:

31 Desember 2008							
Counterparty	Jenis Surat-surat Berharga	Nilai Nominal	Tanggal Dimulai	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Beli Kembali	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Bersih
Standard Chartered Bank	Obligasi Pemerintah -VR0020	625.000	08/09/2008	08/09/2009	625.000	-	625.000

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. SURAT-SURAT BERTAHAP YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

31 Desember 2007							
<i>Counterparty</i>	Jenis Surat-surat Bertahap	Nilai Nominal	Tanggal Dimulai	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Beli Kembali	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Bersih
Bank Indonesia	Sertifikat Bank Indonesia	200.000	28/12/2007	02/01/2008	199.528	(122)	199.406

Pada tahun 2008, BNI memiliki Obligasi Pemerintah seri VR0020 kategori tersedia untuk dijual (Catatan 12) yang dijual kepada Standard Chartered Bank, Jakarta dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulai kontrak, BNI menerima dana sebesar Rp625.000 dari Standard Chartered Bank, Jakarta dan menjual dengan janji dibeli kembali obligasi tersebut dengan nilai nominal sebesar Rp625.000 kepada Standard Chartered Bank, Jakarta.

BNI dikenakan bunga oleh Standard Chartered Bank, Jakarta, sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia tiga bulan ditambah 1,90% yang terutang setiap triwulan atau berdasarkan aturan yang terdapat pada Obligasi Pemerintah. Standard Chartered Bank, Jakarta, membayar kepada BNI jumlah kupon yang diterima oleh pemegang dari obligasi tersebut. Dalam kontrak penjualan ini, BNI diwajibkan untuk menanamkan sebagian dana yang diterimanya, yaitu sebesar Rp125.000 pada Standard Chartered Bank, Jakarta, selama periode kontrak. Atas penempatan tersebut, Standard Chartered Bank, Jakarta, akan memberikan bunga sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia tiga bulan ditambah dengan 1,90% yang akan dibayarkan setiap triwulan atau berdasarkan aturan yang terdapat dalam Obligasi Pemerintah.

Pada saat jatuh tempo, BNI akan membayarkan kepada Standard Chartered Bank, Jakarta sebesar Rp625.000 dan menerima kembali Obligasi Pemerintah seri VR0020 dengan nilai nominal sebesar Rp625.000.

Pada tahun 2007, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan nilai tercatat Rp199.360 (nilai tunai sebesar Rp200.000) (Catatan 7) dijual pada tanggal 28 Desember 2007 yang mengacu pada perjanjian untuk pembelian kembali di dalam perjanjian tersebut, BNI menjual SBI sebesar Rp199.224 dengan janji membeli kembali pada harga sebesar Rp199.528 pada tanggal 2 Januari 2008.

21. SURAT-SURAT BERTAHAP YANG DITERBITKAN

Informasi mengenai jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 44.

a. Berdasarkan jenis

	30 September 2010		30 September 2009 (Tidak Diaudit)		31 Desember					
					2009		2008		2007	
	Saldo	Peringkat	Saldo	Peringkat	Saldo	Peringkat	Saldo	Peringkat	Saldo	Peringkat
Obligasi-BNI, setelah dikurangi premi penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp1.126 pada periode 2010, Rp2.560 pada periode 2009, Rp2.202 pada tahun 2009, Rp3.636 pada tahun 2008, dan Rp5.071 pada tahun 2007	998.874	idAA*)	997.440	idAA-*)	997.798	idAA-*)	996.364	idAA-*)	989.388	idA+*)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

	30 September 2010		30 September 2009 (Tidak Diaudit)		31 Desember					
					2009		2008		2007	
	Saldo	Peringkat	Saldo	Peringkat	Saldo	Peringkat	Saldo	Peringkat	Saldo	Peringkat
Obligasi-Anak Perusahaan, setelah dikurangi premi penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp1.641 pada periode 2010, Rp2.506 pada periode 2009, Rp2.290 pada tahun 2009, Rp3.272 pada tahun 2008, dan Rp4.253 pada tahun 2007	277.671	idBBB*)	269.681	idBBB	262.952	idBBB*)	272.878	idBBB*)	279.747	idBBB+*)
Jumlah	1.276.545		1.267.121		1.260.750		1.269.242		1.269.135	

*) PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Pada tanggal 14 Juli 2003, BNI menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar Rp1 triliun dan tercatat di Bursa Efek Surabaya (sekarang BEI). Obligasi tersebut bersifat tidak dijamin dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2011. Obligasi tersebut memiliki tingkat bunga tetap sebesar 13,125% per tahun dan dibayarkan setiap kwartal. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh PT Pefindo dengan rating idA- (A minus). Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 10 Mei 2007, Anak Perusahaan (BNI Securities) menerbitkan dan mendaftarkan obligasi I BNI Securities tahun 2007 dengan tingkat bunga tetap 12,00% per tahun dengan nominal sebesar Rp300 miliar pada Bursa Efek Surabaya (BEI). Bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap triwulan mulai tanggal 10 Agustus 2007. Obligasi tersebut berjangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2012. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh PT Pefindo dengan rating idBBB+ (BBB plus).

Manajemen BNI dan Anak Perusahaan berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

b. Berdasarkan mata uang

Semua surat-surat berharga yang diterbitkan adalah dalam mata uang Rupiah.

c. Tingkat suku bunga per tahun

	Rupiah %
2010 (9 bulan)	12,00 - 13,125
2009 (9 bulan)	12,00 - 13,125
2009	12,00 - 13,125
2008	12,00 - 13,125
2007	12,00 - 13,125

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA

Informasi mengenai jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 44.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Rupiah					
Kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya	55.278	116.739	92.669	173.296	324.603
Pinjaman penerusan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> yang diterima	34.297	140.059	49.299	70.146	91.541
Lain-lain	-	200.000	200.000	-	-
	165.898	47.452	76.493	84.531	66.122
Jumlah Rupiah	255.473	504.250	418.461	327.973	482.266
Mata uang asing					
<i>Bankers acceptance</i>	2.152.597	1.627.680	1.533.857	3.815.364	2.195.825
Pinjaman penerusan	94.460	87.296	88.468	82.489	62.010
Pinjaman luar negeri dan lain-lain	2.682.538	5.517.970	3.529.019	4.391.043	3.569.050
Jumlah mata uang asing	4.929.595	7.232.946	5.151.344	8.288.896	5.826.885
Jumlah	5.185.068	7.737.196	5.569.805	8.616.869	6.309.151

Pembiayaan *Mudharabah* yang diterima

Akun ini merupakan Fasilitas Pembiayaan I yang diperoleh dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (PT SMF) yang ditujukan untuk pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) kepada debitur Bank.

Fasilitas Pembiayaan I dari PT SMF di atas tertuang dalam Akad *Mudharabah* No. 020/AKAD/SMF-BNIS/VII/2009 dan No. USY/7/24/2009 tanggal 22 Juli 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Akad *Mudharabah* No. 034/PERUB.AKAD/SMF-BNIS/IX/2009 dan No. USY/6/27/2009 tanggal 3 September 2009. Plafon pinjaman untuk Fasilitas Pembiayaan I sebesar Rp200.000 dengan jangka waktu pinjaman 12 (dua belas) bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 3 September 2010.

Porsi *nisbah* yang disepakati per tahun atas fasilitas pinjaman ini adalah sebesar 87,5% untuk PT SMF dan 12,5% untuk Bank dan bersifat tetap selama 1 (satu) tahun. Pembayaran pokok Fasilitas Pembiayaan I dibayar pada tanggal jatuh tempo.

Jaminan pinjaman atas fasilitas pembiayaan adalah tagihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan kriteria tertentu termasuk hak agunan yang melekat atas tagihan tersebut dengan jumlah minimum sebesar 125% dari nilai plafon pinjaman pada saat penandatanganan perjanjian dan wajib dikelola minimum sebesar 100% dari saldo pinjaman sampai jatuh tempo.

Kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya

Merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia terutama ditujukan untuk debitur BNI sehubungan dengan program kredit Pemerintah untuk pinjaman investasi usaha kecil, pinjaman modal kerja dan pinjaman pengusaha kecil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, manajemen program kredit likuiditas telah dialihkan ke PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Badan Usaha Milik Negara, yang akan jatuh tempo dalam beberapa tanggal, berdasarkan penyelesaian dari program-program tersebut.

Tingkat bunga atas fasilitas ini berkisar antara 3% sampai 7% per tahun.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Pinjaman penerusan

Pinjaman penerusan terdiri dari fasilitas pinjaman dalam Rupiah dan mata uang asing yang diperoleh dari beberapa lembaga pembiayaan internasional melalui Bank Indonesia dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (dahulu PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), Badan Usaha Milik Negara) yang ditujukan untuk membiayai proyek-proyek tertentu di Indonesia dan untuk membiayai wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan *letters of credit* ekspor dan impor. Pinjaman ini memiliki beberapa jangka waktu jatuh tempo mulai dari 2004 sampai 2017.

Tingkat bunga rata-rata per tahun atas fasilitas tersebut berkisar antara 1,25% sampai dengan 7,83% pada tahun-tahun 2010, 2009, 2008 dan 2007. Bunga dibayar setiap enam bulan.

Pinjaman penerusan pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 di atas mencakup pinjaman penerusan dari Asian Development Bank untuk pembiayaan *Small Medium Enterprise Export Development Project* yang diterima pada tahun 2004. Berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara BNI dan Departemen Keuangan No. SLA-1162/DP3/2004 tertanggal 5 Februari 2004, Pemerintah telah menyetujui BNI sebagai bank pelaksana dengan jumlah fasilitas tidak melebihi USD20 juta dan jangka waktu penarikan dana selama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu pinjaman penerusan ini adalah 15 (lima belas) tahun, termasuk masa tenggang selama 3 (tiga) tahun.

Bankers acceptance

Bankers acceptance merupakan pinjaman antar bank yang diperoleh BNI dari bank-bank luar negeri yang ditujukan untuk meningkatkan likuiditas.

Pinjaman luar negeri dan lain-lain

Termasuk dalam pinjaman luar negeri dan lain-lain adalah fasilitas pinjaman di bawah ini:

Pada tanggal 15 November 2006, BNI memiliki pinjaman bilateral yang diberikan oleh beberapa bank kepada BNI cabang luar negeri (BNI cabang Hong Kong, London dan Tokyo), dimana Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited bertindak sebagai agen. Pinjaman ini terbagi dalam *Tranche 1* sebesar USD50 juta dengan tingkat suku bunga LIBOR ditambah 0,45% per tahun dan *Tranche 2* sebesar USD100 juta dengan tingkat suku bunga LIBOR ditambah 0,60%.

Pinjaman *Tranche 1* dan *Tranche 2* tersebut telah jatuh tempo dan telah dilunasi oleh BNI, masing-masing pada tanggal 17 November 2008 dan 16 November 2009.

Pada tanggal 19 Desember 2007, BNI memiliki pinjaman bilateral yang diberikan oleh Wachovia Bank kepada BNI cabang Tokyo sebesar USD100 juta dengan tingkat suku bunga LIBOR ditambah 0,40%. Pinjaman itu jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2008 dan telah dilunasi.

Pada tanggal 4 September 2008, BNI memiliki pinjaman bilateral yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan umum dan kebutuhan *trade finance*, masing-masing dengan Standard Chartered Bank Singapura sebesar USD150 juta dengan tingkat suku bunga 3,31% dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Maret 2011. Selanjutnya untuk membiayai hal yang sama, pada tanggal 18 Mei 2009 BNI memiliki pinjaman bilateral dengan Standard Chartered Bank Jakarta sebesar USD150 juta dengan tingkat suku bunga LIBOR ditambah 2,75% dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2014.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b. Tingkat suku bunga per tahun

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat %
2010 (9 bulan)	2,95 - 11,00	1,04 - 7,75
2009 (9 bulan)	3,00 - 11,00	1,04 - 7,75
2009	3,00 - 11,00	1,04 - 7,75
2008	3,00 - 20,40	0,50 - 6,00
2007	3,00 - 10,64	1,33 - 6,41

Pembatasan dari persyaratan perjanjian di atas antara lain bahwa BNI dapat meyakini kepemilikan saham, langsung dan tidak langsung yang dimiliki dan dikontrol oleh Pemerintah Indonesia adalah sekurang-kurangnya lima puluh satu persen (51%).

23. PERPAJAKAN

a. Hutang pajak

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
BNI					
Pajak penghasilan badan					
- Pasal 29	429.372	66.454	143	368.771	-
- Pasal 25	115.773	71.173	71.773	89.149	65.600
Pajak penghasilan lainnya	9.270	19.203	17.634	139.262	77.556
	554.415	156.830	89.550	597.182	143.156
Anak Perusahaan	8.415	6.020	4.486	2.064	8.223
Jumlah	562.830	162.850	94.036	599.246	151.379

b. Beban pajak

	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	31 Desember		
			2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
BNI					
Kini	(1.165.525)	(654.071)	(874.252)	(1.130.743)	(960.164)
Tangguhan	(136.583)	165.283	(99.944)	394.203	381.312
Pajak penghasilan - BNI	(1.302.108)	(488.788)	(974.196)	(736.540)	(578.852)
Anak Perusahaan	9.057	955	16.966	30.060	(544)
Jumlah	(1.293.051)	(487.833)	(957.230)	(706.480)	(579.396)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian dan taksiran penghasilan kena pajak pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	31 Desember		
			2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi konsolidasian	4.248.608	2.342.636	3.443.949	1.932.385	1.481.140
Rugi (Laba) sebelum pajak penghasilan - Anak Perusahaan	7.703	1.058	14.242	26.641	(4.360)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak (lanjutan)

	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	31 Desember		
			2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Laba sebelum pajak penghasilan - BNI	4.256.311	2.343.694	3.458.191	1.959.026	1.476.780
Perbedaan temporer (Pembalikan penyisihan) penyisihan kerugian penurunan nilai aktiva produktif - selain pinjaman yang diberikan	(196.300)	(65.615)	26.783	358.153	(87.355)
(Pembalikan penyisihan) penyisihan <i>legal, fraud</i> dan lainnya	(32)	(3.780)	(3.799)	32.055	(15.745)
(Pembalikan penyisihan) penyisihan imbalan kerja	(83.117)	1.382	(122.908)	142.836	484.859
Penyisihan (Pembalikan penyisihan) kerugian penurunan nilai aktiva produktif -pinjaman yang diberikan	331.410	82.589	(160.325)	1.100.118	800.390
Penyusutan aset tetap	82.701	(220.780)	(319.939)	(108.685)	88.894
Jumlah perbedaan temporer	134.662	(206.204)	(580.188)	1.524.477	1.271.043
Perbedaan tetap Kenikmatan karyawan Saham pada rugi (laba) bersih perusahaan asosiasi	22.390	21.729	37.973	41.684	13.051
(Pembalikan penyisihan) penyisihan kerugian penurunan nilai aktiva produktif dan non produktif	(102.087)	184.981	(178.001)	142.333	130.602
Lain-lain	327.530	11.515	407.511	33.993	9.975
Jumlah perbedaan tetap	271.128	198.480	244.325	285.702	452.782
Penghasilan kena pajak - BNI	4.662.101	2.335.970	3.122.328	3.769.205	3.200.605

Beban pajak penghasilan periode berjalan dan taksiran hutang pajak penghasilan BNI adalah sebagai berikut:

	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	31 Desember		
			2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Beban pajak penghasilan sesuai tarif pajak yang berlaku (tarif progresif)					
10% x Rp50	-	-	-	5	5
15% x Rp50	-	-	-	7	7
25% x Rp4.662.101	1.165.525	-	-	-	-
28% x Rp2.335.970	-	654.071	-	-	-
28% x Rp3.122.328	-	-	874.252	-	-
30% x Rp3.769.105	-	-	-	1.130.731	-
30% x Rp3.200.605	-	-	-	-	960.152
Beban pajak penghasilan	1.165.525	654.071	874.252	1.130.743	960.164
Pajak dibayar di muka	(736.153)	(587.617)	(874.109)	(761.972)	(1.050.695)
Hutang pajak (tagihan atas lebih bayar) penghasilan - BNI	429.372	66.454	143	368.771	(90.531)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Aset (kewajiban) pajak tangguhan

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah konsisten dengan pajak penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Kantor Pajak.

Aset (kewajiban) pajak tangguhan pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 merupakan pengaruh beda pajak dengan rincian sebagai berikut:

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Penyisihan kerugian penurunan nilai aktiva produktif - selain pinjaman yang diberikan	128.074	267.520	221.660	248.097	50.075
Penyisihan kerugian penurunan nilai aktiva produktif - pinjaman yang diberikan	518.443	615.436	487.862	475.673	240.117
Penyusutan aset tetap	(88.575)	(46.759)	(67.900)	21.683	44.076
Penyisihan imbalan kerja	220.533	337.758	270.270	269.470	284.969
Penyisihan <i>legal, fraud</i> dan lainnya	26.314	32.645	29.481	26.394	27.875
Rugi yang belum direalisasi atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual	248.354	465.737	359.488	906.731	37.779
Aset pajak tangguhan BNI - bersih	1.053.143	1.672.337	1.300.861	1.948.048	684.891
Aset pajak tangguhan Anak Perusahaan - bersih	65.591	42.038	58.050	41.083	25.864
Aset pajak tangguhan konsolidasian - bersih	1.118.734	1.714.375	1.358.911	1.989.131	710.755

Pada September 2008, Undang-undang No. 7 tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008. Perubahan tersebut mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun pajak 2009 dan 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya.

d. Surat ketetapan pajak

Pada bulan Maret 2009, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak 2007, yang menetapkan kurang bayar untuk Pajak Pertambahan Nilai *Murabahah* sebesar Rp150.083 termasuk bunga dan denda. BNI telah mengajukan keberatan pada bulan Juni 2009, namun ditolak oleh Ditjen Pajak sehingga diajukan permohonan banding oleh BNI ke Pengadilan Pajak tanggal 22 Maret 2010 dan sebagai salah satu syarat banding atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut telah dibayar 50% pada tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp75.042.

Sampai dengan 30 September 2010, belum terdapat keputusan mengenai pengajuan banding tersebut.

24. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Hutang ke pemegang polis	1.858.439	1.262.108	1.328.184	892.943	816.444
Biaya yang masih harus dibayar	968.096	597.289	792.098	765.508	707.923
Imbalan kerja (Catatan 35)	911.815	1.105.677	985.270	1.095.076	949.898

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. KEWAJIBAN LAIN-LAIN (lanjutan)

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Setoran jaminan	729.204	418.598	427.383	487.701	404.481
Hutang bunga	232.176	301.937	316.159	427.199	250.282
Nota kredit dalam penyelesaian	161.567	201.184	160.537	189.970	-
Pendapatan yang belum diakui	94.544	333.235	406.152	322.891	245.825
Lain-lain	1.389.284	844.320	717.892	482.507	944.008
Jumlah	6.345.125	5.064.348	5.133.675	4.663.795	4.318.861

Kewajiban lain-lain termasuk di dalamnya adalah penyisihan atas perkara hukum untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp87.352, Rp87.352, Rp87.352, Rp89.629 dan Rp52.841.

25. PINJAMAN SUBORDINASI

Pinjaman subordinasi tahun 2003 - USD100 juta

Pada tanggal 14 Juli 2003, BNI menerbitkan surat berharga subordinasi dengan nilai nominal sebesar USD100 juta dan dicatat di Bursa Efek Surabaya (sekarang BEI). Surat berharga ini adalah kewajiban subordinasi BNI dan bersifat *unsecured*. Surat berharga ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2013.

Surat berharga ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 7,5% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan. Kecuali dilunasi lebih awal, tingkat bunga akan ditentukan kembali berdasarkan tingkat bunga Treasury Amerika Serikat dengan jangka waktu 5 (lima) tahun ditambah premi 7,74% (774 *basis points*) per tahun mulai 10 Juli 2008. Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 10 Juli 2008, BNI mengambil opsi untuk melunasi pinjaman subordinasi ini setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

26. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR

Modal Saham

Pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, kepemilikan modal saham adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	30 September 2010		
	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase kepemilikan (%)	Jumlah
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	-	-
Saham Seri B			
Negara Republik Indonesia	217.006.399	1,42	1.627.548
Fero Poerbonegoro (Komisaris)	2.000	-	15
Karyawan	6.500.267	0,04	48.752

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Modal Saham (lanjutan)

Pemegang saham	30 September 2010		
	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase kepemilikan (%)	Jumlah
Masyarakat (kepemilikan masing-masing di bawah 5% untuk setiap pihak)	65.833.200	0,43	493.693
Jumlah saham Seri B	289.341.866	1,89	2.170.008
Saham Seri C			
Negara Republik Indonesia	11.446.082.745	74,94	4.292.281
Perseroan terbatas (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	1.559.037.113	10,21	584.639
Badan usaha asing (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	882.048.516	5,77	330.768
Gatot M. Suwondo (Direktur Utama)	538.000	-	202
Fero Poerbonegoro (Komisaris)	2.000	-	194
Sutanto (Direktur)	22.500	-	192
Adi Setianto (Direktur)	17.000	-	163
Krishna R. Suparto (Direktur)	75.000	-	28
Suwoko Singoastro (Direktur)	36.923	-	14
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	1.096.738.846	7,19	410.799
Jumlah saham Seri C	14.984.598.643	98,11	5.619.280
Jumlah	15.273.940.510	100,00	7.789.288

Pemegang saham	30 September 2009 (Tidak Diaudit)		
	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase kepemilikan (%)	Jumlah
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	-	-
Saham Seri B			
Negara Republik Indonesia	217.006.399	1,42	1.627.548
Achmad Baiquni (Direktur)	7.500	-	56
Fero Poerbonegoro (Komisaris)	2.000	-	15
Karyawan	6.500.267	0,04	48.752
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	65.825.700	0,43	493.693
Jumlah saham Seri B	289.341.866	1,89	2.170.064

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Modal Saham (lanjutan)

Pemegang saham	30 September 2009 (Tidak Diaudit)		
	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase kepemilikan (%)	Jumlah
Saham Seri C			
Negara Republik Indonesia Perseroan terbatas	11.446.082.745	74,94	4.292.281
(kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	1.559.037.113	10,21	584.639
Badan usaha asing			
(kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	882.048.516	5,77	330.768
Gatot M. Suwondo (Direktur Utama)	538.000	-	202
Fero Poerbonegoro (Komisaris)	519.000	-	194
Bien Subiantoro (Direktur)	513.000	-	192
Achmad Baiquni (Direktur)	436.000	-	163
Parikesit Suprpto (Komisaris)	276.000	-	104
Krishna R. Suparto (Direktur)	143.284	-	54
Suwoko Singoastro (Direktur)	36.923	-	14
Darwin Suzandi (Direktur)	23.500	-	9
Masyarakat			
(kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	1.094.944.562	7,19	410.604
Jumlah saham Seri C	14.984.598.643	98,11	5.619.224
Jumlah	15.273.940.510	100,00	7.789.288

Pemegang saham	31 Desember 2009		
	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase kepemilikan (%)	Jumlah
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	-	-
Saham Seri B			
Negara Republik Indonesia	217.006.399	1,42	1.627.548
Achmad Baiquni (Direktur)	7.500	-	56
Fero Poerbonegoro (Komisaris)	2.000	-	15
Karyawan	6.500.267	0,04	48.752
Masyarakat			
(kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	65.825.700	0,43	493.693
Jumlah saham Seri B	289.341.866	1,89	2.170.064
Saham Seri C			
Negara Republik Indonesia Perseroan terbatas	11.446.082.745	74,94	4.292.281
(kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	1.559.037.113	10,21	584.639

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Modal Saham (lanjutan)

Pemegang saham	31 Desember 2009		
	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase kepemilikan (%)	Jumlah
Saham Seri C (lanjutan)			
Badan usaha asing (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	882.048.516	5,77	330.768
Gatot M. Suwondo (Direktur Utama)	538.000	-	202
Fero Poerbonegoro (Komisaris)	519.000	-	194
Bien Subiantoro (Direktur)	513.000	-	192
Achmad Baiquni (Direktur)	436.000	-	163
Parikesit Suprpto (Komisaris)	276.000	-	104
H.M.S. Latief (Komisaris)	151.000	-	57
Krishna R. Suparto (Direktur)	75.000	-	28
Suwoko Singoastro (Direktur)	36.923	-	14
Darwin Suzandi (Direktur)	23.500	-	9
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	1.094.861.846	7,19	410.573
Jumlah saham Seri C	14.984.598.643	98,11	5.619.224
Jumlah	15.273.940.510	100,00	7.789.288

Pemegang saham	31 Desember 2008		
	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase kepemilikan (%)	Jumlah
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	-	-
Saham Seri B			
Negara Republik Indonesia	217.006.399	1,42	1.627.548
Achmad Baiquni (Direktur)	7.500	-	56
Fero Poerbonegoro (Komisaris)	2.000	-	15
Karyawan	6.500.267	0,04	48.752
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	65.825.700	0,43	493.693
Jumlah saham Seri B	289.341.866	1,89	2.170.064
Saham Seri C			
Negara Republik Indonesia	11.446.082.745	74,94	4.292.281
Perseroan terbatas (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	1.559.037.113	10,21	584.639
Badan usaha asing (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	882.048.516	5,77	330.768
Gatot M. Suwondo (Direktur Utama)	538.000	-	202
Fero Poerbonegoro (Komisaris)	519.000	-	194

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Modal Saham (lanjutan)

Pemegang saham	31 Desember 2008		
	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase kepemilikan (%)	Jumlah
Saham Seri C (lanjutan)			
Bien Subiantoro (Direktur)	513.000	-	192
Achmad Baiquni (Direktur)	436.000	-	163
Achil R. Djajadiningrat (Komisaris)	428.500	-	160
Parikesit Suprpto (Komisaris)	276.000	-	104
H.M.S Latif (Komisaris)	151.000	-	57
Krishna R. Suparto (Direktur)	75.000	-	28
Suwoko Singoastro (Direktur)	36.923	-	14
Darwin Suzandi (Direktur)	23.500	-	9
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	1.094.433.346	7,19	410.413
Jumlah saham Seri C	14.984.598.643	98,11	5.619.224
Jumlah	15.273.940.510	100,00	7.789.288
	31 Desember 2007		
Pemegang saham	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase kepemilikan (%)	Jumlah
Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia	1	-	-
Saham Seri B			
Negara Republik Indonesia	217.006.399	1,42	1.627.548
Zaki Baridwan (Komisaris)	1.700	-	13
Suroto Moehadji (Direktur)	4.000	-	30
Fero Poerbonegoro (Direktur)	2.000	-	15
Achmad Baiquni (Direktur)	7.500	-	56
Karyawan	6.500.267	0,04	48.752
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	65.820.000	0,43	493.650
Jumlah saham Seri B	289.341.866	1,89	2.170.064
Saham Seri C			
Negara Republik Indonesia Perseroan terbatas (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	11.446.082.745	74,94	4.292.281
Badan usaha asing (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	1.559.037.113	10,21	584.639
	882.048.516	5,77	330.768

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Modal Saham (lanjutan)

Pemegang saham	31 Desember 2007		
	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase kepemilikan (%)	Jumlah
Saham Seri C (lanjutan)			
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	1.097.430.269	7,19	411.536
Jumlah saham Seri C	14.984.598.643	98,11	5.619.224
Jumlah	15.273.940.510	100,00	7.789.288

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi, perubahan Anggaran Dasar, menyetujui pembubaran dan likuidasi, penggabungan, dan pengambilalihan BNI dan semua hak-hak lainnya yang dimiliki saham Seri B dan saham Seri C. Saham Seri A Dwiwarna tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Saham Seri B dan Saham Seri C adalah saham biasa atas nama yang memiliki hak yang sama.

Pada tanggal 13 Agustus 2007, Pemerintah Republik Indonesia, melakukan divestasi sebesar 3.475.231.980 saham Seri C, mewakili 22,54% dari kepemilikan di BNI melalui Penawaran Umum Saham Kedua.

Kepemilikan saham oleh Direksi dan karyawan merupakan opsi pemilikan saham yang diberikan. Tidak ada pelaksanaan opsi saham pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

Tambahan Modal Disetor

Perubahan tambahan modal disetor sebagai akibat dari penerbitan saham adalah sebagai berikut:

Saldo pada tanggal 31 Desember 2007	5.812.879
Biaya emisi penerbitan saham	(195.280)
Bersih	5.617.599

Perubahan tambahan modal disetor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sebagai akibat dari Penawaran Umum Saham Terbatas II per 13 Agustus 2007 (Catatan 1d) adalah sebagai berikut:

Saldo pada tanggal 31 Desember 2006	2.525.661
Penambahan dalam rangka Penawaran Umum Saham Terbatas II	3.287.218
Saldo pada tanggal 31 Desember 2007	5.812.879

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. PENGGUNAAN LABA BERSIH

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 Mei 2010, 27 Mei 2009 dan 28 Mei 2008, laba bersih masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 dialokasikan untuk:

	Laba Bersih			
	2009	2008	2007	2006
Pembagian dividen	869.396	122.248	449.054	962.922
Pembentukan cadangan khusus	233.744	125.571	89.793	182.954
Pembentukan cadangan umum dan wajib (Catatan 28)	248.400	122.249	89.793	385.166
Dana program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil (Catatan 29)	24.839	12.225	8.981	28.887
Dana program bina lingkungan (Catatan 29)	74.519	36.673	26.937	38.517
Jasa produksi karyawan	-	-	-	54.630
Pembagian tantiem direksi dan komisaris	-	-	-	18.345
Saldo laba	1.033.097	803.519	233.370	254.409
	2.483.995	1.222.485	897.928	1.925.830

Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah telah menyetujui pembagian dividen dari laba bersih tahun 2009, 2008, 2007 dan 2006 masing-masing sebesar Rp869.396, Rp122.248, Rp449.054 dan Rp962.922. Pembayaran dividen tersebut dilakukan masing-masing pada tanggal 24 Juni 2010, 7 Juli 2009, 4 Juli 2008 dan 29 Juni 2007.

Pada tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, tantiem dan jasa produksi karyawan masing-masing tahun 2009, 2008 dan 2007 telah dibayarkan dan dibebankan sebagai beban periode berjalan.

28. CADANGAN UMUM DAN WAJIB

Cadangan umum dan wajib pada awalnya dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang No. 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas (kemudian diganti dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007), yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum dan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut. Termasuk di dalam cadangan umum dan wajib adalah cadangan wajib yang dibentuk untuk cabang Tokyo dan Singapura.

29. CADANGAN KHUSUS

Cadangan investasi, dana program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan dana program bina lingkungan diklasifikasikan sebagai cadangan khusus.

Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 24 (Revisi), "Imbalan Kerja", di tahun 2005, cadangan khusus yang digunakan untuk penyisihan imbalan kerja adalah sebesar Rp334.955 sehingga terdapat kelebihan cadangan khusus imbalan kerja sebesar Rp121.033 yang telah dikembalikan ke saldo laba dan telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 24 Mei 2006. Dana program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil telah dialihkan seluruhnya ke pengelola program kemitraan.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	31 Desember		
			2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	10.890.133	10.105.589	13.570.123	10.563.534	8.211.779
Obligasi Pemerintah	1.776.156	2.574.602	3.173.604	3.499.931	3.553.207
Surat-surat berharga	911.993	778.520	1.032.165	993.942	1.771.496
Margin, pendapatan bagi hasil dan bonus syariah	473.618	361.286	496.001	322.619	168.590
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	272.908	375.849	567.152	722.862	710.882
Lain-lain	75.004	90.971	39.530	480	39.317
Jumlah	14.399.812	14.286.817	18.878.575	16.103.368	14.455.271

31. BEBAN BUNGA DAN BONUS

	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	31 Desember		
			2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Simpanan nasabah dan bank lain	4.847.336	5.867.815	7.615.944	5.806.433	6.746.066
Surat berharga yang diterbitkan	184.594	98.802	134.938	218.965	397.221
Pinjaman yang diterima	180.661	286.332	359.118	513.841	154.828
Bagi hasil <i>mudharabah</i>	165.609	128.748	178.906	118.663	69.741
Bonus <i>wadiah</i>	4.660	4.261	5.214	3.447	2.557
Jumlah	5.382.860	6.385.958	8.294.120	6.661.349	7.370.413

32. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

Akun ini termasuk di dalamnya pendapatan lainnya yang ditagihkan kepada pelanggan, pendapatan bersih dari berbagai investasi yang dilakukan oleh Anak Perusahaan dan pendapatan bersih penyertaan pada perusahaan asosiasi.

33. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	31 Desember		
			2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Gaji dan upah	1.774.293	1.599.938	2.122.427	1.932.182	1.903.235
Tunjangan	749.755	896.038	1.185.715	1.210.691	1.631.557
Pendidikan dan pelatihan	118.013	97.618	151.858	156.013	156.955
Jumlah	2.642.061	2.593.594	3.460.000	3.298.886	3.691.747

Termasuk di dalam beban gaji dan tunjangan terdapat gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris BNI dan Komite Audit (Catatan 1g).

Sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004) mengenai Imbalan Kerja, Bank telah membentuk cadangan tantiem untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	31 Desember		
			2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Penyusutan	342.889	320.170	408.942	599.396	682.849
Biaya sewa	301.773	275.835	391.531	358.791	374.591
Beban tenaga kerja	250.081	211.876	299.207	266.149	245.035
Persediaan	208.363	161.432	237.327	213.889	196.663
Perbaikan dan pemeliharaan	155.940	131.913	236.874	165.071	156.065
Komunikasi	137.810	134.621	195.611	220.915	208.749
Teknologi informasi	121.031	124.620	196.536	192.472	273.423
Transportasi	97.900	79.353	118.389	98.329	87.533
Listrik dan air	85.513	67.291	105.840	89.405	75.848
Jasa profesional	21.866	13.290	51.852	30.127	25.018
Penelitian dan pengembangan	12.480	8.738	14.343	13.659	13.604
Beban lain-lain	1.384	64.549	55.368	25.133	50.029
Jumlah	1.737.030	1.593.688	2.311.820	2.273.336	2.389.407

35. IMBALAN KERJA

Program pensiun manfaat pasti

Program ini dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Dana Pensiun"). Kontribusi pegawai adalah sebesar 7,5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh BNI.

Penilaian aktuarial atas manfaat pensiun pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuarial terdaftar, PT Sentra Jasa Aktuarial (Biro Pusat Aktuarial), dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Rekonsiliasi status pembiayaan atas program pensiun berdasarkan laporan aktuarial PT Sentra Jasa Aktuarial tanggal 1 Oktober 2010, 23 November 2009, 29 Januari 2010, 6 Maret 2009 dan 26 Maret 2008 disajikan sebagai berikut:

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Nilai wajar aset dana pensiun	4.141.418	3.980.121	4.024.648	3.687.771	3.749.850
Nilai kini kewajiban manfaat pasti yang didanai	(3.711.121)	(3.257.121)	(3.583.234)	(3.149.001)	(3.354.364)
Selisih lebih pendanaan	430.297	723.000	441.414	538.770	395.486
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang belum diakui	163.980	(185.656)	125.470	(106.281)	(164.561)
Penyesuaian aset berdasarkan PSAK No. 24	(163.980)	-	(125.470)	-	164.561
Aset - bersih	430.297	537.344	441.414	432.489	395.486

Tidak ada aset yang diakui di neraca konsolidasi karena ketentuan untuk pengakuan aset yang disyaratkan dalam standar akuntansi tidak terpenuhi.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Rekonsiliasi atas perubahan aset bersih selama periode berjalan yang diakui di neraca dana pensiun adalah sebagai berikut:

	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	31 Desember		
			2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Aset bersih					
pada awal periode/tahun	441.414	432.489	432.489	395.486	198.910
Pendapatan (beban) periode					
berjalan	(58.078)	29.910	(89.615)	(36.943)	118.087
Kontribusi pemberi kerja	46.961	74.945	98.540	73.946	78.489
Aset - bersih pada akhir					
 periode/tahun	430.297	537.344	441.414	432.489	395.486

Biaya imbalan pensiun yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	31 Desember		
			2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Biaya jasa kini	75.289	68.514	91.670	99.101	66.599
Kontribusi karyawan	(18.396)	(18.844)	(24.872)	(27.265)	(27.523)
Biaya bunga	295.617	259.793	349.363	352.208	376.837
Kerugian (keuntungan) bersih					
aktuarial	(908)	(1.895)	125.106	(4.544)	523
Hasil yang diharapkan atas aset					
dana pensiun	(332.033)	(304.242)	(413.694)	(412.484)	(369.962)
Penyesuaian aset berdasarkan					
PSAK No. 24	38.509	-	125.470	164.561	(164.561)
Laba kurtailmen					
dan <i>settlement</i>	-	(33.236)	(163.428)	(134.634)	-
Biaya (pendapatan) yang					
 dibebankan pada laporan					
 laba rugi konsolidasian	58.078	(29.910)	89.615	36.943	(118.087)

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas adalah:

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Asumsi ekonomi:					
Tingkat diskonto per tahun	11%	11%	10,5%	11%	10,5%
Tingkat kenaikan penghasilan					
dasar per tahun	9%	9%	9%	9%	9%
Asumsi lainnya:					
Usia pensiun normal	55 tahun	55 tahun	55 tahun	55 tahun	55 tahun
Tingkat kematian	Tabel Mortalita Indonesia 1999 (TMI 1999)	Tabel Mortalita Indonesia 1999 (TMI 1999)	Tabel Mortalita Indonesia 1999 (TMI 1999)	Tabel Mortalita Indonesia 1999 (TMI 1999)	Tabel Mortalita Indonesia 1999 (TMI 1999)
Tingkat cacat	10% dari TMI '99	10% dari TMI '99	10% dari TMI '99	10% dari TMI '99	10% dari TMI '99

BNI juga memiliki Program Pensiun Iuran Pasti, untuk karyawannya, dimana kontribusi iuran proporsional antara BNI dan karyawan masing-masing adalah sebesar 75% dan 25% dari jumlah iuran pensiun yang ditetapkan oleh BNI untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sebelum tanggal 1 September 2005. Untuk karyawan tetap yang dipekerjakan mulai tanggal 1 September 2005, kontribusi BNI dan karyawan adalah masing-masing sebesar iuran 11,5% dan 3,5% dari gaji karyawan. Program Pensiun Iuran Pasti dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti yang telah dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebesar Rp26.791, Rp25.403, Rp34.041, Rp32.189 dan Rp30.503 masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Kewajiban atas imbalan kerja jangka panjang lainnya meliputi uang jasa, uang pisah dan pesangon sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 dan kompensasi lainnya.

Penilaian aktuarial atas imbalan kerja jangka panjang lainnya pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007, dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, PT Sentra Jasa Aktuarial (Biro Pusat Aktuarial) dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" sebagaimana yang tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2010, 23 November 2009, 29 Januari 2010, 6 Maret 2009 dan 26 Maret 2008.

Karyawan tetap yang bergabung dengan BNI setelah bulan September 2005, memiliki hak atas program pensiun iuran pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003, mana yang lebih tinggi.

Karyawan tetap yang bergabung dengan BNI sebelum bulan September 2005, memiliki hak atas program pensiun manfaat pasti ditambah dengan program pensiun iuran pasti, atau imbalan kerja yang disediakan sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003, mana yang lebih tinggi.

Jumlah pegawai BNI yang memiliki hak atas imbalan kerja adalah 17.086 orang, 17.494 orang, 17.412 orang, 17.202 orang dan 17.713 orang masing-masing pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 (tidak diaudit).

Rekonsiliasi antara kewajiban yang diakui pada neraca konsolidasian (Catatan 24) dan kewajiban aktuarial adalah sebagai berikut:

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Nilai kini kewajiban	(945.622)	(872.123)	(859.973)	(948.619)	(972.321)
Biaya jasa masa lalu yang belum diakui (non vested)	10.188	14.079	12.111	16.228	19.420
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang belum diakui	53.301	(231.496)	(117.389)	(155.768)	7.578
Kewajiban yang diakui:					
BNI	(882.133)	(1.089.540)	(965.251)	(1.088.159)	(945.323)
Anak Perusahaan	(29.682)	(16.137)	(20.019)	(6.917)	(4.575)
Kewajiban yang diakui pada neraca konsolidasian (Catatan 24)	(911.815)	(1.105.677)	(985.270)	(1.095.076)	(949.898)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Rekonsiliasi perubahan selama periode berjalan atas kewajiban bersih yang diakui di neraca konsolidasian adalah sebagai berikut:

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Kewajiban bersih pada awal periode	(965.251)	(1.088.159)	(1.088.159)	(945.323)	(465.039)
Biaya selama periode berjalan	(153.825)	(112.128)	(96.374)	(262.252)	(594.586)
Pembayaran imbalan	210.208	110.747	219.282	119.416	114.302
Pemindahan karyawan	26.735	-	-	-	-
Kewajiban yang diakui oleh BNI	(882.133)	(1.089.540)	(965.251)	(1.088.159)	(945.323)
Imbalan kerja konsolidasian					
BNI	(882.133)	(1.089.540)	(965.251)	(1.088.159)	(945.323)
Anak Perusahaan	(29.682)	(16.137)	(20.019)	(6.917)	(4.575)
Kewajiban yang diakui pada neraca konsolidasian (Catatan 24)	(911.815)	(1.105.677)	(985.270)	(1.095.076)	(949.898)

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian:

	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	31 Desember		
			2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Biaya jasa kini	83.963	69.863	93.100	101.372	99.492
Biaya bunga	70.948	78.261	102.245	102.094	56.573
(Keuntungan) kerugian aktuarial periode berjalan - bersih	(3.010)	(23.300)	(13.876)	108.361	304.328
Amortisasi biaya jasa masa lalu dalam rangka kurtailmen	-	225	1.551	627	-
Biaya jasa masa lalu	-	-	-	-	131.628
Amortisasi biaya jasa masa lalu <i>non-vested</i>	1.924	1.924	2.565	2.565	2.565
Laba dalam rangka kurtailmen dan <i>settlement</i>	-	(14.845)	(89.211)	(52.767)	-
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	153.825	112.128	96.374	262.252	594.586

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung estimasi beban dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Asumsi ekonomi:					
Tingkat diskonto per tahun	11%	11%	10,5%	11%	10,5%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	9%	9%	9%	9%	9%
Asumsi lainnya:					
Usia pensiun normal	55 tahun	55 tahun	55 tahun	55 tahun	55 tahun
Tingkat kematian	Tabel Mortalita Indonesia 1999 (TMI 1999)	Tabel Mortalita Indonesia 1999 (TMI 1999)	Tabel Mortalita Indonesia 1999 (TMI 1999)	Tabel Mortalita Indonesia 1999 (TMI 1999)	Tabel Mortalita Indonesia 1999 (TMI 1999)
Tingkat cacat	10% dari TMI '99	10% dari TMI '99	10% dari TMI '99	10% dari TMI '99	10% dari TMI '99

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Laba bersih konsolidasian per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih konsolidasian kepada pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan.

	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	31 Desember		
			2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Laba bersih kepada pemegang saham	2.954.211	1.854.906	2.483.995	1.222.485	897.928
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar	15.273.940.510	15.273.940.510	15.273.940.510	15.273.940.510	14.111.792.863
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	193	121	163	80	64

37. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Kewajiban komitmen					
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	21.467.336	21.068.829	21.285.009	15.807.317	12.522.359
<i>Irrevocable letters of credit</i> yang masih berjalan	4.634.165	5.236.138	4.469.709	3.582.430	6.055.464
Jumlah	26.101.501	26.304.967	25.754.718	19.389.747	18.577.823
Tagihan kontinjensi					
Garansi bank yang diterima	714.420	242.504	317.709	384.303	248.881
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	1.026.296	1.772.260	1.224.107	1.166.764	1.610.257
Jumlah	1.740.716	2.014.764	1.541.816	1.551.067	1.859.138
Kewajiban kontinjensi					
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:					
<i>Performance bonds</i>	4.082.088	3.071.516	4.104.570	2.904.073	2.144.858
<i>Standby letters of credit</i>	1.690.694	1.898.651	2.079.605	2.540.637	963.045
<i>Advance payment bonds</i>	1.346.177	915.461	1.164.163	1.109.835	635.827
<i>Bid bonds</i>	1.030.535	447.630	485.705	469.991	728.634
<i>Risk sharing</i>	96.806	-	191.861	325.206	-
<i>Shipping guarantee</i>	68.340	27.431	2.728	473	-
Garansi bank lainnya	794.362	744.429	863.463	1.061.542	1.823.721
Jumlah	9.109.002	7.105.118	8.892.095	8.411.757	6.296.085

Transaksi komitmen dan kontinjensi yang terjadi dalam kegiatan normal BNI yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Garansi bank yang diterbitkan Pihak yang memiliki hubungan istimewa	76.349	17.079	4.005	27.413	3.295
Pihak ketiga	9.032.653	7.088.039	8.888.090	8.384.344	6.292.790

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
<i>Irrevocable letters of credit</i> yang masih berjalan					
Pihak yang memiliki hubungan istimewa	994	-	703	12	1.085
Pihak ketiga	4.633.171	5.236.138	4.469.006	3.582.418	6.054.379
Jumlah	13.743.167	12.341.256	13.361.804	11.994.187	12.351.549

Transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Lancar	13.510.726	12.043.723	13.043.284	11.810.811	12.280.202
Dalam perhatian khusus	216.666	288.655	299.891	177.814	51.829
Kurang lancar	431	2.559	9.692	3.977	1.474
Diragukan	9.963	152	2.566	28	1.045
Macet	5.381	6.167	6.371	1.557	16.999
Jumlah	13.743.167	12.341.256	13.361.804	11.994.187	12.351.549
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(148.543)	(155.402)	(155.723)	(129.166)	(178.505)
Bersih	13.594.624	12.185.854	13.206.081	11.865.021	12.173.044

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

38. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan normal usaha, BNI melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama secara wajar (tidak diaudit).

Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

ASET

a. Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Mitrayasa Sarana Informasi	320.607	-	293.970	159.984	-
Koperasi Swadharma	74.292	77.750	79.301	55.906	37.166
PT Finansia Multifinance	72.778	169.309	140.060	206.740	-
PT Asuransi Tripakarta	270	270	270	300	-
PT Swadharma Duta Data	245	743	540	1.186	1.756
PT Swadharma Sarana Informatika	100	100	100	100	1.567
PT Pelangi Nusa Gemilang	-	-	-	19.874	20.906
PT Percetakan Karya Gunung Mas Agung	-	-	-	3.806	3.990
PT Swadharma Era Grafindo	-	-	-	1.831	-
PT Swadharma Propertindo	-	-	-	82	-
Lain-lain	14.570	15.354	15.946	18.440	19.295

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

ASET (lanjutan)

a. Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan (lanjutan)

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Jumlah	482.862	263.526	530.187	468.249	84.680
Persentase terhadap jumlah aset konsolidasian	0,21%	0,13%	0,23%	0,23%	0,05%

b. Tagihan akseptasi

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
PT Swadharma Era Grafindo	-	-	220	939	-
PT Pelangi Nusa Gemilang	-	-	-	-	854
Jumlah	-	-	-	-	-
Persentase terhadap jumlah aset konsolidasian	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

KEWAJIBAN

c. Simpanan nasabah

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
PT Asuransi Tripakarta	33.584	49.453	36.847	22.378	196.722
PT Citanduy Perkasa	5.853	-	10.632	14.677	-
PT Swadharma Kerysatya Shangri-la Hotel	5.254	-	26.873	46.159	-
Koperasi Swadharma	5.093	7.913	11.087	-	6.609
PT Swadharma Sarana Informatika	3.014	4.676	7.766	-	2.146
Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI	1.292	72.838	912.443	680.636	173.067
PT Swadharma Duta Data	241	301	941	484	39.944
PT Swadharma Propertindo	152	1.794	1.733	-	-
Yayasan Damar Dana Swadharma	13	-	8.844	9.620	-
PT Aplikanusa Lintas Arta	-	-	-	24.283	-
Lain-lain	18	317	89	68.716	929
Jumlah	54.514	137.292	1.017.255	866.953	419.417
Persentase terhadap jumlah kewajiban konsolidasian	0,03%	0,07%	0,49%	0,47%	0,25%

d (i).Garansi bank yang diterbitkan

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
PT Swadharma Kerry Saty	604	-	-	-	-
PT Swadharma Sarana Informatika	505	-	-	-	-
PT BNI Life Insurance	432	-	1.517	-	106
PT Asuransi Tri Pakarta	270	-	-	-	-
PT Swadharma Travelindo	100	-	-	100	-

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
 serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

KEWAJIBAN (lanjutan)

d (i).Garansi bank yang diterbitkan (lanjutan)

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
PT Swadharna Surya Finance	64	-	64	64	-
PT Swadharna Propertindo	42	-	-	100	-
PT Swadharna Eragrafindo	38	279	91	77	191
PT Swadharna Duta Data	-	248	108	469	473
PT Swadharna Indo Perkasa	-	-	12	-	-
PT Asuransi Wahana Tata	-	24	6	-	-
PT Pelangi Nusa Gemilang	-	15.883	-	26.603	-
PT Swadarmaguna Mitrapratama	-	610	-	-	-
PT BNI Securities	-	35	-	-	-
Gunung Mas Satria Mandiri	-	-	-	-	1.900
Koperasi Swadharna	-	-	-	-	625
Sub jumlah	2.055	17.079	1.798	27.413	3.295
d (ii). Surat garansi atas pelaksanaan pekerjaan jasa perbankan Divisi Jasa Keuangan dan Dana Institusi Bank kepada PT Telkom dan Departemen Keuangan	-	-	2.207	-	-
d (iii). Surat garansi atas pelaksanaan jasa layanan perbankan PT BNI (Persero) Tbk kepada Departemen Keuangan	2.248	-	-	-	-
d (iv). Surat garansi Standby L/C untuk menjamin ketersediaan collateral Divisi Bisnis Kartu atas transaksi Credit Card Visa dan Master	70.046	-	-	-	-
d (v). Surat garansi atas pelaksanaan proyek pengembangan sistem otomasi gateway dan e-payment dengan teknologi smartcard Divisi Dana dan Jasa Konsumen kepada Taman Impian Jaya Ancol	2.000	-	-	-	-
Jumlah	76.349	17.079	4.005	27.413	3.295
Persentase terhadap jumlah kewajiban kontinjensi konsolidasian	0,84%	0,24%	0,04%	0,32%	0,05%

e. Irrevocable letters of credit

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
PT Swadharna Eragrafindo	994	-	703	12	259
PT Pelangi Nusa Gemilang	-	-	-	-	826
Jumlah	994	-	703	12	1.085
Persentase terhadap jumlah kewajiban komitmen konsolidasian	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,01%

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. HAK MINORITAS

Mutasi hak minoritas atas kekayaan bersih Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Saldo awal	30.940	30.578	30.578	27.610	24.651
Bagian hak minoritas atas laba bersih Anak Perusahaan	1.346	(103)	2.724	3.420	3.816
Lain-lain (termasuk dividen)	11.606	(1.581)	(2.362)	(452)	(857)
Saldo akhir	43.892	28.894	30.940	30.578	27.610

40. INFORMASI SEGMENT USAHA

Bank mempertimbangkan jenis usaha sebagai segmen utama dan lokasi geografis sebagai segmen sekunder. Jenis usaha Bank dan Anak Perusahaan beserta lokasi geografisnya adalah sebagai berikut:

Nama perusahaan	Jenis usaha	Lokasi
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Bank konvensional	Indonesia, Singapura, Jepang, Hong Kong, Inggris, Amerika Serikat
PT BNI Securities	Sekuritas	Indonesia
PT BNI Multifinance	Pembiayaan	Indonesia
PT BNI Life Insurance	Asuransi jiwa	Indonesia
BNI Remittance Ltd.	Jasa keuangan	Hong Kong
PT Bank BNI Syariah	Perbankan	Indonesia

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang utama dari BNI dan Anak Perusahaan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Keterangan	Pendapatan bunga bersih, operasional dan investasi				
	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Sembilan Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Bank:					
Konvensional	10.722.928	10.180.716	13.628.217	12.298.454	10.535.275
Syariah	173.559	243.373	353.567	240.825	130.638
Anak Perusahaan:					
Asuransi jiwa	1.206.727	887.768	1.220.368	41.003	749.568
Syariah	145.498	-	-	-	-
Sekuritas	106.774	123.182	155.503	802.177	137.198
Pembiayaan	37.803	44.950	97.197	33.289	44.468
Jasa keuangan	1.922	1.928	2.854	-	-
Jumlah	12.395.211	11.481.917	15.457.706	13.415.748	11.597.147
Eliminasi	13.790	(26.111)	(29.553)	45.024	-
Konsolidasian	12.409.001	11.455.806	15.428.153	13.460.772	11.597.147
Terdiri dari:					
Pendapatan bunga/bagi hasil - bersih					
Konvensional	8.704.258	8.068.358	10.820.038	9.711.373	7.358.948
Syariah	300.537	241.389	312.730	200.510	108.483
Pendapatan operasional lainnya					
Konvensional	3.385.686	3.144.075	4.254.548	3.508.573	4.107.561
Syariah	18.520	1.984	40.837	40.316	22.155
Jumlah	12.409.001	11.455.806	15.428.153	13.460.772	11.597.147

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

Keterangan	Laba bersih				
	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Sembilan Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Bank:					
Konvensional	2.954.204	2.064.346	2.670.505	1.188.046	859.012
Anak Perusahaan:					
Asuransi jiwa	10.501	(936)	18.248	23.710	12.185
Jasa keuangan	(2.045)	362	412	-	-
Sekuritas	7.083	24.053	3.103	(75.189)	26.554
Pembiayaan	(6.334)	2.183	10.139	7.355	(19.060)
Syariah	(21.642)	(209.440)	(186.510)	34.439	19.237
Jumlah	2.941.767	1.880.568	2.515.897	1.178.361	897.928
Eliminasi	12.444	(25.662)	(31.902)	44.124	-
Konsolidasian	2.954.211	1.854.906	2.483.995	1.222.485	897.928

Keterangan	Jumlah aset				
	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Bank:					
Konvensional	216.688.632	195.770.443	220.232.432	196.373.005	179.460.905
Anak Perusahaan:					
Syariah	6.088.008	5.128.529	5.308.896	4.017.502	2.546.844
Pembiayaan	194.546	164.674	200.332	201.546	414.836
Sekuritas	1.580.147	1.193.317	987.626	792.774	1.013.230
Jasa keuangan	5.982	10.042	9.768	-	-
Asuransi jiwa	2.117.218	1.506.339	1.585.352	1.118.160	933.922
Jumlah	226.674.533	203.773.344	228.324.406	202.502.987	184.369.737
Eliminasi	(1.863.899)	(712.918)	(827.439)	(761.918)	(1.028.126)
Konsolidasian	224.810.634	203.060.426	227.496.967	201.741.069	183.341.611

Informasi yang berkaitan dengan segmen sekunder dari BNI dan Anak Perusahaan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Keterangan	Pendapatan bunga bersih, operasional dan investasi				
	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Sembilan Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Indonesia	11.935.423	11.004.767	14.870.699	13.073.325	10.880.905
Asia	356.075	368.043	457.476	281.146	480.540
Eropa	80.247	31.413	61.305	(4.676)	150.492
Amerika Serikat	23.466	77.694	68.226	65.953	85.210
Jumlah	12.395.211	11.481.917	15.457.706	13.415.748	11.597.147
Eliminasi	13.790	(26.111)	(29.553)	45.024	-
Konsolidasian	12.409.001	11.455.806	15.428.153	13.460.772	11.597.147

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

Keterangan	Laba bersih				
	30 September 2010 (Sembilan Bulan)	30 September 2009 (Sembilan Bulan) (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009 (Satu Tahun)	2008 (Satu Tahun)	2007 (Satu Tahun)
Indonesia	2.602.535	1.735.416	2.438.724	1.158.209	864.808
Asia	265.610	118.523	67.889	16.901	16.996
Eropa	68.682	(1.250)	2.212	2.001	7.415
Amerika Serikat	4.940	27.879	7.072	1.250	8.709
Jumlah	2.941.767	1.880.568	2.515.897	1.178.361	897.928
Eliminasi	12.444	(25.662)	(31.902)	44.124	-
Konsolidasian	2.954.211	1.854.906	2.483.995	1.222.485	897.928

Keterangan	Jumlah aset				
	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Indonesia	218.800.459	194.813.651	221.357.437	192.098.402	174.954.143
Asia	5.352.397	6.294.424	4.277.642	6.781.583	6.084.480
Eropa	1.989.203	2.170.347	2.243.402	3.093.992	2.522.168
Amerika Serikat	480.933	494.922	445.925	529.010	808.946
Jumlah	226.622.992	203.773.344	228.324.406	202.502.987	184.369.737
Eliminasi	(1.812.358)	(712.918)	(827.439)	(761.918)	(1.028.126)
Konsolidasian	224.810.634	203.060.426	227.496.967	201.741.069	183.341.611

41. MANAJEMEN RISIKO

Pengembangan manajemen risiko di BNI berpedoman pada peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta dokumen-dokumen dari *Basel Committee on Banking Supervision*, terutama konsep *Basel Accord II*. Pengelolaan risiko di BNI mencakup keseluruhan lingkup aktivitas usaha di BNI, berdasarkan kebutuhan akan keseimbangan antara fungsi usaha dengan pengelolaan risikonya. Dengan kebijakan manajemen risiko yang berjalan efektif, manajemen risiko menjadi *strategic partner* dari unit bisnis yang ada dalam mengoptimalkan pendapatan dari operasional perusahaan.

Untuk menyesuaikan dengan manajemen risiko seperti di perbankan internasional, secara terus menerus BNI mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi kepada Bank adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya Bank dapat mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, batas-batas transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

Untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada, maka evaluasi selalu dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan parameter risikonya. Berbagai inisiatif serta langkah-langkah telah ditempuh untuk meletakkan landasan yang kuat dalam manajemen risiko di BNI yang mencakup aspek-aspek organisasi, strategi, sistem informasi dan operasi, serta aspek budaya.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Terkait dengan produk atau aktivitas baru yang akan diterbitkan, dilakukan penilaian (assessment) terhadap risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru untuk memastikan bahwa potensi risiko telah dimitigasi dengan baik.

Pengelolaan risiko kredit, risiko nilai tukar, risiko likuiditas, risiko tingkat suku bunga, risiko pasar dan risiko operasional BNI sebagaimana diuraikan pada Catatan 42 sampai dengan Catatan 47 adalah sesuai dengan definisi dari Bank Indonesia.

BNI juga memonitor (i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan perikatan seperti ada klausul hukum yang tidak lengkap; (ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank; (iii) risiko strategis untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau strategi yang kurang responsif terhadap perubahan eksternal; dan (iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari Bank karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan seperti tersebut di atas diantaranya adalah:

- Mengelola Pedoman Perusahaan (PP) risiko hukum;
- Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap perjanjian atau kontrak yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh unit-unit bisnis;
- Melakukan analisis aspek hukum atas produk atau aktivitas baru;
- Mengelola Pedoman Perusahaan (PP) risiko reputasi;
- Mengelola sistem untuk mencatat dan memantau keluhan pelanggan nasabah untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengelola Pedoman Perusahaan (PP) risiko strategis;
- BNI telah memiliki *Performance Measurement System* (PMS) untuk mengetahui kinerja di masing-masing unit maupun BNI secara *Bankwide*; dan
- Mengelola Pedoman Perusahaan (PP) risiko kepatuhan.
- Melakukan uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan produk atau aktivitas baru.

Anak Perusahaan BNI secara umum telah menerapkan manajemen risiko, antara lain dengan membentuk unit risiko pada Anak Perusahaan. Manajemen risiko pada masing-masing Anak Perusahaan secara operasional dilakukan terpisah dari unit bisnis di masing-masing Anak Perusahaan dan menjalankan fungsinya secara independen. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko, pada organisasi Anak Perusahaan juga dibentuk unit kontrol intern yang melakukan pemantauan terhadap kepatuhan terhadap kontrol internal secara rutin dan berkala. Disamping itu, Dewan Komisaris dan Direksi pada masing-masing Anak Perusahaan secara aktif juga melakukan pemantauan, dan evaluasi melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh setiap Anak Perusahaan untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pada Anak Perusahaan.

BNI selaku Induk Perusahaan telah melakukan koordinasi dengan Anak Perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan Bank Indonesia. Disamping membuat laporan seperti laporan perhitungan Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) konsolidasian dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) konsolidasian, BNI juga telah membuat laporan profil risiko masing-masing Anak Perusahaan dan profil risiko konsolidasian.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil risiko BNI menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank (inherent risk) termasuk sistem pengendalian risiko (risk control system) untuk masing-masing jenis risiko. Profil risiko BNI berdasarkan hasil laporan terakhir atas penelaahan sendiri (self assessment) adalah berperingkat komposit rendah (tidak diaudit) yang didasarkan pada rendahnya risiko yang melekat pada kegiatan Bank (inherent risk) dan kuatnya sistem pengendalian risiko untuk masing-masing jenis risiko.

42. RISIKO KREDIT

Tujuan pengelolaan risiko kredit Bank selain untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia, juga untuk mengelola risiko kredit itu sendiri sehingga diharapkan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pinjaman yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya seminimal mungkin, baik pada tingkat individual maupun portofolio kredit secara keseluruhan.

Pengelolaan kredit Bank diarahkan untuk melakukan ekspansi kredit dan mengelola kualitas setiap kredit sejak saat diberikan sampai dengan dilunasi untuk mencegah kredit tersebut menjadi *Non-Performing Loan* (NPL). Pengelolaan kredit yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit.

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis yang dituangkan dalam Pedoman Perusahaan (PP) Perkreditan, Keputusan *Credit Policy Committee* (CPC) dan Radisi (Rapat Direksi). Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan pedoman secara lengkap dan terperinci atas kegiatan manajemen kredit dari saat pengajuan kredit, proses analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian dan penyelamatan/restrukturisasi. Dalam rangka mendukung proses pemberian kredit yang lebih hati-hati, BNI melakukan penelaahan dan penyempurnaan kebijakan kredit secara periodik sesuai dengan perkembangan bisnis terkini.

Pengelolaan risiko kredit diterapkan pada tingkat individu pinjaman dan tingkat portofolio. Pada tingkat individu pinjaman, setiap keputusan pemberian kredit oleh Unit Usaha memerlukan rekomendasi dari Unit Risiko Kredit. Mekanisme persetujuan kredit dilakukan melalui sirkulasi atau rapat anggota Pejabat Pemutus Kredit. Keputusan pemberian kredit dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari Unit Usaha yang memiliki integritas, kemampuan dan kompetensi yang sesuai serta diberikan rekomendator dari Unit Risiko Kredit. Dengan demikian, proses pemberian kredit menjadi lebih komprehensif dan hati-hati.

Pada tingkat portofolio, setiap tahun sekali ditetapkan *Loan Exposure Limit*, yaitu diversifikasi portofolio pinjaman berdasarkan industri untuk mengoptimalkan risiko dan pendapatan di masing-masing industri dan mengurangi risiko konsentrasi.

Proses analisa dan persetujuan kredit dilakukan melalui serangkaian proses penilaian tingkat risiko kredit calon debitur, yang diantaranya dengan menggunakan *internal rating system* (untuk kredit produktif) dan *scoring system* (untuk kredit konsumtif), sekaligus juga strategi mitigasi risikonya. Hasil proses analisa dan penilaian tingkat risiko kredit kemudian diajukan kepada anggota Pejabat Pemutus Kredit untuk mendapatkan persetujuan.

Pemeringkatan debitur memberikan penilaian yang lebih obyektif terhadap debitur dimana debitur yang memiliki risiko rendah akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan debitur yang memiliki risiko lebih tinggi atau sebaliknya, sehingga Bank menentukan dasar *pricing management* pada tingkat risiko debitur (*risk-based pricing*).

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. RISIKO KREDIT (lanjutan)

Kredit yang bermasalah dikelola oleh Unit/Divisi Kredit Khusus agar penyelamatan/penyelesaiannya dapat dilakukan secara lebih baik dan memungkinkan Unit Usaha untuk dapat fokus pada pengelolaan debitur lancar dan melakukan ekspansi kredit.

Pengembangan manajemen risiko kredit dilakukan secara bertahap sesuai dengan pola waktu yang ditetapkan Bank Indonesia. Khusus untuk pengukuran risiko kredit pada tahap pertama, dilakukan dengan metodologi *standardized approach* dan secara paralel juga mempersiapkan dan mengembangkan metodologi *internal rating based approach*. Untuk keperluan tersebut, Bank sedang mempersiapkan pembangunan *database* sebagai bagian dari sistem yang ada, yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan parameter risiko kredit seperti *Probability of Default*, *Loss Given Default* dan *Exposure at Default*.

Sistem pengelolaan manajemen risiko kredit Bank telah dibakukan dalam suatu Pedoman Perusahaan (PP) dan dikaji secara periodik.

- (i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada neraca konsolidasian pada tanggal 30 September 2010 adalah sebagai berikut:

<u>Keterangan</u>	<u>Eksposur Maksimum</u>
Kas	5.325.305
Giro pada Bank Indonesia	8.551.458
Giro pada bank lain	2.721.670
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	22.908.421
Surat-surat berharga	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	1.535.316
Tersedia untuk dijual	5.493.206
Dimiliki hingga jatuh tempo	10.300.606
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	4.015
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	527.067
Tagihan akseptasi	5.858.054
Tagihan derivatif	1.365
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	126.073.612
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	531.670
Tersedia untuk dijual	25.557.614
Dimiliki hingga jatuh tempo	6.947.948
Penyertaan saham	41.033
Aset lain-lain	2.331.280
Jumlah - Kotor	224.709.640
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(6.712.730)
Jumlah - Bersih	217.996.910

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif konsolidasian pada tanggal 30 September 2010 adalah sebagai berikut:

<u>Keterangan</u>	<u>Eksposur Maksimum</u>
<i>Irrevocable letters of credit</i> yang masih berjalan	4.634.165
Garansi yang diterbitkan	9.109.002
	13.743.167

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. RISIKO KREDIT (lanjutan)

- (i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank pada tanggal 30 September 2010, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset neraca konsolidasian, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pada tanggal 30 September 2010, 56,11% dari jumlah eksposur maksimum terhadap aset pada neraca konsolidasian berasal dari pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan.

Manajemen yakin akan kemampuan Bank untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari kredit yang diberikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bank telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses kredit yang mencakup seluruh aspek pemberian kredit yang dilakukan. Setiap pemberian kredit harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut.
- Bank telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui "early warning system" dan pemantauan yang disiplin.
- Seluruh kredit diberikan dengan agunan kecuali untuk jenis kredit tertentu seperti kartu kredit, *personal loans* dan fasilitas antar bank.
- Pada tanggal 30 September 2010, 90,85% dari portofolio kredit yang diberikan dikategorikan sebagai tidak mengalami penurunan nilai.

- (ii) Konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur risiko kredit

(a) Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Grup pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 30 September 2010. Untuk tabel ini, Grup telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat mereka beroperasi.

	30 September 2010							
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Indonesia Timur	Sumatera	Lain-lain *)	Jumlah
Kas	1.237.284	562.929	441.545	651.409	462.543	1.165.871	803.724	5.325.305
Giro pada								
Bank Indonesia	8.551.458	-	-	-	-	-	-	8.551.458
Giro pada bank lain	1.758.423	-	6	8	777	5.024	957.432	2.721.670
Penempatan pada bank lain dan								
Bank Indonesia	21.249.256	-	-	-	-	-	1.659.165	22.908.421
Surat-surat berharga	14.723.827	-	-	-	-	-	2.605.301	17.329.128
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	4.015	-	-	-	-	-	-	4.015
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	286.743	109.787	-	60.624	11.575	52.905	5.433	527.067
Tagihan akseptasi	4.759.611	511.228	114.703	186.717	17.585	160.238	107.972	5.858.054
Tagihan derivatif	1.365	-	-	-	-	-	-	1.365
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	47.123.117	14.736.200	7.775.819	17.675.555	6.902.421	18.066.161	13.794.339	126.073.612
Obligasi Pemerintah	32.719.019	-	-	-	-	-	318.213	33.037.232
Penyertaan saham	41.033	-	-	-	-	-	-	41.033
Aset lain-lain	2.331.280	-	-	-	-	-	-	2.331.280
Jumlah kotor	134.786.431	15.920.144	8.332.073	18.574.313	7.394.901	19.450.199	20.251.579	224.709.640
Penyisihan	-	-	-	-	-	-	-	(6.712.730)
Jumlah bersih								217.996.910

*) Termasuk kantor cabang luar negeri dan Anak Perusahaan

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. RISIKO KREDIT (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

(a) Sektor geografis (lanjutan)

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif konsolidasian adalah sebagai berikut:

30 September 2010								
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Indonesia Timur	Sumatera	Lain-lain *)	Jumlah
Rekening Administratif								
<i>Irrevocable letters of credit</i> yang masih berjalan	1.694.053	1.544.761	73.224	786.776	14.825	305.108	215.418	4.634.165
Garansi yang diterbitkan	5.894.461	1.080.103	172.482	414.711	235.636	390.836	920.773	9.109.002
	7.588.514	2.624.864	245.706	1.201.487	250.461	695.944	1.136.191	13.743.167

*) Termasuk kantor cabang luar negeri dan Anak Perusahaan

(b) Sektor industri

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Grup pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri.

30 September 2010						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan bank	Perusahaan lainnya	Perseorangan	Jumlah
Kas	-	5.319.947	5.358	-	-	5.325.305
Giro pada						
Bank Indonesia	8.551.458	-	-	-	-	8.551.458
Giro pada bank lain	-	2.721.670	-	-	-	2.721.670
Penempatan pada bank lain dan						
Bank Indonesia	2.185.000	20.723.421	-	-	-	22.908.421
Surat-surat berharga						
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	92.369	1.442.947*)	-	-	-	1.535.316
Tersedia untuk dijual	2.061.972	3.431.234*)	-	-	-	5.493.206
Dimiliki hingga jatuh tempo	10.255.402	45.204*)	-	-	-	10.300.606
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	-	4.015	4.015
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	-	527.067	-	-	-	527.067
Tagihan akseptasi	-	5.858.054	-	-	-	5.858.054
Tagihan derivatif	-	1.365	-	-	-	1.365
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	330.325	1.013.095	4.698.093	97.317.135	22.714.964	126.073.612
Obligasi Pemerintah						
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	531.670	-	-	-	-	531.670
Tersedia untuk dijual	25.557.614	-	-	-	-	25.557.614
Dimiliki hingga jatuh tempo	6.947.948	-	-	-	-	6.947.948
Penyertaan saham	-	-	41.033	-	-	41.033
Aset lain-lain	-	-	-	-	2.331.280*)	2.331.280
Jumlah kotor	56.513.758	41.084.004	4.744.484	97.317.135	25.050.259	224.709.640
Penyisihan	-	-	-	-	-	(6.712.730)
Jumlah bersih						217.996.910

*) tidak diaudit

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. RISIKO KREDIT (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

(b) Sektor industri (lanjutan)

Eksposur risiko kredit yang terkait dengan unsur rekening administratif konsolidasian adalah sebagai berikut:

	30 September 2010					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)	Bank	Lembaga keuangan bukan Bank	Perusahaan lainnya	Perseorangan	Jumlah
Rekening Administratif						
<i>Irrevocable letters of credit</i>						
yang masih berjalan	1.668.201	355.660	-	2.610.304	-	4.634.165
Garansi yang diterbitkan	372.253	243.657	2.656	8.358.478	131.958	9.109.002
	2.040.454	599.317	2.656	10.968.782	131.958	13.743.167

(iii) Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan

Ikhtisar pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan adalah sebagai berikut:

	30 September 2010			
	Tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami Penurunan nilai		Jumlah
		Individual	Kolektif	
Rupiah:				
Perindustrian	21.233.029	1.646.365	377.190	23.256.584
Perdagangan, restoran dan hotel	20.595.831	749.190	437.115	21.782.136
Jasa dunia usaha	9.728.153	377.339	114.056	10.219.548
Konstruksi	8.376.674	402.592	136.183	8.915.449
Pertanian	8.470.849	85.612	46.470	8.602.931
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	8.012.401	308.643	61.507	8.382.551
Listrik, gas dan air	3.621.455	3.646	27.024	3.652.125
Pertambangan	2.198.591	23.120	3.410	2.225.121
Jasa pelayanan sosial	1.194.440	-	29.430	1.223.870
Lain-lain	22.487.693	415	397.519	22.885.627
Jumlah Rupiah	105.919.116	3.596.922	1.629.904	111.145.942
Mata uang asing:				
Perindustrian	4.109.767	1.499.626	45.224	5.654.617
Perdagangan, restoran dan hotel	1.993.818	-	8.811	2.002.629
Pertambangan	1.871.650	-	-	1.871.650
Listrik, gas dan air	1.712.448	-	-	1.712.448
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	356.052	17.512	-	373.564
Jasa dunia usaha	346.613	-	5.736	352.349
Pertanian	222.427	45.677	42.467	310.571
Konstruksi	27.964	-	-	27.964
Lain-lain	2.566.582	55.276	20	2.621.878
Jumlah mata uang asing	13.207.321	1.618.091	102.258	14.927.670
Jumlah	119.126.437	5.215.013	1.732.162	126.073.612
Dikurangi:				
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.418.600)	(4.271.155)	(839.639)	(6.529.394)
	117.707.837	943.858	892.523	119.544.218

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. RISIKO KREDIT (lanjutan)

(iii) Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan (lanjutan)

Bank melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Pinjaman dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; dan (b) Pinjaman dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah yang direstrukturisasi.

Penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Pinjaman dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; dan (b) Pinjaman dalam segmen pasar usaha kecil dan konsumtif.

Penilaian secara kolektif berdasarkan ketentuan transisi dari Bank Indonesia melalui Surat Edaran No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009 (Catatan 2I).

43. RISIKO MATA UANG

Risiko valuta asing timbul sebagai akibat adanya posisi neraca dan rekening administratif konsolidasian baik pada sisi aset konsolidasian maupun pasiva konsolidasian. Posisi valuta asing BNI dapat dikelompokkan dalam dua aktivitas yaitu *trading book*, yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan transaksi valuta asing dan *banking book*, yang dilakukan dalam rangka mengendalikan Posisi Devisa Neto BNI secara keseluruhan.

Perbankan diperkenankan mempertahankan Posisi Devisa Neto maksimum sebesar 20% dari modal. BNI memiliki kebijakan secara internal untuk mengelola Posisi Devisa Neto-nya. Secara *trading book* dan *banking book*, kinerja risiko serta *limit* risiko dihitung, dipantau dan dilaporkan kepada Manajemen BNI.

Berikut adalah Posisi Devisa Neto (PDN), dalam nilai absolut, BNI pada tanggal 30 September 2010 (tidak diaudit) per mata uang, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia:

Mata Uang	Aset	Kewajiban	Posisi Devisa Neto
KESELURUHAN (NERACA DAN REKENING ADMINISTRATIF)			
Dolar Amerika Serikat	83.606.760	82.949.358	657.402
Euro	4.792.450	4.695.192	97.258
Yen Jepang	2.830.898	2.702.130	128.768
Dolar Hong Kong	459.238	296.604	162.634
Pound Sterling Inggris	280.592	215.539	65.053
Lain-lain	1.507.409	1.169.534	337.875*)
Jumlah			1.448.990
NERACA			
Dolar Amerika Serikat	52.814.793	52.273.010	541.783
Euro	839.396	737.270	102.126
Yen Jepang	1.231.101	912.170	318.931
Dolar Hong Kong	443.182	280.548	162.634
Pound Sterling Inggris	201.725	136.673	65.052
Lain-lain	1.210.110	674.923	535.187*)
Jumlah			1.725.713

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. RISIKO MATA UANG (lanjutan)

Mata Uang	Aset	Kewajiban	Posisi Devisa Neto
Jumlah Modal Tier I dan Tier II dikurangi penyertaan pada Anak Perusahaan (Catatan 51)			17.891.746

Rasio PDN (Keseluruhan)	8,10%
Rasio PDN (Neraca)	9,64%

Rasio PDN per 30 September 2010 jika menggunakan modal bulan Agustus 2010 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

Modal - bulan Agustus 2010	18.222.573
Rasio PDN (Neraca)	9,47%
Rasio PDN (Keseluruhan)	7,95%

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih antara aset dan kewajiban beberapa mata uang asing lainnya

Posisi Devisa Neto, dalam nilai absolut, BNI pada tanggal 30 September 2009 (tidak diaudit) per mata uang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

Mata Uang	Aset	Kewajiban	Posisi Devisa Neto
KESELURUHAN (NERACA DAN REKENING ADMINISTRATIF)			
Dolar Amerika Serikat	80.743.682	80.864.773	121.091
Yen Jepang	1.886.139	1.951.563	65.424
Dolar Hong Kong	524.305	263.836	260.469
Pound Sterling Inggris	220.038	170.815	49.223
Lain-lain	7.414.468	6.989.359	425.109*)
Jumlah			921.316
NERACA			
Dolar Amerika Serikat	45.401.372	44.520.557	880.815
Yen Jepang	734.048	718.447	15.601
Dolar Hong Kong	495.692	219.944	275.748
Pound Sterling Inggris	167.622	115.290	52.332
Lain-lain	2.437.420	1.809.405	628.015*)
Jumlah			1.852.511
Jumlah Modal Tier I dan Tier II dikurangi penyertaan pada Anak Perusahaan (Catatan 51)			18.807.997
Rasio PDN (Keseluruhan)			4,90%
Rasio PDN (Neraca)			9,85%

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. RISIKO MATA UANG (lanjutan)

Rasio PDN per 30 September 2009 jika menggunakan modal bulan Agustus 2009 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

Modal - bulan Agustus 2009	19.642.389
Rasio PDN (Neraca)	9,43%
Rasio PDN (Keseluruhan)	4,69%

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih antara aset dan kewajiban beberapa mata uang asing lainnya

Berikut adalah Posisi Devisa Neto (PDN), dalam nilai absolut, BNI pada tanggal 31 Desember 2009 (tidak diaudit) per mata uang, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia:

Mata Uang	Aset	Kewajiban	Posisi Devisa Neto
KESELURUHAN (NERACA DAN REKENING ADMINISTRATIF)			
Dolar Amerika Serikat	58.509.688	58.000.297	509.391
Yen Jepang	807.321	544.039	263.282
Dolar Hong Kong	272.132	87.471	184.661
Pound Sterling Inggris	92.418	49.702	42.716
Lain-lain	2.811.633	2.590.703	220.930*)
Jumlah			1.220.980
NERACA			
Dolar Amerika Serikat	45.568.026	43.536.416	2.031.610
Yen Jepang	550.222	345.978	204.244
Dolar Hong Kong	272.141	71.039	201.102
Pound Sterling Inggris	87.696	42.704	44.992
Lain-lain	2.278.168	1.816.337	461.831*)
Jumlah			2.943.779
Jumlah Modal Tier I dan Tier II dikurangi penyertaan pada Anak Perusahaan (Catatan 51)			19.301.849
Rasio PDN (Keseluruhan)			6,33%
Rasio PDN (Neraca)			15,25%

Rasio PDN per 31 Desember 2009 jika menggunakan modal bulan November 2009 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

Modal - bulan November 2009	20.005.024
Rasio PDN (Neraca)	14,72%
Rasio PDN (Keseluruhan)	6,10%

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih antara aset dan kewajiban beberapa mata uang asing lainnya

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. RISIKO MATA UANG (lanjutan)

Posisi Devisa Neto, dalam nilai absolut, BNI pada tanggal 31 Desember 2008 (tidak diaudit) per mata uang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

Mata Uang	Aset	Kewajiban	Posisi Devisa Neto
KESELURUHAN (NERACA DAN REKENING ADMINISTRATIF)			
Dolar Amerika Serikat	82.522.125	81.623.984	898.141
Dolar Hong Kong	440.054	356.321	83.733
Pound Sterling Inggris	283.358	224.662	58.696
Yen Jepang	1.822.305	1.778.820	43.485
Lain-lain	6.826.371	6.574.385	251.986*)
Jumlah			1.336.041
NERACA			
Dolar Amerika Serikat	49.073.560	47.246.449	1.827.111
Yen Jepang	838.667	744.333	94.334
Dolar Hong Kong	436.564	354.133	82.431
Pound Sterling Inggris	211.217	153.466	57.751
Lain-lain	2.016.169	1.445.004	571.125*)
Jumlah			2.632.752
Jumlah Modal Tier I dan Tier II dikurangi penyertaan pada Anak Perusahaan (Catatan 51)			17.612.014
Rasio PDN (Keseluruhan)			7,59%
Rasio PDN (Neraca)			14,95%

Rasio PDN per 31 Desember 2008 jika menggunakan modal bulan November 2008 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

Modal - bulan November 2008	18.118.683
Rasio PDN (Neraca)	14,53%
Rasio PDN (Keseluruhan)	7,37%

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih antara aset dan kewajiban beberapa mata uang asing lainnya

Posisi Devisa Neto, dalam nilai absolut, BNI pada tanggal 31 Desember 2007 (tidak diaudit) per mata uang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

Mata Uang	Aset	Kewajiban	Posisi Devisa Neto
KESELURUHAN (NERACA DAN REKENING ADMINISTRATIF)			
Dolar Amerika Serikat	134.696.620	133.934.773	761.847
Yen Jepang	1.469.461	1.445.063	24.398
Dolar Hong Kong	462.825	399.455	63.370
Pound Sterling Inggris	928.372	875.160	53.212
Lain-lain	4.914.297	4.767.229	147.068*)
Jumlah			1.049.895

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. RISIKO MATA UANG (lanjutan)

Mata Uang	Aset	Kewajiban	Posisi Devisa Neto
NERACA			
Dolar Amerika Serikat	113.296.980	112.327.011	969.969
Yen Jepang	923.630	888.321	35.309
Dolar Hong Kong	462.825	399.455	63.370
Pound Sterling Inggris	856.150	663.171	192.979
Lain-lain	4.023.827	3.699.763	324.064*)
Jumlah			1.585.691
Jumlah Modal Tier I dan Tier II dikurangi penyertaan pada Anak Perusahaan (Catatan 51)			17.195.929
Rasio PDN (Keseluruhan)			6,11%
Rasio PDN (Neraca)			9,22%
Rasio PDN per 31 Desember 2007 jika menggunakan modal bulan November 2007 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:			
Modal - bulan November 2007			17.949.989
Rasio PDN (Neraca)			8,83%
Rasio PDN (Keseluruhan)			5,85%

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih antara aset dan kewajiban beberapa mata uang asing lainnya

44. RISIKO LIKUIDITAS

Pengelolaan dan pemantauan posisi likuiditas BNI berada dalam tanggung jawab kelompok likuiditas di Divisi Treasuri. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BNI, *Primary Reserve* dijaga dalam bentuk giro pada Bank Indonesia agar memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Selain itu ditetapkan pula jumlah pagu kas cabang dan *Secondary Reserve* yang ideal. Penetapan pagu kas cabang ditujukan agar cabang dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya berupa penarikan dana pihak ketiga, sekaligus menjaga kondisi kas cabang agar tidak *idle*. *Secondary Reserve* yang ideal ditetapkan sebagai dana untuk berjaga-jaga dan ditetapkan oleh *Risk and Capital Committee* BNI secara periodik.

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan kewajiban konsolidasian menjadi arus kas masuk atau keluar.

	30 September 2010						
	Nilai Tercatat	Lainnya	Kurang dari 1 Bulan	1 - 3 Bulan	3 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
ASET							
Kas	5.325.305	-	5.325.305	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	8.551.458	-	8.551.458	-	-	-	-
Giro pada bank lain	2.721.670	-	2.721.670	-	-	-	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain	(1.049)	(1.049)	-	-	-	-	-
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	22.908.421	-	22.752.099	142.557	5.000	8.765	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	(210)	(210)	-	-	-	-	-
Surat-surat berharga	17.329.128	-	5.958.388	3.211.470	2.937.948	550.469	4.670.853

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

30 September 2010							
	Nilai Tercatat	Lainnya	Kurang dari 1 Bulan	1 - 3 Bulan	3 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
ASET (lanjutan)							
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai surat-surat berharga	(105.508)	(105.508)	-	-	-	-	-
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	4.015	-	4.015	-	-	-	-
Weasel ekspor dan tagihan lainnya	527.067	-	415.957	105.829	5.281	-	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai weasel ekspor dan tagihan lainnya	(5.516)	(5.516)	-	-	-	-	-
Tagihan akseptasi	5.858.054	-	1.733.484	2.585.120	914.405	448.237	176.808
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi	(65.423)	(65.423)	-	-	-	-	-
Tagihan derivatif	1.365	-	674	691	-	-	-
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	126.073.612	-	18.985.705	11.735.604	11.641.786	14.172.725	69.537.792
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	(6.529.394)	(6.529.394)	-	-	-	-	-
Obligasi Pemerintah - bersih	33.037.232	-	996	4.833	4.411	38.937	32.988.055
Penyertaan saham	41.033	41.033	-	-	-	-	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai penyertaan	(5.630)	(5.630)	-	-	-	-	-
Aset tetap - bersih	3.750.512	3.750.512	-	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan	1.118.734	1.118.734	-	-	-	-	-
Aset lain-lain - bersih	4.275.758	4.275.758	-	-	-	-	-
Jumlah	224.810.634	2.473.307	66.449.751	17.786.104	15.508.831	15.219.133	107.373.508
KEWAJIBAN							
Kewajiban segera	1.032.919	-	1.032.919	-	-	-	-
Simpanan nasabah	183.771.811	-	105.457.560	66.056.256	4.432.677	6.467.722	1.357.596
Simpanan dari bank lain	3.155.074	-	1.751.778	544.551	308	178.600	679.837
Kewajiban derivatif	233.117	-	633	603	-	9.687	222.194
Kewajiban akseptasi	1.719.040	-	323.184	620.404	442.503	332.000	949
Surat-surat berharga yang diterbitkan	1.276.545	-	-	-	-	998.874	277.671
Pinjaman yang diterima	5.185.068	-	310.590	583.662	669.375	653.776	2.967.665
Hutang pajak	562.830	-	562.830	-	-	-	-
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	148.543	148.543	-	-	-	-	-
Kewajiban pajak tangguhan	18.657	18.657	-	-	-	-	-
Kewajiban lain-lain	6.345.125	6.345.125	-	-	-	-	-
Jumlah	203.448.729	6.512.325	109.439.494	67.805.476	5.544.863	8.640.659	5.505.912
Perbedaan jatuh tempo	21.361.905	(4.039.018)	(42.989.743)	(50.019.372)	9.963.968	6.578.474	101.867.596

30 September 2009 (Tidak Diaudit)							
	Nilai Tercatat	Lainnya	Kurang dari 1 Bulan	1 - 3 Bulan	3 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
ASET							
Kas	4.962.340	-	4.962.340	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	7.498.689	-	7.498.689	-	-	-	-
Giro pada bank lain	1.462.085	-	1.462.085	-	-	-	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain	(20.514)	(20.514)	-	-	-	-	-
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	21.133.484	-	20.834.895	291.446	-	6.843	300
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	(349.044)	(349.044)	-	-	-	-	-
Surat-surat berharga	9.286.042	-	1.868.707	69.044	25.025	426.726	6.896.540
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai surat-surat berharga	(393.104)	(393.104)	-	-	-	-	-
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	252.986	-	-	252.986	-	-	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	(2.530)	(2.530)	-	-	-	-	-

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

30 September 2009 (Tidak Diaudit)							
	Nilai Tercatat	Lainnya	Kurang dari 1 Bulan	1 - 3 Bulan	3 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
ASET (lanjutan)							
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	575.442	-	407.672	113.910	25.684	28.176	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai wesel ekspor dan tagihan lainnya	(15.804)	(15.804)	-	-	-	-	-
Tagihan akseptasi	2.565.970	-	617.270	930.498	836.567	180.813	822
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi	(37.495)	(37.495)	-	-	-	-	-
Tagihan derivatif	16.810	-	8.943	3.222	103	-	4.542
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai tagihan derivatif	(173)	(173)	-	-	-	-	-
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	122.116.396	-	18.114.594	13.142.215	10.546.813	14.681.895	65.630.879
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	(8.647.140)	(8.647.140)	-	-	-	-	-
Obligasi Pemerintah - bersih	34.553.671	-	-	-	1.550.265	447.907	32.555.499
Penyertaan saham	99.028	99.028	-	-	-	-	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai penyertaan	(42.730)	(42.730)	-	-	-	-	-
Aset tetap - bersih	3.492.938	3.492.938	-	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan	1.714.375	-	-	-	-	-	-
Aset lain-lain - bersih	2.838.704	2.838.704	-	-	-	-	-
Jumlah	203.060.426	(1.363.489)	55.775.195	14.803.321	12.984.457	15.772.360	105.088.582
KEWAJIBAN							
Kewajiban segera	917.558	-	917.558	-	-	-	-
Simpanan nasabah	163.654.026	-	143.704.206	11.541.513	4.801.244	3.521.276	85.787
Simpanan dari bank lain	3.494.768	-	3.193.715	252.728	48.325	-	-
Kewajiban derivatif	209.732	-	8.931	3.107	17.927	12.292	167.475
Kewajiban akseptasi	1.962.297	-	548.512	614.292	620.764	177.907	822
Surat-surat berharga yang diterbitkan	1.267.121	-	-	-	-	-	1.267.121
Pinjaman yang diterima	7.737.196	-	999.582	2.858.537	490.757	202.642	3.185.678
Hutang pajak	162.850	-	162.850	-	-	-	-
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	155.402	155.402	-	-	-	-	-
Kewajiban lain-lain	5.064.348	5.064.348	-	-	-	-	-
Jumlah	184.625.298	5.219.750	149.535.354	15.270.177	5.979.017	3.914.117	4.706.883
Perbedaan jatuh tempo	18.435.128	(6.583.239)	(93.760.159)	(466.856)	7.005.440	11.858.243	100.381.699
31 Desember 2009							
	Nilai Tercatat	Lainnya	Kurang dari 1 Bulan	1 - 3 Bulan	3 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
ASET							
Kas	4.903.316	-	4.903.316	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	8.531.044	-	8.531.044	-	-	-	-
Giro pada bank lain	6.927.618	-	6.927.618	-	-	-	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain	(69.276)	(69.276)	-	-	-	-	-
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	29.851.712	-	29.549.428	293.750	1.150	7.384	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	(229.550)	(229.550)	-	-	-	-	-
Surat-surat berharga	19.515.511	-	12.597.783	25.121	165.625	107.674	6.619.308
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai surat-surat berharga	(317.584)	(317.584)	-	-	-	-	-
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	687.971	-	555.564	98.628	4.303	286	29.190
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai wesel ekspor dan tagihan lainnya	(19.207)	(19.207)	-	-	-	-	-
Tagihan akseptasi	4.792.858	-	621.100	2.172.688	1.594.801	403.879	390
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi	(63.479)	(63.479)	-	-	-	-	-
Tagihan derivatif	7.393	-	3.683	668	249	-	2.793
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai tagihan derivatif	(92)	(92)	-	-	-	-	-

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

31 Desember 2009							
	Nilai Tercatat	Lainnya	Kurang dari 1 Bulan	1 - 3 Bulan	3 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
ASET (lanjutan)							
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	120.843.140	-	13.952.257	9.127.707	15.880.378	13.390.863	68.491.935
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	(6.920.455)	(6.920.455)	-	-	-	-	-
Obligasi Pemerintah - bersih	31.039.523	-	349.961	1.213.428	268.210	455.285	28.752.639
Penyertaan saham	66.790	66.790	-	-	-	-	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai penyertaan saham	(15.523)	(15.523)	-	-	-	-	-
Aset tetap - bersih	3.707.940	3.707.940	-	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan	1.358.911	1.358.911	-	-	-	-	-
Aset lain-lain	2.898.406	2.898.406	-	-	-	-	-
Jumlah	227.496.967	396.881	77.991.754	12.931.990	17.914.716	14.365.371	103.896.255
KEWAJIBAN							
Kewajiban segera	1.109.216	-	1.109.216	-	-	-	-
Simpanan nasabah	188.468.987	-	165.903.491	14.188.692	4.406.081	3.922.285	48.438
Simpanan dari bank lain	3.819.149	-	2.213.175	948.274	281.900	375.800	-
Kewajiban derivatif	152.423	-	1.045	2.566	232	207	148.373
Kewajiban akseptasi Surat berharga yang diterbitkan	2.558.681	-	451.482	912.839	810.254	384.106	-
Pinjaman yang diterima	1.260.750	-	-	-	-	-	1.260.750
Hutang pajak	5.569.805	-	-	1.824.404	422.775	101.468	3.221.158
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	94.036	-	94.036	-	-	-	-
Kewajiban lain-lain	155.723	155.723	-	-	-	-	-
Jumlah	208.322.445	5.289.398	169.772.445	17.876.775	5.921.242	4.783.866	4.678.719
Perbedaan jatuh tempo	19.174.522	(4.892.517)	(91.780.691)	(4.944.785)	11.993.474	9.581.505	99.217.536
31 Desember 2008							
	Nilai Tercatat	Lainnya	Kurang dari 1 Bulan	1 - 3 Bulan	3 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
ASET							
Kas	4.428.192	-	4.428.192	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	9.350.792	-	9.350.792	-	-	-	-
Giro pada bank lain	1.720.580	-	1.720.580	-	-	-	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain	(19.787)	(19.787)	-	-	-	-	-
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	22.948.307	-	22.792.465	28.850	114.635	12.357	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	(306.367)	(306.367)	-	-	-	-	-
Surat-surat berharga	10.243.283	-	6.182.532	41.769	119.815	181.582	3.717.585
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai surat-surat berharga	(369.232)	(369.232)	-	-	-	-	-
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	86.815	-	81.812	5.003	-	-	-
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	452.055	-	269.815	103.371	78.869	-	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai wesel ekspor dan tagihan lainnya	(24.110)	(24.110)	-	-	-	-	-
Tagihan akseptasi	3.990.035	-	1.335.755	1.223.778	1.281.567	148.201	734
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi	(158.998)	(158.998)	-	-	-	-	-
Tagihan derivatif	96.525	-	73.923	5.417	6.163	-	11.022
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai tagihan derivatif	(967)	(967)	-	-	-	-	-
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	111.994.397	-	11.551.386	9.543.992	14.198.021	15.855.968	60.845.030
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	(5.652.046)	(5.652.046)	-	-	-	-	-

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

31 Desember 2008

	Nilai Tercatat	Lainnya	Kurang dari 1 Bulan	1 - 3 Bulan	3 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
ASET (lanjutan)							
Obligasi Pemerintah - bersih	34.655.313	-	-	-	52.496	-	34.602.817
Penyertaan saham	137.040	137.040	-	-	-	-	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai penyertaan saham	(32.387)	(32.387)	-	-	-	-	-
Aset tetap - bersih	3.732.893	3.732.893	-	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan - bersih	1.989.131	1.989.131	-	-	-	-	-
Aset lain-lain - bersih	2.479.605	2.479.605	-	-	-	-	-
Jumlah	201.741.069	1.774.775	57.787.252	10.952.180	15.851.566	16.198.108	99.177.188
KEWAJIBAN							
Kewajiban segera	1.059.663	-	1.059.663	-	-	-	-
Simpanan nasabah	163.164.358	-	147.015.018	7.885.974	3.973.024	4.176.672	113.670
Simpanan dari bank lain	4.100.032	-	1.126.532	2.374.000	381.500	218.000	-
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	625.000	-	-	-	-	625.000	-
Kewajiban derivatif	82.666	-	6.952	29	-	-	75.685
Kewajiban akseptasi	1.969.306	-	661.840	437.781	798.133	71.068	484
Surat berharga yang diterbitkan	1.269.242	-	-	-	-	-	1.269.242
Pinjaman yang diterima	8.616.869	-	1.328.691	2.440.860	763.000	1.994.700	2.089.618
Hutang pajak	599.246	-	599.246	-	-	-	-
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	129.166	129.166	-	-	-	-	-
Kewajiban lain-lain	4.663.795	4.663.795	-	-	-	-	-
Jumlah	186.279.343	4.792.961	151.797.942	13.138.644	5.915.657	7.085.440	3.548.699
Perbedaan jatuh tempo	15.461.726	(3.018.186)	(94.010.690)	(2.186.464)	9.935.909	9.112.668	95.628.489

31 Desember 2007

	Nilai Tercatat	Lainnya	Kurang dari 1 Bulan	1 - 3 Bulan	3 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
ASET							
Kas	3.259.229	-	3.259.229	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	17.573.082	-	17.573.082	-	-	-	-
Giro pada bank lain	1.181.714	-	1.181.714	-	-	-	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain	(10.914)	(10.914)	-	-	-	-	-
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	14.888.136	-	14.557.034	319.579	3.980	7.543	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	(79.621)	(79.621)	-	-	-	-	-
Surat-surat berharga	16.242.810	-	12.301.494	-	150.954	37.993	3.752.369
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai surat-surat berharga	(42.249)	(42.249)	-	-	-	-	-
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	195.119	-	23.457	75.136	96.526	-	-
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	329.907	-	319.942	9.208	757	-	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai wesel ekspor dan tagihan lainnya	(10.574)	(10.574)	-	-	-	-	-
Tagihan akseptasi	2.427.471	-	409.688	690.387	680.223	647.002	171
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi	(47.353)	(47.353)	-	-	-	-	-
Tagihan derivatif	2.664	-	1.898	90	676	-	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai tagihan derivatif	(27)	(27)	-	-	-	-	-
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	88.651.188	-	11.993.928	6.118.030	11.183.897	16.174.407	43.180.926
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	(5.436.203)	(5.436.203)	-	-	-	-	-
Obligasi Pemerintah - bersih	36.700.770	-	-	-	-	106.672	36.594.098
Penyertaan	145.911	145.911	-	-	-	-	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai penyertaan	(11.118)	(11.118)	-	-	-	-	-

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

31 Desember 2007							
	Nilai Tercatat	Lainnya	Kurang dari 1 Bulan	1 - 3 Bulan	3 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
ASET (lanjutan)							
Aset tetap - bersih	3.871.229	3.871.229	-	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan - bersih	710.755	710.755	-	-	-	-	-
Aset lain-lain - bersih	2.799.685	1.436.308	329.314	317.472	84.544	352.611	279.436
Jumlah	183.341.611	526.144	61.950.780	7.529.902	12.201.557	17.326.228	83.807.000
KEWAJIBAN							
Kewajiban segera	1.118.333	-	-	1.118.333	-	-	-
Simpanan nasabah	146.188.546	-	130.743.156	4.893.902	1.739.573	6.697.771	2.114.144
Simpanan dari bank lain	3.803.936	-	1.765.655	1.192.911	375.720	469.650	-
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	199.406	-	199.406	-	-	-	-
Kewajiban derivatif	29.190	-	9.963	70	3.681	25	15.451
Kewajiban akseptasi	1.594.270	-	342.282	487.628	366.962	397.227	171
Surat berharga yang diterbitkan	1.269.135	-	-	-	-	-	1.269.135
Pinjaman yang diterima	6.309.151	-	737.817	1.077.845	1.831.635	1.502.880	1.158.974
Hutang pajak	151.379	-	151.379	-	-	-	-
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	178.505	178.505	-	-	-	-	-
Kewajiban lain-lain	4.318.861	4.318.861	-	-	-	-	-
Pinjaman subordinasi	933.704	-	-	-	-	-	933.704
Jumlah	166.094.416	4.497.366	133.949.658	8.770.689	4.317.571	9.067.553	5.491.579
Perbedaan jatuh tempo	17.247.195	(3.971.222)	(71.998.878)	(1.240.787)	7.883.986	8.258.675	78.315.421

45. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

Risiko tingkat suku bunga timbul atas instrumen keuangan yang mempunyai kemungkinan atas perubahan tingkat suku bunga yang akan berdampak pada arus kas masa depan.

Risk and Capital Committee BNI yang beranggotakan Direksi dan beberapa anggota manajemen senior, bertanggung jawab untuk menetapkan, melaksanakan serta menjaga kebijakan pengelolaan risiko tingkat suku bunga sesuai dengan pedoman umum BNI. Tujuan utama *Risk and Capital Committee* adalah memaksimalkan hasil usaha BNI dengan tetap memperhatikan kebijakan *limit* risiko yang ditetapkan.

Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat suku bunga per tahun untuk aset dan kewajiban konsolidasian yang penting untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007:

30 September 2010			
	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat %	Euro %
ASET			
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	4,90 - 9,50	0,01 - 3,00	0,10 - 0,43
Surat-surat berharga	7,55 - 15,00	0,73 - 11,63	4,13
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	9,12 - 11,99	4,29 - 8,57	-
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	7,72 - 16,00	2,30 - 11,25	1,56
Obligasi Pemerintah			
- Tingkat bunga tetap	6,58 - 14,50	5,00 - 11,63	-
- Tingkat bunga mengambang	6,58 - 6,81	-	-

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA (lanjutan)

	30 September 2010		
	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat %	Euro %
KEWAJIBAN			
Simpanan nasabah	0,50 - 10,25	0,00 - 4,00	0,00 - 0,35
Simpanan dari bank lain	0,00 - 6,25	0,00 - 2,25	0,25
Surat berharga yang diterbitkan	12,00 - 13,13	-	-
Pinjaman yang diterima	2,95 - 11,00	1,04 - 7,75	1,25 - 1,50
30 September 2009 (Tidak Diaudit)			
	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat %	Euro %
ASET			
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	5,75 - 9,50	0,01 - 2,52	0,10 - 0,43
Surat-surat berharga	9,25 - 18,25	0,69 - 9,03	4,13
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	10,97 - 12,97	6,83 - 8,83	-
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	10,50 - 14,25	10,00 - 11,50	11,00 - 11,50
Obligasi Pemerintah			
- Tingkat bunga tetap	9,00 - 14,50	6,63 - 8,80	-
- Tingkat bunga mengambang	6,58 - 6,81	-	-
KEWAJIBAN			
Simpanan nasabah	0,00 - 13,00	0,00 - 5,00	0,00 - 4,00
Simpanan dari bank lain	0,00 - 8,00	0,00 - 2,99	-
Surat-surat berharga yang diterbitkan	12,00 - 13,13	-	-
Pinjaman yang diterima	3,00 - 11,00	1,04 - 7,75	1,25 - 1,50
31 Desember 2009			
	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat %	Euro %
ASET			
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	4,50 - 12,00	0,01 - 3,00	0,15 - 1,20
Surat-surat berharga	9,25 - 18,25	0,66 - 9,03	-
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	10,14 - 12,14	6,69 - 8,69	-
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	9,50 - 14,25	8,00 - 9,75	-
Obligasi Pemerintah			
- Tingkat bunga tetap	9,00 - 14,50	6,50 - 8,80	-
- Tingkat bunga mengambang	6,58 - 6,59	-	-
KEWAJIBAN			
Simpanan nasabah	0,00 - 12,50	0,00 - 5,00	0,00 - 1,20
Simpanan dari bank lain	0,00 - 8,00	0,00 - 4,25	-
Surat-surat berharga yang diterbitkan	12,00 - 13,13	-	-
Pinjaman yang diterima	3,00 - 11,00	1,04 - 7,75	1,25 - 1,50

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA (lanjutan)

	31 Desember 2008		
	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat %	Euro %
ASET			
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	4,31 - 13,50	0,01 - 3,75	1,00 - 3,00
Surat-surat berharga	9,08 - 14,50	1,93 - 6,85	4,13
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	12,62 - 14,62	3,43 - 9,90	-
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	12,25 - 16,00	8,00 - 11,50	-
Obligasi Pemerintah			
- Tingkat bunga tetap	0,00 - 14,50	6,63 - 8,50	-
- Tingkat bunga mengambang	11,00 - 11,50	-	-
KEWAJIBAN			
Simpanan nasabah	1,00 - 11,75	0,05 - 4,50	0,95 - 4,27
Simpanan dari bank lain	0,50 - 10,25	1,95 - 6,75	2,50
Surat-surat berharga yang diterbitkan	12,00 - 13,13	-	-
Pinjaman yang diterima	3,00 - 20,40	0,50 - 6,00	1,25
31 Desember 2007			
	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat %	Euro %
ASET			
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	3,00 - 15,21	3,00 - 7,25	3,90 - 4,50
Surat-surat berharga	9,75 - 17,88	3,96 - 10,50	4,13
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	10,71 - 12,71	5,75 - 10,00	6,68
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	13,25 - 15,75	8,00 - 9,50	-
Obligasi Pemerintah			
- Tingkat bunga tetap	0,00 - 14,50	6,63 - 8,50	-
- Tingkat bunga mengambang	7,83	-	-
KEWAJIBAN			
Simpanan nasabah	1,00 - 9,75	3,07 - 5,74	1,82 - 3,00
Simpanan dari bank lain	0,50 - 3,13	5,05 - 5,91	-
Surat-surat berharga yang diterbitkan	12,00 - 13,13	-	-
Pinjaman yang diterima	3,00 - 10,64	1,33 - 6,41	1,25
Pinjaman subordinasi	-	7,50	-

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur grup terhadap risiko tingkat suku bunga (*Gross*) (Tidak diaudit)

	30 September 2010								Jumlah	
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tapi tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun tapi tidak lebih dari 2 tahun	Lebih dari 2 tahun tapi tidak lebih dari 3 tahun	Lebih dari 3 tahun tapi tidak lebih dari 4 tahun	Lebih dari 4 tahun tapi tidak lebih dari 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Suku bunga tetap		Tidak dikenakan bunga
Aset										
Kas	-	-	-	-	-	-	-	-	5.325.305	5.325.305
Giro pada Bank Indonesia	8.551.458	-	-	-	-	-	-	-	-	8.551.458
Giro pada bank lain	2.721.670	-	-	-	-	-	-	-	-	2.721.670
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	22.908.421	-	-	-	-	-	-	-	-	22.908.421
Surat-surat berharga - bersih										
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	-	-	-	-	-	-	-	1.535.316	-	1.535.316
Tersedia untuk dijual	-	-	-	-	-	-	-	5.493.206	-	5.493.206
Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-	10.300.606	-	10.300.606

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur grup terhadap risiko tingkat suku bunga (*Gross*) (Tidak diaudit) (lanjutan)

	30 September 2010									
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tapi tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun tapi tidak lebih dari 2 tahun	Lebih dari 2 tahun tapi tidak lebih dari 3 tahun	Lebih dari 3 tahun tapi tidak lebih dari 4 tahun	Lebih dari 4 tahun tapi tidak lebih dari 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Jumlah
Aset (lanjutan)										
Tagihan atas surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	4.015	-	-	-	-	-	-	-	-	4.015
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	527.067	-	-	-	-	-	-	-	-	527.067
Tagihan akseptasi	5.858.054	-	-	-	-	-	-	-	-	5.858.054
Tagihan derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	1.365	1.365
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan - bersih	124.554.752	-	-	-	-	-	1.518.860	-	-	126.073.612
Obligasi Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	-	-	-	-	-	-	531.670	-	-	531.670
Tersedia untuk dijual	15.814.754	-	-	-	-	-	9.742.860	-	-	25.557.614
Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	6.947.948	-	-	6.947.948
Penyertaan dalam saham	-	-	-	-	-	-	-	41.033	-	41.033
Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	2.331.280	-	2.331.280
Jumlah aset keuangan	180.940.191	-	-	-	-	-	36.070.466	7.698.983	-	224.709.640
Kewajiban										
Kewajiban segera lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	1.032.919	1.032.919
Simpanan dari nasabah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giro	43.873.028	-	-	-	-	-	-	2.239.984	-	46.113.012
- Tabungan	56.877.420	-	-	-	-	-	-	845.957	-	57.723.377
- Deposito berjangka	71.602.091	8.213.515	119.816	-	-	-	-	-	-	79.935.422
Simpanan dari bank lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giro	679.837	-	-	-	-	-	-	-	-	679.837
- Deposito dan <i>deposits on call</i>	2.475.237	-	-	-	-	-	-	-	-	2.475.237
Kewajiban derivatif	-	-	-	-	-	-	-	233.117	-	233.117
Kewajiban akseptasi	1.719.040	-	-	-	-	-	-	-	-	1.719.040
Surat-surat berharga yang diterbitkan	276.545	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.276.545
Pinjaman yang diterima	5.185.068	-	-	-	-	-	-	-	-	5.185.068
Kewajiban lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	3.029.229	-	3.029.229
Jumlah kewajiban keuangan	182.688.266	8.213.515	119.816	-	-	-	1.000.000	7.381.206	-	199.402.803
Jumlah gap repricing suku bunga	(1.748.075)	(8.213.515)	(119.816)	-	-	-	35.070.466	317.777	-	25.306.837

46. RISIKO PASAR

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang timbul akibat pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan atas posisi yang diambil oleh BNI baik pada posisi neraca dan rekening administratif. Risiko pasar melekat pada hampir seluruh aktivitas Bank baik *banking* maupun *trading book*.

BNI menetapkan dan melakukan review *limit-limit* risiko pasar berupa *trading limit*, yaitu *Value at Risk (VaR) Limit*, *Nominal Limit Dealer*, dan *Loss Limit* untuk masing-masing *desk (Forex Desk, Money Market Desk, dan Capital Market Desk)*. Pemantauan risiko pasar berupa laporan disampaikan kepada manajemen secara berkala (laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan).

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

46. RISIKO PASAR (lanjutan)

VaR dipergunakan untuk mengukur potensi risiko kerugian yang timbul akibat perubahan harga pasar yang disebabkan oleh pergerakan bunga, nilai tukar, dan pergerakan harga lainnya yang dapat mempengaruhi nilai pasar instrumen keuangan. Pemantauan risiko pasar untuk *trading book* juga dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dan *real-time* yang meliputi *front office*, *middle office* (*risk management*) maupun *back office* (*settlement*). Bank telah memiliki aplikasi perhitungan VaR dan telah mengimplementasikannya di seluruh cabang luar negeri pada tahun 2008.

Untuk mengelola pergerakan pasar yang abnormal, BNI telah melakukan *Stress Testing* pada instrumen yang terekspos risiko pasar dalam rangka menghitung potensi dampak keuangan yang timbul. *Back Testing* juga telah dilakukan secara berkala, untuk menilai akurasi metodologi yang digunakan.

47. RISIKO OPERASIONAL

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko operasional, BNI mengacu kepada kerangka Basel Accord II, Ketentuan Bank Indonesia serta *international best practices*. Pengelolaan risiko operasional meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional. Salah satu perangkat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan risiko operasional di BNI adalah PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional). PERISKOP terdiri dari 3 (tiga) modul utama, yaitu:

- Modul *Self Assessment*, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya risiko operasional di suatu unit. Metode ini terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilakukan sendiri (*self assessment*) oleh setiap unit pemilik risiko (*risk owner*) dalam mengidentifikasi, menilai, mengontrol dan memantau risiko operasional yang terjadi di unitnya. Modul *self assessment* wajib diisi oleh segenap unit setiap tiga bulan sekali, dengan melakukan pengukuran terhadap dampak dan frekuensi setiap *risk issue* di unitnya, mencari penyebab risiko tersebut timbul serta solusi mitigasinya.
- *Loss Event Database*, merupakan sarana yang digunakan untuk mencatat setiap peristiwa risiko operasional yang menimbulkan dampak finansial secara langsung. Setiap kali unit pemilik risiko (*risk owner*) mengalami kerugian risiko operasional yang menimbulkan dampak finansial, maka unit tersebut harus melakukan input dalam modul *Loss Event Data* tersebut. Dari modul ini akan diketahui tipe risiko yang terjadi, penyebab kejadian tersebut, lokasi (lini bisnis) tempat terjadinya risiko serta besarnya (*amount*) risiko yang terjadi atau kewajiban hukum yang terjadi serta *recovery*-nya (bila ada). Sarana ini sangat penting untuk memonitor profil risiko operasional secara teratur, serta data yang diperoleh merupakan input data utama bila bank akan mengaplikasikan pendekatan maju (*advance*) dalam pengukuran kecukupan modal minimumnya.
- *Key Risk Indicator*, merupakan serangkaian parameter yang ditetapkan untuk mengidentifikasi potensi kerugian risiko operasional yang utama/dominan sebelum peristiwa risiko operasional tersebut terjadi, dan perangkat tersebut akan memberikan *warning/alert* jika nilainya sudah di luar *range/threshold* yang ditetapkan sebelumnya.

Selain PERISKOP tersebut, BNI juga melakukan penyempurnaan *chart of account*, dengan menambahkan rekening Beban Risiko Operasional (BRO) serta *Recovery* BRO, yang digunakan untuk membukukan kerugian atau *recovery* yang disebabkan karena risiko operasional. Pembukuan pada rekening BRO juga akan berdampak kepada penilaian kinerja unit bersangkutan dan akan tergambar dalam *Performance Measurement System* (PMS) unit yang bersangkutan.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

47. RISIKO OPERASIONAL (lanjutan)

Terkait dengan kelangsungan usaha bila terjadi kondisi *disaster* (bencana), BNI juga sudah mempunyai kebijakan *Business Continuity Management* (BCM), yaitu suatu mekanisme formal yang merupakan kombinasi antara strategi, kebijakan, prosedur, dan organisasi yang dikembangkan untuk memastikan kelangsungan operasional dari fungsi-fungsi usaha yang kritikal pada tingkat layanan tertentu pada saat terjadi gangguan atau bencana. Kebijakan ini mencakup semua unit usaha yang ada di BNI.

48. NILAI WAJAR ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN

Berikut adalah perbandingan antara nilai tercatat, seperti dilaporkan dalam neraca konsolidasian, dan nilai wajar semua aset dan kewajiban keuangan konsolidasian.

Pada tabel di bawah ini, instrumen keuangan telah dikelompokkan sesuai dengan klasifikasinya perihal kategori aset dan kewajiban keuangan serta pendapatan dan beban, termasuk laba dan rugi atas nilai wajar (perubahan atas nilai wajar instrumen keuangan).

Nilai wajar yang diungkapkan di bawah ini adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal neraca konsolidasian dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal neraca konsolidasian.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan kewajiban keuangan:

	30 September 2010	
	Nilai tercatat	Nilai wajar
Aset		
Kas	5.325.305	5.325.305
Giro pada Bank Indonesia	8.551.458	8.551.458
Giro pada bank lain	2.721.670	2.721.670
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	22.908.421	22.908.421
Surat-surat berharga		
- Nilai wajar melalui laporan laba rugi	1.535.316	1.535.316
- Tersedia untuk dijual	5.493.206	5.493.206
- Dimiliki hingga jatuh tempo	10.300.606	10.300.606
Tagihan atas surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	4.015	4.015
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	527.067	527.067
Penyertaan saham	41.033	41.033
Tagihan akseptasi	5.858.054	5.858.054
Tagihan derivatif	1.365	1.365
Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan	126.073.612	126.073.612
Obligasi Pemerintah		
- Nilai wajar melalui laporan laba rugi	531.670	531.670
- Tersedia untuk dijual	25.557.614	25.557.614
- Dimiliki hingga jatuh tempo	6.947.948	8.743.147
Aset lain-lain	2.331.280	2.331.280
	224.709.640	226.504.839

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48. NILAI WAJAR ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN (lanjutan)

	30 September 2010	
	Nilai tercatat	Nilai wajar
Kewajiban		
Kewajiban segera	1.032.919	1.032.919
Simpanan nasabah		
- Giro	46.113.012	46.113.012
- Tabungan	57.723.377	57.723.377
- Deposito berjangka	79.935.422	79.935.422
Simpanan dari bank lain		
- Giro dan tabungan	679.837	679.837
- Deposito dan <i>deposits on call</i>	2.475.237	2.475.237
Kewajiban derivatif	233.117	233.117
Kewajiban akseptasi	1.719.040	1.719.040
Surat berharga yang diterbitkan	1.276.545	1.276.545
Pinjaman yang diterima	5.185.068	5.185.068
Kewajiban lain-lain	3.029.229	3.029.229
	199.402.803	199.402.803

- (i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat-surat berharga, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, wesel ekspor dan tagihan lainnya, penyertaan saham, tagihan akseptasi dan aset lain-lain

Nilai tercatat dari kas dan setara kas, giro dan penyertaan saham serta penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, wesel ekspor dan tagihan lainnya, tagihan akseptasi dan aset lain-lain ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk hutang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, wesel ekspor dan tagihan lainnya, penyertaan saham, tagihan akseptasi dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

- (ii) Pinjaman/pembiayaan/piutang yang diberikan

Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari pinjaman yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan pinjaman yang diberikan dengan jangka pendek dengan suku bunga tetap. Pinjaman yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari pinjaman yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

Nilai tercatat dari pinjaman yang diberikan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar, sedangkan nilai tercatat atas pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajarnya.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48. NILAI WAJAR ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN (lanjutan)

- (iii) Kewajiban segera, simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain, kewajiban akseptasi dan kewajiban lain-lain

Estimasi nilai wajar kewajiban segera, simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah terhutang ketika hutang tersebut dibayarkan.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap, kewajiban akseptasi dan kewajiban lain-lain yang tidak memiliki kuota di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga hutang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo dibawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari simpanan dengan suku bunga tetap, kewajiban akseptasi dan kewajiban lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

- (iv) Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah

Nilai wajar untuk surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuota perantara (broker)/pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuota efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa.

- (v) Surat-surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima

Nilai wajar agregat dihitung berdasarkan harga pasar kuota. Jika informasi ini tidak tersedia, model diskonto arus kas digunakan berdasarkan kurva *yield* terkini yang sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

- (vi) Tagihan derivatif dan kewajiban derivatif

Nilai wajar atas instrumen derivatif yang dinilai menggunakan teknik penilaian dengan menggunakan komponen yang dapat diamati di pasar terutama adalah *swap* suku bunga, *swap* mata uang dan kontrak pertukaran mata uang. Teknik penilaian yang paling banyak digunakan meliputi model penilaian *forward* dan *swap* yang menggunakan perhitungan nilai kini. Model tersebut menggabungkan berbagai komponen yang meliputi kualitas kredit dari *counterparty*, nilai *spot* dan kontrak berjangka dan kurva tingkat suku bunga.

49. PENERAPAN AWAL PSAK NO. 50 (REVISI 2006) DAN PSAK NO. 55 (REVISI 2006)

PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010 dan diterapkan secara prospektif.

Ketentuan Transisi atas Penerapan Awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dilaksanakan sesuai dengan Buletin Teknis No. 4 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, memberikan tambahan pedoman di bawah ini:

1. Perhitungan Suku Bunga Efektif

Perhitungan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang diperoleh sebelumnya dan masih bersaldo pada tanggal 1 Januari 2010 ditentukan berdasarkan arus kas masa depan yang akan diperoleh sejak penerapan awal PSAK No. 55 (Revisi 2006) sampai dengan jatuh tempo instrumen keuangan tersebut.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

49. PENERAPAN AWAL PSAK NO. 50 (REVISI 2006) DAN PSAK NO. 55 (REVISI 2006) (lanjutan)

2. Penghentian Pengakuan

Instrumen keuangan yang sudah dihentikan pengakuannya sebelum tanggal 1 Januari 2010 tidak dievaluasi kembali berdasarkan ketentuan penghentian pengakuan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2006).

3. Instrumen Keuangan Majemuk

Instrumen keuangan majemuk yang ada pada tanggal 1 Januari 2010 harus dipisahkan antara komponen kewajiban dan komponen ekuitas berdasarkan paragraf 11 PSAK No. 50 (Revisi 2006). Pemisahan tersebut ditentukan berdasarkan sifat, kondisi, persyaratan, dan hal lainnya dari instrumen keuangan tersebut pada tanggal 1 Januari 2010.

4. Klasifikasi Instrumen Keuangan sebagai Kewajiban atau Ekuitas

Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas sesuai dengan paragraf 11 PSAK No. 50 (Revisi 2006).

5. Penurunan Nilai Instrumen Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank menentukan penurunan nilai instrumen keuangan berdasarkan kondisi pada saat itu. Selisih antara penurunan nilai ini dengan penurunan nilai yang ditentukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku sebelumnya diakui langsung ke saldo laba pada awal tanggal 1 Januari 2010.

Untuk penerapan standar baru ini, Bank telah melakukan identifikasi atas penyesuaian transisi sesuai dengan standar akuntansi tersebut (PSAK No. 50 dan PSAK No. 55 (Revisi 2006)), PAPI (Revisi 2008) dan Buletin Teknis No. 4 mengenai ketentuan transisi atas penerapan standar-standar tersebut. Penyesuaian transisi terutama berasal dari perhitungan ulang atas penyisihan kerugian penurunan nilai. Selisih antara penyisihan kerugian penurunan nilai yang dihitung dengan standar yang baru dan standar sebelumnya disesuaikan ke saldo laba pada tanggal 1 Januari 2010. Dasar penghitungan ulang atas kerugian penurunan nilai dijelaskan pada Catatan 2/. Penyesuaian transisi tersebut adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2010		
	Sebelum penyesuaian	Efek dari penyesuaian transisi penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006)	Setelah penyesuaian
Aset - bersih setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai			
Giro pada bank lain	6.858.342	69.276	6.927.618
Penempatan pada bank lain	29.622.162	229.550	29.851.712
Surat-surat berharga	19.197.927	68.568	19.266.495
Tagihan derivatif	7.301	92	7.393
Pinjaman yang diberikan	113.922.685	(315.125)	113.607.560
Ekuitas			
Saldo Laba	4.662.449	52.361	4.714.810

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

50. AKTIVITAS FIDUCIARY

BNI menyediakan jasa kustodi, *trustee*, pengelolaan investasi dan reksadana kepada pihak-pihak ketiga. Aset yang terdapat dalam aktivitas *fiduciary* tidak termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian ini. Jumlah komisi yang diterima dari pemberian jasa ini adalah masing-masing sebesar Rp15.084 (tidak diaudit), Rp15.573 (tidak diaudit), Rp33.804 (tidak diaudit), Rp20.248 (tidak diaudit) dan Rp18.867 (tidak diaudit) untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

51. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 (untuk BNI saja) yang dihitung oleh BNI adalah:

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
BNI - tanpa memperhitungkan risiko pasar					
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko	131.541.452	120.110.002	138.876.668	121.503.271	97.435.826
Jumlah Modal	17.891.746	18.807.997	19.301.849	17.612.014	17.195.929
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	13,60%	15,66%	13,90%	14,50%	17,65%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	8%	8%	8%	8%	8%
BNI - dengan memperhitungkan risiko pasar (tidak diaudit)					
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko	133.401.850	121.229.943	140.213.945	129.622.280	109.268.798
Jumlah Modal	17.891.746	18.807.997	19.301.849	17.612.014	17.195.929
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	13,41%	15,51%	13,77%	13,59%	15,74%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	8%	8%	8%	8%	8%
BNI - dengan memperhitungkan risiko operasional (tidak diaudit), mulai berlaku sejak 1 Januari 2010					
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko	148.853.974	-	-	-	-
Jumlah Modal	17.891.746	-	-	-	-
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	12,02%	-	-	-	-
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	8%	-	-	-	-

52. RENCANA BARANG MODAL

BNI memiliki komitmen barang modal terkait dengan pembangunan gedung kantor cabang serta pengadaan perlengkapan komputer dan ATM masing-masing sebesar Rp130.364 (tidak diaudit), Rp165.175 (tidak diaudit), Rp105.731 (tidak diaudit), Rp113.416 (tidak diaudit) dan Rp19.326 (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

53. KREDIT KELOLAAN

BNI mengelola dana yang langsung dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (didanai oleh kreditur luar negeri) yang ditujukan kepada penerima pinjaman untuk keperluan pembiayaan proyek tertentu. Penerima pinjaman ini telah disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pembayaran yang diterima oleh BNI dari penerima pinjaman dikembalikan lagi ke Pemerintah. BNI tidak menanggung risiko atas transaksi-transaksi tersebut. Pinjaman tersebut bukan merupakan aset BNI, dan dana yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia bukan merupakan kewajiban BNI, transaksi tersebut tidak dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian BNI. BNI memperoleh pendapatan atas pengelolaan pinjaman tersebut.

Jumlah kredit yang dikelola oleh BNI atas nama Pemerintah tersebut pada tanggal 30 September 2010 dan 2009, serta 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	30 September 2010	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	31 Desember		
			2009	2008	2007
Sektor					
Perindustrian	2.519.394	1.498.380	1.438.547	1.679.378	1.597.887
Listrik, gas dan air	1.845.828	2.860.121	2.730.238	3.141.810	2.465.108
Konstruksi	732.497	794.018	771.496	893.021	778.144
Pengangkutan, perdagangan dan komunikasi	273.687	285.950	277.806	298.009	317.104
Pertanian	53.713	56.589	54.722	64.441	126.413
Perdagangan, restoran dan hotel	44.037	41.867	42.589	48.971	58.142
Jasa dunia usaha	3.054	4.147	4.923	4.650	5.202
Jasa pelayanan sosial	6.001	3.146	3.195	3.282	3.540
Pertambangan	19	-	-	27	71.359
Lain-lain	50.315	54.546	52.416	68.765	50.686
Jumlah	5.528.545	5.598.764	5.375.932	6.202.354	5.473.585

54. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG DIREVISI

Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan relevan untuk Bank, yang belum berlaku efektif pada tanggal penyelesaian laporan keuangan:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011:

- PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan". Menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*) agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.
- PSAK No. 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas". Memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (*financing*) selama suatu periode.
- PSAK No. 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri". Akan diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk dan dalam akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

54. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG DIREVISI (lanjutan)

- d. PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.
- e. PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak yang berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk, dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. Penerapan dini diperkenankan.
- f. PSAK No. 19 (Revisi 2010), "Aset Tidak Berwujud". Menentukan perlakuan akuntansi bagi aset tidak berwujud yang tidak diatur secara khusus dalam PSAK lain. Mensyaratkan untuk mengakui aset tidak berwujud jika, dan hanya jika, kriteria tertentu dipenuhi, dan juga mengatur cara mengukur jumlah tercatat dari aset tidak berwujud dan pengungkapan yang berhubungan.
- g. PSAK No. 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis". Diterapkan untuk transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi kombinasi bisnis guna meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya tentang kombinasi bisnis dan dampaknya.
- h. PSAK No. 23 (Revisi 2010), "Pendapatan". Mengidentifikasi keadaan saat kriteria mengenai pengakuan pendapatan akan terpenuhi, sehingga pendapatan akan diakui. Mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu. Memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan.
- i. PSAK No. 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset". Menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkan dan jika aset tersebut terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diakui.
- j. PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut.
- k. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 14, "Aset Tidak Berwujud Berwujud - Biaya Situs". Situs web yang muncul dari pengembangan dan digunakan untuk akses internal maupun eksternal merupakan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal, dan setiap pengeluaran internal atas pengembangan dan pengoperasian situs web akan dicatat sesuai dengan PSAK No. 19 (Revisi 2010).
- l. ISAK No. 10, "Program Loyalitas Pelanggan". Menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi oleh entitas yang memberikan poin penghargaan kepada pelanggannya.

Bank sedang mengevaluasi dampak dari Standar yang direvisi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasiannya.

Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) yang diterbitkan oleh DSAK efektif mulai 1 Januari 2010 yang relevan untuk Bank adalah sebagai berikut:

- a. PPSAK No. 4, "Pencabutan PSAK No. 31 (revisi 2000): Akuntansi Perbankan, PSAK No. 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK No. 49: Akuntansi Reksa Dana". PPSAK ini berlaku untuk semua entitas yang menerapkan PSAK No. 31 (revisi 2000), PSAK No. 42, dan PSAK No. 49.
- b. PPSAK No. 5, "Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing".

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

55. REKLASIFIKASI LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Efektif tanggal 1 Januari 2010, komponen kas dan setara kas telah diubah seperti dijelaskan dalam Catatan 2a. Oleh karenanya, laporan arus kas konsolidasian komparatif untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 telah direklasifikasi:

	30 September 2009 (Tidak Diaudit)	
	Sebelum reklasifikasi	Setelah reklasifikasi
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	3.124.983	(10.388.447)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(3.453.773)	(410.719)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(1.247.660)	(1.247.660)
Penurunan bersih kas dan setara kas	(1.576.450)	(12.046.826)
Kas dan setara kas pada awal periode	15.499.564	47.169.433
Kas dan setara kas pada akhir periode	13.923.114	35.122.607
	31 Desember 2009	
	Sebelum reklasifikasi	Setelah reklasifikasi
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	1.343.479	4.501.826
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	6.745.637	13.176.726
Kas bersih digunakan untuk aktivitas Pendanaan	(3.226.702)	(3.226.702)
Kenaikan bersih kas dan setara kas	4.862.414	14.451.850
Kas dan setara kas pada awal tahun	15.499.564	47.169.433
Kas dan setara kas pada akhir tahun	20.361.978	61.621.283
	31 Desember 2008	
	Sebelum reklasifikasi	Setelah reklasifikasi
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(12.340.073)	(579.603)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	4.936.462	(1.583.680)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	889.150	889.150
Penurunan bersih kas dan setara kas	(6.514.461)	(1.274.133)
Kas dan setara kas pada awal tahun	22.014.025	48.443.566
Kas dan setara kas pada akhir tahun	15.499.564	47.169.433

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
serta Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2009 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

55. REKLASIFIKASI LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)

	31 Desember 2007	
	Sebelum reklasifikasi	Setelah reklasifikasi
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	10.187.279	(7.839.790)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(10.135.662)	(1.915.433)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	3.680.888	3.680.888
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	3.732.505	(6.074.335)
Kas dan setara kas pada awal tahun	18.281.520	54.517.901
Kas dan setara kas pada akhir tahun	22.014.025	48.443.566

56. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 25 Oktober 2010, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Awal kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, melalui surat No. DIR/403 tanggal 25 Oktober 2010.

57. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

BNI dan anak perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan laporan auditor independen No. RPC-335/PSS/2010 tertanggal 11 Oktober 2010. Sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan untuk memenuhi persyaratan Bapepam-LK, laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali dengan beberapa tambahan pengungkapan pada Catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

58. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen BNI bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan konsolidasian yang disetujui oleh manajemen BNI pada 12 November 2010.

XVI. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

1. Keterangan Tentang Pembeli Siaga

Sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PUT III BNI No.29 tanggal 23 Oktober 2010 juncto Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PUT III BNI No.15 tanggal 15 November 2010 juncto Akta Perubahan II Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PUT III BNI No.35 tanggal 23 November 2010 yang ketiganya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang bertindak sebagai Pembeli Siaga adalah:

PT Bahana Securities
Graha Niaga Lt.19
Jl. Jend Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telp. (021) 2505081
Faks. (021) 5225869

PT Bahana Securities bertindak sebagai pembeli siaga yang bukan merupakan porsi Negara Republik Indonesia sebanyak-banyaknya sebesar 902.508.430 (sembilan ratus dua juta lima ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh) Saham Biasa Atas Nama Seri C dengan memperhatikan bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh publik setelah pelaksanaan PUT III sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan saham yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebesar 60% (enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT III selesai dilaksanakan.

PT Bahana Securities adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan akta notaries Soebagio Ronoatmojo, S.H. No.58 tanggal 26 Juli 1989 di Jakarta. Akta pendirian telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No.C-2-8857.HT.01.01. Th.89 tanggal 19 September 1989 serta diumumkan dalam Berita Negara No.245 tanggal 21 Januari 1992. Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris Hadijah, S.H No.15 tanggal 15 Juni 2009. Perubahan terakhir tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No.AHU-34961.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 24 Juli 2009.

Kegiatan utama PT Bahana Securities adalah sebagai perusahaan sekuritas yang dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek (baik untuk diri sendiri maupun sebagai kuasa atau komisioner) serta kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Bahana Securities memiliki hubungan afiliasi dengan BNI melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

Berikut ini adalah pengurus PT Bahana Securities:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Heri Sunaryadi
Komisaris : Hari Gursida

Direksi

Direktur Utama : Eko Yuliantoro
Direktur : Andi Irawan Sidharta
Direktur : Sunu Widyatmoko
Direktur : Benny Bambang Soebagjo
Direktur : Natalia Surjadiputra
Direktur : Wiwit Gusnawan

Struktur permodalan PT Bahana Securities pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	500.000	500.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	198.000	198.000.000.000	99,00
Koperasi Karyawan Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	2.000	2.000.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	200.000.000.000	100,00
C. Jumlah Saham Dalam Portepel	300.000	300.000.000.000	

2. Pokok-pokok Perjanjian Pembelian Sisa Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

- a. BNI akan melakukan Penawaran Umum Terbatas III dengan menerbitkan HMETD kepada Para Pemegang Saham BNI dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.374.716.060 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu enam puluh) Saham Biasa Atas Nama Seri C baru dengan nilai nominal Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham EMITEN yang berhak atas HMETD pada tanggal yang ditentukan dalam Prospektus, di mana setiap pemegang 500.000 (lima ratus ribu) saham lama (Saham Seri C) memiliki 110.473 (seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga) HMETD, dan setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru Seri C (sebagaimana yang didefinisikan di bawah ini) dalam Perseroan dengan Harga Pelaksanaan Rp3.100,00 (tiga ribu seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.
- b. untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas III, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah mendapat surat-surat sebagai berikut:
 - Menteri Keuangan berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-292/MK.06/2010 tanggal 24 Juni 2010
 - Komite Privatisasi, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Nomor KEP-35/M.EKON/07/2010 tanggal 28 Juli 2010
 - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW.01/7425/DP/RR/1/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010
 - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW.01/8149/DP/RR/1/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010; dan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk tanggal 20 November 2010
- c. Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi masyarakat, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham masyarakat lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Disamping itu, setelah alokasi pemesanan saham tambahan, bilamana masih terdapat sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham dalam PUT III ini, maka PT Bahana Securities bertindak sebagai Pembeli Siaga yang bukan merupakan porsi Negara Republik Indonesia wajib -membeli sebanyak-banyaknya sebesar 902.508.430 (sembilan ratus dua juta lima ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh) Saham Biasa Atas Nama Seri C dengan memperhatikan bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat setelah pelaksanaan PUT III sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan saham yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebesar 60% (enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT III selesai dilaksanakan.
- d. Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Penjual tidak akan melaksanakan seluruh HMETD dan akan menjual seluruh HMETD tersebut kepada Pembeli Siaga yang bertindak sebagai pembeli HMETD yang akan dijual oleh Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tanggal 21 Oktober 2010 Nomor: S-643/MBU/2010, Hal Right Issue BNI.

- e. Pembeli Siaga harus membayar kepada BNI seluruh harga dari Sisa Saham pada Harga Pelaksanaan kedalam rekening BNI pada 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dan kepada Pemegang Saham Penjual seluruh harga atas HMETD yang merupakan hak Pemegang Saham Penjual yang tercantum dalam perjanjian penjualan HMETD Pemegang Saham Penjual.
- f. Harga Pelaksanaan Rp3.100,- (tiga ribu seratus Rupiah) untuk setiap Saham Baru;
- g. Sebelum Tanggal Efektif antara lain :
 - BNI dan Pembeli Siaga telah menyepakati Harga Pelaksanaan Pembeli Siaga dan Pemegang Saham Penjual telah menyepakati harga jual HMETD Pemegang Saham Penjual.
 - Pemegang Saham Penjual telah menandatangani perjanjian penjualan HMETD Pemegang Saham Penjual serta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pembeli Siaga.
- h. Perjanjian akan berakhir dengan sendirinya apabila :
 - Seluruh kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian ini telah dipenuhi sebagaimana mestinya; atau
 - Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dan/atau seluruh kewajiban bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini tidak diperoleh dan/atau tidak dipenuhi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal laporan keuangan auditan BNI yang terakhir dipergunakan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III.
- i. BNI berkewajiban pada Tanggal Penjatahan selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, BNI melalui Biro Administrasi Efek, akan memberitahukan secara tertulis kepada Pembeli Siaga mengenai jumlah Sisa Saham yang wajib dibeli Pembeli Siaga serta menerbitkan dan mendistribusikan saham ke rekening Pembeli Siaga; atau memberi konfirmasi kepada Pembeli Siaga bahwa tidak ada Sisa Saham yang harus dibeli oleh Pembeli Siaga.

XVII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

BNI telah menunjuk PT Datindo Entrycom untuk mengelola Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan PUT III BNI sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan PUT III BNI No. 28 tanggal 23 Oktober 2010 juncto Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan PUT III BNI No.34 tanggal 23 November 2010, yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BNI pada tanggal **8 Desember 2010** pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 500.000 (lima ratus ribu) saham lama mempunyai 110.473 (seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp3.100,- (tiga ribu seratus Rupiah). Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik BNI dan harus dijual oleh BNI serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening BNI.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian Efek adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom Endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau Daftar Pemegang HMETD yang dikeluarkan KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan atau Lembaga dan atau Badan Hukum baik Indonesia/ Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya,

2. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, HMETD akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal **9 Desember 2010**. Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Pelaksana Pengelola Administrasi Efek (Biro Administrasi Efek atau BAE) kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI, BNI akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham yang dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya setiap hari kerja dan jam kerja sejak tanggal **10 Desember hingga 16 Desember 2010** di kantor BAE PT Datindo Entrycom, dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal **10 Desember sampai dengan 16 Desember 2010**.

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi Pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa /Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya Instruksi Pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa/Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub-rekening Pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;

- b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk KSEI tersebut ke Rekening Bank Khusus pada hari yang sama
 3. 1 (Satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima Instruksi Pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar rincian Instruksi Pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data Pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) Pemegang HMETD yang melakukan Pelaksanaan HMETD;
 - b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank khusus;
 - c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI
 4. Segera setelah BAE menerima dari KSEI dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari Instruksi Pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam Rekening Bank Khusus berdasarkan data pada Rekening Bank Khusus serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD.
 5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) di Rekening Bank Khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD tersebut kepada BNI dan BAE.
- B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif
1. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE
 2. Pemegang HMETD yang berada diluar Penitipan Kolektif yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam Rekening Bank Khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap
 - b. Asli Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD
 - c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang HMETD (lembaga / badan hukum) yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD
 - d. Asli Surat Kuasa, jika Pelaksanaan HMETD dilakukan oleh Pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas)
 - e. Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa / Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan Pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli formulir penyeteroran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap

3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk Pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.
4. Selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan HMETD diterima oleh Biro Administrasi Efek dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) ke dalam Rekening Bank Khusus, Biro Administrasi Efek akan menerbitkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi Kolom Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan yang telah disediakan.

Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dan pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE BNI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat / fisik Surat Kolektif Saham dapat mengajukan sendiri permohonannya kepada BAE BNI.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE BNI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

1. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar
2. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa
3. Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum)
4. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening BNI dari bank tempat menyetorkan pembayaran
5. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan BAE BNI

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST)
2. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE BNI
3. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening BNI dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk warkat/fisik Surat Kolektif Saham harus mengajukan permohonan kepada BAE BNI dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

1. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar
2. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susuna Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum)

3. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa
4. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening BNI dari bank tempat menyetorkan pembayaran

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank BNI selambat-lambatnya pada tanggal **20 Desember 2010**, dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal **21 Desember 2010** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini, maka seluruh pesanan atas Saham Tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.
- c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham setelah pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III, dengan komposisi Pemerintah RI sebesar 60% dan masyarakat sebesar 40%.

Manajer penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada BAPEPAM dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan BAPEPAM No.VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan BAPEPAM No.IX.A.7 Tentang tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE BNI harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening BNI pada:

**Rekening atas nama:
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Jakarta Pusat
No. Rekening: 194-6535354
Atas nama Penampungan Dana Rights Issue 2010**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening BNI tersebut di atas.

Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening BNI paling lambat tanggal **20 Desember 2010**.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham Penawaran Umum Terbatas III ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

BNI melalui BAE yang ditunjuk BNI menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pesanan yang tidak dipenuhi.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) melalui C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

BNI berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan penjatahan atas pesanan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, pengembalian uang dilakukan oleh BNI selambat-lambatnya tanggal **23 Desember 2010**. Pengembalian uang yang dilakukan BNI sampai dengan tanggal **23 Desember 2010** tidak akan disertai bunga. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian, uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan sejak tanggal **24 Desember 2010** dengan memperhatikan tingkat jasa giro yang berlaku pada BNI pada tanggal pengembalian uang pemesanan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan cek atau pemindahbukuan ke rekening Pemesan.

Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di:

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo
JI Jendral Sudirman Kav 34
Jakarta
Telp.: 5709009
Fax.: 5709026

dengan menunjukkan KTP asli atau Tanda Bukti Diri asli lainnya (bagi perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar dan surat kuasa (bagi Badan Hukum/Lembaga) serta menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian saham asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau Tanda Bukti Diri. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening BNI.

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE BNI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh BNI.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Pengambilan dilakukan Badan Administrasi Efek yang ditunjuk BNI dengan menunjukkan/ menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau
- b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Hukum) dan susunan Direksi/Komisaris atau Pengurus yang masih berlaku
- c. Asli surat kuasa sah (bagi Lembaga/Badan Hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa
- d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan masih terdapat sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham dalam PUT III ini, PT Bahana Securities bertindak sebagai pembeli siaga yang bukan merupakan porsi Negara Republik Indonesia sebanyak-banyaknya sebesar 902.508.430 (sembilan ratus dua juta lima ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh) Saham Biasa Atas Nama Seri C dengan memperhatikan bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh publik setelah pelaksanaan PUT III sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan saham yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebesar 60% (enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT III selesai dilaksanakan.

12. Pendaftaran Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Pendaftaran dilakukan sendiri atau dikuasakan dengan dilengkapi dokumen-dokumen tersebut di bawah ini melalui:

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo
JI Jendral Sudirman Kav 34
Jakarta
Telp.: 5709009
Fax.: 5709026

dengan membawa:

- a. Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap
- b. Bukti Pembayaran asli dari Bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank
- c. Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi Badan Hukum/Lembaga)
- d. Surat Kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi KTP yang memberi dan diberi kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing, disamping mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan)

Waktu Pendaftaran:
Tanggal : 10-16 Desember 2010
Pukul : 09.00 – 16.00 WIB

- e. FPPS tambahan asli yang diisi lengkap dan ditandatangani (jika memesan saham tambahan).

XVIII. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

Efek yang ditawarkan dalam PUT III ini diterbitkan berdasarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT III ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Pihak yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 500.000 (lima ratus ribu) saham lama mempunyai 110.473 (seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan antara Rp2.300,- (dua ribu tiga ratus Rupiah) sampai dengan Rp3.700,- (tiga ribu tujuh ratus Rupiah).

2. Pemegang Sertifikat HMETD yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **8 Desember 2010** sampai dengan pukul 16.00 WIB yang berhak menerima HMETD yang Sertifikat Bukti HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD,
- b. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- c. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD yaitu mulai tanggal **10 Desember 2010 sampai dengan 16 Desember 2010**.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa Efek Indonesia, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keraguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat investasi, manajer investasi atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atas Rekening Efek atas nama Anggota Bursa atau Bank Kustodian di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Edaran PT Bursa Efek Jakarta No.SE-006/BEJ/1998, satu-satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 500 (lima ratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.30 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta *Automated Trading System* ("JATS") kecuali hari Jumat dari pukul 09.30 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+ 0) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.

4. Bentuk dari Sertifikat Bukti HMETD

Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah melakukan penitipan sahamnya secara elektronik melalui KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.
- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara elektronik melalui KSEI, maka HMETD yang akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan tambahan saham, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

5. Nilai HMETD

Nilai Bukti HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang Bukti HMETD yang sah akan berbeda-beda dari Pemegang Bukti HMETD satu dengan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai Bukti HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya, Penjelasan di bawah ini diharapkan akan memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai Bukti HMETD:

Diasumsikan harga pasar satu saham	= Rpa	
Harga saham PUT III	= Rpb	
Jumlah Saham yang beredar sebelum PUT III	= A	
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PUT III	= B	
		$(Rpa \times A) + (Rpb \times B)$
Harga Teoritis Saham Baru ex-HMETD	=	$\frac{\hspace{10em}}{(A + B)}$
		= RpX
Harga Bukti HMETD per saham	=	RpX – Rpb

6. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli Saham baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan konversi saham digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak berlaku dalam fotokopi. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

7. Pecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atau pecahan efek tersebut wajib dijual oleh perusahaan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening perusahaan.

8. Lain-lain

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai HMETD, investor dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan untuk PUT III ini.

XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham BNI yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BNI tanggal 8 Desember 2010 pukul 16.00 WIB di:

**PT Datindo Entrycom
Puri Datindo
JI Jendral Sudirman Kav 34
Jakarta
Telp.: 5709009
Fax.: 5709026**

Apabila sampai dengan tanggal **16 Desember 2010** Pemegang Saham BNI yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal **8 Desember 2010** pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD dan tidak menghubungi BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab Biro Administrasi Efek ataupun BNI, melainkan merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham yang bersangkutan.

XX. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III ini, para Pemegang saham dipersilakan menghubungi:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BNI
Jl. Jenderal Sudirman Kav.1
Jakarta 10220, Indonesia
Telepon: (021) 251 1946, 572 9278, 572 9586, 572 9590 dan 572 9633
Faksimili: (021) 572 8295

Direksi Perseroan akan mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 November 2010
Waktu : 14.00 – selesai
Tempat : Ruang Serba Guna
Gedung BNI Lantai 25
Jakarta 10220

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PUT III dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan